Chega!

Volume V:

Lampiran

TERBITAN CAVR LAINNYA:

Buku-buku Audiensi Publik:

Penahanan politik
Perempuan dan konflik
Pemindahan paksa dan kelaparan
Pembantaian
Konflik politik internal 1974 – 1976
Penentuan nasib sendiri dan masyarakat internasional
Anak dan konflik

Buku-buku lain:

Rona Ami-Nia Lian (Dengarkan suara kami)
Penjara Comarca Balide: Sebuah 'Gedung Sakral'
Laporan Eksekutif Chega!

Video dan radio dokumenter:

Dalan ba Dame (Jalan Menuju Perdamaian)

http://www.cavr-timorleste.org

info@cavr-timorleste.org

Chega!

Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

Volume V:

Lampiran

JAKARTA
KPG

Chega!

Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

Volume V: Lampiran

KPG: 950 04 10 0342

Cetakan pertama, Agustus 2010

Penyusun:
Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

Foto sampul:
Poriaman Sitanggang

Pembaca akhir:
Rani Elsanti

Desain dan tata letak:
M. Roniyadi

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste
Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste - Volume V
Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2010
xii + 644 hlm; 150x230 mm
ISBN-13: 978-979-91-0248-5

Penerbitan buku ini didanai oleh Pemerintah Irlandia dan Jerman

Dicetak oleh PT Gramedia, Jakarta.
Isi di luar tanggungjawab percetakan.

Daftar isi

2929 | Lampiran 1: Timor-Leste 1999: Kejahatan terhadap kemanusiaan — Laporan Pesanan Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR)

2929 | Prakata

2933 | Ringkasan Eksekutif
- 2934 | Metode dan mandat
- 2935 | Kerangka dan kesimpulan

2937 | Konteks sejarah dan politik
- 2937 | Invasi dan pendudukan Indonesia
- 2940 | Resistansi
- 2942 | Tanggapan internasional
- 2945 | Terobosan di Indonesia
- 2946 | UNAMET dan Jajak Pendapat

2950 | Indonesia: kekuasaan dan strategi
- 2951 | Tentara Nasional Indonesia
- 2956 | Milisi
- 2958 | Kepolisian Indonesia
- 2959 | Pemerintah sipil dan kampanye sosialisasi
- 2962 | Kelompok-kelompok politik pro-otonomi
- 2963 | Badan-badan khusus bentukan pemerintah

2965 | Pelanggaran, korban, dan pelaku
- 2966 | Jenis-jenis pelanggaran
- 2971 | Kronologi kekerasan: Tiga periode
- 2975 | Korban
- 2981 | Pelaku

2984 | Pola dan variasi
- 2984 | Variasi sementara – Menutup Keran
- 2990 | Ketakbertindakan dan keterlibatan polisi
- 2994 | *Modus Operandi* Milisi
- 2997 | Variasi geografis

3002 | Enam Dokumen Kunci
- 3002 | Operasi Pembersihan
- 3004 | Dokumen Tavares
- 3006 | Dokumen Garnadi

3008 | Telegram Brigade Penyelamat Integrasi Timor Timur
3009 | Operasi Cabut

3014 | Milisi: Sejarah, pembentukan, dan pengakuan hukum
3014 | Pola Historis
3020 | Pembentukan milisi
3026 | Pengakuan politik dan hukum

3032 | Milisi: Perekrutan, pelatihan, operasi, dan senjata
3032 | Perekrutan dan keanggotaan
3035 | Pelatihan
3038 | Operasi
3041 | Senjata: Bukti kesaksian
3046 | Senjata: Bukti dokumenter

3050 | Milisi: Pendanaan dan dukungan material
3050 | 'Sosialisasi' dan pendanaan milisi
3054 | Sumber pendanaan pemerintah
3059 | Pendanaan dan dukungan material TNI
3063 | FPDK sebagai saluran pendanaan
3065 | Anggaran milisi

3068 | Ringkasan kabupaten
3068 | Aileu (Kodim 1632)
3071 | Ainaro (Kodim 1633)
3075 | Baucau (Kodim 1628)
3079 | Bobonaro (Kodim 1636)
3086 | Covalima (Kodim 1635)
3090 | Dili (Kodim 1627)
3097 | Ermera (Kodim 1637)
3102 | Lautém (Kodim 1629)
3107 | Liquiçá (Kodim 1638)
3114 | Manatuto (Kodim 1631)
3119 | Manufahi (Kodim 1634)
3123 | Oecussi (Kodim 1639)
3125 | Viqueque (Kodim 1630)

3129 | Studi kasus: Insiden utama Hak Asasi Manusia
3130 | Pembantaian di Gereja Liquiçá (6 April 1999)
3135 | Pembunuhan di Cailaco (12 April 1999)
3139 | Pembantaian di rumah Carrascalão (17 April 1999)
3145 | Pembunuhan dua mahasiswa di Hera (20 Mei 1999)
3146 | Penahanan sewenang-wenang dan pemerkosaan di Lolotoe (Mei-Juni 1999)
3149 | Penyerangan terhadap UNAMET Maliana (29 Juni 1999)

3152 | Penyerangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan (4 Juli 1999).
3157 | Pembunuhan Staf UNAMET di Boboe Leten (30 Agustus 1999)
3161 | Pemindahan paksa dan pembunuhan pengungsi di Dili (5-6 September 1999)
3165 | Pembantaian di Gereja Suai (6 September 1999)
3170 | Pembantaian di Kantor Polisi Maliana (8 September 1999)
3175 | Pembantaian di Passabe dan Maquelab (September-Oktober 1999)
3178 | Pemerkosaan dan pembunuhan Ana Lemos (13 September 1999)
3182 | Amukan Batalion 745 (20-21 September 1999)
3187 | Pembunuhan rohaniwan Los Palos (25 September 1999)

3190 | Tanggungjawab individual dan komando
3191 | Tanggungjawab pidana individual
3195 | Tanggungjawab komando

3207 | Tanggungjawab internasional
3208 | Tanggungjawab internasional
3214 | Tanggungjawab PBB: Masalah keadilan

3246 | Catatan tentang sumber

3247 | Catatan tentang penulis

3249 | Lampiran 2: Data dan metode statistik

3255 | Pendahuluan
3255 | Relevansi dari analisis data empiris terhadap mandat Komisi

3257 | Sumber-sumber data
3257 | Human Rights Violations Database (HRVD)
3265 | Retrospective Mortality Survei (RMS)
3269 | Graveyard Census Database (GCD)

3270 | Gambaran metodologis tentang teknik-teknik penyuntingan data, pembersihan, dan normalisasi nama
3270 | Pembersihan dan penyuntingan basis data
3271 | Penyuntingan dan pembersihan tanggal
3271 | Penyuntingan dan pembersihan usia
3272 | Penyuntingan dan pembersihan kode-kode pelanggaran dan hubungan
3272 | Penyuntingan dan pembersihan kode lokasi geografis
3272 | Deduplikasi pemakaman dan makam GCD
3273 | Proses-proses pembersihan nama-nama

3277 | Konversi data

3278 | Tinjauan pertalian catatan (*record linkage*)
- 3279 | Aturan-aturan pencocokan
- 3282 | Pencocokan intra-sistem
- 3286 | Pencocokan Antarsistem

3290 | Pengolahan data pelanggaran yang dilaporkan melibatkan kelompok-kelompok korban tak dikenal

3291 | Teknik-teknik perkiraan statistik yang digunakan dalam analisis pelanggaran fatal dan pemindahan
- 3291 | Kalkulasi beban RMS
- 3293 | Penentuan tanggal RMS untuk analisa pemindahan
- 3293 | Penyesuaian beban RMS untuk perkiraan angka kematian
- 3295 | Analisis sensitivitas terhadap asumsi-asumsi dalam pengukuran kembali angka kematian (*mortality re-weighting*)
- 3296 | *Multiple System Estimation* (MSE): motivasi dan teori
- 3299 | Mengalokasikan GCD menurut jenis kematian
- 3300 | Analisis sensitivitas hilangnya pengetahuan sosial: penyesuaian-penyesuaian untuk perkiraan yang terlalu rendah

3311 | Lampiran 3: Ringkas dakwaan

3312 | Kesimpulan tuduhan/dakwaan menurut distrik
- 3312 | Aileu
- 3313 | Ainaro
- 3315 | Baucau
- 3316 | Bobonaro
- 3326 | Covalima
- 3334 | Dili
- 3340 | Ermera
- 3342 | Lautém
- 3345 | Liquiçá
- 3347 | Manatuto
- 3348 | Manufahi
- 3350 | Oecussi
- 3355 | Viqueque
- 3356 | Timor Barat

3356 | Dakwaan nasional

Daftar tabel:

3222 | Perwira dan pejabat senior yang diduga mengemban tanggung jawab individual dan komando untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor-Leste, 1999

3225 | Perwira dan pejabat penting pada 1999 (berdasarkan urutan abjad)

3228 | Kelompok milisi pro-Indonesia di Timor-Leste, 1999

3081 | Kelompok milisi pro-Indonesia di Kabupaten Bobonaro

3229 | PBB dan Timor-Leste

3260 | Tabel pernyataan yang diberikan, relatif terhadap jenis kelamin pemberi pernyataan

3264 | Matriks pencatatan perhitungan untuk Basis Data Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HRVD)

3268 | Daftar *aldeia* yang tidak dihitung dalam pengambilan sampel

3274 | Contoh penulisan nama Portugis orang Timor-Leste

3274 | Contoh penulisan nama asli orang Timor-Leste

3278 | Perhitungan total yang tercatat oleh basis data sebelum dan sesudah pembersihan

3288 | Matriks hasil pencocokan antarsistem

3289 | Tabel total pencatatan perhitungan pencocokan antarsistem dan persentase pelanggaran fatal menurut pasangan set data

3291 | Tingkat duplikasi di antara korban-kelompok

3299 | Tabel perkiraan proporsi kematian, menurut periode dan cara kematian

Daftar grafik:

3258 | Jumlah pernyataan yang diberikan, berdasarkan distrik

3259 | Jumlah pernyataan, berdasarkan usia dan jenis kelamin pemberi pernyataan

3302 | Perkiraan kasar tingkat kematian bagi Timor-Leste

3302 | Perkiraan total kematian akibat kelaparan dan penyakit di Timor-Leste (berdasarkan MSE)

3303 | Perkiraan total kematian akibat kelaparan dan penyakit di Timor-Leste (berdasarkan RMS)

Pulau Alor
Pulau Ataúro
Selat Wetar
Pulau Kisar
Selat Ombar
Dili
40km ke Daerah Kantung Oecussi
DILI
Liquiça
LIQUIÇA
Manatuto
MANATUTO
Baucau
BAUCAU
LAUTEM
Los Palos
Pulau Jaco
Gleno
Aileu
AILEU
ERMERA
VIQUEQUE
Viqueque
BOBONARO
MANUFAHI
Same
Maliana
Ainaro
AINARO
TIMOR BARAT
COVA LIMA
Suai
Laut Timor
Timor-Leste
0
30km
UTARA
Daerah Kantung Oecussi
Pante Makasar
OECUSSI
TIMOR BARAT
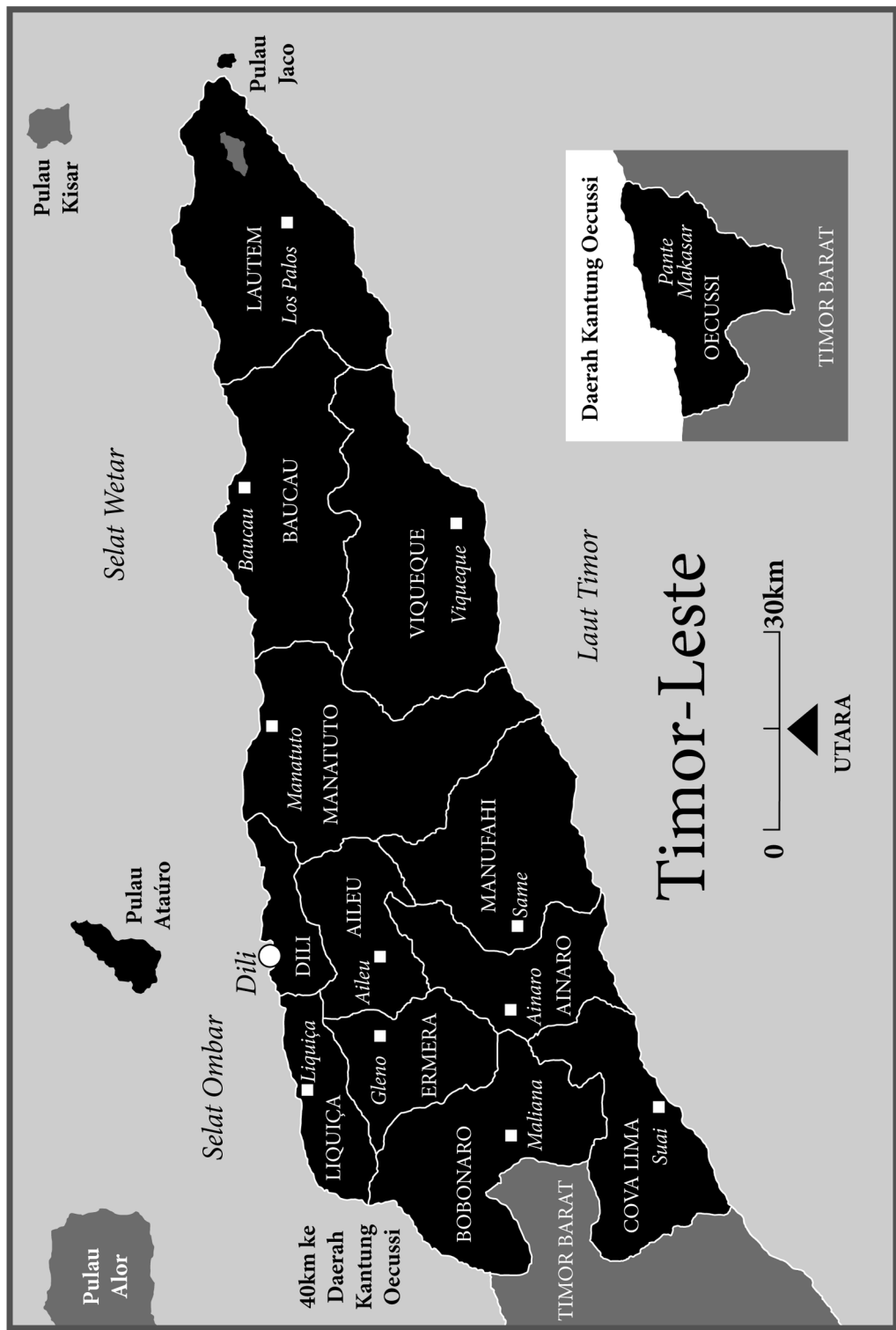
Lampiran 1:

Timor-Leste 1999: Kejahatan terhadap kemanusiaan –

Sebuah laporan yang dibuat berdasarkan pesanan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa

Oleh Geoffrey Robinson,
University of California, Los Angeles (UCLA)

Geoffrey Robinson membuat sedikit perubahan pada laporan yang ditulisnya pada 2003 ini, saat mempersiapkan penerbitan versi bahasa Indonesianya oleh LSM Timor-Leste, Yayasan HAK, pada 2007. Untuk menghindari kebingungan, versi HAK terbaru itulah yang dilampirkan di sini.

Timor-Leste 1999: Kejahatan terhadap kemanusiaan –
Laporan Pesanan Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR)

2929 | Prakata

2933 | Ringkasan eksekutif
- **2934** | Metode dan mandat
- **2935** | Kerangka dan kesimpulan

2937 | Konteks sejarah dan politik
- **2937** | Invasi dan pendudukan Indonesia
- **2940** | Resistansi
- **2942** | Tanggapan internasional
  - **2945** | Terobosan di Indonesia
- **2946** | UNAMET dan Jajak Pendapat

2950 | Indonesia: kekuasaan dan strategi
- **2951** | Tentara Nasional Indonesia
- **2956** | Milisi
- **2958** | Kepolisian Indonesia
- **2959** | Pemerintah sipil dan kampanye sosialisasi
- **2962** | Kelompok-kelompok politik pro-otonomi
- **2963** | Badan-badan khusus bentukan pemerintah

2965 | Pelanggaran, korban, dan pelaku
- **2966** | Jenis-jenis pelanggaran
  - **2966** | Pembunuhan di luar hukum
  - **2967** | Penyiksaan dan penganiayaan
  - **2967** | Kekerasan berbasis gender
  - **2968** | Pemindahan penduduk secara paksa
  - **2970** | Penghancuran harta benda
- **2971** | Kronologi kekerasan: Tiga periode
  - **2971** | Periode pra-UNAMET (Januari hingga akhir Mei)
  - **2972** | Periode UNAMET (awal Juni hingga 30 Agustus)
  - **2973** | Periode setelah pemungutan suara (30 Agustus hingga akhir Oktober)

2975 | Korban
2976 | Pemimpin CNRT
2976 | Pejabat lokal
2976 | Orang-orang yang dianggap pengkhianat
2977 | Penduduk biasa
2977 | Para rohaniawan
2978 | Mahasiswa dan pemuda
2978 | Staf lokal UNAMET
2978 | Kaum perempuan dewasa dan muda
2979 | Anak-anak
2979 | Staf internasional dan wartawan internasional
2980 | Tokoh pro-otonomi dan milisi
2981 | Pelaku
2981 | Milisi
2981 | Militer
2982 | Polisi
2983 | Falintil
2984 | Pola dan variasi
2984 | Variasi sementara – Menutup Keran
2990 | Ketakbertindakan dan keterlibatan polisi
2994 | *Modus Operandi* Milisi
2997 | Variasi geografis
3002 | Enam Dokumen Kunci
3002 | Operasi Pembersihan
3004 | Dokumen Tavares
3006 | Dokumen Garnadi
3008 | Telegram Brigade Penyelamat Integrasi Timor Timur
3009 | Operasi Cabut
3014 | Milisi: Sejarah, pembentukan, dan pengakuan hukum
3014 | Pola Historis
3020 | Pembentukan milisi
3026 | Pengakuan politik dan hukum

3032 | Milisi: Perekrutan, pelatihan, operasi dan senjata

3032 | Perekrutan dan keanggotaan
3035 | Pelatihan
3038 | Operasi
3041 | Senjata: Bukti kesaksian
3046 | Senjata: Bukti dokumenter

3050 | Milisi: Pendanaan dan dukungan material

3050 | 'Sosialisasi' dan pendanaan milisi
3054 | Sumber pendanaan pemerintah
3059 | Pendanaan dan dukungan material TNI
3063 | FPDK sebagai saluran pendanaan
3065 | Anggaran milisi

3068 | Ringkasan kabupaten

3068 | Aileu (Kodim 1632)
3069 | Milisi dan pihak berwenang
3070 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia
3071 | Ainaro (Kodim 1633)
3071 | Milisi dan pihak berwenang
3074 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia
3075 | Baucau (Kodim 1628)
3076 | Milisi dan pihak berwenang
3078 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia
3079 | Bobonaro (Kodim 1636)
3080 | Milisi dan pihak berwenang
3082 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia
3086 | Covalima (Kodim 1635)
3086 | Milisi dan pihak berwenang
3087 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia
3090 | Dili (Kodim 1627)
3090 | Milisi dan pihak berwenang
3092 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia
3097 | Ermera (Kodim 1637)
3097 | Milisi dan pihak berwenang
3100 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

3102 | Lautém (Kodim 1629)
3103 | Milisi dan pihak berwenang
3104 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia
3107 | Liquiçá (Kodim 1638)
3107 | Milisi dan pihak berwenang
3110 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia
3114 | Manatuto (Kodim 1631)
3115 | Milisi dan pihak berwenang
3117 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia
3119 | Manufahi (Kodim 1634)
3120 | Milisi dan pihak berwenang
3121 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia
3123 | Oecussi (Kodim 1639)
3123 | Milisi dan pihak berwenang
3124 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia
3125 | Viqueque (Kodim 1630)
3126 | Milisi dan pihak berwenang
3128 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

3129 | Studi kasus: Insiden utama Hak Asasi Manusia
3130 | Pembantaian di Gereja Liquiçá (6 April 1999)
3135 | Pembunuhan di Cailaco (12 April 1999)
3139 | Pembantaian di rumah Carrascalão (17 April 1999)
3145 | Pembunuhan dua mahasiswa di Hera (20 Mei 1999)
3146 | Penahanan sewenang-wenang dan pemerkosaan di Lolotoe (Mei-Juni 1999)
3149 | Penyerangan terhadap UNAMET Maliana (29 Juni 1999)
3152 | Penyerangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan (4 Juli 1999)
3157 | Pembunuhan Staf UNAMET di Boboe Leten (30 Agustus 1999)
3161 | Pemindahan paksa dan pembunuhan pengungsi di Dili (5-6 September 1999)
3165 | Pembantaian di Gereja Suai (6 September 1999)
3170 | Pembantaian di Kantor Polisi Maliana (8 September 1999)
3175 | Pembantaian di Passabe dan Maquelab (September-Oktober 1999)
3178 | Pemerkosaan dan pembunuhan Ana Lemos (13 September 1999)
3182 | Amukan Batalion 745 (20-21 September 1999)
3187 | Pembunuhan rohaniwan Los Palos (25 September 1999)

3190 | Tanggung jawab individual dan komando
3191 | Tanggung jawab pidana individual
3193 | Manajer dan perencana
3195 | Tanggung jawab komando
3196 | Hubungan atasan-bawahan
3201 | "Mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui"
3203 | "Tindakan yang diperlukan dan mencukupi"

3207 | Tanggung jawab internasional
3208 | Tanggung jawab internasional
3214 | Tanggung jawab PBB: Masalah keadilan

3246 | Catatan tentang sumber

3247 | Catatan tentang penulis

Daftar tabel:

3222 | **Tabel 1** : Perwira dan pejabat senior yang diduga mengemban tanggung jawab individual dan komando untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor-Leste, 1999
3225 | **Tabel 2** : Perwira dan pejabat penting pada 1999 (berdasarkan urutan abjad)
3228 | **Tabel 3** : Kelompok milisi pro-Indonesia di Timor-Leste, 1999
3081 | **Tabel 4** : Kelompok milisi pro-Indonesia di Kabupaten Bobonaro
3229 | **Kronologi** : PBB dan Timor-Leste

Lampiran 1:

Timor-Leste 1999: Kejahatan terhadap kemanusiaan

– Laporan Pesanan Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR)

Prakata

Setelah kemenangan kemerdekaan Timor-Leste dalam pemungutan suara yang bersejarah pada Agustus 1999, pendukung-pendukung kekuasaan Indonesia membuat negeri itu menjadi puing-puing hangus. Pada akhir Oktober, sekitar 1.500 orang telah terbunuh, banyak perempuan telah diperkosa, 70% dari seluruh bangunan di negeri itu telah dihancurkan, dan lebih daripada separuh penduduknya telah dipaksa lari meninggalkan rumah mereka.

Laporan ini memberikan pengkajian yang terperinci mengenai kekerasan tersebut, dan analisis tentang sebab, pola, dan variasi-variasi utamanya. Dengan mempelajari dokumen-dokumen dan kesaksian-kesaksian yang belum diterbitkan sebelumnya, laporan ini juga memberikan suatu pengkajian baru mengenai tanggung jawab politik dan hukum atas kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan, dan memerikan rekomendasi yang ditujukan untuk memastikan bahwa orang-orang yang menjadi penanggungjawabnya diadili.

Kekerasan 1999 memicu kemarahan tidak hanya di Timor-Leste tetapi juga di seluruh dunia. Para pemimpin negara dan badan-badan PBB, termasuk Dewan Keamanan, berjanji bahwa para pelaku akan dihukum. Dua penyelidikan yang dibuat atas perintah PBB, keduanya dilaksanakan pada akhir 1999, menyimpulkan bahwa kejahatan terhadap umat manusia telah dilakukan, dan bahwa pihak-pihak berwenang Indonesia memikul tanggung jawab utama. Satu laporan yang disusun oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia menarik kesimpulan yang serupa, dan ketiga penyelidikan itu merekomendasikan bahwa suatu pengadilan pidana internasional harus dibentuk untuk menjamin bahwa para pelaku diadili sesuai dengan hukum internasional. Sekretaris Jenderal PBB menyambut temuan-temuan itu dan mengatakan bahwa ia akan mengikuti dengan dekat usaha-usaha untuk memberikan keadilan kepada para korban.

Dalam suatu usaha untuk melunakkan tekanan ke arah pembentukan pengadilan internasional, pada 2001 Indonesia membentuk mekanisme peradilan istimewa untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab. Proses itu sekarang telah luas dianggap sebagai sandiwara dan tipuan bagi keadilan, bahkan oleh sekutu-sekutu Indonesia yang paling setia sekalipun. Dari 18 orang yang didakwa dan diadili Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Jakarta, hanya seorang yang dijatuhi hukuman, dan satu orang terdakwa ini, yang adalah pemimpin milisi terkenal Eurico Guterres, tetap bebas ketika sedang menunggu keputusan pengadilan tingkat banding. Tidak satupun perwira atau pejabat sipil Indonesia yang dihukum penjara oleh pengadilan tersebut; bahkan sebagian besar dari terdakwa mendapatkan promosi, dan sebagian sekarang menduduki jabatan-jabatan yang penting di dalam jajaran aparat keamanan negeri tersebut.

Peradilan Timor-Leste, dengan bantuan PBB dan dunia internasional, telah bekerja dengan lebih baik. Pada akhir 2004, lebih daripada 370 orang telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada 1999, termasuk Jenderal Wiranto dan sejumlah perwira dan pejabat tinggi Indonesia. Dari jumlah itu, sekitar 50 orang telah diadili dan dijatuhi hukuman penjara oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat Timor-Leste. Sayangnya, hampir semua yang telah diadili adalah milisi lokal atau orang Timor-Leste tentara Indonesia yang berpangkat rendah. Para perwira dan pejabat Indonesia secara efektif tetap berada di luar jangkauan pengadilan Timor-Leste. Misalnya, pada akhir 2004, sekitar 280 dari 370 terdakwa berada di Indonesia dengan bebas.

Sebagian penyebab langkanya kemajuan yang mengecewakan itu adalah kelemahan peradilan di Indonesia, dan penolakan oleh pihak berwenang Indonesia untuk bekerjasama dengan proses di Timor-Leste. Ini juga terkait dengan keengganan pemimpin politik Timor-Leste untuk bertentangan dengan Indonesia yang merupakan tetangga yang begitu besar dan berpotensi membahayakan. Keprihatinan ini telah membuat Presiden Timor-Leste, Xanana Gusmão, dan sejumlah menteri pemerintah menyatakan secara terbuka penolakan terhadap gagasan mengenai pengadilan internasional, dan sebaliknya berfokus pada rekonsiliasi.

Tetapi, persoalan yang sebenarnya adalah kegagalan menyeluruh negara-negara penting dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri untuk mengambil dan menerima pertanggungjawaban dalam hal ini. Selain pernyataan-pernyataan kemarahan awal, dan sejumlah dukungan yang berarti pada proses peradilan di Timor-Leste, tidak ada usaha internasional yang serius untuk menjamin bahwa orang-orang yang paling bertanggung jawab untuk kekejaman-kekejaman 1999 akan dihadapkan ke pengadilan. Gagasan tentang pengadilan pidana internasional untuk Timor-Leste, yang secara resmi didukung oleh ketiga penyelidikan yang sungguh-sungguh itu, secara efektif telah ditinggalkan. Sebagai penggantinya, pihak-pihak yang berkepentingan telah mengusulkan berbagai tindakan yang tidak cukup kuat, meliputi pembentukan satu Komisi Pakar PBB, yang menilai pengadilan di Indonesia dan Timor-Leste, dan satu Komisi Kebenaran dan Persahabatan gabungan Indonesia-Timor-Leste, dengan mandat untuk membahas apa yang terjadi pada 1999, tetapi

tidak untuk melakukan apapun mengenainya. Sementara hal yang baik mungkin akhirnya dihasilkan oleh inisiatif-inisiatif itu, ada satu bahaya nyata bahwa inisiatif-inisiatif itu hanya akan menunda, dan mungkin bahkan menggagalkan sama-sekali, proses peradilan yang benar.

Laporan ini menawarkan rekomendasi yang lebih langsung: agar Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan membentuk, tanpa menunda lagi, suatu pengadilan pidana internasional untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor-Leste pada 1999. Karena beratnya kejahatan-kejahatan tersebut, fakta bahwa kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan lebih daripada lima tahun yang lalu, dan bahwa semua penyelesaian telah diupayakan dan ternyata tidak mencukupi, hal ini bukanlah usulan yang tidak beralasan. Sesungguhnya, melakukan yang kurang daripada itu akan merupakan pernyataan penghinaan terhadap penegakan hukum, dan mengirimkan pesan yang jelas kepada para pelaku kejahatan di masa lalu dan masa mendatang—baik di Indonesia, Sudan, Irak, Amerika Serikat, atau di mana saja—bahwa mereka tidak perlu takut akan adanya sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

Gagasan untuk laporan ini berasal dari dalam Unit Hak Asasi Manusia Misi Dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste (United Nations Mission of Suport in East Timor – UNMISET), dan saya ditugaskan menulisnya pada pertengahan 2002 oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (Office of the High Commissioner for Human Rights – OHCHR). Gagasannya adalah mengkaji sangat banyak bukti yang telah dikumpulkan oleh Pejabat Urusan Politik dan Pejabat Urusan Hak Asasi Manusia PBB sejak 1999, dengan tujuan menulis suatu pengkajian yang lebih mendalam daripada yang dimungkinkan pada saat kekerasan itu baru terjadi. Antara lain, dibayangkan bahwa laporan ini akan disampaikan kepada Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor-Leste yang waktu itu baru memulai pekerjaannya yang penting, dan kepada badan-badan resmi lainnya yang diberi wewenang menyelidiki dan mengadili kejahatan-kejahatan 1999. Juga ada kesepakatan umum bahwa laporan ini akan diterbitkan dan disebarkan secara luas, jika mungkin dalam bahasa Indonesia dan Tetum, selain dalam bahasa Inggris.

Seperti yang dibayangkan, informasi yang dikumpulkan oleh para Pejabat Urusan Politik dan Pejabat Urusan Hak Asasi Manusia PBB di Timor-Leste amat kaya dan mengerikan. Tetapi segera jelas bahwa lembaga-lembaga lain di Timor-Leste juga memiliki informasi tambahan yang merupakan pelengkap yang berguna bagi bukti yang dikumpulkan oleh Unit Hak Asasi Manusia, termasuk satu kumpulan besar dokumen yang telah dikumpulkan dari puing-puing kantor-kantor militer, kepolisian, dan milisi pada akhir 1999. Koleksi yang paling penting adalah yang dimiliki organisasi hak asasi manusia lokal, Yayasan HAK, dan Unit Kejahatan Berat (Serious Crimes Unit – SCU), suatu badan yang dibentuk pada akhir 2000 oleh Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste (United Nations Transitional Authority in East Timor – UNTAET).

Meskipun ada kekhawatiran awal mengenai konfidensialitas, Yayasan HAK dan SCU akhirnya memberikan akses kepada koleksi arsip mereka untuk tujuan pembuatan laporan ini. Keduanya juga memberikan bantuan yang sangat bernilai dengan pengecekan fakta dan penafsiran hukum, ketika laporan ini sedang ditulis. Pribadi-pribadi dan organisasi-organisasi lain—terutama staf pada International Center for Transitional Justice di New York dan pada kantor pusat Amnesty International di London—memberikan komentar-komentar dan nasihat yang bernilai pada berbagai rancangan laporan. Tanpa bantuan orang-orang dan organisasi-organisasi ini, tanpa komitmen murni mereka pada keadilan, laporan ini akan sangat sulit ditulis.

Laporan ini selesai ditulis pada Juli 2003, dan pada awal 2004 Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia secara resmi menyampaikan satu salinan kepada CAVR. Salinan juga disampaikan kepada Yayasan HAK dan Unit Kejahatan Berat, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan untuk menghargai bantuan mereka. Versi yang diterbitkan oleh Yayasan HAK ini telah mengalami sedikit penyuntingan, tetapi substansi serta argumen-argumen dan kesimpulan-kesimpulan utamanya tetap tidak berubah dari aslinya.

Lima tahun telah berlalu sejak kejahatan-kejahatan yang diuraikan dalma laporan ini dilakukan, dan sejak masyarakat internasional berjanji bahwa kejahatan-kejahatan tersebut akan dihukum. Sebagai salah seorang yang menyaksikan kejadian-kejadian mengerikan pada 1999, dan yang memercayai kejujuran janji keadilan itu, saya sedih bahwa hanya sedikit yang telah dilakukan untuk membuatnya menjadi kenyataan. Saya berharap bahwa penerbitan laporan ini akan mendorong maju penyelesaian keadaan tersebut.

Geoffrey Robinson

Los Angeles, November 2004

Ringkasan Eksekutif

> *Masa lalu tak dapat dibiarkan terselimuti misteri. Dalam keadaan seperti itu, korban akan terus mencari keadilan dan tidak akan dapat mengatasi duka cita dan kesedihan mereka.**

Selama 1999, Timor-Leste merupakan tempat terjadinya kekerasan yang mengerikan. Antara awal Januari dan akhir Oktober, sekurangnya 1.200 sampai 1.500 orang dibunuh. Sebagian ditembak mati, sementara yang lain dipenggal kepalanya, dikeluarkan isi tubuhnya, atau dipotong dengan parang sampai mati. Banyak dari mereka mengalami siksaan dan penganiayaan. Kaum perempuan dewasa dan perempuan muda usia mengalami pemerkosaan dan kejahatan kekerasan seksual lainnya. Kekerasan sistematis ini memicu pemindahan penduduk secara paksa dalam skala yang masif.

Kekerasan itu terjadi dalam konteks pelaksanaan referendum atau Jajak Pendapat mengenai status politik Timor-Leste, yang diawasi dan dijalankan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 Agustus 1999. Sebelum berlangsungnya pemungutan suara, orang yang diduga mendukung kemerdekaan terus-menerus mendapat ancaman dan tindak kekerasan dari kelompok milisi pro-Indonesia. Terlepas dari bahaya yang nyata mengancam mereka, rakyat Timor-Leste menyambut kesempatan menentukan masa depan politik mereka dan secara meyakinkan memilih merdeka.

Kekerasan terus meningkat menyusul pengumuman hasil pemungutan suara pada 4 September. Selama beberapa minggu setelah pengumuman itu, tentara dan polisi Indonesia bergabung dengan pasukan milisi pro-Indonesia yang bersenjata melancarkan tindak kekerasan yang begitu hebat dan kejam, sampai-sampai membuat mereka yang telah menduga akan terjadi kekerasan pun terkejut. Sebelum pasukan yang disahkan PBB tiba untuk menertibkan keadaan pada akhir September, ratusan orang dibunuh dan sekitar 400.000—lebih daripada separuh penduduk Timor-Leste—dipaksa lari meninggalkan rumah mereka.

Pihak berwenang Indonesia memberikan beragam penjelasan mengenai kejadian-kejadian itu. Mereka mengklaim bahwa kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia dibentuk secara spontan karena adanya provokasi dari aktivis pro-kemerdekaan, dan bahwa kekerasan adalah hasil "bentrokan" antara kedua belah pihak. Kekerasan setelah pemungutan suara, menurut pandangan resmi ini, adalah wajar karena merupakan ungkapan kemarahan orang Timor-Leste yang pro-Indonesia, terhadap sikap PBB yang cenderung berpihak pada kemerdekaan. Menanggapi bukti-bukti bahwa tentara Indonesia sendiri telah melakukan tindak kekerasan, pihak berwenang Indonesia mengakui adanya "oknum-oknum" yang mungkin

* United Nations, *Situation of Human Rights in East Timor* (UN No. A/54/660), 10 Desember 1999, paragraf 65.

telah berbuat demikian, tetapi sekaligus menekankan bahwa angkatan bersenjata sebagai sebuah institusi tetap teguh pada disiplin dan bekerja keras mencegah terjadinya kekerasan.

Para pengamat dari luar, seperti juga banyak orang Timor-Leste sendiri, memberikan penafsiran yang berbeda. Mereka menggugat klaim bahwa kekerasan adalah hasil "bentrokan" antar-orang Timor-Leste sendiri, dan sebaliknya mengatakan bahwa kekerasan itu dipicu oleh pihak berwenang militer Indonesia, khususnya Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Mereka menyatakan bahwa kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia sebenarnya hanya merupakan pasukan perpanjangan tangan, yang diciptakan, diperlengkapi, dan diorganisasi oleh pihak berwenang militer dan sipil Indonesia, dan bahwa kelompok-kelompok milisi bertindak di bawah perintah perwira-perwira militer Indonesia. Menanggapi klaim bahwa keterlibatan militer terbatas pada "oknum-oknum" saja, para pengamat dan orang Timor-Leste menunjuk pada bukti-bukti tentang keterlibatan sejumlah perwira tinggi, dan bukti-bukti bahwa banyak dari kekerasan itu direncanakan sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan pandangan yang berbeda-beda tersebut, laporan ini berusaha memberikan pengkajian independen mengenai sifat dan penyebab kekerasan di Timor-Leste. Lebih khususnya, laporan ini punya tiga tujuan. Pertama, laporan ini berusaha menguraikan dan menentukan sifat kekerasan tersebut selengkap dan seakurat mungkin, dengan fokus pada periode antara 1 Januari dan akhir Oktober 1999. Kedua, laporan ini berusaha menjelaskan bagaimana dan mengapa kekerasan itu terjadi. Ketiga, dan yang paling penting, laporan ini berusaha menetapkan para pelaku yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut, dan tindakan-tindakan penyelesaian yang tepat terhadap mereka.

Metode dan mandat

Temuan dan kesimpulan laporan ini bukan didasarkan pada kliam-klaim tanpa bukti yang dibuat oleh pejabat pemerintah Indonesia maupun para pengkritiknya. Laporan ini juga tidak bertolak dari penemuan "satu bukti yang mengenai segalanya", baik dalam bentuk dokumen maupun kesaksian. Laporan ini didasarkan pada pemeriksaan dan analisis yang teliti terhadap sumber dokumenter maupun kesaksian yang berbobot dan sekarang banyak jumlahnya. Sumber-sumber utama laporan ini mencakup:

- Laporan internal, memoranda, dan surat perintah yang semua bersifat rahasia yang berasal dari pihak berwenang militer, kepolisian, dan sipil Indonesia, dan berbagai kelompok milisi dan organsiasi pro-Indonesia lainnya;
- Kesaksian dari para saksimata dan korban kekerasan, yang diambil dan dikumpulkan oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional dan domestik, para ahli hukum, dan oleh para pejabat PBB;
- Laporan dan memoranda internal mengenai kejadian-kejadian selama 1999 yang disusun oleh Misi PBB di Timor-Leste (UNAMET – UN Mission

in East Timor), Pmerintah Transisi PBB di Timor-Leste (UNTAET – UN Transitional Administration for East Timor), dan Misi Dukungan PBB untuk Timor-Leste (UNMISET – UN Mission of Support in East Timor);

- Temuan dari berbagai penyelidikan tepercaya lain mengenai kekerasan tersebut, termasuk yang dikeluarkan oleh tiga orang Pelapor Khusus PBB (Desember 1999), Komisi Penyelidikan Internasional mengenai Timor-Leste (Januari 2000), dan oleh Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk Timor-Leste yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Januari 2000);
- Surat-surat dakwaan pidana yang dibuat terhadap para pelaku kekerasan oleh kejaksaan di Indonesia dan Timor-Leste, dan informasi yang muncul dalam persidangan pidana di kedua negara;
- Analisis ilmiah, laporan media, dan sumber-sumber sekunder lainnya.

Laporan ini dibuat berdasarkan permintaan dari Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB pada Juli 2002. Penelitian dan penulisannya dilakukan oleh Dr. Geoffrey Robinson, Guru Besar Madya bidang Sejarah pada University of California, Los Angeles (UCLA). Pakar masalah hak asasi manusia di Indonesia dan Timor-Leste ini bertugas sebagai Pejabat Urusan Politik dalam Misi PBB di Timor-Leste (UNAMET) di Dili dari Juni sampai November 1999. Ia melakukan penelitian untuk laporan ini di Dili antara Agustus sampai Oktober 2002, dan menyelesaikannya pada Juli 2003. Dalam menyiapkan laporan ini, ia dibantu oleh Unit Hak Asasi Manusia dari Misi Dukungan PBB di Timor-Leste (UNMISET) dan oleh Unit Kejahatan Berat (SCU – Serious Crimes Unit) dari Kantor Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat di Dili.

Kerangka dan kesimpulan

Laporan ini dibagi menjadi lima bagian, setiap bagian terdiri atas dua bab atau lebih. Bagian pertama (Bab 1 dan 2) menempatkan rangkaian kejadian 1999 dalam konteks sejarah dan politik, dan secara garis besar menguraikan unsur-unsur pokok strategi Indonesia di Timor-Leste pada 1999. Bagian kedua (Bab 3 sampai dengan 5) mengkaji dan menganalisis pola-pola umum pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste pada 1999. Bagian ketiga (Bab 6 sampai dengan 8) menguraikan hakikat hubungan antara kelompok-kelompok milisi bersenjata dengan pihak-pihak berwenang Indonesia. Bagian keempat (Bab 9 dan 10) memberikan ringkasan keadaan hak asasi manusia di setiap distrik administratif di Timor-Leste yang berjumlah 13, dan pengkajian yang terperinci terhadap 15 kasus hak asasi manusia yang utama. Bagian terakhir (Bab 11 dan 12) mengkaji persoalan pertanggungjawaban dan penyelesaian hukum bagi kejahatan yang dilakukan pada 1999.

Laporan ini menyimpulkan bahwa tindak kekerasan pada 1999 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, bahwa kekerasan tersebut adalah bagian dari operasi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak-pihak berwenang indonesia, dan bahwa

pejabat-pejabat tinggi Indonesia mengemban tanggung jawab pidaha individual dan tanggung jawab komando atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Lebih khususnya, laporan ini menyimpulkan bahwa:

1. Tindak kekerasan yang diuraikan dalam laporan ini—mencakup pembunuhan, pemerkosaan, penyisaan, pemindahan paksa, dan penghancuran harta-benda—adalah bagian dari serangan meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil Timor-Leste, yang menjadikan mereka yang benar-benar mendukung atau diduga mendukung kemerdekaan sebagai sasaran. Karena itu, tindak kekerasan tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, namun juga merupakan kejahatan terhadap umat manusia.
2. Para pelaku langsung kejahatan tersebut terutama adalah para anggota kelompok milisi pro-Indonesia, yang jumlahnya lebih daripada dua lusin pada 1999. Meskipun demikian, anggota-anggota TNI, dan dalam jumlah kecil Polri, juga sangat sering merupakan penanggung jawab langsung.
3. Berlawanan dengan klaim para pejabat Indonesia, kelompok-kelompok milisi tidak muncul secara spontan menjawab provokasi dari kelompok-kelompok pro-kemerdekaan. Mereka direkrut, dilatih, dipersenjatai, dibiayai, dan dikoordinasikan oleh pihak berwenang militer Indonesia, sejalan dengan doktrin dan praktik militer Indonesia yang sudah lama berlaku.
4. Para perwira TNI dan pejabat pemerintah sipil bersekongkol untuk menggunakan milisi sebagai perpanjangan tangan mereka guna melancarkan teror terhadap penduduk agar mendukung pilihan 'otonomi khusus' dalam pemungutan suara Agustus 1999, dan untuk mencapai tujuan tersebut, mereka mengesahkan, mendorong, atau membiarkan terjadinya tindak kekerasan yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
5. Sekitar 50 perwira berpangkat letnan kolonel atau lebih tinggi, dan sekitar 30 pejabat tinggi pemerintah dan kepolisian, diduga mengemban tanggung jawab komando atau tanggung jawab individual atas kejahatan yang terjadi, dan semestinya djadikan sasaran penyelidikan pidana lanjutan.
6. Terlepas dari sumbangannya dalam mengakhiri kekerasan September 1999, negara-negara besar anggota masyarakat internasional ikut mengemban tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan pada 1999, karena dalam sejarahnya membiarkan Indonesia melakukan pendudukan yang melanggar hukum terhadap Timor-Leste, dan karena tidak mendesakkan pengaturan keamanan yang memadai untuk Jajak Pendapat pada 1999.
7. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab khusus untuk memastikan bahwa para pelaku kekerasan di Timor-Leste diajukan ke pengadilan. Dewan Keamanan semestinya menjalankan rekomendasi-rekomendasi dari penyelidikan-penyelidikan PBB sebelumnya, dan membentuk pengadilan pidana internasional bagi Timor-Leste pada kesempatan yang paling awal.

Konteks sejarah dan politik

Inti dari krisis 1999 sesungguhnya adalah masalah status politik Timor-Leste. Setelah lama menjadi jajahan Portugal, Timor-Leste diserbu dan akhirnya dicaplok oleh negara tetangganya, Indonesia, pada 1975. Selama 24 tahun status politik wilayah itu menjadi sengketa, baik di Timor-Leste sendiri maupun secara internasional. Walaupun sejumlah negara mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut, PBB tidak pernah mengakuinya. Bagi PBB, Portugal tetap menyandang status formal sebagai penguasa administratif wilayah tersebut.

Periode kekuasaan Indonesia (1975-1999) ditandai oleh perlawanan terus-menerus, baik yang menggunakan senjata maupun cara-cara damai. Pada tahun-tahun pertama, perlawanan itu dipimpin oleh Fretilin (*Frente Revolucionária de Timor Leste Independente* – Front Revolusioner untuk Timor Leste Merdeka); dan sayap bersenjatanya, Falintil (*Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor Leste* – Angkatan Bersenjata untuk Pembebasan Nasional Timor-Leste). Pada dasawarsa 1990-an sebuah organisasi payung yang bernama CNRT (*Conselho Nacional de Resistência Timorense* – Dewan Nasional Perlawanan Bangsa Timor) memegang kepemimpinan, didukung oleh sejumlah organisasi sosial dan politik, Front Klandestin, dan Falintil.

Kekuasaan Indonesia di Timor-Leste ditandai oleh pola pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistematis oleh angkatan bersenjata Indonesia serta milisi dan kelompok paramiliter pro-Indonesia yang menjadi perpanjangan tangannya. Terlepas dari kritik internasional yang terus meningkat terhadap pelanggaran yang dilakukan Indonesia, dan adanya perlawanan yang terus berlanjut, selama bertahun-tahun hampir tidak ada tindakan konkret yang diambil untuk menyelesaikan masalah status politik Timor-Leste.

Situasi tersebut mulai berubah dengan mundurnya presiden Indonesia yang lama berkuasa, Soeharto, pada Mei 1998. Pada Januari 1999 pemerintah Indonesia mengumumkan kesiapannya untuk meninggalkan Timor-Leste, jika rakyat di wilayah tersebut menolak usulan 'otonomi luas' di bawah kekuasaan Indonesia. Inisiatif itu membuka jalan bagi serangkaian kesepakatan antara Indonesia, Portugal, dan PBB, yang dikenal sebagai Kesepakatan 5 Mei. Kesepakatan itu menetapkan cara-cara pelaksanaan hak memilih dan pemeliharaan keamanan, dan menetapkan bahwa pemilihan akan diorganisasi dan dilaksanakan oleh PBB. United Nations Mission in East Timor (UNAMET – Misi PBB di Timor-Leste) mulai bekerja pada Mei, dan pemungutan suara dilakukan pada 30 Agustus 1999.

Invasi dan pendudukan Indonesia

Selama sekitar tiga abad, wilayah yang dikenal sebagai Timor-Leste merupakan koloni Portugal. Status itu mulai goyah pada 1974, ketika setelah terjadinya Revolusi Anyelir, Portugal bersiap menghapus kekuasaan atas jajahannya, termasuk Timor-Leste. Surutnya Portugis ini mendorong tumbuhnya partai-partai politik di Timor-Leste.

Pada 1975, ada tiga partai utama yang muncul: ASDT (*Associação Social Democrática de Timor* – Perhimpunan Sosial Demokratik Timor) yang kemudian berganti nama menjadi Fretilin; UDT (*União Democrática Timorense* – Serikat Demokratik Timor), dan Apodeti (*Associação Popular Democrática Timorense* – Perhimpunan Kerakyatan Demokratik Timor). Fretilin adalah partai sosial demokratik yang para pemimpinnya menuntut kemerdekaan segera. UDT, sebuah partai yang lebih konservatif, ingin mempertahankan hubungan dengan Portugal sambil menjalani transisi bertahap menuju kemerdekaan. Apodeti, partai yang paling kecil, menginginkan integrasi dengan negara tetangga, Indonesia.

Terlepas dari adanya aliansi antara Fretilin dan UDT yang dibentuk Januari 1975, ketegangan di antara kedua partai itu terus tumbuh dan, menyusul sebuah upaya kup oleh UDT pada Agustus, menajam menjadi konflik bersenjata. Pada titik yang menentukan ini, penguasa Portugis mengabaikan Timor-Leste. Gubernur Portugis dan stafnya melarikan diri ke Pulau Ataúro, dan pemerintah di Lisabon hanya melakukan upaya seperlunya untuk merundingkan proses dekolonisasi yang memuaskan.

Setelah bertempur beberapa minggu, yang berlangsung dengan pelanggaran berat hak asasi manusia, Fretilin muncul sebagai pemenang dalam perang saudara itu dan mulai berusaha mengonsolidasikan otoritasnya di dalam negeri serta memperoleh dukungan internasional. Akan tetapi, usaha-usaha itu bertabrakan dengan rencana Indonesia, negara tetangganya yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto, mantan jenderal Angkatan Darat yang berkuasa melalui suatu kup antikomunis pada 1965, dan yang tetap berkuasa sampai Mei 1998.

Rezim Orde Baru Soeharto memberikan keleluasaan yang tiada taranya bagi perluasan kekuasaan militer di bidang ekonomi dan politik. Lembaga-lembaga dan pemimpin-pemimpin sipil secara bertahap didorong ke pinggir kehidupan politik, dan dilucuti wewenangnya dalam pengambilan keputusan.[*] Cara Soeharto dan sekutunya naik ke kekuasaan pun turut membentuk dan menjadi dasar sebuah gaya pemerintahan baru yang secara mendalam memengaruhi kehidupan politik Indonesia selama 30 tahun selanjutnya, dan yang melahirkan suatu pola pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan di Indonesia dan, setelah 1975, di Timor-Leste.

Gaya baru ini mencakup suatu ideologi negara yang sibuk dengan keamanan dan persatuan nasional, dan tanpa toleransi samasekali pada pembangkangan. Gaya itu juga mengarah pada pelaksanaan suatu doktrin militer mengenai 'pertahanan rakyat semesta' yang melibatkan mobilisasi kekuatan milisi untuk melancarkan perang terhadap musuh-musuh negara di dalam negeri.[†] Pada masa setelah kup, militer maupun milisi menggunakan cara-cara brutal, banyak di antaranya

---

* Mengenai peran politik angkatan bersenjata pada masa awal Orde Baru, lihat Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1978, bab 9-14.

† Mengenai sejarah dan implikasi politik dari doktrin ini, lihat Geoffrey Robinson, "Indonesia: On a New Course?" Muthiah Alagappa, penyunting, *The Declining Role of the Military in Asia*, Stanford University Press, 2001. Lihat juga Abdul Haris Nasution, *Fundamentals of Guerrilla Warfare*, Praeger, New York, 1965.

mengikuti tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pembantaian 1965-1966. Di bawah pengarahan Angkatan Darat—khususnya di bawah Komando Pasukan Khusus (Kopassus)— pasukan-pasukan milisi dan paramiliter dikerahkan untuk melaksanakan berbagai "tugas kotor" dan operasi tertutup, yang mencakup pembunuhan, penyiksaan, pembunuhan di muka umum, pemenggalan kepala, dan pemerkosaan, sebagai cara-cara pengendalian politik.*

Kecenderungan-kecenderungan ideologis dan pola-pola perilaku seperti inilah yang membentuk tanggapan Orde Baru terhadap perkembangan di Timor-Leste pada 1975. Sementara di permukaan menjalankan perundingan diplomatik dengan Portugal, dan memelihara kesan tidak mau campurtangan dalam urusan dalam negeri Timor-Leste, Indonesia menggerakkan operasi rahasia untuk memastikan pencaplokan wilayah itu.

Kegiatan tertutup yang dilancarkan pada 1975 ini mencakup penyusupan kesatuan-kesatuan tempur dan pasukan-pasukan paramiliter melintasi batas dari Timor Barat ke Timor-Leste, di mana mereka digambarkan sebagai 'sukarelawan' anti-Fretilin yang menginginkan integrasi dengan Indonesia. Operasi militer tertutup ini mulai terungkap ke khalayak luas pada Oktober 1975, ketika lima orang wartawan Barat yang meliput perkembangan di sana, dibunuh oleh pasukan Indonesia di kota Balibó, di dalam wilayah Timor-Leste. Dokumen-dokumen rahasia pemerintah yang baru-baru ini dibuka mengungkap bahwa sejumlah pemerintah di masa lalu memilih tidak menekan pejabat Indonesia dengan masalah tersebut.

Di bawah tekanan terus-menerus akibat serangan lintas-batas, pengabaian oleh Portugal dan sebagian besar masyarakat internasional, dan ancaman serangan besar-besaran oleh Indonesia, pada 28 November 1975 Fretilin mengumumkan kemerdekaan Timor-Leste. Proklamasi Republik Demokratik Timor Leste merdeka ini menjadi dalih terakhir bagi invasi Indonesia. Dengan klaim bahwa Indonesia menghadapi ancaman kebangkitan komunis dan ketidakstabilan politik di perbatasan, pada 7 Desember 1975 Indonesia melancarkan serangan melalui darat, laut, dan udara terhadap negara baru merdeka itu.

Para pemimpin militer Indonesia menduga bahwa operasi untuk menduduki Timor-Leste hanya akan memakan waktu beberapa hari saja, dan bahwa penduduk tidak akan memberikan perlawanan berarti sebelum akhirnya takluk pada kontrol Indonesia. Namun, kenyataannya berbeda. Operasi Indonesia itu tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, dan rakyat Timor-Leste melawan pasukan penyerang itu dengan ketahanan sangat besar.

Sebagai langkah yang jelas ditujukan untuk membungkam kritik internasional, pihak berwenang Indonesia membentuk Majelis Rakyat Timor Timur yang, dalam satu-

* Asal-usul dan perkembangan dari doktrin dan praktik militer Orde Baru telah dianalisis secara lengkap. Lihat Richard Tanter, "The Totalitarian Ambition: Intelligence Organisations and the Indonesian State," dan Michael van Langenberg "The New Order State: Language, Ideology, Hegemony," keduanya dalam Arief Budiman, penyunting, *State and Civil Society in Indonesia*, Clayton, Vic: Monash Papers on Southeast Asia, No. 22, 1990.

satunya sidang pada 31 Mei 1976, secara resmi meminta integrasi menjadi provinsi Indonesia. Pihak berwenang Indonesia memenuhi permintaan tersebut pada 17 Juli 1976, dengan menetapkan Undang-Undang No. 7/1976 yang memutuskan integrasi Timor-Leste sebagai provinsi Indonesia yang ke-27.

Sementara itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menghadapi perlawanan yang terus berlanjut dengan meningkatkan operasi-operasi militernya. Operasi yang luarbiasa keras dan kejam dilancarkan pada 1975-1983. Dengan menggunakan pesawat tempur OV-Bronco yang disediakan oleh Amerika Serikat, tentara Indonesia melakukan pengeboman udara besar-besaran terhadap kawasan perdesaan. Penduduk yang dianggap mendukung perlawanan dipindahkan secara paksa ke suatu versi Indonesia dari 'desa-desa strategis' yang digunakan tentara Amerika Serikat di Vietnam.

Pengeboman dan pemindahan paksa ini mengakibatkan kelaparan dan penyakit yang meluas. Pada 1980 organisasi-organisasi gereja dan hak asasi manusia memperkirakan bahwa sebanyak 200.000 penduduk dari sekitar 700.000 penduduk sebelum invasi, meninggal dunia. Kebanyakan meninggal akibat kelaparan dan penyakit, tetapi sejumlah besar orang dibunuh dalam pertempuran atau eksekusi sewenang-wenang. Walaupun skala pembunuhan dan krisis kemanusiaan agak menurun dalam dua dasawarsa selanjutnya, pasukan tentara Indonesia dan kelompok-kelompok milisi setempat yang mereka kerahkan terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistematis sampai kepergian akhir mereka dari wilayah itu pada Oktober 1999.

Resistansi

Tentara Indonesia menghadapi perlawanan hebat, baik yang menggunakan senjata maupun cara-cara damai, selama 24 tahun pendudukan mereka di Timor-Leste. Gerakan perlawanan mendapat dukungan dari Gereja Katolik dan lapisan besar generasi muda yang merancang strategi-strategi baru untuk menghubungkan perjuangan mereka dengan jaringan-jaringan dan organisasi-organisasi internasional.

Dalam hampir seluruh masa pendudukan, Fretilin dan sayap bersenjatanya, Falintil, menjadi ujung tombak gerakan perlawanan. Pada awal dasawarsa 1980-an, Falintil berkembang menjadi pasukan gerilya bergerak, yang unit-unitnya beroperasi dengan sangat otonom. Mereka juga mendapat dukungan dari setidaknya sebagian penduduk yang memberi mereka makanan, tempat berlindung, dan informasi. Pendekatan itu mendatangkan bahaya bagi penduduk sipil, yang menjadi sasaran operasi militer Indonesia. Tetapi di sisi lain, strategi itu memungkinkan satu kelompok gerilya dengan sekitar 1.000 pejuang bersenjata untuk menghadapi dan kadang bahkan menimbulkan korban di pihak tentara Indonesia yang memiliki persenjataan lengkap dan jumlahnya dua puluh kali lipat lebih besar.

Betapapun pentingnya peran para pejuang bersenjata itu, perlawanan terhadap pendudukan Indonesia tidak hanya, atau tidak terutama, dilakukan dengan kekuatan senjata. Hal ini terutama berlangsung setelah 1981, ketika kepemimpinan perlawanan, dan Falintil, dilanjutkan oleh José Alexandre Gusmão, yang lebih dikenal dengan nama Xanana Gusmão. Di bawah kepemimpinannya, perlawanan bersenjata semakin dilengkapi dengan suatu jaringan dari kelompok-kelompok yang beroperasi terutama di medan politik, baik di Timor-Leste maupun di luar negeri. Organisasi-organisasi yang memiliki bentuk resmi ini antara lain adalah Renetil (*Resistência Nacional dos Estudantes de Timor Leste* – Resistansi Nasional Pelajar Timor Leste), OJETIL (*Organização de Juventude e Estudante de Timor Leste* – Organisasi Pemuda dan Pelajar Timor Leste), dan kelompok perempuan OMT (*Organização das Mulheres Timorenses* – Organisasi Perempuan Timor). Selain itu masih ada lusinan kelompok setengah resmi atau tidak resmi yang tersebar di seluruh negeri dan di kota-kota utama di Indonesia.

Jaringan yang biasanya disebut Front Klandestin ini memelihara hubungan dengan gerakan perlawanan bersenjata, tetapi tidak berperan langsung dalam konflik bersenjata. Banyak dari yang aktif dalam Front Klandestin ini adalah orang-orang muda dan pelajar/mahasiswa yang dibesarkan dan dididik di bawah kekuasaan Indonesia. Di samping bekerja di dalam Timor-Leste, unsur-unsur dari jaringan ini juga mengumpulkan informasi mengenai perkembangan politik dan hak asasi manusia, dan menyebarkannya kepada organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional, media, dan pemerintahan asing. Salah satu kelompok terpenting yang terlibat dalam kegiatan seperti ini adalah organisasi hak asasi manusia, Yayasan HAK.

Mereka yang mengkritik dan menentang kekuasaan Indonesia juga mendapat dukungan dari dalam Gereja Katolik Timor-Leste, sekutu yang kuat di kalangan penduduk yang hampir seluruhnya beragama Katolik.[*] Para pemimpin agama memberi perlindungan kepada korban-korban operasi militer dan angkat bicara melawan pendudukan. Sikap ini dipelopori oleh Monsignor Martinho da Costa Lopes, seorang pengkritik keras kekuasaan Indonesia yang digeser dari kedudukannya sebagai Administrator Apostolik pada 1983. Penggantinya, Monsignor Carlos Filipe Ximenes Belo, semula dikira lebih menurut. Namun pada 1989, Monsignor Belo mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB waktu itu, Javier Perez de Cuellar, mengecam kekerasan yang dilakukan Indonesia dan meminta PBB menyelenggarakan referendum mengenai masa depan politik Timor-Leste.[†]

Pada akhir dasawarsa 1980-an, perlawanan mengalami transformasi lebih lanjut. Meninggalkan retorika kiri dari tahun-tahun sebelumnya, Xanana Gusmão meminta partai-partai Timor Leste bergabung dalam front persatuan perlawanan nasional

* Untuk uraian tentang peran Gereja Katolik lihat Arnold Kohen, *From the Place of the Dead: The Epic Struggles of Bishop Belo of East Timor*, New York: St Martin's Press, 1999.

† Teks surat tersebut dikutip dalam Kohen, *From the Place of the Dead*, halaman 137.

yang bernama CNRM (*Conselho Nacional de Resistência Maubere* – Dewan Nasional Perlawanan Maubere). Dalam sebuah pertemuan besar di Portugal, pada April 1998, CNRM diubah menjadi CNRT (*Conselho Nacional de Resistência Timorense* – Dewan Nasional Resistansi Bangsa Timor), dengan Xanana Gusmão sebagai Ketua. Falintil yang awalnya merupakan sayap bersenjata Fretilin, dinyatakan sebagai angkatan bersenjata seluruh perlawanan nasional.

Mundurnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 membuat tujuan memperkuat sebuah front nasional semakin mendesak, dan juga membuka kesempatan yang tiada bandingannya untuk berorganisasi dan menghimpun kekuatan di Timor-Leste sendiri. Pada September 1998, CNRT secara terbuka mengumumkan keberadaannya di Timor-Leste, dan mendirikan kantor-kantor di seluruh negeri. Para pengurus CNRT segera menjadi sasaran serangan politik dan fisik oleh kelompok-kelompok pro-Indonesia, sehingga banyak dari mereka akhirnya terpaksa menutup kantor mereka dan melarikan diri. Sebagian pendapat mengatakan bahwa mobilisasi kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia yang menjadi pelaku utama kekerasan 1999 ini dimulai pada masa ini sebagai reaksi terhadap inisiatif CNRT.

Bagaimanapun, pada awal 1999 CNRT telah muncul sebagai wakil politik terpenting dari kelompok prokemerdekaan, baik di Timor-Leste maupun dalam urusannya dengan PBB dan pemerintah-pemerintah asing. Sekalipun ada penolakan dari kelompok-kelompok tertentu, bendera CNRT diakui umum sebagai simbol pilihan kemerdekaan, dan menjadi simbol pilihan 'menolak otonomi' dalam Konsultasi Rakyat 1999.

Tanggapan internasional

Klaim Indonesia atas Timor-Leste tidak pernah diakui oleh PBB. Antara 1975 dan 1981, Dewan Keamanan dan Sidang Umum PBB mengeluarkan serangkaian resolusi yang mengecam invasi Indonesia dan mengakui hak tak terpisahkan rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri.[*] Sejalan dengan resolusi-resolusi itu, PBB tetap mengakui Portugal sebagai penguasa administratif resmi di wilayah itu.

Timor-Leste tetap berada dalam agenda Sidang Umum sampai 1982, ketika dengan Resolusi 37/30 (1982) Sekretaris Jenderal PBB diberi mandat untuk bekerjasama dengan Indonesia dan Portugal guna mencari penyelesaian yang dapat diterima secara internasional. Pembicaraan-pembicaraan dilakukan secara berkala di bawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB selama dasawarsa 1980-an. Selama periode itu, Timor-Leste tetap berada dalam agenda Komite Dekolonisasi PBB, yang bersidang sekali setahun di New York untuk membahas status sejumlah kecil "wilayah tak berpemerintahan sendiri" (*non-self governing territories*) yang masih tersisa.

* Resolusi Dewan Keamanan yang relevan adalah Resolusi No. 384 (1975) 22 Desember 1975 dan No. 389 (1976) 22 April 1976. Kedua resolusi itu meminta Indonesia menarik semua pasukan tentaranya dari Timor-Leste tanpa penundaan. Sesudahnya sampai 1981, Sidang Umum PBB setiap tahun mengeluarkan resolusi yang menegaskan kembali hak dasar rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri, dan mengungkapkan keprihatinan pada penderitaan penduduk.

Tetapi, sangat sedikit yang dilakukan untuk menghentikan invasi Indonesia. Banyak pemerintah asing justru dengan efektif mendukung posisi Indonesia. Invasi Desember 1975, misalnya, dilancarkan sehari setelah satu pertemuan di ibukota Indonesia, Jakarta, antara Presiden Soeharto dengan Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri Kissinger dari Amerika Serikat. Transkripsi pertemuan 6 Desember 1975 tersebut, yang akhirnya dibuka dalam keadaan tanpa disensor pada 2001, mengungkapkan bahwa Amerika Serikat secara sengaja membiarkan terjadinya invasi Indonesia.[*]

Presiden Ford menjamin Presiden Soeharto bahwa Amerika Serikat akan "memahami" jika Indonesia menganggap "perlu mengambil tindakan yang cepat atau drastis" di Timor-Leste. Kissinger mengatakan kepada Soeharto: "Apapun yang Anda lakukan, kami akan berusaha menanganinya sebaik mungkin." Kedua pejabat itu hanya meminta agar serangan Indonesia itu ditunda sampai mereka kembali ke Washington, agar, dalam kata-kata Kissinger, mereka dapat "memengaruhi reaksi" dan mengurangi "kesempatan orang-orang berbicara dengan cara yang tidak resmi."

Sikap mendukung pemerintah AS dan sekutunya menjadi semakin jelas sesudah invasi. Menurut perkiraan Departemen Luar Negeri AS sendiri, sekitar 90% peralatan militer yang digunakan dalam invasi Indonesia disediakan oleh Amerika Serikat. Dan dalam tahun-tahun setelah invasi, pemerintah AS yang silih berganti, menyalurkan ratusan juta dolar bantuan ekonomi maupun militer kepada pemerintah Indonesia, dan melindunginya dari tantangan politik yang sungguh-sungguh terhadap pendudukan ilegalnya atas Timor-Leste.

Amerika Serikat tidak sendirian dalam mendukung Indonesia. Dokumen resmi yang baru dibuka oleh pemerintah Australia dan Selandia Baru mengungkap pola pembiaran dan pemakluman yang sama.

Australia memilih tidak campurtangan dalam invasi 1975 dan kemudian menjadi negara besar pertama dan satu-satunya yang secara *de jure* mengakui klaim Indonesia atas Timor-Leste. Dokumen pemerintah yang dibuka untuk umum (*declassified documents*) mengungkapkan bahwa Australia sudah tahu sebelumnya tentang rencana Indonesia untuk melancarkan invasi pada 1975 dan juga memiliki data yang terperinci mengenai kekejaman pasukan tentara Indonesia selama 24 tahun pendudukan.[†] Meskipun demikian, selama itu pula pemerintah Australia yang silih berganti berusaha mengabaikan laporan-laporan pelanggaran berat hak asasi manusia di wilayah itu, dan memberikan pelatihan militer yang besar kepada pasukan Indonesia. Pada 2001, mantan Menteri Luar Negeri Australia (1988-1996), Gareth Evans, mengakui bahwa banyak pelatihan militer yang diberikan Australia

* Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Kawat dari Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri, 6 Desember 1975, tentang "Ford-Suharto Meeting." Teks lengkap dokumen ini dapat dilihat dalam situs jaringan National Security Archives pada http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62/

† Lihat Wendy Way, penyunting, *Australia and the Incorporation of Portuguese Timor, 1974-1976: Documents on Australian Foreign Policy*, Melbourne University Press, 2000.

kepada Indonesia "hanya membantu menghasilkan pelanggar hak asasi manusia yang lebih profesional."*

Kejadian-kejadian di Timor-Leste dan pergeseran konteks internasional secara bertahap mulai memperlemah posisi Indonesia sepanjang dasawarsa 1990-an. Kejadian yang merupakan titik balik adalah pembantaian Santa Cruz pada 12 November 1991, di mana sebanyak 270 orang ditembak atau dipukuli sampai mati oleh tentara Indonesia.† Rekaman video yang mengejutkan mengenai pembantaian itu disiarkan ke seluruh dunia, memicu kemarahan dan mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok pendukung Timor-Leste di seluruh dunia.

Penangkapan pemimpin perlawanan, Xanana Gusmão, pada akhir 1992, pengadilan politik terhadapnya setahun kemudian, dan perjuangannya untuk kemerdekaan Timor-Leste dari dalam penjara, terus meningkatkan profil gerakan perlawanan. Perkembangan ini mendorong adanya kegiatan baru dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan menghasilkan pengiriman pejabat-pejabat PBB ke Timor-Leste untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia.‡

Perkembangan penting lain adalah saat dua orang Timor-Leste, yaitu juru bicara internasional resistansi José Ramos-Horta dan Uskup Dili, Monsignor Carlos Belo, mendapat Anugerah Nobel pada 1996. Anugerah Nobel ini meningkatkan harapan akan kemerdekaan jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dan juga meningkatkan kekuatan kelompok-kelompok pendukung Timor-Leste serta organisasi nonpemerintah lainnya. Prospek penyelesaian masalah Timor-Leste lebih lanjut meningkat pada 1997 dengan pengangkatan Kofi Annan menjadi Sekretaris Jenderal PBB.

Akan tetapi, perubahan terpenting terjadi pada Mei 1998 ketika gelombang pasang protes di Indonesia yang bersamaan dengan krisis ekonomi besar memaksa Presiden Soeharto mundur dari kekuasaannya selama lebih daripada 30 tahun.

---

* Gareth Evans, "Indonesia: My Mistake," *International Herald Tribune*, 26 Juli 2001.

† Untuk penjelasan dan analisis mutakhir tentang pembantaian tersebut, lihat Amnesty International, *East Timor: The Santa Cruz Massacre*, November 1991.

‡ Pelapor Khusus PBB mengenai penyiksaan mengunjungi Indonesia dan Timor-Leste pada 1991; Amos Wako mengunjungi wilayah ini sebagai utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB pada 1992 dan 1993; Pelapor Khusus PBB mengenai eksekusi di luar hukum, seketika, atau sewenang-wenang, berkunjung pada 1994; Pelapor Khusus PBB mengenai kekerasan terhadap perempuan, sebab-sebab, dan akibat-akibatnya berkunjung pada akhir 1998; Kelompok Kerja PBB bidang penahanan sewenang-wenang berkunjung pada Februari 1999, dan utusan pribadi Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia berkunjung pada Mei 1999. Pada November 1999 tiga Pelapor Khusus PBB mengadakan satu misi bersama di Timor-Leste. Ketiganya adalah: Pelapor Khusus mengenai eksekusi di luar hukum, seketika, atau sewenang-wenang; Pelapor Khusus mengenai penyiksaan; dan Pelapor Khusus mengenai kekerasan terhadap perempuan, sebab-sebab, dan akibat-akibatnya.

Terobosan di Indonesia

Pengunduran diri Presiden Soeharto meningkatkan tuntutan luas untuk demokratisasi, dan peran angkatan bersenjata Indonesia dalam kehidupan politik dipertanyakan pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih lanjut, krisis ekonomi membuat pemerintah baru sangat memperhatikan negara-negara donor dan lembaga-lembaga pemberi pinjaman seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Karena alasan-alasan itulah, pengganti Soeharto, Presiden B.J. Habibie, beserta sebagian anggota kabinetnya, berusaha keras memperlihatkan komitmen mereka pada demokratisasi, hak asasi manusia, dan kekuasaan sipil. Sebagai bagian dari pendekatan baru tersebut, pada Juni 1998 pemerintahan Habibie mengisyaratkan siap untuk memberikan otonomi luas kepada Timor-Leste, dengan Jakarta tetap memegang kontrol atas urusan luar negeri, pertahanan eksternal, dan kebijakan fiskal.

Perubahan ini memberikan momentum baru kepada perundingan antara Indonesia dan Portugal yang ditengahi oleh PBB, dan pada Oktober 1998 sebuah usulan untuk memberi 'otonomi luas' kepada Timor-Leste di bawah kekuasaan Indonesia disiapkan di bawah pengawasan PBB. Indonesia mengambil posisi bahwa 'otonomi' adalah penyelesaian akhir. Portugal berpandangan bahwa 'otonomi' akan menjadi masa transisi, yang membuka kemungkinan bagi kemerdekaan penuh di masa mendatang. Para pemimpin Timor-Leste—termasuk Xanana Gusmão dan José Ramos-Horta—berpandangan serupa, dan mengusulkan perlunya referendum mengenai kemerdekaan setelah sekian tahun otonomi di bawah kekuasaan Indonesia. Terlepas dari perbedaan pandangan itu, semua pihak setuju untuk melanjutkan pembahasan mengenai usulan otonomi tersebut.

Di Timor-Leste, mundurnya Soeharto menggairahkan CNRT, Falintil, dan pendukung kemerdekaan lainnya. Ribuan orang turun ke jalan-jalan untuk memperlihatkan keinginan mereka untuk merdeka, dan menentang usulan 'otonomi'. Kebanyakan sikap ini diungkapkan dengan cara damai, namun ada juga yang tidak. Pada November 1998 pasukan Falintil menyerang dan membunuh prajurit TNI di Alas, Kabupaten Manufahi. Sikap mendukung kemerdekaan yang terbuka dan serangan di Alas mulai membuat orang Indonesia dan Timor-Leste yang mendukung berlanjutnya kekuasaan Indonesia menjadi gelisah. Serangan di Alas dibalas dengan keras oleh pasukan TNI, di mana sekurangnya lebih daripada satu lusin penduduk sipil tewas (lihat ringkasan kabupaten: Manufahi). Pada masa ini pula, dimulailah mobilisasi kelompok-kelompok milisi baru.

Dengan latar seperti ini, pada 27 Januari 1999 Presiden Habibie secara tak terduga mengumumkan bahwa rakyat Timor-Leste akan diberi kesempatan mengungkapkan pandangan mereka mengenai masa depan politik wilayah itu.* Saat memperjelas kebijakan baru itu, Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengatakan bahwa rakyat

* Pengumuman awal disampaikan pada 27 Januari 1999 oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah. *Kompas*, 28 Januari 1999.

Timor-Leste akan ditanya apakah mereka menerima atau menolak usulan 'otonomi' di bawah kekuasaan Indonesia. Jika mereka menolak, katanya, Indonesia akan keluar dan Timor-Leste akan berdiri sendiri.

Keputusan ini tampaknya membuat semua pihak terkejut, termasuk mereka yang mendesak adanya penyesuaian kebijakan—terutama Perdana Menteri Australia John Howard yang pada Desember 1998 mengusulkan kepada Habibie suatu penentuan nasib sendiri setelah sekian tahun otonomi di bawah kekuasaan Indonesia. Keputusan itu juga mengejutkan bagi angkatan bersenjata Indonesia yang besar kekuasaannya. Pemeliharaan 'persatuan nasional' dengan segala cara telah lama menjadi inti dari ajaran militer Indonesia, dan para perwira yang paling senior jelas menentang kemerdekaan Timor-Leste.

Para pemimpin Angkatan Darat rupanya tidak menentang usulan Habibie dalam kabinet, tetapi tidak berarti bahwa mereka mendukungnya. Justru, seperti dibahas secara terperinci dalam bagian lain laporan ini, ada bukti bahwa perwira-perwira militer yang masih aktif dan sudah pensiun saat itu mulai menyusun rencana untuk menggagalkan proses itu, atau, jika itu tidak mungkin dilakukan, menjamin kemenangan opsi pro-otonomi. Meningkatnya mobilisasi kekuatan milisi pada akhir 1998 dan awal 1999 lebih daripada sekadar kebetulan.

UNAMET dan Jajak Pendapat

Pengumuman Indonesia pada 27 Januari 1999 itu juga mengubah kerangka acuan untuk kelanjutan perundingan yang disponsori oleh PBB. Fokusnya mulai berubah dari perincian paket 'otonomi', ke cara-cara menghimpun pendapat rakyat Timor-Leste mengenai status politik wilayah itu. Pergeseran itu meletakkan dasar bagi keterlibatan langsung PBB dalam menyelenggarakan pemungutan suara mengenai masa depan politik Timor-Leste.

Hal yang mengejutkan bagi para perunding PBB dan Portugal, pada Maret 1999 Indonesia siap menerima usulan tentang pemungutan suara secara langsung, walaupun menolak penggunaan istilah 'referendum'. Setelah perubahan ini, perundingan dengan cepat mengarah pada perumusan serangkaian kesepakatan yang dikenal dengan sebutan Kesepakatan 5 Mei, yang ditandatangani oleh Indonesia, Portugal, dan Sekretaris Jenderal PBB. Kesepakatan itu menguraikan kerangka konstitusional bagi status Timor-Leste di masa mendatang, dan memberi kepercayaan kepada PBB untuk menyelenggarakan 'Konsultasi Rakyat' di Timor-Leste mengenai usulan tersebut.[*]

* Isi selengkapnya dari kesepakatan itu terdapat dalam *Report of the Secretary-General* (A/53/951-S/1999/513), 5 Mei 1999. Laporan itu berisi "Annex I: Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor" (kesepakatan utama) yang padanya dilampirkan "A Constitutional Framework for a Special Autonomy for East Timor" (proposal otonomi); "Annex II: Agreement Regarding the Modalities for the Popular Consultation of the East Timorese Through a Direct Ballot" (kesepakatan tentang pelaksanaan); dan "Annex III: East Timor Popular Consultation" (kesepakatan keamanan).

Kesepakatan utama, yang ditandatangani Indonesia dan Portugal serta disaksikan oleh PBB, menyatakan bahwa rakyat Timor-Leste akan ditanya apakah mereka menerima atau menolak paket otonomi. Penolakan paket itu, seperti tertera dengan jelas dalam kesepakatan tersebut, akan menempatkan Timor-Leste dalam jalur menuju kemerdekaan. Kedua pilihan pada pemungutan suara itu dirumuskan sebagai berikut: "Apakah Anda *menerima* usulan otonomi khusus bagi Timor-Leste dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?" atau "Apakah Anda *menolak* usulan otonomi khusus bagi Timor-Leste, yang akan membawa Timor-Leste berpisah dari Indonesia?" Terlepas dari adanya kekhawatiran bahwa rumusan seperti itu akan menimbulkan kebingungan, bagian kesepakatan ini mendapat sambutan luas.

Kesepakatan mengenai keamanan—yang ditandatangani Indonesia, Portugal, dan PBB—jauh lebih kontroversial karena menempatkan tanggung jawab pemeliharaan keamanan dan ketertiban selama dan sesudah Konsultasi Rakyat di tangan aparat keamanan Indonesia, dan khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kontingen PBB di Timor-Leste akan mencakup sebanyak 300 orang Polisi Sipil (Civpol – Civilian Police), tetapi hanya dalam kapasitas sebagai penasihat dan tidak akan membawa senjata. Kesepakatan ini menekankan tanggung jawab pihak berwenang Indonesia dalam menjamin suasana yang bebas dari kekerasan dan intimidasi serta kondusif bagi pelaksanaan Konsultasi Rakyat. Kesepakatan ini juga menekankan bahwa netralitas dan ketidakberpihakan mutlak dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri sangat diperlukan dalam hal ini.

Terlepas dari ketentuan itu, potensi bahaya dari kesepakatan keamanan itu tidak luput dari perhatian para pengamat luar, maupun dari mereka yang terlibat dalam perundingan mengenainya.[*] Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan jelas sangat khawatir mengenai kesepakatan itu dan karena itu dalam sebuah memorandum, yang diserahkannya kepada pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan tersebut, ia menjabarkan sejumlah kriteria yang digunakannya untuk menilai apakah situasi keamanan dapat diterima atau tidak.[†] Kriteria ini mencakup pelarangan segera terhadap pertemuan umum oleh kelompok bersenjata, penangkapan dan penghukuman segera terhadap mereka yang memicu atau mengancam penggunaan kekerasan, dan penarikan pasukan militer Indonesia. Ia juga mengatakan dengan jelas bahwa ia akan menghentikan proses jika kriteria tersebut tidak dipenuhi.

Dengan jaminan yang rentan itu, pada akhir Mei 1999 PBB mulai merekrut dan menempatkan personelnya di Timor-Leste dengan tujuan menyelenggarakan referendum pada awal Agustus. Bendera PBB dinaikkan di muka markas misi PBB di Dili pada 4 Juni, dan seminggu kemudian, pada 11 Juni, Dewan Keamanan mendirikan United Nations Mission in East Timor (Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste), yang lebih dikenal dengan sebutan UNAMET.

* Tentang perundingan-perundingan yang berlangsung, lihat Tamrat Samuel, "East Timor: The Path to Self-Determination," dalam Chandra Lekha Sriram dan Karin Wermester, penyunting, *From Promise to Practice: Strengthening UN Capacities for the Prevention of Violent Conflict*, Boulder: Lynne Reiner, 2003.

† Kriteria tersebut sesungguhnya telah diuraikan dalam surat dari Sekretaris Jenderal PBB kepada Presiden Indonesia Habibie, tetapi ketika Menteri Luar Negeri Alatas menolak menerima surat itu, surat itu diserahkan kepada kedua belah pihak dalam bentuk memorandum.

Misi itu dipimpin oleh Ian Martin, yang secara resmi menyandang jabatan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB (SRSG – Special Representative of the Secretary-General). Komponen utama UNAMET adalah: Polisi Sipil (Civpol), Perwira Militer Penghubung (MLO – Military Liaison Officers), Urusan Pemilihan, Urusan Politik, Keamanan, dan Administrasi. Di markas PBB di New York, operasi UNAMET dikoordinasikan dan diawasi oleh Departemen Urusan Politik. Hubungan diplomatik tingkat tinggi dengan pihak Indonesia ditangani oleh Duta Besar Jamsheed Marker, yang telah menjadi Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB untuk Timor-Leste sejak 1997.

UNAMET membuka markasnya di ibukota Timor-Leste, Dili, dan delapan kantor daerah untuk menjangkau 13 distrik administratif (kabupaten) di wilayah itu. Petugas ditempatkan atau secara teratur mengunjungi sebagian besar subdistrik (kecamatan) dan desa di wilayah itu, untuk menyelenggarakan pendidikan pemilih, mendaftar para pemilih, memantau situasi politik dan hak asasi manusia, memberi saran kepada dan berhubungan dengan pasukan-pasukan Polri dan pihak TNI mengenai masalah keamanan, dan akhirnya melaksanakan pemungutan suara itu sendiri.

Selain urusan politik, logistik, dan administratif yang penting, urusan UNAMET yang paling penting adalah merancang dan menjalankan sistem pendaftaran pemilih yang bisa dipercaya dalam kerangka waktu yang begitu ketat yang tertera dalam Kesepakatan 5 Mei. Pekerjaan itu dilakukan dengan sangat cepat oleh Kantor Urusan Pemilihan UNAMET. Namun pada 22 Juni Sekretaris Jenderal PBB mengumumkan penundaan batas pendaftaran (dan juga pemungutan suara) selama tiga minggu karena alasan operasional dan keamanan. Kekhawatiran mengenai masalah keamanan, dan khususnya terus berlanjutnya kekerasan oleh milisi pro-Indonesia, berakibat penundaan lagi selama tiga hari pada pertengahan Juli, dan juga adanya kemungkinan untuk menunda lagi, dan bahkan membatalkan, jika situasi tidak berubah secara substansial semasa pendaftaran.

Akan tetapi terlepas dari berbagai kekhawatiran ini, pendaftaran pemilih dimulai pada 16 Juli dan terus berjalan tanpa jeda melewati tanggal 25 Juli yang merupakan titik tengah, berdasarkan pemahaman bahwa pihak berwenang Indonesia akan terus memperbaiki suasana keamanan dan keadaan pengungsi dalam negeri (IDPs – *Internally Displaced Persons*). Pendaftaran berakhir 6 Agustus, setelah diundurkan selama dua hari dari rencana 20 hari karena desakan dari sebagian pejabat Indonesia dan sejumlah pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia. Terlepas dari ancaman terus-menerus dan aksi kekerasan oleh milisi pro-Indonesia selama periode ini, 446.666 orang mendaftar untuk memilih, suatu jumlah yang secara substansial melampaui perkiraan sebelumnya.[*]

Pendaftaran diikuti dengan periode kampanye resmi yang berlangsung sekitar dua minggu, dari 14 sampai 26 Agustus. Kampanye itu diatur oleh suatu peraturan

* Jumlah itu mencakup 433.576 orang di Timor Timur dan 13.090 orang yang mendaftar di pusat-pusat pendaftaran di luar wilayah ini.

yang dibuat di bawah pengawasan UNAMET dan diawasi oleh komite-komite yang beranggotakan wakil-wakil dari masing-masing pihak. Selama periode ini, UNAMET juga bekerja agar pasukan prokemerdekaan dan pro-Indonesia "meletakkan senjata". Namun terlepas dari usaha-usaha semacam itu, periode kampanye terus diwarnai tindak kekerasan yang serius, terutama dari pihak pro-otonomi. Pada hari terakhir kampanye pro-otonomi misalnya, sekurangnya delapan orang tewas dibunuh di kota Dili saja (lihat ringkasan kabupaten: Dili).

Sebagai usaha membatasi atau menghalangi konflik yang berdarah, pada Agustus Xanana Gusmão memulai tindakan 'kantonisasi' (*cantonment*) sepihak pasukan-pasukan prokemerdekaan. Pada 12 Agustus, Falintil sudah menarik pasukannya ke empat tempat kantonisasi dan memberikan komitmen bahwa mereka akan tetap tinggal di sana selama proses pemungutan suara. Kelompok milisi pro-Indonesia yang didukung oleh pihak berwenang Indonesia menolak mengikuti contoh itu. Antara 16 dan 19 Agustus, milisi melakukan serangkaian 'upacara kantonisasi', di mana mereka menyerahkan sejumlah senjata, samasekali bukan semuanya, kepada kepolisian dan militer Indonesia. Namun dalam kenyataannya milisi terus beroperasi tanpa halangan, dan senjata-senjata yang mereka serahkan kemudian dikembalikan kepada mereka.

Terlepas dari kekhawatiran akan adanya kekerasan yang serius, pemungutan suara berjalan seperti direncanakan pada 30 Agustus. Mengejutkan bagi banyak pihak, pada hari itu hanya terjadi sedikit tindak kekerasan, dan 98,6% pemilih memberikan suara. Namun, bisa disesalkan bahwa kedamaian itu tidak berlangsung lama. Begitu pemungutan suara selesai dilakukan, milisi mulai menyerang orang-orang yang mereka anggap pendukung kemerdekaan. Korban-korban pertama serangan ini termasuk staf lokal UNAMET yang dibunuh ketika membawa kotak suara dari tempat pemungutan suara ke kendaraan mereka.

Sekretaris Jenderal PBB mengumumkan hasil pemungutan suara itu pada pagi hari 4 September. Mayoritas pemilih (78,5%) memberikan suara menolak otonomi dan memilih kemerdekaan. Dalam beberapa jam setelah pengumuman, milisi pro-otonomi dan prajurit-prajurit TNI turun ke jalan dan mulai melancarkan kekerasan yang tingkat kekejamannya belum pernah terjadi sebelumnya. Rumah-rumah pribadi, bangunan-bangunan umum, dan infrastruktur dibakar serta dihancurkan secara sistematis. Lebih daripada 400.000 orang dipaksa meninggalkan rumah mereka dan lari ke bukit-bukit, atau dipindahkan secara paksa oleh TNI dan unit-unit milisi ke luar Timor-Leste.

Peristiwa-peristiwa ini terjadi bersamaan dengan dua perubahan penting dalam rantai komando di Timor-Leste. Perubahan pertama terjadi pada 4 September, ketika TNI mengambil alih tanggung jawab atas semua operasi keamanan di wilayah itu, dan secara resmi menggeser Polri dan pihak berwenang sipil ke peran pendukung. Komando baru ini dinamakan Ko-ops Nusra (Komando Operasi TNI Nusa Tenggara). Ko-ops Nusra dipimpin oleh Mayor Jenderal Adam Damiri, Panglima Kodam IX Udayana yang membawahi Timor-Leste.

Perubahan kedua terjadi saat Presiden Habibie mengumumkan status Darurat Militer di wilayah itu, yang mulai berlaku tepat tengah malam 7 September. Setelah tanggal itu, semua operasi militer, kepolisian, dan sipil di Timor-Leste secara resmi berada di bawah kendali Penguasa Darurat Militer, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, yang bertanggung jawab langsung pada Presiden Habibie sebagai Panglima Tertinggi.[*]

Walaupun ada perubahan-perubahan seperti itu, kekerasan terus meningkat. Akibatnya misi UNAMET terpaksa mengungsikan stafnya keluar dari Timor-Leste pada dini hari 14 September 1999. Sekitar 1.400 penduduk sipil Timor-Leste yang mencari perlindungan di markas PBB itu juga diangkut dengan pesawat ke tempat yang aman. Kekerasan dan penghancuran semakin tidak terkendali setelah kepergian misi, meskipun ada seruan berulang-kali kepada pemerintah Indonesia untuk mengendalikan keadaan dan menjalankan kewajibannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Pada 12 September pemerintah Indonesia secara resmi menyetujui kehadiran pasukan penengah internasional di Timor-Leste. Pasukan ini yang dikenal dengan sebutan International Force for East Timor (INTERFET – Pasukan Internasional untuk Timor-Leste) mulai diturunkan pada 20 September dan langsung mulai menegakkan hukum dan ketertiban serta membantu pembagian bantuan kemanusiaan. Pada Oktober 1999 DPR di Indonesia mencabut undang-undang yang menyatakan Timor Timur sebagai provinsi Indonesia, dan pada akhir bulan yang sama, pasukan Indonesia ditarik seluruhnya dari wilayah tersebut.

Indonesia: kekuasaan dan strategi

Terlepas dari berbagai perubahan dramatis yang terjadi pada 1998-1999, tanggapan resmi Indonesia terhadap prospek pemungutan suara di Timor-Leste dibentuk oleh sikap dan struktur kekuasaan politik dan militer, yang sudah mapan selama sekurangnya tiga dasawarsa. Sikap dan struktur kekuasaan ini menjadi latar dan memperlancar terjadinya pelanggaran sistematis hak asasi manusia pada 1999.

Lembaga kunci di dalam struktur kekuasaan ini adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia). Sekalipun ada tantangan terhadap wewenangnya, mengiringi kejatuhan Soeharto, pada 1999 TNI tetap merupakan lembaga politik terkuat di Indonesia dan pengaruhnya amat besar di Timor-Leste. Kekuasaan unik TNI, dan segi-segi tertentu dari doktrin, struktur,

* Walaupun secara resmi bertugas sejak 7 September, tampaknya Mayor Jenderal Syahnakri tidak memegang komando efektif di Timor Timur sampai beberapa hari kemudian. Ketika Kepala Misi UNAMET Ian Martin pergi ke markas Korem pada malam hari pada 8 September, misalnya, ia mendapati Mayor Jenderal Damiri masih bertugas. Satu sumber yang bisa dipercaya mengatakan kepada Martin bahwa Kiki Syahnakri tidak mengambil komando efektif sebelum perintah tertulisnya datang dari Jakarta beberapa saat setelah 8 September. Komunikasi pribadi dengan Ian Martin, tanggal 1 Juni 2003. Menurut keterangan lain, Kiki Syahnakri mengambil komando efektif pada pukul 11 malam tanggal 9 September. Lihat Don Greenlees dan Robert Garran, *Deliverance: The Inside Story of East Timor's Fight for Freedom*, Crow's Nest, NSW: Allen & Unwin, 2002, halaman 229.

serta prosedur operasionalnya, secara bersama-sama menjelaskan pola pelanggaran hak asasi manusia pada 1999. Khususnya yang terpenting adalah doktrin 'pertahanan rakyat semesta', struktur komando teritorial, dominasi pasukan khusus serta unit intelijen, dan kecenderungannya memobilisasi pasukan-pasukan milisi sebagai perpanjangan tangan.

Tetapi, strategi Indonesia untuk memenangkan pilihan 'otonomi' bukanlah semata-mata strategi militer atau paramiliter. Strategi itu juga bersandar pada sejumlah lembaga lain, termasuk Polri dan aparatus pemerintah sipil. Berada di bawah kendali TNI, dan karena itu tidak dapat atau tidak mau menentang strateginya, Polri menyumbang pada terjadinya kekerasan, terutama karena gagal mengambil tindakan efektif untuk mencegahnya. Demikian pula, aparatus pemerintah sipil turut berkontribusi dengan melaksanakan kampanye resmi untuk 'menyosialisasikan' pilihan otonomi. Akhirnya, strategi ini bermuara pada mobilisasi kelompok-kelompok politik baru pro-Indonesia, seperti FPDK (Front Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan) dan BRTT (Barisan Rakyat Timor Timur) dan berbagai badan khusus pemerintah, yang bersama-sama menjadi selubung bagi upaya resmi untuk memengaruhi hasil pemungutan suara dengan cara-cara damai maupun kekerasan.

Tentara Nasional Indonesia

Dalam Kesepakatan 5 Mei, Tentara Nasional Indonesia (TNI) diharuskan bersikap samasekali netral dalam kaitannya dengan Konsultasi Rakyat. Namun, karena kekuasaan politik TNI yang begitu dalam di Indonesia maupun Timor-Leste, pola perilaku kekuatan milisi yang sudah berlangsung lama, dan perasaan berkeberatan para perwira dan prajurit mengenai masalah ini, keharusan tersebut sesungguhnya tidak masuk akal.

TNI tidak pernah benar-benar 'profesional' dalam arti menjadi lembaga apolitis yang menjalankan perintah dari pimpinan politik sipil. Sejak kelahirannya dari perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan dari penguasa kolonial Belanda (1945-1949), angkatan bersenjata Indonesia—dan khususnya Angkatan Darat—selalu berperan penting dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi negara. Kekuasaan politik militer menjadi semakin kuat bercokol selama rezim Orde Baru Presiden Soeharto (1965-1998). Bahkan setelah Soeharto mundur pada 1998, TNI tetap menjadi lembaga yang paling kuat di seluruh negeri dan di Timor-Leste.

Di jantung kekuasaan TNI, baik di Indonesia maupun Timor-Leste, terdapat ciri-ciri unik dalam struktur komandonya. Salah satunya adalah organisasi teritorialnya. Pada 1999, sekitar dua per tiga kekuatan TNI tersebar di seluruh negeri dalam suatu struktur yang turun sampai ke tingkat desa. Wilayah seluruh negeri dibagi ke dalam sepuluh Komando Daerah Militer (Kodam). Setiap Kodam kemudian dibagi ke dalam unit-unit komando geografis yang lebih kecil yang dikenal dengan nama Komando Resor Militer (Korem); Komando Distrik Militer (Kodim); dan Komando Rayon Militer (Koramil). Di tingkat desa, TNI diwakili oleh seorang Bintara Pembina Desa atau Babinsa.

Pada 1999 Timor-Leste berada di bawah kewenangan Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana, yang bermarkas di Bali. Kodam IX dipimpin oleh Mayor Jenderal Adam

Damiri. Timor-Leste sendiri dikendalikan oleh Komando Resor Militer (Korem) 164/ Wiradharma yang dipimpin oleh Kolonel Tono Suratman dan setelah 13 Agustus, oleh Kolonel Noer Muis. Di bawah Korem, Timor-Leste (atau Timor Timur) dibagi menjadi 13 Komando Distrik Militer (Kodim 1627 sampai 1639), yang masing-masing dipimpin oleh seorang Komandan Kodim (Dandim), yang biasanya berpangkat Letnan Kolonel. Kodim lebih lanjut dibagi menjadi sekian Komando Rayon Militer (Koramil), yang masing-masing dipimpin oleh seorang Komandan Koramil (Danramil).

Melalui struktur komando militer teritorial inilah kebijakan dasar militer Indonesia dijalankan di Timor-Leste. Strategi militer Indonesia pada 1999 didasarkan pada suatu rencana strategis yang disebut "Operasi Tatoli IV Rem 164/WD."* Rencana-rencana operasional lain yang menjadi landasan kegiatan militer di Timor-Leste adalah rencana operasi Korem untuk referendum, yakni "Operasi Wira Dharma-99"; rencana evakuasi pascapemungutan-suara dari Kodam yang disebut "Operasi Cabut Kodam IX/UDY"; dan "Rencana Kontinjensi 1999-2000" yang disusun oleh markas besar TNI untuk menghadapi kemungkinan kekalahan Indonesia dalam Konsultasi Rakyat.†

Sistem komando militer teritorial ini berjalan sejajar dengan struktur otoritas politik sipil sampai ke tingkat desa—Komandan Korem membayangi Gubernur; 13 Komandan Kodim mengawasi 13 Bupati; 62 Komandan Koramil mengawasi 62 Camat; sementara 442 Babinsa bekerja dengan para Kepala Desa. Dengan begini, komando militer teritorial secara efektif menjamin keterlibatan dan dominasi militer dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pada setiap tingkat. Jadi, walaupun pejabat sipil seperti gubernur dan bupati secara resmi memiliki wewenang, pada akhirnya para perwira militer di dalam komando teritoriallah yang memegang kekuasaan terbesar.

Di samping komando teritorial yang menjadi ciri kekuasaan Indonesia di manapun juga, ada sejumlah ciri unik dalam kekuasaan militer di Timor-Leste pada 1999, yang berasal dari sejarahnya yang lama sebagai daerah operasi militer yang aktif. Wilayah itu misalnya, memiliki dua batalion infanteri 'organik' yang bermarkas tetap di Timor-Leste. Batalion 744 yang bermarkas di Dili dan Batalion 745 yang bermarkas di Los Palos, dibentuk akhir dasawarsa 1970-an, tidak lama setelah invasi Indonesia. Walaupun banyak prajurit kedua batalion ini adalah orang Timor-Leste, para perwira umumnya adalah orang Indonesia. Kedua unit ini secara resmi berada di bawah Komandan Korem.‡

* Nama operasi menunjukkan bahwa operasi tersebut dikendalikan oleh Komandan Korem, sementara angka 'IV' menunjukkan bahwa tahun 1999 adalah tahun keempat dari operasi yang bersangkutan. Lihat: Dan Sat Gas Pam Dili kepada Danrem 164/WD dan lain-lain. Telegram Rahasia STR/199/1999, 24 Agustus 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #40).

† Dalam beberapa dokumen TNI, 'Rencana Kontinjensi' ini disebut "Rencana Tindakan Menghadapi Kontinjensi Purna Penentuan Pendapat di Timtim [Jika] Opsi-1 Gagal." Lihat: Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima TNI (Jenderal Wiranto), "Direktif Panglima TNI, Nomor: 02/P/IX/1999, tentang Komando Penguasa Darurat Militer Wilayah Timor Timur," [8] September 1999 (Koleksi HRU, Doc. TNI #9). Untuk pembahasan lebih lanjut tentang berbagai rencana pascapemungutan suara lihat Bab 5.

‡ Lihat: Dan Yonif 744/SYB (Mayor Yakraman Yagus) kepada Danki Yonif 744/SYB dan lain-lain. Telegram Rahasia No. TR/74/1999, 30 Januari 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #5).

Kesatuan-kesatuan pasukan 'teritorial' dan 'organik' ini dilengkapi dengan pasukan tempur yang didatangkan dari tempat-tempat lain untuk melaksanakan pergiliran tugas di Timor-Leste. Jumlah pasukan tempur yang ditempatkan di Timor-Leste pada satu waktu selalu naik-turun, tetapi pada paruh pertama 1999 setidaknya ada sepuluh batalion tempur, yang membuat jumlah keseluruhan kekuatan pasukan TNI di wilayah itu melebihi 15.000 orang. Jumlah batalion tempur, dan keseluruhan kekuatan pasukan, meningkat secara substansial setelah penetapan keadaan Darurat Militer di Timor-Leste oleh Presiden pada 7 September 1999.

Kekuasaan militer di Timor-Leste dan strategi pemerintah pada 1999 juga mengandalkan dua kesatuan pasukan elite kontra-gerilya: Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad).[*] Penting diperhatikan, kedua kesatuan ini bekerja di luar rantai komando teritorial yang normal, dan sering tanpa sepengetahuan para perwira teritorial.

Kostrad yang dibentuk sebelum kudeta 1965, berkembang menjadi pasukan pemukul yang kuat, dengan unit-unit yang ditugaskan menghadapi ancaman yang dianggap serius terhadap keamanan dalam negeri di Aceh, Papua, Timor-Leste, dan tempat-tempat lainnya. Terlepas dari reputasinya karena profesionalisme dan *esprit de corps*, unit-unit Kostrad ini dituduh melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia. Tetapi dengan pengumuman keadaan Darurat Militer di Timor-Leste, pada 7 September 1999, pasukan-pasukan Kostrad inilah yang diterjunkan untuk memulihkan ketertiban.[†]

Patut dicatat bahwa banyak pejabat tinggi TNI, yang bertanggung jawab komando di Timor-Leste pada 1999, memiliki latar belakang Kostrad. Mereka ini mencakup Panglima TNI Jenderal Wiranto; Kepala Staf Teritorial TNI Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono; Kepala Badan Intelijen ABRI/Badan Intelijen Strategis (BIA/BAIS) Letnan Jenderal Tyasno Sudarto; Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Sugiono; Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat yang kemudian menjadi Penguasa Darurat Militer di Timor Timur, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri; Asisten Operasi TNI Mayor Jenderal Endriartono Sutarto; dan Panglima Daerah Militer IX, Mayjen Adam Damiri.[‡]

Seperti Kostrad, Kopassus punya reputasi keahlian dalam metode-metode perang tidak konvensional, tetapi juga terkenal karena kebrutalannya dan penyalahgunaan kekuasaan, terutama di Timor-Leste. Pada awal 1999 Kopassus membentuk

* Untuk perincian sejarah, kekuatan, dan misi Kopassus dan Kostrad, lihat Lowry, *Indonesian Defence Policy*, halaman 40, 81-84, 93.

† Satu batalion penuh Kostrad ditempatkan di Dili pada saat itu, dan satu kompi penuh dari kesatuan tersebut ditugaskan melindungi markas UNAMET. Komandan pasukan Kostrad yang ditempatkan di UNAMET adalah Kapten Catur. Lihat: Dandim 1627/Dili (Letnan Kolonel Soedjarwo), "Data Kekuatan Pengamanan UNAMET dan Objek Vital," September 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #45). Panglima Kostrad pada 1999 adalah Letnan Jenderal Djamari Chaniago.

‡ Untuk perincian latar belakang karier dari para perwira ini lihat Hamish McDonald et al., *Masters of Terror*, Canberra: Strategic and Defence Studies Centre, Australian National University (Canberra Paper #145), 2002. Lihat juga di: http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm

sebuah satuan tugas khusus di Timor-Leste, yang dikenal sebagai Satgas Tribuana VIII di bawah pimpinan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat.[*] Satgas Tribuana VIII ini mengendalikan jaringan perwira dan prajurit yang disebar dalam kelompok-kelompok kecil di seluruh wilayah.[†] Walaupun Kopassus memiliki sejumlah pos yang tetap, kebanyakan perwira dan prajurit Kopassus beroperasi secara tertutup, sering dengan berpakaian sipil, dan terlibat terutama dalam pengumpulan informasi intelijen dan operasi kontra-intelijen. Ada dugaan yang bisa dipercaya, yang akan dibahas lebih terperinci dalam bagian lain laporan ini, bahwa sejumlah anggota milisi sesungguhnya adalah prajurit Kopassus yang sangat terlatih, yang bertugas memimpin anggota-anggota milisi lokal.

Di samping mereka yang secara aktif bertugas dalam kesatuan-kesatuan Kopassus di Timor-Leste, sejumlah pejabat senior militer dengan tanggung jawab komando di Timor-Leste memiliki latar belakang Kopassus. Mereka itu mencakup: Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagyo Hadisiswoyo; Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin; Wakil Asisten Pengamanan Kepala Staf TNI (dan kemudian Wakil Panglima Darurat Militer di Timor Timur) Brigadir Jenderal Amirul Isnaeni; Kepala Staf Kodam IX Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon; Komandan Korem Timor Timur sampai pertengahan Agustus 1999, Kolonel Tono Suratman; dan penggantinya, Kolonel Noer Muis.[‡]

Banyak menteri kabinet yang memegang tanggung jawab komando di Timor-Leste pada 1999 juga punya kaitan erat dengan Kopassus. Mereka mencakup: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal (Purnawirawan) Feisal Tanjung; Menteri Transmigrasi dan Permukiman, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Hendropriyono; Menteri Penerangan Letnan Jenderal (Purnawirawan) Yunus Yosfiah, dan seorang penasihat militer Presiden Habibie, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Sintong Panjaitan.[§]

Berbagai pasukan tempur yang ditempatkan di Timor-Leste, termasuk Kopassus dan Kostrad, tampaknya memiliki struktur komando tersendiri yang terkait

* Berbicara kepada penyelidik Indonesia pada September 2000, Letnan Kolonel Sudrajat mengatakan bahwa dirinya menerima perintah penugasan ke Timor-Leste dari Komandan Kopassus pada 27 Januari 1999. Lihat Yayat Sudrajat, pernyataan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Tim Penyelidik Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Timor Timur, 12 dan 20 September 1999. Terjemahan (Koleksi SCU, Doc #C).

† Dalam pernyataan kepada para penyelidik Indonesia pada September 2000 Komandan Satgas Tribuana VIII, Letnan Kolonel Sudrajat, menyebutkan nama para komandan Kopassus di 8 dari 13 Kabupaten, yaitu: Letnan Rahmat Zulkarnaen di Lautém; Kapten Alfi Shari Lubis di Baucau; Letnan Aminton Manurung di Viqueque; Kapten Sugiyono di Manufahi; Sersan Tukiran di Ainaro; Letnan Masgen Abas di Ermera; Sersan Mulyono di Bobonaro; dan Letnan Kawan di Dili. Lihat: pernyataan Yayat Sudrajat, Koleksi SCU, Doc #C. Menurut sebuah laporan media tentang intelijen Australia yang bocor, pada September 1999 Kopassus telah membentuk regu pembunuh khusus yang disebut 'Kiper-9' untuk memburu dan menangkap para pemimpin prokemerdekaan dan tokoh-tokoh pro-Indonesia yang menyeberang. Lihat Hamish McDonald, "Australia's bloody East Timor secret," dan "Silence over crime against humanity," *Sydney Morning Herald*, 14 Maret 2002.

‡ Lihat *Masters of Terror*: http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm

§ Lihat *Masters of Terror*: http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm

dengan fungsi tempur mereka. Tidak seperti pasukan teritorial yang dibagi menjadi 13 Kodim, pasukan tempur yang ditempatkan di Timor-Leste dikelompokkan menjadi dua Komando Sektor, yakni "Sektor A" yang meliputi bagian timur wilayah itu, dan "Sektor B" yang meliputi kabupaten-kabupaten di bagian barat.[*] Masing-masing sektor dipimpin oleh seorang perwira berpangkat kolonel. Penting diperhatikan, semua komandan sektor dan wakil-wakil mereka berlatarbelakang Kopassus atau Kostrad, dan intelijen militer.[†] Struktur komando sektor ini adalah warisan sejarah panjang Timor-Leste sebagai daerah operasi militer, dan jelas dipertahankan untuk mempermudah operasi kontra-gerilya di sana. Ada indikasi bahwa komando sektor ini berperan penting dalam memobilisasi dan mengoordinasi milisi-milisi pada 1999.

Terakhir, kekuasaan dan strategi militer di Timor-Leste bersandar pada jaringan intelijen yang tersebar di mana-mana. Para perwira dan unit-unit intelijen militer berperan penting pada setiap jenjang komando teritorial (Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil). Akan tetapi, para pelaksana operasi intelijen yang normal ini dilengkapi dan sering digantikan oleh "Satuan Tugas Intelijen" yang umumnya disebut SGI. Pada 1999, SGI tersebar di seluruh wilayah tetapi kebanyakan pekerjaannya—termasuk mobilisasi dan koordinasi kelompok-kelompok milisi—bersifat tertutup.[‡] Resminya SGI berada di bawah wewenang Korem.[§] Namun, pada praktiknya, SGI tampaknya dikendalikan dan dikoordinasikan oleh perwira-perwira Kopassus. Misalnya, komandan SGI pada 1999 adalah Letnan Kolonel Yayat Sudrajat, yang juga menjadi komandan unit Kopassus di Timor-Leste, Satgas Tribuana VIII.[¶]

* Sektor Tempur A meliputi Kabupaten Baucau, Viqueque, Lautém, dan Manatuto. Sektor B meliputi Kabupaten Aileu, Ainaro, Bobonaro, Covalima, Ermera, Manufahi, dan Oecussi.

† Komandan Sektor A (sampai 21 Juni 1999) adalah Kolonel Sunarko, yang berlatarbelakang Kopassus dan intelijen militer. Ia digantikan oleh Kolonel Irwan Kusnadi, yang kariernya dilalui dalam Kopassus dan Kostrad. Sektor B dipimpin oleh Kolonel Tatang Zaenuddin, yang berlatarbelakang Kopassus dan intelijen militer. Wakil Komandan Sektor B adalah Letnan Kolonel Nyus Rahasia, juga seorang perwira karier Kopassus. Beberapa dokumen menunjukkan bahwa Komandan Sektor A selama masa Keadaan Darurat pada September 1999 adalah Kolonel Gerhan Lantara.

‡ Salah satu pos SGI yang diketahui adalah 'Pos Nanggala-13' di Baucau. Sebuah daftar nama rahasia para anggota milisi Sera yang dibuat oleh pos tersebut pada Januari 1998, memperlihatkan hubungan lama antara SGI dan kelompok-kelompok milisi. Lihat: Komandan Pos Nanggala-13, Satuan Tugas Intelijen (Sersan Mudji Maulani), "Daftar Nama Nama Anggota Sera (Surwan) Kec. Baguia," 2 Januari 1998 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #2). Pos SGI yang lain adalah "Pos SGI Kresna 12" di Kecamatan Atsabe, Ermera. Komandan Pos tersebut, Amran Odhe, turut menandatangani sebuah dokumen yang memuat daftar nama 62 orang anggota milisi Aitarak di Desa Atudame, yang sekali lagi menegaskan hubungan antara SGI dan kelompok-kelompok milisi. Lihat: Kepala Desa Atudame, Danramil 04/Atsabe, Dan Pos SGI Kresna 12/Atsabe, dan lain-lain. "Daftar Nama-Nama Dari Markas Besar Komando Pasukan Aitarak Sektor B," 22 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #20).

§ Lihat: Kepala Bagian Intelijen (Kapten Sarengat) untuk Komandan Satuan Tugas Intelijen, Korem 164/WD kepada Koordinator Judi, mengenai "Surat Panggilan," 28 Mei 1998 (Koleksi SCU, Doc # 221).

¶ Pendahulu Letnan Kolonel Sudrajat sebagai Komandan SGI di Timor-Leste adalah Letnan Kolonel Wioyotomo Nugroho.

Setiap unit ini, dan khususnya SGI, memiliki jaringan mata-mata dan informan yang luas. Sistem ini memungkinkan angkatan bersenjata, khususnya Kopassus, dengan mudah melakukan pengintaian atau pengumpulan informasi terus-menerus, dan juga melancarkan operasi-operasi kontra-intelijen yang tertutup, termasuk menggalang kelompok-kelompok milisi.

Milisi

Salah satu unsur strategi pemerintah yang paling jelas dan memiliki dampak langsung bagi hak asasi manusia adalah penggalangan kelompok-kelompok milisi bersenjata untuk keperluan mempertahankan hubungan dengan Indonesia. Kelompok milisi sejak lama menjadi unsur integral dalam strategi kontrapemberontakan Indonesia di Timor-Leste maupun di tempat-tempat lain, sehingga penyebaran mereka yang tiba-tiba dengan kuat menunjukkan adanya keterlibatan militer.

Walau memiliki akar sejarah yang panjang, ada kelompok-kelompok yang baru digalang pada pertengahan 1998, tidak lama setelah Presiden Habibie mengumumkan pilihan 'otonomi' bagi Timor-Leste.[*] Berita tentang kelompok-kelompok milisi baru itu mulai mengalir ke luar negeri akhir 1998 ketika perundingan yang disponsori PBB mengenai otonomi khusus bagi Timor-Leste mulai menghangat. Saat Presiden Habibie mengumumkan bahwa orang Timor-Leste bebas memilih antara otonomi dan kemerdekaan pada akhir Januari 1999, aliran itu berubah menjadi banjir. Dalam beberapa bulan saja, lebih daripada dua lusin kelompok milisi dibentuk, dan mereka dengan cepat menjadi alat utama untuk menekan penduduk agar memilih otonomi. Mereka juga menjadi pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagian kelompok yang tampil pada saat itu sudah ada selama bertahun-tahun, seperti Halilintar di Bobonaro, Tim Saka dan Tim Sera di Baucau, dan Tim Alfa di Lautém. Akan tetapi lainnya adalah kelompok milisi baru, seperti Besi Merah Putih yang bermarkas di Liquiçá, Aitarak di Dili, Dadurus Merah Putih di Bobonaro, Mahidi di Ainaro, Laksaur di Covalima, AHI di Aileu, dan ABLAI di Manufahi (Lihat Tabel 3: Kelompok Milisi Pro-Indonesia di Timor-Leste, 1999).

Mencerminkan hubungan erat mereka dengan TNI, kelompok-kelompok ini menggunakan retorika dan cara organisasi militer. Mereka diorganisasikan dalam 'kompi' dan 'peleton' dan anggotanya disebut sebagai prajurit atau pejuang kemerdekaan. Markas dari salah satu kelompok yang paling keji, Aitarak, menggunakan nama "Komando Pasukan Aitarak".[†]

* Seorang mantan Sekretaris Jenderal Apodeti, Francisco Carvalho, dilaporkan memperlihatkan dokumen bertanggal 24 Juni 1998 kepada para jurnalis Australia yang dikatakan sebagai laporan Apodeti tentang suatu pertemuan dengan para perwira militer, dan pada pertemuan tersebut disusun rencana pembentukan pasukan milisi. Lihat ABC, *Four Corners*, "A License to Kill," 15 Maret 1999, transkripsi, halaman 11.

† Untuk perincian tentang struktur organisasi Aitarak, lihat: Wakil Panglima, Komando Pasukan Pejuang Integrasi (Eurico Guterres) kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Surat No. 55/SP/MK-AT/VI/1999, 30 Juni 1999 (Koleksi SCU, Doc #39).

Awal 1999 kelompok-kelompok milisi yang berbeda ini disatukan di bawah sebuah struktur bergaya militer, yang disebut Pasukan Pejuang Integrasi (PPI). PPI dipimpin oleh seorang tokoh lama pro-Indonesia, João Tavares, yang mendapat jabatan bergaya militer, 'Panglima'. Meniru lebih jauh organisasi militer, PPI terdiri atas tiga 'Komando Sektor', yang masing-masing dipimpin oleh seorang Wakil Panglima PPI.*

- Sektor A PPI meliputi kabupaten-kabupaten yang paling timur, yakni Baucau, Lautém, Viqueque, dan Manatuto, dan dipimpin oleh Joanico Cesario Belo, yang juga komandan milisi Tim Saka. Bintara Kopassus berpangkat Sersan Satu ini adalah anakbuah perwira Kopassus yang terkenal dan menantu Soeharto, Prabowo Subianto.†
- Sektor B yang mencakup kabupaten-kabupaten bagian tengah, Dili, Liquiçá, Ermera, dan Aileu, berada di bawah komando Eurico Guterres, yang juga menjadi komandan Aitarak. Laki-laki yang dulunya aktivis pendukung kemerdekaan ini, pada 1995 muncul sebagai ketua Gadapaksi, sebuah organisasi pemuda pro-Indonesia yang didirikan Kopassus dan ditugaskan mengganggu dan mengintimidasi anggota gerakan kemerdekaan.
- Sektor C yang meliputi kabupaten-kabupaten bagian barat, Bobonaro, Covalima, Ainaro, Manufahi, dan kantong Oecussi. Sektor ini dipimpin oleh Cancio Lopes de Carvalho, yang juga menjadi komandan kelompok milisi Mahidi. Carvalho punya hubungan erat dengan Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon, seorang perwira Kopassus yang pada 1999 menjadi Kepala Staf Kodam IX.

Tujuan resmi milisi mencerminkan suatu kekhawatiran mengenai hasil Konsultasi Rakyat, serta memperlihatkan pendekatan yang dogmatis dan sikap suka berperang. Misalnya, dalam sepucuk surat kepada komandan posnya tertanggal 30 Maret 1999, seorang anggota Aitarak mengungkapkan pandangannya tentang bulan-bulan yang akan datang:

> "Aitarak yang mempunyai kekuatan 400 personel ini akan menghancurkan semua ancaman pihak anti-integrasi... Kalau toh memang ada yang mau minta merdeka, silakan saja mereka merdeka sendiri, tapi merdeka itu pasti akan diakhiri dengan pertumpahan darah. [...] Karena ini adalah prinsip daripada berdirinya tim Aitarak yang dipimpin oleh Bapak Eurico Guterres ini."‡

* Sektor-sektor milisi yang berbeda dikemukakan secara ringkas dalam: Wakil Panglima, Komando Pasukan Pejuang Integrasi (Eurico Guterres) kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Surat No. 55/SP/MK-AT/VI/1999, 30 Juni 1999 (Koleksi SCU, Doc #39).

† Juga dikatakan bahwa Joanico adalah anak angkat seorang perwira karier Kopassus, Letnan Jenderal Luhut Panjaitan. Lihat Don Greenlees dan Robert Garran, *Deliverance: The Inside Story of East Timor's Fight for Freedom*, Crow's Nest, NSW: Allen & Unwin, 2002, halaman 132.

‡ Penulis surat ini adalah Mário Pinto da Costa. Lihat: Surat dari Mário Pinto da Costa kepada Komandan [Aitarak], 30 Maret 1999 (Koleksi SCU, Doc #262).

Para pejabat Indonesia menyatakan bahwa kelompok-kelompok milisi ini merupakan refleksi spontan dari dukungan penduduk lokal kepada integrasi, dan bahwa kekerasan merupakan akibat dari konflik antara orang Timor-Leste yang prokemerdekaan dengan yang prointegrasi. Karenanya, demikian menurut para pejabat Indonesia, lebih daripada sebelumnya TNI dan Polri sungguh-sungguh dibutuhkan untuk menjaga perdamaian. Sebagaimana yang akan dibahas secara terperinci dalam bab-bab selanjutnya, pernyataan tersebut menyembunyikan peran kunci TNI dalam menciptakan dan mendukung milisi yang melakukan kekerasan. Dengan demikian, hal tersebut memastikan pula bahwa hubungan TNI dengan milisi tetap utuh, dan bahwa pola sistematis pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari hubungan tersebut akan berlanjut tanpa halangan yang berarti.

Kepolisian Indonesia

Berdasarkan Kesepakatan 5 Mei, tugas memelihara keamanan selama Konsultasi Rakyat dipercayakan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tokoh kunci di lapangan di Timor-Leste adalah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kolonel Timbul Silaen. Di bawahnya terdapat 13 Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang masing-masing ada di setiap kabupaten di Timor-Leste; dan sejumlah besar Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek).

Sebagai bagian dari tanggungjawabnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban, pada Agustus 1999 Kepolisian Daerah (Polda) menyusun sebuah rencana terperinci yang disebut Operasi Hanoin Lorosae II yang mencakup rencana untuk evakuasi setelah terjadinya pemungutan suara.* Sebagian pengamat berpendapat bahwa rencana tersebut merupakan bukti bahwa kekerasan yang terjadi setelah pemungutan suara, dan khususnya pemindahan paksa penduduk sipil yang terjadi kemudian, telah direncanakan sebelumnya oleh para pejabat tingkat tertinggi. Namun penelaahan yang lebih teliti atas dokumen tersebut tidak mendukung kesimpulan tersebut. Seperti yang akan dibahas secara lebih mendalam pada Bab 5, apapun yang mungkin dikatakan orang tentang perilaku Polri, dokumen itu sendiri terbaca sebagai satu usaha untuk membuat rencana menghadapi kekerasan yang telah luas diperkirakan akan terjadi pada periode setelah pemungutan suara.

Berhadapan dengan tuduhan bahwa mereka tidak cukup berbuat untuk menghentikan kekerasan milisi, para pejabat Polri kadang-kadang mengeluhkan bahwa mereka sangat kekurangan tenaga, dan bahwa memelihara ketertiban dengan hanya sedikit pasukan adalah sebuah “tugas yang mustahil”. Namun kenyataannya Polri telah menurunkan sejumlah besar petugas di Timor-Leste, dan jumlahnya terus meningkat pesat seiring dengan mendekatnya hari pemungutan suara. Misalnya rencana evakuasi seperti yang telah dikutip sebelumnya memperlihatkan adanya 6.704 petugas polisi yang ditempatkan di Timor-Leste pada Agustus 1999.

* Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Timor Timur, “Rencana Operasi Hanoin Lorosae II,” Rencana Rahasia No. Pol: Ren Ops/04/VIII/1999, Agustus 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #39).

Jumlah tersebut mencakup 3.876 anggota pasukan organik Polri dan 2.828 anggota yang diperbantukan dari kesatuan-kesatuan lainnya.*

Penjelasan yang lebih masuk akal tentang ketidakefektifan Polri dalam menangani kekerasan milisi adalah bahwa Polri berada di bawah kendali TNI dan, pada saat yang bersamaan, menyerap banyak budaya kelembagaan TNI. Polri sudah lama menjadi bagian dari angkatan bersenjata sampai April 1999, ketika Polri secara resmi dipisahkan. Namun bahkan setelah pemisahan ini, Polri tetap mempertahankan karakternya sebagai kekuatan polisi yang sangat militeristis, dan tetap berada di bawah kewenangan Menteri Pertahanan Jenderal Wiranto yang pada saat itu sekaligus menjabat Panglima TNI.

Karakter militer Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya tampak jelas dalam kesatuan pasukan elitenya, Brigade Mobil (Brimob) yang ditempatkan dalam jumlah besar di Timor-Leste. Menurut dokumen Polri yang dikutip sebelumnya, 2.497 orang atau hampir setengah dari petugas polisi yang ditempatkan di Timor-Leste pada Agustus 1999 berasal dari kesatuan Brimob. Dipersenjatai dengan senjata otomatis, dan dengan pelatihan kontra-gerilya serta pengalaman lapangan sebelumnya, Brimob dulu dan sekarang adalah kesatuan paramiliter, dengan catatan pelanggaran berat hak asasi manusia di seluruh wilayah negeri.

Menanggapi kritik tentang merosotnya kondisi keamanan, Indonesia menempatkan lebih banyak lagi kesatuan Brimob di Timor-Leste seiring dengan mendekatnya Konsultasi Rakyat. Para pejabat Indonesia menyatakan bahwa penempatan ini akan membantu mengendalikan keadaan, tapi nyatanya tidak samasekali. Menurut berbagai kesaksian, bertambahnya pasukan Brimob ini hanya membuat keadaan menjadi semakin buruk. Sebagaimana akan dibahas lebih terperinci di dalam Bab 3, pasukan Brimob bertanggung jawab atas sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Polri di Timor-Leste pada 1999.

Pemerintah sipil dan kampanye sosialisasi

Satu bagian penting dari strategi pemerintah Indonesia pada 1999 adalah kampanye untuk “menyosialisasikan” usulan paket otonomi. Seperti yang digambarkan oleh para pejabat pemerintah, ‘sosialisasi’ adalah sebuah usaha penyuluhan masyarakat yang ditujukan untuk menjelaskan keuntungan-keuntungan pilihan otonomi bagi masyarakat Timor-Leste. Dalam praktiknya, ‘sosialisasi’ adalah serangan propaganda terencana, yang terdiri atas gabungan bujukan, ancaman, dan tindakan kekerasan yang dirancang untuk menekan para pegawai negeri sipil dan warga biasa untuk memilih agar kekuasaan Indonesia tetap berlanjut di Timor-Leste.

Di bawah selubung kampanye ‘sosialisasi’ para pejabat pemerintah sipil menggunakan kewenangan jabatannya untuk menekan para pegawai negeri dan warga lainnya untuk mendukung pilihan otonomi, dan menganiaya mereka yang mendukung kemerdekaan. Dalam sejumlah kasus, nama-nama pendukung kemerdekaan dicatat dan diserahkan kepada pejabat intelijen militer.

* Ibid.

Sejak awal pertengahan 1998 Gubernur Timor Timur, Abilio Osório Soares, sudah mulai melancarkan tuntutan dan ancaman terhadap para pegawai negeri sipil yang tidak setia. Sebuah laporan rahasia intelijen militer Indonesia tertanggal 23 Juni 1998, melaporkan tentang pernyataan Gubernur pada sebuah pertemuan kelompok prointegrasi, Gadapaksi, dengan mengutip apa yang dikatakannya:

> "Pada tanggal 23 Juni 1998 saya akan mengumpulkan [pegawai negeri] Eselon IV ke atas kalau mereka tidak mau mendukung integrasi silakan buka baju …"*

Tindakan-tindakan semacam itu secara tersurat diperintahkan oleh Gubernur dalam surat edaran tertanggal 28 Mei 1999, yang dibagikan kepada semua kepala instansi pemerintahan di Timor-Leste, dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Indonesia. Surat edaran itu menyatakan bahwa setiap pegawai negeri sipil yang mendukung kemerdekaan akan "dipecat." Surat edaran itu lebih jauh menyatakan bahwa para pegawai negeri yang dicurigai melindungi simpatisan prokemerdekaan, akan diminta menandatangani pernyataan sumpah setia kepada pemerintah, dan diancam dengan pemecatan jika mereka kemudian terlibat dalam kegiatan prokemerdekaan.†

Semuanya ini bukanlah ancaman kosong. Mereka yang diketahui atau dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan memang dipaksa keluar dari pekerjaan dan dari rumah mereka, di bawah selubung kampanye 'sosialisasi.' Para petugas penegak aturan itu sering juga anggota milisi. Sepucuk surat dari seorang anggota milisi Aitarak kepada komandan posnya menunjukkan bahwa milisi menganggap tugas tersebut sebagai salah satu dari tujuan utama mereka:

> "Kami tim Aitarak juga sekarang sudah bersikap tegas untuk mengadakan pemeriksaan dan penyitaan terhadap orang-orang anggota pegawai negeri sipil yang ingin ikut merdeka. Kami akan pecat mereka secara terbuka, pakaian KORPRI yang mereka pakai akan kami lepas dari mereka, kemudian juga mobil-mobil dinas yang plat merah entah beroda dua maupun yang beroda empat, kami akan tarik atau ambil semua. Sebab ini betul-betul sudah menjadi konsep untuk operasi yang akan kami adakan di dalam bulan April 1999 ini."‡

* Tuntutan Gubernur itu diulangi lagi oleh Ketua DPRD Tingkat I Timor Timur Armindo S. Mariano, yang mengatakan bahwa para pegawai negeri sipil yang tidak setia akan dipecat. Lihat: Dandim 1627 (Letnan Kolonel Endar Priyanto) kepada Danrem 164/WD dan lain-lain, "Laporan hasil pertemuan di Gada Paksi," 23 Juni 1998 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #3).

† Lihat: Gubernur Timor Timur kepada Para Kepala Instansi Vertikal dan Otonom Provinsi Dati I Timor Timur. Edaran No. 200/827/Sospol/V/1999, tentang "Tindakan terhadap PNS yang terlibat organisasi/kegiatan yang menentang Pemerintah RI," 28 Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #10). Salinan sumpah setia disimpan oleh Unit Hak Asasi Manusia UNMISET di Dili.

‡ Surat Mário Pinto da Costa kepada Komandan [Aitarak], 30 Maret 1999 (Koleksi SCU, Doc #262).

Sesuai dengan statusnya sebagai salah satu unsur kebijakan pemerintah, kampanye 'sosialisasi' dibiayai sangat besar oleh pemerintah Indonesia (lihat Bab 8). Pertemuan dan rapat umum 'sosialisasi' diselenggarakan di seluruh Timor-Leste, dan dalam acara-acara ini para pejabat sipil dan militer berceramah panjang lebar tentang keuntungan otonomi. Ditopang oleh dana pemerintah, para jurubicara pemerintah memperkuat kata-kata mereka dengan membagi-bagikan beras, baju kaos, dan barang-barang lainnya, dan dengan menjanjikan lebih banyak barang yang sama bagi mereka yang mendukung kekuasaan Indonesia. Seorang pengamat yang terdaftar pada PBB berkomentar:

> "Kami pergi ke satu rapat umum kelompok pro-otonomi ... di mana dua truk besar datang dengan kantong-kantong penuh berisi baju kaos, topi, bandana, bendera ... dan barang-barang itu kemudian dilemparkan kepada orang-orang di situ, dan mereka berebut mengambil barang-barang itu. Tak seorang pun dalam kampanye kelompok prokemerdekaan yang punya barang-barang seperti itu."[*]

Pembagian beras kepada penduduk merupakan bagian yang sangat penting dari kampanye 'sosialisasi' pemerintah. Dokumen-dokumen rahasia militer mengungkapkan bahwa tujuan nyata dari pembagian beras adalah untuk memengaruhi opini penduduk berkaitan dengan Konsultasi Rakyat. Dokumen-dokumen itu juga menunjukkan bahwa sumberdaya dalam jumlah yang besar diarahkan untuk usaha ini, dan bahwa para perwira tinggi militer Indonesia terlibat dalam usaha ini. Dalam satu telegram rahasia kepada Jenderal Wiranto, tertanggal 6 Juli 1999, Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon (Kepala Staf Kodam IX) meminta pengiriman segera kapal TNI Angkatan Laut tipe Frost untuk mengangkut beras ke Timor-Leste. Telegram itu menjelaskan bahwa "pihak Pemda [pemerintah daerah] perlu segera menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat" karena pembagian pangan yang dilakukan oleh sejumlah 35 organisasi nonpemerintah akan memengaruhi hasil Konsultasi Rakyat.[†]

Bujukan semacam itu juga dilengkapi dengan ancaman terbuka maupun tertutup tentang akan adanya kekerasan jika pilihan otonomi kalah.[‡] Ancaman yang biasa muncul di dalam pertemuan 'sosialisasi' antara lain adalah seperti berikut: "Kalau otonomi menang, darah akan menetes, kalau kemerdekaan menang, darah akan mengalir!" Ancaman-ancaman semacam itu diperkuat dengan pernyataan-

---

* ABC, *Four Corners*, "Silenced Majority," transkripsi, halaman 4.

† Telegram rahasia dari Kepala Staf Kodam IX/Udayana (Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon) kepada Panglima Angkatan Bersenjata (Jenderal Wiranto), 6 Juli 1999 (Koleksi Yayasan HAK).

‡ Seperti tuntutan pemecatan terhadap para pegawai negeri sipil yang tidak loyal, ancaman kekerasan yang dikandungnya dimulai setidaknya sejak pertengahan 1998. Misalnya, ketika memberikan pengarahan pada suatu pertemuan Gadapaksi pada Juni 1998, Ketua DPRD Timor Timur, Domingos S. Mariano, dilaporkan mengatakan: "Pendapat saya kalau Referendum, pasti akan ada pertumpahan darah yang lebih besar bila dibandingkan pada tahun 1975." Lihat: Dandim 1627 (Letnan Kolonel Endar Priyanto) kepada Danrem 164/WD dan lain-lain, "Laporan hasil pertemuan di Gada Paksi," 23 Juni 1998 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #3).

pernyataan terbuka para pemimpin pro-otonomi, dan lebih jauh lagi ditegaskan oleh kehadiran anggota milisi pro-otonomi bersenjata yang tampak mengancam. Memang, milisi secara efektif bertugas sebagai penguat kampanye 'sosialisasi'—yang memastikan bahwa penduduk datang ke pertemuan umum dan mengancam atau menyerang secara fisik orang-orang yang menolak hadir di sana.

Kelompok-kelompok politik pro-otonomi

Satu unsur yang juga berhubungan dengan strategi pemerintah adalah dorongan pembentukan dan pendanaan atas sejumlah organisasi dan kelompok politik baru prointegrasi yang dipimpin dan dijalankan oleh orang Timor-Leste. Dua kelompok utamanya adalah Forum Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan (FPDK) dan Barisan Rakyat Timor Timur (BRTT), keduanya didirikan di paruh pertama tahun 1999.[*]

Kedua kelompok ini menggunakan taktik yang sedikit berbeda. Sementara BRTT berusaha merangkul elite politik yang lebih tua sebagai anggota, FPDK berusaha memobilisasi unsur-unsur yang lebih muda.[†] FPDK juga berhubungan dengan kelompok-kelompok milisi—yang mereka nyatakan sebagai hubungan 'penasihat'—lebih dekat daripada BRTT, yang sebagian pemimpinnya merasa prihatin bahwa kekerasan yang dilakukan oleh milisi adalah sesuatu yang kontraproduktif.[‡] Walaupun ada perbedaan di antara mereka, FPDK dan BRTT menampilkan wajah rakyat Timor-Leste dari posisi pemerintah Indonesia. Dan ketika hari pemungutan suara mendekat, kedua kelompok tersebut bergabung ke dalam satu organisasi tunggal, yang dikenal sebagai United Front for East Timor Autonomy (UNIF, Front untuk Otonomi Timor Timur) yang tanpa keraguan membela posisi pro-Indonesia.[§]

Pembentukan dan penguatan kelompok-kelompok politik ini mungkin ditujukan untuk membuktikan klaim resmi Indonesia bahwa konflik yang terjadi adalah antara rakyat Timor-Leste sendiri, dan pemerintah bertindak sebagai wasit yang netral. Namun pernyataan tersebut diperlemah oleh fakta bahwa para pemimpin

* FPDK secara resmi didirikan pada 27 Januari 1999 dan BRTT didirikan pada April 1999. Lihat: Ian Martin, *Self-Determination in East Timor: The United Nations, the Ballot, and International Intervention*, London: Lynne Rienner Publishers, 2001, halaman 43. Organisasi lain Forum Persatuan Timor Timur (FPTT) didirikan pada 7 Desember 1998 di bawah kepemimpinan Eurico Guterres. Tampaknya organisasi itu sudah dibubarkan suatu saat pada Januari 1999, dan digantikan oleh FPDK dan Aitarak. Lihat: Forum Persatuan Timor Timur (FPTT) kepada Danrem 164/WD. Surat tulisan tangan (rancangan surat?), meminta pendanaan TNI untuk aktivitas FPTT, [Desember] 1998 (Koleksi SCU, Doc #233); dan Ketua Umum Forum Persatuan Timor Timur (Eurico Guterres) kepada Kepala Biro Keuangan Pemda Tk I Timor Timur, 5 Januari 1999 (Koleksi SCU, Doc #159).

† *Far Eastern Economic Review*, 27 Mei 1999.

‡ Beberapa orang dari kelompok yang lebih tua memang berhubungan dengan FPDK, namun ada tanda-tanda ketegangan. Pada Juli 1999, tokoh yang sudah lama mendukung Indonesia, Hermínio da Silva da Costa, mengundurkan diri dari Dewan Penasihat FPDK. Ketika mengumumkan pengunduran dirinya ia meminta perhatian pada peran penting generasi aktivis prointegrasi yang lebih tua. *Suara Timor Timur*, 15 Juli 1999.

§ Pembentukan UNIF diumumkan dalam sebuah pernyataan bersama oleh FPDK, BRTT, dan PPI pada 23 Juni 1999 (Koleksi Yayasan HAK).

FPDK, BRTT, dan UNIF sebagian besar adalah pejabat pemerintah Indonesia. Misalnya, pemimpin BRTT adalah Duta Besar Keliling Indonesia untuk masalah Timor Timur, Francisco Lopes da Cruz. Hubungan tersebut merupakan gejala dari fenomena yang lebih umum. Seperti yang ditulis oleh Ian Martin:

"Hubungan antara pemerintah daerah, FPDK, milisi, dan TNI sedemikian erat sehingga semuanya merupakan satu operasi tunggal untuk menandingi kegiatan-kegiatan prokemerdekaan dan memenangkan pilihan pro-otonomi."*

Di samping tujuan politik terbuka mereka, ada beberapa bukti bahwa kelompok-kelompok politik pro-otonomi ini juga menjalankan tujuan yang lebih tertutup—yakni sebagai saluran dana dan barang-barang untuk milisi. Sebagaimana diuraikan di bagian lain dalam laporan ini, FPDK dan BRTT menerima dana dan sumberdaya yang cukup besar dari sumber-sumber resmi, baik sipil maupun militer (lihat Bab 8).

Badan-badan khusus bentukan pemerintah

Bagian penting terakhir dari strategi pemerintah adalah pembentukan sejumlah badan politik khusus di Timor-Leste. Badan-badan ini—yang paling terkenal adalah Komisi Perdamaian dan Stabilitas (KPS) dan Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur (Satgas P3TT)—berfungsi sebagai semacam mesin propaganda. Satgas P3TT juga berfungsi sebagai selubung untuk pengoordinasian strategi tertutup pemerintah dan militer Indonesia.

KPS adalah produk 'kesepakatan damai' yang diperantarai oleh Panglima TNI Jenderal Wiranto dan ditandatangani oleh wakil-wakil dari kelompok prokemerdekaan dan kelompok pro-Indonesia di Timor-Leste pada 21 April 1999. KPS seolah-olah didirikan untuk memfasilitasi dialog di antara berbagai kelompok yang berbeda di Timor-Leste. Dalam kenyataannya, tugas KPS hampir tidak ada bedanya dengan jurubicara pemerintah Indonesia. Ini sebagian adalah akibat dari komposisi keanggotaan KPS yang sangat berat sebelah, berpihak pada pemerintah Indonesia dan kubu pro-otonomi,† selain itu juga akibat posisi yang sangat berpihak dari para wakil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia yang didatangkan untuk membentuk KPS.

Tingkah KPS dalam mengadakan kegiatan kehumasan tersebut yang menggelikan itu adalah bagian dari usaha lebih luas yang dilakukan pemerintah untuk menampilkan versinya tentang keadaan di Timor-Leste, dan pilihan yang diinginkannya, kepada khalayak Timor-Leste dan Indonesia. Dalam usahanya ini KPS dibantu oleh media

* Ian Martin, *Self-Determination in East Timor*, halaman 43.

† Para wakil dari pemerintah, TNI, Polri, dan masing-masing dari dua kelompok pro-otonomi bergabung, berhadapan dengan hanya dua orang utusan dari CNRT/Falintil. Satu-satunya wakil CNRT yang hadir dalam penandatanganan kesepakatan, Leandro Isaac, dibawa ke tempat pertemuan dari kantor polisi tempatnya berlindung setelah rumahnya diserang. UNAMET sepenuhnya disingkirkan dari KPS sebagaimana juga organisasi-organisasi lokal nonpemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya. Tentang komposisi dan kelemahan KPS, lihat Ian Martin, *Self-Determination in East Timor*, halaman 30-31, dan 70.

dalam negeri yang umumnya patuh—meliputi radio, televisi, dan media cetak. Kampanye pemerintah mencakup upaya-upaya disinformasi yang agaknya dengan sengaja dirancang KPS untuk mendiskreditkan UNAMET dan meletakkan dasar bagi penentangan di kemudian hari terhadap kredibilitas proses Konsultasi Rakyat.

Di samping rasa permusuhan mereka terhadap UNAMET, para jurubicara Indonesia dan pro-otonomi juga menyatakan bahwa UNAMET sengaja hanya mempekerjakan para pendukung kemerdekaan. Walaupun tanpa bukti, para jurubicara ini terus-menerus mengulang pernyataan ini dengan frekuensi yang meningkat ketika hari pemungutan suara semakin dekat dan segera dalam masa sesudahnya. Para pejabat militer dan pemerintah, serta para pemimpin pro-otonomi, juga mengeluarkan ancaman langsung maupun terselubung terhadap para staf lokal UNAMET yang menyebabkan beberapa dari mereka mengundurkan diri dan lari ke gunung-gunung.

Badan yang kurang terlihat tetapi lebih berpengaruh yang didirikan oleh pemerintah pada 1999 adalah Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur (Satgas P3TT). Satuan Tugas, demikian nama yang dikenal umum, merupakan turunan dari kelompok nasional yang terdiri atas beberapa menteri (TP4 OKTT), yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.[*] Satuan Tugas itu sendiri dipimpin oleh seorang mantan wakil tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Agus Tarmizi, dan seperti badan yang membentuknya (TP4 OKTT), Satuan Tugas ini terdiri atas wakil-wakil dari beberapa Departemen dan lembaga pemerintah pusat lainnya.

Secara formal, Satuan Tugas ini mewakili kepentingan pemerintah Indonesia di Timor-Leste, dan bertugas sebagai penghubung langsung dengan UNAMET, dalam kaitannya dengan Konsultasi Rakyat. Namun, karena langsung melapor kepada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di Jakarta, Satuan Tugas juga merupakan sebuah saluran otoritas penting yang langsung di bawah kendali Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung.

Lebih jauh, kepemimpinan Satuan Tugas mencakup sejumlah perwira tinggi militer, baik yang aktif maupun pensiunan, dengan pengalaman panjang di Timor-Leste, dan latar belakang intelijen militer atau Kopassus atau keduanya. Mereka adalah: H.R. Garnadi, seorang pensiunan Mayor Jenderal Angkatan Darat, dengan latar belakang intelijen militer; dan Brigadir Jenderal Glenny Kairupan, yang pernah bertugas sebagai Wakil Komandan Korem di Timor-Leste di pertengahan dasawarsa 1990-an, dan dikatakan memiliki latar belakang Kopassus.[†]

---

* TP4 OKTT adalah singkatan dari Tim Pengamanan Pelaksanaan Penentuan Pendapat mengenai Otonomi Khusus Timor Timur. Badan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 43 tanggal 18 Mei 1999. Lihat: Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata (Letnan Jenderal Sugiono) untuk Panglima TNI (Jenderal Wiranto), "Surat Perintah No. Sprin/1096/VI/1999," 4 Juni 1999 (Koleksi Yayasan HAK Doc #28); dan Panglima TNI (Jenderal Wiranto), "Surat Perintah No. Sprin 1180/P/VI/1999," 16 Juni 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #29). Tim menteri TP4 OKTT terdiri atas: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, Kapolri, dan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS). Ian Martin, *Self-Determination in East Timor*, halaman 42.

† Anggota ketiga, Kolonel (Pol.) Andreas Sugianto pernah bertugas sebagai Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) Timor Timur pada 1994-96. Dalam kedudukan itu, ia bekerjasama erat dengan sejumlah per-

Namun tokoh kunci dalam Satuan Tugas itu adalah Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim. Seorang perwira karier intelijen, Zacky Makarim bertugas sampai Januari 1999 sebagai kepala Badan Intelijen ABRI (BIA, yang namanya diubah menjadi Badan Intelijen Strategis—BAIS—pada April 1999). Secara resmi ditempatkan di posnya di Timor-Leste di awal Juni,* Zacky telah terlibat dalam berbagai operasi militer dan politik di Timor-Leste beberapa waktu sebelumnya.† Di awal dasawarsa 1990-an, Zacky Makarim bertugas sebagai perwira intelijen militer di Aceh, di puncak operasi kontrapemberontakan, ketika Angkatan Darat memobilisasi kelompok-kelompok milisi untuk membantu usaha mereka menghancurkan gerakan kemerdekaan di Aceh. Sebagai perwira militer paling senior di Timor-Leste sebelum pemakluman Darurat Militer pada September 1999, Mayor Jenderal Zacky Makarim adalah kandidat yang paling mungkin untuk berperan sebagai koordinator lapangan keseluruhan untuk strategi pemerintah dan militer di Timor-Leste. Sejauh strategi tersebut melibatkan mobilisasi kelompok-kelompok milisi bersenjata, dan pelaksanaan tindak kekerasan sistematis terhadap penduduk sipil, Zacky Makarim juga tersangka utama di antara orang-orang yang membantu dan mendorong terjadinya kejahatan terhadap umat manusia.

Pelanggaran, korban, dan pelaku

Tidak ada keraguan lagi bahwa para pejabat Indonesia berusaha memengaruhi hasil Konsultasi Rakyat untuk kemenangan 'otonomi khusus'. Juga tidak ada keraguan pula bahwa berbagai tindak kekerasan yang sangat menggemparkan itu dilakukan dalam konteks rencana tersebut. Hal yang menjadi pertanyaan di sini, apakah kekerasan itu merupakan tindakan spontan dari milisi lokal dan 'oknum-oknum' TNI, sebagaimana yang diklaim oleh pejabat-pejabat Indonesia, ataukah merupakan bagian integral dari sebuah operasi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh para pejabat Indonesia.

Jawaban yang tepat atas pertanyaan tersebut memerlukan penguraian yang cermat atas kekerasan yang terjadi dan analisis mengenai pola-pola yang mendasari kekerasan tersebut, serta variasi dari kekerasan itu. Bab ini adalah yang pertama dari tiga bab dalam laporan ini yang mengemban tugas tersebut. Bab ini menguraikan dan menganalisa pola-pola paling dasar dari kekerasan yang terjadi pada 1999, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini: Apa jenis pelanggaran yang dilakukan? Kapan pelanggaran itu terjadi? Siapa yang menjadi korban? Dan siapa yang menjadi pelaku?

wira TNI yang berperan penting pada 1999, mencakup Mahidin Simbolon dan Kiki Syahnakri, yang keduanya menjadi Komandan Korem 164 di pertengahan dasawarsa 1990-an, dan Glenny Kairupan yang bertugas sebagai Wakil Danrem pada saat itu.

* Mayor Jenderal Zacky Makarim secara resmi ditugaskan ke Timor-Leste sebagai anggota TP4 OKTT pada 4 Juni 1999. Perintah penugasannya (Surat Perintah No. Sprin/1096/VI/1999) dikeluarkan di bawah kewenangan Panglima TNI Jenderal Wiranto, tetapi ditandatangani oleh Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Sugiono (Koleksi Yayasan HAK, Doc #28).

† Ia dan Mayor Jenderal Kiki Syahnakri adalah anggota satu tim yang dikirimkan oleh markas besar TNI untuk menyelidiki pembantaian di Gereja Liquiçá pada April 1999. Lihat: Greenlees dan Garran, *Deliverance*, halaman 126-127.

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu mengarah pada satu kesimpulan inti: sebagian besar tindak kekerasan yang dilakukan pada 1999 adalah bagian dari serangan yang luas dan sistematis terhadap penduduk sipil Timor-Leste, dengan sasaran mereka yang diyakini sebagai pendukung kemerdekaan. Dengan demikian, menurut hukum internasional tindakan tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, tetapi juga merupakan kejahatan terhadap umat manusia.

Jenis-jenis Pelanggaran

Kejahatan terpenting yang dilakukan di Timor-Leste pada 1999 mencakup pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan penganiayaan, kekerasan seksual, pemindahan penduduk secara paksa, dan penghancuran harta benda. Tindakan-tindakan ini melanggar serangkaian hak asasi manusia fundamental, yang diakui oleh hukum internasional, termasuk hak untuk hidup, hak atas keamanan diri pribadi, hak atas integritas fisik, kebebasan berpikir, kebebasan berkumpul, dan hak untuk memiliki harta-benda.

Pembunuhan di luar hukum:

Kejahatan paling terkenal yang dilakukan pada 1999 adalah pembunuhan di luar hukum terhadap sedikitnya 1.200 orang dan kemungkinan sebanyak 1.500 orang sepanjang tahun tersebut. Pembunuhan ini umumnya dilakukan oleh beberapa orang penyerang yang diperlengkapi dengan berbagai jenis senjata, termasuk pisau, parang, pedang, senapan rakitan, dan senjata otomatis.

Banyak dari korban dibunuh secara perorangan, tetapi jumlah yang cukup besar—mungkin sebanyak 400 orang—meninggal dalam pembunuhan massal. Banyak pembunuhan massal terjadi di tempat-tempat ibadah dan atau tempat pengungsian, termasuk gereja-gereja Katolik dan rumah para tokoh terkemuka. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Gereja Liquiçá; pembantaian di rumah Carrascalão; dan pembantaian di Gereja Suai.) Pembunuhan massal juga terjadi di kompleks TNI dan Polri, atau ketika para korban berada di bawah perlindungan mereka. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Cailaco; dan pembantaian di kantor polisi Maliana.)

Lazimnya metode pembunuhannya kejam. Korban dipukuli, dibacok dengan parang atau pedang, dan bagian tubuh para korban kadang-kadang sengaja dipotong, sebelum atau sesudah korban tewas. Bentuk pemotongan bagian tubuh yang paling umum adalah pemotongan salah satu telinga korban, namun terkadang bagian tubuh yang lain juga dipotong, dan beberapa korban juga sengaja dipenggal kepalanya. Dalam beberapa kasus, sisa tubuh yang dipotong (atau bagian tubuh hasil pemotongan) dari korban tewas ditinggalkan di tempat-tempat umum, sebagai usaha nyata untuk meneror penduduk. Dalam sebagian kasus lainnya, khususnya yang jumlah korbannya banyak, para pejabat berusaha keras menghilangkan mayat korban dan bukti-bukti lainnya.

Penyiksaan dan penganiayaan:

Seperti juga pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan penganiayaan selama bertahun-tahun telah menjadi bagian dari strategi dasar kontrapemberontakan pemerintah Indonesia di Timor-Leste maupun di tempat-tempat lain, sehingga tidaklah mengherankan bahwa tindakan tersebut umum dilaporkan terjadi pada 1999. Penyiksaan terhadap para tahanan biasanya berupa pemukulan dan melukai dengan menggunakan tongkat, parang, pisau, pedang, dan popor senapan.

Sebagaimana dinyatakan dalam laporan bersama oleh para Pelapor Khusus PBB, pada 1999 penyiksaan yang terjadi di Timor-Leste biasanya merupakan tindakan awal untuk membunuh atau upaya pembunuhan.[*] Bukti terakhir menunjukkan bahwa penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi juga digunakan, seperti yang telah terjadi selama bertahun-tahun, sebagai metode untuk memeras informasi tentang gerakan prokemerdekaan.

Seperti yang terjadi di masa lalu, penyiksaan dan penganiayaan pada 1999 juga merupakan bagian dari strategi yang ditujukan untuk mengintimidasi dan meneror penduduk. Tujuan intimidasi tersebut berbeda-beda setiap waktu. Dalam waktu sebelum pemungutan suara, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi ditujukan terutama untuk meredam suara prokemerdekaan dalam kaitannya dengan pendaftaran dan masa kampanye, serta untuk memaksakan rekrutmen ke dalam kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia. Dalam masa setelah pemungutan suara, penyiksaan dan penganiayaan digunakan untuk memaksa atau "meyakinkan" penduduk untuk meninggalkan Timor-Leste.

Kekerasan berbasis gender:

Sebagaimana yang dinyatakan oleh para Pelapor Khusus PBB dalam laporannya, penyiksaan dan penganiayaan juga berlangsung dalam bentuk kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, perbudakan seksual, dan pelecehan seksual.[†] Pada 2001, Fokupers, sebuah organisasi nonpemerintah setempat, telah mendokumentasikan sekitar 182 kasus pelanggaran khusus gender yang terjadi pada 1999. Termasuk di dalamnya 46 kasus pemerkosaan, lima kasus upaya pemerkosaan, dan 16 kasus penyerangan seksual. Lebih daripada separuh dari 46 orang korban pemerkosaan, diperkosa secara berulang-kali, atau oleh lebih daripada seorang pemerkosa. Di samping itu, banyak perempuan yang diperkosa selama berbulan-bulan, dan kadang bertahun-tahun, setelah dipaksa menjadi budak seks oleh prajurit-prajurit TNI dan anggota milisi.[‡]

---

* United Nations, *Situation of Human Rights in East Timor*, 10 Desember 1999, paragraf 42.

† United Nations, *Situation of Human Rights in East Timor*, 10 Desember 1999, paragraf 42 dan 46-58.

‡ Termasuk di dalamnya adalah sekitar 20 orang perempuan yang dibawa ke Timor Barat setelah pembantaian di Gereja Suai pada 6 September. UNTAET, "Investigations by the Serious Crimes Unit on cases of abduction of East Timorese women during the 1999 conflict," Dili, Mei 2001.

Dengan adanya keengganan yang bisa dipahami dari sebagian besar perempuan Timor-Leste untuk mengungkapkan pengalaman seperti itu, maka sangat mungkin bahwa jumlah sesungguhnya dari kasus pemerkosaan dan perbudakan seksual pada 1999 sangat jauh lebih tinggi daripada yang sejauh ini dilaporkan.[*] Masalah laporan yang lebih rendah daripada kenyataan ini diperparah oleh adanya hambatan sosial, hukum, dan logistik untuk melakukan pendokumentasian dan penyelesaian masalah. Kaum perempuan Timor-Leste, seperti juga kaum perempuan di manapun, menderita rasa bersalah, rasa malu, dan pengucilan setelah mengalami penyerangan seksual. Sebagian di antara mereka juga ditinggalkan oleh suami, yang mengklaim, atau menyatakan secara tidak langsung bahwa istri mereka menyetujui pemerkosaan dan atau perbudakan seksual yang menimpa diri mereka.[†]

Para pelaku kejahatan kekerasan seksual sebagian besar adalah anggota milisi, tetapi hampir setengahnya adalah para prajurit dan perwira TNI.[‡] Dalam beberapa kasus, para anggota milisi dan prajurit TNI masuk ke rumah seorang perempuan muda dan, sambil mengacungkan senjatanya, mengancam untuk membunuh anggota keluarga si perempuan jika ia menolak berhubungan seks. Dalam kasus lainnya, para perwira TNI dan anggota milisi berkomplot untuk menculik beberapa perempuan, dan kemudian membagi-bagi mereka tak ubahnya seperti barang.

Terlepas dari identitas para pelaku, beberapa perincian tertentu tentang penyerangan ini menjadikannya jelas bahwa pemerkosaan dan kekerasan seksual bukanlah tindakan kebetulan, melainkan perbuatan yang direncanakan oleh atau dengan persetujuan pihak berwenang militer. Contohnya, pejabat-pejabat militer agaknya menunjuk perempuan-perempuan yang dianggap “pantas” untuk dijadikan sasaran perkosaan atau penyerangan seksual. Lebih lagi, sebagian pelaku memiliki akses pada teknologi kontrasepsi yang relatif canggih, termasuk obat-obatan yang mereka suntikkan kepada para korban sebelum mereka perkosa. (Lihat studi kasus: Penahanan sewenang-wenang dan pemerkosaan di Lolotoe.)

Pemindahan penduduk secara paksa:

Selain tindakan itu sendiri merupakan kejahatan, kekerasan seksual, penyiksaan, dan pembunuhan di luar hukum juga merupakan bagian penting dari kejahatan yang lebih jauh berupa pemindahan penduduk secara paksa. Pemindahan secara paksa tersebut terjadi di Timor-Leste dalam dua gelombang besar. Dalam gelombang pertama, yang terjadi sebelum pemungutan suara, sebanyak 60.000 orang terusir

---

* Fokupers mencatat bahwa “… halangan-halangan seperti pengucilan sosial, trauma akibat kejadian, dan takut akan penilaian masyarakat … membuat proses pendokumentasian … teramat sulit.” Fokupers, “Progress Report 1 – Gender-based Human Rights Abuses,” Dili, Juni 2000, halaman 3.

† Keadaan semakin sulit ketika pada awal September 1999 milisi melakukan pembakaran dan penjarahan terhadap kantor Fokupers, satu-satunya organisasi yang secara serius mendokumentasikan persoalan kekerasan berbasis gender pada 1999 dan seluruh catatan rekamannya dihancurkan.

‡ Dari 46 kasus yang pemerkosaan yang didokumentasi oleh Fokupers, 18 di antaranya dilakukan oleh para prajurit TNI atau bersama-sama dengan anggota milisi. Lihat Fokupers, “Progress Report 1 – Gender-based Human Rights Abuses,” Dili, Juni 2000.

dari rumah mereka ke wilayah lain di Timor-Leste. Kedua, yang terjadi segera setelah pemungutan suara pada 30 Agustus, merupakan pemindahan terhadap sekitar 400.000 orang—atau sekitar setengah dari jumlah seluruh penduduk Timor-Leste. Lebih daripada 250.000 orang di antaranya dipaksa menyeberang perbatasan masuk ke wilayah Timor Barat, Indonesia, dan beberapa pulau di sekitarnya, sementara sisanya mengungsi ke bukit dan hutan-hutan di Timor-Leste.

Dalam masa sebelum pemungutan suara, pemindahan paksa terutama terjadi akibat serangan kekerasan dan teror yang dilakukan oleh pasukan-pasukan pro-Indonesia terhadap tempat-tempat yang dianggap sebagai benteng prokemerdekaan. Bentuk serangan itu bermacam-macam, meliputi pembakaran rumah serta penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pemimpin prokemerdekaan. Dimulai pada akhir 1998, dan memuncak pada April 1999, serangan tersebut mengakibatkan penduduk seluruh desa menyelamatkan diri ke gunung atau ke kota-kota sekitarnya. Banyak yang mengungsi ke tempat-tempat ibadah, termasuk gereja-gereja di kota Liquiçá, Suai, dan Maliana. Sementara yang lain mencari perlindungan di rumah orang-orang terkemuka di Dili dan di tempat-tempat lainnya. Seperti dikemukakan di atas, banyak orang dibunuh di tempat-tempat ibadah dan pengungsian.

Pemindahan paksa penduduk juga mengancam gagalnya pelaksanaan Konsultasi Rakyat dan meniadakan hak pilih ribuan penduduk, dengan merusak rencana pendaftaran, pendidikan pemilih, dan pemungutan suara. Para pengungsi dalam negeri (Internally Displaced Persons—IDPs) ini, khususnya mereka yang menyingkir ke gunung-gunung, dapat dipahami akan enggan meninggalkan tempat-tempat pengungsian mereka untuk ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Akhirnya, UNAMET berhasil membuat pengaturan khusus yang memungkinkan semua pengungsi itu, kecuali sejumlah kecil, untuk mendaftar dan memberikan suara.

Yang lebih serius lagi adalah pemindahan paksa hampir setengah dari penduduk Timor-Leste, kebanyakan ke Timor Barat, pada hari-hari dan minggu-minggu setelah pemungutan suara. Beberapa pengamat menyimpulkan,[*] berdasarkan bukti-bukti yang terdokumentasi, bahwa pemindahan paksa penduduk merupakan bagian dari strategi yang direncanakan oleh para pihak berwenang Indonesia di tingkat yang paling tinggi. Meskipun ada alasan untuk berhati-hati dalam menarik kesimpulan tersebut hanya berdasarkan pada dokumen-dokumen yang tersedia, pola perilaku yang dilaporkan oleh banyak saksimata, sepenuhnya mendukung pernyataan bahwa evakuasi paksa tersebut adalah sesuatu yang direncanakan dan terorganisasi dengan baik. (Lihat Studi Kasus: Pemindahan Paksa dan Pembunuhan Pengungsi di Dili.)

Pola evakuasi paksa itu pada dasarnya sama di seluruh wilayah Timor-Leste. Evakuasi ini dimulai segera setelah pemungutan suara dengan sebuah serangan

* Misalnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia dan Komisi Penyelidik Internasional mengenai Timor-Leste, yang masing-masing laporannya diterbitkan pada Januari 2000.

intimidasi dan kekerasan yang dilakukan bersama oleh milisi dan prajurit TNI. Di seluruh wilayah Timor-Leste, kelompok-kelompok milisi dan prajurit dengan bebas menjelajahi desa-desa dan kota-kota, membakari rumah-rumah penduduk dan kantor-kantor, secara selektif memukuli atau membunuh tokoh-tokoh prokemerdekaan, dan mengancam penduduk bahwa mereka harus pergi—kalau tidak, akan mengalami nasib yang sama. Polisi turut serta dalam kekerasan atau enggan atau tidak mampu menghentikannya.

Para korban dan saksi dari tempat-tempat yang terpisah berjauhan di wilayah Timor-Leste melaporkan bahwa mereka diberitahu oleh petugas TNI dan Polri, dan juga milisi, bahwa mereka akan dibunuh, dan bila perempuan akan diperkosa, jika mereka tidak mau naik ke truk-truk atau ke kapal-kapal yang akan membawa mereka ke Timor Barat. Laporan-laporan mereka juga sama menyebutkan bahwa kendaraan-kendaraan yang digunakan dalam evakuasi disita paksa oleh para petugas militer dan milisi, dan bahwa uang diperas dari mereka yang dipaksa naik ke truk.

Berhadapan dengan kenyataan hancurnya hukum dan ketertiban, dan bahaya kematian yang dekat, banyak warga yang merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali pergi meninggalkan kampung halaman. Kepergian mereka didorong oleh aparat militer dan sipil yang mengatakan kepada penduduk bahwa keamanan mereka tidak akan dapat dijamin kecuali jika mereka pindah ke kantor-kantor polisi dan militer, dan tempat-tempat yang ditentukan di seluruh wilayah Timor-Leste. Pada tempat-tempat yang ditentukan, para pengungsi secara sistematis dinaikkan ke truk atau kapal, dan dikirim ke Timor Barat dan pulau-pulau yang berdekatan.

Persoalan ini tidak berhenti ketika para pengungsi meninggalkan Timor-Leste. Sebaliknya, mereka menghadapi kondisi yang penuh bahaya di dalam kamp-kamp pengungsi Indonesia di mana mereka ditempatkan. Masalah yang paling serius adalah bahwa anggota milisi yang telah meneror mereka untuk pergi juga berada di kamp-kamp tersebut dan mereka terus mengganggu, mengancam, dan mengintimidasi para pengungsi. Sebagaimana yang terjadi di Timor-Leste, pihak-pihak berwenang Indonesia, termasuk TNI, sangat sedikit melakukan usaha untuk mengendalikan milisi di dalam kamp-kamp pengungsian. Hasil yang dapat diduga adalah bahwa mereka bebas melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap para pengungsi, termasuk pemerkosaan, perbudakan seksual, dan pembunuhan.

Penghancuran harta benda:

Pelanggaran yang dilakukan pada 1999 juga mencakup penghancuran besar-besaran terhadap harta benda penduduk, dan khususnya pembakaran rumah-rumah serta pembunuhan hewan ternak. Sebagian penghancuran ini terjadi dalam konteks kegiatan teror sebelum pemungutan suara. Namun sebagian besar terjadi dalam periode tiga minggu setelah pemungutan suara 30 Agustus. Dalam masa yang singkat itu, setidaknya 70% dari seluruh bangunan di seluruh wilayah dibakar secara sengaja jika bukan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bisa lagi didiami. Bangunan-bangunan yang dihancurkan mencakup rumah-rumah

pribadi, toko-toko, kantor-kantor pemerintah, sekolah-sekolah, dan klinik-klinik kesehatan. Infrastruktur sangat penting, termasuk air, listrik, dan telekomunikasi juga dihancurkan atau dilumpuhkan.

Walaupun beberapa bagian dari wilayah Timor-Leste kehancurannya lebih parah daripada bagian lainnya, namun pola penghancurannya menunjukkan bahwa kekerasan terhadap harta benda itu direncanakan pada tingkat tinggi. Para saksimata dari berbagai kota dan desa yang terpisah semuanya melaporkan bahwa pembakaran dan penghancuran dilakukan secara sistematis, dan juga dengan partisipasi penuh, atau dengan persetujuan prajurit TNI dan Polri. (Lihat ringkasan kabupaten.)

Penghancuran fisik pada skala ini mendatangkan konsekuensi kemanusiaan yang mengerikan. Penghancuran ini membuat ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal dan tidak memiliki akses untuk mendapatkan pangan yang memadai. Penghancuran itu juga mengakibatkan mayoritas penduduk kehilangan akses untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan pendidikan. Dengan cara demikian, seperti dicatat oleh Komisi Penyelidik Internasional mengenai Timor-Leste dalam laporannya pada Januari 2000, penghancuran harta benda juga merupakan pelanggaran atas hak-hak sosial dan ekonomi.[*]

Kronologi kekerasan: Tiga periode

Pola pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pada 1999 bervariasi secara signifikan sepanjang waktu. Dapat dibedakan adanya tiga periode umum, masing-masing dengan ciri-cirinya sendiri: (i) periode pra-UNAMET (Januari hingga akhir Mei); (ii) periode UNAMET (awal Juni hingga 30 Agustus); dan periode setelah pemungutan suara (30 Agustus hingga akhir Oktober).

Periode pra-UNAMET (Januari hingga akhir Mei):

Sebagian pelanggaran hak asasi manusia yang paling buruk terjadi di dalam periode pra-UNAMET, sebelum Timor-Leste menjadi fokus perhatian serius media dan dunia internasional. Kelompok-kelompok milisi mulai dibentuk pada pertengahan 1998, dan pada Januari 1999 bersama dengan kesatuan-kesatuan TNI, beberapa kelompok telah melancarkan kegiatan kekerasan dan intimidasi dengan sasaran para pendukung maupun yang dianggap pendukung kemerdekaan Timor-Leste.

Ketika semakin banyak kelompok milisi yang dibentuk, dan ketika pihak berwenang sipil dan militer memberikan dukungan logistik dan politik kepada milisi, kekerasan mengalami percepatan dan penyebarluasan. Di antara Januari hingga akhir Mei

* Komisi Penyelidik menyatakan bahwa berbagai hak sosial dan ekonomi "… dilanggar melalui penghancuran berskala besar, yang mencakup hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan tingkat hidup yang memadai, termasuk pakaian, makanan, perumahan, dan perawatan kesehatan serta hak untuk mendapatkan pendidikan." PBB, Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, "Report of the International Commission of Inquiry on the Question of East Timor to the Secretary General," UN Doc A/54/726,S/2000/59, January 31, 2000. Lihat khususnya paragraf 20, 102-103, dan 142.

1999 beberapa puluh orang dibunuh di luar hukum, dan puluhan ribu dipindahkan secara paksa dari rumah-rumah mereka. Banyak dari mereka yang meninggalkan rumah mencari perlindungan di gereja terdekat atau di rumah pribadi tokoh-tokoh masyarakat. Terhadap orang-orang inilah, dan di tempat-tempat pengungsian inilah, sebagian dari pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan dilakukan.

Di antara pelanggaran yang paling terkenal pada periode ini adalah tiga pembunuhan massal yang terjadi pada April 1999. Pertama, yang terjadi pada 6 April 1999, adalah pembantaian terhadap sedikitnya 60 orang di gereja paroki di kota Liquiçá. Yang kedua adalah eksekusi secara sengaja terhadap tujuh orang ketika mereka sedang dalam pengawasan prajurit dan perwira TNI, di Kecamatan Cailaco, Bobonaro. Ketiga, pembunuhan terhadap sedikitnya 12 orang yang mengungsi di rumah pendukung kemerdekaan yang terkenal, Manuel Carrascalão, di Dili pada 17 April. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Gereja Liquiçá; pembantaian di Cailaco, dan pembantaian di rumah Carrascalão.) Pembantaian-pembantaian ini terjadi hampir bersamaan waktunya dengan perundingan akhir yang berlangsung di New York yang akan mengarah pada Kesepakatan 5 Mei.

Periode UNAMET (awal Juni hingga 30 Agustus):

Situasi hak asasi manusia sedikit membaik setelah UNAMET dan sejumlah besar pengamat dan wartawan internasional mulai bertugas di seluruh wilayah Timor-Leste awal Juni 1999. Bila diukur dari jumlah orang yang terbunuh dalam tindak kekerasan politik, ada perbaikan penting. Akan tetapi, pelanggaran yang berat—termasuk penganiayaan, kekerasan seksual, dan pemindahan paksa—tetap berlanjut. Di pertengahan Juli 1999, UNAMET dan beberapa organisasi lain memperkirakan terdapat sekitar 60.000 pengungsi di dalam negeri dari jumlah penduduk 800.000 lebih sedikit.[*]

Pelanggaran yang paling umum dilaporkan selama periode UNAMET adalah intimidasi, pemukulan, dan pemindahan paksa terhadap mereka yang dianggap pendukung kemerdekaan. Di antara berbagai kasus yang terdokumentasi dengan baik pada periode ini adalah serangan milisi pada 29 Juni terhadap kantor UNAMET di kota Maliana, Kabupaten Bobonaro. Serangan tersebut mengakibatkan sejumlah orang terluka dan menyebabkan penghancuran harta benda yang cukup besar. Sebuah investigasi internal PBB menyimpulkan bahwa serangan itu diorganisasikan dan dikoordinasikan oleh komandan-komandan militer setempat, termasuk Komandan Komando Distrik Militer, dan serangan itu ditujukan untuk mengintimidasi petugas PBB. (Lihat studi kasus: Serangan terhadap UNAMET di Maliana.) Insiden lain yang terdokumentasi dengan baik yang khas periode ini adalah serangan milisi terhadap suatu konvoi bantuan kemanusiaan di kota Liquiçá pada 4 Juli 1999. (Lihat studi kasus: Serangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan.)

* Ian Martin, *Self-Determination in East Timor*, halaman 57.

Situasi hak asasi manusia merosot semakin jauh di akhir Agustus, pada periode kampanye terbuka untuk pemungutan suara. Selain jumlah insiden pengancaman dan intimidasi yang lebih besar, serta gelombang baru pengungsian paksa, terdapat peningkatan mencolok jumlah pembunuhan di luar hukum.

Hari kekerasan yang paling buruk dalam periode UNAMET adalah 26 Agustus, hari terakhir kampanye pihak pro-otonomi. Insiden pelanggaran hak asasi manusia yang sangat besar khususnya terjadi di Dili, ketika pasukan-pasukan pro-otonomi dari seluruh negeri berkumpul dalam jumlah besar dan melancarkan kegiatan agresif. Pada hari itu di Dili setidaknya delapan orang dibunuh. Seluruh korban, kecuali satu orang di antaranya, adalah pendukung kemerdekaan yang dibunuh oleh anggota milisi atau anggota pasukan keamanan. (Lihat ringkasan kabupaten: Dili.)

Periode setelah pemungutan suara (30 Agustus hingga akhir Oktober):

Pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat dan luas terjadi segera setelah pemungutan suara. Antara 30 Agustus 1999 hingga keberangkatan terakhir TNI pada akhir Oktober, diperkirakan 900 orang dibunuh di luar hukum, dan sekitar 400.000 orang, atau hampir separuh dari seluruh penduduk meninggalkan rumahnya akibat paksaan yang luarbiasa. Dari jumlah itu setidaknya 250.000 melarikan diri atau dipindahkan secara paksa ke Timor Barat, dan bagian-bagian lain Indonesia, sementara sisanya berlindung di bukit-bukit dan hutan-hutan.

Salvo pembuka terjadi pada pukul lima sore pada hari pemungutan suara, ketika sekelompok milisi dan prajurit TNI menyerang sebuah tempat pemungutan suara di Desa Boboe Leten, di Kabupaten Ermera. Dua orang Timor-Leste petugas lokal UNAMET dibunuh dalam serangan tersebut, dan seorang lainnya terluka. Penyelidikan PBB kemudian mengungkapkan bahwa penyerangan tersebut telah direncanakan lebih dahulu dengan sepengetahuan komandan Komando Rayon Militer (Koramil), dan bahwa para prajurit TNI ambil bagian dalam serangan itu. (Lihat Studi Kasus: Pembunuhan staf UNAMET di Boboe Leten.)

Pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia juga dilaporkan terjadi di berbagai pusat kegiatan pro-otonomi yang terkenal. Pada 2 September, misalnya, pasukan-pasukan milisi dan prajurit TNI di kota Maliana mulai mengancam dan menyerang orang-orang yang diketahui sebagai pendukung kemerdekaan, serta menjarah dan membakari rumah-rumah mereka. Aktivitas yang sama juga dilaporkan terjadi di Covalima dan Ermera.

Namun di sebagian besar wilayah Timor-Leste, kekerasan belum sungguh-sungguh dimulai sampai 4 September, ketika hasil pemungutan suara secara resmi diumumkan. Pengumuman tersebut dilakukan pada pagi hari waktu setempat, dan siang harinya para milisi, prajurit TNI, dan petugas Polri turun ke jalan-jalan di kota dan desa di seluruh Timor-Leste, menembak-nembakkan senjata mereka, menyerang para pendukung kemerdekaan, serta membakari rumah dan bangunan-bangunan umum.

Walaupun telah berjanji untuk tetap tinggal di Timor-Leste setelah pemungutan suara, UNAMET menjadi tidak berdaya menghadapi kekerasan yang meningkat. Pada 7 September, semua staf UNAMET telah dievakuasi ke Dili. Mereka berlindung di kantor pusat UNAMET di Dili. Di sana mereka bergabung dengan ratusan penduduk lokal yang telah meninggalkan rumah mereka untuk mendapatkan keamanan di kompleks ini. Pada 8 September kurang lebih 500 staf PBB dan 1.500 orang pengungsi dalam negeri berada di dalam kompleks. Sementara itu, gerombolan-gerombolan milisi bersenjata melancarkan pengepungan terhadap kompleks, mencegah staf UNAMET dan pengungsi meninggalkan tempat tersebut. Dengan staf UNAMET terkepung di markas besarnya sendiri, dan nyaris semua pengamat dan wartawan telah meninggalkan Timor-Leste, kekerasan yang sesungguhnya dimulai.

Dengan latar belakang inilah TNI mengambil dua prakarsa yang seolah-olah bertujuan untuk pemulihan ketertiban. Pada 4 September, TNI mengambilalih tanggung jawab keamanan dan ketertiban dari tangan Polri, di bawah pengawasan satu komando khusus yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Adam Damiri, dengan nama 'Komando Operasi TNI Nusa Tenggara' (Ko-Ops TNI Nusra). Selanjutnya, pada 6 September Presiden Habibie menyatakan keadaan darurat militer di Timor-Leste, yang mulai diberlakukan pada pukul 00.00 tanggal 7 September. Pihak berwenang militer Indonesia menjamin bahwa tindakan ini akan dapat mengendalikan kekerasan. Namun dalam kenyataannya, justru selama periode ini terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan.

Pemahaman mengenai polanya dapat dilihat secara sekilas dengan memperhatikan sejumlah kecil pelanggaran utama yang terjadi segera pada periode setelah pemungutan suara, dan setelah militer mengambil alih kendali.

- Pada 6 September, pasukan TNI dan Brimob membantu kelompok- kelompok milisi ketika mereka mengeksekusi banyak orang, termasuk tiga orang pastor, yang berlindung di Gereja Suai. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Gereja Suai.)
- Pada hari yang sama, para prajurit TNI dan polisi bersama dengan milisi secara paksa mengevakuasi ribuan orang yang mengungsi di tempat kediaman Uskup Belo, dan di kantor Palang Merah Internasional serta di Susteran Canossiana yang berada di dekatnya. (Lihat studi kasus: Pemindahan paksa dan pembunuhan pengungsi di Dili.)
- Dua hari kemudian, pada 8 September, para prajurit TNI dan milisi membantai sebanyak 14 orang di antara ratusan orang yang mengungsi di kantor Polri di kota Maliana. Tiga belas orang lainnya yang melarikan diri dari pembantaian ini, diburu, ditangkap, dan dibunuh pada hari berikutnya. (Lihat studi kasus: Pembantaian di kantor polisi Maliana).
- Sedikitnya 21 orang, termasuk seorang wartawan asing, dibunuh pada September, oleh unsur-unsur Batalion 745 TNI, ketika batalion ini ditarik dari markasnya di Los Palos melalui Baucau dan Dili, dalam perjalanan ke Timor Barat. (Lihat studi kasus: Amuk Batalion 745).

- Di daerah kantong Oecussi, hampir seratus orang dibantai oleh para prajurit TNI dan milisi dalam dua insiden terpisah pada September dan Oktober, sehingga membuat jumlah orang yang dibunuh di distrik itu menjadi 170 orang. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Passabe dan Maquelab.)

Insiden-insiden tersebut, dan banyak insiden lainnya, merupakan latar belakang kunci bagi pola pengancaman, intimidasi, dan teror sistematis yang, menurut perhitungan yang konservatif, mengarah pada pemindahan paksa setengah dari seluruh jumlah penduduk Timor-Leste, dalam jangka waktu dua hingga tiga minggu. Bisa dikatakan bahwa pembunuhan massal tersebut merupakan bagian pokok dari sebuah tindakan teror yang disengaja. Pembunuhan-pembunuhan itu kurang-lebih memastikan bahwa semua orang harus meninggalkan rumahnya, bahkan pergi ke pengasingan, untuk menghindari nasib yang sama.

Korban

Korban-korban pelanggaran hak asasi manusia pada 1999 sebagian besar adalah para pendukung atau yang dianggap sebagai pendukung kemerdekaan, berikut kerabat dekatnya. Sebagian dari mereka yang dijadikan sasaran adalah pemimpin politik terkenal atau warga masyarakat yang terkemuka, tetapi sebagian besar adalah laki-laki dan perempuan biasa, yang kebanyakan petani atau nelayan. Kelompok-kelompok utama korban prokemerdekaan tersebut mencakup: para pemimpin CNRT; pejabat lokal; orang yang dianggap sebagai pengkhianat; penduduk desa di wilayah basis prokemerdekaan; para rohaniwan Katolik; mahasiswa dan pemuda, staf lokal UNAMET; perempuan dewasa dan muda, serta anak-anak kecil.

Orang-orang non-Timor—termasuk staf UNAMET, jurnalis, dan pengamat—juga menjadi sasaran ancaman, intimidasi, dan pelecehan, dan sebagian mengalami serangan fisik dan terluka. Namun, patut dicatat bahwa staf internasional dan pengamat sangat jarang menjadi sasaran kekerasan yang mematikan, dan hanya dua orang asing yang terbunuh selama tahun itu.[*] Sebagaimana yang dibahas di bawah, pola tersebut tampaknya merupakan bagian dari strategi yang sengaja dipersiapkan oleh para pejabat Indonesia dan bukannya sekadar persoalan nasib baik.

Sejumlah kecil korban kekerasan adalah anggota kelompok pro-otonomi, atau yang diketahui sebagai pendukung Indonesia. Jumlah keseluruhan pendukung pro-otonomi yang terbunuh pada 1999 tidak lebih daripada 20 orang, dari seluruh korban meninggal yang berjumlah sedikitnya 1.200 orang. Ketimpangan ini membantah klaim yang dibuat oleh penguasa Indonesia bahwa kekuatan pro-otonomi adalah korban utama dari kekerasan, dan bahwa mobilisasi milisi adalah persoalan pertahanan diri.

* Dua korban itu adalah pastor tua berkebangsaan Jerman, Carolus Albrecht, dan seorang wartawan Belanda, Sander Thoenes. (Lihat studi kasus: Amuk Batalion 745.)

Kalau dilihat secara keseluruhan, pola-pola kekerasan tersebut menjelaskan bahwa kekerasan pada 1999 tidak terjadi secara acak, melainkan terarah, dan dirancang untuk mencapai tujuan politik tertentu: kemenangan pilihan pro-otonomi dalam Konsultasi Rakyat.

Pemimpin CNRT:

Para pemimpin CNRT amat dikenal di antara para korban pelanggaran hak asasi manusia pada 1999, baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara. Dalam masa pra-UNAMET, beberapa pemimpin ini dibunuh tanpa proses hukum, dan banyak lainnya terpaksa mencari perlindungan di kantor-kantor polisi atau melarikan diri ke gunung-gunung atau kota-kota lain. Situasi menjadi lebih berbahaya dalam periode setelah pemungutan suara. Di setiap kabupaten di Timor-Leste, milisi dan prajurit TNI membidik para pemimpin CNRT untuk dieksekusi.*

Pejabat lokal:

Yang juga menjadi sasaran, baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara, adalah para pejabat lokal—meliputi para kepala desa, camat, dan pegawai negeri sipil—yang tidak cukup memperlihatkan semangat mendukung pilihan pro-otonomi, atau yang samasekali menentangnya. Pejabat lokal semacam itu mendapatkan tekanan keras tidak hanya dari para milisi tetapi juga dari para prajurit dan perwira TNI, serta dari para pejabat sipil. Bentuk-bentuk tekanannya termasuk penghinaan di depan umum pada saat pertemuan, ancaman fisik, serangan terhadap anggota keluarga, pembakaran dan penjarahan rumah korban, dan dalam beberapa kasus, berupa pembunuhan.

Orang-orang yang dianggap sebagai pengkhianat:

Kelompok penting dari para pendukung kemerdekaan yang menjadi sasaran pada 1999 adalah orang-orang yang pernah dianggap menjadi pendukung kekuasaan Indonesia. Tokoh-tokoh semacam itu dianggap pengkhianat oleh pejabat-pejabat Indonesia dan orang Timor pro-Indonesia, dan menjadi sasaran serangan atau pembunuhan.

Salah satu contoh dari pola tersebut adalah pembunuhan terhadap *liurai* Los Palos, Verissimo Dias Quintas, pada 27 Agustus 1999. Sekalipun ia menampilkan dirinya kepada Indonesia sebagai pendukung kekuasaan Indonesia, tetapi rupanya ia secara tidak terbuka menjadi pendukung kemerdekaan, dan pada 1999 menyediakan

* Tidak ada keraguan bahwa para pemimpin CNRT sengaja dijadikan sasaran. Di samping bukti tidak langsung yang begitu banyak yang diuraikan dalam laporan ini, juga ada beberapa bukti dokumenter mengenai hal tersebut. Misalnya, dalam satu perintah tertanggal 3 September 1999, Komandan Aitarak, Eurico Guterres memerintahkan kepada wakilnya, Inacio de Jesus, dan sepuluh anggota milisi lainnya untuk berkoordinasi dengan para anggota Aitarak dan BMP untuk memeriksa orang-orang yang berusaha meninggalkan Timor-Leste. Perintah itu menyatakan secara eksplisit bahwa "Elit-elit Politik dan Kelompok Anti Integrasi (pengurus CNRT-Falintil) supaya ditahan dan diamankan sambil menunggu perintah dari Komandan Komando Pasukan Aitarak." Lihat: Komandan, Komando Pasukan Aitarak, Sektor B (Eurico Guterres). Perintah No. 139/SPT/MK-AT/IX/1999, [3] September 1999 (Koleksi SCU, Doc #27).

rumahnya untuk dijadikan kantor CNRT. Pembunuhan terhadap dirinya, yang dilakukan oleh milisi dan para anggota BRTT, di bawah arahan perwira Kopassus dan Bupati, secara luas dianggap sebagai imbalan bagi "pengkhianatan"-nya. Demikian juga dengan serangan kekerasan terhadap rumah Manuel Carrascalão pada 17 April 1999 yang mengakibatkan kematian sedikitnya 12 orang, tampaknya dimotivasi oleh kebencian terhadap keluarga Carrascalão, yang melakukan perubahan sikap politik dalam tahun-tahun terakhir kekuasaan Indonesia.

Penduduk biasa:

Sementara sebagian korban pelanggaran hak asasi manusia pada 1999 adalah tokoh lokal maupun nasional yang terkemuka, sebagian besarnya adalah orang biasa yang hidup di desa-desa yang dianggap sebagai benteng prokemerdekaan. Sebagian dari mereka dicurigai sebagai anggota aktif gerakan perlawanan, sementara yang lain dituduh memasok gerakan perlawanan dengan bahan makanan. Sebagian yang lain dijadikan sasaran sebagai ganti untuk para anggota keluarga yang telah melarikan diri.

Apapun alasannya, sebagian besar dari orang-orang ini adalah petani dan nelayan, yang rumahnya dijarah dan dibumihanguskan, dan yang dipaksa melarikan diri ke gunung-gunung atau ke kota-kota yang berdekatan, sebelum maupun setelah pemungutan suara. Susah dicapai melalui jalanan umum, tidak ada saluran telepon, dan hanya sedikit pengunjung dari luar, desa-desa tersebut rentan terhadap perusakan yang dilakukan oleh para prajurit TNI dan kelompok-kelompok milisi. Pembantaian terhadap hampir 100 orang di beberapa desa di Oecussi pada pertengahan September 1999 merupakan salah satu contoh kasusnya. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Passabe dan Maquelab.)

Para rohaniwan:

Salah satu aspek yang paling mengejutkan dari kekerasan yang dilakukan oleh kekuatan pro-otonomi adalah dengan menjadikan para pastor Katolik dan tempat-tempat ibadah secara sengaja sebagai sasaran. Pembantaian di gereja-gereja di Liquiçá dan Suai, masing-masing pada April dan September, serangan terhadap tempat tinggal Uskup Belo pada September, dan pembunuhan dengan cara eksekusi terhadap sekelompok rohaniwan di sepanjang jalan ke Baucau pada 25 September, tampak sudah diperhitungkan untuk meneror penduduk yang 80% beragama Katolik Roma.

Beberapa pengamat berpendapat bahwa pengarahan sasaran pada rohaniwan Katolik dan tempat-tempat ibadah mengandung arti adanya motif keagamaan di balik kekerasan, yang mungkin didorong oleh kaum Muslim Indonesia. Namun bukti yang tersedia tidak mendukung pendapat tersebut. Sebetulnya, serangan terhadap tokoh-tokoh agama dan umatnya berakar pada anggapan bahwa Gereja telah mendukung, dan bahkan mendorong, perjuangan kemerdekaan. Kekerasan terhadap para pemimpin dan umat gereja dimotivasi, atau setidaknya dijustifikasi, lebih oleh alasan politis daripada alasan keagamaan.

Mahasiswa dan pemuda:

Mahasiswa dan pemuda adalah salah satu di antara kelompok yang secara sengaja dijadikan sasaran oleh para milisi dan pasukan keamanan Indonesia. Seperti sebagian tokoh gereja Katolik, pemuda dan mahasiswa selama beberapa tahun telah dikenal sebagai penggerak utama aktivitas prokemerdekaan. Tepat untuk mengatakan bahwa kaum muda berada di garis depan perjuangan kemerdekaan, setidaknya sejak awal dasawarsa 1990-an, dan banyak yang telah meninggal demi perjuangan itu. Para pejabat Indonesia dan orang-orang Timor pro-Indonesia menyadari ancaman dari para mahasiswa dan pemuda ini, dan bertekad menggagalkan perjuangan tersebut.

Anggota-anggota dari berbagai organisasi mahasiswa prokemerdekaan amat rentan menghadapi kekerasan ini. Satu kelompok yang disebutkan pada 1999 adalah Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur (DSMPTT), yang mulai menggerakkan kegiatan informasi publik dengan penuh semangat pada Agustus 1998. Banyak dari anggota DSMPTT yang diancam, dipukuli, dan dibunuh pada 1999. (Lihat studi kasus: Pembunuhan dua mahasiswa di Hera.)

Staf lokal UNAMET:

Orang-orang Timor yang bekerja dengan UNAMET juga dipilih menjadi sasaran serangan. Setidaknya 14 orang staf lokal UNAMET dibunuh pada 1999, dan semuanya dibunuh pada periode setelah pemungutan suara. Di antara mereka yang dibunuh adalah dua orang laki-laki, yang telah disebutkan, ditikam hingga mati di akhir pemungutan suara pada 30 Agustus, di Boboe Leten, Ermera. (Lihat studi kasus: Pembunuhan terhadap anggota staf UNAMET di Boboe Leten). Ketika kelompok-kelompok milisi mulai mengamuk di Maliana pada 2 September 1999, dua orang staf lokal UNAMET termasuk yang menjadi korban pertama di sana.

Staf lokal UNAMET kadang-kadang dijadikan sasaran karena memang mendukung atau dianggap mendukung kemerdekaan. Tampaknya inilah salah satu alasan serangan terhadap Ana Lemos, seorang staf UNAMET yang dipukuli, diperkosa, dan kemudian dibunuh di Ermera pada hari-hari setelah pemungutan suara. (Lihat studi kasus: Pemerkosaan dan pembunuhan Ana Lemos.) Mereka juga dipilih oleh karena antipati umum terhadap UNAMET yang berkembang di antara para pendukung Indonesia, yang telah disiram oleh pernyataan-pernyataan tanpa bukti, termasuk beberapa dari sumber resmi, tentang kecenderungan dan sikap tidak adil UNAMET mendukung kemerdekaan. Dengan kata lain, pembunuhan-pembunuhan ini bukanlah tindakan yang sembarangan tetapi pembunuhan dengan motivasi politik.

Kaum perempuan dewasa dan muda:

Di antara para korban pelanggaran berat hak asasi manusia pada 1999, kaum perempuan dewasa dan anak-anak perempuan Timor-Leste menempati posisi khusus. Bagi kaum perempuan dewasa dan anak-anak perempuan Timor-Leste, di samping mengalami serangkaian kekerasan seperti yang dialami oleh kaum

laki-laki—termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan pengungsian paksa—mereka juga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia berbasis gender, yang mencakup pemerkosaan dan perbudakan seksual.

Suasana politik pada 1999 membuat kaum perempuan khususnya rentan terhadap serangan-serangan semacam itu. Ketika kegiatan kekerasan terhadap kemerdekaan meningkat cepat, banyak laki-laki melarikan diri ke gunung-gunung atau ke kota-kota utama, meninggalkan anak dan istri mereka di rumah untuk mengurus ladang dan hewan ternak. Oleh karenanya, sebagaimana dinyatakan oleh organisasi hak perempuan Fokupers, "kaum perempuan dan anak-anak mereka menjadi sasaran pengganti intimidasi dan teror."[*] Perempuan yang suaminya diyakini menjadi pejuang Falintil, atau yang dianggap bersimpati prokemerdekaan, secara khusus rentan diserang. (Lihat studi kasus: Penahan sewenang-wenang dan pemerkosaan di Lolotoe; dan pemerkosaan dan pembunuhan Ana Lemos.)

Anak-anak:

Walaupun anak-anak tampak tidak dijadikan sasaran khusus pada 1999, jumlah anak-anak yang mengalami pelanggaran berat hak asasi manusia cukup berarti. Setidaknya selusin anak dibunuh dalam kekerasan politik selama tahun itu. Mereka mencakup seorang anak kecil dan dua orang remaja yang dibunuh dalam pembantaian di Gereja Suai pada 6 September, dan lima anak dari satu keluarga yang dibunuh, bersama dengan ibunya, setelah diculik oleh anggota milisi pada September 1999. Ibu anak-anak itu, Georgina Tilman, dikenal karena pandangannya yang prokemerdekaan. (Lihat ringkasan kabupaten: Ermera.)

Anak-anak juga mengalami gangguan mental dan luka-luka fisik yang berat ketika mereka ditangkap dan menjadi saksi atas kekerasan tanpa pandang bulu, termasuk serangan terhadap anggota keluarga mereka. Sejumlah anak menyaksikan saudara-saudaranya dipukuli atau dipenggal hingga mati. Anak-anak juga menjadi bagian dari korban kekerasan seksual pada 1999. Dari kasus-kasus kekerasan seksual yang didokumentasikan oleh Fokupers, tiga di antaranya adalah pemerkosaan anak di bawah umur, dan lima kasus adalah serangan seksual terhadap anak-anak. Lima lainnya adalah kasus anak-anak yang dipaksa menyaksikan pemerkosaan.[†]

Staf internasional dan wartawan internasional:

Satu ciri yang mencolok dari pola pelanggaran hak asasi manusia pada 1999 adalah bahwa, meskipun terjadi kekacauan dan milisi yang mengamuk—dan walaupun beberapa dari mereka berada sangat dekat dengan peristiwa kekerasan—tidak satupun anggota staf internasional PBB dibunuh. Meskipun sebagian orang menganggap ini sekadar kebetulan, namun hal ini merupakan petunjuk lebih jauh bahwa tindak kekerasan disusun dengan hati-hati, sangat mungkin oleh mereka

* Fokupers, "Progress Report 1 – Gender-based Human Rights Abuses," Dili, Juni 2000, halaman 7.

† Fokupers, "Progress Report 1 – Gender-based Human Rights Abuses," Dili, Juni 2000, halaman 5.

yang berada di Jakarta yang menyadari bahwa kekerasan terhadap orang asing bisa menimbulkan dampak internasional.

Tampaknya satu bagian pokok dari rencana tersebut adalah untuk menciptakan kesan terjadinya anarki yang dirancang untuk menakut-nakuti—tetapi tidak untuk membunuh—staf UNAMET dan pengamat internasional, serta para wartawan. Pendekatan itu menjadi nyata dalam serangan terhadap UNAMET pada akhir Juni dan awal Juli, dan pada 30 Agustus di Atsabe yang mengakibatkan dua staf lokal UNAMET meninggal, tetapi tidak ada staf internasional yang dibunuh atau terluka sekalipun.

Satu yang hampir menjadi perkecualian terhadap rancangan umum ini muncul dalam kasus evakuasi UNAMET dari Liquiçá pada 4 September 1999. Dalam kasus tersebut, sebuah konvoi UNAMET disergap dan ditembaki oleh milisi, Polri, dan TNI ketika konvoi itu meninggalkan kampnya. Seorang polisi sipil asal Amerika Serikat tertembak dan terluka parah, dan beberapa kendaraan penuh lubang peluru, namun tidak ada korban meninggal. Perkecualian kedua terjadi di Baucau pada 7 September ketika Brimob menembak secara langsung ke kamp UNAMET, tampaknya dengan tujuan untuk membunuh atau melukai staf PBB. Dalam kasus ini juga, tidak ada korban terluka.

Walaupun ada perkecualian seperti itu, jelas ada strategi meneror tetapi tidak untuk membunuh orang asing. Strategi itu tampaknya berdasar atas kesadaran para pejabat—pada tingkat tinggi dan kemungkinan besar di Jakarta—bahwa kematian seorang asing sangat mungkin akan membangkitkan tanggapan internasional yang kuat dan tidak diharapkan. Sebaliknya, penciptaan suatu kesan kekacauan, dan bahkan kematian beberapa orang Timor-Leste, akan memberikan dalih yang masuk akal untuk memindahkan semua pengamat internasional dari wilayah perdesaan, dan meminta tentara Indonesia untuk "memulihkan keamanan".

Untuk suatu waktu, di awal September 1999, strategi itu tampak berhasil. Ketika sebagian besar pengamat internasional meninggalkan Timor-Leste, dan sisanya bertahan di kompleks PBB di Dili, para petugas berwenang Indonesia dan milisi bebas membalas dendamnya terhadap orang-orang Timor-Leste yang telah memilih kemerdekaan. Menurut semua kesaksian, saat itulah kekerasan yang paling buruk berlangsung tanpa kendali.

Tokoh pro-otonomi dan milisi:

Korban kekerasan politik pada 1999 juga mencakup sejumlah tokoh pro-otonomi yang terkemuka dan para anggota kelompok milisi. Sebagian ditahan, dipukuli, dan diinterogasi sebelum dibebaskan, sementara yang lain dibunuh. Para pejabat Indonesia dan pemimpin pro-otonomi menyatakan bahwa sejumlah besar pendukung mereka terbunuh pada 1999. Namun, ada kurang daripada 20 pembunuhan terhadap para pendukung mereka yang dapat dipastikan.

Pembunuhan yang terjadi sering membangkitkan kekerasan pembalasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pro-otonomi dan pasukan tentara Indonesia, yang dengan demikian menghasilkan lingkaran kekerasan. Misalnya, pembunuhan

terhadap seorang pengurus FPDK dan pegawai negeri sipil, Manuel Gama, pada April 1999 mendorong dilakukannya tindakan penghantaman besar oleh tentara Indonesia yang mengakibatkan terjadinya sejumlah pembunuhan di Cailaco, Bobonaro. (Lihat studi kasus: Pembunuhan di Cailaco.) Demikian juga di Manatuto, pembunuhan terhadap seorang pemimpin kelompok milisi Morok, Filomeno Lopez da Cruz, pada April mengakibatkan terjadinya pembunuhan pembalasan yang dilakukan oleh kekuatan pro-Indonesia. (Lihat ringkasan kabupaten: Manatuto.) Sama halnya dengan pembunuhan terhadap dua orang milisi Ablai di Dili pada April yang kemudian mendorong adanya gelombang kekerasan di kampung halaman mereka di Manufahi pada bulan itu juga, dan dalam kejadian itu setidaknya lima orang dibunuh. (Lihat ringkasan kabupaten: Manufahi.)

Pelaku

Pelaku langsung pelanggaran hak asasi manusia pada 1999 sebagian besar adalah anggota milisi, namun para prajurit dan perwira TNI hampir selalu terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anggota-anggota Polri dan Brimob jarang diidentifikasi sebagai pelaku langsung, tetapi mereka hampir selalu disebutkan tidak mengambil tindakan untuk mencegah, menghentikan, atau menginvestigasi pelanggaran berat hak asasi manusia. Para prajurit Falintil, dan kemungkinan para anggota kelompok prokemerdekaan yang lain, bertanggung jawab atas penganiayaan dan pembunuhan terhadap sejumlah kecil tokoh pro-otonomi dan anggota milisi.

Di luar pola umum ini, bukti yang ada menunjukkan bahwa beberapa kelompok milisi, kesatuan TNI, dan kesatuan Polri tertentu lebih umum terlibat dalam melakukan secara langsung pelanggaran hak asasi manusia dibandingkan kelompok-kelompok milisi dan kesatuan-kesatuan dalam TNI serta Polri lainnya.

Milisi:

Kelompok milisi yang paling buruk, dari segi kekejaman dan seringnya kekerasan yang mereka lakukan, adalah Dadurus Merah Putih dan Halilintar di Bobonaro, Sakunar di Oecussi, Aitarak di Dili, Besi Merah Putih di Liquiçá, Darah Integrasi di Ermera, Mahidi di Ainaro, dan Laksaur di Covalima. Yang kurang begitu kelihatan, tetapi meskipun demikian menjadi pelaku pelanggaran berat, adalah Tim Alfa di Lautém, Makikit di Viqueque, Saka dan Sera di Baucau, Ablai di Manufahi, serta Morok dan Mahadomi di Manatuto.

Militer:

Keterlibatan TNI dalam pelanggaran hak asasi manusia pada 1999 terjadi dalam empat bentuk dasar. Pertama, TNI membantu merekrut, melatih, membiayai, dan mempersenjatai kelompok-kelompok milisi yang melakukan pelanggaran. Kedua, TNI mengarahkan dan mengambil bagian dalam operasi bersama dengan kelompok-kelompok milisi, selama terjadinya berbagai pelanggaran. Ketiga, pasukan-pasukan TNI mendukung pelaksanaan pelanggaran dengan secara sengaja tidak melakukan

apa-apa untuk mencegah atau tidak menghentikan kekerasan yang terencana atau berkelanjutan yang dilakukan oleh milisi. Terakhir, dalam sejumlah kasus penting, pasukan TNI secara langsung melakukan tindak kekerasan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat.

Satu unit militer yang paling berbahaya adalah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan satuan tugas intelijennya, yang dikenal sebagai SGI (Satuan Tugas Intelijen). Walaupun relatif sedikit anggotanya, para perwira dan mata-mata Kopassus dan SGI sangat penting perannya dalam merancang dan melaksanakan beberapa serangan dan tindak kekerasan yang paling brutal dan mematikan di seluruh wilayah Timor-Leste pada 1999. Kesatuan elite TNI lainnya yang ditugaskan di Timor-Leste, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), agaknya berperan penting, walaupun kurang terlihat, dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Kesatuan reguler teritorial TNI yang paling berbahaya di Timor-Leste adalah yang ditempatkan pada Kodim 1636 di Bobonaro, Kodim 1635 di Covalima, Kodim 1638 di Liquiçá, Kodim 1633 di Ainaro, dan Kodim 1639 di Oecussi. Yang juga jelas melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, terutama dalam periode setelah pemungutan suara, adalah Batalion 745 TNI yang berbasis di Los Palos. Sebagaimana dicatat di atas, unsur-unsur dari batalion ini bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap sekitar 21 orang termasuk seorang wartawan Belanda Sander Thoenes, ketika mereka meninggalkan Los Palos menuju Timor Barat pada September 1999. (Lihat studi kasus: Amuk Batalion 745.)

Polisi:

Unit Polri yang paling sering terlibat dalam pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya adalah unit paramiliter Brigade Mobil (Brimob), yang ditugaskan dalam jumlah besar di seluruh wilayah Timor-Leste pada 1999. Pasukan-pasukan Brimob secara langsung bertanggung jawab, misalnya, atas pembunuhan di luar hukum terhadap seorang pendukung prokemerdekaan yang tidak bersenjata di Dili pada 26 Agustus. Pemuda tersebut saat itu mendesak prajurit-prajurit Brimob untuk bertindak terhadap anggota-anggota milisi bersenjata yang sedang menyerang para pemuda prokemerdekaan yang tidak bersenjata. Sebagai tanggapannya, para prajurit Brimob malah mengangkat senjata otomatisnya dan menembak pemuda itu hingga mati. (Lihat ringkasan kabupaten: Dili.)

Namun perlu dicatat bahwa berbeda dengan pola-pola lain perilaku Polri yang diamati, pelaksanaan langsung tindak kekerasan oleh para prajurit Brimob tampak agak sporadis. Sehingga ada kemungkinan bahwa insiden semacam itu bukanlah bagian dari rencana keseluruhan, namun merupakan produk dari suatu kecenderungan kelembagaan untuk menggunakan kekuatan yang mematikan. Dilengkapi dengan senjata otomatis berkekuatan tinggi (S-1), dan mendapatkan pelatihan seperti militer, Brimob sejak dulu (dan sekarang masih) pada dasarnya adalah suatu pasukan paramiliter bukan pasukan kepolisian, dan karenanya mereka memiliki banyak budaya kelembagaan yang sama dengan pasukan reguler dan tempur TNI.

Falintil:

Pada umumnya, pasukan Falintil melakukan pengendalian diri menghadapi serangan kekuatan pro-Indonesia. Namun, terdapat perkecualian. Di akhir 1998, dan sekali lagi pada April 1999, unit-unit Falintil di berbagai wilayah Timor-Leste memulai operasi-operasi yang di dalamnya anggota-anggota milisi pro-Indonesia, prajurit tentara, dan penduduk sipil ditahan, dipukuli atau dibunuh. Serangan dan pembunuhan semacam itu diketahui terjadi di Manufahi, Ermera, Manatuto, Bobonaro, Liquiçá, dan Dili. Dalam periode setelah pemungutan suara, badan keamanan Falintil, yang dikenal sebagai *Forças Popular* dan *Segurança*, melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam sejumlah kasus, orang-orang yang diketahui atau dicurigai sebagai anggota milisi pro-Indonesia ditahan dan disiksa ketika sedang diinterogasi.

Kesimpulannya, kejahatan penting yang terjadi di Timor-Leste pada 1999 mencakup pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan penganiayaan, kekerasan seksual, pemindahan penduduk secara paksa, dan penghancuran harta-benda. Tindakan-tindakan ini melanggar berbagai macam hak asasi manusia yang diakui oleh hukum internasional, meliputi hak untuk hidup, hak atas keamanan diri pribadi, hak atas integritas fisik, kebebasan berpikir, kebebasan berkumpul, dan hak untuk memiliki harta-benda.

Korban pelanggaran hak asasi manusia pada 1999 sebagian besar adalah para pendukung dan yang dianggap sebagai pendukung kemerdekaan, serta kerabat dekat mereka. Kelompok-kelompok utama korban (prokemerdekaan) mencakup: para pemimpin CNRT, pejabat tingkat lokal, orang-orang yang dianggap pengkhianat, penduduk desa di wilayah-wilayah basis prokemerdekaan, rohaniwan Katolik, mahasiswa dan pemuda, staf lokal UNAMET, perempuan dewasa dan muda, serta anak-anak kecil. Sejumlah kecil korban kekerasan adalah anggota kelompok-kelompok pro-Indonesia.

Orang-orang non-Timor-Leste—termasuk di dalamnya para staf internasional UNAMET, wartawan, dan pengamat—juga menjadi sasaran ancaman, intimidasi, dan pelecehan, dan beberapa diserang secara fisik dan terluka. Namun patut dicatat bahwa para pengamat dan staf internasional sangat jarang menjadi sasaran kekerasan yang mematikan, dan hanya dua orang asing yang dibunuh selama 1999. Seperti yang dibahas dalam Bab 4, pola itu tampaknya merupakan bagian dari satu strategi yang dipersiapkan secara sengaja oleh pihak berwenang Indonesia.

Pelaku langsung pelanggaran hak asasi manusia pada 1999 secara umum adalah para anggota dari sekian banyak kelompok milisi, namun para prajurit dan perwira TNI juga terlibat dalam kebanyakan kasus. Para perwira TNI, terutama dari intelijen militer dan unit-unit Kopassus, memimpin atau mengarahkan sebagian besar kelompok milisi, sementara sejumlah prajurit dan perwira TNI secara langsung melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia. Anggota-anggota Polri dan Brigade Mobil juga diidentifikasi sebagai pelaku langsung, walau tidak sesering para anggota TNI. Di samping itu, Polri jarang bertindak mencegah, menghentikan,

atau menyelidiki pelanggaran berat hak asasi manusia. Pelaku utama kekerasan terhadap tokoh-tokoh pro-Indonesia adalah para prajurit Falintil.

Pola-pola ini menghapus keraguan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di Timor-Leste pada 1999 dilaksanakan dalam skala yang luas dan sistematis, dalam konteks suatu serangan yang sengaja terhadap bagian-bagian tertentu dari penduduk Timor-Leste. Karenanya, kita bisa menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan kejahatan terhadap umat manusia, sebagaimana yang didefinisikan di dalam Statuta Roma dan perjanjian-perjanjian serta instrumen-instrumen internasional yang terkait.

Pola dan variasi

Pengamatan lebih dekat terhadap kekerasan 1999 ini mengungkap lebih jauh pola-pola dan variasi dari sifat serta penyebarannya. Hal-hal ini mencakup: variasi sistematis intensitas kekerasan sepanjang waktu; satu pola ketakmampuan rutin Polri untuk mengambil tindakan efektif dalam menghadapi tindak kekerasan; kesamaan yang jelas dalam *modus operandi* kekuatan milisi; dan satu variasi penting dalam persebaran kekerasan secara geografis. Pola dan variasi ini memberikan sebagian dari bukti yang paling kuat bahwa kekerasan di tahun 1999 bukanlah sesuatu yang terjadi secara spontan, tetapi sesuatu yang sistematis dan diatur oleh pihak berwenang Indonesia.

Variasi sementara – penutupan keran

Sebagaimana yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, dari segi parahnya pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste, kekerasan 1999 dapat dibagi ke dalam tiga periode: (i) periode pra-UNAMET, dari Januari hingga akhir Mei; (ii) periode UNAMET, dari 1 Juni hingga 30 Agustus; dan (iii) periode setelah pemungutan suara, dari 30 Agustus hingga akhir Oktober. Secara umum dapat dikatakan, pelanggaran hak asasi manusia paling sering dan paling berat terjadi pada periode pertama dan ketiga, dan tak seserius itu pada periode kedua.

Pola itu bukanlah kebetulan dan tidak dapat dijelaskan dengan merujuk kepada kepentingan-kepentingan atau perilaku individu anggota milisi atau "oknum" prajurit TNI. Sebaliknya, karena sifat sistematis dari variasi kekerasan yang berkembang di seluruh Timor-Leste, pola itu hanya dapat dijelaskan secara masuk akal sebagai produk keputusan politik, yang setidaknya diambil di tingkat provinsi, dan kemungkinan di tingkat yang lebih tinggi. Lebih tepatnya, pola itu tampak mencerminkan suatu keputusan melakukan pengendalian terhadap milisi dan tentara selama periode kehadiran internasional dalam jumlah yang besar. Baik sebelum maupun setelah periode pengawasan internasional, TNI dan kelompok-kelompok milisi secara bersama-sama melancarkan serangan kekerasan.

Bahkan hal yang mungkin lebih mengungkap perencanaan tingkat tinggi adalah pola variasi dalam setiap periode luas tersebut. Suatu pengkajian yang seksama menunjukkan bahwa pasang-surut kekerasan tepat sejalan dengan kepentingan politik internasional Indonesia. Lebih jauh lagi, dokumen-dokumen rahasia dari 1999 menyingkirkan keraguan bahwa para komandan TNI di Timor-Leste berusaha menjalankan kendali langsung atas tindakan kekerasan milisi, yang secara efektif menggerakkan atau menghentikan kekerasan sesuai dengan tujuan politik yang lebih luas.

Pola tersebut mulai mengemuka akhir Januari 1999, di puncak gelombang pertama kekerasan milisi dan tidak lama sebelum kunjungan satu delegasi PBB ke Timor-Leste pada 9 Februari 1999. Untuk mengantisipasi kunjungan tersebut, pihak berwenang militer Indonesia—dan khususnya Danrem Kol. Tono Suratman—mengambil langkah-langkah yang seksama untuk memastikan bahwa kekerasan milisi akan berhenti, atau tidak akan terlihat oleh delegasi PBB.

Sejumlah dokumen rahasia TNI merekam langkah-langkah tersebut. Pertama adalah sebuah perintah dari Kol. Tono Suratman tertanggal 28 Januari 1999, kepada ke-13 Dandim di Timor-Leste. Perintah itu dibuka dengan menyebutkan: "rencana kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia PBB ke Timtim tanggal 9 Februari 1999" dan "beberapa kasus yang terjadi di wilayah Timtim yang melibatkan Wanra [yaitu milisi] yang mengakibatkan korban jiwa." Surat perintah itu selanjutnya berbunyi:

> "Sehubungan dengan ref di atas, kepada tersebut alamat agar: melaksanakan penarikan senjata yang dipegang oleh anggota Wanra atau Ratih [yaitu milisi] selama tidak melaksanakan tugas khusus atau operasi tempur di wilayah Kodim masing-masing."*

Dokumen ini mengungkapkan beberapa keterangan. Pertama, sebagaimana yang dibahas dalam Bab 7, dokumen itu menegaskan bahwa TNI memang membagikan senjata kepada milisi-milisi, dan bahwa milisi-milisi bersenjata secara teratur ditugaskan oleh TNI untuk melaksanakan operasi-operasi tempur. Kedua, dokumen itu secara meyakinkan menunjukkan bahwa pihak berwenang militer Indonesia berada dalam posisi mengendalikan arus kekerasan milisi, dan melakukannya sejalan dengan tujuan politik yang lebih luas. Dalam hal ini, tujuannya adalah menyembunyikan fakta kerjasama TNI-milisi agar tidak diketahui oleh delegasi PBB yang akan berkunjung.

Dokumen rahasia TNI yang lain, tertanggal 12 April 1999, mengungkap pola yang sama—sebuah rencana yang disusun dengan baik oleh para perwira militer untuk mengendalikan sementara kekerasan milisi dalam rangka mengelabui para pengamat internasional. Dokumen berupa telegram itu adalah perintah dari Kolonel Tono Suratman kepada banyak jenis komandan operasi, termasuk komandan Satgas Tribuana Kopassus, dan komandan militer Sektor A dan B. Perintah itu

---

* Lihat: Danrem 164/WD kepada Dandim 1627-1639 dan lain-lain. Telegram rahasia No. TR/41/1999, 28 Januari 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #7).

dibuka dengan menyebut "bentrokan" kekerasan di Liquiçá pada 5 April yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Namun inti persoalannya terungkap dalam paragraf berikutnya dari telegram tersebut, yang menyebutkan "Jadwal kegiatan tamu asing (Atase Pertahanan, Duta Besar, LSM) untuk mengunjungi wilayah Timor-Leste khususnya ke daerah Liquiçá" dalam minggu-minggu mendatang. Sehubungan dengan kunjungan tersebut, para penerima telegram diperintahkan:

> "Untuk menghindari sorotan tamu asing terhadap kegiatan operasi teritorial, untuk sementara waktu kegiatan dialihkan kepada kegiatan pengamanan pangkalan."[*]

Alasan yang mendasari perintah ini begitu terang-terangan. Para pejabat TNI mengetahui—atau mungkin telah diberitahu oleh atasan mereka di Jakarta—bahwa secara politis akan merugikan posisi internasional Indonesia jika delegasi luar negeri yang terdiri atas para Atase Militer, Duta Besar, dan organisasi nonpemerintah melihat adanya bukti kerjasama TNI-milisi. Oleh karenanya, selama waktu kunjungan tersebut, para komandan unit diperintahkan tidak menjalankan operasi-operasi seperti itu.[†]

Pola manipulasi resmi atas kekerasan mengemuka kembali di pertengahan Juli 1999, seminggu sebelum Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dijadwalkan untuk menentukan apakah proses pendaftaran pemilih, dan Konsultasi Rakyat secara keseluruhan, bisa dilanjutkan. Keprihatinan yang serius telah dinyatakan PBB menyangkut situasi keamanan yang rentan dan ada kemungkinan nyata bahwa Annan akan mengeluarkan keputusan negatif, dan meletakkan beban kesalahan pada kegagalan Indonesia untuk menyediakan kondisi keamanan yang diperlukan. Keputusan seperti itu pasti akan merusak wibawa pemerintah Indonesia di mata internasional dan strategi mereka di Timor-Leste. Pemerintah menggarisbawahi keprihatinannya dengan mengirimkan delegasi tingkat tinggi menteri-menteri kabinet ke Dili pada 12 Juli untuk bertemu dengan UNAMET dan para pejabat lokal.

Karenanya, merupakan sesuatu yang penting bahwa mendekati hari yang menentukan itu, terjadi penurunan cukup besar kegiatan milisi. Meskipun masih terjadi kekerasan, namun banyak ancaman serangan besar dan terkoordinasi oleh milisi terhadap penduduk setempat dan staf UNAMET tidak menjadi kenyataan.[‡] Indikator yang lebih umum dari kegiatan milisi—penghadangan di jalan, insiden

* Lihat: Wakil Danrem 164/WD (Kolonel Mudjiono) atas nama Danrem 164/WD, kepada Dansektor A dan B, dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/43/1999, 12 April, 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #12).

† Perintah Danrem diturunkan ke tingkat yang lebih rendah dalam hierarki TNI pada hari-hari berikutnya. Dalam sebuah telegram tertanggal 16 April 1999, Dandim Dili, Letnan Kolonel Endar Priyanto, meneruskan perintah yang sama ke semua komandan operasi di wilayah komandonya. Lihat: Dan Sat Gas Pam Dili kepada Kapolres Dili, Dan Yonif 521/DY, dan lain-lain. Telegram rahasia, No. STR/192/1999, 16 April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #50).

‡ Ini meliputi beberapa yang mengakibatkan dilakukannya penutupan sementara tempat-tempat pendaftaran di empat atau lima lokasi.

penembakan, pembakaran rumah, dan pemukulan—juga menurun selama periode ini. TNI, Polri, dan sejumlah pejabat sipil Indonesia tampak berusaha bertindak sesuai dengan Kesepakatan 5 Mei.

Kantor Urusan Politik UNAMET melihat ketenangan tersebut sebagai bukti bahwa kekerasan sedang diatur di tingkat yang tinggi—dari markas besar TNI, di bawah tekanan dari Departemen Luar Negeri dan Presiden—dan bahwa kekerasan akan dapat dimulai lagi secepat ia berakhir. Perumpamaan yang mereka pergunakan adalah kran air, yang dapat dibuka dan ditutup sesuai keinginan. Apa yang sedang terjadi di pertengahan Juli, mereka yakini, adalah sebuah contoh bagaimana kekerasan sedang ditutup alirannya, dalam sebuah usaha resmi yang dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari keputusan negatif pada pertengahan jalan proses pendaftaran. Kantor Urusan Politik UNAMET pun berpendapat, jika kekerasan dapat ditutup alirannya, aliran kekerasan itu pun dapat juga dengan mudah dibuka kembali.*

Bukti dokumenter yang ditemukan sejak waktu itu memberikan dukungan yang kuat bagi kesimpulan tersebut. Bukti itu mencakup sebuah telegram rahasia dari Dandim Dili kepada semua Danramil, yang memerintahkan mereka untuk memberlakukan keamanan yang lebih ketat terhadap gudang-gudang senjata, untuk membantu Polri dan pejabat-pejabat pemerintah dalam mengendalikan milisi, dan khususnya membantu pembongkaran rintangan-rintangan jalan. Bagian yang relevan dari perintah tersebut berbunyi:

> "1.BB. Senjata hanya digunakan untuk kepentingan dinas, setelah selesai melaksanakan tugas, senjata dimasukkan kembali ke dalam gudang. 2. AA. Agar para komandan kesatuan membantu Pemerintah Daerah dan Polri dalam upaya menertibkan Pam Swakarsa di wilayah masing-masing. 2.BB. Koordinasikan dengan aparat kepolisian untuk membuka kembali jalan-jalan yang ditutup portal ..."†

Instruksi ini dikeluarkan sebagai kelanjutan dari satu perintah tentang hal yang sama yang dikeluarkan oleh Danrem pada 17 Juli 1999.

Dilihat dari waktu diberikannya perintah-perintah tersebut, terhapuslah keraguan bahwa perintah itu keluar untuk menanggapi tekanan kuat PBB dan

---

* Laporan situasi mingguan yang ditulis oleh Kantor Urusan Politik UNAMET, untuk periode 12-18 Juli 1999 menyatakan: "Ada tanda-tanda perbaikan yang lumayan dalam suasana keamanan di distrik-distrik tertentu selama minggu ini, tetapi masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa kondisi keamanan yang diperlukan untuk Konsultasi Rakyat yang adil dan bebas telah tercapai. Alasan utama untuk waspada adalah bahwa belum ada satu perubahan yang dapat dibuktikan menyangkut segi-segi dasar yang melandasi ketidakamanan, dengan akibat bahwa setiap perubahan yang tampak akan dapat dengan cepat berbalik". UNAMET, Political Affairs, "Weekly Sitrep #3 (12 July-18 July)." Dicetak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book on Political Affairs and Human Rights in East Timor*, Dili, November 1999.

† Lihat: Dandim 1627/Dili kepada Danramil 01-04 dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/173/1999, 20 Juli 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #37).

dunia internasional agar TNI memperbaiki situasi keamanan atau berisiko menghadapi keputusan negatif yang akan menghentikan seluruh proses. Sama pentingnya juga, perintah-perintah itu membenarkan analisis UNAMET bahwa para pejabat militer memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup kran kekerasan, dan bahwa mereka melakukannya sesuai dengan kebutuhan politik mereka sendiri.

Kejadian-kejadian pada Agustus memberikan dukungan tambahan bagi penafsiran tersebut. Ketika akhir proses pendaftaran semakin dekat di awal Agustus, terjadi serangan serius milisi terhadap staf UNAMET di Bobonaro dan Ainaro, serta ketegangan mendadak berupa kekerasan di Dili pada hari terakhir kampanye yang mengakibatkan setidaknya delapan orang terbunuh. Gelombang kekerasan pada Agustus tersebut diikuti dengan penghentian hampir sepenuhnya kegiatan milisi pada hari pemungutan suara, 30 Agustus, dan selama penghitungan suara pada hari-hari selanjutnya.*

Dua kegiatan tersebut—pemungutan suara dan penghitungan suara—membuka kesempatan yang cukup besar bagi milisi pro-Indonesia untuk menghentikan sepenuhnya seluruh proses, tetapi mereka tidak melakukannya. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk adanya ketenangan yang tiba-tiba dalam situasi penuh kekerasan pada saat kritis semacam itu adalah bahwa milisi dan pelindung Indonesia mereka tetap yakin pihak mereka berkemungkinan menang. Sebenarnya, dalam komentar kepada media setelah pemungutan suara, pejabat-pejabat penting Indonesia—termasuk Ali Alatas dan Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim—menunjukkan bahwa mereka menduga menang atau kalah dengan perbedaan suara tipis.† Jika mereka meyakini yang sebaliknya, maka hari pemungutan suara dan penghitungan suara akan menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan intimidasi dan kekerasan, bukan menghentikannya. Fakta bahwa pola yang sama muncul di seluruh Timor-Leste tampaknya menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak menyerang pada hari-hari tersebut pasti merupakan keputusan yang dibuat di tingkat tinggi.

Akhirnya, patut dicatat bahwa kegiatan milisi, yang oleh para pejabat Polri dan TNI selalu diklaim tidak bisa dikendalikan, tiba-tiba berhenti pada hampir semua kesempatan kunjungan delegasi penting tingkat tinggi di wilayah Timor-Leste. Sebagaimana telah dikemukakan, hal ini terjadi pada Februari, April, dan mendekati pertengahan masa pendaftaran pada Juli. Namun, peristiwa yang paling menarik perhatian terjadi pada 11 September 1999, ketika delegasi Dewan Keamanan PBB dan Jenderal Wiranto mengunjungi Dili untuk menyelidiki laporan-laporan tentang kekerasan milisi dan TNI.

* Sejumlah tempat pemungutan suara harus ditutup sementara selama sehari sebagai akibat dari ancaman atau tindak kekerasan, tetapi secara keseluruhan proses pemungutan suara berjalan jauh lebih lancar daripada yang diperkirakan. Hal yang sama juga terjadi dengan penghitungan suara yang dilakukan di dalam museum pemerintah yang bersebelahan dengan markas besar Kepolisian Daerah (Polda) di Dili di antara 31 Agustus dan 4 September.

† Berbicara kepada wartawan pada Januari 2000, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim mengatakan: "Dalam prediksi kami, kami menang atau kalah dengan perbedaan suara tipis … Tetapi hanya 21 persen yang memilih kekuasaan Indonesia tetap di Timor Timur… Itu benar-benar mengecewakan." *South China Morning Post*, 5 Januari 2000.

Terselip di antara beberapa hari penembakan dan pembakaran yang tanpa henti, pada hari kunjungan nyaris tidak ada insiden. Bagi mereka yang pernah berada di Timor-Leste untuk beberapa waktu, termasuk para analis di Kantor Urusan Politik UNAMET, kejadian ini bukanlah kejutan. Kejadian itu adalah bukti lebih jauh bahwa kekerasan dapat dibuka-ditutup seperti sebuah kran, sesuai dengan kepentingan atau keinginan politik para pejabat tinggi TNI dan pemerintah Indonesia.

Dengan adanya bukti tersebut, pola kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia setelah pernyataan Keadaan Darurat pada 7 September 1999, secara khusus terungkap. Di setiap kabupaten di seluruh Timor-Leste, tampak pasukan TNI bergabung dengan milisi dalam sebuah serangan sistematis berupa pembakaran dan penjarahan, atau setidaknya tidak melakukan apa-apa untuk menghentikannya. (Lihat ringkasan kabupaten.)

Di Manatuto, misalnya, para Perwira Penghubung Militer UNAMET menyaksikan TNI mengangkut sejumlah drum minyak yang kemudian digunakan dalam sebuah operasi pembakaran selama enam hari yang terencana dengan baik, yang akhirnya memusnahkan kota. Walaupun benar bahwa operasi itu dimulai sebelum 7 September, namun penetapan Keadaan Darurat tidak tampak menghalangi atau memperlambat samasekali operasi pembakaran tersebut. Pola yang sama diamati pula secara langsung oleh sejumlah anggota UNAMET, termasuk Kepala Perwira Penghubung Militer, yang menyaksikan prajurit-prajurit TNI membakari gedung-gedung di seluruh Dili jauh sesudah Keadaan Darurat diumumkan dan setelah TNI mengambil kendali penuh atas wilayah Timor-Leste.

Bahkan yang mungkin lebih mencolok adalah setelah penetapan Keadaan Darurat, banyak dari pembantaian paling hebat terjadi, semuanya melibatkan TNI dan atau Polri. Misalnya:

- Pada 8 September, para anggota milisi dan prajurit TNI membunuh sedikitnya 14 orang, kalau tidak lebih banyak lagi, yang mengungsi di kantor Polisi Maliana. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Kantor Polisi Maliana.)
- Antara 8 dan 10 September, para anggota milisi bersama dengan prajurit TNI menangkap dan mengeksekusi sedikitnya 82 orang dari empat desa di Kabupaten Oecussi, dalam pembunuhan massal yang paling terpadu di Timor-Leste. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Passabe dan Maquelab.)
- Dalam sebuah serangan penuh kekerasan yang sistematis, ketika bergerak dari markasnya di Los Palos ke Timor Barat pada September, para prajurit Batalion 745 membunuh sebanyak 21 orang, termasuk seorang jurnalis Belanda. (Lihat studi kasus: Amuk Batalion 745.)
- Pada 25 September, beberapa anggota milisi bersenjata yang dilatih Kopassus dari Los Palos menyergap dan mengeksekusi lima orang rohaniwan dan empat orang awam ketika mereka berkendaraan di jalan menuju Baucau (Lihat Studi Kasus: Pembunuhan Rohaniwan Los Palos).

Beberapa pengamat mengemukakan bahwa para perwira tinggi TNI tertentu, walaupun tidak berhasil, berusaha mengendalikan milisi dan pasukan teritorial,

tidak lama sebelum dan setelah penetapan Keadaan Darurat. Menurut satu laporan yang belum dipastikan, misalnya, Jenderal Wiranto berusaha memerintahkan penarikan milisi ke Timor Barat sebelum pemungutan suara, tetapi tidak mampu membuat perintahnya berlaku karena penentangan dari dalam TNI. Demikian pula, beberapa orang yang memiliki hubungan langsung dengan kepemimpinan TNI pada saat itu, mengklaim bahwa Panglima Keadaan Darurat Mayor Jenderal Kiki Syahnakri dan Kolonel Noer Muis berusaha mengendalikan kekerasan selama masa Keadaan Darurat. Jika klaim-klaim ini dapat dibuktikan kebenarannya, klaim-klaim ini mungkin dapat memengaruhi penilaian-penilaian tentang kesalahan perwira-perwira tertentu. Klaim-klaim tersebut juga akan dapat membantu mengklarifikasi apakah kekerasan yang terjadi setelah penghitungan suara diperintahkan melalui rantai komando yang normal atau tidak. Namun, klaim-klaim tersebut tidak akan mengubah kesimpulan-kesimpulan umum yang dibuat di sini—bahwa tindak kekerasan yang paling serius dilakukan setelah penetapan Keadaan Darurat, dan bahwa beberapa perwira tinggi TNI mengoordinasi atau membiarkan kekerasan tersebut.

Terus terjadinya kekerasan yang tampak terkoordinasi setelah pernyataan Keadaan Darurat memiliki nilai penting tersendiri, karena Keadaan Darurat melibatkan pengerahan pasukan Kostrad. Tidak seperti pasukan teritorial dan pasukan lainnya yang telah berada di Timor-Leste selama beberapa waktu—dan yang dianggap telah 'terkontaminasi' hubungan dengan milisi—pasukan Kostrad ini adalah pasukan baru dan dikomandoi secara terpusat. Lebih jauh, mereka dianggap loyal kepada Jenderal Wiranto, yang bertugas sebagai Panglima Kostrad pada 1996-1997. Oleh karena sebab-sebab ini, sementara pengamat mengira bahwa pasukan Kostrad akan lebih berdisiplin dan bahwa mereka akan memutus cengkeraman "oknum-oknum" di dalam TNI yang bisa jadi telah membantu milisi. Tetapi sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh bukti-bukti yang disebutkan terdahulu, kenyataannya berbeda.

Singkatnya, pola waktu terjadinya kekerasan menghapus keraguan bahwa kekerasan bersifat sistematis dan bahwa kekerasan itu pada tingkat tertentu dikoordinasi oleh TNI dan pihak-pihak berwenang lain dalam pemerintah.

Ketidakbertindakan dan keterlibatan polisi

Pandangan bahwa kekerasan yang terjadi itu direncanakan, dan bukan spontan, memperoleh dukungan lebih jauh dalam pola perilaku Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pola yang paling jelas adalah kegagalan terus-menerus Polri dalam menangani tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi ketika kekerasan itu berlangsung, atau dalam mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menyelidiki atau menghukum mereka setelah terjadinya kekerasan tersebut.

Satu contoh yang paling jelas dari pola ini adalah tindakan Polri terhadap serangan milisi terhadap rombongan bantuan kemanusiaan di Liquiçá pada 4 Juli. Meskipun ada peringatan jelas bahwa rombongan tersebut kemungkinan diserang, dan

walaupun ada permintaan berulang-ulang dari UNAMET agar Polri melakukan pengawalan resmi, tidak satu pun permintaan itu dipenuhi. Polri juga gagal mengambil tindakan ketika serangan terjadi, walaupun kantor Kepolisian Resor (Polres) hanya berada dalam jarak beberapa menit dari tempat kejadian bila ditempuh dengan menggunakan mobil. Lebih lanjut, setelah serangan itu Polri tidak berusaha menangkap atau bahkan menanyai satu pun anggota milisi yang terlihat menyerang rombongan tersebut dengan senjata. Sebaliknya, mereka bekerjasama dengan milisi untuk menangkap orang-orang yang melarikan diri dari serangan tersebut. Ketika petugas UNAMET dan organisasi-organisasi nonpemerintah berkendaraan menuju Dili dengan mobil mereka yang rusak, mereka dihalangi perintang jalan di depan kantor Kepolisian Resor (Polres) Liquiçá. Perintang jalan itu dijaga oleh dua anggota milisi yang salah satunya membawa sebuah senapan otomatis. (Lihat studi kasus: Penyerangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan.)

Para anggota milisi yang diketahui melakukan tindakan-tindakan kekerasan hampir tidak pernah ditahan atau diproses hukum atas kejahatan apapun. Satu-satunya pengecualian terjadi di tengah munculnya tekanan internasional yang kuat dan intervensi politik pada tingkat tertinggi. Sebagai tanggapan pada tekanan semacam itu, sejumlah anggota milisi ditahan dan dituntut sehubungan dengan serangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan pada 4 Juli, dan serangan terhadap kantor UNAMET di Maliana pada tanggal 29. Namun, kasus-kasus tersebut tidak dengan sungguh-sungguh diproses hukum dan, setelah menerima penangguhan hukuman yang pendek selama empat atau lima bulan, semua tertuduh dibebaskan.[*]

Persoalannya bukan ambiguitas hukum. Bahkan di Timor-Leste, hukum Indonesia jelas melarang pembunuhan, penculikan, penghancuran harta-benda, dan membawa senjataapi tanpa izin, sehingga ada dasar hukum yang cukup jelas bagi Polri untuk menindak milisi. Lebih lagi, di bawah kerangka Kesepakatan 5 Mei, Polri diberi tanggung jawab tunggal untuk memelihara keamanan dan ketertiban selama Konsultasi Rakyat. Persoalannya juga bukan pelatihan dan keahlian yang kurang memadai. Kadang-kadang polisi bertindak tegas dan profesional, walaupun itu biasanya dalam mengejar seseorang dari pihak prokemerdekaan yang dituduh melakukan tindakan kriminal.

Persoalan sebenarnya adalah bahwa Polri secara politik dan operasional berada di bawah TNI.[†] Dalam hal milisi Timor-Leste didukung oleh TNI—dan Polri jelas mengetahui hal ini—kesempatan menjadi amat sangat kecil bagi Polri untuk berani menindak mereka. Sesungguhnya, para perwira Polri mengatakan kepada para Polisi Sipil PBB (UN Civpol) bahwa mereka terhambat oleh TNI. Ini bukan

* Lihat UNAMET, Political Affairs Office, "Weekly Sitrep #4 (26 July-1 August)," halaman 3-4; "Weekly Sitrep #5 (2 August-8 August)," halaman 4; "Weekly Sitrep #6 (9 August-15 August)," halaman 4. Dicetak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

† Berbicara kepada seorang wartawan Australia di akhir 1999, misalnya, seorang mantan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan: "Tentang siapa yang memiliki otoritas tertinggi, kita semua tahu itu TNI." ABC, *Four Corners*, "The Vanishing," 18 Oktober 1999, transkrip, halaman 9.

hanya persoalan mengikuti tuntutan atau perintah TNI. Tetapi ini juga akibat dari sebuah persepsi umum bahwa sebagian anggota milisi sebenarnya adalah prajurit TNI, mungkin bahkan Kopassus. Dalam keadaan seperti ini, Polri takut bertindak dengan sungguh-sungguh.

Hakikat persoalannya tergambarkan dengan baik melalui pengalaman satu tim UNAMET yang pergi menuju Kecamatan Atsabe pada 31 Agustus 1999 untuk menyelidiki pembunuhan terhadap João Lopes, salah satu dari dua staf lokal UNAMET yang dibunuh di wilayah itu oleh milisi pada hari pemungutan suara. Ketika mendekati bangunan di mana jenazah Lopes terbaring, tim UNAMET melihat bahwa jenazah itu dikelilingi oleh sekitar 50 orang anggota milisi —yang sebenarnya adalah orang-orang yang telah membunuh João Lopes—bersenjatakan parang, senjataapi rakitan, dan senapan. Bercampur bersama para milisi adalah para anggota Polri dan TNI. Pembicaraan panjang dengan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) setempat dan seorang perwira Polri yang berbasis di Ermera menghasilkan jaminan bahwa kerumunan milisi itu akan dibubarkan dan dikendalikan. Tetapi tidak ada tindakan yang diambil, dan milisi tetap berada di tempat yang berdekatan, dengan senjata di tangan. Sebagai tanggapan terhadap protes dari pihak UNAMET, Kapolsek dan perwira dari Ermera tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak berani memerintahkan milisi untuk melakukan sesuatu, karena mereka sangat mungkin akan berbalik menyerang Polri. (Lihat studi kasus: Pembunuhan staf UNAMET di Boboe Leten.)

Polri juga mengambil bagian dalam operasi-operasi yang memfasilitasi kekerasan TNI dan milisi. Beberapa dari operasi tersebut, dinilai dari jangkauannya, pasti direncanakan di tingkat provinsi ataupun di tingkat yang lebih tinggi. Bukti paling kuat tentang hal tersebut bisa dilihat pada periode setelah pemungutan suara, dan khususnya pada perilaku Polri dan TNI selama evakuasi personel UNAMET dari kantor-kantor tingkat kabupaten di awal September. Peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan terjadinya evakuasi besar-besaran itu memiliki kesamaan besar yang mengerikan dengan, dan tanda-tanda dari, suatu operasi perang psikologis yang terencana dengan baik. Satu laporan UNAMET mengenai evakuasi dari lima kantor kabupaten pada 3 dan 4 September menyimpulkan bahwa kekerasan yang terjadi merupakan bagian dari satu "strategi yang terencana dengan baik untuk memaksa UNAMET mundur dari beberapa wilayah tertentu kembali ke Dili."[*] Jika ditinjau kembali, jelas bahwa tujuan penting dari operasi tersebut adalah untuk meneror staf internasional UNAMET dan semua pengamat internasional lainnya, dengan maksud membuat mereka meninggalkan Timor-Leste.

Dalam setiap kejadian, urutannya dimulai dengan milisi berkeliaran secara bebas di seluruh kota utama, dilengkapi dengan persenjataan yang lebih berat daripada biasanya. Lalu mereka menembak, menyulut api dan membakar gedung, serta membunuh. Dalam setiap kasus, Polri maupun TNI tidak berusaha melakukan

* UNAMET, Political Affairs Office, "Incidents on 3 and 4 September which led to the relocation to Dili of UNAMET staff from Aileu, Ainaro, Maliana, Liquiçá and Same regencies." Dicetak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

tindakan untuk menghalangi milisi, melainkan justru giat membantu mereka. Dalam beberapa jam, Polri di kabupaten yang terkena serangan memperingatkan bahwa mereka tidak lagi bisa mengendalikan keadaan, dan menyarankan agar semua staf UNAMET mengungsi ke kantor Polres. Setelah mereka mengumpulkan staf PBB di kantor mereka, tiba-tiba mereka menyatakan bahwa mereka akan pergi, dan menyarankan UNAMET untuk mengikuti. Karena tidak memiliki penjamin untuk keamanan mereka sendiri, dan terputus dari semua sumber informasi independen, para pejabat UNAMET di tingkat kabupaten tidak memiliki pilihan kecuali pergi bersama polisi. Demikianlah, mereka bergabung dengan konvoi Polri keluar dari kota kabupaten dan kembali ke Dili.

Dari waktu ke waktu Polri bergerak melampaui ketidakmampuan umum mereka untuk bertindak atau memfasilitasi kekerasan milisi, dan benar-benar berperan langsung sebagai pelaku kekerasan. Hal ini khususnya dilakukan oleh kesatuan Brigade Mobil (Brimob) Polri, yang dalam jumlah beberapa ribu orang ditempatkan di Timor-Leste selama Konsultasi Rakyat. Dalam sebuah insiden di Dili, pada hari terakhir kampanye (26 Agustus 1999), seorang anggota Brigade Mobil berseragam menembakkan senapan otomatisnya ke arah seorang penduduk sipil pada bagian punggung, yang langsung menewaskan orang sipil tersebut. Korban sipil itu adalah seorang mahasiswa bernama Bernardino Agusto Guterres (alias Bernardino da Costa). Insiden tersebut disaksikan oleh sejumlah orang yang berada di tempat dan terekam dalam video. Dalam sebuah pernyataan di bawah sumpah kepada Komisi Pemilihan (*Electoral Commission*) independen yang mengawasi proses pemungutan suara, salah seorang saksimata menggambarkan insiden tersebut:

> *Kerumunan orang berteriak kepada Polisi untuk menghentikan milisi yang menembak. Salah seorang dari kerumunan … memprotes Polisi, dengan mengarahkan perhatian Polisi kepada milisi. Seorang Polisi yang tidak menggunakan baret seperti teman-temannya … mengatakan [kepada si pemuda] bahwa ia dapat menembaknya karena si pemuda menghasut orang-orang. [Pemuda itu] berbalik dan lari. Polisi itu lalu menembaknya pada jarak sekitar tiga langkah. Saya kemudian melihat sebuah luka tembak di tengah punggung si pemuda dan satu di belakang lehernya. Pemuda itu meninggal di tempat. Ketika petugas ambulans mengangkat jasadnya kemudian, saya melihat sebuah luka dengan lubang besar menganga di tenggorokan.*[*]

Seorang penduduk lokal yang menelepon UNAMET kemudian pada hari yang sama, mengatakan bahwa Polri terlihat memberikan senjata kepada para anggota milisi sebelum dan sesudah insiden. Orang lain yang ada di tempat kejadian mengatakan bahwa para anggota milisi Aitarak sesungguhnya adalah prajurit TNI. Klaim-klaim ini tidak pernah diuji secara independen, namun sejalan dengan pola dukungan resmi kepada milisi yang sudah kuat.

* UNAMET, Electoral Commission, "Statement Minuted on Friday, August 27, 1999."

Ringkasnya, terdapat satu kumpulan besar bukti, berdasarkan pengamatan lapangan, bahwa Polri tidak mau atau tidak mampu bertindak untuk mencegah atau menghentikan kegiatan melanggar hukum yang dilakukan oleh milisi, dan bahwa sebabnya terutama terletak pada subordinasi posisi Polri terhadap TNI. Kesimpulan ini tidak hanya berdasarkan pada satu tindakan atau kejadian semata, tetapi berdasarkan pada analisis mengenai perilaku yang jelas berpola.

Fakta bahwa jenis perilaku yang sama dari Polri terlihat secara konsisten di seluruh wilayah Timor-Leste, sangat kuat menunjukkan bahwa ini merupakan persoalan kebijakan, setidaknya setinggi tingkat regional (Polda). Pola perilaku yang sama dan mengerikan pada saat pemindahan paksa penduduk di awal September menunjukkan kesimpulan yang sama. Bukti dokumenter juga menegaskan bahwa peran Polri dalam pemindahan tersebut sudah direncanakan di tingkat provinsi (Polda). Namun, karena kita mengetahui (dari dokumen-dokumen yang dianalisis dalam Bab 5 laporan ini), bahwa perencanaan strategis keseluruhan evakuasi dibuat di markas besar TNI di Jakarta, kita dapat meyakini dengan cukup alasan bahwa perilaku Polri yang terlihat ini telah dirancang pada tingkat itu, dan sangat mungkin di bawah pengarahan TNI.

Modus Operandi milisi

Gaya dan *modus operandi* kelompok-kelompok milisi hampir sama di manapun di Timor-Leste. Kesamaan yang luas ini, di ke-13 kabupaten, memberikan petunjuk tambahan tentang perencanaan dan koordinasi milisi oleh militer dan pihak-pihak berwenang pemerintah, setidaknya di tingkat provinsi, dan mungkin lebih tinggi lagi.

Gaya milisi dirancang untuk mengelabui. Sekelompok kecil anggota milisi menggunakan seragam militer Indonesia, atau salah satu bagiannya, tetapi sebagian besar berpakaian ‘sipil’—mengenakan bandana berwarna merah dan putih yang diikatkan di leher atau di kepala, dan kerap mengenakan kaos oblong bertuliskan slogan pro-otonomi dan sejenisnya. Pakaian ‘sipil’ semacam ini agaknya dirancang untuk mempertahankan ilusi bahwa milisi terbentuk secara spontan, dan untuk memberikan dasar yang masuk akal bagi pengingkaran keterlibatan resmi dalam tindak kekerasan.

Jika gaya milisi ditujukan untuk mengelabui, maka *modus operandi* milisi dirancang untuk meneror dan mengintimidasi. Patut dicatat bahwa tidak ada satupun dari metode yang digunakan itu hanya terjadi di Timor-Leste. Sebagaimana gagasan inti penggunaan pasukan milisi ‘sipil’, *modus operandi* milisi diambil dari seluruh repertoar yang dikembangkan oleh pasukan-pasukan TNI dalam operasi kontrapemberontakan dan anti-kejahatan yang dilaksanakan di bagian-bagian lain Indonesia selama lebih daripada tiga puluh tahun.*

* Untuk pembahasan yang rinci tentang repertoar kontra-pemberontakan TNI, lihat Geoffrey Robinson, “*Rawan* is as *Rawan* Does: The Origins of Disorder in New Order Aceh,” *Indonesia*, No. 66 (Oktober 1998) halaman 127-156.

Unsur yang paling umum dari repertoar milisi mencakup pembuatan penghalang jalan dan pendirian pos pemeriksaan, pemukulan, pembakaran rumah, ancaman mati di muka umum, mengacungkan dan menembakkan senjataapi, dan, terhadap perempuan, berupa ancaman dan kenyataan kekerasan seksual termasuk pemerkosaan.* Ketika tidak melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, sebagian besar unit-unit milisi menjalani latihan dan baris-berbaris militer dengan memanggul senjata organik maupun rakitan.

Pembunuhan terencana, jasad yang dipamerkan di hadapan publik, dan pemotongan anggota badan juga merupakan bagian dari repertoar dan, lagi-lagi mengikuti standar praktik TNI, ini semua dimaksudkan sebagai contoh—untuk mengirimkan pesan kepada orang-orang lain di dalam komunitas tentang apa yang akan terjadi pada siapa saja yang tidak memperhatikan peringatan milisi atau TNI. Jasad korban sering dipotong dengan berbagai cara—dipenggal hingga tanpa kepala, dikeluarkan isi perutnya, atau dicincang hingga menjadi potongan-potongan kecil—dan kemudian ditinggalkan di tempat umum. Satu laporan tentang milisi di Viqueque, yang disusun oleh Perwira Penghubung Militer (*Military Liaison Officers* – MLO) UNAMET pada Agustus 1999 mengatakan bahwa: "Metode pembunuhannya, seperti yang dilaporkan, sangat mengerikan. Misalnya, sesosok korban dengan otaknya ditembus tulang binatang … Tampak bahwa tujuannya adalah untuk menimbulkan pengaruh psikologis dan menggunakan cara kematian tersebut untuk mengintimidasi orang lain."†

Unsur umum lainnya dari repertoar milisi yang jelas-jelas ditujukan untuk meneror penduduk adalah memberikan tanda pada yang dijadikan sasaran pembunuhan. Seperti yang dijelaskan dalam laporan UNAMET dari Viqueque:

> "Ini adalah satu strategi dasar perang psikologis, yang bisa mencakup ancaman terhadap seorang korban yang disampaikan kepada masyarakat luas untuk memastikan ancaman itu sampai ke sasaran. Taktik lainnya yang tercatat di dalam wilayah kami adalah praktik menandai rumah-rumah dengan tanda 'X' berwarna merah yang menyatakan bahwa penghuninya telah ditandai untuk dibunuh."‡

Dalam pandangan para analis UNAMET, maksud dari taktik semacam itu adalah untuk mencapai sebuah tujuan psikologis "… seperti menunjukkan kepada penduduk bahwa milisi memiliki kekuatan untuk membidik dan membunuh seseorang."

---

* Para prajurit TNI juga secara langsung terlibat dalam pemerkosaan dan perbudakan seksual. Untuk perincian yang lebih jauh lihat United Nations, *Situation of human rights in East Timor*, December 10, 1999, halaman 9-11.

† UNAMET Viqueque, "Outline of Pro-Integration Militia in Viqueque Area," August 6 1999, halaman 3. Dicetak kembali dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

‡ UNAMET Viqueque, "Outline of Pro Integration Militia in Viqueque Area," August 6, 1999, halaman 4. Dicetak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

Cara milisi menyerang sasarannya terbukti dimaksudkan untuk menghasilkan akibat psikologis yang sama. Ketika milisi melancarkan sebuah serangan, mereka tidak melakukannya dengan ketepatan yang baik dari regu pembunuh profesional. Tetapi, mereka menciptakan kesan sebagai orang-orang yang penuh amarah, berteriak-teriak, dan membelah udara dengan senjata mereka. Dengan kata lain, mereka berlaku seperti apa yang dibayangkan tentang orang-orang yang "mengamuk".

Gaya 'amuk' dari serangan milisi terekam dalam banyak gambar yang disiarkan televisi dari Timor-Leste antara Juni dan September 1999. Salah satu dari insiden-insiden yang paling awal dan mengerikan dari jenis ini muncul pada 4 Juli, ketika para anggota kelompok milisi Besi Merah Putih menyerang rombongan bantuan kemanusiaan yang berhenti sejenak ketika melewati kota Liquiçá.* (Lihat studi kasus: Penyerangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan.) Satu laporan UNAMET tentang serangan tersebut memberikan uraian berikut ini:

> "Sekitar lima menit setelah rombongan berhenti di Liquiçá, sebuah mobil mini-van berwarna biru-hijau dengan tulisan 'Miramar' di sisinya, menuruni bukit dengan cepat dari arah selatan, datang dan berhenti tiba-tiba di tengah deretan kendaraan yang berhenti. Ketika mobil van itu berhenti, sekitar 20 orang pemuda melompat keluar dan mulai mendekati staf organisasi-organisasi nonpemerintah dan UNAMET, sambil berteriak 'bunuh mereka!' Sebagian besar membawa parang, pisau, atau senapan rakitan. Setidaknya salah seorang anggota kelompok membawa senapan otomatis. Tanpa peringatan maupun provokasi para anggota milisi mulai menyerang, mengayun-ayunkan parang dan pisau mereka secara membahayakan, mengarahkan senjata mereka kepada para anggota rombongan, dan menghancurkan kaca jendela sebagian besar kendaraan. Serangan berlanjut ketika orang-orang berusaha melarikan diri…"†

Kesamaan yang menonjol di dalam repertoar kekerasan milisi di seluruh Timor-Leste tampak menegaskan bahwa para milisi dilatih dan tindakan mereka direncanakan dengan baik oleh TNI. Perilaku milisi yang tersebut begitu menyebar luas, dan begitu konsisten, sehingga hanya dapat dipahami dengan baik sebagai produk dari perencanaan yang terkoordinasi, setidaknya pada tingkat provinsi (Korem). Bahkan jika semua tindakan milisi bukan merupakan hasil langsung dari koordinasi TNI, sangatlah jelas bahwa para milisi tidak akan dapat berlaku sebagaimana yang mereka lakukan tanpa persetujuan dan dukungan dari TNI, dan pada tingkat yang lebih rendah, dari Polri.

* Serangan 4 Juli tidak muncul tersendiri. Pada hari-hari sebelumnya, staf PBB di Liquiçá telah menjadi sasaran dari serangkaian ancaman dan serangan. Pada umumnya para anggota Besi Merah Putih mencaci-maki staf PBB, sambil mengacungkan senjata api atau parang. Masing-masing insiden telah dilaporkan kepada Polri. Hasilnya beberapa tambahan petugas polisi ditempatkan untuk melindungi staf UNAMET. Tetapi tidak ada yang dilakukan untuk mencegah milisi, yang tetap bersenjata, agar tidak bergerak bebas di kota dan agar tidak melakukan intimidasi.

† UNAMET, Political Affairs Office, "Report on the Liquiçá Incidents of 4 July," July 12, 1999, halaman 3. Dicetak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

Variasi geografis

Meskipun benar bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste bervariasi secara sistematis sepanjang waktu, dan bahwa para pelakunya menjalankan *modus operandi* yang demikian sama di mana pun mereka berada, ada variasi geografis yang signifikan di dalam intensitas dan frekuensi pelanggaran. Secara paradoks, perbedaan tersebut memberikan dukungan tambahan pada klaim bahwa kekerasan tersebut adalah sesuatu yang terencana dan bukan spontan.

Kelompok-kelompok milisi tidaklah muncul secara serentak atau merata di seluruh Timor-Leste. Secara umum, kelompok-kelompok milisi pertama kali didirikan di kabupaten-kabupaten di bagian barat dan tengah dan agak kemudian di wilayah timur, dan di wilayah kantong Oecussi. Kabupaten-kabupaten yang ada di bagian barat dan tengah juga memiliki jumlah anggota milisi yang lebih besar dan penetrasi kelompok yang lebih dalam hingga turun ke tingkat kecamatan dan desa. Bukanlah suatu kebetulan bahwa kelompok-kelompok milisi yang paling terkenal dan paling ditakuti—seperti BMP, Aitarak, Mahidi, Laksaur, Darah Integrasi, Dadurus Merah Putih, dan Halilintar —semuanya terkonsentrasi di kabupaten-kabupaten bagian barat.

Demikian juga ada beberapa keragaman geografis di dalam intensitas kekerasan. Di dalam periode pra-UNAMET dan UNAMET, wilayah yang paling buruk adalah beberapa kabupaten yang ada di bagian barat, yaitu Bobonaro, Liquiçá, dan Covalima, sementara kabupaten Dili, Ermera, dan Ainaro kadang-kadang mencapai tingkat ketidakamanan yang sama. Sebaliknya di sebagian besar kabupaten bagian tengah dan timur, yaitu Aileu, Manufahi, Manatuto, Baucau, Lautém, dan Viqueque bersama dengan wilayah kantong Oecussi, relatif tenang, dan milisi kurang begitu aktif, setidaknya sebelum periode setelah pemungutan suara.

Secara sekilas, keragaman tersebut tampak membenarkan klaim bahwa kekerasan 1999 bersifat spontan. Namun melalui analisis yang lebih dalam, keragaman tersebut sangat menunjukkan bahwa kekerasan berasal dari sebuah pola jaringan yang sistematis di antara milisi dan pihak-pihak berwenang Indonesia yang khas terjadi di kabupaten-kabupaten di bagian barat. Secara lebih khusus, milisi cenderung lebih kuat dan lebih kejam di wilayah-wilayah: (i) yang berbatasan dengan Indonesia; (ii) yang pihak berwenang sipil dan militernya memainkan peran agresif dalam mendukung mereka; dan (iii) yang di dalamnya terdapat jaringan kelompok pro-Indonesia yang terbangun sudah sejak lama dan beroperasi sebelum 1999.

Faktor pertama, dan mungkin yang paling penting, menjelaskan mengapa konsentrasi kekerasan terjadi di kabupaten-kabupaten bagian barat yakni karena kedekatan geografisnya dengan Indonesia. Kabupaten-kabupaten yang paling penuh dengan kekerasan—Covalima dan Bobonaro—berbatasan dengan Timor Barat Indonesia. Kawasan perbatasan menawarkan sejumlah keuntungan, baik dari segi logistik, militer, dan politis, yang memfasilitasi dan mendukung penggunaan kekerasan di sana.

Pertama, wilayah perbatasan bermakna bahwa orang-orang muda akan dapat direkrut dengan mudah di NTT dan diangkut melintasi perbatasan untuk menjadi “milisi Timor Timur”. Kedekatan geografis juga membuat mudah untuk menyusupkan prajurit TNI ke Timor-Leste guna menjalankan operasi rahasia. Satu penyelidikan yang dilakukan oleh satu organisasi nonpemerintah Indonesia di awal Agustus 1999 mengungkapkan bukti penting tentang rekrutmen tersebut dan gerakan melintasi perbatasan yang dilakukan oleh milisi, yang meliputi BMP, Laksaur, Mahidi, dan Ablai. Salah seorang anggota milisi mengatakan kepada para investigator bahwa sekitar 250 orang milisi di Suai sebenarnya berasal dari Belu, NTT. Laporan yang sama mengungkapkan bahwa panglima tertinggi milisi, João Tavares, telah menyewa sebuah rumah di sisi perbatasan NTT, di Atambua, yang dipergunakannya sebagai markas milisi.*

Kawasan perbatasan juga memfasilitasi pelenyapan jasad para korban pelanggaran hak asasi manusia. Pada September 1999, pasukan TNI dan milisi mengangkut setidaknya 27 jasad korban pembantaian di Gereja Suai melintasi perbatasan ke Timor Barat, dan ada kesaksian lisan bahwa jasad korban-korban lainnya juga dilenyapkan dengan cara yang sama. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Gereja Suai.)

Kedekatan geografis juga merupakan sebuah kondisi dasar bagi dilakukannya deportasi paksa besar-besaran penduduk Timor-Leste pada periode setelah pemungutan suara. Sebagian besar dari sekitar 250.000 orang penduduk Timor-Leste yang diungsikan paksa ke NTT berasal dari kabupaten-kabupaten bagian barat yang berbatasan dengan Indonesia. Pengungsian paksa ini tidak akan dapat terjadi dalam skala demikian besar, jika Indonesia tidak mudah dicapai melalui jalan darat. Dukungan pada klaim tersebut terletak pada fakta bahwa sebagian besar yang dipindahkan paksa tinggal di kota-kota dan desa-desa yang terletak di sepanjang jalan utama menuju perbatasan.

Intensitas kekerasan yang besar di kabupaten-kabupaten bagian barat juga jelas berhubungan dengan sikap pihak-pihak berwenang sipil dan militer yang bertugas di wilayah tersebut. Sikap para pejabat lokal dan kabupaten memengaruhi cara penugasan TNI dan Polri di sana, dan juga memengaruhi kekuatan dan tingkat kegiatan kelompok-kelompok milisi di wilayah tersebut.

Sikap para Komandan Distrik Militer (Dandim), dan perwira intelijen militer, amatlah penting. Dandim Bobonaro, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian, dan kepala seksi intelijennya, Letnan Sutrisno, luarbiasa bersemangat dalam mendukung milisi, dan Kabupaten Bobonaro merupakan wilayah dengan persoalan hak asasi manusia yang paling tidak pernah berhenti. Para perwira ini—beserta perwira-perwira yang lain di Covalima, Liquiçá, dan Viqueque—dianggap sebagai bagian dari masalah sehingga UNAMET mengajukan pernyataan resmi kepada pemerintah Indonesia kurang daripada dua pekan sebelum pemungutan suara agar mengganti para Dandim itu.†

* Lihat “Hasil Investigasi Forum Solidaritas Perdamaian Timor Leste,” [10] Agustus 1999, Kupang.

† Ian Martin menulis kepada Duta Besar Tarmidzi (Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat

Tampaknya sebagai hasil dari pernyataan resmi tersebut, Dandim Bobonaro dan Covalima dipindahkan dan diganti tidak lama sebelum pemungutan suara.

Untuk berbagai sebab, pemindahan menjelang saat pelaksanaan pemungutan suara ini tidak menyelesaikan persoalan, sebagian karena pemindahan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan. Letnan Kolonel Siagian masih terlihat di Bobonaro pada 30 Agustus dan sesudahnya memimpin pasukan, dan kehadirannya itu bersamaan waktunya dengan adanya laporan pembagian senjata kepada milisi dan peningkatan kekerasan yang dramatis di kabupaten tersebut. Tidak jelas apakah Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus tetap berada di Kabupaten Covalima setelah ia secara resmi diganti. Namun yang sudah pasti penggantinya sebagai Dandim adalah seorang perwira intelijen militer yang ditunjuk langsung oleh Panglima Kodam IX, Mayor Jenderal Adam Damiri. Dandim yang baru, Letnan Kolonel Liliek Koeshadiyanto, terlibat sejumlah kekerasan terburuk di Timor-Leste, termasuk pembantaian di Gereja Suai tanggal 6 September. Kehadirannya di tempat kejadian kejahatan tersebut memperkuat kesimpulan umum bahwa Dandim—dan para perwira militer umumnya—merupakan faktor yang luarbiasa penting dalam membentuk pola kekerasan.

Arti penting khusus dari para Dandim ini juga membantu menjelaskan tingkat kekerasan yang relatif rendah_di sejumlah kabupaten. Di Aileu misalnya, Dandim Mayor Maman Rahman tampak kecil perannya dalam menggalang dan mendukung kelompok-kelompok milisi. Ini mungkin karena pangkatnya hanya mayor, lebih rendah daripada pangkat bupati dan berbagai perwira Kopassus di wilayah tersebut, atau karena perwira-perwira lain di kabupaten itu yang mengambil kepemimpinan. Apapun sebabnya, patut diperhatikan bahwa Aileu pada 1999 mengalami tingkat kekerasan milisi yang jauh lebih rendah dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya.

Pola yang sama jelas terlihat di Kabupaten Viqueque. Bagaimanapun juga, Dandim yang ditunjuk tidak lama sebelum referendum, Letnan Kolonel Gustaf Hero, berdampak meredakan pada milisi, dan bekerja aktif membatasi terjadinya kekerasan setelah pemungutan suara di kabupaten tersebut. Usahanya ini membantu menjelaskan mengapa di Kabupaten Viqueque hanya terjadi dua pembunuhan dalam seluruh periode setelah pemungutan suara, yang merupakan tingkat kekerasan terendah di Timor-Leste.

Namun, bukan hanya sikap perwira militer yang memengaruhi persebaran kekerasan secara geografis. Sikap para bupati, camat, dan kepala desa juga membuat perbedaan persebaran tersebut. Secara keseluruhan, kekerasan cenderung paling buruk ketika para bupati memberikan dukungan penuh secara pribadi maupun dinas kepada milisi. Khususnya ini terjadi dalam kasus Liquiçá, Bobonaro, dan Covalima, yang para bupatinya secara langsung dan agresif terlibat pengorganisasian milisi.

di Timor Timur, Indonesia) pada 19 Agustus 1999, yang meminta agar keprihatinannya itu disampaikan kepada yang berwenang di Jakarta (Koleksi SCU, Doc #B). Martin kemudian menulis bahwa dirinya telah meminta penggantian perwira-perwira tersebut karena mereka "lebih memperkuat daripada melawan impunitas milisi, yang beberapa di antara mereka adalah anggota aktif TNI." Ian Martin, *Self-Determination in East Timor*, halaman 76-77.

Pentingnya bupati, sebagai kekuasaan yang potensial independen, juga diperjelas oleh keadaan di Kabupaten Baucau, di mana milisi relatif tetap tenang, bahkan setelah pemungutan suara 30 Agustus. Di sana, walaupun ada tekanan kuat dari Kepala Staf Kodim, bupati aktif menentang pembentukan milisi-milisi baru. Alasan mengapa ia melakukan hal tersebut masih tidak jelas. Terdapat spekulasi bahwa kelompok-kelompok milisi lama—seperti Saka dan Sera—dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang dekat dengan bupati, dan ia menganggap pembentukan milisi-milisi baru sebagai tantangan terhadap kekuasaannya sendiri. Spekulasi yang lain menyatakan bahwa ia dipengaruhi oleh Uskup Baucau, Monsignor Nascimiento. Apapun alasannya, faktanya adalah ia telah merintangi mobilisasi milisi baru, setidaknya untuk sementara.

Bupati Manufahi juga tampak secara serupa berdampak meredakan terhadap kekerasan milisi di wilayahnya. Walaupun ia berdinas sebagai seorang pejabat pemerintah Indonesia, Nazario José Tilman de Andrade dianggap sebagai orang moderat dan bahkan bersimpati pada kemerdekaan. Lebih jauh lagi, ada tanda-tanda pertentangan di antara dirinya dengan pimpinan milisi Ablai. Mungkin ketiadaan dukungan bupati kepada Ablai mengakibatkan lemahnya kelompok milisi ini, dan membuat tingkat kekerasan yang dilakukan oleh para anggotanya relatif rendah pada 1999.

Penjelasan yang ketiga dan yang berkaitan mengenai persebaran geografis kekerasan yang tidak merata pada 1999 adalah bahwa kabupaten-kabupaten di barat memiliki jaringan pialang kekuasaan pro-Indonesia yang andal jauh sebelum 1999. Konsentrasi para bos pro-Indonesia di kabupaten bagian barat memiliki akar historis yang dalam. Dalam paruh akhir abad ke-19, penguasa Portugis di Timor-Leste memandang kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah perbatasan sebagai tidak bisa diatur, membangkang, dan liar, dan menjadikan kerajaan-kerajaan itu sebagai pusat perhatian dari berbagai serangan penaklukan yang berulang kali.[*] Ketika kekuasaan Portugis mulai runtuh pada 1974-1975, banyak dari keluarga setempat yang berkuasa di kawasan tersebut melihat satu kesempatan untuk membebaskan diri dari mereka, dan memilih mendukung invasi serta aneksasi Indonesia.

Jaringan pro-Indonesia yang sudah dibangun lama itu diandalkan untuk memobilisasi kekuatan milisi besar dalam jangka waktu yang relatif singkat. Contoh kasusnya adalah João Tavares, orang yang pada 1999 dijadikan Panglima Tertinggi dari Pasukan Pejuang Integrasi (PPI). Tavares mendapatkan kedudukannya karena berjuang di pihak Indonesia sejak 1975. Ia diberi penghargaan karena loyalitasnya kepada pemerintah Indonesia, dengan ditunjuk sebagai Bupati Bobonaro selama dua kali masa jabatan.[†] Ia juga berhasil menumpuk penguasaan tanah yang besar, yang

* Mengenai reputasi wilayah barat akan keliarannya, lihat Katherine Davidson, *The Portuguese Colonisation of Timor: The Final Stage, 1850-1912*, Tesis Ph. D, University of New South Wales, 1994, halaman 74, 101, 170, dan 181.

† Tavares ditunjuk menjadi Bupati Bobonaro pada 1978 dan menduduki jabatan itu selama sepuluh tahun kemudian. Dunn menulis bahwa setelah 'integrasi' resmi Timor Timur pada 1976, "… orang-orang Timor tepercaya, seperti João Tavares dan Tomás Gonçalves ditunjuk menjadi bupati." Dunn, *Timor: A Nation Betrayed*, halaman 266.

menjadikannya salah satu tuan tanah paling besar di Timor-Leste, setelah Presiden Soeharto dan sejumlah kroninya. Jadi, pada 1999, Tavares telah lama menjadi operator lokal yang amat berkuasa, dan ia hanyalah salah satu dari beberapa orang di kabupaten-kabupaten bagian barat yang dapat diandalkan untuk mengorganisasi milisi dan kegiatan pro-otonomi.

Sebaliknya, kabupaten-kabupaten di bagian tengah dan timur memiliki jaringan bos pro-Indonesia yang kurang kuat. Sebagian karena secara umum kabupaten-kabupaten ini lebih miskin daripada yang di bagian barat, dan karenanya mungkin kurang kondusif bagi kemunculan para pialang kekuasaan yang makmur dan berkuasa. Yang juga penting, kabupaten-kabupaten di bagian tengah dan timur secara historis merupakan wilayah basis yang penting bagi perlawanan Fretilin dan Falintil. Beberapa kepala desa di kabupaten-kabupaten ini, bahkan beberapa bupati, bersimpati atau setidaknya tidak bermusuhan dengan Fretilin, walaupun mereka tidak menunjukkan hal ini secara terbuka. Keadaan itu sungguh-sungguh membatasi rombongan orang yang mungkin bergabung dengan milisi atau memimpinnya.

Jadi, secara paradoksal, pola geografis persebaran kekerasan milisi yang tidak merata ini tidak mendukung klaim bahwa kekerasan tersebut bersifat spontan. Lebih daripada itu, pola tersebut memperkuat bukti lain bahwa kekerasan tersebut bersifat sistematis dan secara krusial bertumpu pada hubungan antara pasukan-pasukan milisi dengan pihak-pihak berwenang Indonesia. Lebih tepatnya, konsentrasi kekerasan di kabupaten-kabupaten bagian barat Timor-Leste berhubungan dengan tiga faktor utama: kedekatan geografis dengan Indonesia; sikap dan latar belakang karier dari para pejabat kabupaten dan tingkat lebih rendah; dan lokasi jaringan pro-Indonesia yang sudah terkondisikan secara historis.

Ringkasnya, bab ini mengemukakan bahwa pola-pola yang bisa dilihat dalam karakter dan persebaran kekerasan di Timor-Leste menunjukkan bahwa kekerasan itu tidaklah spontan, melainkan lebih bersifat sistematis dan direncanakan oleh pihak-pihak berwenang Indonesia. Empat pola yang menonjol mengarah pada kesimpulan tersebut.

Pertama, terdapat variasi sistematis dalam jumlah dan bobot kekerasan yang terjadi sepanjang waktu. Bisa dibedakan tiga periode umum, yang masing-masing memiliki ciri-cirinya sendiri, sebagai berikut: (i) periode pra-UNAMET (Januari hingga akhir Mei); (ii) periode UNAMET (awal Juni hingga 30 Agustus); dan periode setelah pemungutan suara (30 Agustus hingga akhir Oktober). Kekerasan menurun dan meningkat selaras dengan kebutuhan dan kepentingan politik pihak-pihak berwenang Indonesia, dan ada bukti tidak langsung maupun dokumenter bahwa keragaman tersebut merupakan masalah kebijakan resmi.

Kedua, terdapat kegagalan terus-menerus dari Polri, dan pihak-pihak berwenang lain yang bertanggung jawab, untuk mengambil tindakan efektif terhadap para pelaku kekerasan. Konsistensi dari ketidakbertindakan semacam ini, dan pola impunitas yang turut dilahirkan oleh tindakan itu, tampak mencerminkan suatu kebijakan yang keputusannya diambil pada tingkat tinggi.

Ketiga, terdapat kesamaan yang menonjol dalam *modus operandi* milisi di seluruh wilayah Timor-Leste. Konsistensinya dengan gaya dan perilaku tertentu yang telah terlihat di berbagai tempat yang berbeda di Timor-Leste, menunjukkan dengan kuat bahwa kekerasan dikoordinasikan setidaknya pada tingkat Komando Resor Militer (Korem), dan mungkin pada tingkat yang lebih tinggi.

Terakhir, walaupun terdapat kesamaan luas perilaku kekerasan di seluruh Timor-Leste, terdapat variasi geografis yang signifikan dalam hal intensitas dan banyaknya kekerasan. Variasinya bersifat sistematis dan konsisten dengan bukti lain tentang perencanaan keseluruhan oleh pihak berwenang Indonesia.

Enam Dokumen Kunci

Sejak awal 1999, terungkap sejumlah dokumen yang digambarkan sebagai bukti dari perencanaan tingkat tinggi TNI untuk kekerasan baik sebelum dan setelah pemungutan suara 30 Agustus. Bukti tersebut perlu diperiksa dengan hati-hati karena mungkin penting sekali untuk menetapkan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban politik dan hukum atas kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste.

Khususnya enam dokumen pantas diperiksa dengan sangat seksama karena klaim-klaim yang dibuat atas namanya. Dokumen-dokumen itu adalah: satu memorandum rahasia dari seorang pemimpin milisi yang menjelaskan rencana untuk melaksanakan sebuah operasi terhadap para pendukung kemerdekaan; sepucuk surat edaran yang diduga dikeluarkan oleh panglima tertinggi milisi, João Tavares; satu laporan rahasia yang disusun oleh seorang pejabat tinggi pemerintah, H.R. Garnadi; satu lembar telegram yang menyampaikan garis besar rencana untuk memobilisasi satu kesatuan militer khusus setelah pemungutan suara; satu rencana Polri untuk melakukan evakuasi besar-besaran setelah pemungutan suara, yang disebut 'Operasi Hanoin Lorosae II'; dan satu rencana operasi TNI untuk Konsultasi Rakyat dan evakuasi, yang disebut 'Operasi Wira Dharma-99.'

Operasi Pembersihan

Dokumen pertama yang diajukan sebagai bukti mengenai perencanaan tingkat tinggi untuk kekerasan adalah satu memorandum bertanggal 11 Maret 1999, yang ditujukan kepada panglima tertinggi milisi, João Tavares, dan para pemimpin milisi lainnya.* Memo yang dikeluarkan oleh komandan milisi Darah Merah, Lafaek Saburai, ini memberitahukan rencana untuk memulai 'Operasi

* Surat dari Lafaek Saburai kepada João da Silva Tavares, (No.024/Ops/R/III/1999) tentang "Operasi Pembersihan," 11 Maret 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #15). Terjemahan bahasa Inggris dari dokumen ini dilampirkan pada laporan East Timor Action Network "Subject: *Operasi Sapu Jagad* – Indonesia's military plan to disrupt independence," Ref. Doc. FAIO-1999/10/21.

Pembersihan' pada 1 Mei 1999 pukul 00.00. Menurut dokumen ini, operasi akan "menghapus keberadaan" para pemimpin dan kader kelompok prokemerdekaan, dengan pertama-tama memindahkan seluruh penduduk pro-Indonesia dari Dili ke Kabupaten Bobonaro dan kemudian membunuh semua orang yang tetap berada di Dili pada tanggal yang ditentukan itu.

Ketika dokumen ini pertama kali terungkap di awal 1999, sebagian analis dengan cepat menyimpulkan bahwa dokumen ini membuktikan keberadaan suatu rencana sentral intelijen militer Indonesia untuk mengacaukan referendum melalui kekerasan dan intimidasi milisi. Tidak lama kemudian, para pengamat dan analis lain menerima kesimpulan ini dan mulai berbicara dan menulis dengan penuh keyakinan tentang 'Operasi Pembersihan' sebagai rencana TNI untuk merongrong referendum.[*] Misalnya organisasi East Timor Action Network (ETAN) menulis bahwa "pelaksanaan rencana [untuk mengacaukan pemungutan suara] itu dimulai segera setelah Presiden Habibie menawarkan pilihan otonomi luas pada Agustus 1998, dan ini muncul secara resmi pada Maret 1999 dengan nama sandi Operasi Sapu Jagad."[†]

Untuk mendukung pendapat ini, para analis mencatat bahwa penulis dokumen 'Operasi Pembersihan', Lafaek Saburai (yang juga dikenal dengan nama Afonso Pinto) diketahui memiliki hubungan dengan BIA (Badan Intelijen ABRI) yang sampai dengan Januari dipimpin oleh Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim. ETAN menulis bahwa oleh karena hubungan Saburai dengan BIA, "dapat ditarik kesimpulan mengenai dari mana perintah itu berasal."[‡]

Kesimpulan itu mungkin benar, tetapi ada sejumlah alasan untuk berhati-hati dalam menerima cara pembacaan dokumen seperti itu. Salah satunya, latar belakang Saburai sebagai agen BIA tidak dengan sendirinya merupakan bukti bahwa 'Operasi Pembersihan' yang diancamkannya merupakan satu rencana TNI atau BIA, dan ada alasan-alasan untuk meragukannya. Sebagaimana yang terungkap dalam beberapa kejadian kemudian, kelompok milisinya, Darah Merah, adalah kelompok yang amat lokal dan samasekali tidak termasuk kelompok yang paling berpengaruh atau kuat di Timor-Leste.[§] Apabila dibandingkan dengan kelompok Aitarak di Dili, Besi Merah Putih di Liquiçá, atau Mahidi di Ainaro, kelompok Darah Merah adalah kelompok yang kecil dan tidak berarti. Orang dapat bertanya mengapa demikian kalau Saburai dan Darah Merah benar-benar merupakan saluran utama dari suatu rencana sentral BIA.

---

* Argumen ini tampaknya muncul pertama kali dalam buletin Indonesian Human Rights Campaign (Tapol), "The Indonesian Army's 'dirty war' in East Timor," *Tapol Bulletin*, Juni 1999.

† East Timor Action Network (ETAN), "Subject: '*Operasi Sapu Jagad*' – Indonesia's military plan to disrupt independence." (Ref doc. FAIO-1999/10/21).

‡ ETAN, "*Operasi Sapu Jagad*."

§ Darah Merah menurut laporan dibentuk pada 21 Maret 1999. East Timor International Support Center (ETISC), "Indonesia's Death Squads: Getting Away with Murders," ETISC Occasional Paper No. 2 (Darwin, Mei 1999), halaman 18.

Nilai dari dokumen 'Operasi Pembersihan' sebagai bukti dari satu operasi militer utama yang terencana juga berkurang dengan adanya fakta bahwa operasi yang disebut dalam dokumen tersebut tidak pernah benar-benar terjadi. Tanggal 1 Mei tiba dan berlalu tanpa adanya tanda-tanda pembersihan massal sebagaimana yang dijanjikan dalam surat tersebut.

Pendeknya, TNI mungkin telah memiliki suatu rencana untuk meneror penduduk dan memengaruhi hasil pemungutan suara, tetapi dokumen 'Operasi Pembersihan' tidak memberikan bukti yang meyakinkan tentang operasi tersebut. Sebaliknya, dokumen ini tampak seperti hasil karya dari seorang komandan milisi tingkat lokal yang agak terlalu bersemangat, yang membesar-besarkan keinginannya kepada sesama komandan milisi dan kepada perwira TNI yang mungkin mendengarkan.

Namun jika dokumen 'Operasi Pembersihan' tidak membuktikan adanya suatu perencanaan tingkat tinggi untuk kekerasan oleh intelijen militer Indonesia, dokumen ini memberikan bukti tambahan tentang hakikat hubungan antara milisi dan pihak berwenang Indonesia. Dokumen ini menunjukkan, misalnya, bahwa kelompok-kelompok milisi setidaknya menginginkan koordinasi luas dengan TNI. Dokumen ini juga mengungkapkan sejauh mana retorika teror, satu ciri dari strategi kontrapemberontakan TNI sendiri, telah menjadi ciri standar gaya milisi di awal 1999.

Dokumen Tavares

Dokumen kedua yang sering dikutip sebagai bukti bahwa kekerasan sebelum dan sesudah pemungutan suara direncanakan pada tingkat tinggi adalah satu instruksi, bertanggal 17 Juli 1999, yang diduga ditandatangani oleh pemimpin tertinggi milisi Timor-Leste—secara resmi dikenal sebagai 'Panglima Pasukan Pejuang Integrasi'—João da Silva Tavares. Instruksi sepanjang dua halaman ini ditujukan kepada para komandan utama milisi di Timor-Leste, dan ditembuskan kepada berbagai perwira militer dan Polri, termasuk Panglima TNI Jenderal Wiranto dan Panglima Kodam IX, Mayor Jenderal Adam Damiri.

Dengan keterusterangan yang mengejutkan, instruksi Tavares mengarahkan semua komandan milisi untuk: "Tetap mengadakan teror dan intimidasi terhadap pihak-pihak yang disinyalir memengaruhi rakyat untuk tidak menerima Otonomi Khusus" dan mendesak mereka untuk "Menekan dan mengancam rakyat untuk tidak ikut berpartisipasi dalam kampanye yang dilakukan oleh Juru Kamp. Pro-Kemerdekaan…"[*] Instruksi ini juga menjanjikan bahwa pihak berwenang Indonesia akan memberikan dukungan material yang besar kepada milisi. "Sebelum hasil jajak pendapat diumumkan," dokumen itu menyebutkan:

* "Instruksi Panglima Pasukan Pejuang Integrasi Tentang Kesiapan dan Kesiagaan Pasukan Pejuang Integrasi (Milisi) Dalam Menyikapi Perkembangan Situasi dan Kondisi di Timor Timur," (No.020/INS/PPI/VII/1999). Salinan dari dokumen ini, dan terjemahannya dalam Bahasa Inggris yang dibuat oleh UNAMET, dimiliki oleh penulis.

> "… akan dibagikan senjata-senjata modern yang telah disiapkan oleh ABRI sebanyak 15.000 (lima belas ribu) pucuk, serta akan didukung oleh Pasukan elite TNI dan dilengkapi dengan senjata berat/Tank serta Pesawat-Pesawat tempur modern sebanyak 50 (lima puluh) buah …. Pada saat Pengumuman hasil Konsultasi Rakyat, ternyata Pihak Pro-Otonomi dinyatakan kalah maka secara serentak dengan kekuatan penuh melancarkan Operasi Pembersihan terhadap pendukung-pendukung prokemerdekaan mulai dari yang berusia 15 Tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan tidak terkecuali."*

Dokumen ini muncul pertama kali di awal Agustus 1999 dan segera ditangkap oleh para pengamat sebagai bukti kerjasama TNI-milisi dalam merancang kekerasan di seluruh Timor-Leste.† Kepala Misi UNAMET meminta pendapat stafnya tentang dokumen ini. Polisi Sipil PBB (UN Civpol) berkonsultasi dengan rekannya dari Polri yang dengan cepat menyimpulkan, atas dasar teknis, bahwa dokumen tersebut palsu. Kantor Urusan Politik UNAMET juga meragukan keaslian dokumen tersebut, namun lebih berdasarkan pada analisis politik, daripada analisis teknis atau forensik.

Salah satunya, Kantor Urusan Politik memperhatikan bahwa sejumlah salinan dari dokumen tersebut telah dikirimkan ke UNAMET dalam jangka waktu hanya beberapa hari. Ini sangat tidak biasa, khususnya untuk dokumen yang sesensitif itu, dan ini membuat para analis mencurigai keasliannya. Bagaimana dan mengapa begitu banyak salinan untuk dokumen semacam itu begitu cepat tersedia? Perhatian juga ditujukan pada penggunaan istilah 'Milisi' dalam judul dokumen, satu istilah yang ditolak oleh pemerintah Indonesia dan para pemimpin kelompok prointegrasi. Mengapa Panglima Pasukan Pejuang Integrasi menggunakan istilah tersebut?

Analis dari Kantor Urusan Politik UNAMET berpendapat bahwa ada dua kemungkinan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah bahwa dokumen tersebut dibuat sebagai bagian dari perang psikologis yang dirancang oleh kubu pro-Indonesia untuk menyebarkan ketakutan di kalangan pendukung prokemerdekaan. Kemungkinan kedua adalah bahwa dokumen tersebut diciptakan oleh pihak prokemerdekaan untuk mendiskreditkan TNI dan milisi dengan satu pukulan dokumenter yang memuaskan, dan pada saat yang kritis di dalam prosesnya.

Isi dari dokumen ini menimbulkan kecurigaan. Bahasa yang digunakan dalam instruksi terlalu baik dan teratur dalam menyampaikan berbagai ancaman dan klaim-klaim kasar di dalamnya, sehingga tidak meyakinkan. Bahkan jika pada waktu tertentu João Tavares mengeluarkan sebagian atau semua perintah dan janji

---

* "Instruksi Panglima Pasukan Pajuang Integrasi Tentang Kesiapan dan Kesiagaan Pasukan Pejuang Integrasi (Milisi)."

† Beberapa salinan dari dokumen ini sampai ke tangan UNAMET dalam waktu yang hampir bersamaan, bersama dengan sepucuk surat yang ditujukan kepada Wakil Sekretaris Front Politik Internal (*Frente Política Interna* – FPI) CNRT bertanggal 3 Agustus 1999.

seperti yang dikemukakan dalam dokumen ini, sangat tidak mungkin bahwa ia akan mengatakannya secara tertulis.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, Kantor Urusan Politik menyimpulkan bahwa dokumen Tavares bertanggal 17 Juli sangat mungkin bukan dokumen asli. Bukan berarti bahwa UNAMET menganggap Tavares dan pemimpin milisi yang lain tidak bersalah melakukan pelanggaran, atau bahwa UNAMET meragukan keterlibatan TNI dalam kekerasan. Sebaliknya, UNAMET tetap yakin bahwa TNI dan milisi bekerjasama sangat erat. Kesimpulan ini sekadar menyatakan bahwa UNAMET tidak menganggap dokumen Tavares sebagai bukti yang meyakinkan untuk fakta kerjasama TNI dan milisi.

Dokumen Garnadi

Dokumen ketiga, yang muncul di Dili pertengahan Juli 1999, sangat mungkin merupakan dokumen yang otentik—tetapi seperti dokumen-dokumen lain yang sudah dibahas, dokumen ini tidak dengan sendirinya membuktikan semua hal sebagaimana yang dianggap oleh sementara pengamat. Dokumen ini dikenal dengan sebutan dokumen Garnadi, yang oleh banyak orang dianggap sebagai satu bukti yang tidak bisa dibantah, yang membuktikan sekaligus adanya suatu hubungan resmi yang erat antara pemerintah dengan milisi, dan bahwa kekerasan setelah pemungutan suara direncanakan pada tingkat yang paling tinggi—yaitu di Jakarta.

Laporan ini bertanggal 3 Juli 1999, dan diberi judul "Gambaran Umum Apabila Opsi I Gagal," memberikan suatu penilaian yang terus-terang tentang strategi pemerintah dalam menghadapi proses Konsultasi Rakyat yang dimulai awal Juli; 'Opsi I' adalah tawaran 'Otonomi Khusus' yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Penulisnya, Mayor Jenderal (Purn.) H.R. Garnadi, adalah Asisten I Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung. Fakta bahwa laporan ini ditulis oleh seorang pejabat penting pemerintah dan dikirimkan kepada seorang menteri senior dan mantan jenderal TNI, memberikan signifikansi yang luarbiasa pada dokumen tersebut. Karenanya dokumen ini tampaknya berkemungkinan membuktikan keterlibatan pemerintah pusat dan TNI dalam kekerasan di Timor-Leste.

Para analis menyatakan bahwa dokumen ini berbicara tentang tugas pemerintah untuk melindungi dan mendukung milisi antikemerdekaan, yang digambarkan sebagai "pahlawan integrasi." Bagian yang relevan tertulis seperti berikut ini: "Tidak bisa diabaikan bagaimana sikap para Milsas asal Timor Timur yang direkrut dari pendukung integrasi. Mereka adalah pahlawan integrasi."* Yang lebih mengejutkan lagi, laporan-laporan media dan para analis mengklaim bahwa dokumen ini berbicara tentang satu rencana pemerintah pusat untuk menghancurkan Timor-Leste pada

* H.R. Garnadi, "Gambaran Umum Apabila Opsi I gagal," satu laporan rahasia kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung, 3 Juli 1999. (Koleksi Yayasan HAK, Doc #35). Terjemahan dokumen ini dalam bahasa Inggris terdapat di dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book on Political Affairs and Human Rights in East Timor*, Dili, November 1999.

saat hasil pemungutan suara memperlihatkan kemenangan prokemerdekaan. Kata-kata penting mengenai hal ini menyatakan bahwa "Merencanakan dan pengamanan rute pengunduran, kalau mungkin merusak fasilitas-fasilitas atau objek vital."*

Fakta bahwa Timor-Leste benar-benar dihancurkan setelah pemungutan suara memberikan bobot kepercayaan pada klaim bahwa laporan Garnadi menyampaikan suatu rencana 'pembumihangusan.' Namun suatu penyelidikan yang lebih teliti terhadap dokumen tersebut mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak demikian. Apabila dibaca dalam konteks, maka bagian tentang penghancuran yang dikutip di atas tidak memberikan bukti tentang suatu kebijakan pembumihangusan pada tahap ini. Kenyataannya, tekanan utama Garnadi di dalam laporan ini adalah bahwa, dalam keyakinannya akan kemenangan, pemerintah Indonesia gagal merencanakan sesuatu untuk menghadapi kemungkinan kekalahan, dan bahwa lebih baik memulai perencanaan itu tanpa menunda lagi. Misalnya, ia menulis:

> "… kita hanya mempunyai waktu untuk memenangkan Otonomi Khusus selama ± 6 minggu lagi, namun bila ini gagal, waktu yang 6 minggu itu sangatlah singkat untuk membuat rencana penyelamatan personel prointegrasi beserta aset-aset lainnya. Karenanya penyusunan Rencana Kontinjensi menghadapi Opsi II sudah harus dikembangkan sedini mungkin. Pemerintah masih harus menyisakan anggaran untuk mendukung rencana cadangan ini."†

Komentarnya bahwa infrastruktur vital kalau mungkin dirusak oleh tentara Indonesia yang berangkat di saat kekalahan Otonomi Khusus ditawarkan sebagai salah satu dari beberapa usulan untuk mengembangkan suatu rencana darurat. Tetapi, ini bukanlah ungkapan tentang kebijakan yang sudah disetujui pada saat itu. Justru apa yang ditunjukkan oleh dokumen tersebut dengan sangat jelas adalah bahwa, pada awal Juli, rencana darurat dan operasi untuk menghadapi kemenangan prokemerdekaan belum benar-benar dimulai.

Pendeknya, dokumen Garnadi itu sendiri tidaklah mengungkapkan tingkat keterlibatan pemerintah di dalam perencanaan kekerasan seperti yang dinyatakan oleh sementara pihak. Walaupun demikian, sebagaimana yang telah dinyatakan di bagian lain dalam laporan ini, dokumen tersebut memperjelas aspek-aspek penting dari hubungan antara pihak berwenang Indonesia dengan milisi, dan sikap resmi pemerintah terhadap milisi. Dokumen ini menegaskan adanya dukungan resmi pemerintah, dan solidaritas dengan, kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia, serta usulan yang kuat bahwa mereka harus diperhatikan pada saat kemenangan prokemerdekaan. Dokumen ini juga membuktikan bahwa para perwira tinggi di Dili dan Jakarta sekurangnya sedang mempertimbangkan dan membahas penghancuran

---

* Garnadi, "Gambaram Umum Apabila Opsi I Gagal," paragraf 8b.

† Garnadi, "Gambaran Umum Apabila Opsi I Gagal," paragraf 8b. Dalam paragraf 8b Garnadi juga menulis bahwa "Membuat rencana cadangan (Rencana Kontinjensi) untuk menghadapi situasi apabila Opsi I tidak diterima." Dalam hal penganggaran, CNRT mengklaim di awal Agustus 1999 bahwa Jakarta telah menyediakan Rp 28 juta untuk rencana evakuasi.

Timor-Leste kalau opsi otonomi kalah, saat masih di Juli. Dan dokumen ini menegaskan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung, sangat terlibat di dalam pembahasan-pembahasan tersebut yang berkembang setelah 3 Juli 1999.

Telegram Brigade Penyelamat Integrasi Timor Timur

Dokumen keempat yang tampak menunjukkan perencanaan TNI adalah satu telegram rahasia yang tampaknya berasal dari militer, tertanggal 29 Agustus 1999, atau hanya satu hari sebelum pemungutan suara. Telegram ini ditujukan kepada banyak perwira TNI, termasuk Komandan Korem 164 dan Komandan Batalion 744, dengan tembusan disampaikan kepada pemimpin tertinggi milisi, João Tavares, dan berbagai perwira intelijen TNI.

Telegram ini ditandatangani oleh Sersan Henrike Agama, Wakil Komandan Komando Brigade Penyelamat Integrasi Timor Timur.* Dokumen ini menginstruksikan kepada semua penerima telegram yang disebutkan namanya berikut anakbuah mereka agar bersiap melapor di hari-hari setelah pemungutan suara dan pengumuman hasilnya. Pesannya patut dikutip secara terperinci:

> "B. Sehubungan ref di atas, mohon para komandan tersebut agar mengizinkan personelnya masing-masing yang terlibat dalam pasukan Brigade Partisan Dili untuk dapat mengikuti apel kesiapan di Asrama Seroja di Comoro, Dili yang diatur sebagai berikut:
>
> 1. Hari Senin s/d Kamis pukul 14.30 sampai selesai.
> 2. Hari Jumat dan Sabtu pukul 13.30 sampai selesai
> 3. Hari Minggu pukul 11.00 WITA.
>
> C. Koordinasi:
>
> 1. Markas Komando Brigade/Markas Komando Batalion Partisan-1 Dili berada di Asrama Seroja Comoro Dili.
> 2. Para komandan kesatuan dapat melaksanakan cros chek terhadap kehadiran anggotanya melalui Kepala Seksi Operasi Brigade Penyelamat Integrasi di markas."†

Telegram ini tampak menunjukkan keberadaan komando militer khusus—'Brigade Penyelamat Integrasi Timor Timur' dan satu kesatuan di Dili dari komando tersebut, yaitu 'Batalion Partisan Dili'—yang terdiri atas prajurit-prajurit reguler yang berasal dari kesatuan-kesatuan normal TNI, dan dikomandoi oleh perwira-perwira TNI.‡

* Komando Brigade Penyelamat Integrasi Timor Timur atau Brigade P.I. Tims.

† Telegram, bertanggal 29 Agustus 1999, ditandatangani oleh Wakil Komandan Brigade Penyelamat Integrasi Timor Timur, Sersan Henrike Agama. Salinan dokumen ini dimiliki oleh penulis.

‡ Juga mungkin bahwa kesatuan-kesatuan ini mencakup pasukan bukan reguler, termasuk milisi. Sepucuk surat bertanggal 23 Agustus 1999, dari Cancio Lopes da Carvalho (Komandan milisi Mahidi dan Komandan PPI Sektor C) kepada Jenderal Wiranto, Mayor Jenderal Adam Damiri, dan Kolonel Noer Muis, mengusulkan pembentukan "Batalion Partisan" di seluruh Timor-Leste (Koleksi SCU, Doc #222).

Setidaknya, dokumen ini memperjelas bahwa markas kesatuan-kesatuan ini bertempat di satu fasilitas TNI, yaitu Asrama Seroja di Comoro, Dili. Dengan kata lain, tampaknya ini adalah kesatuan-kesatuan militer yang resmi, yang sedang dipersiapkan untuk tindakan atas nama integrasi pada hari-hari segera setelah pemungutan suara.

Sepucuk surat dari Front Politik Internal (FPI) CNRT yang dikirimkan kepada Kantor Urusan Politik UNAMET pada 1 September, bersama dengan salinan telegram ini, memberikan informasi tambahan tentang rencana-rencana tersebut yang dilaporkan didapatkan dari seorang sumber di dalam Korem Timor Timur.[*] Surat itu menjelaskan bahwa Brigade yang disebutkan dalam telegram tersebut baru saja dibentuk oleh TNI—dengan bantuan beberapa tokoh sipil penting termasuk Bupati Dili—untuk mengambil tindakan represif terhadap tokoh-tokoh prokemerdekaan pada saat kemenangan kemerdekaan. Secara lebih khusus, dikatakan bahwa kesatuan itu telah ditugaskan untuk melaksanakan "operasi penculikan semua aktivis prokemerdekaan, seperti [operasi] pada waktu G30S/PKI di Indonesia." Akhirnya, surat itu melaporkan bahwa pada 31 Agustus, Komandan Korem telah memimpin pembagian 600 pucuk senjata kepada milisi, dan bahwa 800 pucuk senjata lagi akan dibagikan dalam waktu dekat.

Fakta bahwa tindakan represif memang dilakukan dengan bantuan TNI setelah hasil pemungutan suara diumumkan pada 4 September mengharuskan kita untuk memperhatikan surat CNRT secara serius. Apabila diamati bersama, telegram 30 Agustus dan surat CNRT tampak memberikan beberapa bukti dokumenter bahwa kekerasan dan represi setelah pemungutan suara sebenarnya dilakukan dengan sepengetahuan penuh TNI, setidaknya sampai tingkat Korem, dan kemungkinan direncanakan oleh perwira-perwira TNI.

Namun, sekali lagi, perlu untuk berhati-hati. Telegram tersebut boleh jadi hanya membuktikan bahwa TNI—atau suatu bagian dari TNI—sedang melakukan persiapan menghadapi kemungkinan kekacauan setelah pemungutan suara; yang dalam keadaan waktu itu bukan merupakan tindakan yang tidak berdasar.

Operasi Cabut

Ambiguitas yang sama menandai dua dokumen yang menguraikan secara ringkas rencana-rencana TNI dan Polri untuk melakukan evakuasi setelah pemungutan suara. Rencana-rencana ini meliputi satu rencana yang dibuat oleh Komando Resor Militer Timor Timur pada Juli 1999, dengan nama 'Operasi Wira Dharma-99', dan satu rencana Polri yang disusun pada Agustus yang disebut 'Operasi Hanoin Lorosae II.'[†]

* Surat dari CNRT, Front Politik Internal, Sekretariat Komando Wilayah 4 kepada Political Section, UN-AMET, bertanggal 1 September 1999. Salinan dokumen ini dimiliki oleh penulis.

† Korem 164/WD, "Rencana Operasi Wira Dharma-99," Dili, Juli 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #33); dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Timor Timur, "Rencana Operasi Hanoin Lorosae II," No. Pol: Ren Ops/04/VIII/1999, Agustus 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #39).

Kedua dokumen ini tampak telah dipersiapkan sesuai dengan rencana operasi Kodam IX untuk evakuasi setelah pemungutan suara, yang diketahui sebagai 'Operasi Cabut' dan sejalan dengan keseluruhan 'Rencana Kontijensi 1999-2000', yang disusun di markas besar TNI di Jakarta.* Walaupun kami belum mendapatkan salinan dari dua dokumen terakhir ini, kami mengetahui beberapa hal mengenainya.† 'Operasi Cabut' dipersiapkan sesuai dengan surat perintah tertanggal 5 Mei 1999 dari Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, kepada Panglima Kodam IX, Mayor Jenderal Adam Damiri. Dalam perintah 5 Mei tersebut, Subagyo memerintahkan Damiri menyusun satu rencana untuk "pemindahan ke belakang/ pengungsian apabila Opsi Kedua [kemerdekaan] menjadi pilihan."‡ Rencana itu disusun pada Juli dan digerakkan di awal September 1999.§ Sedang 'Rencana Kontinjensi 1999-2000' tercatat dipersiapkan atas perintah Jenderal Wiranto oleh Mayor Jenderal Endriartono Sutarto, Asisten Operasi Kepala Staf Umum TNI. Dokumen 13 halaman itu memaparkan dengan begitu tepat apa yang benar-benar terjadi pada hari-hari dan minggu-minggu setelah pemungutan suara.¶

Dua dokumen yang kami miliki (baik sebagian maupun seluruhnya) menguraikan rencana untuk pemindahan besar-besaran setelah pemungutan suara, yang sangat sesuai dengan pemindahan yang benar-benar dilaksanakan pada September 1999. Mereka yang dijadikan sasaran pemindahan menurut rencana, misalnya, termasuk sekitar 180.000 orang Timor-Leste, dan sekitar 70.000 orang pegawai negeri sipil Indonesia, tentara, dan polisi, berikut keluarganya.** Jumlah seluruhnya orang yang dipindahkan yang disebutkan kedua rencana tersebut adalah sekitar 250.000 orang atau hampir tepat sama dengan jumlah yang dalam

* Dalam beberapa dokumen TNI, Rencana Kontinjensi ini disebut "Rencana Tindakan Menghadapi Kontinjensi Purna Penentuan Pendapat di Timtim [Jika] Opsi-1 Gagal." Lihat: "Direktif Panglima TNI, Nomor: 02/P/IX/1999, tentang Komando Penguasa Darurat Militer Wilayah Timor Timur," [8] September 1999 (Koleksi HRU, Doc. TNI #9).

† Pada 31 Agustus 1999, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagyo Hadisiswoyo mengatakan bahwa TNI telah mempersiapkan sebuah rencana kontinjensi untuk menghadapi segala kemungkinan di Timor Timur. Embassy of Japan, "Political News Round Up," 31 Agustus 1999. Pada Januari 2000, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim lebih jauh memperjelas bahwa "Markas besar TNI … telah mempersiapkan sebuah rencana kontinjensi sementara Pangdam Udayana membuat sebuah rencana operasi." Lihat *Jakarta Post*, 5 Januari 2000. 'Operasi Cabut' dan 'Rencana Kontinjensi 1999-2000' disebutkan secara eksplisit dalam satu surat perintah (No. Sprin/811/VII/1999) yang dikeluarkan oleh Brigadir Jenderal Simbolon, Kepala Staf Kodam IX, pada tanggal 14 Juli 1999 (Koleksi Yayasan HAK).

‡ Telegram rahasia (No. STR/172/1999) dari Kepala Staf Angkatan Darat (ditandatangani oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal Johny J. Lumintang) kepada Pangdam IX Udayana, 5 Mei 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #21).

§ Dalam satu telegram rahasia dari awal bulan September, Dandim Dili, Letnan Kolonel Soedjarwo, menginformasikan kepada Danrem, Kolonel Noer Muis, bahwa 'Operasi Cabut' secara resmi telah dimulai di Kabupaten Dili pada pukul 15.00 tanggal 6 September 1999 (Koleksi Yayasan HAK).

¶ Greenlees dan Garran, *Deliverance*, halaman 209.

** Satu lampiran (tentang kebutuhan logistik) untuk 'Operasi Wira Dharma 99' TNI memperkirakan jumlah total orang yang membutuhkan evakuasi adalah 251.187 orang yang dirinci sebagai berikut: Personel militer dan keluarganya (26.015 jiwa), Orang dari luar Timor Timur (43.347 jiwa), Orang Timor Timur (180.000). Lihat: Korem 164/WD, "Operasi Wira Dharma 99," Lampiran D (Rencana Banmin), Sub-Lampiran-3 (Kebutuhan Angkutan)," Dili, Juli 1999, tanpa tanggal, (Koleksi Yayasan HAK, Doc #33).

kenyataannya dipindahkan. Dokumen Polri juga menyertakan penilaian intelijen yang memperkirakan terjadinya penghancuran dan kekerasan yang luas di saat prokemerdekaan menang.

Setidaknya seorang analis yang telah memeriksa dokumen-dokumen ini menyimpulkan bahwa "… militer tidak pernah merencanakan 'pengalihan kekuasaan secara damai dan tertib …' sebagaimana ditetapkan dalam Kesepakatan 5 Mei. Mereka secara rahasia berencana untuk kekacauan."* Analisis ini secara mendasar benar, dan fakta terkutuknya adalah bahwa pihak-pihak berwenang Indonesia bersikap tidak jujur dalam meyakinkan komunitas internasional bahwa mereka akan tetap berada di Timor-Leste dan memelihara keamanan di sana, apapun hasil pemungutan suara. Lebih jauh lagi, kebenaran analisis tersebut dikukuhkan sebagian oleh pernyataan-pernyataan di depan umum dan pribadi pejabat-pejabat tinggi Indonesia dalam minggu-minggu sebelum pemungutan suara. Pada Agustus 1999, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim dan Kolonel Noer Muis mengatakan kepada UNAMET tentang persiapan resmi untuk evakuasi besar-besaran setelah pemungutan suara. Kolonel Muis yang bersama Menteri Kehakiman dan Sekretaris Negara, Muladi, juga dikutip oleh pers mengenai hal tersebut. Muladi dilaporkan menyatakan tentang "kemungkinan besar" perpindahan sejumlah 223.000 orang kalau prokemerdekaan menang.†

Tetapi, persoalannya tetap apakah dokumen-dokumen yang dipersoalkan tersebut membuktikan bahwa kekerasan yang telah terjadi setelah pemungutan suara direncanakan oleh pimpinan TNI dan/atau Polri. Jawaban yang jujur adalah bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak membuktikan demikian. Memang dokumen-dokumen tersebut tidak menyebutkan apapun tentang kebijakan 'pembumihangusan' yang sering dikatakan telah mengarahkan tindakan TNI dan Polri setelah pemungutan suara. Bukti tentang perencanaan semacam itu mungkin ada di dalam dokumen-dokumen yang masih belum ditemukan yang menguraikan 'Operasi Cabut' Kodam IX atau mungkin dalam 'Rencana Kontinjensi 1999-2000' dari markas besar TNI. Namun tetaplah meragukan apakah dokumen-dokumen tersebut berisi pembahasan eksplisit tentang kebijakan pembumihangusan di masa setelah pemungutan suara. Sangat mungkin bahwa tidak ada rencana tertulis samasekali, dan bahwa pencarian satu bukti dokumenter yang tidak bisa dibantah pada akhirnya tidak akan mendatangkan hasil.

Walaupun demikian, kedua dokumen tersebut memberikan pemahaman yang mengungkapkan sikap resmi pemerintah terhadap Konsultasi Rakyat. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bukti yang kuat bahwa Polri dan pihak berwenang militer secara formal mengambil posisi antipati terhadap pihak prokemerdekaan, terhadap banyak pengamat dari luar negeri, UNAMET, dan juga pimpinan Gereja Katolik.

* Samuel Moore, "The Indonesian Military's Last Years in East Timor: An Analysis of Its Secret Documents," *Indonesia*, No. 72 (Oktober 2001), halaman 41.

† Lihat *Sydney Morning Herald*, 24 Agustus 1999; *Jakarta Post*, 26 Agustus 1999; dan *Media Indonesia*, 27 Agustus 1999. Lihat juga Ian Martin, *Self-Determination in East Timor*, halaman 82.

Penilaian intelijen yang disebutkan di dalam rencana 'Operasi Hanoin Lorosae II' Polri dengan jelas mengungkapkannya.* Penilaian itu menyebutkan beberapa organisasi dalam negeri dan internasional telah "melakukan tindakan-tindakan ofensif baik terhadap kelompok massa prointegrasi maupun terhadap pemerintah Indonesia."† Kelompok-kelompok yang digambarkan demikian mencakup: USAID (United States Agency for International Development – Badan Bantuan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional), AusAID (Australian Agency for International Development – Badan Bantuan Australia untuk Pembangunan Internasional), Carter Center yang berpusat di Amerika Serikat, dan sejumlah organisasi nonpemerintah Indonesia dan Timor-Leste. Penilaian itu juga mengambil posisi yang sama tidak bersahabatnya terhadap UNAMET yang dikatakan "membawa misi politis sehingga terlihat adanya sikap keberpihakan dan diskriminatif" terhadap kubu prointegrasi, dan mendukung kubu prokemerdekaan.‡ Akhirnya, dokumen tersebut mengatakan bahwa mayoritas penduduk adalah penganut Katolik yang "fanatik" dan bahwa "Hal ini dimanfaatkan oleh pimpinan agama (Uskup) untuk kepentingan politiknya dengan mempengaruhi jemaatnya untuk mendukung salah satu kelompok (antiintegrasi)."§

'Rencana Operasi Wira Dharma-99' TNI juga memberikan pemahaman yang sama pentingnya tentang cara berpikir para pejabat militer. Dalam satu bagian yang berjudul "Pasukan Musuh," dokumen tersebut memasukkan CNRT, DSMPTT (Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur), dan Ojetil (Organização de Juventude de Timor Leste – Organisasi Pemuda Timor-Leste) yang semuanya adalah kelompok sipil prokemerdekaan, dan semuanya menjadi sasaran utama kekerasan yang dilakukan oleh kekuatan pro-Indonesia. Paragraf pembuka pada bagian "Pasukan Musuh" dari rencana operasi tersebut menjelaskan bahwa: "Pasukan musuh merupakan kelompok masyarakat Timor Timur yang anti-integrasi dengan Indonesia dan menolak opsi otonomi khusus yang ditawarkan Pemerintah RI."¶

Dengan demikian, meskipun dokumen-dokumen tersebut tidak membuktikan bahwa kekerasan setelah pemungutan suara direncanakan pada tingkat paling tinggi, dokumen-dokumen tersebut memberikan bukti penting tentang tanggung jawab militer dan Polri atas kekerasan tersebut. Antara lain, dokumen-dokumen tersebut menegaskan bahwa pihak-pihak berwenang militer dan kepolisian Indonesia secara resmi mengambil posisi yang secara terang-terangan melanggar janji untuk tidak berpihak sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dalam Kesepakatan 5 Mei. Dokumen-dokumen tersebut juga membuktikan bahwa permusuhan terhadap pihak prokemerdekaan—bahkan

* Judul lengkap dari penilaian tersebut yang terkandung dalam dokumen 'Operasi Hanoin Lorosae II' adalah: "Perkiraan Keadaan Intelijen Kepolisian Khusus tentang Menghadapi Kontijensi Opsi I dan Opsi II di Polda Timor Timur" (Koleksi Yayasan HAK, Doc #39).

† Polda Timor Timur, "Perkiraan Keadaan Intelijen," halaman 4 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #39).

‡ Polda Timor Timur, "Perkiraan Keadaan Intelijen," halaman 2 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #39).

§ Polda Timor Timur, "Perkiraan Keadaan Intelijen," halaman 5 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #39).

¶ Korem 164/WD, "Rencana Operasi Wira Dharma-99," Dili, Juli 1999, halaman 2 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #34).

hingga tingkat yang menggambarkan orang sipil sebagai "pasukan musuh" —merupakan persoalan kebijakan, dan bukannya terbatas pada sikap sejumlah kecil 'oknum' yang didorong oleh 'emosi'. Akhirnya, dengan memberikan perincian mengenai sikap militer dan Polri terhadap organisasi dan individu tertentu, dokumen-dokumen ini juga membantu menjelaskan pola tertentu pelanggaran hak asasi manusia pada 1999. Melihat sikap permusuhan yang terbuka seperti diungkapkan dalam dokumen-dokumen kebijakan utama tersebut, lebih mudah untuk memahami mengapa kelompok-kelompok tertentu—mencakup CNRT, DSMPTT, dan Gereja Katolik—secara khusus dijadikan sasaran.

Ringkasnya, dokumen-dokumen ini tidak memberikan bukti yang definitif tentang keterlibatan langsung jajaran tingkat tinggi pemerintah Indonesia dalam perencanaan atau pelaksanaan tindak kekerasan yang spesifik. Kenyataannya, analisis yang disampaikan di sini menunjukkan bahwa perencanaan kekerasan mungkin tidak pernah dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk tulisan. Sehingga, tuntutan atau bantahan akan pertanggungjawaban resmi pemerintah Indonesia atas kekerasan yang terjadi harus ditetapkan melalui analisis tentang peristiwa-peristiwa yang diamati di lapangan, dan penelitian yang lebih sabar terhadap ratusan dokumen yang sekarang tersedia.

Dari sudut pandang seperti itu, enam dokumen tersebut dalam hal tertentu dapat menyumbang pada pemahaman kita tentang kekerasan. Pertama, dokumen-dokumen ini membantu dalam menetapkan keberadaan dan sifat hubungan antara TNI dan milisi. Kedua, dokumen-dokumen ini menunjukkan secara pasti bahwa ada pembahasan pada jajaran tingkat tertinggi TNI mengenai rencana-rencana darurat, termasuk rencana-rencana untuk evakuasi besar-besaran, dan setidaknya kemungkinan perusakan fisik sebagai bagian dari evakuasi itu. Ketiga, dokumen-dokumen tersebut memperlihatkan tanpa keraguan bahwa pihak-pihak berwenang militer dan kepolisian secara resmi mengambil posisi bermusuhan terhadap kubu prokemerdekaan (dan terhadap PBB), suatu posisi yang melanggar kewajiban mereka yang ditetapkan dalam Kesepakatan 5 Mei.

Dokumen-dokumen yang dikaji dalam bab ini juga memberikan satu petunjuk bahwa pelaku-pelaku utama yang bertanggung jawab atas kebijakan dan perencanaan militer di Timor-Leste meliputi: Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo; Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal Johny Lumintang; Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung; Panglima Komando Daerah Militer IX, Mayor Jenderal Adam Damiri; Komandan Korem 164/Wira Dharma, Kolonel Tono Suratman; dan Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur, Kolonel Timbul Silaen. Walaupun tidak secara khusus disebut di dalam dokumen-dokumen yang tersedia, kita bisa beranggapan bahwa para perwira yang bertanggung jawab atas operasi, baik di Markas Besar TNI maupun di Kodam IX, juga terlibat.

Milisi: Sejarah, pembentukan, dan pengakuan hukum

Persoalan tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap umat manusia di Timor-Leste sangat bergantung pada sifat hubungan antara milisi dan pihak-pihak berwenang Indonesia. Apabila, seperti diklaim oleh pemerintah Indonesia, milisi bertindak tanpa dukungan atau persetujuan pemerintah, maka tanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan terletak di pundak milisi itu sendiri. Di lain pihak, jika milisi dibentuk oleh pihak-pihak berwenang Indonesia, serta menerima dukungan dan arahan dari para pejabat Indonesia, maka tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh milisi juga ada pada pihak yang berwenang tersebut.

Bab ini merupakan yang pertama dari tiga bab di dalam laporan ini yang mempelajari hubungan tersebut secara terperinci, dengan menggunakan begitu banyak bukti dokumenter dan kesaksian. Dengan memusatkan perhatian pada tiga jenis bukti—hubungan historis antara milisi dan TNI, keterlibatan para pejabat tinggi dalam membentuk milisi, dan pemberian pengakuan hukum kepada milisi—bab ini secara meyakinkan memperlihatkan bahwa kelompok-kelompok milisi itu dibentuk, didukung, dan disahkan oleh para pejabat Indonesia. Selanjutnya, temuan tersebut berarti bahwa pihak-pihak berwenang Indonesia tersebut mengemban tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, meskipun pelanggaran-pelanggaran itu secara langsung dilakukan oleh milisi.

Pola historis

Keberadaan milisi bukanlah gejala baru di Timor-Leste. Mereka telah muncul, dalam beberapa bentuk, setidaknya sejak zaman kekuasaan Portugis, dan hadir tanpa terputus selama masa pendudukan Jepang dan invasi Indonesia. Sejak 1975, sejarah milisi terkait erat dengan angkatan darat Indonesia, dan khususnya dengan pasukan kontrapemberontakan Kopassus.

Milisi sudah lama menjadi unsur pokok dalam strategi kontrapemberontakan dan kontra-intelijen Indonesia setidaknya sejak dasawarsa 1950-an. Milisi-milisi tersebut dimobilisasi dalam setiap operasi kontrapemberontakan yang pernah dilaksanakan oleh angkatan darat Indonesia. Walaupun mendapatkan pembenaran melalui doktrin militer 'pertahanan keamanan rakyat semesta,' alasan utama mengapa mereka digunakan adalah karena mereka murah dan efektif, membantu membangun ikatan loyalitas dengan pasukan pendudukan, dan menjadi sarana pengingkaran yang bisa meyakinkan bagi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tentara.

Sejarah tersebut memberikan bukti kuat bahwa milisi-milisi yang muncul di Timor-Leste pada 1999 merupakan bagian dari operasi intelijen militer yang terarah dan dipersiapkan dengan baik. Pandangan sekilas pada sejarah tersebut menegaskan

bahwa jelas bahwa segala sesuatu tentang organisasi, bahasa, gaya, dan repertoar dari milisi modern berasal dari doktrin militer Indonesia yang sudah mapan dan praktik kesejarahan. Ini juga membantu menjelaskan bagaimana milisi dapat tumbuh cepat, secepat yang mereka lakukan di seluruh Timor-Leste di 1998-1999.

Bahkan sebelum invasi pada Desember 1975, para perencana militer Indonesia berusaha memobilisasi penduduk lokal untuk mengumpulkan informasi intelijen dan membantu operasi-operasi militer. Pada September 1975, satu laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mencatat dengan jelas bahwa, "Intelijen Indonesia … telah melatih, mengorganisasikan, dan secara rahasia memasukkan 650 pasukan ireguler orang Timor ke Timor Portugis untuk membendung gerak maju pasukan Fretilin."[*] Dalam masa setelah invasi, pasukan militer Indonesia membentuk kelompok-kelompok milisi lokal, yang dikenal sebagai kelompok Partisan, di setiap tempat setelah mereka membangun kontrol yang cukup. Sisa-sisa dari kelompok-kelompok awal 'Partisan' ini tetap terlihat di beberapa bagian Timor-Leste pada 1999, dan sebagian anggota mereka aktif dalam kelompok-kelompok milisi baru.

Dengan dimulainya operasi militer besar yang baru pada September 1977, angkatan darat Indonesia bahkan memulai dengan lebih bersemangat merekrut penduduk Timor-Leste untuk bertempur di pihaknya. Ribuan rakyat biasa Timor-Leste diwajibkan bergabung dalam operasi-operasi militer terhadap kelompok prokemerdekaan Fretilin, yang digambarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai komunis. Di awal dasawarsa 1980-an, penggunaan pasukan-pasukan sipil semacam itu telah dilembagakan. Pasukan-pasukan milisi setengah-tetap kini menyebar luas di seluruh Timor-Leste, dalam jumlah yang tertentu ada di setiap desa dan kota; dan mereka dikontrol ketat oleh perwira militer maupun pejabat pemerintah Indonesia lainnya, dengan dukungan resmi dari bupati, camat, dan kepala desa.

Beberapa dokumen rahasia angkatan darat dari 1982 memberikan perincian penting tentang asal-usul dari kesatuan-kesatuan milisi ini dan peran mereka dalam strategi kontrapemberontakan angkatan darat.[†] Dokumen-dokumen itu membuat jelas, misalnya, bahwa dasar strategi ini adalah doktrin militer 'pertahanan keamanan rakyat semesta.'[‡] Dokumen-dokumen itu juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya ini berarti bahwa rakyat Timor-Leste dapat diharapkan untuk digalang melawan "musuh" pada saat yang ditentukan. Perlu dicatat juga bahwa sebagian dari dokumen-dokumen ini ditandatangani oleh Kepala Seksi Intelijen Korem Timor Timur Mayor Williem T. da Costa, yang kemudian menjabat sebagai Kepala Staf (1997-1998) dan selanjutnya Panglima (2000-2002) Komando Daerah Militer IX.

* U.S. Department of State, dikutip dalam James Dunn, *Timor: A People Betrayed*, Sydney, NSW: ABC Books, 2001, halaman 193.

† Delapan dokumen tersebut ditulis oleh Seksi Intelijen dari Komando Resor Militer (Korem) Timor Timur, dan ditandatangani oleh Komandan Korem, Kolonel Rajagukguk, atau oleh Kepala Seksi Intelijen Korem Mayor Williem T. da Costa.

‡ Setelah menyebutkan secara tersurat doktrin ini, salah satu dokumen menyatakan secara luas: "Dengan demikian … pada dasarnya seluruh rakyatlah yang menjadi pelawan musuh." Lihat Korem 164/Wira Dharma, Seksi Intel, "Rencana Penyusunan Kembali Rakyat Terlatih," disusun oleh Mayor Williem T. da Costa, 1982, halaman 2.

Sebagian besar orang yang diwajibkan dan 'sukarelawan' setempat dikelompokkan ke dalam dua badan resmi yang berbeda namun terkait—Ratih dan Hansip—dan peran dari masing-masing badan tersebut dalam menghabisi musuh dinyatakan secara terperinci dalam dokumen-dokumen resmi. Kedua badan itu adalah satuan-satuan pembantu yang bertempat di desa, yang dirancang untuk membantu angkatan bersenjata dalam mendeteksi dan memerangi musuh. Seperti milisi-milisi pada 1999, kedua badan itu diorganisasikan menurut garis militer yang dibagi ke dalam kompi, peleton, dan regu, dan 'dibina' oleh berbagai tokoh militer, termasuk Komandan Rayon Militer (Danramil), prajurit dari Batalion 745, dan wakil dari satuan intelijen Kopassus dengan kekuasaan besar, SGI (Satuan Tugas Intelijen).[*] Dengan kata lain, kedua badan itu merupakan replika nyata dari milisi yang muncul pada 1999.

Kesatuan yang paling dasar adalah Ratih (Rakyat Terlatih). Orang yang direkrut ke dalam Ratih mendapatkan latihan dasar militer, dengan penekanan pada disiplin dan ideologi. Walaupun kepala desa biasanya menjadi komandan resmi mereka, dalam kenyataannya mereka dikendalikan oleh perwira militer.[†]

Setingkat di atas Ratih dalam hierarki militer adalah Hansip (Pertahanan Sipil). Mereka mendapatkan latihan militer yang lebih intensif, biasanya membawa senjataapi, dan melaksanakan berbagai fungsi tempur, termasuk pengamatan. Dalam kenyataannya Hansip dibagi dalam dua bagian, salah satunya (Kamra – Keamanan Rakyat) bertugas sebagai pembantu polisi. Bagian lainnya adalah Wanra (Perlawanan Rakyat) yang ditugaskan pada angkatan darat. Dalam praktiknya, Wanra jauh lebih penting daripada Kamra, sehingga istilah Wanra dan Hansip biasa saling dipertukarkan.

Selain pasukan-pasukan milisi dasar ini, di akhir dasawarsa 1970-an dan 1980-an angkatan darat juga membentuk sejumlah kesatuan paramiliter yang lebih terlatih, meliputi: Makikit, Halilintar, Tim Saka, Tim Sera, 59/75 Junior, Tim Alfa, dan Railakan. Kesatuan-kesatuan ini melaksanakan peran pengamatan, intelijen, dan tempur yang penting, selain juga mengambil bagian dalam operasi-operasi khusus, termasuk pembunuhan. Kesatuan-kesatuan ini secara resmi dikoordinasikan di tingkat Komando Distrik Militer (Kodim), tetapi memiliki hubungan erat dan sering melakukan operasi bersama pasukan elite kontrapemberontakan, Kopassus—dan khususnya Satuan Tugas Intelijen (SGI) dan satuan operasional yang dikenal sebagai Nanggala.[‡]

Hubungan dekat yang terus-menerus antara kelompok-kelompok paramiliter dan Kopassus/TNI ditegaskan oleh satu dokumen, bertanggal 2 Januari 1998, yang

* Kehadiran SGI dan prajurit-prajurit Batalion 745 disebutkan dalam: Korem 164/ Wira Dharma, Seksi Intel, "Petunjuk Tehnis [*sic*] tentang Desa" (Juknis/01-A/IV/1982), halaman 6-7.

† Korem 164/Wira Dharma, Seksi Intel, "Rencana Penyusunan Kembali Rakyat Terlatih," halaman 2 dan 6.

‡ Nanggala merupakan satuan khusus Kopassus, yang dibentuk di akhir dasawarsa 1970-an. Satu satuan yang disebut Nanggala 28 dipimpin oleh Prabowo Subianto sewaktu muda, bertanggung jawab atas pembunuhan panglima Fretilin, Nicolau Lobato, pada Desember 1978.

disusun oleh 'Pos Nanggala-13 Satuan Tugas Intelijen'. Dokumen itu memuat daftar 57 orang anggota kesatuan paramiliter Saka di Kecamatan Baguia, Kabupaten Baucau.*
Selain mengindikasikan bahwa kesatuan paramiliter Saka dalam kenyataannya dikoordinasikan oleh SGI, dokumen itu juga menunjukkan dengan jelas bahwa banyak anggota kesatuan Saka adalah anggota Nanggala-13, yang dipimpin Kopassus. Dengan kata lain, di akhir 1998, Saka dan sangat mungkin kesatuan-kesatuan paramiliter lain bukan hanya didukung oleh TNI, namun sesungguhnya mereka adalah kesatuan TNI.

Jaringan organisasi paramiliter dan milisi ini membentuk pengaman yang esensial di dalam pendudukan Indonesia dan operasi kontrapemberontakan di Timor-Leste sepanjang dua dasawarsa selanjutnya. Hansip, Ratih, beserta infrastruktur paramiliter terus berfungsi sepanjang periode ini, dan menjadi model untuk repertoar dasar latihan, berbaris, berpatroli, dan bertempur yang dikenal di seluruh Timor-Leste pada 1999. Lebih jauh lagi, banyak dari kesatuan-kesatuan milisi yang sepertinya muncul tiba-tiba pada 1999 dalam kenyataannya adalah sisa dari kesatuan-kesatuan milisi dan paramiliter lama yang telah dibentuk sejak akhir dasawarsa 1970-an dan terus berfungsi di masa antara itu.† Sebenarnya, seperti yang nanti dijelaskan dalam bab ini, pada 1999 pihak berwenang Indonesia sering menyebut milisi dengan menggunakan terminologi yang lama.

Walaupun demikian, mereka bukanlah satu-satunya model bagi milisi yang muncul di tahun 1999. Dalam dasawarsa 1990-an, versi baru pasukan milisi—yang lebih menyerupai regu pembunuh daripada kesatuan bantuan warga—mulai membuat kehadirannya terasa di Timor-Leste. Manifestasi yang paling dikenal dari bentuk baru ini disebut kelompok Ninja, yang pertama kali dilaporkan ke luar negeri pada 1991, tetapi sangat mungkin sudah ada setahun atau dua tahun sebelumnya.‡
Kelompok-kelompok Ninja ini berkeliaran di jalan-jalan pada tengah malam, memakai pakaian hitam, kepala mereka terbungkus semacam topeng berwarna gelap terbuat dari rajutan benang yang menutup seluruh kepala kecuali bagian mata. Mereka mengganggu, menculik, dan kadang-kadang membunuh pendukung-pendukung kemerdekaan, kemudian meninggalkan mayat para korban di tempat-tempat umum.

---

* Komandan Pos Nanggala-13, Satuan Tugas Intelijen (Sersan Kepala Mudji Maulani), "Daftar Nama Nama Anggota Sera (Surwan) Kec. Baguia," 2 Januari 1998 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #2).

† Daftar anggota kesatuan Saka, Januari 1998 yang dikutip di atas, misalnya, menunjukkan bahwa banyak dari 57 anggota yang terdaftar telah bergabung dengan kesatuan itu lebih daripada sepuluh tahun sebelumnya. Sementara banyak tahun masuk yang tercantum dalam dokumen sulit dibaca, sebagian besar berasal dari dasawarsa 1980-an dan setidaknya 11 adalah dari akhir dasawarsa 1970-an (Koleksi Yayasan HAK, Doc #2). Sama juga halnya, menurut sepucuk surat dari Eurico Guterres kepada Kepala Kepolisian Resor Dili bertanggal 22 Juni 1999, setidaknya 93 anggota milisi Aitarak pada saat itu adalah anggota kesatuan pembantu kepolisian, Kamra. Lihat: Komandan, Komando Pasukan Aitarak, Sektor B (Eurico Guterres) kepada Kapolres Dili, 22 Juni 1999 (Koleksi SCU, Doc #244).

‡ Bukti-bukti yang tidak langsung menunjukkan bahwa Ninja ini muncul di akhir dasawarsa 1980-an, ketika Abílio Soares, pemimpin Apodeti yang kemudian menjadi gubernur yang memiliki hubungan dekat dengan Prabowo Subianto, menjadi Walikota Dili.

Bagi orang Indonesia, dan mungkin juga bagi orang Timor-Leste, kehadiran Ninja ini membangkitkan ingatan tentang pembunuhan menakutkan yang disponsori negara terhadap sekitar 5.000 orang yang diduga penjahat kecil di pertengahan dasawarsa 1980-an di Indonesia, yang dikenal dengan singkatan Petrus (penembakan misterius).[*] Pembunuhan tersebut dilaksanakan oleh orang-orang berpakaian sipil dan bertopeng, dan mayat korban biasanya ditinggalkan di tempat umum. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mengelak bertanggung jawab. Namun pada 1989 Presiden Soeharto menyatakan dalam buku riwayat hidupnya bahwa pembunuhan tersebut memang kebijakan pemerintah—'shock therapy' untuk mengendalikan kriminalitas. Pengakuan itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar tangan resmi militer juga yang mengarahkan Ninja di Timor-Leste.

Militer Indonesia juga mulai mengaktifkan dan mengarahkan kembali pasukan-pasukan milisinya di wilayah perdesaan Timor-Leste pada waktu itu. Pada Oktober 1993, seorang jurubicara angkatan darat mengumumkan bahwa sekitar 3.844 orang Timor-Leste baru-baru ini telah diambil sumpah untuk menjadi anggota pasukan pendukung. Juru bicara ini tidak menyebut mereka Ratih dan Hansip atau Wanra, tetapi orang-orang yang telah disumpah itu ia sebut sebagai 'Pasukan Adat.' Keputusan untuk memobilisasi pasukan pendukung ini dan pilihan nama yang aneh mungkin berkaitan dengan kenyataan bahwa Indonesia pada saat itu mendapatkan tekanan internasional yang kuat untuk mengurangi kehadiran tentaranya di Timor-Leste dan menunjukkan perkembangan di bidang hak asasi manusia.

Pada 1995, sebuah kelompok baru pro-Indonesia muncul dengan banyak ciri dari kelompok Ninja yang terdahulu—yang sekarang bercampur dengan ciri-ciri gangster terkenal di Jawa yang memiliki kaitan politik (yang dikenal dengan sebutan 'preman'). Kelompok baru ini disebut Gadapaksi (Garda Pemuda Penegak Integrasi).[†] Peran yang ditugaskan kepada Gadapaksi rupanya adalah menyusup ke perlawanan bawahtanah dan memancing keributan di kalangan rakyat Timor-Leste. Berpakaian hitam-hitam dan bersenjatakan pisau, mereka meneror Dili dan kota-kota lain, melempar batu, membakari rumah-rumah, memasang penghalang jalan, menculik, dan kadang-kadang membunuh aktivis kemerdekaan.

Seperti Ninja, para anggota dan pemimpin Gadapaksi memiliki hubungan dengan jaringan kriminal dan Kopassus.[‡] Kami mengetahui hubungan historis Gadapaksi dengan Kopassus/TNI baik melalui bukti-bukti dokumenter maupun yang lain. Di antara dokumen-dokumen itu yang paling banyak mengungkapkan adalah laporan bulanan, bertanggal 10 November 1995, tentang latihan untuk rekrutan Gadapaksi di

* Tentang pembunuhan Petrus, lihat David Bourchier, "Crime, Law and Authority in Indonesia," dalam Arief Budiman (penyunting), *State and Civil Society in Indonesia*, halaman 177-211.

† Gadapaksi (kadang-kadang disebut Garda Paksi atau Gada Paksi) diresmikan pada Juli 1995. *Reuters*, 19 Juli 1995.

‡ Seorang tokoh senior pro-Indonesia yang melarikan diri dari Timor-Leste pada 1999 mengatakan kepada seorang wartawan Australia bahwa pemerintah Indonesia telah menghapuskan utang judi Eurico Guterres sebagai suap kepadanya untuk memimpin Gadapaksi. Lihat, "Timor Coup Planned," *The Age*, 22 Juni 1999.

Surabaya, Jawa Timur. Laporan itu ditandatangani oleh perwira TNI (Kapten Handy Geniadi) dan memberikan perhatian khusus pada latihan intelijen yang diberikan kepada rekrutan. Laporan itu tidak mengatakan secara eksplisit bahwa latihan tersebut dikoordinasi oleh Kopassus, namun kesimpulan itu bisa ditarik secara logis dari fakta bahwa satu-satunya perintah yang dikutip sebagai dasar pembuatan laporan itu adalah satu surat perintah Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Komandan Kopassus.* Bukti tambahan tentang hubungan antara Kopassus dan Gadapaksi terletak dalam fakta bahwa komandan SGI di Dili periode 1996-1999 sebelumnya bertugas melatih Gadapaksi di Jawa Tengah dan kemudian di Surabaya.

Gadapaksi masih tetap aktif pada 1998, dan terus mendapatkan dukungan kuat dari pihak berwenang Indonesia. Satu pertemuan Gadapaksi pada 22 Juni 1998 dihadiri antara lain oleh Gubernur Timor Timur, Ketua DPRD Timor Timur, dan Bupati Lautém. Satu laporan rahasia intelijen militer tentang pertemuan tersebut, yang disampaikan kepada Komandan Resor Militer Timor Timur, Kolonel Suratman, pada 23 Juni 1998 mengutip pernyataan sang gubernur: "Saya secara resmi menyatakan masuk sebagai anggota Garda Paksi [*sic*]."†

Gadapaksi bertahan sampai awal 1999 ketika, nyaris tiba-tiba, kelompok itu menghilang dan kelompok milisi Aitarak muncul sebagai penggantinya. Hubungan antara dua kelompok tersebut dipersonifikasi oleh jalur karier dari salah seorang pemimpin milisi Timor-Leste yang paling terkenal: Eurico Guterres. Di antara 1995 sampai Januari 1999, ia adalah pemimpin Gadapaksi.‡ Ketika milisi dimobilisasi di awal 1999, ia mendapatkan imbalan untuk kesetiaannya dengan diangkat menjadi komandan Aitarak, dan komandan Sektor B seluruh milisi (PPI). Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa hubungan dengan Kopassus/SGI berubah dengan terjadinya perubahan Gadapaksi menjadi Aitarak.

Pendeknya, milisi yang tampak hadir secara tiba-tiba pada 1999 samasekali tidak baru. Banyak kelompok milisi yang sudah berkeliaran selama beberapa tahun, walaupun sering dengan nama yang berbeda. Fakta itu membantu menjelaskan

* Surat perintah tersebut adalah 'Sprin/489/VII/1995'. Lihat: Komandan Kelompok BLK Surabaya (Kapten Handy Geniadi), "Laporan Bulanan Kegiatan Pelatihan Gada Paksi di BLK Surabaya," 10 November 1995 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #1).

† Lihat: Dandim 1627 (Letnan Kolonel Endar Priyanto) kepada Danrem 164/WD dan lain-lain, "Laporan hasil pertemuan di Gada Paksi," 23 Juni 1998 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #3).

‡ Guterres tampaknya tetap menjadi pemimpin Gadapaksi sampai beberapa saat pada Januari 1999, ketika ia menulis surat kepada Pemerintah Daerah Timor Timur meminta uang Rp7,5 juta untuk mendukung kegiatan Gadapaksi. Lihat: Ketua DPP Gada Paksi (Eurico Guterres) kepada Asisten III Kessos Sekwilda Tingkat I Timor Timur, Januari 1999 (Koleksi SCU, Doc #205). Setelah tanggal tersebut, Gadapaksi menghilang dari peredaran. Untuk suatu waktu, kelompok itu digantikan oleh FPTT (Forum Persatuan Timor Timur) satu organisasi pro-integrasi yang didirikan pada 7 Desember 1998, dan dipimpin oleh Guterres. Dalam kedudukan itu pada Januari 1999 Guterres menulis kepada Kepala Biro Keuangan Pemerintah Daerah Timor Timur, untuk meminta agar seorang staf biro tersebut ditugaskan membantu FPTT. Staf itu adalah Inácio de Jesus Soares, yang kemudian muncul sebagai Wakil Komandan Aitarak. Lihat: Ketua Umum Forum Persatuan Timor Timur (Eurico Guterres) kepada Kepala Biro Keuangan Pemda Tk-1 Timor Timur, 5 Januari 1999 (Koleksi SCU, Doc #159); dan Forum Persatuan Timor Timur (FPTT) kepada Danrem 164/WD, [Desember] 1998 (Koleksi SCU, Doc# 233). FPTT tampaknya dibubarkan pada satu hari di bulan Januari 1999 dan digantikan dengan Aitarak dan FPDK.

bagaimana milisi bisa diorganisasikan dan dimobilisasi dengan begitu cepat pada 1999. Ini juga membantu menjelaskan gaya khas dan repertoar kekerasan mereka. Diciptakan oleh kekuasaan Indonesia selama 24 tahun, dan dibentuk oleh doktrin dan praktik militer Indonesia, milisi melakukan brutalitas terencana yang menjadi sentral dari budaya kelembagaan TNI itu sendiri. Yang terpenting, pola historis mobilisasi milisi oleh TNI mengajukan bukti yang meyakinkan bahwa milisi yang menjadi menonjol pada 1999 merupakan produk dari strategi standar TNI, yang darinya tindakan kekerasan yang mereka lancarkan merupakan satu bagian penting.

Pembentukan milisi

Terdapat bukti yang meyakinkan bahwa hubungan erat antara pihak berwenang Indonesia dan milisi berlanjut sepanjang 1999, dan bahwa para perwira tinggi militer dalam kenyataannya secara langsung terlibat dalam pembentukan dan koordinasi milisi pada periode tersebut. Bukti-bukti itu datang baik dari pernyataan-pernyataan mantan tokoh prointegrasi, dan dari komunikasi rahasia antara para perwira tinggi TNI dan pejabat pemerintah sipil. Karena sifat dan tindakan kelompok-kelompok tersebut, keterlibatan pihak berwenang dalam pembentukan milisi mungkin menjadi perangsang untuk melakukan, dan dengan demikian memiliki keterlibatan dalam, pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan kejahatan terhadap umat manusia.

Beberapa informasi tentang peran para perwira tinggi TNI di dalam membentuk milisi di akhir 1998 dan awal 1999—dan tentang perintah TNI untuk melakukan tindak kekerasan—datang dari para mantan pejabat pemerintah Indonesia dan tokoh Timor-Leste pro-Indonesia. Di awal 1999, tokoh lama prointegrasi Tomás Gonçalves mengatakan kepada televisi Australia bagaimana pembentukan milisi dimulai pada 1998:

> “Perintah datang dari panglima daerah [Mayor Jenderal] Adam Damiri kepada komandan Timor Timur [Kolonel Tono Suratman] dan komandan Pasukan Khusus [Letnan Kolonel] Yayat Sudrajat—habisi semua CNRT, semua orang prokemerdekaan, termasuk orang tua, anak laki-laki dan perempuan, dan cucu-cucunya. Komandan Sudrajat menjanjikan pembayaran Rp200.000 [US$ 26,6] per orang kepada siapa saja yang mau masuk milisi.”*

Sumber-sumber yang lain menegaskan peran sentral Adam Damiri, Tono Suratman, dan Yayat Sudrajat dalam membentuk milisi, tetapi menunjukkan juga bahwa perwira yang lebih tinggi—khususnya Mayor Jenderal Kiki Syahnakri dan Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim—juga terlibat langsung. Sumber-sumber tersebut telah menggambarkan serangkaian pertemuan yang terjadi dari pertengahan 1998

* ABC, *Four Corners*, “The Ties That Bind,” 14 Februari 1999.

hingga awal 1999, di Dili, Denpasar, dan Jakarta, di mana para perwira tinggi TNI merumuskan rencana untuk mobilisasi pasukan milisi.

Banyak bukti tentang pertemuan tersebut diringkaskan di dalam satu surat dakwaan terhadap delapan pejabat senior Indonesia, yang diajukan oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat Timor-Leste pada Februari 2003.* Halaman-halaman yang relevan dengan persoalan pembentukan milisi terbaca sebagai berikut:

> "11. Pada atau sekitar bulan Agustus 1998, Adam Rachmat DAMIRI mengatur agar seorang Timor-Leste pemimpin pro Indonesia dapat terbang dari Timor-Leste ke Denpasar, Bali untuk sebuah pertemuan. Pada pertemuan ini, DAMIRI memberitahukan pemimpin orang Timor-Leste tersebut untuk mendirikan sebuah kelompok untuk mempromosikan integrasi.
>
> 12. Pada atau sekitar Agustus 1998, DAMIRI mengadakan perjalanan ke Dili dan bertemu dengan para komandan TNI dan pemimpin pro-Indonesia Timor-Leste. Suhartono SURATMAN hadir pada pertemuan ini. DAMIRI memberitahu kelompok itu bahwa terdapat banyak perhatian internasional yang difokuskan terhadap Timor-Leste dan ini merupakan masalah untuk Indonesia. Dia menyampaikan kepada mereka bahwa mereka harus merancang rencana untuk membentuk organisasi-organisasi yang akan menyebarkan perasaan pro-Indonesia di seluruh Timor-Leste. Dia memberitahukan mereka bahwa mereka harus menciptakan sebuah pasukan pertahanan sipil yang tegas sesuai dengan model yang sebelumnya telah didukung oleh TNI dan bahwa pasukan ini seharusnya diperbesar dan dikembangkan untuk menjaga integrasi.
>
> 13. Pada atau sekitar November 1998, Adam DAMIRI sekali lagi mengadakan perjalanan ke Timor-Leste. Selama kunjungan ini dia bertemu dengan para pemimpin pro-Indonesia di Dili, termasuk orang-orang yang kemudian menjadi pemimpin kelompok-kelompok milisi. DAMIRI minta para laki-laki ini untuk gabung bersama dan membantu TNI untuk melawan kelompok pro kemerdekaan … Selama kunjungan ini dengan para pemimpin pro Indonesia, DAMIRI memuji Eurico Guterres yang akan menjadi pemimpin milisi di masa depan sebagai pemuda yang bersedia berjuang untuk integrasi dan mengatakan bahwa dia bersedia memberikan lima puluh juta rupiah kepada Guterres untuk mulai pekerjaannya.
>
> 14. Pada atau sekitar November 1998, SURATMAN bertemu dengan para pemimpin pro-Indonesia Timor-Leste di markasnya di Dili. Yayat SUDRAJAT hadir pada pertemuan ini. SURATMAN memberitahu kepada kelompok tersebut bahwa dia ingin Eurico Guterres, yang

* Timor Leste, Wakil Jaksa Penuntut untuk Kejahatan Berat, Surat Dakwaan Wiranto dan lain-lain, Februari 2003.

akan menjadi pemimpin milisi di masa depan, untuk membentuk sebuah organisasi baru untuk membela integrasi yang mirip kelompok pemuda pro-Indonesia Gada Paksi.

15. Pada awal 1999 Zacky Anwar MAKARIM menerima para anggota pendiri kelompok pro-Indonesia Barisan Rakyat Timor Timur [BRTT] di kantornya di Jakarta. Selama pertemuan ini dia mengatakan bahwa perang gerilya akan dibutuhkan untuk mengatasi para pendukung kemerdekaan kalau opsi otonomi kalah dalam jajak pendapat.

16. Pada atau sekitar Februari 1999, DAMIRI bertemu dengan para pemimpin pro-Indonesia Timor-Leste di Markas Besar Komando Daerah Militer IX di Denpasar, Bali. DAMIRI memberitahukan para laki-laki tersebut bahwa TNI siap memberikan dukungan rahasia kepada pasukan pro-Indonesia. Dia menjelaskan bahwa hal ini harus rahasia untuk menghindari perhatian dan kritik internasional. DAMIRI minta para laki-laki tersebut mengumpulkan orang Timor-Leste yang telah bertugas di TNI. Dia memberitahukan mereka bahwa mereka harus bertemu dengan SURATMAN untuk menerima pengarahan selanjutnya.

17. Pada atau sekitar Februari 1999, SURATMAN bertemu dengan seorang pemimpin pro-Indonesia Timor-Leste di Dili. Dia memberitahukannya bahwa karena TNI berada di bawah sebuah rezim reformasi, TNI tidak dapat ikut serta dalam operasi terbuka untuk melawan gerakan kemerdekaan. SURATMAN minta pemimpin pro-Indonesia untuk membentuk sebuah kelompok milisi. SURATMAN mengatakan bahwa TNI bersedia memberikan bantuan macam apapun yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok milisi.

18. Pada atau sekitar Februari 1999, SUDRAJAT bertemu dengan personel TNI dan para pemimpin pro-Indonesia Timor-Leste di markas Satuan Tugas Intelijen di Dili. SUDRAJAT memberitahukan kelompok tersebut bahwa Satuan Tugas Intelijen mempunyai sebuah daftar pendukung kemerdekaan yang akan dibunuh. Dia mengatakan bahwa Satuan Tugas Intelijen dan kelompok-kelompok pro-Indonesia akan bekerjasama untuk melaksanakan pembunuhan ini. Dia mengatakan bahwa pasukan KOPASSUS berpakaian sebagai penjahat akan mulai melaksanakan pembunuhan pendukung prokemerdekaan.

19. Pada atau sekitar Maret 1999, Kiki SYAHNAKRI bertemu dengan para pemimpin pro-Indonesia Timor-Leste di Markas Besar TNI di Jakarta. SYAHNAKRI memberitahukan kelompok tersebut bahwa TNI akan mendukung usaha pro-Indonesia dan bahwa MAKARIM bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan menjelang jajak pendapat. SYAHNAKRI memberitahukan mereka bahwa senjataapi telah dikirim ke Timor Leste dan ketika mereka kembali ke Dili, mereka harus menghubungi SURATMAN untuk mengatur pembagian senjata."

Bukti tambahan tentang dukungan tingkat tinggi kepada milisi datang dari sejumlah dokumen rahasia dan komunikasi radio yang muncul sejak 1999. Dalam laporan rahasia Garnadi bertanggal 3 Juli 1999, yang dibahas dalam Bab 5, seorang pejabat tinggi dari kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyebut milisi Timor-Leste sebagai "pahlawan integrasi" yang pendapatnya harus diperhatikan dalam setiap perencanaan kontinjensi setelah pemungutan suara.[*] Serupa dengan itu, dalam sepucuk surat rahasia kepada Presiden Habibie, bertanggal 6 September 1999, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Wiranto, menjelaskan bahwa pasukan-pasukan TNI telah kesulitan mengendalikan kekerasan dalam periode setelah pemungutan suara karena "Adanya hubungan kedekatan emosional antara aparat keamanan dengan masyarakat prointegrasi."[†]

Pernyataan-pernyataan oleh pejabat-pejabat tinggi tersebut mencerminkan satu simpati yang luas kepada milisi di dalam lingkaran pejabat tertinggi, walaupun tidak sampai mengonfirmasikan peran langsung TNI dalam memobilisasikan dan mengoordinasikan kegiatan milisi. Namun bukti ke arah itu dilaporkan telah terungkap dalam serangkaian komunikasi rahasia melalui radio dan telepon yang disadap oleh Defence Signals Directorate (DSD – Direktorat Sinyal Pertahanan) Australia pada 1999. Transkripsi lengkap dari sadapan tersebut belum dibuka kepada masyarakat umum, tetapi cuplikan-cuplikannya yang dilaporkan media tampak menegaskan tuduhan-tuduhan yang dibuat dalam surat dakwaan Februari 2003. Cuplikan-cuplikan itu juga menambahkan kekhususan dan perincian mengenai asal-usul dukungan pihak berwenang kepada milisi, dan identitas dari orang-orang yang terlibat.

Misalnya, satu pembicaraan telepon antara Danrem Kolonel Tono Suratman dan Eurico Guterres, yang dilaporkan disadap pada 5 Mei 1999, tampak menegaskan keterlibatan langsung Suratman di dalam operasi-operasi milisi. Dalam pembicaraan melalui telepon itu, Suratman menanyakan kepada Guterres di mana ia mengumpulkan pasukan milisinya untuk unjuk kekuatan di Dili. Guterres disebutkan menjawab bahwa ia telah mengumpulkan sekitar 400 orang milisi di luar sebuah hotel di Dili (Hotel Tropical) yang dijadikan markas besar Aitarak.

Sekitar satu bulan kemudian, pada 1 Juni 1999, DSD Australia dilaporkan menyadap pembicaraan telepon yang lain antara kedua laki-laki itu. Jelas untuk menyembunyikan keterlibatan langsungnya dengan milisi, Kolonel Suratman dikatakan memberitahu

* Penulis laporan, H.R. Garnadi, seorang pensiunan mayor jenderal, menulis dalam kedudukan resminya sebagai asisten untuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung, dengan tanggung jawab mengenai politik dalam negeri (Pol/Dagri) dan sebagai anggota badan gabungan tingkat menteri untuk Timor Timur (P4-OKTT) yang dipimpin oleh Feisal Tanjung. Lihat Garnadi, "Gambaran umum apabila Opsi I gagal," 3 Juli 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #35)

† Surat dari Jenderal Wiranto kepada Presiden Habibie (No. R/511/P-01/03/14/Set) tentang "Perkembangan lanjut situasi Timtim dan saran kebijaksanaan penanganannya," 6 September 1999 (Koleksi HRU, Doc. TNI #7). Mengungkapkan pandangan yang sama pada Oktober 2000, Mayor Jenderal Endriartono Sutarto (Asisten Operasi Kepala Staf Umum TNI pada tahun 1999) mengatakan: "Ini adalah psikologi prajurit kami, karena telah begitu lama memiliki hubungan kerja sama (dengan milisi) untuk mengamankan Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia." *Channel News Asia* (Singapore), 12 Oktober 2000.

Guterres, "Jangan berhubungan langsung dengan saya. Hubungi saya melalui Bambang."* Bambang yang disebut oleh Suratman adalah juga seorang perwira senior TNI di Timor-Leste, kepala seksi intelijen Korem, Mayor R.M. Bambang Wisnumurty. Bersama dengan perwira intelijen yang lain, Letnan Masbuku, Mayor Bambang menjadi satu titik penghubung penting antara TNI dan milisi.

Perwira TNI lain, dengan kedudukan lebih tinggi, yang tampaknya memelihara hubungan dekat dengan milisi adalah Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon, yang pada 1999 menjabat sebagai Kepala Staf Kodam IX. Sebagai mantan komandan militer di Timor-Leste (1995-1997), ia telah cukup lama dicurigai terlibat dalam membentuk dan menggerakkan kelompok-kelompok milisi di Timor-Leste. Hubungannya dengan milisi agaknya ditegaskan oleh satu percakapan melalui telepon pada 14 Februari 1999, yang disadap oleh DSD. Percakapan itu antara pemimpin milisi Eurico Guterres dan seorang perwira dari unit Kopassus, Satgas Tribuana VIII. Berbicara tentang anggota milisi Mahidi yang terluka, seorang perwira Kopassus dilaporkan berkata: "Kami tahu bahwa Brigadir Jenderal Simbolon mengkhawatirkan seorang anakbuahnya yang terluka."†

Simbolon dikenal memiliki hubungan dekat yang khusus dengan Cancio Lopes de Carvalho, komandan milisi Mahidi yang bermarkas di Ainaro, dan komandan umum PPI Sektor C. Sebenarnya, dalam pengertian tertentu nama dari kelompok milisinya, Mahidi, merupakan penghormatan kepada sang jenderal, Mahidin Simbolon. Hubungan khusus itu bisa membantu menjelaskan kemunculan Cancio Carvalho sebagai salah satu dari pemimpin milisi yang paling kuat di Timor-Leste, dan ciri agresif yang khusus dari kelompok milisinya.‡

Perwira yang paling banyak dicurigai sebagai koordinator utama milisi di Timor-Leste—dan disebut namanya dalam surat dakwaan Februari 2003 terhadap Jenderal Wiranto dan lain-lain—adalah Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim. Sejarah karier Makarim membuatnya menjadi kandidat ideal untuk posisi itu, dan penunjukannya sebagai anggota militer senior untuk Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur yang dibentuk pemerintah Indonesia segera mengejutkan para pengamat lokal maupun internasional. Sampai dengan Januari 1999, ia menjabat sebagai kepala badan intelijen militer Indonesia, BIA, sebuah lembaga dengan pengalaman bertahun-tahun menjalankan operasi-operasi kontra-intelijen dalam situasi seperti yang terjadi di Timor-Leste.

Penting diperhatikan bahwa di awal dasawarsa1990-an Makarim ditugaskan sebagai seorang perwira intelijen di Aceh, dalam konteks operasi besar-besaran kontrapemberontakan dalam mana ribuan penduduk Aceh terbunuh. Salah satu ciri penting dari operasi tersebut, walaupun tidak banyak diketahui pada saat itu, adalah

* *Sydney Morning Herald*, "Silence over crime against humanity," 14 Maret 2002.

† *Sydney Morning Herald*, "Silence over crime against humanity," 14 Maret 2002.

‡ Juga patut dicatat bahwa kelompok-kelompok milisi yang melakukan kekerasan di Papua Barat muncul ketika Mahidin Simbolon, yang waktu itu berpangkat mayor jenderal, menjadi Panglima Daerah Militer di sana.

mobilisasi kelompok-kelompok milisi lokal, dan penggelaran mereka di dalam menghancurkan gerakan oposisi bersenjata, Aceh Merdeka, yang sekarang lebih dikenal sebagai GAM (Gerakan Aceh Merdeka).* Mayor Jenderal Makarim banyak diyakini sebagai orang yang bertanggung jawab atas operasi tersebut, sehingga kedatangannya di Timor-Leste menumbuhkan kekhawatiran bahwa strategi di Aceh akan dilaksanakan di Timor-Leste.

Peran Makarim sebagai bos milisi belum, dan mungkin bahkan tidak pernah bisa, dikonfirmasikan. Namun sadapan DSD dari awal September 1999 tampak membenarkan dugaan bahwa ia bertugas sebagai seorang koordinator operasi pro-otonomi, yang kelompok-kelompok milisi hanyalah salah satu bagian darinya. Sadapan-sadapan itu, seperti yang dilaporkan, mengungkapkan bahwa Makarim menghubungi beberapa tokoh kunci militer dan para pemain politik baik di Dili maupun di Jakarta, dan membahas dengan mereka hasil pemungutan suara serta rencana setelah pemungutan suara. Salah seorang yang sering berbicara dengan Makarim di hari-hari segera setelah pemungutan suara adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung, dan dua pensiunan jenderal lain yang menjabat menteri kabinet pada saat itu, yaitu Letnan Jenderal Hendropriyono dan Mayor Jenderal Yunus Yosfiah. Ketiga orang ini pernah bertugas militer di Timor-Leste, dengan latar belakang intelijen militer atau Kopassus, atau keduanya.

Di Dili, Makarim disebutkan berbicara dengan Brigadir Jenderal Glenny Kairupan, salah seorang perwira angkatan darat lain yang berpengalaman di Timor-Leste, dan para pemimpin kelompok pro-otonomi, antara lain Basilio Araújo. Pembicaraan-pembicaraan tersebut, demikian dilaporkan, mengungkap suatu kekhawatiran tentang hasil pemungutan suara dan potensi pembelotan para pemimpin kunci milisi. Dalam suatu pembicaraan dengan Basilio Araújo, pada 4 September 1999, Makarim tampak mengancam akan menyuruh membunuh Eurico Guterres kalau ia membelot pada saat terakhir. Setelah meminta Araújo untuk mengawasi Guterres, Makarim dilaporkan mengatakan: "Saya akan mengurusnya kalau dia menyeberang."†

Ringkasnya, bukti yang tersedia memberikan dukungan kuat untuk tuduhan umum yang dibuat dalam surat dakwaan untuk Wiranto dan lain-lain pada Februari 2003, bahwa:

> "Selama periode menjelang jajak pendapat, pejabat Indonesia mendirikan dan menguatkan kelompok-kelompok sipil untuk berkampanye untuk opsi otonomi. … [dan bahwa] kelompok-kelompok didirikan dan dipertahankan dengan tindakan aktif para pejabat Indonesia di dalam Angkatan Bersenjata Indonesia … dan pemerintah sipil."‡

* Lihat Geoffrey Robinson, "*Rawan* is as *Rawan* Does: Restoring Order in New Aceh," *Indonesia*, No. 66 (Oktober 1998).

† *Sydney Morning Herald*, "Silence over crime against humanity," 14 Maret 2002.

‡ Timor-Leste, Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Surat Dakwaan Wiranto dan lain-lain, Februari 2003, paragraf 10.

Pengakuan politik dan hukum

Milisi secara efektif diberi status hukum dan politik oleh para pejabat Indonesia. Pengakuan semacam itu membawa sejumlah keuntungan praktis tertentu bagi milisi, dan memberikan mereka akses ke lingkaran inti kekuasaan. Lebih penting lagi, ini berarti bahwa pihak berwenang Indonesia mengemban tanggung jawab hukum dan politik untuk tindakan-tindakan mereka, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap umat manusia.

Pejabat-pejabat militer, kepolisian, dan sipil pada awalnya tidak menutup-nutupi dukungan mereka kepada kelompok pro-otonomi dan milisi. Mulai akhir 1998, dan dengan frekuensi yang meningkat pada awal 1999, para pejabat TNI, Polri, dan pemerintah sipil mengambil bagian dalam berbagai upacara yang menandai pembentukan kelompok-kelompok milisi, atau memberikan semangat kepada kelompok-kelompok yang telah terbentuk untuk bertindak melawan kekuatan prokemerdekaan.[*] Kegiatan yang terdokumentasi mencakup upacara peresmian di Cassa (12 Desember 1998), Same (11 Maret 1999), Viqueque (11 Maret 1999), Dili (17 April 1999), Maliana (April 1999), Suai (pertengahan April 1999), Oecussi (1 Mei 1999), Manatuto (8 Mei 1999), Lolotoe (10 Mei 1999), Laclubar (18 Mei 1999), dan Gleno (April atau Mei 1999). Tanpa kecuali, Dandim, Kapolres, dan bupati masing-masing wilayah hadir di semua upacara ini. Dalam beberapa kasus, upacara dihadiri oleh pejabat dari jajaran yang lebih tinggi, termasuk komandan militer di Timor-Leste, Kolonel Tono Suratman.[†]

Salah satu contoh yang paling jelas mengenai dukungan publik semacam itu terjadi pada 17 April 1999 ketika para pejabat penting—termasuk Gubernur Timor Timur, Bupati Dili, Kolonel Tono Suratman, dan Mayor Jenderal Kiki Syahnakri[‡]—berkumpul di depan kantor gubernur untuk menyaksikan rapat umum pro-otonomi, yang dihadiri oleh ratusan anggota milisi dari seluruh Timor-Leste.[§] Menurut berbagai kesaksian tentang pawai tersebut, pemimpin milisi Eurico Guterres menyerukan kepada semua yang hadir untuk "melaksanakan pembersihan terhadap semua orang yang telah mengkhianati integrasi. Tangkap dan bunuh mereka kalau perlu."[¶]

* Sebagaimana yang ditulis oleh kepala misi UNAMET, Ian Martin: "… tidak ada penyembunyian tentang tingkat persetujuan resmi pada keberadaan milisi: para pejabat militer, kepolisian, dan pemerintah sipil menghadiri upacara peresmian dan acara-acara lain dengan milisi di seluruh Timor-Leste." Ian Martin, *Self-Determination in East Timor*, hal. 25.

† Upacara di Manatuto—yang dipimpin oleh bupati dan dihadiri oleh sekitar 5.000 orang—dihadiri oleh Danrem Kolonel Tono Suratman. Lihat Kodim 1631/Manatuto, Laporan Harian Intelijen Rahasia, 12 Mei 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #23).

‡ Menurut keterangan yang belum dikukuhkan, Mayor Jenderal Adam Damiri dan Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim juga hadir.

§ Satu laporan intelijen TNI tentang upacara tanggal 17 April memperkirakan bahwa yang hadir 1.645 anggota milisi. Menurut laporan itu, kelompok-kelompok yang hadir meliputi: Aitarak (760), BMP (400), Laksaur (75), Mahidi (75), AHI (80), Naga Merah (75), Morok (80), Alfa (50), dan Saka (50). Lihat: Dan Sat Gas Pam Dili kepada Dan Rem Up. Kasi Intel Rem 164/WD dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/200/1999, 17 (18?) April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16).

¶ Dikutip dalam Amnesty International, *Seize the Moment* (AI Index ASA 21/49/99), 21 Juni 1999, halaman 20.

Kemudian pada siang itu, diperkirakan 1.645 anggota milisi bergerak mengamuk di seluruh Dili, menembak-nembakkan senjata mereka, dan menyerang rumah tokoh prokemerdekaan yang terkenal, Manuel Carrascalão, serta membunuh setidaknya 12 orang. (Lihat studi kasus: Pembantaian di rumah Carrascalão.)

Tidak ada satupun suara pemerintah Indonesia yang disampaikan untuk memprotes pernyataan Guterres yang membakar itu, dan tidak ada usaha serius yang dibuat untuk mencegah kekerasan milisi. Sebaliknya, para pejabat yang berkuasa sungguh-sungguh berusaha menolak bertindak, dan dengan berbuat demikian secara efektif memfasilitasi dan mendukung kekerasan. Dari antara mereka yang gagal bertindak adalah komandan militer Timor-Leste, Kolonel Tono Suratman. Ketika amukan milisi dimulai, Manuel Carrascalão datang ke kantor Tono Suratman dan meminta Danrem itu untuk bertindak. Menurut Menteri Luar Negeri Irlandia, David Andrews, yang berada di sana, Kolonel Suratman tidak peduli dan tidak melakukan apa-apa.[*]

Selain pengakuan politik *de facto* semacam itu, pemerintah Indonesia juga memberikan status legal resmi kepada kelompok-kelompok milisi. Dalam beberapa bulan pertama 1999, pihak berwenang Indonesia menggolongkan milisi sebagai Wanra, Hansip, dan Ratih dan kadang-kadang Surwan (singkatan dari Sukarelawan) —yaitu sebagai kesatuan-kesatuan pertahanan warga yang resmi yang telah ada selama bertahun-tahun. Ini bukanlah sekadar tindakan hubungan masyarakat; terminologi yang sama digunakan dalam laporan-laporan dan memo-memo rahasia TNI. Misalnya, dalam sepucuk surat pada Maret 1999, seorang personel Kopassus di Baucau menyebut kelompok milisi Saka, Sera, dan Alfa sebagai 'Ratih.'[†] Makna dari penggolongan ini adalah bahwa hal ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok milisi telah diberi kedudukan hukum oleh pemerintah Indonesia.

Kedudukan hukum semacam itu bermakna hubungan istimewa dengan badan-badan pemerintah, terutama TNI dan kesatuan-kesatuan Kopassus. Sifat dari hubungan khusus itu ditunjukkan melalui berbagai dokumen pada 1999. Misalnya, dalam sepucuk surat pada Maret 1999, seorang perwira Kopassus meminta kepada kantor dinas kesehatan Baucau untuk menyediakan obat-obatan kepada sekitar 600 anggota Ratih dan keluarga mereka. Tidak ada alasan medis yang mendesak untuk permintaan tersebut. Sebaliknya, tujuan eksplisitnya adalah untuk memberikan penghargaan kepada para anggota Ratih atas bantuan mereka dalam mendukung operasi TNI dan untuk meningkatkan semangat mereka.[‡]

Bahkan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Wiranto, jelas menganggap kelompok-kelompok milisi sebagai satu unsur yang dapat diterima dan sah dalam strategi militer. Dalam satu rencana darurat yang dikutip oleh Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur (KPP-HAM), Wiranto menggambarkan milisi sebagai berikut:

---

* Ian Martin, *Self-Determination in East Timor*, halaman 27.

† Lihat: Komandan Satuan Lapangan-A, Satuan Tugas Tribuana-VIII, kepada Kepala Dinas Kesehatan Tingkat II Kab. Baucau, "Permohonan Dukungan Obat Bulanan Pos dan Kes Satlap-A," Maret 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #14).

‡ Ibid.

> "Kekuatan bersenjata berjumlah kurang-lebih 1.100 orang dengan 546 pucuk senjata berbagai jenis termasuk rakitan, mereka tergabung dalam organisasi-organisasi prointegrasi. Massa pendukung militan 11.950 orang tergabung dalam organisasi-organisasi perlawanan seperti Besi Merah Putih, Aitarak, Mahidi, Laksaur Merah Putih, Sakunar, Ahi, Jati Merah Putih, Darah Integrasi, Dadurus Merah Putih, Guntur Kailak, Halilintar Junior, Tim Pancasila, Mahadomi, Ablai, dan Naga Merah."[*]

Walaupun menurut pandangan mereka kelompok-kelompok milisi itu sah, dengan meningkatnya kemungkinan pengamatan internasional, pihak berwenang Indonesia membuat usaha untuk memberikan legalitas sipil baru kepada kelompok-kelompok milisi. Mulai April 1999, kelompok-kelompok milisi penting secara resmi digolongkan sebagai organisasi keamanan sukarela warga, atau Pam Swakarsa. Istilah tersebut telah digunakan untuk mengabsahkan kelompok-kelompok pemuda yang dimobilisasi untuk memberikan "keamanan" di wilayah-wilayah lain Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam pembicaraan dengan UNAMET dan dalam pernyataan- pernyataan publik, para pejabat pemerintah bersikeras bahwa kelompok-kelompok di Timor-Leste bukanlah milisi tetapi Pam Swakarsa, dan bahwa aktivitas mereka sepenuhnya sesuai dengan hukum.

Status resmi kelompok-kelompok milisi sebagai Pam Swakarsa dikonfirmasi oleh dua dokumen. Dokumen pertama adalah satu perintah dari Gubernur Timor Timur, Abílio Osório Soares, dan Komandan Korem Timor Timur, Kolonel Tono Suratman, bertanggal 23 April 1999 yang memerintahkan pembentukan Pam Swakarsa di seluruh wilayah Timor-Leste.[†] Sedang yang kedua adalah satu instruksi yang datang dari pemerintah Kabupaten Dili, juga dari April 1999, yang secara resmi memasukkan milisi Aitarak sebagai unsur integral dari Pam Swakarsa, dan memberikan daftar sejumlah pejabat sipil dan militer sebagai pemimpin mereka.[‡]

Bahkan setelah seruan untuk membentuk Pam Swakarsa menyebar di seluruh Timor-Leste, pejabat-pejabat TNI dan yang lain terus menggambarkan milisi sebagai bagian dari aparat pertahanan sipil yang telah lama berdiri; yaitu sebagai Wanra, Hansip, dan Ratih. Dalam satu laporan Perwira Penghubung Militer UNAMET di Kabupaten Viqueque bertanggal 5 Agustus 1999 dicatat bahwa latihan TNI dengan milisi "dijelaskan sepintas sebagai kegiatan Wanra yang sah atau sebagai kegiatan kemasyarakatan dari TNI … Sama halnya dengan PAM-Swakarsa-isasi milisi di Dili, kami melihat milisi yang punya hubungan dengan TNI tampil sebagai Wanra dan Hansip."[§]

---

* Wiranto, dikutip dalam Laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur (Internal), Jakarta, Januari 2000, paragraf 40.

† Surat itu sendiri belum pernah ditemukan hingga kini, namun dokumen-dokumen resmi lain menyebut dengan eksplisit dokumen itu.

‡ Lihat: Bupati Dili, "Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. I Dili, No. 33 Tahun 1999, Tentang Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) dan Ketertiban Kota Dili," 14 Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #304).

§ UNAMET Viqueque, "Outline of Pro-Integration Militia in Viqueque Area," 6 Agustus 1999. Dimuat

Karena adanya kaitan historis di antara kesatuan-kesatuan bantuan sipil dan milisi baru, klaim ini mungkin agak mendekati kebenaran. Klaim itu sekaligus menyembunyikan fakta bahwa pada Juni 1999, kelompok-kelompok milisi secara resmi telah diorganisasikan ke dalam satu struktur tunggal gaya militer, dengan nama yang eksplisit militer 'Pasukan Pejuang Integrasi' (PPI), dan mendapatkan komando dan instruksi dari para pemimpin organisasi tersebut. Struktur tersebut, yang secara resmi diakui oleh pihak berwenang Indonesia, menambah bobot pada klaim bahwa kelompok-kelompok milisi diorganisasikan secara resmi, bukan spontan, dan bahwa aksi-aksi mereka—termasuk tindak kekerasan—dikoordinasikan.

Status resmi dari kelompok milisi, dan hubungan dekat mereka dengan TNI, lebih jauh dikonfirmasi oleh satu laporan rahasia tertanggal 21 Juni 1999, dari Kodim Dili kepada Korem. Laporan itu merupakan jawaban atas permintaan dari kepala seksi intelijen militer Timor-Leste untuk klarifikasi tentang sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan oleh organisasi nonpemerintah setempat, Yayasan HAK. Dalam rangka memeriksa laporan ini, Kodim Dili memberikan daftar pelanggaran hak asasi manusia itu kepada Aitarak, yang anggota-anggotanya merupakan pelaku utama pelanggaran yang disebutkan dalam laporan. Tidak mengejutkan, pemimpin Aitarak menyatakan bahwa semua tuduhan tersebut tidak benar. Penting dicatat bahwa pernyataan pemimpin Aitarak diterima tanpa diperiksa lebih lanjut dan disampaikan kepada Korem sebagai temuan Kodim.[*]

Para pemimpin milisi juga diberi status setengah resmi di dalam badan-badan negara yang bertanggung jawab untuk urusan politik dan keamanan. Para pemimpin milisi secara rutin diundang ke berbagai rapat dan penjelasan dengan pejabat-pejabat TNI, Polri, dan sipil. Sebagian dari pertemuan ini bersifat rahasia, tetapi banyak yang bersifat publik. Ketika ditanya mengenai pertemuan-pertemuan semacam itu, para pejabat pemerintah dan militer kadang-kadang menyatakan bahwa mereka bermaksud mendesak milisi untuk menghentikan tindakan-tindakan di luar hukum. Namun, para peserta dan saksi pertemuan tersebut memberikan laporan yang konsisten kepada UNAMET bahwa tujuan umum dari pertemuan-pertemuan tersebut adalah untuk menyampaikan rencana strategis dan taktis untuk tindak kekerasan yang terencana—termasuk pembakaran rumah, pemukulan, dan pembunuhan—terhadap para pendukung kemerdekaan.

Selain pertemuan tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya, pada 1999 ada sejumlah pertemuan antara para perwira tinggi militer dan para pemimpin milisi. Misalnya, pada Maret 1999 Mayor Jenderal Adam Damiri tercatat menghadiri satu pertemuan para pemimpin kelompok pro-otonomi dan milisi di sebuah hotel mewah di Bali, dan mengatakan kepada mereka bahwa Indonesia "100 persen di belakang mereka dan tidak akan pernah meninggalkan mereka."[†] Di markas

dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book on Political Affairs and Human Rights in East Timor*, November 1999.

* Lihat: Dandim 1627/Dili kepada Danrem Up. Kasi Intel Rem 164/WD, dan lain lain. Telegram rahasia No. STR/137/1999, 21 Juni 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #30).

† Dan Murphy, "Spotlight: School's Out," *Far Eastern Economic Review*, 23 September 1999.

Korem pada 18 Juni, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Brigadir Jenderal Glenny Kairupan, Kolonel Tono Suratman, dan beberapa pemimpin milisi bertemu untuk membahas perincian rencana darurat untuk memengaruhi pemungutan suara dan menciptakan kekacauan kalau pihak prokemerdekaan menang.[*] Pertemuan tingkat tinggi lebih lanjut dilaporkan terjadi di Dili yang diadakan segera setelah pemungutan suara. Pertemuan yang dihadiri oleh Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin, dan beberapa perwira tinggi TNI lainnya itu dilaporkan membahas rencana-rencana untuk menghancurkan infrastruktur vital dan membunuh tokoh-tokoh utama prokemerdekaan, kalau hasil penghitungan suara menunjukkan kemenangan prokemerdekaan.[†]

Harus diperhatikan bahwa pertemuan-pertemuan antara para pejabat militer, kepolisian, dan pemerintah sipil itu bukanlah sesuatu yang khas Timor-Leste. Secara bersama-sama, para pejabat ini merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk urusan keamanan yang ada pada setiap tingkat hierarki pemerintahan Indonesia. Badan yang dikenal dengan nama Muspida di tingkat kabupaten, dan dengan nama-nama yang berbeda pada tingkat-tingkat struktur pemerintah yang lebih rendah, mengadakan rapat secara rutin, baik di Timor-Leste maupun di Indonesia sendiri. Yang tidak lazim adalah di Timor-Leste pada 1999 para pemimpin milisi diundang untuk ambil bagian dalam rapat-rapat seperti itu. Akibatnya, walaupun menjadi penanggungjawab atas terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia, milisi digabungkan dalam aparat pembuatan keputusan resmi negara Indonesia.

Status resmi dari milisi, yang terbukti jelas dari partisipasi mereka dalam pertemuan-pertemuan semacam itu, dikonfirmasikan lebih jauh oleh sejumlah dokumen resmi yang penting, yang ditandatangani bersama oleh pejabat Indonesia yang berwenang dan komandan milisi. Misalnya, ini mencakup satu perintah yang ditandatangani bersama oleh seorang Komandan Rayon Militer (Danramil) dan seorang komandan milisi tingkat kecamatan yang menginstruksikan kepada seorang pemimpin milisi lain dan anakbuahnya untuk menghadiri satu pertemuan pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan.[‡] Dokumen-dokumen itu juga mencakup setumpuk 'surat izin jalan' yang ditandatangani bersama oleh komandan milisi Eurico Guterres dan berbagai pejabat militer, kepolisian, dan pemerintah sipil di awal September 1999.[§] Di antara yang paling luarbiasa dari 'surat izin jalan' ini adalah satu surat yang ditandatangani oleh Eurico Guterres dan Kepala Staf Kodim Dili, Kapten Salmun

---

* Douglas Kammen, "The Trouble with Normal: The Indonesian Military, Paramilitaries, and the Final Solution in East Timor," dalam Benedict Anderson (penyunting), *Violence and the State in Suharto's Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia Program, 2001.

† "Maj. Gen. Zacky Anwar Makarim," *Masters of Terror*, http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm; dan "Sjafrie Sjamsuddin siapkan rencana darurat," *MateBEAN*, 1 September 1999.

‡ Perintah (No. 02/HMP/Kec.BB/VII/1999), bertanggal 30 Juli 1999, ditandatangani oleh Danramil Bobonaro, Sersan Poniran dan Komandan milisi Hametin Merah Putih di Bobonaro, Alberto Leite (Koleksi HRU, Doc. BOB#10).

§ Lihat misalnya, Koleksi SCU, Documents #42, 43, 53, 54, 57, dan 283-299.

Manafe.* Dokumen ini luarbiasa karena memberikan izin perjalanan kepada Kapten Manafe dan keluarganya. Dengan kata lain, pada September 1999, bahkan Kepala Staf Kodim membutuhkan dan terbukti menerima otoritas legal seorang komandan milisi dalam urusan keamanan.

Singkatnya, bukti-bukti yang disampaikan di dalam bab ini mengajukan dukungan kuat untuk kesimpulan bahwa milisi bukanlah badan independen yang bertindak di luar jangkauan negara Indonesia, tetapi kenyataannya dibentuk, didukung, dan diarahkan oleh pihak-pihak berwenang Indonesia. Lebih jauh, bukti-bukti ini menunjukkan bahwa dukungan kepada milisi tidaklah sekadar disediakan oleh sejumlah kecil 'oknum' di dalam TNI, tetapi merupakan bagian dari kebijakan resmi, dan mendapatkan dukungan dari sebagian pejabat tertinggi dan paling berkuasa di Indonesia. Kesimpulan-kesimpulan ini didasarkan pada tiga temuan utama berikut ini.

Pertama, milisi yang menyebabkan kekacauan pada 1999 bukanlah kelompok yang baru. Sebaliknya, mereka itu merupakan kelanjutan dari strategi politik dan militer yang sudah mapan dan telah diterapkan oleh angkatan darat Indonesia di Timor-Leste sejak invasi pada 1975. Kenyataannya, sebagian dari pasukan milisi yang aktif pada 1999 telah dimobilisasi oleh angkatan bersenjata Indonesia pada saat invasi, sementara sebagian yang lain telah dibentuk oleh para perwira Angkatan Darat dalam dasawarsa 1980-an dan 1990-an. Selama 24 tahun pendudukan Timor-Leste, kelompok-kelompok tersebut dilatih, dipasok, dan dibina oleh Angkatan Darat Indonesia, dan menggunakan taktik-taktik yang sebenarnya sama dengan yang terlihat pada 1999. Pola historis ini menyediakan dasar yang sangat kuat untuk meragukan pernyataan pemerintah Indonesia bahwa kelompok-kelompok milisi tersebut muncul secara spontan dan bertindak sendiri pada 1999.

Kedua, pejabat-pejabat tinggi militer di Dili, Denpasar, dan Jakarta, secara aktif terlibat dalam pembentukan kelompok-kelompok milisi baru, dan dalam mengoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka sejak pertengahan 1998 sampai dengan 1999. Bukti tentang berlanjutnya keterlibatan pihak berwenang didapatkan dari kesaksian mantan pemimpin-pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia, dan dari komunikasi rahasia antara para pejabat sipil dan militer Indonesia pada 1998 dan 1999. Bukti ini menunjuk pada para pejabat tinggi, yang mencakup Jenderal Wiranto, Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Mayor Jenderal Adam Damiri, Kolonel Tono Suratman, dan Mayor Bambang Wisnumurty.

Terakhir, ada bukti yang tak terbantahkan bahwa milisi-milisi tersebut diberi kedudukan legal dan politik resmi baik oleh pemerintah Indonesia maupun oleh pihak berwenang militer. Pernyataan-pernyataan publik yang mendukung milisi, yang dibuat oleh sejumlah pejabat, merupakan ungkapan tentang pengakuan dan dukungan resmi negara kepada kelompok-kelompok tersebut. Pernyataan-pernyataan itu juga bisa dipandang sebagai mendorong, dan bahkan memicu, kelompok-kelompok milisi

* Lihat: Kepala Staf Kodim 1627 (Kapten Salmun Manafe) dan Wakil Panglima PPI (Eurico Guterres), Surat Ijin Jalan, No. SIJ/14/IX/1999, 3 September 1999 (Koleksi SCU, Doc #53).

untuk melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia. Dengan dasar-dasar itu, bisa diajukan pendapat bahwa milisi adalah tangan resmi aparat politik dan keamanan Indonesia, dan bahwa tindakan-tindakan mereka oleh karena itu merupakan tanggung jawab langsung dari pihak-pihak berwenang Indonesia. Lebih lanjut, kedudukan legal milisi bukanlah sekadar bersifat teoretis, tetapi dikonfirmasikan oleh pengikutsertaan secara tetap para pemimpin milisi di dalam pembahasan dan pengambilan keputusan pejabat-pejabat Indonesia dalam bidang politik dan keamanan di semua tingkatan. Jadi, baik dalam hukum dan dalam praktik, milisi bertindak dengan pengesahan penuh pihak-pihak berwenang Indonesia.

Milisi: Perekrutan, pelatihan, operasi, dan senjata

Hubungan antara milisi dengan TNI dan pejabat-pejabat Indonesia lainnya juga jelas terbukti dalam pola perekrutan, pelatihan, operasi, dan akses milisi pada senjata. Pola-pola itu signifikan karena menunjukkan bahwa milisi bukanlah entitas independen yang berada di luar kontrol pihak berwenang, seperti yang diklaim oleh pejabat-pejabat Indonesia, tetapi ada dan bertindak sesuai dengan arahan dan prosedur TNI. Lebih daripada itu, pola-pola tersebut melibatkan TNI, termasuk sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat, dalam pelaksanaan pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh milisi.

Perekrutan dan keanggotaan

Keterlibatan langsung TNI dengan milisi terungkap dalam pola perekrutan dan keanggotaan milisi pada 1999. Para perwira dan prajurit TNI secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam perekrutan anggota milisi, yang kadang-kadang dilakukan dengan pemaksaan. Sama pentingnya, perwira dan prajurit TNI bertugas sebagai pemimpin milisi dan menyamar sebagai milisi, sehingga membuat perbedaan antara TNI dan milisi menjadi benar-benar tanpa arti.

Anggota-anggota milisi berasal dari kelompok yang beragam dan menjadi terlibat di dalam milisi karena berbagai alasan. Sebagian bergabung dengan kelompok milisi karena keinginan sendiri. Mereka mencakup orang-orang yang pernah berjuang di pihak Indonesia sejak 1975, yang keluarga atau kerabatnya dibunuh oleh partai kemerdekaan, Fretilin, atau yang relatif hidup mapan di bawah kekuasaan Indonesia. Anggota-anggota yang lain direkrut secara langsung dari kelompok-kelompok kriminal yang terlibat dalam lingkaran-lingkaran perjudian, jasa perlindungan, dan sebagainya, atau karena mereka tergoda oleh kemungkinan menggunakan senjata dan memiliki kekuasaan kotor atas pihak yang lain.

Namun sejumlah besar anggota milisi bergabung oleh karena pemaksaan sebagai bagian dari usaha perekrutan resmi yang sistematis yang digerakkan sejak awal 1999

dalam konteks kampanye 'sosialisasi' pro-otonomi. Di setiap kabupaten, pejabat-pejabat militer dan pemerintah menetapkan target mengenai jumlah anggota milisi yang harus direkrut. Biasanya, targetnya adalah sekitar sepuluh orang laki-laki untuk setiap desa. Pencapaian target ini merupakan tanggung jawab camat dan kepala desa, namun sesuai dengan pola historis yang diuraikan dalam Bab 6, para perwira TNI selalu terlibat.

Berbicara kepada para wartawan di awal 1999, Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Supadi mengatakan bahwa militer telah merekrut sekitar 1.200 orang milisi, dan bahwa perekrutan tersebut dijadwalkan terus berlanjut hingga Maret.* Tokoh Timor-Leste mantan pendukung Indonesia, Tomás Gonçalves, menyatakan bahwa perwira-perwira dari Satgas Tribuana Kopassus berperan sangat penting dalam perekrutan. Berbicara di awal 1999, ia mengatakan:

> "Orang-orang itulah yang merekrut milisi—mereka melakukan pemaksaan. Jika mereka tidak mau, pada malam hari mereka diambil dan dibunuh. [Mereka yang bergabung] diberi latihan militer, senjata, dan diindoktrinasi."†

Walaupun tidak semua yang menolak menjadi milisi dibunuh, pemaksaan dan ancaman merupakan unsur umum dalam usaha perekrutan. Pada pertemuan-pertemuan umum dan dalam kampanye dari rumah ke rumah yang dilaksanakan di awal 1999, anggota-anggota milisi dan prajurit-prajurit TNI menekan orang untuk bergabung. Yang menolak atau melawan, apapun sebabnya, dituduh bersikap prokemerdekaan dan dijadikan sasaran pembalasan dendam. Banyak dari yang menolak, rumahnya dibakar dan keluarganya diancam, dan beberapa dibunuh. Kalau kepala desa atau camat tidak bersemangat membentuk kelompok milisi, mereka dijadikan sasaran ancaman dan pembalasan oleh kelompok-kelompok milisi dan para prajurit TNI dari wilayah-wilayah tetangga.

Seperti kesaksian seorang mantan milisi: "Mereka memanggil kami, mencatat nama kami, dan berkata, 'kalian harus bergabung dalam kelompok ini.' Kami bilang, 'untuk apa kami bergabung?' Mereka bilang, 'Kalau kalian menolak, kalian akan lihat apa yang terjadi.' Sehingga kami menjadi takut dan kami bergabung."‡ Hal yang sama, seorang istri dari seorang laki-laki yang melarikan diri dari desanya setelah menolak bergabung dengan milisi bersaksi: "Mereka datang ke desa kami dan menghancurkan segalanya. Mereka membunuh ayam-ayam kami, mereka ambil apa yang bisa mereka bawa dan menjualnya. Dan mereka bilang, kalau [mereka tidak dapat] menemukan suami [saya] mereka akan datang lagi dan memukuli saya dan anak-anak saya sampai mati."§

* "Lt. Col. Supadi," *Masters of Terror*, http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm

† Dikutip dalam "Timor Coup Planned," *The Age*, 22 Juni 1999.

‡ Dikutip dalam SBS, *Dateline*, "Timor Terror Fund," 16 Februari 2000, transkripsi, halaman 34.

§ Dikutip dalam ABC, *Four Corners*, "A Licence to Kill," 15 Maret 2000, transkripsi, halaman 6.

Di samping mereka yang direkrut dengan tekanan, dan yang bergabung secara sukarela, ada sejumlah 'orang milisi' yang ternyata samasekali bukan orang sipil Timor-Leste, tetapi prajurit angkatan darat Indonesia yang berpakaian seperti milisi setempat. Khususnya dalam periode pra-UNAMET dan pasca-pemungutan suara, kerap ada laporan tentang orang-orang milisi yang sesungguhnya adalah prajurit TNI berpakaian sipil. Berdasarkan kesaksian dari para korban perkosaan pada 1999, para Pelapor Khusus PBB pada akhir 1999 melaporkan bahwa:

> "… pada banyak kesempatan tidak bisa dibuat pembedaan antara anggota milisi dengan anggota TNI, karena sering mereka adalah orang yang sama dengan seragam yang berbeda."[*]

Rekaman film, yang diambil pada 1999, yang menunjukkan seorang prajurit TNI sedang berganti 'kostum' milisi dan memasang rambut palsu panjang 'milisi' memberikan dukungan pada sangkaan bahwa setidaknya sebagian dari anggota milisi tidaklah seperti yang terlihat.

Dalam beberapa kasus, pihak berwenang Indonesia mengakui bahwa anggota milisi sebenarnya adalah perwira TNI. Pada Agustus 1999, pejabat UNAMET menulis surat kepada kepala Satuan Tugas, Agus Tarmidzi dan kepada Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, untuk mengajukan keberatan tentang keterlibatan anggota TNI dalam kegiatan milisi. Di antara anggota TNI yang mereka sebut namanya adalah Sersan Domingos dos Santos dan Sersan Julião Gomes, yang keduanya bertugas di Kodim Bobonaro.[†] Dalam jawabannya, Makarim mengakui bahwa dua orang tersebut memang anggota TNI dan anggota milisi DMP. Sebagai usaha untuk mengalihkan kritik UNAMET, Makarim menyatakan, dengan tidak benar, bahwa dua tentara tersebut telah dikurung di barak.[‡]

Sejumlah dokumen militer dan pemerintah dari akhir 1998 dan 1999 mengonfirmasikan bahwa terdapat perangkapan yang besar di dalam keanggotaan milisi dan TNI, dan bahwa sebagian anggota milisi kenyataannya adalah prajurit TNI. Misalnya, satu dokumen dari akhir 1998, menyebutkan 49 anggota kelompok milisi Makikit yang bermarkas di Viqueque, mengindikasikan bahwa enam orang dari semua yang terdaftar sebenarnya adalah prajurit TNI dari Batalion Infanteri 328 TNI.[§] Sepucuk surat dari pemimpin milisi Eurico Guterres kepada Dandim Dili menunjukkan bahwa penempatan personel TNI di dalam kesatuan-kesatuan milisi adalah hal yang biasa. Surat tersebut, bertanggal 22 Juni 1999, meminta Dandim Dili mengizinkan seorang bintara intelijen TNI

---

* United Nations, *Situations of Human Rights in East Timor*, 10 Desember 1999, halaman12.

† Dua orang yang disebut namanya itu tercantum dalam surat Ian Martin kepada Agus Tarmidzi, bertanggal 19 Agustus 1999. Dikutip dalam Greenlees and Garran, *Deliverance*, halaman 184.

‡ Komunikasi pribadi, Ian Martin, 1 Juni 2003.

§ Lihat: Kodim 1630, "Daftar: Nominatif Pemegang Senjata Team Makikit," tidak bertanggal, ditemukan di Kodim 1630 pada 28 November 1998 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #4).

(Sersan Satu Elizario da Cruz P.) untuk bertugas pada Aitarak untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.*

Dokumen lain menegaskan pola-pola ini dan membuktikan bahwa sejumlah kelompok "milisi" kenyataannya adalah kesatuan khusus TNI. Satu daftar resmi tentang 91 anggota kelompok milisi Saka (juga dikenal sebagai Pusaka), bertanggal 3 Februari 1999, menunjukkan bahwa semuanya adalah prajurit TNI, dengan pangkat dan nomor pokok militer, dan bahwa kesatuan itu secara resmi disebut 'kompi khusus' Kodim 1638/Baucau. Dengan kata lain, Saka samasekali bukan suatu pasukan sipil sukarela, tetapi satu kesatuan khusus TNI. Lebih jauh, dokumen yang sama menunjukkan bahwa komandan kompi tersebut, Joanico Cesário Belo—yang juga Komandan Sektor A PPI—kenyataannya adalah seorang bintara Kopassus, dengan pangkat Sersan Satu.

Akhirnya, sejumlah dokumen internal milisi Aitarak dengan jelas menunjukkan bahwa personel TNI adalah anggota-anggota milisi ini dan bahwa mereka digaji. Satu dokumen semacam itu, dibuat oleh bendaharawan Aitarak dan bertanggal 24 Agustus 1999, adalah ringkasan mengenai gaji yang sudah dibayarkan kepada para anggota kelompok. Di antara mereka yang dibayar adalah 96 orang yang anggota TNI atau pegawai sipil pemerintah daerah.†

Keterlibatan langsung pasukan dan perwira TNI di dalam perekrutan paksa untuk keanggotaan milisi di tahun 1999, serta perangkapan keanggotaan milisi dan TNI yang signifikan dan mendapatkan dukungan resmi, meninggalkan sedikit ruang untuk keraguan tentang hubungan milisi-TNI. Hal ini juga memperkuat kesimpulan bahwa pimpinan TNI mengemban tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan-pasukan milisi.

Pelatihan

Walaupun terdapat penolakan resmi yang sangat kuat, tidak ada keraguan bahwa TNI memberikan pelatihan kepada milisi secara teratur.‡ Seperti bukti perekrutan paksa dan keanggotaan rangkap dengan milisi, bukti mengenai latihan dengan jelas menunjukkan keterlibatan TNI dalam kekerasan milisi.

Dalam suatu keterusterangan pihak resmi yang jarang terjadi, di awal Januari 1999 Kepala Staf Korem, Letnan Kolonel Supadi, dilaporkan berkata kepada para wartawan bahwa militer sebenarnya memberikan latihan selama dua minggu kepada

* Lihat: Komandan Komando Pasukan Aitarak Sektor B (Eurico Guterres) kepada Komandan Kodim 1627/Dili dan lain-lain. Surat No. 46/PD/MK-AT/VI/1999 mengenai "Permohonan Dispensasi," 22 Juni 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #31).

† Menurut laporan tersebut, 96 orang itu masing-masing dibayar Rp120.000. Lihat: Memo dari Bendahara kepada Eurico Guterres tentang anggaran Aitarak, 28 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #79).

‡ Bersaksi di hadapan sidang Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Jakarta, pada Oktober 2002, Kolonel Tono Suratman secara tegas membantah bahwa TNI pernah memberikan latihan kepada milisi Timor-Leste. "Kami tidak pernah mendidik atau melatih mereka," katanya. Lihat "Tono Bantah Keterlibatan TNI dan Polri," *Media Indonesia*, 23 Oktober 2002.

milisi baru.[*] Pengakuannya tentang peran TNI sudah dikonfirmasi oleh berbagai laporan dari para pengamat waktu itu, dan dari bukti kesaksian yang substansial yang dikumpulkan sejak 1999. Namun peran sangat penting TNI di dalam pelatihan milisi, paling meyakinkan ditunjukkan oleh rekaman dokumenter.

Ada empat dokumen yang secara khusus mengungkapkan hal tersebut. Pertama adalah satu lembar telegram rahasia dari Danrem Kolonel Tono Suratman, bertanggal 13 April 1999, yang memerintahkan semua Dandim untuk melaksanakan tindakan kewaspadaan dan disiplin yang lebih besar dalam melatih satuan-satuan Ratih (yaitu milisi) di kabupaten mereka masing-masing. Dengan demikian, dokumen itu menegaskan bahwa pelatihan kelompok-kelompok milisi dilakukan secara rutin, dan berada dalam pengawasan dan kontrol dari pejabat militer yang paling tinggi di Timor-Leste, Kolonel Tono Suratman. Dalam bagian yang relevan dari telegram tertanggal 13 April, Suratman memerintahkan semua Dandim:

> "Supaya melaksanakan pengamanan kegiatan penyenggaraan pendidikan dan latihan Ratih di pendidikan dan latihannya masing-masing agar melaksanakan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar"; dan "Menekankan tata-tertib disiplin dalam rangka mencegah terjadinya kerugian secara fisik maupun nonfisik di lingkungan dan di luar satuan pendidikan."[†]

Penting bahwa telegram Danrem tersebut didasarkan pada satu perintah dari Panglima Daerah Militer IX, Mayor Jenderal Adam Damiri (No. STR/90/1999, tanggal tidak disebutkan), yang mengonfirmasikan bahwa latihan semacam itu dilakukan dengan sepengetahuannya, dan dengan perintahnya. Lebih jauh, telegram Danrem tertanggal 13 April 1999 mengutip, untuk pengesahan, satu perintah tahun 1996 dari Kepala Staf Angkatan Darat mengenai prosedur perekrutan dan pelatihan Ratih. Dengan demikian, telegram tersebut mengonfirmasikan bahwa pelatihan milisi di tahun 1999 diatur melalui peraturan dan prosedur yang sudah tetap yang dikeluarkan oleh jajaran TNI yang paling tinggi. Bagian yang relevan dari telegram Danrem tersebut memerintahkan kepada semua Dandim untuk:

> "Menekankan pembuatan Rencana Pengamanan dalam setiap penyusunan Rencana Latihan Ratih sesuai surat telegram KASAD No. ST/1156/96 tanggal 26 Nop 1996"; dan "Memperhatikan semua sarana pendukung yang digunakan agar disesuaikan dengan persyaratan/peraturan dan prosedur yang berlaku."[‡]

Dokumen kedua yang relevan dengan persoalan pelatihan adalah satu lembar telegram rahasia, bertanggal 16 April 1999. Telegram ini dikeluarkan oleh Dandim

* "Lt. Col. Supadi," *Masters of Terror*, http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc/htm

† Danrem 164/WD kepada Dandim 1627-1639 dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/44/1999, 13 April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #10).

‡ Ibid.

Dili kepada semua Danramil yang berada di bawah komandonya. Dengan merujuk pada telegram Danrem bertanggal 13 April 1999, telegram Dandim mengingatkan semua Danramil tentang "peraturan dan prosedur" yang berlaku untuk mengatur pelatihan Ratih. Dengan cara demikian, telegram tersebut memberikan konfirmasi tambahan bahwa pelatihan untuk milisi merupakan tugas rutin TNI, yang dilaksanakan di seluruh Timor-Leste setidak-tidaknya sampai pada tingkat Koramil, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang sudah tetap.[*]

Dokumen ketiga yang penting adalah satu laporan intelijen TNI dari Kodim Liquiçá, bertanggal 18 April 1999. Dokumen ini melaporkan, antara lain, tentang kunjungan Danrem Kolonel Tono Suratman ke kota Liquiçá dan Maubara pada pertengahan April. Dokumen ini tidak hanya mengonfirmasikan bahwa TNI secara aktif terlibat dalam pelatihan milisi BMP pada waktu itu, tetapi juga bahwa Kolonel Tono Suratman berperan langsung di dalamnya. Bagian yang relevan dari laporan itu terbaca:

> "Pada 16 April pukul 14.00 WITA [Waktu Indonesia Tengah] Dan Rem 164/WD dan rombongan tiba di Makodim 1638/Lqs kemudian melaksanakan kunjungan di Koramil 1638-03/Maubara dalam rangka memberikan pengarahan kepada ± 500 anggota Besi Merah Putih …"[†]

Penting diperhatikan bahwa pengarahan yang diberikan oleh Tono Suratman kepada BMP di Maubara terjadi hanya dua minggu setelah milisi yang sama melancarkan serangan kekerasan terhadap Gereja Liquiçá, di mana belasan orang terbunuh. Penting juga ditegaskan bahwa Kolonel Tono Suratman memberikan pengarahan kepada para anggota milisi ketika mereka berkumpul di sebuah instalasi resmi TNI, markas Koramil di Maubara.[‡]

Dokumen keempat adalah satu laporan situasi harian, bertanggal 20 Mei 1999, dari Kodim 1631/Manatuto kepada kepala Seksi Intelijen Korem, Mayor Bambang Wisnumurty, dan salinannya diberikan kepada Komandan Satgas Tribuana.[§] Laporan itu antara lain menyatakan secara eksplisit bahwa pada 17 Mei 1999, dua orang perwira senior TNI telah memberikan "pengarahan" kepada para anggota milisi Morok yang bermarkas di Manatuto. Dua orang perwira tersebut adalah

---

* Kepala Staf Kodim 1627 (Kapten Salmun Manafe) atas nama Dandim 1627, kepada Danramil 01 sampai dengan 04 dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/198/1999, 16 April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #13).

† Perwira Seksi Intelijen Kodim 1638 kepada Kepala Seksi Intelijen Korem 164/WD, Dan Sektor B, dan lain-lain, "Laporan Harian Seksi Intelijen Dim 1638/Lqs Periode tgl. 16 s/d 17 April 1999," 18 April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #11).

‡ Mungkin juga penting bahwa kunjungan Tono Suratman terjadi tepat satu hari sebelum satu tim dari Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat tiba di kabupaten itu untuk menyelidiki pembantaian di Gereja Liquiçá.

§ Perwira Seksi Intelijen (Kapten Dulhadjar) Kodim 1631/Manatuto kepada Kasi Intel Korem 164/WD dan lain-lain. Laporan Harian Intelijen, 20 Mei 1999. (Koleksi Yayasan HAK, Doc #24.)

Komandan Sektor A, Kolonel Sunarko, dan Komandan "Sub-Sektor Manatuto" yang tidak disebutkan namanya.* Dengan demikian di samping mengonfirmasikan bahwa TNI terlibat dalam pelatihan milisi, laporan ini menyatakan dengan jelas tentang peran komandan sektor yang berpangkat tinggi dalam pelatihan tersebut.† Laporan ini juga menunjukkan bahwa para perwira senior intelijen dan Kopassus, terutama Mayor Bambang Wisnumurty di Korem dan Komandan Satgas Tribuana, Letnan Kolonel Yayat Sudrajat, sepenuhnya mengetahui situasi tersebut.

Secara bersama-sama, dokumen-dokumen ini mengonfirmasikan bukti kesaksian yang sangat banyak bahwa pelatihan milisi adalah unsur standar dari kegiatan TNI di Timor-Leste pada 1999. Dokumen-dokumen itu juga menunjukkan bahwa pelatihan tersebut diatur oleh seperangkat peraturan dan prosedur yang sudah tetap, dan sesuai dengan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh perwira-perwira pada jajaran tertinggi hierarki militer, termasuk Danrem Kolonel Tono Suratman, Pangdam IX Mayor Jenderal Adam Damiri, dan Kepala Staf Angkatan Darat.

Operasi

Juga ada bukti penting, baik dalam bentuk kesaksian maupun dokumenter, bahwa pada 1999 kelompok-kelompok milisi menerima dukungan operasional langsung dari TNI. Dukungan operasional tersebut bentuknya bermacam-macam. Dalam sejumlah kasus, khususnya pada periode pra-UNAMET dan pasca-pemungutan suara, para prajurit TNI ditugaskan bersama milisi dalam operasi-operasi yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dalam kasus-kasus lainnya, paling umum terjadi selama periode UNAMET, milisi diperbolehkan menggunakan pangkalan-pangkalan dan pos-pos TNI sebagai tempat persiapan untuk operasi-operasi mereka.

Operasi bersama TNI-milisi memiliki dua ciri penting. Pertama, para prajurit TNI biasanya mengambil tempat di belakang pasukan milisi, menembakkan senjata mereka hanya ketika milisi berada dalam bahaya. Kedua, dalam kasus pembunuhan, para prajurit dan perwira TNI umumnya memimpin penyelenggaraan pelenyapan mayat.

Satu contoh yang paling jelas dari pola ini adalah pembantaian 6 April di Gereja Liquiçá. Dalam kasus tersebut, ratusan anggota milisi BMP dan Aitarak menyerang sekelompok orang yang mengungsi di kompleks gereja di Liquiçá dan membunuh belasan orang. Prajurit pasukan-pasukan TNI, Polri, dan Brimob yang bersenjata lengkap hadir selama terjadinya serangan itu. Para prajurit ini bukan saja hanya

* Ini mungkin adalah Letnan Kolonel Nyus Rahasia, seorang perwira Kopassus yang disebutkan berada di Manatuto mulai pertengahan Mei hingga pertengahan Juni untuk mengoordinasikan latihan cara militer untuk milisi di sana. (Lihat Ringkasan Distrik: Manatuto.)

† Beberapa dokumen lain mengonfirmasikan peran komando-komando Sektor dalam melatih milisi. Salah satunya adalah perintah bertanggal 27 April 1999 dari Danrem Kolonel Tono Suratman kepada Komandan Sektor A dan Sektor B, yang menginstruksikan mereka untuk sementara menghentikan apel rutin pagi hari pasukan-pasukan pro-integrasi (yaitu milisi). Lihat: Danrem 164/WD kepada Dan Sektor A dan B. Telegram rahasia, 27 April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #18).

diam tidak melakukan apapun untuk mencegah serangan, atau menghentikannya ketika sedang terjadi, tetapi sebagian besar kesaksian menyatakan bahwa mereka justru membantu pelaksanaan penyerangan. Seorang anggota BMP yang terlibat dalam penyerangan, di kemudian hari mengatakan kepada UNAMET bahwa mayat-mayat korban diangkut pergi dengan menggunakan sedikitnya lima truk. Perlu diperhatikan, satu laporan rahasia Polri tentang insiden itu mencatat bahwa hubungan erat antara TNI dan milisi menjadi halangan bagi penyelidikan Polri.[*] (Lihat studi kasus: Pembantaian Gereja Liquiçá.)

Dengan mulai bertugasnya UNAMET pada Juni 1999, dan datangnya ratusan wartawan dan pengamat, TNI berusaha menghindari terlihat sedang bersama milisi.[†] Perubahan taktik ini membuat turunnya laporan tentang operasi bersama TNI-milisi setelah awal Juni, dan mungkin bukan kebetulan, membuat turunnya tingkat pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste.

Akan tetapi, operasi bersama TNI-milisi tetap berlangsung. Sebagai contohnya:

- Di pertengahan Juni 1999, para pejabat UNAMET menyaksikan TNI dan pasukan-pasukan milisi secara paksa mengungsikan penduduk beberapa desa di Liquiçá, dan membakar seluruh isi rumah mereka.[‡]
- Di akhir Juni, perwira-perwira Komando Distrik Militer Bobonaro terlihat sedang mengoordinasikan suatu serangan yang dilakukan oleh anggota-anggota milisi Dadurus Merah Putih terhadap markas UNAMET di kota Maliana. (Lihat studi kasus: Penyerangan terhadap UNAMET Maliana.)
- Di pertengahan Agustus, personel UNAMET di Viqueque menyaksikan anggota TNI dan Polri mengoordinasikan dan bergabung dengan milisi-milisi setempat dalam satu serangan terhadap pemuda-pemuda prokemerdekaan, yang mengakibatkan sedikitnya dua orang meninggal.[§]
- Pada hari pemungutan suara, 30 Agustus 1999, sekelompok milisi yang disertai prajurit-prajurit TNI menikam dan membunuh dua anggota staf UNAMET di dekat tempat pemungutan suara di Boboe Leten, Kabupaten Ermera. Investigasi yang dilakukan kemudian mengungkapkan bahwa Komandan Rayon Militer mengambil bagian dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan. (Lihat studi kasus: Pembunuhan staf UNAMET di Boboe Leten.)

---

* Dalam satu bagian yang berjudul "Hambatan/kendala yang dihadapi," laporan itu menyatakan dengan terus-terang bahwa "Dukungan ABRI khususnya TNI-AD terhadap kelompok Pro Integrasi sangat mempengaruhi proses penyidikan." Kepolisian Daerah Timor Timur, Direktorat Reserse, "Laporan Penanganan Kasus Liquisa," 15 April 1999. Dimuat dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book on Political Affairs and Human Rights in East Timor*, Dili, November 1999.

† Perubahan pendekatan ini dikonfirmasikan oleh satu komunikasi radio, yang disadap oleh intelijen Australia pada 1 Juni 1999. Dalam pembicaraan radio itu, Komandan Korem Kolonel Tono Suratman dilaporkan mengatakan kepada pemimpin milisi, Eurico Guterres: "Jangan berhubungan langsung dengan saya. Hubungi saya melalui [Kepala Seksi Intelijen Korem, Mayor] Bambang [Wisnumurty]." *Sydney Morning Herald*, "Silence over crime against humanity," 14 Maret 2002.

‡ Untuk laporan terperinci tentang insiden tersebut lihat UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

§ Untuk perincian lebih lanjut, lihat UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

Ada banyak kesaksian dan bukti dokumenter penting yang menunjukkan bahwa pasukan-pasukan TNI membolehkan milisi mempergunakan pangkalan-pangkalan dan pos-pos TNI sebagai tempat persiapan operasi-operasi mereka. Salah satu bukti tersebut adalah telegram rahasia bertanggal 18 April 1999. Telegram itu dari Dandim Dili Letnan Kolonel Endar Priyanto kepada Danrem Kolonel Tono Suratman. Isinya melaporkan bahwa lebih daripada 250 orang anggota milisi Aitarak berkumpul di dalam markas Kompi B Batalion 744 di Dili ketika berlangsung operasi 'pembersihan' yang berakibat sedikitnya seorang pemuda prokemerdekaan meninggal dunia. Laporan itu terbaca:

> "Pada 18 April 1999 pukul 13.15 WITA sebagian pasukan Aitarak yang melaksanakan pembersihan selesai, mereka kembali ke Kompi B Yonif 744/SYB, bergabung dengan yang lain, selanjutnya kembali ke Tropical…"*

Penting untuk diingat bahwa tingkat kerjasama—dan kesepakatan diam-diam—TNI ini terjadi sehari setelah Aitarak bergerak melancarkan kekerasan di seluruh Dili, di mana mereka membunuh sedikitnya 12 orang sipil yang mengungsi di rumah Manuel Carrascalão. (Lihat studi kasus: Pembantaian di rumah Carrascalão.)

Pola yang sama—fasilitas dan tempat-tempat TNI disediakan kepada milisi—terbukti di seluruh Timor-Leste. Di Lautém, misalnya, Kopassus berbagi markas dengan kelompok milisi Tim Alfa, dan memberikan dukungan logistik dan transportasi kepada kelompok tersebut. (Lihat ringkasan kabupaten: Lautém.) Di sekurangnya dua kecamatan di Kabupaten Covalima, markas milisi Laksaur bertempat di dalam markas Koramil.† Di Liquiçá, seperti yang sudah kita bahas, Koramil di Kecamatan Maubara berfungsi ganda sebagai markas milisi BMP. (Lihat ringkasan kabupaten: Liquiçá.) Contoh-contoh semacam itu dapat disebutkan untuk setiap kabupaten di Timor-Leste.

Pola operasi gabungan TNI-milisi berubah lagi dalam periode setelah pemungutan suara. Dengan UNAMET berada di bawah pengepungan di kantor induknya di Dili, dan hampir semua pengamat dan wartawan telah meninggalkan Timor-Leste, TNI bebas terlibat dalam tindakan-tindakan kekerasan, baik secara langsung maupun bersama dengan milisi. Dalam konteks inilah terjadi beberapa contoh terjelas operasi gabungan TNI-milisi. Ini termasuk, di antara banyak kasus yang lain, pembantaian terhadap sedikitnya 40 orang dan kemungkinan sebanyak 200 orang di Gereja Suai pada 6 September; pembantaian terhadap sedikitnya 14 orang pengungsi di kantor Kepolisian Resor Maliana pada 8 September; dan eksekusi sistematis terhadap sedikitnya 82 orang di Kecamatan Oesilo di Kabupaten Oecussi pada waktu antara

* Dan Sat Gas Pam Dili kepada Dan Rem Up. Kasi Intel Rem 164/WD dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/202/1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #17).

† Lihat Timor Leste, Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Herman Sedyono et al., Dili, 7 April 2003, halaman 12.

8 dan 10 September. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Gereja Suai; Pembantaian di Kantor Polisi Maliana, dan Pembantaian di Passabe dan Maquelab).

Saksi-saksi kekerasan pada masa setelah pemungutan suara juga telah bersaksi bahwa prajurit-prajurit TNI secara rutin tidak melakukan apa-apa untuk mencegah atau menghentikan milisi melaksanakan tindakan kekerasan. Satu contoh yang jelas dari pola ini terjadi tepat di depan hidung UNAMET. Pada 10 September, tiga hari setelah pengumuman Keadaan Darurat, staf UNAMET melihat sekelompok milisi bersenjata mendekati halaman sekolah di sebelah kompleks UNAMET dan mulai menyerang orang-orang yang berkumpul di sana. Sekitar 200 prajurit Kostrad dan Polri siap tempur yang seharusnya melindungi tempat tersebut tidak hanya gagal menghentikan milisi, tetapi malah bergabung dengan milisi menghancurkan jendela mobil-mobil PBB dan menjarah atau mencuri kendaraan-kendaraan tersebut.*

Ketika seorang staf UNAMET bertanya kepada salah seorang prajurit Kostrad mengapa ia dan teman-temannya tidak menembak, atau setidaknya menangkap milisi, prajurit itu menjawab bahwa kesatuannya tidak mendapatkan perintah untuk melakukan hal tersebut. Dan ketika Jenderal Wiranto dihadapkan pada kenyataan semacam ini oleh delegasi Dewan Keamanan PBB yang berkunjung pada hari yang sama, ia membantah bahwa ada masalah dan bersikeras bahwa keadaan keamanan di Dili berada di bawah kendali.

Senjata: Bukti kesaksian

Sejumlah bukti paling jelas tentang hubungan TNI dengan milisi terletak dalam fakta bahwa perwira-perwira militer memasok milisi dengan senjataapi modern, dan membolehkan mereka membawa senjata-senjata lain yang bertentangan dengan hukum. Keterlibatan TNI di dalam pembagian senjata kepada milisi, dan penolakan mereka untuk menegakkan hukum yang melarang kepemilikan senjata, merupakan satu kasus yang jelas tentang keterlibatan pihak berwenang dalam tindakan-tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Lebih-lebih lagi kalau diingat bahwa komandan-komandan militer mengetahui penggunaan senjata-senjata itu—pengetahuan yang telah dikonfirmasikan oleh bukti dokumenter.

Bukti yang paling awal bahwa senjata-senjata dibagikan kepada milisi datang dari pernyataan-pernyataan terbuka para perwira tinggi TNI, dan dari dua pemimpin penting milisi. Di awal 1999, Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Supadi mengatakan kepada para wartawan bahwa militer telah memasok senjata kepada milisi. "Bila kami tidak mempersenjatai mereka," katanya, "akan ada banyak

* Menurut satu dokumen internal TNI, kompleks UNAMET dijaga oleh satu kompi lengkap KOSTRAD (91 orang) dan 100 orang Polri, di bawah komando Kapten Infanteri Catur. Lihat: Dandim 1627/Dili (Letnan Kolonel Soedjarwo), "Data Kekuatan Pengamanan UNAMET dan Obyek Vital," September 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #45). Untuk penjelasan terinci dari tangan pertama tentang peristiwa penyerangan 10 September, lihat UNAMET, Political Affairs Office, "Note on Militia Incursion into UNAMET Compound, 10 September 1999," dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

korban di pihak kami. Lebih baik banyak korban di pihak mereka."[*] Kemudian pada Februari, Wakil Komandan Korem Kolonel Mudjiono, mengatakan kepada seorang wartawan bahwa senjataapi telah dibagikan kepada kelompok-kelompok prointegrasi agar mereka bisa melawan Falintil.[†] Panglima Daerah Militer IX Mayor Jenderal Adam Damiri juga mengatakan kepada media bahwa TNI telah membagikan senjata kepada milisi, walaupun ia menolak bahwa tujuan tindakan tersebut adalah untuk mendukung pihak prointegrasi.[‡] Di awal Februari, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, mengatakan bahwa Angkatan Darat mempersenjatai 'Wanra' untuk membantu TNI mengamankan Timor-Leste.[§] Pada pertengahan Februari, Kepala Pusat Penerangan TNI di Jakarta, Jenderal Sudrajat, menegaskan bahwa senjata memang telah dibagikan kepada milisi tetapi menegaskan bahwa "kami memberikan senjata hanya kepada yang dapat kami percaya."[¶]

Pada saat yang kira-kira sama, pemimpin milisi Mahidi, Cancio Carvalho, mengatakan kepada para wartawan bahwa TNI telah memberikan 20 pucuk senapan otomatis SKS buatan Cina kepada kelompoknya di akhir Desember 1998, yang kemudian dipergunakan untuk melaksanakan sejumlah serangan mematikan terhadap desa-desa tetangga.[**] Serangan-serangan tersebut dilaporkan termasuk satu serangan terhadap Desa Galitas, di Zumalai, pada 25 Januari 1999. Di dalam serangan tersebut sejumlah orang dibunuh, termasuk seorang perempuan yang sedang hamil dan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun[††] (Lihat ringkasan kabupaten: Covalima.)

Berbicara kepada para wartawan segera setelah kejadian ini, Cancio Carvalho—yang, bisa diingat kembali, memiliki hubungan erat dengan Mahidin Simbolon, Kepala Staf Kodam IX—mengakui keterlibatan pribadinya dalam pembunuhan tersebut: "Serangan terjadi seperti ini. Saya menembak begini. Saya memimpin mereka dan kami menyerang dalam dua barisan. Saya perintahkan mereka untuk menembak dengan gaya menggunting, seperti ini. Perempuan itu tubuhnya hancur. Saya tidak memotongnya." Ia juga berusaha menjelaskan mengapa perempuan tersebut dan para korban lainnya dijadikan sasaran: "Perempuan ini adalah istri komandan Falintil. Saya tidak tahu apakah orang tua itu pembuat kekacauan atau bukan."[‡‡]

---

* "Lt. Col. Supadi," *Masters of Terror*, http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm.

† "Up in Arms," *Far Eastern Economic Review*, 18 Februari 1999.

‡ Dikutip dalam East Timor International Support Center (ETISC), *Indonesia's Death Squads: Getting Away with Murder*, Darwin: ETISC Occasional Paper No. 2, Mei 1999, halaman 12. Damiri membuat pernyataan yang sama beberapa saat sebelum serangan terhadap Gereja Liquiçá, yang menegaskan bahwa militer telah memasok senjata kepada "sejumlah terbatas" kelompok milisi. Lihat "Timor Needs No Foreign Soldiers," *Indonesian Observer*, 5 April 1999.

§ "KSAD Jelaskan Soal Sipil Dipersenjatai," *Media Indonesia*, 2 Februari 1999.

¶ Dikutip dalam ETISC, *Indonesia's Death Squads*, halaman 13.

** "Crossbows and Guns in East Timor", *Economist*, v. 350 n. 8106 (13 Februari 1999), halaman 40.

†† ABC, *Four Corners*, "A Licence to Kill," 15 Maret 1999; dan ETISC, *Indonesia's Death Squads*, halaman 12.

‡‡ ABC, *Four Corners*, "A Licence to Kill," 15 Maret 1999, transkripsi halaman 10.

Kakak laki-laki Cancio Carvalho, Francisco Carvalho, seorang bekas sekretaris jenderal partai pro-Indonesia Apodeti, tidak ragu bahwa TNI telah membagikan senjata: "Senjata memang sudah diserahkan," katanya saat itu, "semua orang tahu itu."[*] Sama halnya, pemimpin milisi Aitarak Eurico Gutteres mengonfirmasikan bahwa senjata telah dibagikan, tetapi menegaskan bahwa: "Saya diberi senjata bukan hanya untuk melindungi diri saya sendiri maupun orang-orang integrasi lainnya, tetapi juga untuk melindungi musuh-musuh integrasi."[†]

Keterlibatan langsung pejabat tinggi TNI di dalam pembagian senjata dalam periode ini telah diringkaskan di dalam surat dakwaan terhadap delapan pejabat tinggi Indonesia yang dibuat oleh Wakil Jaksa Agung Timor-Leste untuk Kejahatan Berat.[‡] Surat dakwaan tersebut secara langsung menyebut Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Kolonel Tono Suratman, dan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat dalam tindakan-tindakan ini. Bagian dari surat dakwaan tersebut yang relevan adalah sebagai berikut:

> "19. Pada atau sekitar bulan Maret 1999, Kiki SYAHNAKRI bertemu dengan para pemimpin pro Indonesia Timor Leste di Markas Besar TNI di Jakarta. SYAHNAKRI memberitahukan kelompok tersebut bahwa TNI akan mendukung usaha pro-Indonesia dan bahwa MAKARIM bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan menjelang jajak pendapat. SYAHNAKRI memberitahukan mereka bahwa senjataapi telah dikirim ke Timor Leste dan ketika mereka kembali ke Dili, mereka seharusnya menghubungi SURATMAN untuk mengatur pembagian senjata.
>
> …
>
> 23. Pada atau sekitar bulan Maret 1999, SUDRAJAT dan anggota lain dari TNI mengantar banyak senjata ke seorang pemimpin pro Indonesia Timor Leste. SUDRAJAT minta pemimpin Timor Leste tersebut untuk memberikan senjata-senjata kepada kelompok-kelompok milisi pro Indonesia.
>
> 24. Pada April 1999, MAKARIM memberitahukan para komandan TNI dan pemimpin pro Indonesia Timor Leste bahwa mereka seharusnya bekerja keras untuk otonomi karena kalau otonomi kalah, lebih banyak darah akan mengalir. Dia menawar kepada para pemimpin pro Indonesia Timor Leste penggunaan senjataapi otomatis dan menyuruh SURATMAN untuk mengatur pengambilan dan pembagian senjata-senjata tersebut.

* ABC, *Four Corners*, "A Licence to Kill," 15 Maret 1999, transkripsi halaman 11.

† ABC, *Four Corners*, "A Licence to Kill," 15 Maret 1999, transkripsi halaman 5.

‡ Timor Leste, Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Surat Dakwaaan Wiranto dan lain-lain, Februari 2003.

> 25. Pada atau sekitar bulan April 1999, SURATMAN, setelah diminta oleh MAKARIM untuk menyediakan senjataapi otomatis kepada para pemimpin pro Indonesia Timor Leste, menyuruh bawahannya SUDRAJAT untuk mengatur pengambilan dan pembagian senjata-senjata tersebut."

Berhadapan dengan meluasnya kecaman internasional atas pembantaian di Liquiçá dan Dili pada April 1999, para pejabat Indonesia mulai menyangkal bahwa senjata telah dibagikan, dan berbagai usaha dilakukan untuk menyembunyikan pembagian selanjutnya.* Namun keseluruhan bukti yang substansial menunjukkan bahwa senjata-senjata terus disediakan kepada milisi setelah April.

Mungkin bukti yang paling nyata adalah fakta bahwa anggota-anggota milisi di seluruh Timor-Leste terlihat membawa dan mempergunakan senjata modern standar TNI dan Polri, termasuk M-16, SKS, S-1, dan granat tangan, sementara sebagian besar memiliki senapan Mauser dan G-3 dari zaman penjajahan Portugis. Bahkan jika seseorang menerima pernyataan yang tidak masuk akal bahwa senjata-senjata ini tidak dibagikan oleh TNI atau Polri, faktanya tetap bahwa pihak yang berwenang tidak mengambil tindakan apapun untuk menyita senjata, atau memproses hukum orang-orang yang memiliki senjata tersebut. Penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa pihak yang berwenang ingin memastikan bahwa milisi bisa mendapatkan senjataapi.

Kesimpulan yang sama dapat ditarik dari tindakan para perwira dan pemimpin milisi ketika menghadapi persoalan perlucutan senjata, yang telah lama menjadi pembahasan hangat dan mencapai puncaknya di pertengahan Agustus 1999. Seperti yang dikemukakan dalam Bab I, di awal Agustus 1999 Falintil mulai menarik mundur satuan-satuan bersenjatanya ke dalam empat wilayah 'kantonisasi' di berbagai tempat di Timor-Leste. Mereka tetap berada di sana, walaupun ancaman kekerasan oleh milisi dan TNI semakin meningkat seiring dengan mendekatnya hari pemungutan suara. Para pejabat UNAMET mengungkapkan penghargaan pada komitmen Falintil untuk menghindari konflik bersenjata melalui kantonisasi, dan menyerukan kepada milisi dan TNI untuk melakukan hal yang sama.

Para pemimpin TNI dan milisi secara tegas menolak melakukan hal yang sama, namun di hadapan meningkatnya tekanan internasional, di pertengahan Agustus mereka menyelenggarakan empat 'upacara kantonisasi' di mana para anggota milisi menyerahkan berbagai macam senjata kepada para pejabat militer dan kepolisian setempat. Sebagian besar pengamat asing, termasuk Perwira Penghubung Militer UNAMET mengungkapkan keraguan yang mendalam dan berpikir bahwa senjata-senjata yang dalam upacara di depan umum diserahkan itu hanyalah sebagian

* Penyangkalan itu bahkan menjadi lebih kuat setelah terjadinya kekerasan yang mengerikan pada September 1999. Bersaksi di hadapan sidang Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Jakarta, Kolonel Tono Suratman secara tegas menolak bahwa militer telah memasok senjata kepada milisi. "Kami tidak pernah memberi mereka senjata," katanya. Lihat "Tono Bantah Keterlibatan TNI dan Polri," *Media Indonesia*, 23 Oktober 2002.

sangat kecil dari senjata yang berada di tangan milisi. Mereka juga mencatat bahwa, mengingat fakta bahwa orang-orang milisi kenyataannya tidak berada di kantonisasi, tidak ada jaminan bahwa senjata-senjata yang sudah dikembalikan itu tidak akan dibagikan kembali kepada milisi segera setelah upacara itu selesai.

Menurut kesaksian banyak orang, itulah yang sebenarnya terjadi. Ketika hari pemungutan suara mendekat, pembagian senjata kepada milisi sangat meningkat, dan dengan kepergian sebagian besar pengamat internasional setelah 4 September, para perwira TNI sekali lagi mendapatkan kebebasan untuk membagikan senjata kepada milisi tanpa malu-malu lagi. Kesaksian seorang saksimata yang dapat dipercaya menyatakan bahwa sejumlah besar—mungkin ratusan—senjataapi dibagikan oleh TNI dan Polri setelah pemungutan suara. Pola ini menunjukkan tidak hanya hubungan yang erat antara milisi dan TNI, tetapi juga suatu tingkat perencanaan dan koordinasi TNI, sekurang-kurangnya di tingkat Korem dan mungkin tingkat yang lebih tinggi. Kesimpulan tersebut juga sesuai dengan bukti bahwa perwira-perwira tinggi TNI terlibat dalam penyediaan senjata di dalam masa sebelum pemungutan suara.

Namun akan menjadi salah arah kalau menyatakan bahwa milisi sepenuhnya diperlengkapi dengan senjataapi modern yang canggih. Sementara sebagian memang mendapatkan senjataapi modern, kebanyakan milisi dipersenjatai dengan apa yang disebut 'senjata rakitan' serta parang, pedang, pisau, dan tombak. Dibuat dari dua atau lebih pipa baja yang dilekatkan pada sebatang penampang kayu, sepucuk senjata rakitan ditembakkan dengan menyulutkan korek api mancis atau gas pada bagian atas senjata tersebut, di dasar pipa baja. Ledakan yang dihasilkan mengirim sebuah bola besi atau pecahan logam yang meluncur keluar dari pipa yang sedikit banyak mengarah pada sasaran. Bagi mata yang tidak terlatih, senjata rakitan itu menyerupai senjataapi abad ke-17 dan ke-18, dan banyak kesaksian menyebutkan bahwa senjata itu tidak andal.

Sekilas, ketergantungan milisi pada senjata-senjata yang berteknologi rendah semacam itu tampak tidak sesuai dengan klaim bahwa mereka didukung secara resmi oleh TNI, atau bahwa kekerasan adalah sesuatu yang direncanakan dengan seksama. Jika mereka sungguh-sungguh dalam menggunakan milisi untuk mengintimidasi oposisi dan menciptakan kekacauan, tentunya TNI akan memberikan kepada mereka semua akses untuk mendapatkan senjata yang canggih dan membiarkan mereka lepas. Akan tetapi, setelah dianalisis lebih dalam, jelas bahwa penggunaan teknologi senjata sederhana itu sepenuhnya konsisten dengan bukti tentang pembagian senjata dan koordinasi kekerasan milisi oleh TNI.

Dari sudut pandang ahli strategi TNI, senjata rakitan, parang, pisau, tombak, pedang, dan batu setidaknya memiliki tiga keuntungan. Pertama, senjata-senjata itu membuat lebih mudah untuk mempertahankan ilusi bahwa milisi tumbuh secara spontan dari masyarakat. Kedua, jauh lebih kecil bahaya bahwa senjata-senjata sederhana semacam itu akan dapat dibalikkan untuk melawan TNI atau Polri apabila terjadi pemberontakan, atau bila terjadi kehilangan senjata atau penjualan senjata

ke pihak musuh.[*] Akhirnya, di luar kesederhanaannya, senjata-senjata ini amat efektif untuk menyebarkan teror. Walaupun senjata rakitan sama kemungkinannya untuk melukai pemiliknya maupun sasaran yang dikehendaki, namun senjata itu dapat menghasilkan luka yang serius, dan menimbulkan dampak yang mengerikan. Begitu pula dengan parang, pisau, tombak, pedang, dan batu.

Senjata: Bukti dokumenter

Di samping bukti kesaksian semacam itu, sejumlah dokumen rahasia yang terungkap sejak 1999 mengonfirmasikan pertanggungjawaban langsung TNI dalam membagikan senjata kepada, dan menoleransi kepemilikannya oleh, kelompok-kelompok milisi. Lebih jauh, dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa para perwira TNI mengendalikan dengan hati-hati arus senjata, mengeluarkan, dan menariknya kembali sesuai dengan tujuan politik dan militer mereka.

Satu bukti penting adalah dokumen dari Komando Distrik Militer Baucau (Kodim 1628/Baucau) bertanggal 3 Februari 1999. Dokumen itu mendaftar 91 anggota Kompi Khusus Pusaka, yang dikenal sebagai milisi Saka. Berjudul "Daftar: Nominatif Anggota Kompi Khusus Pusaka, Kodim 1628/Baucau," dokumen itu mencatat jenis dan nomor registrasi senjata yang dibagikan kepada semua, kecuali satu orang, anggota kelompok tersebut. Senjata yang didaftar mencakup: 1 PMI/Pindad, 19 G-3, 56 SP-II, 10 SP-I, 1 FNC, 1 M16A1, 1 AK, dan 1 Mauser. Dokumen itu ditandatangani oleh seorang pemimpin milisi yang terkenal, Joanico C. Belo, yang disebutkan sebagai Sersan Satu dan Komandan Kompi Khusus Pusaka.[†]

Dokumen kedua yang relevan dengan persoalan pembagian senjata TNI adalah satu daftar yang dibuat oleh Kodim Viqueque, yang berisi lebih daripada 49 anggota milisi Makikit. Berjudul "Daftar: Nominatif Pemegang Senjata Team Makikit," dokumen ini memerinci jenis dan nomor registrasi senjata yang dibagikan kepada setiap anggota. Senjata yang terdaftar di dalamnya meliputi tiga pucuk M16A-1, 35 pucuk SP-1, dan 11 pucuk Garand. Dokumen ini tak bertanggal, tetapi satu catatan pinggir menunjukkan bahwa dokumen itu ditemukan di Kodim 1630/Viqueque pada 28 Oktober 1998.[‡]

Bukti dokumenter ketiga yang berhubungan dengan persoalan senjata adalah satu lembar telegram rahasia, bertanggal 2 Februari 1999, dari Danrem kepada semua Dandim dan Komandan Satgas Tribuana, yang dikeluarkan untuk mengantisipasi

* Perwira Penghubung Militer UNAMET di Viqueque menyatakan kekhawatiran ini dalam hubungannya dengan kelompok milisi 59/75 Junior, dalam satu laporan Agustus 1999: "Kami tidak percaya bahwa TNI atau KOPASSUS mempercayai anggota 59/75 Junior untuk diberi senjata dan amunisi." UNAMET, MLO-Viqueque, Sitrep, 5 Agustus 5, 1999, halaman 3. Laporan ini dimuat dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

† Kodim 1628/Baucau, "Daftar: Nominatif Anggota Kompi Khusus Pusaka, Kodim 1628/Baucau," 3 Februari 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #9).

‡ Kodim 1630/Viqueque, "Daftar: Nominatif Pemegang Senjata Team Makikit," tak bertanggal tetapi ditemukan di Kodim 1630/Viqueque tanggal 28 November 1998 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #4).

kunjungan delegasi PBB ke Timor-Leste di bulan tersebut.[*] Dokumen itu menunjukkan dengan jelas bahwa TNI telah menarik untuk sementara waktu senjata dari milisi dan kemudian mengembalikannya lagi kepada milisi. Telegram itu memerintahkan kepada semua Dandim dan Komandan Satgas Tribuana V untuk mempersiapkan laporan tentang tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak prokemerdekaan terhadap kelompok-kelompok milisi, dan menginstruksikan mereka untuk memfokuskan pada "periode penarikan senjata terhadap Surwan/Ratih sampai dengan pemegang/ inventaris senjata terhadap Surwan/Ratih." Fakta bahwa perintah ini juga disampaikan kepada Komandan Satgas Tribuana menunjukkan bahwa Kopassus secara integral—walaupun tidak eksklusif—terlibat dalam pembagian dan pengendalian senjata.[†]

Peran Kopassus dalam pembagian senjata dan pelatihan telah dikonfirmasi dalam sidang-sidang pengadilan yang dilaksanakan sejak 1999. Pada April 2000, seorang pemimpin kelompok milisi Sakunar di Oecussi, Laurentino Moko, bersaksi di hadapan pengadilan Indonesia bahwa ia telah diberi sejumlah senapan pada 1999 oleh dua orang perwira Kopassus.[‡] (Lihat ringkasan kabupaten: Oecussi.) Sama halnya, dalam pengadilan terhadap beberapa anggota milisi Tim Alfa yang didakwa membunuh lima orang agamawan dan empat orang lainnya pada 25 September 1999, pemimpin milisi tersebut, Joni Marques, bersaksi bahwa dirinya telah dilatih oleh Kopassus sejak 1986, dan telah menerima sejumlah senjata dari perwira-perwira Kopassus setelah pemungutan suara 30 Agustus.[§] Dalam penilaiannya mengenai kasus ini, Pengadilan Distrik Dili menyimpulkan bahwa: "Pasukan Khusus Kopassus memberikan senjata dan pelatihan kepada anggota-anggota Tim Alfa"[¶] (Lihat Studi Kasus: Pembunuhan Rohaniwan Los Palos.)

Penting untuk dicatat bahwa, selain menunjukkan keterlibatan langsung TNI dan Kopassus di dalam mempersenjatai milisi, bukti ini juga mengonfirmasikan bahwa milisi tidak diberi akses yang tidak terbatas pada senjataapi modern. Sebaliknya, senjata-senjata disimpan—biasanya di sebuah pos komando militer—dan dibagikan kepada milisi sebelum operasi militer tertentu dilancarkan. Sesudah operasi dilaksanakan, senjata-senjata dikembalikan kepada militer. Berbicara kepada para jaksa penyidik Indonesia di akhir 1999, Jenderal Wiranto memperjelas persoalan ini: "Kadang-kadang senjata diberikan," katanya, "tetapi tidak berarti [para milisi] membawa senjata ke mana saja mereka pergi. Senjata-senjata disimpan di markas Komando Rayon Militer."[**]

* Danrem 164/WD kepada Dandim 1627-1639, Dansatgas Tribuana V, dan lain-lain. Telegram rahasia No. TR/46/1999, 2 Februari 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #8). Menurut isi telegram ini akan ada kunjungan oleh "Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB" pada tanggal 29 Februari 1999.

† Ibid.

‡ Karen Polglaze, "Timor militia leader back in court," AAP, 10 April 2000.

§ Dili District Court, "Judgement," Joni Marques et al., halaman 58.

¶ Dili District Court, "Judgement," Joni Marques et al., halaman 53.

** Dikutip dalam Kevin O'Rourke, *Reformasi: The Struggle for Power in Post-Soeharto Indonesia*, Sydney: Allen & Unwin, 2002, halaman 352.

Pola kontrol TNI atas akses milisi kepada senjata, yang sering disebut dalam kesaksian saksi, juga dikonfirmasi oleh dokumen militer yang lain. Salah satu dokumen semacam itu adalah satu telegram rahasia bertanggal 28 Januari 1999 dari Danrem Kolonel Tono Suratman, kepada ke-13 orang Dandim di Timor-Leste. Telegram itu memerintahkan para Dandim untuk:

> "Melaksanakan penarikan senjata yang dipegang oleh anggota-anggota Wanra atau Ratih selama tidak melaksanakan tugas khusus atau operasi tempur di wilayah Kodim masing-masing."[*]

Perintah ini tidak hanya menunjukkan bahwa para perwira TNI melakukan pengendalian yang signifikan atas akses milisi pada senjata, tetapi juga menambahkan bobot pada bukti bahwa para pejabat militer secara langsung terlibat dalam perencanaan dan koordinasi operasi-operasi milisi, termasuk operasi yang mengakibatkan pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk pembunuhan.

Tentang hal terakhir ini, telegram bertanggal 28 Januari memberikan bukti penting. Bukti ini menyebut secara eksplisit beberapa kasus di mana para anggota milisi mempergunakan senjata yang diberikan kepada mereka oleh TNI untuk membunuh atau melukai dengan serius penduduk sipil. Kasus-kasus yang dicatat dalam perintah tersebut mencakup: pembunuhan Julião Gonçalves Sarmento oleh anggota milisi Saka Norberto Lopes, di Desa Defauasi, Kecamatan Baguia, Kabupaten Baucau, pada 3 Desember 1998; pembunuhan dua orang pemuda prokemerdekaan dan penyerangan yang melukai lima orang lainnya yang dilakukan oleh anggota-anggota milisi Mahidi di desa Manutasi, Kabupaten Ainaro, pada 3 Januari 1999; dan pembunuhan Fernando Cardoso oleh anggota Ratih bernama Alfredo, di Desa Raiman, Kecamatan Zumalai, Kabupaten Covalima, pada 23 Januari 1999.

Selanjutnya, seawal 28 Januari 1999, komandan militer Timor-Leste Kolonel Tono Suratman menyadari bahwa kelompok-kelompok milisi telah melakukan tindakan kekerasan serius dengan senjata yang diberikan oleh TNI. Pengetahuan tersebut dimiliki oleh semua Dandim dan sejumlah komandan TNI di jajaran lebih tinggi, kepada siapa telegram itu dikirimkan, yang mencakup: Panglima Komando Daerah Militer IX; Asisten Intelijen, Asisten Operasi, dan Asisten Teritorialnya; Komandan Sektor A dan Komandan Sektor B di Timor-Leste; dan Komandan Satuan Tugas Tribuana Kopassus.[†] Lebih jauh, mengingat bahwa perintah Kolonel Tono Suratman dikeluarkan beberapa saat sebelum kunjungan delegasi PBB yang akan dilakukan pada Februari 1999, hal tersebut juga cocok dengan pola, yang dibahas dalam Bab 4, bahwa perwira TNI dengan seksama mengendalikan kekerasan milisi sesuai dengan tujuan politik yang lebih luas.

---

* Danrem 164/WD kepada Dandim 1627-1639 dan lain-lain. Telegram rahasia No. TR/41/1999, 28 Januari 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #7).

† Lihat: Danrem 164/WD kepada Dandim 1627-1639 dan lain-lain. Telegram rahasia No. TR/41/1999, 28 Januari 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #7).

Secara bersama, bukti-bukti yang ditampilkan di dalam bab ini menunjuk secara konklusif pada peran TNI yang kuat dalam melakukan perekrutan, pelatihan, dan operasi pasukan-pasukan milisi, serta pada keterlibatan langsung TNI dalam pelanggaran berat yang dilakukan oleh milisi. Secara lebih spesifik, bukti-bukti ini memungkinkan ditariknya kesimpulan-kesimpulan berikut ini.

Pertama, para prajurit dan perwira TNI secara integral terlibat di dalam perekrutan milisi di akhir 1998 dan awal 1999, dan sebagian dari mereka benar-benar bertugas sebagai anggota dan pemimpin milisi. Keanggotaan rangkap di TNI dan milisi yang telah didokumentasikan membuat tidak berartinya pembedaan formal antara keduanya, dan secara langsung melibatkan TNI di dalam tindakan-tindakan yang seolah-olah dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi secara mandiri.

Kedua, tidak ada keraguan sedikitpun bahwa kelompok-kelompok milisi menerima pelatihan dan pengarahan dari perwira-perwira TNI. Pelatihan tersebut bukanlah pelatihan yang pura-pura, atau yang dilakukan oleh sejumlah kecil 'oknum.' Sebaliknya, bukti menunjukkan secara konklusif bahwa pelatihan milisi merupakan tugas rutin, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang sudah tetap yang berasal dari markas besar TNI di Jakarta. Lebih jauh, pelatihan itu dilakukan dengan sepengetahuan penuh para pejabat tinggi TNI, termasuk minimal: Panglima Komando Daerah Militer IX Mayor Jenderal Adam Damiri; Danrem Kolonel Tono Suratman, Komandan Satuan Tugas Tribuana Kopassus; Komandan Sektor A dan Komandan Sektor B; dan kemungkinan semua Dandim dan Danramil di Timor-Leste.

Ketiga, TNI secara rutin menjalankan operasi bersama dengan kelompok-kelompok milisi, dan memberikan dukungan dan bantuan untuk operasi-operasi yang seolah-olah dilakukan oleh milisi. Perwira-perwira tingkat tinggi TNI, termasuk Kolonel Tono Suratman dan lain-lain, mengetahui dengan baik bahwa semua operasi itu mengakibatkan tindakan kekerasan yang serius. Mereka juga memahami bahwa kerjasama operasional semacam itu melanggar Kesepakatan 5 Mei. Karena alasan itu, begitu UNAMET mulai bertugas pada Juni 1999, TNI berusaha menyamarkan hubungan operasionalnya dengan milisi, tetapi gagal.

Keempat, TNI memberikan senjata modern yang canggih secara langsung kepada sejumlah anggota milisi, dan membiarkan yang lain untuk menyimpan dan menggunakan senjata mereka sendiri, yang bertentangan dengan hukum. Para perwira tinggi, termasuk Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, Mayor Jenderal Adam Damiri, Kolonel Tono Suratman, dan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat mengetahui bahwa senjata-senjata ini dipergunakan untuk melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia, tetapi gagal menindak para pelakunya, atau mengakhiri akses milisi pada senjata.

Terakhir, bertentangan dengan pernyataan-pernyataan resmi bahwa milisi bertindak sendiri, dan bahwa TNI dan Polri telah melakukan yang terbaik untuk membendung kekerasan, jelas bahwa TNI memegang kontrol yang signifikan terhadap akses milisi pada senjata. Penemuan tersebut memperkuat argumen, yang dibuat dalam Bab 4, bahwa pihak yang berwenang membagikan dan menarik kembali senjata sebagai bagian dari usaha yang diatur dengan seksama untuk memengaruhi irama kekerasan, sesuai dengan tujuan politik dan militer yang lebih luas.

Milisi: Pendanaan dan dukungan material

Para pejabat pemerintah telah berusaha keras membantahnya,* tetapi milisi-milisi di Timor-Leste menerima dukungan finansial dan material yang besar dari pihak berwenang pemerintah dan militer Indonesia. Sebenarnya, pemberian pemerintah merupakan landasan esensial bagi seluruh operasi milisi. Anggota biasa milisi menerima Rp200.000,00 (USD26,6) pada saat bergabung, dan antara Rp50.000,00 (USD6,66) dan Rp150.000,00 (USD20) per bulan sesudahnya. Selain pembayaran tunai dan akses pada senjata, mereka menerima pembagian beras secara teratur, kendaraan, makanan ketika melaksanakan operasi, transportasi, bahan bakar, ruang kantor, peralatan komunikasi, poster, pakaian, dan obat-obatan. Penyediaan dana dan dukungan material semacam itu melibatkan pejabat-pejabat sipil dan militer dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh para milisi, yang merupakan target penyaluran dukungan tersebut.

'Sosialisasi' dan pendanaan milisi

Pendanaan resmi yang paling banyak kita ketahui mengalir dari aparatus pemerintah sipil, terutama di bawah naungan kampanye 'sosialisasi' pro-otonomi. Para pejabat tinggi pemerintah mengakui bahwa dana pemerintah dipergunakan untuk kampanye tersebut. Misalnya, Menteri Luar Negeri Ali Alatas, mengatakan: "Tentu saja ada uang yang digunakan untuk penyebaran informasi … Kami setuju dengan PBB bahwa ada suatu masa sosialisasi."†

Jumlah keseluruhan dana untuk 'sosialisasi' belum diketahui, tetapi dokumen-dokumen pemerintah Indonesia yang terungkap sampai saat ini menunjukkan bahwa sekitar Rp3 miliar (USD400.000) disalurkan ke setiap kabupaten dari seluruhnya 13 kabupaten untuk mendukung kampanye pada 1999, sehingga keseluruhan dana sedikitnya berjumlah Rp39 miliar (USD5,2 juta).‡ Walaupun jumlahnya berbeda-beda dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya, di semua kasus sebagian dari dana tersebut digunakan untuk membayar milisi.

Bukti dan perincian pendanaan resmi untuk kampanye 'sosialisasi', dan melaluinya untuk kegiatan milisi, ditemukan dalam beberapa dokumen yang terungkap pada 1999 dan sesudahnya. Dokumen-dokumen yang relevan mencakup: (i) sepucuk surat pada Mei 1999 dari Gubernur Timor Timur kepada semua bupati, yang menginstruksikan

* Lihat, misalnya, Ali Alatas dalam SBS, *Dateline*, "Timor Terror Fund," 16 Februari 2000, transkrip, halaman 17.

† Dikutip dalam SBS, *Dateline*, "Timor Terror Fund," 16 Februari 2000, transkrip, halaman 23.

‡ Surat dakwaan terhadap Wiranto dan tujuh pejabat tinggi Indonesia lainnya, dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Penuntut Umum Timor-Leste untuk Kejahatan Berat, menyebutkan bahwa jumlah seluruh dana yang dikeluarkan untuk kampanye 'sosialisasi' adalah Rp53 miliar atau 60 persen dari Anggaran Pembangunan Daerah Timor Timur. Lihat Surat Dakwaan Wiranto dan lain-lain, paragraf 28.

mereka menyusun proposal anggaran penggunaan dana pemerintah untuk kegiatan 'sosialisasi'; (ii) proposal anggaran untuk kegiatan 'sosialisasi' yang diajukan kepada gubernur oleh Bupati Manufahi dan Bupati Bobonaro pada Mei 1999; dan (iii) surat dari gubernur kepada Bupati Lautém dan Bupati Oecussi berturut-turut pada Mei dan Juni, yang menyetujui proposal anggaran tersebut.[*]

Dokumen-dokumen ini dengan jelas menunjukkan bahwa semua kabupaten diinstruksikan mengajukan permintaan dana untuk membiayai kegiatan 'sosialisasi,' bahwa mereka melakukannya, dan bahwa permintaan tersebut disetujui oleh gubernur. Dokumen-dokumen ini juga menunjukkan, tanpa keraguan, bahwa sebagian dari uang yang dialokasikan untuk 'sosialisasi' dalam anggaran-anggaran semacam itu secara eksplisit dikhususkan untuk milisi dan bermacam-macam kegiatan yang mungkin memberikan penyamaran untuk kegiatan-kegiatan milisi.

Bukti yang paling jelas untuk mendukung kesimpulan ini adalah surat dari Gubernur Timor Timur kepada semua bupati pada Mei 1999. Di dalamnya, gubernur menginstruksikan setiap bupati untuk menyusun proposal anggaran, sesuai dengan suatu kerangka yang mencakup pengeluaran untuk 'sosialisasi' dan 'Pam Swakarsa' (yaitu milisi).[†] Kemudian dalam bulan tersebut, para bupati menyerahkan proposal mereka.

Proposal anggaran Bupati Manufahi dan Bupati Bobonaro yang diajukan kepada Gubernur masing-masing meminta sekitar Rp3 miliar dana pemerintah untuk kegiatan 'sosialisasi' yang dilaksanakan di daerah mereka masing-masing.[‡] Surat-surat dari gubernur kepada Bupati Lautém dan Bupati Oecussi memberikan persetujuan resmi untuk proposal anggaran yang meminta sekitar Rp3 miliar untuk kampanye sosialisasi di kabupaten masing-masing, dengan hanya membuat perubahan kecil anggaran di kedua kabupaten tersebut. "Dengan ini kami beritahukan," tulis gubernur kepada kedua bupati tersebut, "bahwa pada prinsipnya proposal anggaran dan dana yang seluruhnya berjumlah Rp3.000.000.000 disetujui."[§]

* Lihat: Surat dari Gubernur Timor Timur kepada Bupati Oecussi, Juni 1999; Surat dari Gubernur Timor Timur kepada Bupati Lautem, 21 Mei 1999; Proposal untuk sosialisasi otonomi khusus di Manufahi, Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #2); dan Bupati Bobonaro, "Proposal Sosialisasi Otonomi Khusus dan Luas Propinsi Timor Timur," 24 Mei 1999 (Koleksi HRU, Doc BOB #2).

† Salinan surat gubernur kepada Bupati Liquiçá bertanggal 21 Mei 1999 (Koleksi Yayasan HAK). Salinan surat yang lain, ditujukan kepada semua bupati, ditandatangani namun tak bertanggal. Lihat: Gubernur Timor Timur, surat kepada semua bupati mengenai "Proposal," Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #A).

‡ Jumlah tepatnya yang diminta adalah Rp3,162 miliar untuk Bobonaro dan Rp 3,0 miliar untuk Manufahi. Lihat: Bupati Bobonaro, "Proposal Sosialisasi Otonomi Khusus dan Luas Propinsi Timor Timur," 24 Maret 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #2), dan Bupati Manufahi, "Proposal Sosialisasi Otonomi Khusus di Manufahi," Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #2).

§ Lihat: Surat dari Gubernur Timor Timur kepada Bupati Oecussi, Juni 1999; Surat dari Gubernur Timor Timur kepada Bupati Lautem, 21 Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #2). [Keterangan penerjemah: Penerjemah tidak berhasil mengecek ulang bahasa Indonesia dari dokumen-dokumen yang termasuk dalam Koleksi SCU, Doc #2. Dengan demikian kutipan kata-kata dalam surat Gubernur Timor Timur tersebut dan kutipan-kutipan lain dari Koleksi SCU, Doc #2 adalah terjemahan bahasa Indonesia atas terjemahan bahasa Inggris dari dokumen aslinya.]

Proposal anggaran dan surat persetujuan gubernur mengungkapkan dengan jelas bagaimana dana pemerintah digunakan. Sebanyak 20 persen dari seluruh anggaran dialokasikan untuk pembayaran kepada para pejabat pemerintah dan militer di tingkat kabupaten, yang secara bersama disebut Kodal (Komando Daerah Lapangan).[*] Menurut proposal anggaran Kabupaten Manufahi, pembayaran Kodal akan mencakup: Rp100 juta (USD13.333) untuk bupati, Rp50 juta (USD6.666) untuk Dandim, Rp50 juta (USD6.666) untuk Kapolres, Rp30 juta (USD4.000) untuk Komandan Sektor TNI, Rp25 juta (USD3.333) untuk Komandan Batalion Teritorial, Rp25 juta (USD3.333) untuk Komandan Satgas Tribuana Kopassus, Rp20 juta (USD2.666) masing-masing untuk empat camat di Kabupaten Manufahi, dan Rp10 juta (USD1.333) masing-masing untuk 29 kepala desa.[†]

Menurut proposal Manufahi, pengeluaran 'Kodal" ini ditujukan untuk membayar "… biaya-biaya yang berkaitan dengan substansi rencana otonomi dan kebutuhan-kebutuhan lain yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi." Rumusan yang kabur tersebut memastikan bahwa alokasi Kodal akan dapat dengan mudah digunakan, di antara tujuan-tujuan yang lain, untuk membiayai dan memasok kelompok-kelompok milisi. Walaupun ini sulit dikonfirmasikan, seorang bekas pejabat di pemerintah Kabupaten Bobonaro (Benjamin Barreto) telah menyatakan bahwa Dandim di sana menerima sekitar Rp800 juta (USD106.666) dan bahwa Dandim itu menggunakannya untuk membiayai pembunuhan terhadap orang-orang prokemerdekaan: "Untuk setiap orang yang dibunuh akan diberi imbalan Rp3 juta (USD400). Itulah rencana Komandan Distrik Militer."[‡]

Bagian besar dari anggaran yang disetujui oleh gubernur juga dicadangkan untuk kategori-kategori yang tidak jelas seperti 'sosialisasi' (20%), 'bantuan masyarakat' (30%), 'penggalangan' (15%), dan 'pembentukan infrastruktur (5%).[§] Kategori-kategori yang luas ini memberikan keleluasaan yang cukup bagi dana-dana ini untuk dapat dialihkan oleh para pejabat dan dipergunakan sesuai dengan kehendak mereka. Menurut proposal Manufahi, misalnya, Rp356 juta (USD47.466) yang terdapat dalam dana 'Satuan Tugas Sosialisasi' "ditujukan untuk mendukung kegiatan 150 anggota Satuan Tugas Sosialisasi, termasuk penyediaan pakaian, makanan, latihan, dan uang saku." Proposal Bobonaro juga menyebutkan 'Satuan Tugas Sosialisasi' yang mendapatkan alokasi sebesar Rp150 juta (USD20.000).[¶] Komposisi yang

* Jumlah 20 persen untuk Kodal ditetapkan dalam anggaran yang sudah direvisi yang digariskan dalam surat Gubernur kepada Bupati Oecussi dan Bupati Lautem (Koleksi SCU, Doc #2).

† Bupati Manufahi, "Proposal Sosialisasi Otonomi Khusus di Manufahi," Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #2). Proposal Bobonaro mengalokasikan Rp510 juta untuk pembiayaan Kodal dengan perincian yang hampir sama. Lihat: Bupati Bobonaro, "Proposal Kegiatan Sosialisasi Otonomi Khusus dan Luas Propinsi Timor Timur," 24 Mei 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #2).

‡ Dikutip dalam SBS, *Dateline*, "Timor Terror Fund," 16 Februari 2000, transkrip, halaman 31.

§ Kategori-kategori dan prosentase yang dikutip di sini berasal dari anggaran yang sudah direvisi yang dimuat dalam surat persetujuan Gubernur kepada Bupati Lautem dan Bupati Oecussi (Koleksi SCU, Doc #2).

¶ Lihat: Bupati Bobonaro, "Proposal Kegiatan Sosialisasi Otonomi Khusus dan Luas Propinsi Timor Timur," 24 Mei 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #2).

tepat untuk 'Satuan Tugas Sosialisasi' tidak dirinci dalam kedua proposal tersebut. Akan tetapi, dari penilaian terhadap pelaksanaan nyata kampanye 'sosialisasi' di Manufahi dan Bobonaro dan di tempat-tempat lain, perincian itu memasukkan para pemimpin dan anggota milisi. Dalam cara yang sama, sebagian dari alokasi untuk 'bantuan masyarakat,' 'penggalangan,' dan 'pembentukan infrastruktur' hampir pasti disalurkan kepada milisi.

Di samping pemberian dana yang tidak langsung semacam itu, semua proposal anggaran sosialisasi dan persetujuan gubernur itu secara eksplisit mengalokasikan dana untuk organisasi-organisasi milisi dan paramiliter. Dalam surat instruksi kepada semua bupati di bulan Mei, dan surat persetujuannya kepada Bupati Lautém dan Bupati Oecussi, misalnya, gubernur mengkhususkan 5 persen dari seluruh anggaran di setiap kabupaten untuk Pam Swakarsa, istilah resmi untuk kelompok-kelompok milisi.[*]

Dana-dana tambahan diberikan kepada kelompok-kelompok milisi di bawah bermacam-macam kategori lain. Di bawah judul 'bantuan untuk organisasi,' misalnya, Kabupaten Manufahi mengusulkan penyaluran dana kepada berbagai kelompok pro-otonomi dan milisi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh proposal tersebut:

> "Peran organisasi-organisasi kemasyarakatan sangat penting dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai otonomi. Dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi-organisasi setempat, seperti BRTT, FPDK, Klibur dan ABLAI, organisasi-organisasi tersebut akan diberi bantuan dana."[†]

Tiga yang pertama dari kelompok-kelompok tersebut masing-masing menerima Rp25 juta (USD3.333), sementara ABLAI, kelompok utama milisi bersenjata di kabupaten ini, mendapatkan jatah sebesar Rp50 juta (USD6.666). Dana-dana ini di luar 5 persen dari seluruh anggaran Kabupaten Manufahi yang dialokasikan untuk Pam Swakarsa.[‡]

Proposal Kabupaten Bobonaro juga meminta dana untuk organisasi-organisasi pro- otonomi dan milisi. Di bawah kategori 'pembentukan infrastruktur,' proposal itu mengalokasikan Rp90 juta (USD12.000) untuk FPDK, BRTT, dan kelompok milisi paramiliter Halilintar. Dalam satu kategori yang terpisah, anggaran ini mengalokasikan Rp1 miliar, atau sekitar sepertiga dari seluruh anggaran sosialisasi, kepada Pam Swakarsa (yaitu milisi). Jumlah tersebut, seperti yang dijelaskan oleh proposal, meliputi biaya 'uang saku,' 'uang makan,' dan 'perlengkapan komunikasi' untuk kelompok-kelompok milisi.[§]

---

* Lihat: Surat Gubernur Timor Timur kepada Bupati Oecussi, Juni 1999; Surat Gubernur Timor Timur kepada Bupati Lautem, 21 Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #2).

† Bupati Manufahi, "Proposal Sosialisasi Otonomi Khusus di Manufahi," Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #2).

‡ Ibid.

§ Bupati Bobonaro, "Proposal Kegiatan Sosialisasi Otonomi Khusus dan Luas Propinsi Timor Timur," 24 Mei 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #2).

Di samping bukti bahwa pemerintah di tingkat kabupaten meminta pendanaan bagi milisi, dan bahwa dana ini disetujui oleh gubernur, ada bukti bahwa dana dan pasokan lainnya benar-benar dibagikan kepada milisi. Dokumen-dokumen dari kelompok milisi Aitarak, misalnya, memberikan perincian pembayaran kepada para anggota milisi ini di Kabupaten Dili. Satu dokumen dari Juni 1999, yang ditandatangani oleh Komandan Aitarak Eurico Guterres, menunjukkan bahwa anggota milisi biasa masing-masing menerima 10 kg beras dan uang Rp150.000,00 (USD20) per bulan; sementara anggota yang bekerja sebagai pegawai negeri menerima 10 kg beras dan uang Rp50.000,00 (USD6,66) selain gaji normal mereka. Dokumen itu berisi daftar 1.355 orang anggota biasa, 107 orang anggota yang pegawai negeri, dan 60 orang 'penasihat' serta menunjukkan bahwa jumlah total yang dibayarkan untuk Juni 1999 adalah 15.220 kg beras dan uang Rp22.760.000,00 (USD3.034,66) untuk gaji.[*]

Sumber pendanaan pemerintah

Dokumen-dokumen pemerintah dan kesaksian dari para mantan pegawai negeri sipil memberikan informasi penting tentang sumber-sumber pendanaan pemerintah untuk milisi dan kelompok-kelompok pro-otonomi. Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa dana-dana dialihkan, dengan persetujuan resmi, dari anggaran berbagai departemen pemerintah (termasuk Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pekerjaan Umum dan Transmigrasi) ke anggaran 'sosialisasi', yang merupakan anggaran untuk membayar milisi-milisi tersebut. Dokumen-dokumen itu juga mengonfirmasikan dugaan bahwa sebagian dari anggaran 'sosialisasi' secara langsung datang dari Jakarta di bawah naungan satu rencana pembangunan yang didanai melalui Kantor Kepresidenan.

Sebagian bukti kunci datang dari Kabupaten Bobonaro, dan meliputi: (i) satu dokumen dari Dinas Anggaran Kabupaten Bobonaro, mengenai Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;[†] (ii) satu buku kas dari Dinas Anggaran Kabupaten Bobonaro bertanggal 5 Juli 1999;[‡] dan (iii) sepucuk surat dari Bupati Bobonaro kepada gubernur yang meminta izin untuk mengalihkan dana dari mata anggaran lain untuk digunakan kampanye 'sosialisasi.'[§] Secara bersama-sama, dokumen-dokumen ini mengonfirmasikan bahwa dana untuk milisi, dan untuk kampanye 'sosialisasi' secara lebih umum, dialihkan dari anggaran normal pemerintah, dan bahwa sebagian jika bukan seluruh dana itu didatangkan secara langsung dari Jakarta.

* Mirip dengannya, satu dokumen internal Aitarak menunjukkan bahwa kelompok milisi ini memiliki anggaran gaji Rp356.340.000 (USD47.512) yang darinya Rp221.104.000 (USD29.480) dikeluarkan pada 23 Agustus 1999. Lihat: Komando Pasukan Aitarak, memorandum dari Bendahara kepada Eurico Guterres, 24 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #79).

† Kabupaten Daerah Tingkat II Bobonaro, "DIPDA [Daftar Isian Proyek Daerah] Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1999/2000" (Koleksi HRU, Doc. BOB#3).

‡ Kabupaten Daerah Tingkat II Bobonaro, "Laporan: Keadaan Kas Bendahara Per 30 Juni 1999," Maliana, 5Juli 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #4).

§ Bupati Bobonaro kepada Gubernur Timor Timur. Surat Rahasia No. 195/UM/VII/1999, 27 Juli 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #5).

Yang pertama dari dokumen-dokumen ini, yang menyebut 'Proyek Pembangunan Regional dan Daerah' Bobonaro menunjukkan bahwa total anggaran untuk proyek tersebut adalah Rp3,162 miliar—tepat sama dengan jumlah anggaran sosialisasi yang diajukan oleh bupati kepada gubernur di akhir Mei 1999. Kesesuaian yang tepat ini menegaskan bahwa pemberian dana untuk kampanye 'sosialisasi' disetujui dan didanai dengan nama 'Proyek Pembangunan Regional dan Daerah,' dan bahwa kampanye 'sosialisasi' dan program 'pembangunan' tersebut adalah hal yang sama.

Kesimpulan tersebut dikonfirmasikan oleh dokumen kunci kedua, buku kas dari Dinas Anggaran Kabupaten Bobonaro bertanggal 5 Juli 1999 yang memberikan perincian dari anggaran 'Proyek Pembangunan Regional dan Daerah.' Butir-butir yang terdaftar dalam buku kas sepenuhnya sama dengan yang terdaftar dalam proposal 'sosialisasi' bupati. Lebih jauh, dokumen ini mengonfirmasikan bahwa sekitar dua per tiga dari seluruh anggaran proyek (Rp3,162 miliar atau USD421.600) telah diterima dan disalurkan pada 30 Juni 1999, sementara sekitar sepertiganya sedang ditunggu oleh pemerintah kabupaten ini.*

Dokumen yang ketiga, yaitu sepucuk surat dari Bupati Bobonaro kepada gubernur, bertanggal 27 Juli 1999, memberikan informasi penting tentang sumber-sumber lain pendanaan untuk kampanye 'sosialisasi' di Bobonaro, dan memberikan gambaran mengenai mekanisme pemeriksaan keuangan yang mungkin telah digunakan di kabupaten-kabupaten lain. Dalam surat ini, bupati menjelaskan kepada gubernur bahwa Kabupaten Bobonaro kekurangan dana untuk membiayai kampanye 'sosialisasi,' dan secara khusus meminta izin untuk mengalihkan sejumlah Rp2,5 miliar (USD333.333) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pekerjaan Umum untuk kampanye 'sosialisasi.'† Bahasa permohonan Bupati itu begitu terus terang:

> "Sehubungan dengan itu, dimohon persetujuan kiranya diperkenankan menggunakan dana yang telah diadakan untuk membiayai beberapa program proyek dalam DIPDA TA. 1999/2000, dialihkan penggunaannya untuk kegiatan sosialisasi Otonomi."‡

Satu lampiran pada surat ini memperjelas bahwa uang yang dialihkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan aslinya dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan sekolah-sekolah dasar di kabupaten tersebut.

---

* Kabupaten Daerah Tingkat II Bobonaro, "Laporan: Keadaan Kas Bendahara Per 30 Juni 1999," Maliana, 5 Juli 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #4).

† Jumlah tepat yang diharapkan Bupati untuk dialihkan adalah: Rp850.790.000 (USD113.438) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Rp1.165.000.000 (USD155.333) dari Dinas Pekerjaan Umum. Bupati Bobonaro kepada Gubernur Timor Timur. Surat rahasia No. 195/UM/VII/1999, 27 Juli 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #5).

‡ Ibid.

Namun, Kabupaten Bobonaro samasekali tidak sendiri dalam mengalihkan dana dari pos anggaran lain ke kampanye 'sosialisasi.' Sebenarnya, bukti dokumenter memperjelas bahwa pengalihan dana untuk sosialisasi diperintahkan oleh gubernur, dengan sepengetahuan penuh pemerintah pusat. Pada Mei 1999 dalam surat yang dikirimkan kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) semua Departemen di Timor-Leste, dan ditembuskan kepada menteri-menteri penting di Jakarta, Gubernur secara jelas menginstruksikan bahwa antara 10 persen dan 20 persen dari semua anggaran departemen harus dialihkan untuk membiayai kampanye sosialisasi.[*] Bagian dalam surat yang terkait langsung dengan hal tersebut terbaca sebagai berikut:

> "Dalam kaitan itu, maka semua potensi yang dimiliki di daerah sepantasnyalah kita kerahkan seoptimal mungkin untuk menyuksekannya. Kepada semua instansi vertikal diharapkan kontribusinya dengan menyisihkan dana 10 % s/d 20 % dari alokasi anggaran pembangunan … demi sosialisasi otonomi …"[†]

Ketika bersaksi di hadapan pengadilan Indonesia pada Juni 2002, Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Timor Timur Rajakarina Brahmana, mengonfirmasikan bahwa antara 10 dan 20 persen anggaran pemerintah daerah telah dialihkan untuk sosialisasi kampanye pro-otonomi, termasuk untuk milisi.[‡]

Juga ada bukti yang kuat bahwa sebagian besar dari sekitar Rp3 miliar yang disediakan untuk setiap pemerintah kabupaten pada 1999 diambilkan dari proyek 'Jaring Pengaman Sosial' (JPS) yang dibiayai oleh Bank Dunia. Bukti paling jelas dalam hal ini adalah surat dari Gubernur kepada semua bupati pada Mei 1999, yang sudah dikemukakan di atas, yang di dalamnya Gubernur menginstruksikan kepada para Bupati untuk menyusun proposal anggaran sosialisasi. Surat tersebut secara eksplisit menyebutkan proyek 'Jaring Pengaman Sosial' sebagai sumber dari mana dana akan diambil:

> "Menyusul surat kami Nomor: 915/712/II.BIPRAM/V/1999 tanggal 5 Mei 1999 maka pelaksanaan Proyek Pembangunan Regional dan Daerah, Proyek Dukungan Pengaman Jaring Sosial (JPS) di masing-masing Daerah Tingkat II, diminta perhatian Saudara agar segera menyusun rencana penggunaan dana sesuai proposal di bawah ini."[§]

Sejumlah dokumen lain juga mengindikasikan bahwa dana 'Jaring Pengaman Sosial' digunakan untuk kampanye sosialisasi. Salah satu proposal anggaran 'sosialisasi' (dari Manufahi), dan kedua surat Gubernur tentang persetujuan anggaran, secara

---

* Surat Gubernur tersebut ditembuskan kepada sejumlah pejabat penting termasuk: Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan (Koleksi Yayasan HAK).

† Surat dari Gubernur Timor Timur kepada semua Kepala Kantor Wilayah Departemen di Timor Timur, bertanggal Mei 1999 (Koleksi Yayasan HAK).

‡ "Funding for East Timor Militias Came From State," *Jakarta Post*, 14 Juni 2002.

§ Gubernur Timor Timur kepada semua Bupati. Surat edaran perihal "Proposal," Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #A).

tersurat menyebut 'Jaring Pengaman Sosial' sebagai proyek dari mana dana 'sosialisasi' akan diambilkan.[*]

Bukti kesaksian mendukung pernyataan bahwa dana 'Jaring Pengaman Sosial' dialihkan untuk membiayai kampanye 'sosialisasi.' Dalam November 1999, seorang mantan pegawai negeri sipil mengatakan kepada Komisi Penyelidik Internasional mengenai Timor Leste tentang adanya satu rapat di Lautém, di mana dijelaskan bahwa pendanaan untuk sosialisasi di kabupaten itu akan didapatkan dari dana yang sebenarnya dialokasikan untuk 'kegiatan kesejahteraan'—yang sangat mungkin adalah dana 'Jaring Pengaman Sosial.' Menurut perkataan Komisi Penyelidik Internasional:

> "Seorang mantan pejabat pemerintah Indonesia bersaksi bahwa pada suatu rapat resmi tanggal 5 Mei 1999 dibahas persoalan penggunaan dana kegiatan kesejahteraan untuk digunakan menutupi biaya kegiatan memenangkan dukungan pada otonomi. Diputuskan untuk mengeluarkan 3,5 juta rupiah untuk pembagian beras dan berbagai barang lainnya kepada rakyat, dengan tujuan memanipulasi suara untuk memenangkan otonomi."[†]

Secara signifikan, dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa dana-dana tersebut tidak dialihkan dengan cara sembunyi-sembunyi, tetapi dilakukan dengan jelas sesuai dengan prosedur birokratis yang sudah tetap.[‡] Dalam surat persetujuan kepada Bupati Lautém dan Bupati Oecussi, misalnya, Gubernur menjelaskan bahwa 'Tim Kontrol' proyek 'Jaring Pengaman Sosial' telah memeriksa dan menyetujui kedua proposal tersebut. Dalam suratnya kepada Bupati Lautém bertanggal 21 Mei 1999 itu, Gubernur menulis:

> "Dengan hormat diberitahukan bahwa proposal Anda telah dipelajari oleh Tim Kontrol proyek Jaring Pengaman Sosial … yang dikelola oleh pemerintah provinsi, dan bahwa pada prinsipnya proposal Anda … disetujui."[§]

* Surat dari Gubernur Timor Timur kepada Bupati Oecussi, Juni 1999; Surat dari Gubernur Timor Timur kepada Bupati Lautem, 21 Mei 1999; Proposal untuk sosialiasi otonomi khusus di Manufahi, Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #2).

† United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, "Report of the International Commission of Inquiry on the Question of East Timor," 31 Januari 2000, paragraf 63.

‡ Satu tuduhan terkait mengenai penggunaan dana 'Jaring Pengaman Sosial' sulit untuk dikonfirmasikan. Satu dokumentasi Australia menyatakan bahwa 'Departemen Urusan Politik' (*sic*) [mungkin yang dimaksud adalah kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan] menyalurkan pinjaman kepada kantor Dinas Keuangan Timor Timur, dengan kesepakatan bahwa pinjaman itu akan dibayar kembali ketika dana 'Jaring Pengaman Sosial' sudah diterima. Lihat SBS, *Dateline*, "Timor Terror Fund," 16 Februari 2000, transkrip, halaman 25.

§ Surat dari Gubernur Timor Timur kepada Bupati Lautem, 21 Mei 2000 (Koleksi SCU, Doc #2).

Bukti dokumenter dan kesaksian ini mungkin tampak menunjukkan bahwa pendanaan untuk kampanye 'sosialisasi', dan untuk milisi, diorganisasikan secara eksklusif di tingkat kabupaten dan provinsi, dan bahwa pihak yang paling bertanggung jawab adalah Gubernur dan 13 Bupati. Namun kenyataannya adalah bahwa, karena sangat sentralistisnya struktur birokrasi Indonesia, pendanaan ini tidak akan dapat dilakukan tanpa persetujuan pejabat-pejabat pemerintah pusat di Jakarta. Atas dasar itu saja, sangat beralasan untuk menyimpulkan bahwa pendanaan untuk milisi dilakukan dengan persetujuan para pejabat pemerintah pusat yang berwenang.

Juga ada bukti substansial bahwa badan-badan pemerintah pusat—termasuk beberapa departemen, badan intelijen militer BAIS (sebelum April 1999 namanya BIA), dan bahkan Kantor Kepresidenan—secara langsung terlibat dalam pengalihan dana kepada milisi, yang biasanya berselubung kedok kampanye 'sosialisasi.' Kesaksian dari sejumlah mantan pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia dan pegawai pemerintah daerah Timor Timur menunjukkan bahwa pendanaan yang substansial diberikan, atau disahkan, antara lain, oleh Departemen Transmigrasi, Departemen Penerangan, dan Departemen Luar Negeri. Bukti itu menempatkan tanggung jawab yang bahkan lebih mengena pada pejabat-pejabat pemerintah pusat.

Seorang mantan tokoh Timor-Leste pro-Indonesia, Tomás Gonçalves, menyatakan bahwa di awal 1999 ia bertemu dengan beberapa pejabat tinggi TNI untuk membahas penyediaan dana dan senjata untuk kelompok-kelompok pro-otonomi. Para perwira yang ia temui disebutkan termasuk Panglima Daerah Militer IX Mayor Jenderal Adam Damiri; Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat (dan kemudian Panglima Darurat Militer) Mayor Jenderal Kiki Syahnakri; Menteri Transmigrasi Letnan Jenderal (Purn.) Hendropriyono; dan Menteri Penerangan Mayor Jenderal (Purn.) Yunus Yosfiah. "Yang mereka katakan," kata Gonçalves, "adalah bahwa jika kami terus mempertahankan bendera merah putih, mereka siap menyediakan dana dan semua jenis senjata, dan semua pasukan di sini bisa membantu kami."[*]

Menurut Gonçalves, Menteri Transmigrasi Letnan Jenderal (Purn.) Hendropriyono adalah yang paling bersemangat, dan menginstruksikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Timor Timur untuk "menyalurkan semua anggaran departemen untuk kepentingan milisi."[†] Menteri Penerangan Mayor Jenderal (Purn.) Yunus Yosfiah juga bersemangat mengenai milisi, menurut Gonçalves, dan menawarkan untuk memperkenalkan para pemimpin pro-otonomi kepada orang-orang penting di Jakarta untuk mendapatkan dukungan pemerintah: "Dalam pembicaraannya tentang persiapan milisi ia bahkan menyebut [Danrem, Kolonel] Tono Suratman pengecut, karena ia begitu lamban untuk bertindak. Kita harus bertindak sekarang karena kita siap untuk mendukung kalian dengan senjata dan apa saja."[‡]

* Dikutip dalam SBS, *Dateline*, "Timor Terror Fund," 16 Februari 2000, transkrip, halaman 18-19.

† SBS, *Dateline*, "Timor Terror Fund," 16 Februari 2000, transkrip, halaman 19. Untuk pernyataan yang sama, lihat "Timor Coup Planned," *The Age*, 22 Juni 1999.

‡ Dikutip dalam SBS, *Dateline*, "Timor Terror Fund," 16 Februari 2000, transkrip, halaman 21.

Seorang mantan pegawai kantor dinas keuangan Timor Timur telah menyatakan bahwa dana juga disediakan oleh Departemen Luar Negeri untuk mendukung kelompok-kelompok pro-otonomi. Setidaknya Rp9 miliar (USD1,2 juta), katanya, telah diberikan kepada FPDK di awal 1999. Mengingat fakta yang diperinci berikut ini, di mana FPDK menyalurkan dana dan barang kepada kelompok-kelompok milisi, kesaksian tersebut melibatkan Departemen Luar Negeri dalam pemberian dukungan finansial kepada milisi. Kenyataannya, pengiriman dana kedua kepada FPDK dihentikan ketika Departemen Luar Negeri mengetahui bagaimana dana bagian yang pertama dipergunakan.[*]

Mungkin yang paling penting, ada bukti dokumenter bahwa pendanaan untuk 'sosialisasi,' dan oleh karenanya juga untuk milisi, berasal langsung dari Kantor Kepresidenan. Bukti ini terdapat dalam dua dokumen dari Bobonaro yang sudah dibahas. Yang pertama dari dokumen-dokumen tersebut, yang menyebut 'Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II' Bobonaro, memerinci bahwa sumber dana untuk proyek ini, dan dengan demikian anggaran untuk sosialisasi, adalah 'INPRES DATI II.' INPRES berarti 'Instruksi Presiden' dan DATI II berarti Daerah Tingkat II atau Kabupaten.[†]

Apa yang ditunjukkan di sini adalah bahwa uang sebesar Rp3,162 miliar (USD421.600) yang dialokasikan untuk kampanye 'sosialisasi' di Bobonaro, yang mencakup uang yang dialokasikan untuk milisi, datang langsung dari Jakarta, di bawah wewenang Kantor Kepresidenan. Sangat mungkin bahwa anggaran 'sosialisasi' di kabupaten-kabupaten yang lain datang dari sumber yang sama. Jika demikian halnya, ini berarti bahwa pertanggungjawaban untuk pendanaan milisi pada 1999 menjangkau hingga ke Kantor Kepresidenan.

Pendanaan dan dukungan material TNI

Selain sumberdaya substansial yang mengalir secara langsung dari, dan melalui, aparatus pemerintah sipil, sebagian dana untuk 'sosialisasi'—dan karenanya juga untuk milisi—berasal dari, atau dibagikan melalui, saluran-saluran militer. TNI juga memberikan dukungan logistik dan material yang cukup banyak untuk milisi dalam bentuk peralatan, pakaian, transportasi, tempat tinggal, obat-obatan, dan senjata. Tingkat keterlibatan lengkap militer dalam pendanaan dan dukungan material semacam itu belum diketahui, tetapi kesaksian dari mantan anggota-anggota TNI, dan dokumen-dokumen yang ditemukan belakangan, menunjukkan secara konklusif bahwa dukungan dan pendanaan itu terjadi, dan mendapatkan dukungan resmi.

Satu dokumen dari Ermera, misalnya, menunjukkan dengan jelas keterlibatan resmi militer di dalam pembagian dana dan barang kepada milisi. Dokumen ini

* Dikutip dalam SBS, *Dateline*, "Timor Terror Fund," 16 Februari 2000, transkrip, halaman 22.

† Kabupaten Daerah Tingkat II Bobonaro, "DIPDA [Daftar Isian Proyek Daerah] Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1999/2000" (Koleksi HRU, Doc. BOB #3).

adalah sepucuk surat dari Dandim Ermera kepada Bupati bertanggal April 1999, yang di dalamnya Dandim meminta uang sebesar Rp104 juta (USD13.866) untuk membiayai gaji bulanan para anggota Pam Swakarsa (yaitu milisi) yang baru direkrut di Kabupaten Ermera sebesar Rp200.000,00 (USD26,66) per orang. Dandim juga meminta 6.405 kg beras untuk dibagikan kepada anggota-anggota baru milisi.[*] Sebagai dasar untuk permintaan tersebut, Dandim secara eksplisit menyebutkan perintah bertanggal 23 April 1999 dari Gubernur dan Danrem yang meminta pembentukan Pam Swakarsa.

Dokumen ini mengonfirmasikan bahwa, sementara pendanaan 'sosialisasi' secara resmi disalurkan melalui kantor Bupati, dalam beberapa hal pendanaan untuk milisi juga mengalir melalui hierarki TNI. Bukti tersebut konsisten dengan informasi dari sumber TNI dan milisi yang didapatkan oleh pengamat-pengamat internasional pada 1999. Dandim di Baucau, misalnya, berkata kepada para petugas Carter Center pada Juli 1999 bahwa para milisi di wilayahnya diorganisasikan, dilatih, dan dipasok oleh TNI. Mirip dengan itu, anggota-anggota milisi di Baucau mengatakan kepada Carter Center bahwa mereka pergi ke Kodim di Baucau setiap bulan untuk mengambil bayaran mereka.[†]

TNI juga mendukung 'sosialisasi' dan milisi dengan menyalurkan dananya sendiri ke pemerintah sipil. Proses ini terungkap dalam sebuah surat bertanggal 23 Juni 1999 dari Dandim Dili Letnan Kolonel Endar Priyanto kepada Bupati. Surat itu menjelaskan bahwa Dandim menyumbang Rp50 juta (USD6.666) kepada Bupati sebagai "dukungan Kodal," seperti yang disepakati dalam rapat tentang persiapan untuk Konsultasi Rakyat. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dana tersebut untuk membantu "terciptanya kondisi yang kondusif, aman dan terkendali" di Kabupaten Dili.[‡]

Walaupun masih terbatas, semakin bertambah bukti yang menunjukkan bahwa sebagian pendanaan dan dukungan material untuk milisi berasal dari sumber-sumber militer di Jakarta, termasuk badan intelijen militer BIA (namanya diubah menjadi BAIS dalam April 1999).

Sadapan DSD Australia tanggal 9 Agustus 1999, dilaporkan mengungkapkan bahwa Brigadir Jenderal Arifuddin, Direktur A BIA/BAIS, telah mengatur penyelenggaraan produksi beberapa ribu bendera pro-otonomi dan kaos oblong untuk dibagikan kepada milisi dan lain-lain di Timor-Leste.[§] Bukti itu mengonfirmasikan bahwa militer, dan khususnya intelijen militer, secara langsung terlibat dalam pemberian dukungan

* Hanya anggota yang baru direkrut, jumlahnya 175 orang di Ermera, yang akan menerima Rp200.000 (USD26,66) per bulan. Gaji untuk anggota lama yang berjumlah 136 orang disediakan Rp125.000 (USD16,66) per bulan. Surat dari Letnan Kolonel Muhamad Nur, Komandan Distrik Militer 1637 Ermera, kepada Bupati Ermera, "Permohonan Uang Saku PAM Swakarsa," bertanggal Juni 1999. Salinan dari dokumen ini dimiliki penulis.

† Komunikasi pribadi dengan Carter Center, 26 Juli 1999.

‡ Dandim 1627/Dili (Letnan Kolonel Endar Priyanto) kepada Bupati Dili. Surat No. B/415/VI/1999, 23 Juni 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #32).

§ *Sydney Morning Herald*, "Silence Over Crimes Against Humanity," 14 Maret 2002.

material kepada kelompok-kelompok pro-otonomi, termasuk milisi. Mungkin juga signifikan bahwa sampai Januari 1999, BIA/BAIS dikepalai oleh Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim. Karena pentingnya peran Makarim dalam merencanakan strategi militer dan milisi di Timor-Leste tahun 1999, bukan tidak masuk akal bahwa ia berperan dalam operasi-operasi BIA/BAIS untuk mendukung milisi.

Indikasi lebih jauh dari dukungan TNI dan BIA/BAIS kepada milisi muncul pada 2000, ketika sejumlah perwira Angkatan Darat dituduh memproduksi dan mendistribusikan uang palsu bernilai jutaan dolar. Salah seorang yang terlibat adalah Brigadir Jenderal Soemaryono, seorang perwira perencana di bawah Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo.[*] Menurut laporan-laporan, ia membantu pembuatan uang palsu itu untuk membiayai milisi Timor-Leste. Kesaksian lain dalam kasus ini menunjukkan bahwa operasi ini dijalankan oleh badan intelijen BIA/BAIS, berdasarkan perintah dari Jenderal Wiranto. Setelah bersaksi dalam kasus tersebut pada akhir 2000, seorang pensiunan perwira intelijen dilaporkan mengatakan bahwa kepala BIA/BAIS, Letnan Jenderal Tyasno Sudarto, mengatakan kepadanya, "bahwa Jenderal Wiranto telah memilih BIA untuk menjalankan operasi uang palsu untuk membiayai milisi."[†]

Juga ada sejumlah bukti bahwa Jenderal Wiranto mungkin telah mengesahkan pengalihan dana negara untuk keperluan membiayai kampanye pro-otonomi. Dalam pemeriksaan pengadilan di akhir 2001 untuk suatu kasus korupsi, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Rahardi Ramelan mengatakan bahwa ia telah mengambil Rp10 miliar dari dana Bulog dan 'meminjamkan' dana itu kepada Jenderal Wiranto. Ia mengatakan diberitahu bahwa dana itu dipergunakan untuk membiayai kelompok-kelompok pro-otonomi di Timor-Leste.[‡]

Terakhir, ada bukti bahwa para pejabat militer senior yang lain berjanji memberikan dana besar untuk kelompok-kelompok milisi. Surat dakwaan untuk Jenderal Wiranto dan tujuh perwira lainnya yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat di Timor-Leste menuduh, misalnya, bahwa pada rapat di Dili pada November 1998, Panglima Daerah Militer IX Mayor Jenderal Adam Damiri menawarkan memberikan uang Rp50 juta kepada Eurico Guterres untuk memulai kerja membentuk kelompok-kelompok milisi.[§]

* Lihat "Retired General Faces 4-year Term," *Indonesian Observer*, 28 Novermber 2000; "Two ex-Army Colonels Nabbed Over Fake Money," *Jakarta Post*, 3 Juli 2000.

† "Two Ex-soldiers Jailed for Counterfeiting," *Jakarta Post*, 22 September 2000; "Alleged Counterfeiter Claims Army Used Him to Finance Timor Militia," AFP, 13 September 2000.

‡ "Wiranto Akui Dana Rp. 10 M Untuk Konsultasi Rakyat Timtim," *Detikcom*, 31 Oktober 2001; dan "Soal Dana Bulog Rp. 54 Miliar: Rahardi – Diserahkan Kepada Akbar Tandjung dan Wiranto," *Kompas*, 10 Oktober 2001.

§ "Selama kunjungan dengan para pemimpin pro Indonesia," demikian surat dakwaan itu, "DAMIRI memuji Eurico Guterres yang akan menjadi pemimpin milisi di masa depan sebagai pemuda yang bersedia berjuang untuk integrasi dan mengatakan bahwa dia bersedia memberikan lima puluh juta rupiah kepada Guterres untuk mulai pekerjaannya." Timor Leste, Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Surat Dakwaan Wiranto dan lain-lain, Februari 2003, paragraf 13.

TNI juga memiliki sejumlah mata anggaran resmi yang dialihkan untuk kepentingan pro-otonomi pada 1999. Salah satunya adalah 'Dana Satuan Operasi Pengamanan Pemilu 1999.' Walaupun namanya menunjukkan bahwa dana itu disediakan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemilihan umum Indonesia tahun 1999, dana itu juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Konsultasi Rakyat di Timor-Leste. Ketika Panglima Daerah Militer IX Mayor Jenderal Adam Damiri memerintahkan satu delegasi yang terdiri atas sejumlah perwira Kodam IX mengunjungi Timor-Leste pada awal Juni 1999 untuk memeriksa rencana pemilihan umum dan Konsultasi Rakyat, ia menyebutkan bahwa untuk membiayai keperluan ini digunakan dana Satuan Operasi Pengamanan Pemilu 1999.[*] Sangat mungkin bahwa dana yang sama—dan dana-dana lain yang belum kita ketahui—telah digunakan untuk keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan Konsultasi Rakyat.

Keterlibatan militer dalam pendanaan dan pemasokan untuk milisi juga mengambil bentuk-bentuk yang lain, baik formal maupun informal. Sudah terbukti dengan sendirinya bahwa TNI membayar untuk senjata dan peralatan militer lainnya yang mereka bagikan kepada milisi. Beberapa satuan milisi—seperti Halilintar di Bobonaro, dan Rajawali serta Saka di Baucau—perlengkapannya sangat baik, dan dapat dilihat tampil dengan perlengkapan tempur yang lengkap atau hampir lengkap (pakaian seragam loreng, sepatu boot, dan lain-lain). Namun semua kelompok milisi diperlengkapi atau memiliki akses pada barang-barang yang mahal, termasuk peralatan radio komunikasi canggih yang biasanya hanya digunakan oleh pihak berwenang militer dan kepolisian.

Pihak berwenang militer dan kepolisian di Timor-Leste juga memberikan 'sumbangan' uang dan barang kepada kelompok-kelompok milisi. Dalam satu laporan kepada Komandan Kompi B Aitarak, bertanggal 2 Agustus 1999, seorang komandan milisi setempat memberikan satu daftar sumbangan yang telah diperoleh dari berbagai badan pemerintah dan bisnis untuk mendukung penyelenggaraan satu pesta yang diadakan di pos milisinya di Dili. Daftar itu berisi 14 nama dengan tandatangan, dan jumlah dana yang disumbangkan oleh masing-masing orang yang namanya disebutkan. Kantor dan pejabat yang masuk dalam daftar itu mencakup tokoh-tokoh pejabat sipil, kepolisian, dan militer penting di kota Dili: Kantor Walikota Dili, Kepala Kepolisian Resor Dili, dan Kodim Dili.[†]

Terakhir, pihak berwenang militer bisa dan sudah menggunakan otoritasnya terhadap badan-badan pemerintah lainnya untuk memastikan bahwa dana dan barang disalurkan kepada kelompok-kelompok milisi bahkan ketika tidak ada anggaran resmi untuk pengeluaran semacam itu. Surat dari seorang bintara Kopassus kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Baucau pada Maret 1999, memberikan

* Panglima Kodam IX/Udayana (Mayor Jenderal Adam Damiri), "Surat Perintah No. Sprin/654/V/1999," 31 Mei 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #27).

† Komandan Peleton IV, Pos III, Aitarak (Nicolau P. Lobato) kepada Komandan Kompi B Aitarak. Laporan No. 03/Pos III/ATK/IV/1999, tentang "Laporan hasil dukungan," 2 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #219).

gambaran tentang proses tersebut.[*] Surat itu meminta obat-obatan untuk keperluan terang-terangan 'penggalangan' penduduk dan 'meningkatkan moril' anggota dan simpatisan milisi setempat. Setelah menyebut kelompok-kelompok milisi Saka, Sera, dan Alfa, dan menyebut sejumlah 600 anggota keluarga dan 'pendukung operasi,' surat itu meminta obat-obatan untuk memfasilitasi "penggalangan terhadap/ kepada masyarakat serta meningkatkan moril para anggota dan simpatisan."[†] Surat itu meninggalkan keraguan bahwa TNI, dan khususnya Kopassus, menggunakan otoritas kuatnya untuk mengarahkan dukungan material kepada milisi.

FPDK sebagai saluran pendanaan

Selain uang dan sumberdaya yang dialirkan melalui saluran-saluran pemerintah sipil dan militer, dukungan diberikan kepada milisi melalui berbagai sarana yang tidak langsung. Banyak darinya disalurkan melalui FPDK, salah satu dari dua organisasi pro-otonomi yang didirikan pada awal 1999. Memang ada alasan untuk meyakini bahwa, apapun hal lain yang dilakukannya, FPDK bekerja untuk keperluan yang tersembunyi—sebagai sarana penyaluran dana dan barang dari pemerintah dan militer kepada milisi. Ada alasan untuk meyakini bahwa BRTT juga bertindak sebagai suatu mekanisme dukungan, dan mungkin sebagai saluran dana, kepada milisi.

Beberapa bukti untuk pernyataan ini sifatnya tidak langsung. Misalnya, menurut penjelasannya sendiri, pada awal 1999 pemimpin FPDK, Basilio Araújo, pergi ke Jakarta untuk meminta uang dan senjata kepada para pejabat militer dan pemerintah. Ketika diwawancarai oleh seorang wartawan Australia pada saat itu, ia mengatakan bahwa ia cukup yakin bahwa permintaannya akan diterima secara positif.[‡] Pernyataan itu sendiri tidak membuktikan banyak hal. Tetapi, bersama dengan kesaksian bahwa Departemen Luar Negeri memberikan Rp9 miliar (USD1,2 juta) kepada FPDK, dan bukti dokumenter bahwa kelompok itu segera mendapatkan akses pada sejumlah besar dana dan perbekalan, yang dibagikan kepada para milisi, mengarahkan telunjuk pertanggungjawaban kepada pejabat-pejabat di Jakarta.

Beberapa bukti paling jelas bahwa FPDK membagikan dana dan perbekalan kepada milisi datang dari Kabupaten Covalima. Satu dokumen yang disusun oleh kantor FPDK Kabupaten Covalima, misalnya, berisi daftar nama 143 orang anggota milisi Laksaur (Kompi 2/Tilomar), yang masing-masing menerima uang sebesar Rp800.000 dari FPDK dalam waktu antara April dan Juli 1999.[§] Dokumen kedua

* Surat itu berasal dari bintara kesehatan 'Satuan Lapangan-A' dari 'Satuan Tugas Tribuana VIII' Kopassus. Lihat Komandan Satuan Lapangan-A, Satuan Tugas Tribuana VIII kepada Kepala Dinas Kesehatan Tingkat II Kabupaten Baucau, "Permohonan Dukungan Obat Bulanan Pos Dan Kes Satlap-A," Maret 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #14).

† Ibid.

‡ ABC, *Four Corners*, "Licence to Kill," 15 Maret 1999, transkrip, halaman 6.

§ Lihat: Ketua FPDK-Covalima (Alberto de Neri), "Daftar: Nama Satuan Tugas Laksaur Merah Putih Kompi 2 Tilomar Yang Menerima Bantuan Biaya dari FPDK Kabupaten Covalima bulan April s/d Juli 1999," [Agustus] 1999 (Koleksi SCU, Doc #182).

berasal dari kantor FPDK yang sama memuat daftar nama 16 orang pegawai negeri yang juga anggota milisi Laksaur yang masing-masing menerima Rp400.000 dari FPDK dalam periode empat bulan yang sama.[*]

Dokumen-dokumen dari Dili menunjuk pada hubungan patronase yang sama antara FPDK dan kelompok milisi Aitarak. Dalam sepucuk surat kepada ketua tingkat provinsi FPDK, bertanggal 18 Agustus 1999, pemimpin Aitarak Eurico Guterres meminta Rp117.000.000 untuk membayar keperluan makan 600 anggota Aitarak yang akan tinggal di markas Aitarak selama masa kampanye 13 hari. Guterres menulis: "… kami mohon kepada Bapak Ketua Umum DPP FPDK Timor Timur dapat mencairkan dana operasional berupa biaya makan (konsumsi) dalam mendukung Kegiatan Anggota Komando Pasukan Aitarak." Nada nyata surat ini, dan fakta bahwa surat itu meminta "mencairkan dana operasional," dengan kuat menunjukkan bahwa ada satu mata anggaran di dalam FPDK untuk keperluan semacam itu, dan bahwa permintaan dari milisi merupakan kejadian yang rutin.[†]

Surat lain kepada ketua FPDK bertanggal 21 Agustus 1999 mengonfirmasikan kecurigaan itu. Dalam surat itu, Guterres meminta 'tambahan' 120 kaos oblong pro-otonomi; 70 darinya untuk anggota Aitarak "yang belum mendapatkan pembagian" dan 50 untuk penduduk desa Motael, Dili. Bahasa di dalam surat itu—dan khususnya kata 'tambahan'—menghilangkan keraguan bahwa FPDK telah memberikan kaos oblong kepada para anggota Aitarak dalam kesempatan yang sebelumnya. Lebih jauh, dengan menyebutkan 70 anggota milisi yang belum menerima pakaian tersebut, surat itu secara tersirat namun jelas menunjukkan bahwa anggota Aitarak yang lain—yang berjumlah sekitar 1.500 orang—telah menerima kaos oblong dari FPDK.[‡]

Surat 21 Agustus 1999 signifikansinya bahkan lebih besar ketika diletakkan bersama dengan bukti yang telah disebutkan bahwa Brigadir Jenderal Arifuddin, Direktur A badan intelijen militer, BAIS, telah mengatur pembuatan sejumlah 5.000 kaos oblong pro-otonomi pada 1999. Bukti tersebut dapat menunjukkan dengan baik bahwa FPDK adalah penyalur pemberian dana dan material dari BAIS itu sendiri, atau dari para pejabat tinggi TNI seperti Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, yang punya hubungan dekat dengan badan tersebut.

---

* "Nama Satuan Tugas Laksaur Merah Putih Kompi 2 Tilomar Yang Menerima Bantuan Biaya Dari FPDK Kabupaten Covalima Bulan April s/d Juli 1999 Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil." (Koleksi SCU, Doc #182).

† Lihat: Komandan, Komando Pasukan Aitarak, Sektor B (Eurico Guterres) kepada Ketua Umum DPP FPDK Timor Timur, tentang "Mohon Dukungan Dana," 18 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #47).

‡ Bagian yang relevan dari surat itu: "Maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Umum DPP FPDK Timor Timur dapat memberikan dukungan tambahan Baju kaos Otonomi sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah untuk anggota Aitarak yang belum mendapatkan pembagian sebanyak 70 Orang dan Masyarakat Desa Motael sebanyak 50 orang." Lihat: Komandan Komando Pasukan Aitarak, Sektor B (Eurico Guterres) kepada Ketua Umum DPP FPDK Timor Timur. Surat No. 57/MK-AT/VIII/1999, tentang "Mohon Dukungan Baju Kaos Otonomi," 21 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #156).

Anggaran milisi

Beberapa bukti yang menunjuk pada pendanaan resmi milisi ada dalam bentuk permintaan dan proposal anggaran yang diajukan kepada pihak berwenang sipil dan militer oleh kelompok-kelompok milisi. Permintaan dan proposal itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dukungan pemerintah akan datang. Namun, dipandang dalam konteks pola pendanaan resmi seperti yang sudah diuraikan—dan dengan memperhatikan nada dan bahasa rutin yang sama dalam permintaan-permintaan ini—permintaan dan proposal itu memberikan dukungan lebih jauh untuk pernyataan bahwa milisi menerima dana dan dukungan logistik resmi. Permintaan dan proposal itu juga memberikan pemahaman tentang jangkauan dan sifat dari pendanaan dan dukungan material lainnya yang mungkin sudah diberikan.

Penting dicatat bahwa banyak dari permintaan ini disampaikan kepada TNI, dan khususnya kepada para komandan Kodim dan Korem. Dalam sepucuk surat kepada Dandim Dili, bertanggal 16 Agustus 1999, pemimpin Aitarak Eurico Guterres meminta agar TNI membayar gaji 76 orang anggota Aitarak yang belum menerima pembayaran melalui jalur normal. Hanya 1.445 dari 1.521 anggota Aitarak yang sudah menerima gaji, keluhnya, dan Walikota Dili mengatakan bahwa tidak cukup uang untuk membayar mereka. Di samping mengonfirmasikan bahwa milisi secara normal dibayar melalui aparat pemerintah sipil, surat itu mengungkapkan bahwa TNI dianggap sebagai sumber pendanaan yang terakhir bagi milisi.[*]

Dokumen-dokumen yang lain menunjukkan bahwa para pemimpin milisi sudah terbiasa dengan TNI membiayai pengeluaran rutin operasionalnya. Dalam sepucuk surat kepada kepala badan perlistrikan negara PLN di Dili, bertanggal 12 Agustus 1999, Eurico Guterres menjelaskan dalam nada biasa bahwa rekening listrik yang belum dibayar untuk dua rumah di Dili semestinya disampaikan kepada Korem, karena kedua rumah tersebut dipergunakan sebagai pos Aitarak. Kami tidak memiliki bukti bahwa Korem benar-benar membayar rekening ini, tetapi nada dari surat tersebut—dan fakta bahwa surat tersebut ditembuskan kepada para pejabat senior termasuk Gubernur—dengan kuat menunjukkan bahwa membiayai pengeluaran semacam itu sudah rutin bagi TNI.[†]

Para pemimpin milisi juga membuat permintaan yang sama untuk dukungan logistik dari para pejabat pemerintah sipil. Di akhir April 1999, misalnya, komandan kompi A Aitarak dan komandan pos milisi di Desa Vila Verde, Dili, menulis surat kepada kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan meminta ruang kantor dan sebuah kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pro-otonomi. Kedua pemimpin milisi itu menjelaskan bahwa

* Lihat: Komandan, Komando Pasukan Aitarak, Sektor B (Eurico Guterres) kepada Dandim 1627/Dili. Laporan No. 148 SL/MK-AT/VIII/1999, 16 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #26).

† Lihat: Komandan Komando Pasukan Aitarak, Sektor B (Eurico Guterres) kepada Kepala PLN Wilayah IX Cabang Dili Tim-Tim. Surat No.147/SP/MK-AT/VIII/1999, 12 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #83).

kendaraan yang mereka dapatkan seharusnya adalah kendaraan yang disita dari seorang pegawai negeri sipil, yang menurut mereka, telah menggunakannya untuk kegiatan prokemerdekaan.*

Contoh lain dari permintaan semacam itu datang dari sepucuk surat bertanggal 10 Agustus 1999, dari Eurico Guterres kepada Walikota Dili. Dalam surat itu, Guterres meminta Rp60 juta (USD8.000) untuk menutupi biaya bahan bakar personel Aitarak yang menggunakan 50 mobil dan 100 sepeda motor selama periode kampanye. Seperti permintaan-permintaan lain yang sudah disebutkan, permintaan ini pun tampaknya adalah permintaan rutin untuk 'mencairkan' dana, bahasa yang lagi-lagi menunjukkan bahwa ada mata anggaran yang sudah tersedia untuk keperluan semacam itu.†

Permintaan bantuan yang terbesar sejauh yang ditemukan adalah dua proposal anggaran yang disusun oleh Aitarak dan ditandatangani oleh Eurico Guterres. Satu disampaikan kepada Gubernur Timor Timur pada 18 Mei 1999, dan yang lainnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), provinsi Indonesia yang bersebelahan dengan Timor-Leste, pada 30 Juni. Proposal kepada Gubernur Timor Timur meminta dana sejumlah Rp477.490.000 (USD63.665) untuk membiayai berbagai macam kebutuhan meliputi: empat buah kendaraan roda empat, 20 buah sepeda motor, dana 'sosialisasi otonomi,' dua buah komputer, empat buah mesin ketik, lima buah lemari, lima buah meja, lima buah kipas angin, dua buah meja komputer, dan lain-lain. Proposal yang diajukan kepada Gubernur NTT meminta dana sejumlah Rp1.009.990.000 (USD134.665) mencantumkan satu daftar yang sama tetapi padanya ditambahkan: gaji untuk 1.522 orang anggota Aitarak, serta biaya telepon, air, listrik, pemeliharaan kendaraan, dan 'biaya tidak terduga.'‡

Proposal-proposal anggaran yang besar itu sendiri tidaklah membuktikan bahwa pendanaan pemerintah sudah diberikan. Namun, seperti banyak permintaan lain yang lebih kecil yang sudah diuraikan, proposal-proposal itu memberi tahu kita bahwa Guterres, dan mungkin pemimpin milisi yang lain, memiliki alasan untuk berharap bahwa dirinya akan mendapatkan sesuatu dari pihak yang berwenang. Lebih jauh, mengingat kenyataan bahwa Aitarak pada akhirnya mendapatkan mobil, sepeda motor, ruang kantor, perlengkapan kantor, dan gaji untuk sekitar 1.500 anggota, bukannya tidak beralasan untuk menyimpulkan bahwa setidaknya sebagian dari permintaan tersebut telah disusul dengan penyaluran dana dari sumber-sumber resmi.

* Lihat: Danki Kompi A Aitarak, Danpos Aitarak Desa Vila Verde, dan Komandan Aitarak, Sector B (Eurico Guterres) kepada Kakanwil Depdikbud. Surat No. /PVV/AT/IV/199 tentang "Permohonan Dukungan Sarana untuk Pos Aitarak Desa Vila Verde," 26 April 1999 (Koleksi SCU, Doc #170)

† Lihat: Komandan, Komando Pasukan Aitarak Sektor B (Eurico Guterres) kepada Walikota Administratif Dili. Surat No. 142/MK-AT/VIII/1999, tentang "Mohon Dukungan Biaya Bahan Bakar Kendaraan," 10 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #172).

‡ Lihat: Komandan, Komando Pasukan Aitarak, Sektor B (Eurico Guterres) kepada Gubernur Timor Timur. Surat No. 16/SP/AT/V/1999, 18 Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #38); dan Wakil Panglima, Komando Pasukan Pejuang Integrasi (Eurico Guterres) kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Surat No. 55/SP/MK-AT/VI/1999, 30 Juni 1999 (Koleksi SCU, Doc #39).

Bukti-bukti yang dikemukakan dalam bab ini meninggalkan sedikit keraguan bahwa pihak berwenang sipil dan militer Indonesia, sampai pada dan termasuk Kantor Kepresidenan, menyediakan landasan material dan finansial yang penting bagi milisi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kedok kampanye 'sosialisasi.' Lebih khususnya, bukti-bukti itu mengarah pada kesimpulan-kesimpulan berikut ini.

Pertama, banyak dari pendanaan resmi—diperkirakan Rp39 miliar atau USD5,2 juta—disalurkan melalui birokrasi pemerintah sipil di Timor-Leste, dengan persetujuan eksplisit dari Gubernur dan para Bupati. Sebagian, mungkin sebagian besar, dari dana-dana itu diambil atau dialihkan dari anggaran dan program pemerintah daerah yang sudah ada, termasuk proyek 'Jaring Pengaman Sosial' yang dibiayai oleh Bank Dunia, dan anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I untuk Pendidikan dan Kebudayaan serta Pekerjaan Umum. Karena sangat sentralistisnya struktur birokrasi Indonesia, pengaturan-pengaturan ini tidak akan dapat terjadi tanpa persetujuan dari pejabat-pejabat pemerintah pusat di Jakarta.

Kedua, ada bukti bahwa beberapa departemen dan instansi pemerintah Indonesia—termasuk Departemen Transmigrasi, Departemen Penerangan, Departemen Luar Negeri, dan badan intelijen militer BAIS—memberikan dukungan yang bersemangat, dan dana, untuk 'sosialisasi,' yang mencakup milisi. Lebih lanjut, ada bukti dokumenter bahwa setidaknya sebagian dari uang yang dipergunakan untuk mendukung milisi di Timor-Leste berasal langsung dari Jakarta di bawah selubung program pembangunan yang didanai oleh Kantor Kepresidenan.

Ketiga, bukti dokumenter dan kesaksian menunjukkan bahwa sebagian pendanaan untuk milisi juga disalurkan, secara langsung maupun tidak langsung, melalui TNI. Di sejumlah kabupaten anggota-anggota milisi menerima gaji bulanan dan jatah berasnya di kantor Kodim. TNI juga memberikan dukungan material dalam bentuk 'sumbangan' sukarela kepada kelompok-kelompok milisi, dengan menggunakan wewenangnya untuk mengalihkan perbekalan kepada milisi dari badan-badan pemerintah yang lain, dan dengan memasok milisi dengan senjata, peralatan tempur, pakaian, peralatan radio, perbekalan medis, transportasi, dan bantuan logistik lainnya.

Terakhir, pendanaan dan perbekalan tambahan disalurkan melalui kelompok pro-otonomi, FPDK. Di sebagian kabupaten, seperti Covalima, FPDK membayar gaji bulanan milisi setempat. Di tempat lain, FPDK memberikan kaos oblong, bendera, dan berbagai pernik-pernik pro-otonomi. Lebih jauh, ada bukti untuk menyatakan bahwa FPDK berlaku sebagai saluran tersembunyi untuk pembagian dana dan perbekalan kepada milisi dari berbagai instansi pemerintah pusat, termasuk Departemen Luar Negeri dan badan intelijen utama militer BAIS.

Ringkasan kabupaten

Pengkajian mengenai pola luas kekerasan pada 1999 dan mengenai hubungan-hubungan yang mendasarinya, dapat menciptakan pengertian yang menyesatkan tentang keseragaman situasi di seluruh Timor-Leste. Bab ini bertujuan mengoreksi ketidakseimbangan tersebut, dan memberikan gambaran yang lebih bernuansa dan kompleks tentang kejadian-kejadian pada 1999, dengan mempelajari keadaan hak asasi manusia pada 1999 di semua kabupaten Timor-Leste: Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Dili, Ermera, Manufahi, Manatuto, Lautém, Liquiçá, Oecussi, dan Viqueque.

Setiap ringkasan kabupaten terdiri atas dua bagian utama. Bagian pertama menggambarkan kelompok-kelompok milisi utama yang beroperasi di kabupaten bersangkutan pada 1999, dan memeriksa hubungan antara kelompok-kelompok tersebut dengan pihak-pihak berwenang militer, kepolisian, dan sipil setempat. Bagian kedua memberikan gambaran tentang peristiwa-peristiwa dan perkembangan hak asasi manusia yang penting di masing-masing kabupaten pada 1999, dengan menyoroti tema-tema umum dan insiden-insiden kekerasan yang spesifik. Selain menambah kompleksitas pada gambaran mengenai kejadian-kejadian 1999, ringkasan-ringkasan ini juga menggambarkan dengan sangat jelas pola-pola umum dan hubungan-hubungan yang dibahas dalam bagian awal laporan ini.

Aileu (Kodim 1632)

- Dandim: Mayor Maman Rahman
- Bupati: Kolonel (Purn.) Suprapto Tarman
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Hermanu, SH
- Milisi: AHI
- Jumlah yang dibunuh: 28 orang

Dibandingkan beberapa kabupaten yang lain, tingkat kekerasan politik di Aileu relatif rendah pada 1999.* Dua puluh delapan orang dibunuh selama 1999, dengan jumlah terbesar di satu kecamatan (Aileu Kota). Di lain pihak, kabupaten ini menderita tingkat penghancuran fisik yang sebanding dengan kabupaten-kabupaten lain, dan beberapa ribu orang dipaksa meninggalkan rumah dan mengungsi ke gunung-gunung atau ke Timor Barat. Pelaku utama kekerasan di Aileu adalah para prajurit TNI dan, pada tingkat yang lebih kecil, para anggota milisi lokal, AHI. Anggota Brigade Mobil (Brimob) Polri juga menjadi pelaku langsung beberapa tindak kekerasan.

* Kecuali disebutkan lain, penjelasan ini berdasar pada UNTAET, DHRO Aileu, "A Profile of Human Rights Violations in Aileu District During 1999," Desember 2001.

Milisi dan pihak berwenang

Kelompok milisi utama di Kabupaten Aileu, AHI (Aileu Hametin Integrasaun – Aileu Memperkuat Integrasi), secara resmi didirikan pada April 1999, dan diperkirakan berkekuatan sekitar 260 anggota. Seperti banyak kelompok milisi baru yang muncul saat itu di Timor-Leste, AHI dibentuk mengikuti organisasi paramiliter dan milisi yang sudah ada sebelumnya. Yang paling penting dari organisasi-organisasi ini di Aileu adalah Gadapaksi, satu kelompok pemuda setengah militer yang didirikan pada 1995. Pada saat pembentukan AHI, semua anggota dari kelompok yang lama bergabung dalam kelompok yang baru. Menegaskan kelanjutan antara yang lama dan yang baru, para pemimpin AHI tahun 1999 mencakup para mantan komandan kelompok-kelompok lama.*

Secara resmi, AHI mendapat dukungan dari pihak berwenang sipil yang utama, termasuk Bupati, Kolonel (Purn.) Suprapto Tarman, dan para pejabat pemerintahan setempat.† AHI mendapatkan ruang kantor di kota Aileu dan di setiap kecamatan. Pihak berwenang kabupaten ini juga memberikan dua mobil kepada AHI, yang digunakan oleh para pemimpin utamanya, dan seperti milisi di manapun AHI menerima dana dan beras yang disalurkan melalui kantor Bupati.

Terlepas dari tanda-tanda dukungan pemerintah semacam itu, dukungan pihak berwenang kepada AHI tidak sekuat seperti di kabupaten-kabupaten lain. Setidaknya beberapa pejabat pemerintah jelas bersikap mendua terhadap milisi. Dandim Mayor Maman Rahman tidak tampak sebagai pendukung kuat milisi, dan tindakan yang di masa lalu dilakukan Bupati Kolonel Suprapto Tarman bermacam-macam. Walaupun ia mengancam akan melakukan kekerasan hebat terhadap tokoh-tokoh prokemerdekaan pada Agustus, dan memperlihatkan sikap siap berperang secara ekstrem di masa setelah pemungutan suara, ia bukan seorang yang cepat menyambut gagasan mengenai kekuatan milisi. Kenyataannya ia tidak mengesahkan pembentukan milisi AHI sampai April, dan ini agaknya hanya untuk menjaga agar milisi lain—terutama Aitarak yang berbasis di Dili—tidak beroperasi di kabupatennya. Sikap mendua ini tampak membatasi kekuatan AHI, dan karena itu mungkin membantu menjelaskan relatif kecilnya jumlah pembunuhan di kabupaten ini.

Beberapa aspek tertentu dari kepemimpinan dan komposisi milisi AHI mungkin turut berperan dalam hal ini. Sebagai contoh, komandan milisi AHI, Tomás Mendonça, dilaporkan ragu-ragu membagikan senjata kepada anggota milisi. Mendonça, yang mantan pegawai negeri sipil dan mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aileu, tidak begitu agresif atau tidak cepat menggunakan kekerasan seperti pemimpin milisi di kabupaten-kabupaten lain. Perilaku AHI mungkin juga dibatasi oleh kenyataan bahwa Aileu adalah wilayah basis utama CNRT dan Falintil. Bahkan, menurut berbagai keterangan, anggota CNRT dan Falintil berhasil menyusup ke satuan-satuan milisi AHI, dan setidaknya

* Mereka mencakup Horacio de Araújo, seorang bekas pemimpin Gadapaksi, yang menjadi orang ketiga dalam komando AHI.

† Kolonel Suprapto Tarman sebelumnya bertugas sebagai Dandim di Manufahi dan Kepala Staf Korem 164/WD.

satu komandan AHI (orang kedua dalam jajaran komandonya, Julio Oscar Galucho) disebut sebagai seorang agen bawahtanah Falintil.

Bagaimanapun AHI mendapatkan dukungan dari beberapa perwira reguler TNI, termasuk Kepala Staf Kodim, Kapten Solapidin Dolok Seribu. Di tempat-tempat tertentu, perwira dan prajurit TNI secara langsung terlibat dalam penggalangan dan koordinasi kegiatan milisi. Komandan Rayon Militer Aileu, Sersan Mayor Alex Cocoleu, adalah seorang pendukung kuat milisi. Di Kecamatan Laulara, AHI secara tidak resmi dikoordinasi oleh seorang Babinsa, Prajurit José Aleixo; sementara di Kecamatan Seloi Kraik, AHI dikoordinasi oleh bintara TNI, Sersan Pedro Araújo.

Basis dukungan terkuat milisi AHI di Aileu mungkin dari satuan Kopassus yang ditempatkan di sana dan dari kelompok milisi yang berpusat di Dili, Aitarak, yang merupakan buatan Kopassus. Kenyataan bahwa Aitarak mulai beroperasi di Kecamatan Laulara, Aileu, awal 1999, mendorong Bupati menerima seruan Kopassus untuk membentuk kelompok milisi lokal. Aitarak juga berperan penting dalam pembentukan AHI, dan anggota-anggota Aitarak datang ke Aileu secara berkala pada 1999 untuk memeriksa operasi-operasi AHI.

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Mungkin karena kelemahan AHI dan kekuatan relatif Falintil dan CNRT di kabupaten tersebut, sepanjang periode pra-pemungutan suara tidak tercatat adanya pembunuhan. Namun, bulan-bulan tersebut tidak sepenuhnya bebas dari kekerasan. Sering ada laporan mengenai penahanan, pemukulan, dan penyiksaan terhadap orang-orang yang diduga anggota CNRT dan Falintil. Kadang-kadang pemukulan ini terjadi di markas AHI, tetapi sering pula pemukulan terjadi di markas Kodim atau di salah satu markas Koramil. Juga dilaporkan terjadinya beberapa tindakan pelecehan seksual dan kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan yang bersimpati pada CNRT.

Sebagaimana di daerah lain di seluruh Timor-Leste, hari pemungutan suara keadaannya relatif damai di Aileu, dan ketenangan ini berlanjut setidaknya sampai 3 atau 4 September 1999. Namun, saat hasil pemungutan suara diumumkan, keadaan berubah dengan dramatis. Menurut beberapa keterangan, kekerasan dimulai pada hari tersebut dengan pembunuhan sistematis terhadap binatang ternak. Para prajurit TNI memulai pembantaian, dengan menggunakan senjata berkekuatan tinggi, dan kemudian memberikan senjata kepada milisi untuk melanjutkan tugas tersebut. Sejak itu, kekerasan dengan cepat meningkat.

Prajurit TNI dan Polri sering berperan langsung dalam kekerasan. Para perwira TNI dilaporkan memerintahkan pemimpin milisi Tomás Mendonça mengorganisasi pembakaran gedung-gedung di kota Aileu. Para perwira Polisi Sipil UNAMET melaporkan bahwa Polisi Indonesia hanya berdiri membiarkan milisi membakar habis kantor CNRT di kota Aileu. Pada 8 September Kapten Dolok Seribu dan Sersan Mayor Cocoleu mengumpulkan sekitar 20 prajurit TNI di Kodim. Setelah mereka berkumpul, Sersan Mayor Cocoleu dilaporkan memberi perintah untuk bergerak membakar dan membunuh.

Antara 4 dan 14 September, setidaknya 15 orang dibunuh di kabupaten ini. Sebelas dari 15 orang itu dibunuh di Kecamatan Aileu Kota, dan empat lainnya dibunuh di Kecamatan Laulara. Tampaknya, tidak ada yang dibunuh di Kecamatan Lequidoe dan Kecamatan Remexio. Informasi yang tersedia tentang pembunuhan yang dilaporkan itu lagi-lagi menunjuk pada peran langsung aparat keamanan. Para perwira TNI atau Polri secara langsung terlibat dalam setidaknya 8 dari 15 pembunuhan, dan mereka adalah pelaku tunggal dalam sedikitnya lima kasus. Misalnya pada 9 September Domingos Maukinta ditembak mati di dekat Desa Hohulu, di Kecamatan Aileu Kota oleh seorang sersan TNI yang beroperasi bersama sejumlah milisi. Pembunuhan terjadi dalam operasi pembakaran dan pemindahan paksa yang dilakukan bersama oleh TNI-milisi di bawah pimpinan Sersan Mayor TNI Alex Cocoleu.

Seperti di kabupaten-kabupaten lain, periode setelah pemungutan suara juga ditandai dengan perusakan besar-besaran harta benda, intimidasi, dan pemindahan paksa. Dalam hal ini peran TNI dan Polri juga tampak jelas. Pembakaran kota Aileu dimulai pada 5 September dan dilaksanakan dengan sengaja dan sistematis. Prajurit-prajurit TNI dan milisi tiba di desa-desa dengan membawa kaleng-kaleng berukuran lima liter berisi bensin atau minyak tanah, yang mereka siramkan ke gedung-gedung sebelum menyulut dan membakarnya. Desa-desa yang berada di sekitar kota Aileu dibakar satu demi satu pada hari-hari selanjutnya.

Dengan latar belakang seperti ini, TNI dan milisi mulai meringkus ribuan penduduk desa dan mengangkut mereka, atau memaksa mereka untuk berjalan, menuju ke kota Aileu. Seperti juga di sejumlah kabupaten lain, penduduk yang tinggal paling dekat dengan jalan-jalan utama adalah yang paling banyak diringkus. Setelah menunggu di Aileu selama beberapa hari, pada 14 September mereka yang diringkus dipindahkan dari Aileu ke Dili. Beberapa hari kemudian mereka dinaikkan ke truk-truk dan diangkut dari Dili ke Atambua di Timor Barat.

Ainaro (Kodim 1633)

- Dandim: Letnan Kolonel Paulus Gatot Rudianto
- Bupati: Evaristo Doutel Sarmento
- Kapolres: Mayor (Pol.) Drs. Rizali, SH
- Milisi: Mahidi, Laksaur
- Jumlah yang dibunuh: 34 orang

Kabupaten Ainaro mengalami tingkat kekerasan dan penghancuran yang jauh lebih tinggi daripada Kabupaten Aileu.* Setidaknya 34 orang dibunuh pada 1999. Hampir semua korban diketahui atau diduga pendukung kemerdekaan. Lebih daripada setengah dari pembunuhan ini (18 orang) terjadi di Kecamatan Ainaro.

* Kecuali dikemukakan lain, penjelasan ini didasarkan pada: UNTAET, DHRO-Ainaro, "Report on Human Rights Violations in 1999, Ainaro District," Mei 2001.

Diperkirakan 13.000 orang dipindahkan secara paksa di masa setelah pemungutan suara, dan sekitar 3.700 bangunan dibakar atau dihancurkan. Para anggota TNI dan kelompok milisi setempat, Mahidi, bertanggung jawab atas mayoritas besar pelanggaran hak asasi manusia di kabupaten tersebut, termasuk pembunuhan, upaya pembunuhan, penyiksaan dan penganiayaan, intimidasi, pemindahan paksa, dan perusakan tempat tinggal dan harta benda.

Milisi dan pihak berwenang

Kelompok milisi utama di Kabupaten Ainaro adalah Mahidi (Mati Hidup Integrasi dengan Indonesia). Mahidi secara resmi didirikan dalam sebuah upacara di Cassa pada Desember 1998.[*] Upacara peresmiannya tercatat dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, termasuk tokoh nasional pro-otonomi Francisco Lopes da Cruz. Namun unsur-unsur unit intelijen, SGI, yang dipimpin oleh Kopassus, disebut sebagai penyelenggara utama acara itu.[†] Pada saat peresmian, kelompok milisi itu disebut sebagai 'Halilintar 612' dan 'Batalion 612' yang mengesankan hubungan dengan TNI di Bobonaro.

Selama beberapa bulan berikutnya, cabang-cabang milisi Mahidi didirikan di tiap kecamatan dan desa di Ainaro. Pertengahan 1999 Mahidi diperkirakan berkekuatan setidaknya 1.000 orang yang dibagi ke dalam struktur bergaya militer, mulai dari Kompi, Peleton, dan Sel.[‡] Ada empat kompi utama (A, B, C dan D) ditambah satu kompi markas dan satu kompi perempuan.

Mahidi berada di bawah komando Cancio Lopes de Carvalho.[§] Adiknya, Nemesio de Carvalho, adalah wakil komandan Mahidi yang berbasis di Cassa dan bertanggung jawab untuk operasi di bagian selatan kabupaten ini. Wakil komandan kedua, Daniel Pereira, yang bermarkas di Manutassi, bertanggung jawab untuk operasi di bagian utara.

Seperti banyak milisi yang muncul pada 1999, Mahidi memiliki akar historis yang dalam dan hubungan yang telah lama dengan militer Indonesia. Asal-usulnya setidaknya dimulai pada 1991, ketika sebuah organisasi milisi yang bernama 'Organisasi Sukarelawan' dibentuk di Ainaro. Pemimpin kelompok tersebut tidak

---

* Sumber-sumber berbeda dalam menyebutkan tanggal tepat upacara tersebut. Banyak saksi yang mengatakan bahwa peresmian itu terjadi pada 17 Desember, tetapi yang lain mengatakan 31 Desember 1998. Satu memo tulisan tangan yang rinci dari Juli 1999 menyatakan bahwa Mahidi pertama kali dibentuk di Cassa pada 31 Desember (Koleksi SCU, Doc #268).

† Mereka mencakup Letnan Kolonel Nyus Rahasia, seorang perwira Kopassus—dan wakil Komandan TNI Sektor B—yang juga melatih milisi di Manatuto pada Mei dan Juni 1999. (Lihat ringkasan kabupaten: Manatuto.)

‡ Pada April 1999, beberapa laporan memperkirakan kekuatan Mahidi sekitar 2.000 orang dengan 500 pucuk senjata, tetapi organisasi-organisasi non-pemerintah setempat mengatakan bahwa angka sesungguhnya mendekati 1.000 orang dan 37 pucuk senjata. UNTAET Peace Keeping Force, *Militia Handbook*, Dili, 5 April 2001.

§ "Sesudah terjadinya pembantaian Santa Cruz, [Cancio Carvalho] bekerjasama dengan SGI (Intelijen Militer) dalam tindakan mereka memburu aktivis pro-kemerdekaan. Sejak 1996, ia tinggal di Kupang di mana ia bekerja di Departemen Kehakiman, sampai dengan jatuhnya Suharto." UNTAET, *Militia Handbook*.

lain adalah Cancio Carvalho, Komandan Mahidi. Lebih jauh, seperti Mahidi, wilayah basis Organisasi Sukarelawan adalah Desa Cassa di Kecamatan Ainaro. Bersama dengan Desa Manutassi, Desa Cassa juga salah satu basis kekuatan partai pro-Indonesia Apodeti pada 1975-1976. Pada pertengahan dasawarsa 1990-an, mereka yang kemudian menjadi pemimpin dan anggota Mahidi ambil bagian dalam program pelatihan militer yang diselenggarakan SGI di Aileu.

Jalinan kuat dengan militer ini sangat nyata terlihat pada 1999. Para perwira TNI menunjukkan dukungan mereka kepada Mahidi dengan menghadiri upacara peresmiannya, dan dengan mengadakan pertemuan bersama untuk 'sosialisasi' opsi otonomi. Di antara mereka yang hadir dalam pertemuan-pertemuan semacam itu adalah Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Paulus Gatot Rudianto.

TNI juga penting dalam pelatihan Mahidi, dan dalam perencanaan serta pelaksanaan operasi-operasinya. Satu pelatihan yang dijalankan oleh perwira-perwira Kodim, secara langsung diamati oleh para pejabat UNAMET pada Juni 1999. Pelatihan milisi juga dilaporkan diselenggarakan di kabupaten ini oleh perwira-perwira Kopassus yang bertugas di Sektor B. TNI juga merupakan sumber utama pasokan senjata bagi Mahidi. Seorang mantan anggota Hansip mengatakan kepada penyelidik PBB bahwa sejak akhir Desember 1998 senjata-senjata sudah dipasok kepada para komandan Mahidi, yang kemudian membagikannya ke kecamatan-kecamatan (Lihat Bab 7). Para pejabat UNAMET dan lainnya secara rutin menyaksikan anggota-anggota TNI dan Mahidi mengadakan patroli bersama.

Mahidi juga mendapatkan dukungan dari Polri, atau setidaknya mereka bisa beroperasi tanpa khawatir akan adanya campurtangan Polri. Seperti di wilayah Timor-Leste yang lain, Polri di Ainaro jelas-jelas tidak berniat bertindak mencegah atau menghentikan tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan milisi, atau menyelidiki laporan adanya tindakan semacam itu. Seorang mantan anggota Polri di Ainaro mengonfirmasi apa yang sudah dicurigai sejak lama ketika mengatakan kepada para penyelidik PBB bahwa Polri mendapat instruksi untuk melindungi dan membantu kelompok-kelompok pro-otonomi, dan menutup mata atas kejahatan terhadap para pendukung kemerdekaan.

Tentu saja ada perkecualian. Sejumlah anggota Polri asal Timor-Leste adalah pendukung kemerdekaan dan melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk membatasi atau mencegah kekerasan milisi. Tetapi konsekuensi dari usaha-usaha semacam itu bisa bersifat fatal. Pada 6 September 1999 misalnya, seorang petugas Polri di kampung Hatu-fae, Kecamatan Maubisse, ditembak mati ketika berusaha mencegah penjarahan dan pembakaran desa yang dilakukan oleh milisi. Khawatir akan mengalami nasib serupa, beberapa polisi yang bersimpati pada prokemerdekaan lari ke bukit-bukit atau ke Timor Barat ketika kekerasan meledak.

Selain bantuan yang diterima dari TNI dan Polri, Mahidi juga mendapat dukungan efektif dari pejabat penting pemerintah sipil, dan dari dua kelompok utama pro-otonomi, yaitu FPDK dan BRTT. Kenyataannya, kepemimpinan kelompok-kelompok yang berbeda ini saling tumpang tindih begitu signifikan, sehingga bisa dikatakan mereka sesungguhnya membentuk sebuah entitas tunggal yang berjalin kuat.

Camat Ainaro dan Hatobuilico misalnya, juga menjadi koordinator Mahidi di wilayah masing-masing. Dua wakil komandan Mahidi, Nemesio Carvalho dan Daniel Pereira, juga menjadi pemimpin FPDK, yang mendapatkan dukungan resmi pemerintah. Lebih daripada itu, keduanya adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ainaro. Akhirnya, pemimpin BRTT di Kabupaten Ainaro tidak lain adalah Bupati, Evaristo Doutel Sarmento.

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Seperti di kebanyakan wilayah Timor-Leste, pelanggaran berat hak asasi manusia terjadi sepanjang 1999, namun dengan puncak intensitas dan frekuensi pada periode pra-UNAMET dan setelah pemungutan suara. Sebanyak 34 pembunuhan tercatat terjadi dalam periode tersebut. Dalam periode ini pula terjadi peningkatan kasus-kasus penculikan, pemukulan, intimidasi, pemindahan paksa, kekerasan seksual, dan perusakan harta benda. Kekerasan paling buruk terpusat di dua kecamatan, yaitu Ainaro dan Maubisse, tetapi semua kecamatan mengalami kekerasan dan perusakan yang serius.

Periode pra-UNAMET ditandai suasana ketakutan dan intimidasi. Sedikitnya lima orang, semuanya pendukung kemerdekaan, dibunuh selama periode ini. Dua dari lima korban tersebut dibunuh dalam satu insiden pada 3 Januari 1999. Mereka terbukti dijadikan sasaran karena memprotes pembentukan milisi Mahidi di Cassa. Tiga korban lainnya dengan sengaja dibunuh setelah ditahan dan dipukuli oleh prajurit-prajurit TNI dan anggota-anggota Mahidi.

Seperti di bagian lain Timor-Leste, insiden pelanggaran berat hak asasi manusia terjadi lebih sedikit dalam periode UNAMET, namun pemukulan, penculikan, dan intimidasi oleh milisi dan TNI tetap berlanjut. Sasaran utama dari tindakan-tindakan ini adalah para pemimpin CNRT, aktivis mahasiswa yang berhubungan dengan DSMPTT, dan staf UNAMET. Pada 5 Agustus misalnya, milisi Mahidi menyerang suatu pertemuan di kota Ainaro yang diselenggarakan oleh DSMPTT, melukai seorang Polisi Sipil UNAMET. Polri gagal bertindak, dan menolak menyelidiki serangan itu dengan alasan bahwa UNAMET tidak seharusnya menghadiri pertemuan tersebut. Kemudian, ketika masa kampanye dalam bulan Agustus, satu kelompok Mahidi membakar habis kantor CNRT.

Hari pemungutan suara lebih menegangkan di Ainaro dibandingkan di banyak kabupaten lain. Di samping meluasnya intimidasi dan pengacungan senjataapi oleh TNI dan milisi, ada usaha yang tidak berhasil untuk membunuh seorang tokoh CNRT di Cassa.

Namun seperti juga di tempat lain di Timor-Leste, kekerasan dan penghancuran yang paling buruk terjadi setelah pemungutan suara, dan intensitasnya sangat tinggi setelah pengumuman hasil pemungutan suara pada 4 September. Pola ini hampir sama di setiap kecamatan. Tim gabungan TNI dan Mahidi bergerak secara sistematis dari desa ke desa, pertama memerintahkan penduduk untuk pergi, kemudian menjarah dan membakar semua rumah dan bangunan. Sebagian besar

penduduk diperintahkan pergi ke Kota Ainaro, dan dari sana diangkut dengan truk ke Timor Barat. Diperkirakan seluruhnya 13.000 orang yang dipindahkan secara paksa dengan cara ini.

Proses pengosongan dan perusakan disertai dengan pelanggaran berat hak asasi manusia, terutama pembunuhan yang selektif atau dengan sasaran tertentu. Sebagian besar dari pelanggaran ini dilakukan oleh tim gabungan TNI dan milisi Mahidi. Dalam beberapa kasus, terutama di Kecamatan Hato Udo, anggota-anggota milisi ABLAI dari kabupaten tetangga, Manufahi, juga terlibat.

Dalam beberapa kasus, pembunuhan dilakukan ketika korban berada dalam tahanan TNI. Salah satu kasus semacam ini terjadi pada 6 September di Kampung Aituto Rina, Kecamatan Hatubuilico, di mana dua orang laki-laki dipukuli dan kemudian dibunuh ketika ditahan di markas TNI. Kedua orang itu berada dalam kelompok besar yang ditangkap prajurit TNI dan milisi pada 5 September, lalu ditahan di pos TNI terdekat. Keesokan paginya, para pendukung kemerdekaan dipisahkan dari yang lain sebelum dipukuli dengan berat dan dibunuh.

Seperti dalam kasus di atas, mereka yang dijadikan sasaran umumnya adalah orang-orang yang diketahui sebagai pendukung kemerdekaan, tetapi korban juga termasuk anggota keluarga mereka. Pada 10 September misalnya, seorang anak perempuan berusia dua tahun ditembak di kepala dan mati di rumahnya di kampung Sebagalau, oleh milisi yang berusaha membunuh ayahnya.

Kasus kekerasan terburuk di kabupaten ini adalah pembantaian di Desa Maununu pada 23 September. Mahidi dan TNI telah meninggalkan Ainaro pada 21 September, tetapi dua hari kemudian satu kelompok yang terdiri atas enam puluh orang bersenjata kembali ke Maununu. Dalam operasi yang dikoordinasikan dengan seksama dan dilaksanakan dengan cara militer, orang-orang bersenjata itu—yang mungkin saja termasuk prajurit TNI—membunuh sedikitnya 11 orang, dan berusaha membunuh lima orang lainnya, membakar sebanyak 165 bangunan, dan memindahkan dengan paksa sekitar 75 orang penduduk desa.

Baucau (Kodim 1628)

- Dandim: Letnan Kolonel Hisar Richard Hutajulu
- Bupati: Virgílio Marçal
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Sodak C. Marpaung
- Milisi: Saka, Sera, Forum Komunikasi Partisan (FKP)
- Jumlah yang dibunuh: 43 orang

Kabupaten Baucau, tempat kota terbesar kedua Timor-Leste, menderita kekerasan dan penghancuran yang parah pada 1999.* Sedikitnya 43 orang dibunuh selama

* Kecuali disebut lain, penjelasan ini berdasar pada: UNTAET, DHRO-Baucau, "Baucau 1999 Report" [tanpa tanggal].

1999 dan setengah dari jumlah tersebut dibunuh dalam masa setelah pemungutan suara. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, terjadi penghancuran fisik yang luas sesudah pemungutan suara, dan diperkirakan 5.000 orang dipaksa meninggalkan rumah mereka. Meskipun demikian, mengingat ukuran dan arti penting politik kabupaten ini, kekerasan di Baucau relatif terbatas.

Sebagian besar dari orang yang dibunuh adalah pendukung kemerdekaan, sementara lima orang adalah prajurit TNI atau pendukung otonomi. Pelaku utama kekerasan adalah kelompok milisi setempat, Saka, dan berbagai unit TNI termasuk Rajawali dan Batalion Infanteri 745. Kelompok-kelompok milisi yang lain, yaitu Sera dan Forum Komunikasi Partisan (FKP) juga berperan.

Milisi dan pihak berwenang

Kelompok milisi utama di Kabupaten Baucau adalah Saka (alias Tim Saka dan Tim Pusaka). Sebagian besar anggotanya memiliki senjata, peralatan komunikasi yang canggih, dan peralatan militer lainnya. Awalnya dibentuk pada saat dilancarkannya 'Operasi Kikis' oleh tentara Indonesia pada 1983, Saka telah lama memiliki hubungan yang kuat dengan TNI. Seorang bintara di Kodim Baucau, Sersan António Monis, bertanggung jawab langsung atas hubungan dan operasi Saka.

Komandan Saka, Joanico Cesario Belo, adalah seorang bintara Kopassus. Sebagai 'murid' dari perwira Kopassus yang terkenal dan menantu Soeharto, Prabowo Subianto, Belo membawa kartu nama dengan lambang Kopassus yang menyebut dirinya sebagai 'Komandan Kompi Khusus Pusaka' (Dan Ki Sus Pusaka).[*] Ia menjadi komandan Saka sejak 1996 dan juga komandan seluruh milisi untuk wilayah timur (PPI, Sektor A), yang membawahi Makikit dan 59/75 Junior di Viqueque, Tim Alfa di Lautém, Moruk di Manatuto, dan Saka maupun Sera (Tim Sera) di Baucau.

Walau merupakan milisi yang paling aktif dan paling besar di Baucau, dan bertanggung jawab atas banyak pembunuhan dan tindak kekerasan lainnya, Saka pada umumnya kurang agresif dibandingkan kelompok milisi lain seperti BMP di Liquiçá dan Aitarak di Dili. Agaknya salah satu sebabnya adalah rendahnya dukungan dari Bupati, Virgílio Marçal (seorang asli Baucau yang cukup dihormati di kabupaten ini), dan dari Dandim Letnan Kolonel Richard Hutajulu.

Resminya, para pejabat ini mendukung Saka. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, dana mengalir ke kelompok ini dari kantor Bupati dan melalui Kodim. Walaupun demikian, Bupati dan Dandim mengungkapkan kepada UNAMET kekhawatiran mereka mengenai milisi, dan keinginan mereka untuk menjamin Konsultasi Rakyat yang damai. Sikap mereka mungkin dipengaruhi oleh pandangan Uskup Baucau, Basilio do Nascimiento, seorang tokoh yang berpengaruh dan sangat dihormati di Baucau, dan di seluruh Timor-Leste.

Juga ada sikap mendua di dalam Saka sendiri. Beberapa anggota Saka tampaknya bersimpati pada kemerdekaan, dan diam-diam membantu Falintil dengan

* Satu lembar kartu nama Cesario dimiliki oleh penulis.

mengirim uang dan makanan yang mereka terima sebagai milisi. Bahkan Komandan Saka, Joanico Cesario Belo, tampak kurang yakin. Dalam periode sebelum pemungutan suara, pernyataan-pernyataannya di depan umum jarang segarang Eurico Guterres, Cancio Carvalho, dan pemimpin-pemimpin milisi yang lain. Dalam periode pasca-pemungutan suara, ia dilaporkan membantu banyak orang prokemerdekaan meninggalkan Dili menuju Baucau, mungkin menyelamatkan banyak nyawa.

Kelompok milisi kedua di Baucau adalah Tim Sera. Dipimpin oleh Agostino Freitas Boavida (alias Sera Malik), Tim Sera juga dibentuk dalam dasawarsa 1980-an dan memiliki hubungan kuat dengan TNI. Namun kelompok ini jauh lebih kecil dan kurang aktif dibanding Saka.

Kelompok milisi terakhir di Baucau, yaitu Forum Komunikasi Partisan (FKP), baru dibentuk sekitar Juli-Agustus 1999. Nama kelompok itu mengingatkan pada kelompok milisi pertama yang dibentuk TNI pada 1975-1976, yang disebut 'Partisan'. Beberapa anggota FKP disebut-sebut sebagai anggota kelompok yang lama. FKP dibentuk atas inisiatif Kepala Staf Kodim Baucau, Kapten Karel Pola, walaupun ada usaha-usaha dari pihak berwenang setempat dan pejabat UNAMET untuk mencegahnya. Situasi saat pembentukan milisi ini dengan jelas menunjukkan bahwa FKP merupakan proyek TNI yang ditujukan untuk menambah atau menggantikan kelompok milisi yang dianggap tidak cukup aktif.

Kontroversi mengenai pembentukan FKP—seperti yang dilaporkan oleh UNAMET pada 1999—menjelaskan sebab-sebab lebih lanjut mengapa tingkat kekerasan di Kabupaten Baucau relatif rendah. Kontroversi itu menegaskan, misalnya, bahwa Bupati Virgílio Marçal dan Dandim Letnan Kolonel Richard Hutajulu kurang mendukung kekerasan milisi dibanding rekan-rekan mereka di kabupaten lain. Kontroversi itu juga menegaskan ketidaksetujuan kuat Uskup terhadap dukungan TNI kepada milisi, dan keinginannya untuk bertindak mendesak pihak berwenang Indonesia agar membatasi kegiatan milisi.

Ketiga orang ini mengungkapkan kekhawatiran mereka kepada UNAMET bahwa usaha-usaha Kapten Pola akan menimbulkan kekerasan, dan mereka mendukung usaha untuk membuatnya ditarik dari Kabupaten Baucau. Semua pihak mengungkapkan kelegaan dan kepuasan pada pertengahan Juli ketika menerima berita bahwa Pola telah dipindahkan. Kemudian, ketika ia muncul kembali di Kabupaten Baucau pada 2 Agustus, Uskup mengatakan bahwa orang itu pasti mendapat dukungan dari satu atau lebih jenderal di Jakarta. Segera setelah Kapten Pola kembali, usaha-usaha penggalangan FKP kembali dilanjutkan, dan pada minggu kedua Agustus satuan-satuan milisi yang baru sudah ada di semua kecamatan. Dipimpin oleh José Manuel dos Reis (alias José Bife), FKP merupakan gabungan yang terdiri atas mantan Partisan, pegawai negeri sipil, dan mantan anggota milisi Saka dan Sera. Bersama dengan Saka dan TNI, mereka adalah penanggungjawab utama pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa sesudah pemungutan suara.

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Seperti di banyak kabupaten lain, kekerasan paling serius di Baucau terjadi dalam periode pra-UNAMET dan sesudah pemungutan suara. Hampir semua pembunuhan pada 1999 terjadi antara Januari dan Mei, atau September 1999. Periode UNAMET ditandai dengan terjadinya intimidasi sistematis, termasuk ancaman terbuka akan adanya kekerasan, pemukulan, dan sebagainya, tetapi tampaknya tidak ada pembunuhan.

Banyak pelanggaran berat hak asasi manusia dalam periode pra-UNAMET, termasuk sejumlah pembunuhan, dilakukan oleh prajurit TNI dan Kopassus. Beberapa pembunuhan ini dilakukan sebagai tindakan pembalasan terhadap serangan Falintil atau Klandestin. Salah satu kasus semacam itu terjadi di wilayah Uaibeana dan Burburaca, pada 17 Maret 1999. Rupanya sebagai pembalasan atas pembunuhan terhadap seorang prajurit TNI pada bulan yang sama, lima orang pemuda ditahan dan dibunuh oleh TNI. Tiga dari lima korban itu kemudian ditemukan dalam sebuah kuburan yang dangkal di Triloka, dekat bandar udara Baucau. Sedang tubuh dua korban lainnya sampai awal 2003 masih belum ditemukan.

Kabupaten Baucau tenang pada hari pemungutan suara dan beberapa hari pertama pada September. Namun pada 3 September, milisi mulai muncul di jalan-jalan kota Baucau, sebagian dari mereka membawa dan menembakkan senjata otomatis. Pada malam 4, 5, dan 6 September sejumlah orang mengendarai sepeda motor mengelilingi kota dan menembakkan senapan-senapan mereka ke udara. Sementara sebagian lainnya memutari atau melintasi rumah-rumah UNAMET dan Civpol, melemparkan batu-batu, menghancurkan jendela-jendela mobil, dan menembakkan senjata.

Pada 7 September, kantor UNAMET di kota Baucau diserang. Serangan itu berlangsung selama sekitar satu jam. Selama itu pula rentetan tembakan senjataapi memasuki bangunan dengan ketinggian sebatas dada. Para Perwira Penghubung Militer (MLO) di luar melaporkan bahwa tembakan-tembakan itu dilakukan oleh Polisi Indonesia, kemungkinan Brimob. Sekitar dua jam setelah serangan dimulai, satu unit TNI muncul di tempat kejadian. Beberapa waktu kemudian UNAMET diungsikan ke Dili dengan helikopter.

Pada saat itu kekerasan paling buruk mulai terjadi, dan ini terus berlanjut sampai akhir September. Selama tiga minggu kemudian, enam orang dibunuh di kecamatan Baucau; lima di Venilale; empat di Laga, tiga di Quelicai, dua di Vemasse, dan seorang di Baguia. Sebagian pembunuhan ini dilakukan oleh pasukan TNI, termasuk beberapa yang dilakukan oleh Batalion Infanteri 745 ketika melintasi Baucau dalam perjalanan dari Los Palos ke Dili akhir September. (Lihat studi kasus: Amuk Batalion 745.)

Selain pembunuhan terhadap 21 orang ini, satuan-satuan TNI dan milisi melakukan kekerasan di sebagian besar wilayah kabupaten ini, pembakaran atau perusakan rumah-rumah, bangunan-bangunan pemerintah, binatang ternak, dan persediaan pangan. Beberapa wilayah menderita kerusakan relatif kecil, termasuk Baucau Kota

dan kecamatan Venilale. Wilayah lain mengalami kerusakan berat, terutama di Kecamatan Quelicai, pusat kegiatan milisi, dan Laga.

Di Quelicai, pada 7 September, anggota milisi Saka gagal menangkap sejumlah pemimpin CNRT. Keesokan harinya, 8 September, anggota milisi dan prajurit TNI bersama-sama membakar habis kantor CNRT dan semua rumah serta bangunan yang ada di sepanjang jalan utama. Pada 9 September, prajurit TNI di Laga bersama milisi Saka dan Sera memaksa penduduk berkumpul di markas TNI untuk diangkut dengan perahu menuju Timor Barat.

Selama September, setidaknya 5.000 orang, dan mungkin lebih banyak lagi, meninggalkan rumah mereka baik karena intimidasi langsung oleh pasukan milisi dan TNI, atau karena ketakutan yang umum akan terjadinya kekerasan. Pasukan Interfet tiba di Baucau akhir September, dan kekerasan berhenti segera sesudahnya.

Bobonaro (Kodim 1636)

- Dandim: Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian
- Bupati: Guilherme dos Santos
- Kapolres: Mayor (Pol) Drs. Budi Susilo
- Milisi: Halilintar, Dadurus Merah Putih, Firmi Merah Putih, Saka Loromunu, ARMUI Merah Putih, Guntur Merah Putih, Hametin Merah Putih, Harimau Merah Putih, Kaer Metin Merah Putih.
- Jumlah yang dibunuh: 229 orang

Kabupaten Bobonaro adalah salah satu pusat utama kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pro-otonomi pada 1999.* Setidaknya 229 orang dan mungkin sebanyak 300 orang dibunuh selama tahun itu. Banyak lainnya mengalami pemukulan, penyiksaan, pemindahan paksa, dan penghancuran harta benda. Diperkirakan 8.612 rumah dibakar, dan lebih daripada 4.382 lainnya dirusak hingga tidak bisa ditempati. Kejahatan berbasis gender, termasuk pemerkosaan dan perbudakan seksual, juga umum dilaporkan.

Kebanyakan korban adalah pendukung kemerdekaan, walaupun sekitar 20 pendukung pro-otonomi atau prajurit TNI termasuk di antara yang mati. Para pelaku kekerasan umumnya adalah anggota dari salah satu kelompok milisi yang beroperasi di kabupaten ini, tetapi juga prajurit TNI dan Polri. Kelompok-kelompok ini hampir selalu dipimpin atau diarahkan oleh anggota unit-unit intelijen TNI.

---

* Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini berdasar pada: UNTAET, DHRO-Bobonaro, “Bobonaro District Report 1999,” September 2002; Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Lt. Col. Burhanuddin Siagian et al., 3 Februari 2003; dan General Prosecutor of Democratic Republic of East Timor, Indictment against Lt. Sutrisno et al., Juni 2002.

Milisi dan pihak berwenang

Bobonaro memiliki jaringan kelompok milisi dan paramiliter yang sangat hebat pada 1999.* Setidaknya ada sembilan kelompok milisi pada akhir 1998 dan awal 1999, dan semuanya mendapat dukungan penuh dari pihak berwenang sipil dan militer.

Kelompok utama milisi adalah kesatuan paramiliter Halilintar, yang resminya dipimpin oleh panglima tertinggi milisi, João Tavares. Halilintar didirikan saat invasi Indonesia pada 1975 tetapi kemudian tertidur selama beberapa tahun dan baru dibangkitkan kembali pertengahan dasawarsa 1990-an. Walaupun total jumlah anggota kesatuan milisi ini pada 1999 hanya sekitar 120 orang, namun milisi ini beroperasi di seluruh kabupaten dan di luarnya, dan mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan TNI.† Sebagai sebuah kesatuan elite, anggotanya menerima Rp300.000,00 per bulan, berikut seragam dan senjataapi. Mereka juga dipercaya untuk bergabung dengan SGI dan kesatuan-kesatuan reguler TNI dalam operasi tempur dan kontrapemberontakan.

Di bawah Halilintar ada beberapa kesatuan milisi dengan ukuran yang beragam. Sebagian besar dari mereka dibentuk awal 1999. Setidaknya satu kelompok didirikan di keenam kecamatan yang ada di kabupaten Bobonaro, dan beberapa kecamatan memiliki dua kelompok. Di antara yang paling aktif dan paling sering terlibat dalam tindak kekerasan yang serius adalah DMP (Dadurus Merah Putih) yang berpusat di Kecamatan Maliana. Dipimpin oleh bintara aktif TNI, Sersan Domingos dos Santos, kelompok ini berperan penting dalam penyerangan terhadap markas UNAMET di Maliana akhir Juni 1999, pembunuhan terhadap dua orang staf UNAMET pada 2 September, dan pembunuhan massal di kantor polisi Maliana 8 September.

Seperti di kabupaten-kabupaten lain, sebagian besar kekerasan milisi di Bobonaro dikoordinasi oleh dan dilaksanakan dengan persetujuan pihak berwenang militer dan sipil. Pejabat utama di Bobonaro adalah: Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian; Kepala Seksi Intelijen Kodim, Letnan Sutrisno; dan Bupati Guilherme dos Santos. Di samping itu, kepemimpinan setiap kelompok milisi di tingkat kecamatan dipengaruhi, dan dalam beberapa kasus didominasi oleh, para bintara TNI aktif dan pensiunan.‡ Orang-orang ini dalam kerjanya dibantu oleh sejumlah tokoh pro-otonomi setempat, termasuk komandan milisi João Tavares; wakil ketua FPDK, Natalino Monteiro; pemimpin BRTT, Francisco Soares; dan Ketua DPRD tingkat II Kabupaten Bobonaro, Jorge Tavares.

---

* Peter Bartu, yang pernah bekerja sebagai Pejabat Urusan Politik UNAMET di Bobonaro, menulis bahwa "struktur milisi di kabupaten Bobonaro adalah yang paling berkembang dalam arti organisasi dan pendanaan." Bartu, "The Militia, the Military, and the People of Bobonaro," dalam Tanter, Selden dan Shalom (penyunting), *Bitter Flowers, Sweet Flowers: East Timor, Indonesia, and the World Community*, Rowman & Littlefield, 2001, halaman 78.

† Tentang hubungan Halilintar dengan TNI, Bartu menulis: "Tentunya milisi ini memiliki hubungan yang dekat dengan Satgas Intel (Satuan Tugas Intelijen, SGI), unit intelijen Kopassus yang mengarahkan pembentukannya kembali, memperhatikan kebutuhan logistiknya, dan menyediakan pengawal bagi Tavares, serta melatih kader seniornya." Bartu, "The Militia," halaman 80.

‡ Bartu menulis: "TNI sangat terlibat dalam semua aspek kegiatan milisi di Kabupaten Bobonaro yang

Tabel 4: Kelompok milisi pro-Indonesia di Kabupaten Bobonaro	
Nama milisi	Kecamatan
Halilintar	Maliana, Atabae
Dadurus Merah Putih	Maliana
Firmi	Balibó
Saka Loromunu	
ARMUI Merah Putih	Atabae
Guntur Merah Putih	Cailaco
Hametin Merah Putih	Bobonaro
Harimau Merah Putih	
Kaer Metin Merah Putih	Lolotoe

Dukungan resmi bagi milisi bentuknya bermacam-macam, termasuk penggalangan, pelatihan, penyediaan senjata dan dukungan logistik, serta pendanaan. Bukti tentang pendanaan resmi kepada milisi dan kelompok pro-otonomi lainnya sangat banyak di Bobonaro. Dokumen-dokumen yang dibocorkan dari pemerintahan kabupaten selama 1999 mengungkap, misalnya, bahwa Bupati meminta dana sekitar Rp3 miliar dari Gubernur untuk kegiatan 'sosialisasi' dan sekitar 35% dari jumlah tersebut disediakan untuk kelompok-kelompok milisi dengan berbagai samaran. Dokumen-dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa, ketika keuangan mulai menipis pada Juli 1999, Bupati meminta persetujuan dari Gubernur untuk mengalihkan dana dari mata anggaran lain—termasuk pendidikan dan pekerjaan umum—untuk menutupi biaya kampanye 'sosialisasi'. Dokumen-dokumen ini dianalisis secara terperinci dalam Bab 8 laporan ini.

Seperti di kabupaten-kabupaten lain, pihak Polri menyatakan tidak berdaya di hadapan dukungan pemerintah sipil dan militer yang kuat kepada milisi. Salah seorang perwira senior tercatat menggambarkan masalahnya kepada UNAMET sebagai berikut: "Jika kami menahan seorang milisi, Dili dan Jakarta akan menyuruh kami untuk melepaskannya. Jika kami menembak salah satu dari mereka, maka kami tahu mereka akan menyerang kantor kami di kabupaten."* Apakah karena ketidakberdayaan mereka ataukah karena dukungan aktif mereka pada pihak pro-otonomi, Polri menjalankan peran pembantu melalui kegagalannya menghentikan atau mencegah tindak kekerasan, atau kegagalannya mengambil tindakan terhadap mereka yang diketahui melakukan pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

bertujuan memenangkan pilihan pro-otonomi dalam Konsultasi Rakyat. Pada tingkat yang lebih tinggi para pemimpin milisi kecamatan dikoordinasikan dan diarahkan oleh Dandim dan kepala intelijennya dari Kodim dan dari kantor bupati. Pada tingkat kecamatan milisi dipimpin secara langsung oleh personel TNI atau secara langsung didukung oleh staf Koramil. Pada tingkat desa milisi bekerja saling membantu dengan pos-pos militer dan Babinsa." Bartu, "The Militia," halaman 88.

* Dikutip dalam Bartu, "The Militia," halaman 75.

Peristiwa utama hak asasi manusia

Sebagaimana yang terjadi di beberapa kabupaten lain, kekerasan terhadap orang-orang dan desa-desa yang mendukung kemerdekaan dimulai bahkan sebelum pernyataan Presiden Habibie akhir Januari 1999. Walau begitu, baru pada Maret 1999 kekerasan anti-kemerdekaan menjadi sistematis dan luas di Bobonaro. Dalam bulan itu kesatuan-kesatuan TNI dan SGI melancarkan penggerebekan terhadap pertemuan-pertemuan yang diduga diadakan CNRT, dan terhadap desa-desa yang dianggap bersimpati pada Falintil. Sejumlah orang dibunuh dalam serangan-serangan tersebut.

Misalnya, pada 19 Maret prajurit TNI dan anggota milisi Halilintar yang bersenjata lengkap dan memakai topeng "Ninja" menggerebek apa yang mereka kira pertemuan klandestin prokemerdekaan di Desa Moleana, Kecamatan Maliana. Dalam penyerangan itu empat orang terbunuh, termasuk dua anak-anak.[*] Beberapa hari kemudian, pada 22 Maret, beberapa prajurit memukul seorang pemimpin CNRT yang terkenal di hadapan umum sampai babak belur lalu menyeretnya melalui jalan-jalan kota menuju markas TNI setempat. Korban yang bernama José Andrade da Cruz itu akhirnya dibebaskan. Tetapi pemukulan terhadap dirinya di hadapan umum dan serangan terhadap pertemuan CNRT telah menciptakan ketakutan yang menyebar luas di kalangan pendukung kemerdekaan. Akibatnya, ratusan orang meninggalkan rumah mereka dan pergi ke Dili atau gereja-gereja setempat yang relatif aman. Pengungsian paksa penduduk dan persoalan penduduk yang terusir dari tempat tinggal mereka yang terus berlanjut selama tahun itu, telah dimulai.

Keadaan terus memburuk pada April dengan diresmikannya kelompok-kelompok milisi baru dan penggalangan mereka dalam konteks kampanye 'sosialisasi' yang diselenggarakan pemerintah. Hanya beberapa hari setelah peluncuran resmi kampanye itu, para prajurit TNI yang beroperasi bersama milisi Halilintar dan kesatuan-kesatuan milisi lainnya memulai salah satu operasi pembunuhan di luar hukum yang paling terkonsentrasi dalam beberapa tahun ini. Operasi ini dimulai dengan eksekusi terhadap tujuh orang dalam satu hari di Kecamatan Cailaco. Para saksi mengatakan bahwa eksekusi tersebut diperintahkan oleh Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian, dan Kepala Seksi Intelijen Kodim, Letnan Sutrisno. Selama dua minggu selanjutnya sebanyak 20 orang dibunuh di Kecamatan Cailaco. Operasi itu kemudian diikuti dengan penyergapan dan pembunuhan terhadap kepala bagian keuangan kabupaten dan tokoh pro-otonomi, Manuel Gama, pada 12 April.[†] (Lihat studi kasus: Pembunuhan di Cailaco).

Rangkaian pembunuhan itu memicu gelombang baru pengungsian dalam negeri di Cailaco, karena penduduk desa menyelamatkan diri ke gunung-gunung, atau

* UNTAET, DHRO-Bobonaro, "Background Information Concerning the 19 March Attack," 20 Maret 2001.

† Tidak jelas siapa yang membunuh Manuel Gama. Beberapa pengamat menyimpulkan bahwa pembunuhan itu mungkin saja dilakukan oleh satu unit Falintil. Di lain pihak, Bartu mengatakan: "Bobot bukti menunjukkan bahwa Gama dibunuh oleh tim gabungan Halilintar/SGI/TNI, sebagai dalih untuk penyerangan di seluruh kabupaten terhadap para pendukung kemerdekaan." Bartu, "The Militia," halaman 82.

ke kota dan desa di sekitarnya. Lebih daripada 4.000 orang pindah dari empat desa ke kamp-kamp kasar di ibukota kecamatan, di mana mereka ditempatkan di bawah "perlindungan" kelompok-kelompok milisi. Milisi mengatakan kepada para pengungsi bahwa mereka tidak akan bisa kembali ke rumah sampai sesudah pemungutan suara selesai.* Di tempat lainnya di kabupaten ini, rumah dua orang pemimpin terkemuka CNRT dibakar dan dijarah, dan kedua orang itu terpaksa mengungsi ke kantor Polres Maliana.

Pada Mei, fokus operasi TNI dan milisi beralih ke Kecamatan Lolotoe. Seperti Cailaco, daerah ini juga dianggap sebagai basis prokemerdekaan. Selama beberapa hari pada akhir Mei, pasukan TNI bersama anggota milisi Kaer Metin Merah Putih (KMP) melancarkan operasi pembersihan. Ratusan orang yang dicurigai pendukung kemerdekaan dan pemimpin CNRT diringkus. Mereka ditahan dan banyak di antaranya dipukuli hingga babak belur, beberapa orang disiksa atau dipotong anggota tubuhnya oleh para penangkapnya dengan tujuan memaksa mereka mengakui hubungan mereka dengan Falintil. Beberapa kejadian pemerkosaan dan perbudakan seksual oleh TNI dan anggota milisi juga dilaporkan dalam konteks penyerangan-penyerangan ini. (Lihat studi kasus: Penahanan sewenang-wenang dan pemerkosaan di Lolotoe).

Pada 1 Juni, dalam suatu arak-arakan besar pro-otonomi di Maliana, para pemimpin CNRT yang berada dalam penahanan perlindungan sejak April dipaksa menandatangani deklarasi yang secara resmi "membubarkan" CNRT. Deklarasi itu kemudian dikutip oleh pihak pro-otonomi untuk membuktikan bahwa CNRT sudah menyerahkan haknya berkampanye untuk Konsultasi Rakyat. Berhadapan dengan taktik semacam itu, dan ancaman kekerasan, CNRT memilih tidak berkampanye di depan umum.

Seperti di kabupaten-kabupaten lain, tingkat pembunuhan menurun pada Juni seiring dengan penempatan UNAMET dan pengamat internasional. Namun, kehadiran UNAMET tidak mengakhiri kegiatan-kegiatan lain kelompok pro-otonomi atau penjarahan oleh milisi. Bahkan selama periode ini UNAMET dan staf lokalnya menjadi sasaran kekerasan milisi. Pada 29 Juni, misalnya, satu gerombolan milisi menyerang kantor UNAMET yang baru dibuka di Maliana. Mereka mengakibatkan beberapa orang luka berat dan menimbulkan kerusakan luas barang-barang. Satu penyelidikan UNAMET mengenai kejadian ini menyimpulkan bahwa penyerangan tersebut diorganisasi oleh seorang perwira senior TNI di kabupaten, dan bahwa tindakan Polri terhadap serangan tersebut samasekali tidak memadai. (Lihat studi kasus: Serangan terhadap UNAMET Maliana.)

Protes internasional mengenai serangan tersebut, dan juga mengenai serangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan di Liquiçá beberapa hari kemudian, membuat keadaan keamanan membaik untuk sementara waktu. Namun tak lama kemudian milisi bersenjata kembali bebas berkeliaran di seluruh kabupaten, mengancam para pendukung kemerdekaan dan staf UNAMET. Lebih buruk

* Bartu, "The Militia," halaman 83.

lagi, amat jelas bahwa mereka mendapat dukungan penuh tidak hanya dari Dandim, Letnan Kolonel Siagian, tetapi juga dari Bupati, Guilherme dos Santos. Menjelang pemungutan suara, kedua orang itu menunjukkan sikap semakin bermusuhan terhadap UNAMET. Pada pertengahan Juli, Guilherme dos Santos mengancam membunuh personel UNAMET dari Australia,[*] dan setidaknya pada dua kesempatan Letnan Kolonel Siagian secara langsung mengatakan kepada para anggota staf lokal UNAMET bahwa mereka akan dibunuh setelah Konsultasi Rakyat.[†]

Ketegangan ini mencapai puncaknya menjelang akhir masa pendaftaran awal Agustus. Dengan menekankan bahwa proses pendaftaran tidak adil pada pihak pro-otonomi, Bupati mengancam akan menahan staf UNAMET jika satu saja penduduk kabupaten ini tidak dapat mendaftar. Dalam tanggapannya kepada wartawan pada masa yang sama, Guilherme dos Santos juga kelihatan mengancam staf UNAMET dengan tindak kekerasan. Krisis yang ditimbulkannya dapat dicegah melalui pertemuan langsung antara Bupati dan Kepala Misi UNAMET, Ian Martin, pada 3 Agustus, dan melalui perpanjangan batas waktu pendaftaran.

Namun, permusuhan resmi terhadap UNAMET dan ancaman terbuka terhadap pendukung kemerdekaan terus berlanjut dan berkembang menjadi kekerasan serius pada hari-hari terakhir menjelang pemungutan suara. Pada 18 Agustus, seorang aktivis muda prokemerdekaan diseret dengan sebuah bus di kota Maliana oleh milisi DMP, dan dibacok hingga mati. Pada 27 Agustus, milisi dan anggota Polri menyerang penduduk di Desa Memo, Kecamatan Maliana, membunuh sedikitnya dua orang dan menghancurkan sekitar 20 buah rumah.

Akhir Agustus, Kantor Urusan Politik UNAMET melapor kepada markas besar PBB di New York bahwa kecuali jika ada perubahan keadaan yang dramatis atau penempatan pasukan penjaga perdamaian, akan semakin banyak kekerasan besar-besaran di Kabupaten Bobonaro setelah pemungutan suara.[‡] Penduduk Bobonaro umumnya berpandangan sama, dan banyak dari mereka melarikan diri ke gunung-gunung atau tempat-tempat persembunyian yang lain, beberapa jam setelah memberikan suara.

Pada 2 September, kekerasan yang sudah luas diperkirakan pun dimulai, dan ketika UNAMET mengevakuasi semua staf internasional pada 3 September, kekerasan itu semakin meningkat. Dengan dukungan dan koordinasi pasukan-pasukan TNI dan Polri, milisi memulai operasi kekerasan yang sistematis di kota-kota dan desa-desa di seluruh kabupaten ini. Ribuan rumah dijarah dan dibakar, dan puluhan ribu penduduk diangkut paksa dengan truk ke Timor Barat.

---

* "Mayor threatens to kill Aussies," *Sydney Morning Herald*, 17 Juli 1999.

† Bartu, "The Militia," halaman 88.

‡ UNAMET, Political Affairs Office, "Weekly Sitrep #7 (16 August – 22 August)." Dimuat dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

Keseluruhan jumlah orang yang dibunuh di kabupaten ini pada September 1999 diyakini sedikitnya mencapai 111 orang, dan beberapa perkiraan menyebutkan jumlahnya mencapai 200 orang. Namun karena besarnya kemungkinan bahwa sebanyak 40 mayat dihanyutkan ke laut selama periode ini, jumlah orang yang meninggal, atau tempat peristirahatan terakhir mereka, tidak akan pernah diketahui.

Seperti di kabupaten-kabupaten lain, para pemimpin dan pendukung kemerdekaan secara khusus menjadi sasaran dalam kekerasan setelah pemungutan suara di Bobonaro. Demikian juga dengan staf lokal UNAMET. Di antara korban pertama setelah 30 Agustus adalah dua staf UNAMET di Maliana, Ruben B. Soares dan Domingos Pereira, yang dibunuh di depan rumah mereka pada 2 September. Pembunuh mereka antara lain adalah Kepala Seksi Intelijen Kodim Bobonaro, Letnan Sutrisno dan seorang perwira intelijen TNI, Asiz Fontes, yang merangkap sebagai komandan milisi DMP di kota Maliana.[*] Di bawah pengamatan Letnan Sutrisno dan Fontes, beberapa orang milisi menyeret Ruben B. Soares dari rumahnya sebelum menikamnya berulang-kali dan menghantam kepalanya dengan sebuah batu. Pada waktu yang hampir bersamaan perwira intelijen TNI, Asiz Fontes, menembak Domingos Pereira sementara milisi menikamnya berulang kali. Kedua orang itu meninggal karena luka-lukanya. Letnan Sutrisno dan Asiz Fontes didakwa, bersama dengan delapan orang lainnya, atas pertanggungjawaban pidana individual untuk pembunuhan itu.[†]

Selain pembunuhan terencana ini dan belasan lainnya terhadap individu atau kelompok kecil orang, di Bobonaro juga terjadi sejumlah pembantaian massal pada September 1999. Pembantaian paling mengerikan dan juga paling mengungkap hubungan antara milisi dan pihak berwenang militer dan Polri adalah pembantaian terhadap pengungsi di kantor Polres Maliana, tempat pengungsian sekitar 6.000 orang beberapa hari setelah pemungutan suara.

Pada pukul 17.30 tanggal 8 September, saat polisi berdiri menjaga, sebuah tim gabungan milisi dan prajurit TNI yang memakai topeng “Ninja” menyerang kantor polisi dan membunuh 14 orang pengungsi dengan parang dan pisau. Mereka yang meninggal mencakup sejumlah tokoh terkemuka CNRT yang jelas dijadikan sasaran eksekusi. Tiga belas orang yang berhasil meloloskan diri dari pembantaian di kantor Polri itu dilacak dan dieksekusi oleh pasukan TNI dan milisi pada hari berikutnya di Desa Mulau. Pada 10 September, dua orang anggota polisi dibunuh karena dianggap berpihak pada kubu prokemerdekaan, dan jasad mereka dibuang ke dalam sumur di kantor Polres. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Kantor Polisi Maliana).

Para pelaku kunci kekerasan setelah pemungutan suara di Bobonaro adalah anggota berbagai kelompok milisi di kabupaten. Namun, pada tingkat yang lebih tinggi daripada periode sebelum pemungutan suara, pada September milisi mendapat dukungan aktif dari TNI dan persetujuan atau dukungan penuh dari Polri dan

---

* Lihat Bartu, “The Militia,” halaman 88.

† General Prosecutor of the Democratic Republic of East Timor, Indictment against Lt. Sutrisno et al., Juni 2002.

pejabat pemerintah sipil. Mereka yang mengoordinasi kekerasan di tingkat kabupaten adalah sejumlah tokoh terkenal: Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian yang konon sudah digantikan sebagai Dandim pada pertengahan Agustus; Letnan Sutrisno, Kepala Seksi Intelijen Kodim; Guilherme dos Santos, Bupati; dan João Tavares, panglima tertinggi seluruh pasukan milisi. Sampai awal 2003, tidak satu pun dari mereka ditahan atau diadili.

Covalima (Kodim 1635)

- Dandim: Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus; Letnan Kolonel Liliek Koeshadianto
- Bupati: Kolonel Herman Sedyono
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol) Gatot Subiaktoro
- Milisi: Laksaur, Mahidi
- Jumlah yang dibunuh: 190 orang

Kabupaten Covalima adalah tempat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang meluas baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara 1999.* Setidaknya 190 orang, dan mungkin lebih banyak lagi, dibunuh selama 1999, sementara ribuan orang dipindahkan secara paksa. Banyak kasus pemukulan, penyiksaan, dan intimidasi dilaporkan terjadi selama 1999, sebagaimana juga beberapa kejadian kekerasan seksual.

Milisi dan pihak berwenang

Kelompok milisi utama di Covalima adalah Laksaur (alias Laksaur Merah Putih). Mahidi, kelompok milisi yang berbasis di Ainaro juga beroperasi di beberapa bagian Kabupaten Covalima, dan memiliki cabang di Kecamatan Zumalai. Setidaknya dalam satu kesempatan, pada akhir Juni 1999, anggota kelompok milisi yang berbasis di Dili, Aitarak, juga dilaporkan beroperasi di kabupaten ini.†

Laksaur dibentuk Januari 1999, dan diresmikan pertengahan April. Pada pertengahan 1999, Laksaur adalah salah satu kelompok milisi terbesar di Timor-Leste, dengan perkiraan kekuatan sekitar 600 hingga 1.000 orang. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, Laksaur tumbuh dari organisasi paramiliter lama, dan pemimpinnya pun berhubungan erat dengan pihak berwenang sipil dan militer. Covalima memiliki kelompok milisi 'Partisan' yang kuat pada 1975, dan selama beberapa tahun sesudahnya; dan keanggotaan lama ini menjadi penting

* Kecuali dikemukakan lain, penjelasan ini berdasar atas UNTAET, DHRO-Covalima, "Covalima District: 1999 Report," Desember 2001; dan Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Col. Herman Sedyono et al., 7 April 2003, Dili.

† Empat truk berisi orang-orang milisi Aitarak, sebagian dari mereka bersenjata, muncul di kota Suai pada 28 Juni 1999. Menyusul penyelidikan UNAMET, Kepala Kepolisian Resor menegaskan bahwa milisi tersebut adalah Aitarak. Lihat UNAMET, Political Affairs Office-Covalima, "Report 7/99," 30 Juni 1999.

dalam rekrutmen milisi pada 1999. Kelompok ini secara resmi dipimpin oleh Olivio Mendonça Moruk, seorang mantan pegawai pemerintah kabupaten dan anggota FPDK.*

Sama halnya dengan milisi di kabupaten-kabupaten lain, Laksaur mendapatkan dana dari sumber-sumber pemerintah dan mendapatkan dukungan kuat dari banyak pejabat sipil dan militer di Covalima. Dana resmi untuk Laksaur datang dari Kantor Gubernur yang disalurkan melalui kantor Bupati. Dana lain dan pasokan beras disediakan dari gaji dan jatah yang tak digunakan oleh para pegawai pemerintah yang berorientasi prokemerdekaan dan pergi bersembunyi pada awal 1999. Lebih jauh, di beberapa kecamatan, gaji Laksaur dibayar oleh kelompok pro-otonomi, FPDK.†

Pendukung Laksaur yang paling bersemangat antara lain adalah Dandim Covalima, Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus. Ia memang sangat terlibat dengan Laksaur sehingga UNAMET membuat pengaduan eksplisit mengenainya dengan akibat ia sebentar digantikan sebagai Dandim pada akhir Agustus 1999.‡ Penggantinya, Letnan Kolonel Liliek Koeshadianto (alias Lilik Kushadiyanto) tidak berbeda jauh dalam sikapnya terhadap milisi. Pendukung kuat lain milisi Laksaur adalah Bupati Covalima, Kolonel Herman Sedyono, seorang Katolik dari Jawa Timur yang menempuh sebagian besar kariernya di Timor-Leste.§ Para pendukung kunci lainnya mencakup Danramil Suai, Letnan Sugito; Kepala Staf Kodim, Kapten Ahmad Syamsuddin; dan Kepala Kepolisian Resort, Letnan Kolonel (Pol) Gatot Subiaktoro.

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Pelanggaran berat hak asasi manusia dilaporkan terjadi di Covalima sepanjang 1999, dengan puncaknya dalam periode sebelum UNAMET dan sesudah pemungutan suara. Kebanyakan korban dibunuh setelah 30 Agustus.

Pembunuhan pertama di Kabupaten Covalima terjadi pada 22 Januari 1999, dan beberapa pembunuhan lain menyusul minggu berikutnya. Sekitar akhir Januari

* Moruk dibunuh di Timor Barat, tidak lama setelah Jaksa Agung Indonesia mengeluarkan satu daftar tersangka pada 31 Agustus 2001. Ada spekulasi pada waktu itu bahwa ia dibunuh untuk mencegahnya bersaksi dalam pengadilan nantinya, dan mengungkap peran para pejabat TNI dan sipil. Sumber-sumber lain mengatakan bahwa ia dibunuh dalam suatu perselisihan pribadi.

† Perincian pendanaan FPDK untuk Laksaur dibahas dalam Bab 8 laporan ini.

‡ Di hadapan Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Jakarta pada Juni 2002, Panglima Kodam IX, Mayor Jenderal Adam Damiri bersaksi dengan mengatakan: "UNAMET lah yang membuat Jakarta mengganti komandan militer Suai Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus dengan alasan yang tidak jelas, sehingga saya menunjuk Liliek [Koeshadiyanto] untuk mengisi posnya." *Jakarta Post*, 20 Juni 2002. Ada beberapa ketidakpastian tentang tanggal penggantian dan penempatan kembali Letnan Kolonel Agus. Namun banyak sumber sepakat bahwa ia digantikan oleh Letnan Kolonel Koeshadiyanto dari 29 Agustus hingga 7 September 1999.

§ Satu sumber menyebutkan bahwa Herman Sedyono adalah seorang perwira karir Kopassus, tetapi tidak memberikan perincian. Lihat "Col. Herman Sedyono," *Masters of Terror*, http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm

setidaknya lima orang, semuanya diduga pendukung kemerdekaan atau keluarganya, telah dibunuh. Tiga di antaranya, termasuk seorang perempuan yang sedang hamil dan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, dibunuh dalam insiden 25 Januari di Desa Galitas, Zumalai.

Seorang saksimata pembunuhan di Galitas menyatakan kepada para penyelidik bahwa belasan anggota milisi Mahidi bersenjata tiba di desa ini, menggunakan tiga mobil pada pukul 21.00, 25 Januari 1999. Sejumlah penduduk berusaha bersembunyi di hutan terdekat, tetapi milisi menemukan Olandino Pereira (60 tahun), anak perempuannya yang sedang hamil, Angelica de Jesus (18 tahun), dan anak laki-lakinya, Luís Pereira (15 tahun). Ketiga orang itu dilaporkan ditembak dan kemudian dipotong dengan parang. Menurut sebuah sumber, yang belum dikonfirmasi, para penyerang memotong kepala orang tua itu (atau sebagian dari kepalanya) dan membawanya potongan itu bersama mereka ke markas Mahidi di Cassa, Ainaro.

Pada April dan Mei, milisi Laksaur melancarkan serangan kekerasan dan teror besar lain terhadap penduduk desa yang dianggap mendukung kemerdekaan.* Sesudah terjadinya gelombang serangan ini, yang mengakibatkan banyak pembunuhan, penduduk desa-desa yang dijadikan sasaran mulai melarikan diri ke kota Suai, di mana mereka berlindung di Gereja Ave Maria. Pada 12 April, milisi Laksaur secara terbuka mengancam anggota CNRT di kota Suai, yang membuat para pemimpin CNRT di sana menutup kantornya dan pergi bersembunyi.

Kedatangan UNAMET di kabupaten ini pada Juni 1999 membuat pelanggaran berat hak asasi manusia sangat berkurang. Hanya satu orang dilaporkan dibunuh antara 1 Juni dan 30 Agustus 1999, dan sebagian orang yang bersembunyi pada April pun bisa kembali ke rumah. Akan tetapi, milisi Laksaur tetap bebas berkeliaran di seluruh kabupaten, mengintimidasi dan memukuli orang-orang yang diduga maupun yang benar-benar pendukung kemerdekaan. Akibatnya sebagian besar pengungsi enggan kembali ke rumah mereka, sebagian tidak bisa mendaftar untuk referendum, dan CNRT praktis tidak bisa berkampanye.

Pada Agustus, beberapa ribu orang berkumpul di Gereja Suai, dan ini menjadi fokus permusuhan pro-otonomi di kabupaten itu. Pada 19 Agustus, Bupati Kolonel (Purn.) Herman Sedyono, menyatakan bahwa para pengungsi tidak akan diizinkan tinggal di dalam gereja, dan ia memerintahkan agar air maupun pasokan bahan makanan dihentikan. Walaupun ada protes kuat dari UNAMET dan delegasi anggota Kongres Amerika Serikat yang sedang berkunjung, dan janji dari Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim untuk membetulkan masalahnya, blokade tetap berjalan selama beberapa hari, sebelum akhirnya Bupati berubah pikiran. Tetapi kebencian resmi terhadap orang-orang yang berada di gereja tidak surut.

* Tentang perincian serangan pada April dan Mei 1999, lihat Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Col. Herman Sedyono et al., 7 April 2003, halaman 17-33.

Pada 29 Agustus, hari terakhir sebelum pemungutan suara, para pemimpin dan anggota kelompok pro-otonomi dan prokemerdekaan berkumpul bersama di kota Suai untuk sebuah misa rekonsiliasi, sebuah upacara umum, dan pengumuman deklarasi bersama. Sebagian yang hadir tampak memiliki harapan murni akan rekonsiliasi, tetapi itu tidak cukup untuk mencegah kekerasan besar-besaran di periode setelah pemungutan suara.* Kenyataannya, seorang pemimpin milisi dari Suai, Rui Lopes, kemudian mengatakan kepada para wartawan bahwa pada hari yang sama, ia hadir dalam pertemuan dengan Bupati dan Dandim, dan dalam pertemuan itu dikeluarkan perintah untuk membakar habis Covalima, dan menggiring penduduk ke Timor Barat.†

Seperti di kebanyakan kabupaten lain, kekerasan semakin meningkat setelah pengumuman hasil referendum. Pada 4 dan 5 September, pembakaran dimulai—di desa-desa Debos, Tabaco, Leogore, dan Kampung Baru di Suai—dan sesudah itu menyebar ke seluruh kabupaten. Sebanyak 20.000 penduduk yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena kekerasan, dikumpulkan di tiga halaman sekolah dan di kompleks-kompleks militer dan kepolisian di kota Suai, sebelum diangkut melewati perbatasan ke Timor Barat. Pada 20 September, semua badan berwenang Indonesia termasuk Polri, juga melarikan diri ke Timor Barat. Dari saat itu hingga kedatangan pasukan INTERFET pada 6 Oktober, Kabupaten Covalima dijarah seluruhnya oleh milisi, yang sebagian dari mereka sudah pergi ke Timor Barat dan kemudian kembali.

Lebih daripada 170 orang diyakini telah dibunuh dalam masa setelah pemungutan suara. Empat orang dibunuh di Desa Matai pada 9 September; sedikitnya 14 orang dibunuh di Lactos dan dekat Raihun oleh tim gabungan TNI-milisi pada 12 September; dan tiga lainnya dibunuh di Kamenasa pada 24 dan 25 September 1999.‡

Namun satu insiden kekerasan paling buruk adalah pembantaian di gereja di Suai pada 6 September. Setidaknya 40 orang, tetapi kemungkinan sebanyak 200 orang, dibunuh ketika milisi Laksaur dan Mahidi, yang didukung oleh para prajurit TNI dan Brimob, menyerbu kompleks gereja. Dari 40 orang yang identitasnya telah dipastikan pada awal 2003, tiga di antaranya adalah pastor Katolik, sepuluh anak-anak (di bawah 18 tahun), dan sejumlah perempuan dewasa atau remaja perempuan. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Gereja Suai).

---

* Jim Fox menulis: "Pada saat misa ketika umat saling memberikan 'salam damai', barisan depan gereja meledak dalam arus emosi yang tumpah ketika para anggota dari kedua faksi tersebut meninggalkan tempat duduk mereka dan saling berpelukan." James J. Fox, "Ceremonies of Reconciliation as Prelude to Violence in Suai, East Timor" [naskah tidak diterbitkan, tanpa tanggal].

† "Indonesia/East Timor: Forced Expulsions to West Timor and the Refugee Crisis," *Human Rights Watch*, Vol. 11, No. 7.

‡ Untuk perincian tentang peristiwa ini dan kejahatan lain yang dilakukan dalam periode setelah pemungutan suara, lihat Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Herman Sedyono et al., 7 April 2003, Dili, halaman 35-37.

Dili (Kodim 1627)

- Dandim: Letnan Kolonel Endar Priyanto; Letnan Kolonel Soedjarwo
- Bupati: Domingos Soares
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol) Drs. Hulman Gultom
- Milisi: Aitarak
- Jumlah yang dibunuh: 192 orang

Kabupaten Dili merupakan satu pusat utama kekerasan politik pada 1999.* Sebanyak 192 orang dibunuh selama 1999. Para korban mencakup sedikitnya 13 orang yang dibunuh pada hari yang sama, 17 April; 15 orang yang dibunuh atau dihilangkan dalam serangan ke kantor Keuskupan Dili pada 5 September; dan seorang jurnalis Belanda yang dibunuh prajurit TNI pada 21 September. Banyak lainnya yang diancam, dipukuli, disiksa, atau terluka berat akibat upaya pembunuhan. Selain itu, diperkirakan 7.165 bangunan dibakar atau dihancurkan, sementara puluhan ribu orang dipaksa meninggalkan rumah ketika kekerasan meledak setelah pemungutan suara pada 30 Agustus.† Para pelaku pelanggaran hak asasi manusia ini mencakup anggota TNI, Polri dan Brigade Mobil, serta milisi.

Milisi dan pihak berwenang

Kelompok milisi utama di Kabupaten Dili adalah Aitarak yang dipimpin oleh Eurico Guterres, yang juga menjadi wakil panglima seluruh pasukan milisi, PPI. Dengan markas di ibukota Dili, dan hubungan dengan semua pejabat penting provinsi dan kabupaten, Aitarak dianggap sebagai kelompok milisi yang paling kuat dan terjalin rapi di Timor-Leste. Kelompok ini juga termasuk yang paling kejam, dan dengan sekitar 1.500 anggota, mungkin merupakan kelompok terbesar. Aitarak khususnya aktif di wilayah sekitar Hera, tempat sebuah perguruan tinggi politeknik, dan secara strategis berlokasi di sepanjang jalan utama yang melintas ke arah timur dari kota Dili. Kesatuan Aitarak di sana, dipimpin oleh Kepala Desa Hera, Mateus de Carvalho, bertanggung jawab atas sejumlah pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk pembunuhan terhadap dua orang mahasiswa pada Mei 1999. (Lihat studi kasus: Pembunuhan terhadap dua mahasiswa di Hera.)

Walaupun berbasis di Dili, unit-unit bersenjata Aitarak juga beroperasi di kabupaten lain. Selama 1999 ada banyak laporan tentang unit-unit Aitarak yang bermarkas atau beroperasi di Kabupaten Viqueque, Aileu, Liquiçá, Covalima, Ermera, dan Oecussi.‡

* Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini berdasar pada: UNTAET, DHRO-Dili, "Key Cases of HRVs/ Abuses in Dili District," September 2002.

† Perkiraan gedung yang dibakar diambil dari "Survey of Population Movements and Refugees in Dili District," disusun oleh Dili District Returns Committee, Agustus 2000.

‡ Satu dokumen bertanggal 22 Agustus 1999 memuat daftar 62 orang anggota Aitarak di desa di

Dokumen-dokumen internal Aitarak yang ditemukan akhir 1999 menunjukkan bahwa kelompok tersebut diorganisasi seperti batalion tentara Indonesia. Di bawah 'Komandan' Eurico Guterres, terdapat seorang "Wakil Komandan" dan empat perwira staf—masing-masing untuk bidang Intelijen, Operasi, Personel, dan Logistik. Kekuatan utama dibagi ke dalam empat "Kompi" (A, B, C, dan D). Masing-masing Kompi dibagi menjadi "Peleton" dan selanjutnya tiap peleton terdiri atas beberapa 'Tim.'

Aitarak dibentuk awal 1999, tetapi seperti kelompok milisi yang lain, akar kelompok ini bisa ditelusuri kembali pada kelompok paramiliter lama. Seperti yang digambarkan dalam Bab 6, Aitarak tumbuh langsung dari organisasi 'pemuda' pro-Indonesia, Gadapaksi (Garda Muda Penegak Integrasi), yang didirikan pada Juli 1995. Komandan Aitarak Eurico Guterres adalah pemimpin Gadapaksi sampai awal 1999. Seperti Gadapaksi, Aitarak memiliki hubungan dekat dengan intelijen militer, khususnya Satuan Tugas Intelijen Kopassus, yang dikenal dengan sebutan SGI.

Dukungan pemerintah untuk Aitarak nyaris tidak disembunyikan, setidaknya dalam periode pra-UNAMET. Selama lima bulan pertama 1999, para perwira senior TNI dan Polri berikut para pejabat sipil secara terbuka menghadiri pertemuan umum pro-otonomi di mana kelompok-kelompok Aitarak dibentuk atau mendapat penghormatan. Pertemuan itu mencakup pertemuan umum pro-otonomi di kantor gubernur, 17 April 1999, yang secara langsung mendahului amuk kekerasan di seluruh Dili yang dilakukan oleh Aitarak dan milisi-milisi lain, yang membuat 13 orang terbunuh. Dua hari kemudian Bupati Dili, Domingos Soares, menunjuk Komandan Aitarak, Eurico Guterres, menjadi kepala badan keamanan yang baru di tingkat kabupaten, Pam Swakarsa.

Dokumen-dokumen rahasia dan sadapan komunikasi menunjukkan bahwa banyak pejabat sipil dan TNI menganggap Aitarak sebagai sekutu, dan sangat terlibat dalam mengoordinasikan kegiatan-kegiatannya. Menurut dokumen-dokumen ini, dan bukti yang lain, pejabat penting yang terlibat adalah: Komandan Korem (sampai pertengahan Agustus) Kolonel Tono Suratman; Asisten Intelijen Korem Letnan Kolonel Bambang Wisnumurty; Komandan Sektor A pada masa Keadaan Darurat, Kolonel Gerhan Lantara; Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Endar Priyanto, dan penggantinya, Letnan Kolonel Soedjarwo; Kepala Kepolisian Resor, Letnan Kolonel (Polisi) Drs. Hulman Gultom; Gubernur Timor Timur Abílio Osório Soares; Bupati Dili, Domingos Soares; dan Walikota Dili, Mateus Maia.

Seperti di kabupaten-kabupaten lain, pihak yang berwenang di Dili jelas gagal bertindak terhadap milisi, bahkan ketika mereka jelas-jelas melanggar hukum. Seperti yang dikeluhkan seorang penduduk Dili kepada pengamat internasional, setelah terjadinya pembunuhan bergaya eksekusi yang dilakukan oleh seorang komandan Aitarak bernama Julio pada awal Agustus 1999:

Ermera Kecamatan Atsabe. Lihat: "Daftar Nama-Nama Dari Markas Besar Komando Pasukan Aitarak Sektor B," 22 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #20). Sepucuk surat dari seorang anggota Aitarak kepada Eurico Guterres bertanggal 30 Maret 1999, mengisyaratkan bahwa satu cabang Aitarak telah didirikan di Ossu, Viqueque sebelum tanggal surat itu. Lihat: Surat dari Mário Pinto da Costa kepada Komandan [Aitarak], 30 Maret 1999 (Koleksi SCU, Doc #262).

"Saya ingin menekankan betapa pentingnya TNI dan senjatanya ditarik keluar dari Timor-Leste. Orang-orang seperti Julio akan terus menembak rakyat. Mungkin hari ini, mungkin besok atau lusa, Julio akan membunuh lagi. Orang-orang sadar bahwa dia bersenjata dan siap membunuh, tetapi tidak ada yang berbuat sesuatu untuk mencegahnya … tidak tentara, tidak polisi, tidak ada satupun."[*]

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Sekitar seperempat dari semua korban di kabupaten Dili dibunuh sebelum 1 Juni, sementara sebagian besar yang lain dibunuh dalam tiga minggu sesudah pemungutan suara. Salah satu penjelasan mengenai banyaknya pembunuhan dalam periode pra-UNAMET adalah bahwa kota Dili menjadi tempat pengungsian bagi orang-orang yang melarikan diri dari kekerasan milisi yang meningkat di desa-desa dan kabupaten-kabupaten di sekitar Dili. Beberapa ribu pengungsi seperti itu, yang datang ke Dili mencari tempat tinggal dan keselamatan, justru menjadi sasaran kekerasan milisi.

Di antara kejadian di kabupaten Dili, dan di seluruh Timor-Leste, yang paling terkenal adalah serangan pada 17 April terhadap sejumlah orang yang mengungsi di rumah tokoh prokemerdekaan terkemuka, Manuel Carrascalão. Serangan ini, yang dilakukan oleh Aitarak dan BMP, didukung oleh TNI dan Polri, mengakibatkan setidaknya 12 orang tewas, termasuk anak Carrascalão yang masih remaja, Manuelito. (Lihat studi kasus: Pembantaian di rumah Carrascalão.) Setelah penyerangan, sebagian besar pemimpin CNRT bersembunyi; beberapa pemimpin CNRT berada di bawah perlindungan polisi, bersama dengan sekitar 100 pendukung kemerdekaan lainnya.

Ada banyak korban lain kekerasan politik sebelum dan sesudah pembunuhan 17 April itu. Setidaknya tiga orang pendukung kemerdekaan dibunuh dalam Februari dan Maret—dan dalam ketiga kasus tersebut, para pelaku adalah anggota TNI dan atau Polri. Korban-korban itu adalah: Benedito de Jesus yang dibunuh dengan tembakan dari satu pos Brigade Mobil pada 14 Februari; Joaquim de Jesus yang ditembak mati pada 24 Februari oleh sejumlah orang yang membawa senjata otomatis dan mengenakan seragam TNI; dan João Texeira, yang disiksa (dengan rokok yang menyala), dibunuh, dan dipenggal pada 11 Maret oleh satu kelompok yang diduga dipimpin oleh seorang petugas intelijen TNI.

Lebih banyak tokoh prokemerdekaan yang dijadikan sasaran dan dibunuh pada akhir April dan Mei 1999. Mereka mencakup: beberapa orang yang dibunuh di Hera akhir April;[†] seorang laki-laki bernama Eugenio António Fátima, yang dibunuh oleh

* Carter Center, "Killing of Pro-Independence Supporter by Aitarak Militia Leader," laporan tidak diterbitkan, Dili, 1 Agustus 1999.

† Menurut seorang penduduk Hera yang menulis surat kepada UNAMET pada Juli 1999, mereka yang meninggal adalah: seorang laki-laki bernama Luís Dias Soares, yang disiksa dan dibunuh oleh milisi dan tentara pada 20 April; dua orang lagi pemuda pro-kemerdekaan dibunuh pada 24 April dan di-

milisi pada 9 Mei; sembilan orang yang dibunuh oleh Aitarak dan TNI di Desa Quintal Kiik dan Quintal Boot pada 10 Mei; dan dua mahasiswa Institut Politeknik Hera yang dibunuh setelah ditahan dan dipukuli oleh pasukan TNI pada 20 Mei. (Lihat studi kasus: Pembunuhan terhadap dua mahasiswa di Hera.)

Sama dengan di kabupaten-kabupaten lain, tingkat pembunuhan mengalami penurunan yang berarti setelah kedatangan dan penempatan UNAMET awal Juni. Tidak ada pembunuhan yang dilaporkan selama Juni, tiga pembunuhan terjadi pada Juli, dan dua lainnya terjadi di tiga minggu pertama Agustus.* Tetapi statistik itu hanyalah sebagian dari cerita. Ketika angka pembunuhan menurun, jenis-jenis lain pelanggaran hak asasi manusia terus berlanjut. Jarang ada hari yang berlalu tanpa laporan mengenai milisi mengancam, memukuli, dan membakar habis rumah orang yang dicurigai pendukung kemerdekaan. Kantor CNRT terus berada di bawah ancaman serangan, dan sebagian besar pemimpin CNRT bersembunyi. Sebaliknya, milisi bersenjata berkeliling kota dan desa dengan impunitas, membangun penghalang jalan, memeriksa surat-surat, menarik pajak jalan, membakar rumah, menembakkan senjata mereka, dan sebagainya—tanpa ada teguran apapun dari TNI maupun Polri.

Ilusi apapun bahwa kekerasan telah dikendalikan di Dili—atau bahwa aparat keamanan memang mau mengendalikan kekerasan—sepenuhnya berantakan pada 26 Agustus, hari terakhir kampanye pihak pro-Indonesia. Selama beberapa jam, para milisi menembakkan senjata, membakar rumah, dan menyerang para pendukung kemerdekaan. Di akhir hari itu, setidaknya delapan orang dibunuh, dua orang wartawan ditembak dan dilukai, kantor CNRT dirusak dan dijarah, dan beberapa rumah dibakar habis.

Laporan internal UNAMET tentang kejadian hari itu mencatat dan mengungkapkan keprihatinan serius mengenai kegagalan nyata Polri mencegah kekerasan yang dilakukan oleh milisi pro-Indonesia, menghentikan saat kekerasan terjadi, maupun menahan atau menangkap mereka yang diketahui bertanggung jawab. Salah satu laporan semacam itu mencatat bahwa kejadian pada hari itu "menegaskan tidak memadainya tindakan dari Polisi Indonesia."† Dari sekian banyak contoh yang dikutip dalam laporan, yang menonjol adalah serangan milisi terhadap markas CNRT:

---

duga dikuburkan di depan pos TNI di Hera; seorang laki-laki bernama Bastian dan seorang lagi bernama Thomas dibunuh pada 25 April dan dilaporkan dimakamkan di Gereja Protestan di Akanunu Hera. Surat dari Carlos Gabriel Pinto kepada UNAMET, 5 Juli 1999.

* José Soares dilaporkan dibunuh pada 25 Juli oleh orang-orang tak dikenal yang menembaknya dari sebuah mobil yang melintas dekat Fatu-Ahi. Angelino Amaral (alias Sabino) ditembak mati di pagi hari 1 Agustus, di luar kantor distrik UNAMET di Dili. Para pelaku dalam kasus kedua diidentifikasi sebagai Julio do Amaral (atau Julio Câmara) seorang komandan peleton Aitarak, dan Zokin, seorang anggota milisi Mahidi dari Maubisse. Carter Center, "Killing of Pro Independence Supporter by Aitarak Militia leader," laporan tidak diterbitkan, Dili, 1 Agustus 1999.

† UNAMET, "Report on the Incidents in Central Dili: 26 of August 1999," dimuat dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

"Pukul 15.55, situasi dekat kantor CNRT begitu rentan. Dua truk berisi pasukan Brimob ditempatkan di luar CNRT. Walaupun ada banyak Polisi, satu mobil bergerak ke arah timur sepanjang Jalan 15 Oktober yang penumpang-penumpangnya terus menembakkan senjata. Ketika mobil itu mendekati penghalang jalan Polri, anggota-anggota Brimob memberi jalan kepada kendaraan itu. Mobil itu terus melaju di Jalan 15 Oktober dan berhenti sekitar 100 meter dari para petugas Polri. Para penumpang mobil itu turun dan tampak menembak ke arah sasaran yang tidak diketahui selama beberapa menit. Para penyerang lalu kembali ke mobil, berputar balik, dan berjalan ke arah yang berlawanan pada jalan satu arah itu, melewati para petugas Polri dan selanjutnya pergi menghilang. Para petugas Polri maupun Brimob samasekali tidak berusaha menghentikan kendaraan tersebut, atau mencegah para penumpangnya melepaskan banyak tembakan ke segala arah … Setidaknya ada 20 orang Brimob yang ditempatkan pada penghalang jalan dengan peralatan lengkap anti-kerusuhan dan senapan serbu semi otomatis. Mereka jelas lebih banyak daripada para penyerang di dalam mobil tetapi mereka tidak mengambil tindakan apapun terhadap para penyerang."[*]

Satu dari banyak korban dari kekerasan hari itu adalah Bernardino Agusto Guterres (alias Bernardino da Costa), seorang mahasiswa yang dibunuh dengan tembakan di punggung dan lehernya oleh prajurit Brigade Mobil di wilayah Kuluhun, Dili. Banyak saksimata yang mengatakan bahwa ketika ditembak, Bernardino saat itu sedang berdebat dengan polisi, memintanya menghentikan milisi yang sedang menyerang. Foto jasadnya muncul di halaman depan majalah *Time* pada Desember 1999. Dalam pernyataan di bawah sumpah kepada Komisi Pemilihan independen yang mengawasi proses pemungutan suara, seorang saksimata menggambarkan insiden tersebut:

"Kerumunan orang berteriak kepada polisi untuk menghentikan milisi yang menembak-nembak. Salah satu dari mereka … berdebat dengan polisi, sambil mengarahkan perhatian mereka kepada para milisi. Seorang polisi yang tidak memakai baret seperti teman-temannya … mengatakan [kepada si pemuda] bahwa dia dapat menembak pemuda itu karena menghasut banyak orang. [Pemuda itu] lalu balik badan dan lari. Polisi lalu menembaknya dari jarak tiga langkah. Saya kemudian melihat luka tembak, satu di tengah punggung dan satu di leher bagian belakang si pemuda. Pemuda itu meninggal di tempat. Ketika ambulans datang untuk mengangkat tubuhnya, saya melihat lubang besar menganga di tenggorokan."[†]

* UNAMET, "Report on the Incidents in Central Dili: 26 Agustus 1999," dimuat dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

† Electoral Commission, E. Timor Popular Consultation, "Statement Minuted on Friday, 27 August 1999."

Situasi merosot semakin drastis pada hari-hari sesudah pemungutan suara. Seperti di bagian lain di Timor-Leste, kelompok-kelompok milisi mulai melancarkan serangan kekerasan yang terencana. Mereka yang diduga atau memang merupakan pendukung kemerdekaan diancam, dipukuli, dan kadang-kadang dibunuh; rumah-rumah dibakari, dan harta benda dijarah atau dihancurkan. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, TNI dan Polri membiarkan kekerasan ini atau membantu melakukan kekerasan. Pemberlakuan Keadaan Darurat pada 7 September, samasekali tidak membawa perbedaan. Menurut laporan banyak orang kekerasan justru semakin buruk setelah 7 September 1999.

Karena takut kehilangan nyawa, ribuan penduduk mengungsi ke bukit-bukit di sekitar Dili, atau di tempat yang dianggap aman di dalam kota. Tetapi puluhan ribu orang diangkut secara paksa ke Timor Barat oleh tim gabungan TNI, Polri, dan milisi.* Sebagian dikirim dengan kapal melalui pelabuhan Dili, tetapi kebanyakan dikumpulkan di kantor-kantor Polri dan TNI dan kemudian diangkut dengan truk.

Selama beberapa hari setelah pemungutan suara, sebagian besar staf UNAMET dipindahkan dari kantor-kantor mereka di luar kota ke markas besar di Dili. Di sana juga bergabung sekitar 1.500 pengungsi Timor-Leste dan sejumlah kecil pengamat dan jurnalis internasional yang belum meninggalkan Timor-Leste. Selama sepuluh hari (4-14 September) markas PBB secara efektif dikepung. Milisi mengancam akan melakukan kekerasan terhadap mereka yang ada di dalam, sambil terus membakar dan menjarah kota. Akhirnya, 14 September pagi hari, semua yang masih tinggal di kompleks itu—termasuk para pengungsi—dengan selamat diungsikan ke Darwin, Australia.

Tetapi kekerasan terus berlanjut. Dalam waktu hanya tiga minggu, puluhan orang dibunuh. Para korban mencakup: seorang anak laki-laki bernama Marcelino yang dibacok hingga mati dan kemudian dibakar oleh sekelompok milisi pada 1 September; sebanyak 15 orang dibunuh atau dihilangkan ketika milisi menyerang dan membakar kantor Keuskupan Dili (*Câmara Eclesiástica*) pada 5 September; seorang laki-laki bernama Thomas Americo dilaporkan disiksa dan dibunuh oleh anggota Aitarak pada 7 September; dan seorang pastor Jerman yang sudah berusia lanjut, Carolus Albrecht, ditembak di rumahnya sendiri oleh tentara pada 11 September. Satu dari beberapa saksi pembunuhan terhadap Marcelino memberikan keterangan sebagai berikut:

> *"Milisi berada di jalan bersama seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Namanya Marcelino, tetapi saya tidak mengetahui nama*

* Satu telegram rahasia dari Komandan Komando Distrik Militer Dili kepada Danrem bertanggal [7] September 1999, melaporkan bahwa 17.620 orang saat itu berada di berbagai tempat di dalam kota Dili, menunggu diungsikan. Perincian tempatnya diberikan sebagai berikut: Koramil Dili Timur (120 orang), Koramil Dili Barat (1.000 orang), Museum (3.000 orang), kantor Polda dan Polres Dili (6.000 orang), Pelabuhan Dili (3.000 orang), Koramil Metinaro (1.000 orang), dan Kodim Dili (3.500 orang). Lihat: Dan Sat Gas Pam Dili kepada Danrem 164/WD dan lain lain. Telegram rahasia STR/--/1999, [7] September, 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #44).

belakangnya … Ada sekitar 10 atau 20 milisi yang berusaha memenggal kepala Marcelino. Mereka membacok leher Marcelino tetapi ia tidak langsung meninggal. Kami bilang itu terjadi karena ia belum waktunya meninggal. Semua milisi membawa pisau. Semua pisaunya panjang. Ada banyak darah. Seperti membunuh seekor sapi … Karena Marcelino tidak segera meninggal, milisi lalu mengambil minyak tanah dari toko makanan [di dekatnya]. Milisi kemudian membakar toko makanan itu dan kemudian menyiram tubuh Marcelino dengan minyak tanah. Milisi kemudian melemparkan badan Marcelino ke kobaran api tersebut … Polisi Indonesia berada di belakang Milisi, di jalan. Mereka melihat apa yang sedang dilakukan oleh Milisi. Mereka dapat melihatnya. Mereka ada di sana sepanjang waktu ketika milisi membacok Marcelino dan melemparkannya ke dalam api."[*]

Salah satu kasus kekerasan sesudah pemungutan suara di Dili yang paling banyak dilaporkan adalah serangan pada 6 September terhadap kompleks kediaman Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo, tempat sekitar 5.000 orang mengungsi setelah pemungutan suara. Setidaknya satu orang terbunuh dalam serangan tersebut dan beberapa terluka, termasuk setidaknya seorang anak kecil. Namun, serangan terhadap kediaman Uskup menjadi mencolok bukan karena jumlah orang yang dibunuh, melainkan karena fakta bahwa serangan itu merupakan satu dari empat serangan yang hampir sama terhadap tempat pengungsian di Dili dalam waktu 24 jam. Serangan-serangan terkoordinasi ini, yang semuanya mengakibatkan setidaknya 17 orang meninggal, menandai metode yang digunakan bersama oleh Milisi, Polri, dan TNI di seluruh wilayah Timor-Leste untuk mendesak penduduk lari ke Timor Barat. (Lihat studi kasus: Pemindahan paksa dan pembunuhan pengungsi di Dili).

Sementara TNI dan Polisi memfasilitasi, dan sangat mungkin mengoordinasi, serangan-serangan oleh milisi, ada kejadian-kejadian lain di mana pasukan TNI secara langsung menjadi pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia. Salah satu kasusnya adalah pembunuhan terhadap wartawan Belanda Sander Thoenes pada 21 September 1999. Ada bukti yang meyakinkan bahwa Thoenes dibunuh oleh anggota Batalion Infanteri 745, yang baru saja mencapai Dili dari markasnya di Kabupaten Lautém. Menurut bukti tersebut Sander Thoenes dibunuh dengan satu tembakan di punggung. Namun, tubuhnya dipotong dengan parah; satu telinga dan sebagian pipinya dipotong lepas dengan tingkat ketepatan yang mendekati pembedahan. (Lihat studi kasus: Amuk Batalion 745.)

* Pernyataan di bawah sumpah oleh Isabel da Conceição, direkam dan dikumpulkan di Australia, 11 November 1999.

Ermera (Kodim 1637)

- Dandim: Letnan Kolonel Muhammad Nur
- Bupati: Constantino Soares
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol.) Ery T.B. Gultom
- Milisi: Darah Integrasi, Darah Merah, Naga Merah, Tim Pancasila, Aitarak
- Jumlah yang dibunuh: 82 orang

Kabupaten Ermera adalah tempat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius.* Setidaknya 82 orang dibunuh selama 1999. Kebanyakan korban yang meninggal adalah orang yang dianggap maupun memang merupakan pendukung kemerdekaan berikut keluarga mereka, termasuk seorang ibu dan lima anaknya yang masih kecil. Korban juga mencakup 11 orang pendukung pro-otonomi yang dilaporkan dibunuh oleh Falintil. Pengungsian penduduk dari tempat tinggal mereka dimulai sejak Februari 1999, dan sekitar 17.000 orang dipindahkan secara paksa dari rumah mereka pada September. Beberapa kejadian pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya dilaporkan terjadi pada tahun itu.

Seperti di kabupaten-kabupaten lain, kekerasan terburuk di Ermera terjadi dalam periode pra-UNAMET dan setelah pemungutan suara. Namun berbeda dengan kebanyakan kabupaten lain, para pelaku kekerasan di Ermera, khususnya dalam tahap pra-UNAMET, sama banyak antara prajurit TNI dan milisi. Pola ini tampaknya bersumber dari kesulitan sebelumnya untuk merekrut milisi di kabupaten ini.

Milisi dan pihak berwenang

Ada beberapa kelompok milisi yang beroperasi di Ermera pada 1999, seperti Darah Integrasi, Tim Pancasila, dan Aitarak. Darah Integrasi adalah kelompok yang paling besar, dengan ratusan anggota. Kelompok ini beroperasi di tiga dari lima kecamatan di kabupaten ini (Ermera, Letefoho, dan Hatolia) baik sendiri maupun melalui dua kelompok bawahannya, Darah Merah,† dan Naga Merah. Dua kelompok ini masing-masing berbasis di Kecamatan Ermera dan Hatolia. Kelompok milisi yang dikenal sebagai Tim Pancasila, berbasis di Kecamatan

* Kecuali disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada: UNTAET, DHRO-Ermera, "Report on Human Rights Violations During 1999: Ermera District," [Maret 2000]; dan Helene van Klinken, "Taking the Risk, Paying the Price: East Timorese Vote in Ermera," dalam Tanter, Selden, dan Shalom (penyunting), *Bitter Flowers, Sweet Flowers: East Timor, Indonesia, and the World Community*, Rowman & Littlefield, 2001, halaman 91-107. Helene van Klinken adalah Pejabat Urusan Politik UNAMET yang ditempatkan di Ermera pada 1999.

† Pemimpin milisi Darah Merah adalah Lafaek Saburai, penulis surat 'Operasi Pembersihan' pada Maret 1999, yang dibahas pada Bab 5 laporan ini. Walaupun banyak hal yang ditulis mengenai surat tersebut, dan ia disebut-sebut sebagai seorang pengawal Prabowo Subianto, Lafaek Saburai tidak muncul sebagai pemain utama pada 1999.

Atsabe, bagian paling selatan Kabupaten Ermera, sementara Aitarak beroperasi di Kecamatan Railako dan Atsabe.*

Seperti di hampir semua kabupaten, kelompok-kelompok milisi ini memiliki akar sejarah dan kelembagaan setidaknya sejak tahun-tahun pertama invasi Indonesia. Dengan bantuan sejumlah tokoh penting seperti Tomás Gonçalves, tentara Indonesia membentuk pasukan milisi yang dikenal sebagai 'Partisan' saat invasi 1975. Pertengahan dasawarsa 1990-an, pasukan Partisan mendapatkan latihan militer secara teratur dari TNI. Bersama Wanra dan Kamra yang dibentuk dalam dasawarsa 1980-an, mereka adalah unsur penting dalam strategi kontrapemberontakan yang dibuat TNI.

Kesatuan-kesatuan yang lebih tua ini—Partisan, Wanra, dan Kamra—tetap ada pada 1999, dan dipersenjatai serta ditugaskan oleh TNI untuk melaksanakan operasi intelijen dan keamanan. Pada 1999 anggota-anggota Partisan terlihat memakai seragam TNI dan membawa senjata standar otomatis TNI (SKS); dan mereka menerima gaji Rp75.000,00 dan beras setiap bulan. Kekuatan Partisan pada 1999 diperkirakan seluruhnya 130 orang.

Kelompok-kelompok Partisan dan Wanra ini juga menjadi sumber penggalangan kelompok-kelompok milisi baru awal 1999. Para pemimpin Partisan dan Wanra menjadi pemimpin-pemimpin kelompok milisi baru, begitu pula dengan para anggotanya. Komandan Wanra Ermera, Miguel Babo, menjadi komandan Darah Integrasi, dan orang yang lama menjadi pemimpin Partisan, António dos Santos menjadi wakil komandan kelompok ini dan secara *de facto* menjadi komandannya.

Semua kelompok ini—Partisan, Wanra, dan milisi-milisi baru—berhubungan dekat dengan pihak yang berwenang dan khususnya dengan SGI. António dos Santos, Wakil Komandan Darah Integrasi, disebut sebagai pemimpin satu kelompok SGI dan sekaligus menjadi Kepala Desa di Letefoho. Ia juga penyalur utama gaji dan beras bagi anggota milisi; ia dilaporkan datang ke Hatolia setiap bulan pada 1999 untuk membagikan uang sejumlah Rp100.000,00 dan beberapa kilogram beras kepada anggota-anggota milisi. Dua komandan utama Partisan di Gleno pada 1999 adalah Kapten Abas dan Sersan Heru, keduanya personel TNI yang bertugas pada SGI. Akhirnya, ada bukti bahwa Komandan pos SGI di Kecamatan Atsabe (Pos SGI Kresna 12 Atsabe) sangat terlibat dalam koordinasi kelompok-kelompok milisi Aitarak di sana.†

Milisi juga menerima dukungan politik, finansial, dan logistik dari komando reguler TNI. Satu dokumen dari Ermera, yang dibahas dalam Bab 8, menunjukkan dengan

* Satu dokumen bertanggal 22 Agustus 1999 memuat daftar nama 62 anggota Aitarak di Desa Atudame, Kecamatan Atsabe. Lihat: "Daftar Nama-Nama Dari Markas Besar Komando Pasukan Aitarak Sektor B," 22 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #20).

† Komandan SGI itu, Amran Odhe, adalah salah satu penandatangan dari daftar nama 62 anggota milisi Aitarak di desa Atudame, Kecamatan Atsabe. Daftar nama itu juga ditandatangani oleh Danramil Atsabe, Letnan M. Roni, dan Kapolsek Atsabe, Sersan Mayor I Ketut Suriana. Lihat "Daftar Nama-Nama Dari Markas Besar Komando Pasukan Aitarak Sektor B," 22 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #20).

jelas keterlibatan resmi militer dalam distribusi dana dan perlengkapan untuk milisi. Dokumen itu adalah sepucuk surat dari Dandim Ermera, Letnan Kolonel Muhammad Nur, kepada Bupati, bertanggal April 1999, dan dalam surat itu ia meminta uang Rp104 juta (USD13.886) untuk membayar gaji bulanan sebesar Rp200.000,00 (USD26.66) untuk setiap anggota Pam Swakarsa (yaitu milisi) yang baru direkrut di Kabupaten Ermera. Dalam suratnya, Letnan Kolonel Nur juga meminta 6.405 kg beras untuk dibagikan kepada anggota-anggota milisi yang baru.*

Polisi di Kabupaten Ermera tidak begitu banyak membantu milisi dibandingkan di kabupaten-kabupaten lain, setidaknya dalam empat atau lima bulan pertama 1999. Salah satu sebabnya, tampaknya, adalah bahwa Kepala Kepolisian Resor Ermera, Letnan Kolonel Ery T.B. Gultom, bersimpati pada perjuangan kemerdekaan dan menggunakan wewenangnya untuk melindungi dan membantu anggota-anggota CNRT yang dalam bahaya.

Namun posisi Polri berubah pada Mei 1999 ketika Letnan Kolonel Gultom dipindahkan, dan pasukan Brimob ditempatkan di kabupaten ini. Walaupun ada beberapa petugas Polri yang bertindak berani menyelamatkan nyawa banyak orang, namun setelah Mei, Polri lebih pasif, yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada milisi untuk beraksi. Misalnya para saksimata pembunuhan terhadap dua anggota staf lokal UNAMET pada 30 Agustus di Boboe Leten mengatakan bahwa pasukan Brimob bersenjata berada dalam posisi untuk mencegah dan menghentikan serangan, tetapi tidak berbuat apa-apa. Pada hari yang sama, tidak lama setelah satu rombongan UNAMET ditembaki milisi, perwira Brimob yang bertugas mengatakan kepada staf pemilihan dan Polisi Sipil UNAMET di Atsabe: "Kami menyelamatkan Anda hari ini: Besok, kami tidak tahu."

Seperti di kabupaten-kabupaten lain, organisasi pro-otonomi, FPDK, juga berperan penting mendukung milisi, terutama dengan menjadi penyalur dana resmi (dan mungkin juga yang tidak resmi). Dana semacam itu disalurkan melalui Kepala Keamanan FPDK, yang juga menjadi Wakil Komandan Darah Integrasi, António dos Santos.

Namun berbeda dengan beberapa kabupaten lain, terutama kabupaten yang berbatasan, yaitu Bobonaro dan Liquiçá, milisi di Ermera tidak mendapat dukungan kuat dari bupati, Constantino Soares. Sebaliknya, Soares sering memberikan bantuan kepada anggota CNRT dan Front Klandestin yang berada dalam bahaya. Dan sementara ia secara formal menjadi ketua BRTT tingkat kabupaten, ia hanya sedikit memberikan dukungan yang diharuskan kepada perjuangan pro-otonomi dan kelompok-kelompok milisi. Sikapnya dan keberadaan jaringan CNRT dan klandestin yang kuat di kabupaten ini, membantu menjelaskan pertumbuhan lambat milisi di Ermera. Hal ini juga menjelaskan mengapa Soares tetap dihormati di kabupaten Ermera bahkan setelah referendum.

---

* Hanya anggota yang baru direkrut, semuanya berjumlah 175 orang di Ermera, yang akan menerima Rp200.000,00 (USD26,66) per bulan. Sedang anggota lama, yang jumlahnya sekitar 160 orang, diberi uang Rp125.000 per bulan (USD16,66). Surat dari Letnan Kolonel Muhammad Nur, Komandan Distrik Militer 1637/Ermera kepada Bupati Ermera, "Permohonan Uang Saku PAM Swakarsa," Juni 1999. Salinan dokumen ini dimiliki penulis.

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Bulan-bulan awal 1999 di Ermera ditandai kehadiran ribuan pengungsi dalam negeri dari kabupaten-kabupaten tetangga. Serangan ancaman dan intimidasi oleh milisi di Kabupaten Liquiçá, misalnya, mendorong ribuan orang menyelamatkan diri ke Kecamatan Hatolia pada Januari dan Februari 1999, sementara yang lain datang dari Kabupaten Bobonaro dan beberapa bagian dari Kabupaten Ermera sendiri. Ketika UNAMET tiba pada Juni, jumlah pengungsi dalam negeri di kabupaten ini diperkirakan 3.000-4.000 orang.

Ketegangan memuncak Februari 1999 ketika TNI dan para pemimpin pro-otonomi melaporkan bahwa 11 orang anggota milisi—kemungkinan Mahidi dari Kabupaten Ainaro yang bertetangga—ditahan di Ermera, lalu dipindahkan ke tahanan Falintil di wilayah Kecamatan Hatolia, dan kemudian dibunuh. Jenazah mereka dilaporkan ditemukan di Fatubessi, pada Mei 1999, dan seorang anggota CNRT dikatakan diadili karena perannya dalam penculikan tersebut. Perincian lebih lanjut mengenai pembunuhan itu sulit dikonfirmasi, dan Falintil menyangkal terlibat, tetapi pembunuhan itu memberikan dorongan tambahan pada kegiatan pro-otonomi, dan pada penggalangan kelompok-kelompok milisi baru. Demikian juga laporan penahanan terhadap enam anggota milisi oleh Falintil selama sekitar satu minggu pada awal April.

Akhirnya, pada awal April 1999 pembunuhan terhadap para pendukung kemerdekaan dimulai, yang kemudian menggerakkan kegiatan intimidasi dan teror selama dua bulan terhadap para pendukung kemerdekaan, yang membuat setidaknya 20 orang mati. Berbeda dengan pola di kabupaten lain, banyak pembunuhan ini tidak dilakukan oleh milisi tetapi oleh kesatuan-kesatuan TNI—termasuk Kodim dan pasukan tempur—yang bertindak sendiri atau bersama pasukan-pasukan milisi. Lebih jauh lagi, keadaan saat pembunuhan itu terjadi dengan kuat menunjukkan bahwa pembunuhan itu adalah bagian dari suatu kegiatan yang dikoordinasikan oleh TNI.

Pada 9 April 1999, Dandim Letnan Kolonel Muhamad Nur bertemu dengan para pemimpin Darah Integrasi, FPDK, dan BRTT di ibukota kabupaten, Gleno. Pada hari berikutnya, 10 April, TNI dan milisi bersama-sama membakar habis kantor CNRT di Gleno dan membunuh anggota DPRD setempat dan pendukung CNRT yang terkenal, António Lima. Ada beberapa pembunuhan lain yang terjadi dalam minggu-minggu berikutnya, termasuk pembunuhan terhadap empat orang di Desa Talimoro dalam dua hari. Kekerasan berlanjut tanpa henti selama Mei 1999. Tiga orang dibunuh oleh pasukan TNI di Desa Poerema, Kecamatan Hatolia, pada 10 Mei 1999. Enam orang lagi dibunuh oleh gabungan pasukan milisi-TNI di Desa Atara, Kecamatan Atsabe pada 16 Mei.

Dengan kedatangan UNAMET di kabupaten ini pada Juni, kekerasan fisik yang terbuka pun surut, tetapi suasana intimidasi tetap ada, dan terus memburuk sampai menjelang hari pemungutan suara. Penduduk desa dan pekerja bantuan kemanusiaan yang berusaha membantu pengungsi dalam negeri di kabupaten

Ermera menjadi sasaran khusus permusuhan kelompok-kelompok pro-otonomi. Demikian juga para aktivis mahasiswa yang datang ke Kabupaten Ermera pada Juli untuk melaksanakan kegiatan pendidikan untuk pemilih, dan dalam kenyataannya mengampanyekan kemerdekaan. Pada tingkat yang hanya terlihat di sedikit kabupaten lain, staf lokal UNAMET juga menjadi sasaran kemarahan dan intimidasi milisi dan TNI.

Dalam beberapa jam setelah pemungutan suara, pola intimidasi ini meletus lagi menjadi kekerasan terbuka. Antara 30 Agustus dan 22 September, setidaknya 67 orang dibunuh di kabupaten ini. Setidaknya lima orang di antaranya adalah staf lokal UNAMET. Selain itu, dalam periode ini hampir 17.000 orang melarikan diri atau dipindahkan secara paksa dari rumah mereka dalam serangan teror dan kekerasan yang sistematis. Rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya, dan hampir semua bangunan umum, dijarah dan dibakar.

Seperti di kabupaten-kabupaten lain, serangan kekerasan setelah pemungutan suara di Ermera dilakukan bersama oleh TNI, Polri, dan Milisi. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, evakuasi dan penghancuran dipusatkan di wilayah-wilayah tertentu—terutama yang paling dekat dengan jalan-jalan besar menuju Timor Barat. Yang mengalami kerusakan paling berat adalah Kecamatan Atsabe, dari mana sekitar 50% dari penduduk dipindahkan secara paksa. Wilayah-wilayah yang jauh dari jalan besar, dan di mana ada Falintil dalam jumlah memadai, seperti bagian-bagian dari Hatolia, tidak terlalu banyak mengalami kerusakan.

Korban-korban pertama dari kekerasan dalam masa setelah pemungutan suara di Ermera dan di Timor-Leste secara keseluruhan adalah dua staf lokal UNAMET, João Lopes dan Orlando Gomes, yang dipukuli dan ditikam hingga mati ketika membawa kotak-kotak suara dari tempat pemungutan suara di Boboe Leten ke kendaraan-kendaraan UNAMET. Staf lokal yang ketiga, Alvaro Lopes, luka parah dalam serangan yang sama dan ditinggalkan agar mati sendiri, tetapi ternyata selamat. Penyelidikan kemudian mengungkapkan bahwa serangan itu dilaksanakan dengan sepengetahuan penuh komandan Komando Rayon Militer Atsabe, dan bahwa pasukan TNI dan Brimob berada di tempat kejadian tetapi tidak melakukan apapun untuk menghentikan serangan. (Lihat studi kasus: Pembunuhan staf lokal UNAMET di Boboe Leten.)

Serangan di Boboe Leten bukanlah insiden yang terpisah. Setelah pemungutan suara, milisi terus mengancam dan menyerang staf dan instalasi UNAMET di seluruh kabupaten ini. Akibatnya, semua staf UNAMET dipanggil pulang ke kantor regionalnya di Gleno. Di sanapun keamanan mereka tidak dapat dijamin, karena milisi berkeliaran di jalan-jalan menembakkan senjata, menyulut bangunan-bangunan dengan api, dan menarik orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan keluar dari mobil mereka di penghadangan jalan.

Dalam sejumlah kejadian, terutama di Boboe Leten, milisi bersenjata yang disertai oleh TNI dan Polri mencegah staf UNAMET meninggalkan tempat pemungutan suara, atau berusaha mencegah mereka membawa kotak suara. Pada 31 Agustus,

milisi melempari dengan batu dan menembakkan senjata ke helikopter UNAMET yang mendarat di Gleno untuk mengambil kotak-kotak suara. Polri tidak bertindak mencegah serangan itu. Seorang MLO (Perwira Penghubung Militer) UNAMET dilaporkan melihat seorang polisi menyerahkan sepucuk senjata kepada seorang milisi di tempat kejadian sesaat sebelum serangan.

Saat kekerasan memuncak, staf UNAMET diungsikan ke Dili yang relatif aman. Dengan kepergian UNAMET, keadaan di Ermera memburuk dan pembunuhan dengan sasaran tertentu meningkat. Salah satu yang dipilih untuk dibunuh adalah Ana Xavier da Conceição Lemos. Ia adalah anggota aktif organisasi perempuan prokemerdekaan, OMT (Organização das Mulheres Timorenses – Organisasi Perempuan Timor), yang bekerja di UNAMET sebagai pengatur antrean pada waktu pemungutan suara. Dengan bantuan seorang petugas Brimob, ia berhasil mencapai Gleno segera setelah penutupan pemungutan suara. Malam harinya ia diringkus dan dipukuli di rumahnya oleh seorang bintara TNI, Sersan Melky, dan beberapa laki-laki lain. Akhirnya ia berhasil mencapai markas UNAMET di Gleno dan menyertai rombongan UNAMET ke Dili. Tetapi beberapa hari kemudian ia kembali ke Gleno untuk melihat apakah anak-anaknya dalam keadaan aman. Saat kembali ia awalnya ditahan di Kodim dan kemudian diserahkan kepada milisi, yang memerkosa dan membunuhnya. (Lihat studi kasus: Pemerkosaan dan pembunuhan Ana Lemos.)

Semua ini hanya beberapa contoh terkenal dari kekerasan yang mengerikan dan mencengkeram Ermera selama September. Kasus yang kurang begitu diketahui adalah kasus Georgina Imaculada Tilman Ribeiro, yang dibunuh bersama lima anaknya (berusia 2 hingga 12 tahun), setelah ia pergi ke tempat yang tampak aman di Timor Barat. Seperti Ana Lemos, Georgina Tilman adalah anggota OMT, dan suaminya adalah seorang anggota aktif Front Klandestin. Setelah berhasil melintasi perbatasan, pada 18 September ia bersama anak-anaknya kembali masuk ke Timor-Leste dengan orang-orang yang mengaku dikirim oleh suaminya. Mereka berenam, Georgina bersama lima anaknya, kemudian menghilang. Jasad Georgina bersama kelima anaknya ditemukan pada Februari 2000, dikuburkan secara serampangan di dasar sungai kering, di kampung Mahir sekitar 13 km dari kota Atabae, di Kabupaten Maliana. Mereka yang diduga sebagai pelaku atas kejahatan ini antara lain adalah Sersan Melky, bintara TNI yang juga diduga memerkosa dan membunuh Ana Lemos.

Lautém (Kodim 1629)

- Dandim: Letnan Kolonel Sudrajat A.S.
- Bupati: Edmundo da Conceição Silva
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Irsan Wijaya
- Milisi: Tim Alfa
- jumlah yang dibunuh: 53 orang

Di Lautém terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia pada 1999, yang kebanyakannya terjadi di masa setelah pemungutan suara.* Sedikitnya 53 orang dibunuh pada tahun itu, dan 51 orang di antaranya terbunuh selama tiga minggu pada September. Dalam periode yang sama, diperkirakan sekitar 6.000 orang melarikan diri ke Timor Barat, dan ribuan lainnya ke pergunungan, untuk menghindari kekerasan dan penghancuran yang memuncak.

Milisi dan pihak berwenang

Para pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia di Kabupaten Lautém adalah anggota kelompok milisi lokal, Tim Alfa, dan prajurit TNI dari berbagai kesatuan, terutama Kopassus dan Batalion 745, yang bermarkas di Los Palos. Tim Alfa memiliki hubungan khusus dengan Kopassus dan beroperasi di bawah komandonya. Batalion 745 kurang berhubungan dengan Tim Alfa dan lebih sering melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara sendiri.

Tim Alfa dibentuk oleh Kopassus pada pertengahan dasawarsa 1980-an untuk menyusup ke gerakan klandestin dan membantu operasi tempur. Hubungan kelembagaan itu bertahan hingga 1999. Tim Alfa beroperasi dari markas Kopassus di Laurara, di Los Palos Kota, dan mendapatkan dukungan logistik dan transportasi dari Kopassus. Tim Alfa secara langsung dikendalikan oleh bintara Kopassus Sersan Syaful Anwar dan komandan Kopassus untuk wilayah Kabupaten Lautém, Letnan Rahman (alias Rahmat) Zulkarnaen.

Hubungan langsung antara Tim Alfa dan Kopassus dibenarkan oleh seorang mantan pemimpin Tim Alfa, Joni Marques dalam sidang pengadilan terhadapnya pada 2001. Bersaksi di bawah sumpah, Marques mengatakan bahwa ia telah dilatih oleh Kopassus, dan bahwa pada 1993 ia diundang ikut dalam latihan militer bersama angkatan bersenjata Australia di Bandung, Indonesia, dengan menyamar sebagai seorang prajurit TNI.† Kepada pengadilan ia juga mengatakan bahwa pada 1999 Tim Alfa melapor ke markas Kopassus di Los Palos: "Sebagai anggota Tim Alfa", katanya, "saya harus pergi ke sana."‡

Tim Alfa juga mendapat dukungan kuat dari Bupati Lautém, Edmundo da Conceição Silva. Dukungan Bupati ini tidak mengherankan karena ia punya hubungan dekat dengan Kopassus, sebagai anggota kehormatan pasukan itu. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, pendanaan bagi milisi pertama-tama disalurkan melalui kantor bupati, tetapi kemudian melalui lembaga lain, termasuk TNI, untuk selanjutnya disalurkan kepada milisi. Bupati juga menjadi Ketua Umum BRTT, dan anggota-

* Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada UNTAET, DHRO-Lautem, "Lautem District Events of 1999 Report," Maret 2002; Dili District Court, Special Panel for Special Crimes, "Judgement" in the case of Joni Marques et al., 11 Desember 2001; dan General Prosecutor of the Democratic Republic of East Timor, Indictment against Edmundo da Conceição Silva et al., 15 November 2002.

† Dalam kesaksian yang sama, Marques mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan latihan militer dari Kopassus sejak tahun 1986. Dili District Court, "Judgement," Joni Marques et al., halaman 55.

‡ Dili District Court, "Judgement," Joni Marques et al., halaman 53.

anggotanya menjaga keamanan tempat tinggalnya. Ada tuduhan yang belum dapat dikonfirmasikan bahwa Bupati membagikan 117 pucuk senjata kepada milisi dan/ atau BRTT pada awal 1999.

Batalion 745 adalah pasukan yang beroperasi lepas dari Kopassus dan kadang-kadang terlibat konflik dengannya, dengan markas di Desa Fuiloro. Anggota-anggota Batalion 745 secara langsung terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang luas pada 1999, yang meliputi pembakaran rumah, intimidasi, pemukulan, dan setidaknya pembunuhan sewenang-wenang terhadap 21 orang. Sebagian besar pembunuhan itu dilakukan ketika batalion tersebut ditarik dari Lautém menuju Dili dan ke Timor Barat akhir September. Yang paling terkenal, anggota-anggota batalion ini bertanggung jawab atas pembunuhan wartawan Belanda Sander Thoenes di Dili pada 21 September 1999. (Lihat studi kasus: Amuk Batalion 745.)

Batalion 745 didirikan pada 1976 dan merupakan satu dari dua batalion yang disebut sebagai batalion tempur 'organik' di Timor-Leste. Sebagian besar prajuritnya adalah orang Timor-Leste, sementara kebanyakan perwira yang memimpin adalah orang Indonesia. Menjelang referendum 1999, ada petunjuk-petunjuk bahwa sejumlah prajurit Timor-Leste dalam batalion ini bersimpati pada kemerdekaan. Karena itu para komandan kesatuan ini mengambil tindakan untuk memastikan bahwa prajurit-prajurit tersebut tidak dilibatkan dalam operasi-operasi militer, dan dijauhkan dari proses perencanaan. Dalam masa sesudah pemungutan suara, sebagian dari prajurit tersebut dijadikan sasaran dan dibunuh. Namun, batalion ini bekerjasama dengan anggota-anggota Tim Alfa, dan bahkan mengizinkan mereka untuk melihat daftar pengungsi yang dibuat oleh batalion itu, untuk memeriksa apakah di dalamnya ada pendukung kemerdekaan.

Kesatuan-kesatuan dan perwira-perwira militer lainnya di kabupaten ini juga terlibat dalam kekerasan, walau kurang menonjol. Markas Kodim, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sudrajat, dilaporkan digunakan sebagai tempat penahanan dan pemukulan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pendukung kemerdekaan. Saksimata, termasuk pemimpin milisi Joni Marques, telah bersaksi di bawah sumpah di pengadilan bahwa sejumlah orang disiksa dan dibunuh di sana, dan bahwa tubuh mereka ditemukan tidak jauh dari sana.[*] Dua batalion tempur 'non-organik', yaitu Batalion 621 dan Batalion 623, yang waktu itu bermarkas di Lautém, tidak sering muncul dalam kesaksian-kesaksian tentang kekerasan.

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Selain dari dua pembunuhan yang terjadi pada April 1999, insiden pelanggaran hak asasi manusia dalam periode pra-UNAMET dan periode UNAMET relatif sedikit.[†]

* Dili District Court, "Judgement," Joni Marques et al.

† Satu perkecualian penting adalah penyiksaan dan pembunuhan terhadap Evaristo Lopes pada April 1999. Para saksimata termasuk pemimpin milisi Joni Marques telah bersaksi bahwa Lopes disiksa dan dieksekusi ketika berada dalam penahanan, dan di bawah pengawasan langsung bintara Kopassus setempat, Sersan Syaful Anwar. Lihat Dili District Court, "Judgement," Joni Marques et al., halaman 53-57.

Tetapi, seperti di kabupaten-kabupaten lain, banyak kejadian intimidasi yang berhubungan dengan kampanye 'sosialisasi' otonomi pemerintah.

Rapat-rapat umum 'sosialisasi' biasanya menampilkan perwira-perwira TNI, Bupati, dan pemimpin-pemimpin BRTT serta milisi. Di tengah rapat-rapat semacam ini para pembicara, sebagian membawa senjata, mengeluarkan ancaman. Ancaman yang biasa dilontarkan adalah: "UNAMET akan pergi 30 Agustus 1999, setelah itu kami akan membunuh kalian." Staf UNAMET, baik internasional maupun lokal, juga dijadi sasaran ancaman dan intimidasi, termasuk dilempari dengan batu.

Insiden kekerasan yang paling menonjol di masa pra-pemungutan suara adalah pembunuhan terhadap *Liurai* Lautém, Verissimo Dias Quintas, pada 27 Agustus 1999. Menampilkan dirinya kepada Indonesia sebagai pendukung kekuasaan Indonesia, sebenarnya ia diam-diam menjadi pendukung kemerdekaan. Pada awal Agustus ia mengizinkan CNRT mendirikan kantor distrik mereka di kompleks tempat tinggalnya. Keputusan itu membuatnya menjadi sasaran khusus kubu pro-otonomi.

Laporan-laporan pada saat itu kuat mengisyaratkan keterlibatan pihak berwenang dalam pembunuhan tersebut. Polri membangun satu penghalang jalan sebelum kejadian itu, dan pasukan Polri maupun TNI yang berada di dekatnya tidak bergerak menghalangi serangan itu. Pasukan Kopassus dilaporkan menyediakan transportasi bagi para penyerang. Seperti dalam hampir semua kasus pembunuhan pada 1999, Polri hanya membuat penyelidikan sekadarnya dan tidak mengajukan dakwaan hukum terhadap mereka yang diduga sebagai pelaku.

Penyelidikan-penyelidikan lebih lanjut mengenai pembunuhan Quintas mengukuhkan bahwa para penyerang itu mencakup anggota-anggota BRTT dan kelompok milisi Tim Alfa. Penyelidikan-penyelidikan juga menunjukkan bahwa para penyerang diarahkan dan dibantu oleh Kopassus, Polri, dan pejabat-pejabat sipil. Sebuah dakwaan yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Agung Timor-Leste untuk Kejahatan Berat pada November 2002 secara eksplisit menyebut komandan Kopassus untuk kabupaten Lautém, Letnan Rahman Zulkarnaen, bintara Kopassus Sersan Syaful Anwar, Bupati Lautém Edmundo da Conceição da Silva, serta anggota-anggota Tim Alfa dan BRTT.*

Pada hari pemungutan suara, keadaan di Lautém tegang dan milisi bersenjata bebas berkeliaran di seluruh kabupaten ini. Namun seperti yang terjadi di seluruh Timor-Leste, tidak ada tindak kekerasan yang serius selama pemungutan suara. Sementara ketegangan kembali memuncak segera setelah pemungutan suara, dan gereja di Los Palos dibakar pada 5 September, kekerasan sungguh-sungguh terjadi setelah UNAMET dan para pengamat internasional meninggalkan kabupaten ini pada 7 September 1999.

Selama tiga minggu selanjutnya lebih daripada 50 orang dibunuh oleh Tim Alfa dan prajurit TNI. Pembunuhan terjadi hampir sepenuhnya di Kecamatan Los Palos dan Kecamatan Muro. Tidak ada pembunuhan yang dilaporkan terjadi di Kecamatan

* General Prosecutor of the Democratic Republic of East Timor, Indictment against Edmundo da Conceição Silva et al., 15 November 2002.

Iliomar, Tutuala, dan Luro, walaupun wilayah-wilayah yang disebut belakangan ini dibakar. Hampir semua korban adalah pendukung kemerdekaan yang terkenal.

Satu kejadian paling buruk pada masa sesudah pemungutan suara terjadi pada 25 September di dekat desa Verokoco, di jalan utama dari Lautém ke Baucau. Di sana anggota-anggota Tim Alfa menyergap dan mengeksekusi sekelompok orang, yakni lima rohaniwan dan empat orang awam.* Korban mencakup seorang biarawati yang dibacok dengan sebilah parang ketika berlutut berdoa di pinggir jalan, yang kemudian dilemparkan ke sungai dan ditembak mati.† Walaupun para pelaku langsungnya adalah anggota Tim Alfa, bintara Kopassus setempat, Sersan Syaful Anwar, juga terlibat dalam pembantaian. (Lihat studi kasus: Pembunuhan terhadap rohaniwan Los Palos.)

Anggota-anggota Batalion 745, termasuk komandan batalion, Mayor Jacob Sarosa, dan seorang komandan peleton, Letnan Camilo dos Santos, juga terlibat langsung dalam pelanggaran berat hak asasi manusia di masa setelah pemungutan suara, yang meliputi sebanyak 21 eksekusi di luar hukum. Beberapa pembunuhan tersebut terjadi di wilayah sekitar markas batalion (misalnya di Asalaino, Home Baru, dan Motolari). Tubuh dari sebagian yang meninggal ditemukan di dalam sumur yang ada di dalam kompleks batalion.

Pada 20 September, setelah sebagian besar anggota batalion telah pergi dengan kapal menuju Indonesia, sekitar 120 prajurit dan perwira, termasuk Mayor Sarosa dan Letnan Camilo, membentuk satu rombongan dan mempersiapkan kepergian ke Dili dan terus ke Timor Barat. Sebelum berangkat, Letnan Camilo dilaporkan memberikan penjelasan ringkas kepada para prajurit. Seorang perwira Timor-Leste yang berada di sana kemudian mengatakan kepada para penyelidik PBB bahwa Letnan Camilo berkata kepada para prajurit: "Kalau kalian menemukan apa saja di perjalanan … tembak saja."‡ Menurut saksi tersebut, Komandan Batalion, Mayor Sarosa, mendengar perintah tersebut ketika disampaikan. Pada hari yang sama, prajurit TNI memukuli dan kemudian membunuh tiga orang di dekat gudang beras di Lautém. Mayor Sarosa dan Letnan Camilo dilaporkan ada di tempat kejadian, tetapi tidak melakukan apa-apa. Hari berikutnya, rombongan itu bergerak keluar dari Lautém menuju Timor Barat, dengan meninggalkan jejak pembunuhan dan penghancuran setelah keberangkatannya. Ketika rombongan itu mencapai Dili, dua hari kemudian, sedikitnya 13 orang lagi dibunuh oleh batalion itu. (Lihat studi kasus: Amuk Batalion 745.)

Selain pembunuhan, dalam masa setelah pemungutan suara anggota-anggota Tim Alfa, Kopassus, dan Batalion 745 melancarkan serangan sistematis untuk

---

* Lihat Dili District Court, "Judgement," Joni Marques et al.

† Mayat-mayat yang diidentifikasi dalam proses pengadilan adalah: Suster Emilia Cazzaniga, Suster Celeste de Carvalho, Bruder Jacinto Xavier, Bruder Fernando dos Santos, Bruder Fernando da Conceição, Agus Muliawan, Cristovão Rudi Barreto, Titi Sandora Lopes, dan Izinho Freitas Amaral. Lihat Dili District Court, "Judgement," Joni Marques et al.

‡ Dikutip dalam Cameron W. Barr, "A Brutal Exit: Battalion 745," Bagian 3 dari 4, *Christian Science Monitor*, 16 Maret 2000.

menghancurkan infrastruktur di wilayah itu, dan mendeportasi sejumlah besar penduduk. Walaupun tingkat penghancurannya berbeda-beda—yang paling parah adalah Kecamatan Luro—sebagian besar bangunan di kabupaten Lautém, termasuk bangunan-bangunan pemerintah, toko-toko, dan rumah-rumah pribadi, dibakar atau dihancurkan. Binatang-binatang ternak dibunuh dan sistem komunikasi dilumpuhkan. Menghadapi penghancuran dan kekerasan ini, banyak orang yang menyelamatkan diri ke bukit-bukit dan sekitar 6.000 orang pergi ke Timor Barat.

Liquiçá (Kodim 1638)

- Dandim: Letnan Kolonel Asep Kuswadi
- Bupati: Leoneto Martins
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol.) Adios Salova; Mayor (Pol.) Drs Joko Irianto
- Milisi: Besi Merah Putih (BMP), Pana
- Jumlah yang dibunuh: 183 orang

Kabupaten Liquiçá merupakan satu pusat kekerasan milisi dan TNI yang terkenal selama 1999.* Sebanyak 183 orang sipil dilaporkan terbunuh selama tahun itu, yang bagian terbesarnya adalah pendukung atau pemimpin kemerdekaan, berikut sanak saudara mereka. Selain itu, sekitar 20.000 orang penduduk dipaksa meninggalkan rumahnya, baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara, karena intimidasi dan kekerasan yang sistematis.

Milisi dan pihak berwenang

Kelompok milisi utama di kabupaten ini adalah BMP (Besi Merah Putih),† yang dibentuk pertama kali pada Januari 1999 di Kecamatan Maubara, dan kemudian mendirikan pos-pos komando di seluruh kabupaten. Pada Juni 1999, milisi ini diperkirakan berkekuatan 600 orang. Sebagian besar dari mereka dipersenjatai dengan apa yang disebut senjata "tradisional", seperti parang dan pisau, tetapi sebagian membawa senjataapi termasuk senjata otomatis berkekuatan tinggi dengan jenis yang sama seperti yang digunakan oleh TNI.

Seperti milisi Aitarak di Dili, BMP tidak membatasi operasinya di satu kabupaten. Tampaknya dengan persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang di tingkat kabupaten dan provinsi, milisi ini mengambil bagian dalam tindak kekerasan berat di Dili, termasuk penyerangan terhadap rumah Manuel Carrascalão pada April

* Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada sumber-sumber berikut ini: UNTAET, UNMO-Liquiçá, "History of Liquiçá District Through 1999," Desember 1999; UNTAET, DHRO-Liquiçá, "Narrative Report on Events in Liquiçá District During 1999"; dan UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., Dili, [tanpa tanggal].

† Kelompok milisi yang lebih kecil, dengan nama Pana, dibentuk di Desa Vatuboro, desa asal Bupati Leoneto Martins.

yang mengakibatkan sedikitnya 12 orang meninggal. Anggota BMP juga bepergian sampai sejauh Oecussi, di mana mereka dilaporkan beroperasi bersama milisi Sakunar pada September 1999.

Walaupun di atas kertas dipimpin oleh Manuel Sousa, BMP dibentuk, dilatih, dan dikoordinasikan oleh jajaran tertinggi pihak berwenang militer dan sipil di tingkat kabupaten dan provinsi. Kelompok ini dibentuk awal 1999 setelah satu pertemuan yang diadakan oleh Bupati Liquiçá, Leoneto Martins. Sebagai anggota kehormatan Kopassus, Martins adalah pendukung utama BMP sepanjang 1999. Sebelum menjadi bupati pada 1995, Martins bertugas sebagai Camat Maubara, yang juga merupakan tempat desa asalnya. Mungkin bukan kebetulan jika pos-pos BMP yang pertama didirikan di kecamatan itu, yang juga menjadi basis utama kelompok milisi sepanjang 1999.

BMP, seperti milisi yang lain, juga mendapatkan dukungan kuat dari TNI dan Kopassus di tingkat kabupaten. BMP tumbuh dari kelompok Gadapaksi, yang dibentuk, didanai, dan dilatih oleh Kopassus sejak awal 1995. Dengan pembentukan BMP pada awal 1999, banyak dari sekitar 200 anggota Gadapaksi di Liquiçá pindah ke kelompok baru ini. Sama halnya, dukungan TNI dan Kopassus berlanjut, walaupun dengan nama baru dan kekuatan yang diperbarui.

Ada bermacam jenis dukungan TNI dan Kopassus untuk BMP pada 1999, termasuk pernyataan dukungan di depan umum, penyediaan latihan militer, operasi bersama, dan pembiaran tindakan milisi yang melanggar hukum. Seperti yang sudah dibahas dalam Bab 7, dokumen-dokumen internal TNI menunjukkan bahwa penyediaan latihan militer dan bimbingan militer merupakan hal yang rutin, yang dilaksanakan dengan pengetahuan penuh komandan-komandan TNI. Salah satu dokumen semacam itu, dari Kodim Liquiçá, mengungkapkan bahwa Komandan Resor Militer Kolonel Tono Suratman mengunjungi Maubara pada 16 April 1999, untuk berbicara dan memberikan 'pengarahan' kepada sekelompok milisi BMP berjumlah 500 orang di markas Koramil di sana.[*]

Para perwira TNI secara rutin memimpin operasi militer gabungan dengan BMP, atau membiarkan BMP melancarkan operasi. Seperti yang digambarkan di bawah ini, beberapa perwira TNI berpangkat tinggi, termasuk personel Kopassus, berada di tempat kejadian ketika milisi BMP melakukan pembantaian sekitar 60 pengungsi di gereja di Liquiçá pada April 1999. Walaupun lebih sering dilaksanakan dalam periode pra-UNAMET, operasi gabungan seperti itu terus berlanjut dengan bentuk berbeda-beda sampai akhir tahun itu. Satu laporan UNTAET bertanggal 14 Desember 1999, menggambarkan situasi akhir Juni 1999:

> "Pada tahap ini milisi jelas telah menguasai kota. Sekelompok besar laki-laki, bersenjata parang dan senjata rakitan menjadi pemandangan umum di seluruh kabupaten ini. Orang tidak

* Lihat: Perwira Seksi Intelijen Kodim 1638 kepada Kepala Seksi Intelijen Korem 164/WD, Dan Sektor B dan lain-lain, "Laporan Harian Seksi Intelijen Dim 1638/Lqs Periode tgl. 16 s/d 17 April 1999," 18 April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #11).

> jarang bertemu kelompok-kelompok milisi, disertai TNI, bergerak memasuki desa-desa dan membakar rumah di siang hari."*

Selain memberikan dukungan pelatihan dan operasional, para perwira TNI secara efektif terintegrasi dalam kepemimpinan dan struktur komando BMP. Komandan BMP yang terkenal adalah Sersan TNI Tome Diogo, seorang Timor-Leste yang telah bertugas di TNI selama bertahun-tahun, memiliki reputasi yang menakutkan di kabupaten ini, dan juga seorang petugas intelijen.† Komandan Rayon Militer (Danramil) Maubara, pusat operasi BMP, adalah seorang bintara Kopassus, Sersan Mayor Carlos Amaral.‡

Arti penting hubungan TNI dengan milisi juga terlihat dari sebaran geografis pos komando utama BMP di kabupaten ini. Salah satu pos pertama dibangun di Desa Vatuboro, tempat Batalion 143 bermarkas.§ Tiga pos komando BMP lainnya dibangun di Desa Vaviquinia, Dato, dan Fatumasi, tempat berada markas Komando Rayon Militer. Pos kelima dibangun di Desa Maumeta, di Kecamatan Bazartete, yang merupakan lokasi markas Kopassus.¶

Akhirnya, BMP mendapat dukungan tidak resmi dari pihak berwenang Polri di tingkat kabupaten. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, Polri di Liquiçá selalu menutup mata terhadap kegiatan milisi, termasuk tindak kekerasan yang serius. Dalam beberapa kasus, seperti pembantaian di Gereja Liquiçá, perwira dan pasukan Polri memainkan peran mendukung secara langsung. Sekutu BMP yang paling jelas adalah Letnan Kolonel (Pol.) Adios Salova, yang menjabat sebagai Kapolres Liquiçá sampai dengan Juli 1999. Penggantinya, Mayor (Pol.) Joko Irianto, tidak begitu aktif mendukung milisi.

Singkatnya, para pejabat penting yang terlibat di dalam mengorganisasikan dan mendukung BMP mencakup, setidaknya: Bupati Liquiçá, Leoneto Martins; Komandan 'Satgas Tribuana' Kopassus, Letnan Kolonel Yayat Sudrajat; Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Asep Kuswadi; Kepala Staf Kodim Kapten Purwanto; petugas intelijen Kodim Sersan Tome Diogo; Komandan Rayon Militer Maubara, Sersan Mayor Carlos Amaral; dan Kapolres, Letnan Kolonel Adios Salova.

---

* UNTAET, UNMO-Liquiçá, "History of Liquiçá District Through 1999," Desember 1999.

† Menurut daftar yang disusun oleh Polisi Sipil UNTAET, Sersan Tome Diogo adalah satu dari 27 petugas intelijen di Kodim Liquiçá. Lihat UNTAET, "Roster of Troops: Kodim 1638 Liquiçá," Liquiçá, [tanpa tanggal].

‡ Menurut daftar yang disusun oleh Polisi Sipil UNTAET, terdapat tujuh anggota SGI Kopassus di Maubara. Lihat UNTAET, "Roster of Troops: Kodim 1638 Liquiçá," Liquiçá, [tanpa tanggal].

§ Komandan kamp BMP di Vatuboro dan saudara laki-lakinya kerap terlihat di kompleks Batalion 143, dan beras dikirimkan ke BMP setempat dari kamp Batalion 143.

¶ Kopassus juga memiliki pos di Dato (di kediaman resmi seorang pejabat pemerintah), di Maumete, dan di Lunturi.

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Tindak kekerasan serius—termasuk pemukulan, pembakaran rumah, dan pembunuhan—sudah dimulai di Liquiçá sejak awal Januari 1999, yang memaksa ribuan penduduk meninggalkan rumah-rumah mereka. Desa-desa yang dianggap bersimpati pada Falintil menanggung beban serangan-serangan ini. Misalnya, Desa Guico di Kecamatan Maubara diserang dalam empat kesempatan terpisah pada Januari dan Februari. Para pelaku serangan-serangan tersebut adalah milisi BMP dan prajurit Batalion 143 dan 144 yang bermarkas di Kaikassa dan Vatuboro yang berdekatan.

Kekerasan lebih meningkat lagi pada awal April, dan akibatnya ribuan orang mengungsi ke gunung-gunung atau ke gereja Katolik di Liquiçá Kota. Menurut beberapa perkiraan ada 6.000 orang pengungsi dalam negeri di kabupaten ini, dari penduduk yang seluruhnya hanya 50.000 orang. Sejumlah besar pengungsi ini berkumpul di tepian Loes, Kecamatan Maubara, suatu wilayah dengan kehadiran Falintil yang cukup kuat, dan karena itu dianggap relatif aman. Walaupun demikian, orang-orang di sana tetap rentan terhadap serangan, dan kekurangan akses untuk mendapat bahan makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan yang memadai.

Dalam keadaan seperti ini milisi BMP dan prajurit TNI mulai melancarkan serangan kekerasan yang terencana dengan baik terhadap para pengungsi dalam negeri itu. Serangan itu, yang mencapai puncaknya pada awal April 1999, mengungkap hubungan dekat antara BMP dengan pihak-pihak berwenang militer dan sipil.

Salah satu korban gelombang kekerasan ini, Ilidio dos Santos, dibunuh oleh milisi di dekat markas Komando Rayon Militer Liquiçá pada 5 April 1999.[*] Dos Santos hendak berlindung di sana, tetapi alih-alih menemukan perlindungan ia justru dikeroyok oleh enam orang milisi yang menyatakan keinginan mereka untuk membunuh dirinya. Ia berusaha melarikan diri tetapi segera tertangkap dan dibunuh dengan sebilah parang. Para perwira TNI dan SGI di pos Koramil dilaporkan tidak berusaha menghentikan pembunuhan terhadap dirinya.

Korban yang lain, Fernando da Costa, ditangkap pada 5 April dan dibunuh di dalam tahanan TNI dua hari kemudian.[†] Da Costa, seorang pendukung CNRT, ditahan di kota Liquiçá oleh sekelompok prajurit TNI, milisi BMP, dan polisi yang bergerak dari rumah ke rumah untuk mencari para pemimpin CNRT yang sudah dikenal. Ia dipukuli babak belur oleh para prajurit TNI di luar rumahnya. Ia kemudian dibawa ke kantor Polres Liquiçá. Di sana ia ditahan selama dua hari, dan selama itu pula dilaporkan bahwa dirinya dipukuli lebih lanjut oleh seorang prajurit TNI. Pada 7 April ia diangkut dari selnya menuju ke markas Koramil Liquiçá oleh para prajurit TNI. Dari sana ia dibawa ke markas Koramil Maubara, disertai Sersan TNI Tome Diogo dan pemimpin BMP, Zacharia Alves. Segera setelah sampai di sana, ia ditikam berulang kali dan dibunuh.

* Lihat UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., paragraf. 94-95.

† Lihat UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., paragraf 80-84.

Kejadian-kejadian kekerasan awal April ini berpuncak pada pembantaian sebanyak 60 orang di dalam Gereja Liquiçá pada 6 April 1999. Mereka yang dibunuh semula mencari perlindungan di gereja ini karena meningkatnya kekerasan milisi. Walaupun serangan tersebut terutama dilancarkan milisi BMP, para saksimata mengatakan bahwa pasukan TNI (termasuk Kopassus) dan Brimob mendukung milisi dan menembakkan senjata- senjata mereka selama serangan. Mereka yang diduga terlibat adalah prajurit dari 'Satgas Tribuana' Kopassus; Batalion 143; Komando Distrik Militer (Kodim) Liquiçá; Komando Rayon Militer (Koramil) Maubara; dan Brigade Mobil (Brimob) Polri.

Beberapa saksimata mengatakan bahwa perwira senior TNI dan pejabat sipil ada di sekitar tempat kejadian saat serangan terjadi. Mereka mencakup: Dandim, Letnan Kolonel Asep Kuswadi; Komandan Satgas Tribuana Kopassus, Letnan Kolonel Yayat Sudrajat; Bupati, Leoneto Martins; dan Kapolres, Letnan Kolonel (Pol.) Adios Salova. Semua pejabat ini tidak mengambil tindakan berarti untuk mencegah serangan, menghentikannya ketika serangan dimulai, atau menyelidiki kejadian itu maupun membawa mereka yang diduga pelaku ke pengadilan. Sebetulnya ada bukti tidak langsung bahwa para pejabat ini sudah lebih dulu tahu akan adanya, dan bahkan mungkin merencanakan, serangan tersebut. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Gereja Liquiçá.)

Dalam hari-hari dan minggu-minggu setelah pembantaian tersebut, serangan terhadap para pendukung kemerdekaan menyebar ke seluruh Liquiçá. Setidaknya enam orang lagi dibunuh di tempat yang berbeda-beda di kabupaten ini selama April, sementara rumah-rumah dibakar dan dijarah. Di hadapan meningkatnya kekerasan, ribuan penduduk melarikan diri ke hutan di sekitar Loes, Hatuquesi, dan Dare. Sebagian juga pergi ke Dili dan sekitarnya, sehingga jumlah keseluruhan orang yang terusir dari rumahnya di kabupaten ini menjadi lebih daripada 10.000 orang. Di Dili, sekitar 150 orang pengungsi dalam negeri mencari perlindungan di rumah tokoh prokemerdekaan yang dihormati, Manuel Carrascalão. Kurang dari dua minggu kemudian, pada 17 April, para pengungsi di rumah tersebut juga diserang oleh milisi dan TNI, dan setidaknya 12 orang dibunuh. (Lihat studi kasus: Pembantaian di rumah Carrascalão.)

Kekerasan terbuka sedikit berkurang dengan datangnya UNAMET ke kabupaten ini pada akhir Juni, tetapi intimidasi sistematis terus berlanjut dan milisi BMP, yang sering membawa senjata, terus bebas berkeliaran di seluruh kabupaten ini. Perbedaan utamanya adalah bahwa sasaran milisi dan TNI sekarang mencakup staf UNAMET dan pekerja bantuan kemanusiaan. Staf lokal UNAMET khususnya berulang-kali diancam, dan kadang-kadang diserang oleh milisi BMP. Ada juga beberapa insiden di mana milisi mengarahkan senjata pada kendaraan dan personel PBB saat mereka melintas dengan truk atau minibus. Tidak ada tindakan yang diambil terhadap para pelaku, yang menunjukkan bahwa perilaku mereka diperbolehkan oleh pihak-pihak yang berwenang.

Keterlibatan pejabat-pejabat TNI dan Polri dalam pola intimidasi dan kekerasan semakin terang dengan adanya serangan terhadap satu rombongan

bantuan kemanusiaan pada 4 Juli. Rombongan itu, yang didampingi Pejabat Urusan Kemanusiaan UNAMET, dan dikawal oleh Perwira Penghubung Militer UNAMET, berhenti di kota Liquiçá setelah membagikan bahan makanan dan obat-obatan kepada pengungsi dalam negeri di wilayah sekitar Loes. Segera setelah berhenti, rombongan itu diserang oleh sekelompok milisi BMP yang mengayun-ayunkan parang dan menembakkan senjata rakitan. Satu orang luka berat dalam serangan tersebut, dan mobil-mobil rombongan rusak berat. Petugas Polri dan TNI yang ada di sekitar tempat kejadian tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan serangan. Tidak adanya tindakan itu turut memengaruhi keputusan UNAMET untuk melakukan evakuasi darurat semua personelnya pada hari yang sama. Kecurigaan adanya keterlibatan pihak yang berwenang ditegaskan melalui kejadian-kejadian selanjutnya, yang paling mencolok adalah dengan dilakukannya penyelidikan yang samasekali tidak memadai dari Polri terhadap kejadian tersebut. (Lihat studi kasus: Serangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan.)

Intimidasi dan kekerasan tingkat rendah semakin intensif selama periode kampanye pada Agustus dan terus berlanjut sampai hari pemungutan suara. Pada 8 Agustus, seorang pekerja UNAMET bernama Mariano da Costa ditahan dan dipukuli oleh milisi BMP yang mencurigainya sebagai anggota CNRT. Atas dasar perintah Sersan TNI Tome Diogo dan komandan BMP Zacharia Alves, ia dibawa pergi dan tidak pernah terlihat lagi. Anggota-anggota milisi kemudian melaporkan bahwa Mariano da Costa telah ditikam sampai mati.* Juga pada Agustus, enam orang aktivis CNRT ditahan oleh Polri dan milisi ketika mereka memasuki Liquiçá. Mereka dipukuli dan disekap dalam tahanan selama enam hari "untuk melindungi diri mereka".

Kekerasan dan intimidasi membuat CNRT hampir tidak mungkin berkampanye secara terbuka, dan juga menghambat para pengungsi dalam negeri kembali ke kampung halamannya. Tetapi terlepas dari masalah-masalah ini dan adanya ketakutan yang berdasar akan terjadinya kekerasan lebih lanjut, jumlah orang yang memilih pada 30 Agustus sangat besar; tempat pemungutan suara khusus didirikan di dekat salah satu tempat permukiman utama pengungsi dalam negeri untuk memastikan agar sebagian besar pengungsi dapat memberikan suara.

Seperti di kabupaten-kabupaten lain, hari pemungutan suara relatif tenang. Namun, ketegangan memuncak pada hari-hari setelah pemungutan suara dan, dengan diumumkannya hasil pemungutan suara pada 4 September, kekerasan sistematispun dimulai. Dalam beberapa jam setelah pengumuman, rumah-rumah di kota Liquiçá mulai dibakari, suara senjataapi otomatis terdengar, dan milisi bersenjata mulai berkeliaran dengan bebas di kota-kota maupun desa-desa. Selama tiga minggu berikutnya, ribuan orang diangkut paksa dengan truk dan diseberangkan ke Timor Barat, dan orang-orang dalam jumlah yang tidak diketahui dibunuh. Satu laporan UNTAET pada Desember 1999 mencatat bahwa 77 jenazah ditemukan di kabupaten

* Lihat UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., paragraf 141-146.

ini, dan 61 lainnya sedang diselidiki.[*] Pada awal 2003, jumlah pembunuhan yang dilaporkan di kabupaten itu mencapai angka 183.

Mereka yang meninggal mencakup tiga laki-laki, semuanya dicurigai sebagai pendukung CNRT, yang ditahan oleh prajurit TNI dan milisi BMP di Desa Metagou pada 3 September. Ketiga orang itu mengalami pemukulan parah dan kemudian dibunuh pada hari berikutnya, 4 September, segera setelah hasil pemungutan suara diumumkan.[†] Korban yang lain juga tiga laki-laki, semuanya diduga sebagai anggota CNRT, yang dengan sengaja dibunuh pada 7 September di Desa Buka Mera oleh tim gabungan TNI dan milisi BMP.[‡] Dalam setiap kasus, prajurit dan milisi pergi ke rumah korban dan menyebutkan nama mereka sebelum dibunuh.

Operasi untuk memindahkan penduduk secara paksa dilaporkan dimulai di Desa Fatumasi, Kecamatan Bazartete. Orang-orang diambil dari rumah mereka dan dibawa ke kompleks gereja di Liquiçá dan ke pantai di Dato. Dari sana, mereka dinaikkan ke sejumlah kapal yang menuju ke Timor Barat. Setelah pemindahan paksa terhadap penduduknya, Desa Fatumasi dibakar habis. Proses yang sama juga dilakukan di Mataulun, Ipelu, dan Liquiçá Kota. Pola pemindahan paksa dan penghancuran yang sama terjadi di Kecamatan Maubara. Bedanya penduduk di sana diangkut ke atas truk dan dipindahkan melalui jalan darat. Desa-desa di dataran tinggi kurang begitu terkena, mungkin karena sulit dijangkau, dan mungkin karena milisi dan TNI enggan masuk ke wilayah-wilayah yang sejak dulu dikontrol oleh pasukan Falintil.

Diperkirakan ada 20.000 orang yang dipindahkan secara paksa dari rumah mereka di Kabupaten Liquiçá dan sekitar 80% bangunan dirusak atau dihancurkan.[§] Dalam setiap kasus yang diketahui, operasi pemindahan dan perusakan dilaksanakan bersama oleh prajurit TNI, Polri, dan milisi BMP, dalam beberapa kasus dibantu oleh anggota-anggota Aitarak yang dikirim dari Dili. Singkatnya, pola umum kekerasan setelah pemungutan suara di Liquiçá memberikan bukti kuat bahwa serangan itu dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak-pihak berwenang TNI dan Polri.

---

* UNTAET, UNMO-Liquiçá, "History of Liquiçá District Through 1999," Desember 1999.

† Tiga orang yang dibunuh di Metagou adalah: Jacinto dos Santos, Pedro Alves, dan Francisco da Silva. Lihat UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., paragraf 148-157.

‡ Tiga orang yang dibunuh di Buka Mera adalah: Paulo Gonçalves, Guilhermo Alves, dan Clementino Gonçalves. Lihat UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., paragraf 158-166.

§ Semua ini angka perkiraan. Data dari UNTAET-DHRO Liquiçá memperkirakan bahwa 25.000 orang di-ungsikan paksa, sementara laporan UNTAET pada Desember 1999 mengatakan bahwa sekitar sepertiga dari penduduk (yakni sekitar 18.000 orang) dipaksa pergi.

Salah satu kejadian yang paling membuka mata adalah serangan bersenjata terhadap staf UNAMET, ketika mereka berusaha keluar dari Liquiçá Kota pada 4 September. Saat meninggalkan kompleks PBB, konvoi itu tiba-tiba dihujani tembakan senjataapi tanpa henti dari sejumlah penyerang, termasuk sejumlah orang yang diidentifikasi sebagai petugas Polri dan TNI. Masing-masing dari enam mobil rata-rata ditembak 15 kali, dengan tembakan tunggal maupun tembakan otomatis. Seorang perwira Polisi Sipil PBB, Earl Candler, mengalami luka berat dalam serangan itu, karena dua tembakan di bagian perut dan satu di bawah lengan. Segera setelah serangan itu, para pemimpin milisi terlihat bersama perwira penghubung TNI dan Polri. Lebih jauh, para pemimpin milisi membawa radio dua arah dan terlihat mengoordinasikan kegiatan milisi. Ketika helikopter PBB datang untuk mengevakuasi perwira Polisi Sipil PBB yang terluka, petugas Polri dan TNI yang ada juga membiarkan milisi menembaki helikopter itu.

Milisi BMP dan TNI mulai meninggalkan Liquiçá sekitar 20 September. Ketika pasukan INTERFET tiba di sana pada 28 September, hanya ada sedikit anggota milisi yang tersisa, dan mereka berangkat pergi pada hari yang sama.

Manatuto (Kodim 1631)

- Dandim: Letnan Kolonel Sulastiyo; Letnan Kolonel Gerson Ponto
- Bupati: Vidal Doutel Sarmento
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Johan A. Sumampouw
- Milisi: Morok, Mahadomi
- Jumlah yang dibunuh: 32 orang

Setidaknya 32 orang, dan kemungkinan lebih banyak, dieksekusi sewenang-wenang di Manatuto pada 1999.* Seperti di kabupaten-kabupaten lain, sebagian besar korban adalah orang-orang yang diduga maupun mereka yang memang mendukung kemerdekaan. Sebagian besar dibunuh selama April-Mei, atau dalam masa segera setelah pemungutan suara pada 30 Agustus. Dalam periode pra-UNAMET, para pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia adalah prajurit TNI, sementara dalam masa setelah pemungutan suara, anggota milisi berperan sama pentingnya. Kabupaten Manatuto juga menderita kerusakan harta benda yang besar, penjarahan, dan pengungsian paksa di masa setelah pemungutan suara.

* Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada sumber-sumber berikut ini: UNAMET, Civpol Manatuto, "Regional Report," 21 September, 1999; UNTAET, DHRO-Manatuto, "Report of the District Human Rights Officer for Manatuto covering the period 11-28 September 2000"; UNTAET, Manatuto District Civpol, "History of Manatuto District 1999," 26 Oktober, 2000; dan João Soares Reis Pequinho, "Situasi keamanan di Manatuto kota berubah drastis dari keadaan yang aman ke keadaan yang menyeramkan," Dili, 16 Oktober 2002.

Milisi dan pihak berwenang

Dua kelompok milisi utama di Manatuto adalah Morok dan Mahadomi (Manatuto Hadomi Otonomi – Manatuto Cinta Otonomi). Morok adalah kelompok yang lebih lama, yang didirikan beberapa tahun sebelumnya. Dengan markas di Kecamatan Laclubar dan Kecamatan Soibada, yang terletak di bagian barat-tengah negeri, pada awal 1999 Morok dipimpin oleh anggota TNI Filomeno Lopes da Cruz. Setelah pembunuhan terhadap dirinya pada pertengahan April, yang diduga dilakukan oleh pasukan Falintil, kepemimpinan lapangan Morok diserahkan kepada Domingos Metan.* Mahadomi adalah kelompok baru, yang dibentuk pada awal 1999 sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk 'menyosialisasikan' opsi otonomi. Berbasis di Kecamatan Manatuto, komandan lapangan utama Mahadomi adalah Aleixo de Carvalho dan Filomeno Barreto.

Terlepas dari perbedaan usia dan basis operasi, Morok dan Mahadomi bekerjasama erat selama 1999. Bahkan, menurut beberapa pengamat, kedua kelompok itu secara resmi melebur menjadi satu kesatuan dengan nama Mahadomi pada Mei 1999.

Pendukung utama milisi di Kabupaten Manatuto, dan secara resmi juga komandan umumnya, adalah Bupati Manatuto, Vidal Doutel Sarmento. Saksi-saksi yang pernah menghadiri pertemuan resmi dengannya pada 1999 mengatakan bahwa Bupati sering menyatakan bahwa jika opsi otonomi tidak menang, Manatuto akan terbakar. Walaupun pejabat sipil, Bupati diketahui berhubungan dekat dengan TNI dan khususnya dengan Kopassus. Seperti sejumlah pejabat senior pemerintah sipil Timor-Leste lainnya, ia diangkat menjadi anggota kehormatan Kopassus. Ketika ketegangan meningkat setelah pemungutan suara, Sarmento dilaporkan mengenakan seragam perwira Kopassus miliknya.

Mahadomi dan Morok juga mendapat dukungan dari hampir seluruh aparat militer dan sipil di tingkat kabupaten maupun tingkat propinsi. Dukungan itu diungkapkan secara terbuka dalam serangkaian upacara resmi pelantikan milisi, dan pembubaran CNRT, yang terjadi di seluruh kabupaten dalam Mei 1999.

Salah satu upacara semacam itu, diadakan di Manatuto Kota pada 8 Mei 1999 dipimpin oleh Bupati dan dihadiri oleh Komandan Distrik Militer Letnan Kolonel Sulastiyo, Komandan Resor Militer Kolonel Tono Suratman, dan sejumlah tokoh pro-otonomi dari Baucau, Dili, dan Lautém. Pembicara utama dalam upacara itu adalah duta besar keliling Indonesia untuk masalah Timor-Leste, Francisco Lopes da Cruz, yang kebetulan juga kakak laki-laki dari pemimpin milisi yang belum lama dibunuh, Filomeno Lopes da Cruz. Satu laporan rahasia intelijen militer bertanggal 12 Mei 1999, yang melaporkan kejadian tersebut, menyatakan bahwa sekitar 5.000 penduduk setempat hadir di sana.†

* Sumber sumber yang lain mengatakan bahwa pemimpin Morok adalah Thomas de Aquino Kalla. Lihat "Lt. Col. Sulastiyo," dalam *Masters of Terror*, http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm.

† Kodim 1631/Manatuto, Perwira Seksi Intelijen kepada Kasi Intel Korem 164/WD dan lain-lain. Laporan Harian Intelijen, 12 Mei 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #23).

Upacara serupa diadakan di Kecamatan Laclubar pada 17 Mei. Menurut laporan situasi dari Perwira Seksi Intelijen Kodim Manatuto kepada Kepala Seksi Intelijen Korem, upacara tersebut dihadiri oleh Komandan Distrik Militer, para perwira dan prajurit Batalion Infanteri 301/PKS, dan pasukan Brimob.*

Selain dukungan pemerintah yang ditampilkan di hadapan umum seperti itu, milisi di Manatuto juga mendapat dukungan praktis dari para perwira dan prajurit TNI. Wajah publik untuk dukungan TNI kepada milisi adalah Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Sulastiyo. Namun dengan pemindahannya pada Juli atau Agustus 1999, peran itu diambil alih oleh penggantinya Letnan Kolonel Gerson Ponto.† Namun menurut banyak laporan, Letnan Kolonel Ponto bukan pendukung kuat milisi dan bisa jadi telah membantu membatasi kekerasan milisi selama masa jabatannya yang pendek.

Bagaimanapun, para Komandan Komando Distrik Militer tidak bertindak sendiri. Kesaksian dari seorang mantan anggota TNI di Manatuto memberikan petunjuk bahwa para perwira dan prajurit yang terkait dengan Kopassus dan intelijen militer berperan penting dalam menggalang dan melatih milisi di sana. Tokoh sentral Kopassus di kabupaten itu adalah Letnan Kolonel Nyus Rahasia, Wakil Komandan Sektor Tempur B, yang dilaporkan berada di Manatuto dari pertengahan Mei hingga pertengahan Juni untuk mengoordinasikan pelatihan bergaya militer bagi milisi.

Setidaknya empat perwira Kopassus lain menetap di kabupaten itu, melatih dan bekerjasama dengan para milisi di Manatuto pada 1999. Tiga di antaranya—yang hanya dikenali sebagai Wayan, Ipon, dan Agus—dilaporkan mengirim senjata ke kediaman Bupati pada 4 September 1999. Senjata-senjata tersebut selanjutnya dibagikan kepada para anggota milisi Mahadomi dan digunakan dalam pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk pembunuhan sewenang-wenang dalam minggu-minggu berikutnya.

Pernyataan bahwa Kopassus dan para perwira intelijen berperan penting di Manatuto didukung oleh bukti-bukti dokumenter. Satu bukti penting berasal dari laporan intelijen militer bertanggal 20 Mei, seperti yang sudah disebutkan di muka. Laporan yang disusun oleh seorang Perwira Seksi Intelijen Kodim untuk Kepala Seksi Intelijen Korem, Mayor Bambang Wisnumurty, dan ditembuskan kepada Komandan Satgas Tribuana Kopassus, menyatakan secara eksplisit bahwa pada 17 Mei 1999 dua orang perwira senior TNI telah memberikan 'pengarahan' kepada para milisi di basis milisi Morok di Manatuto. Walaupun tidak disebutkan namanya, dua orang perwira yang dimaksud itu digambarkan sebagai "Komandan Sektor A" dan "Komandan Sub-Sektor Manatuto". Komandan Sektor A adalah Kolonel Sunarko, dan Komandan Sub-Sektor Manatuto kemungkinan adalah Letnan Kolonel Nyus Rahasia.

* Kodim 1631/Manatuto, Perwira Seksi Intelijen kepada Kasi Intel Korem 164/WD dan lain-lain. Laporan Harian Intelijen, 20 Mei 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #24).

† Menurut beberapa sumber, Letnan Kolonel Sulastiyo digantikan pada Juli 1999 oleh Letnan Kolonel Gerson Ponto (alias Lexi Herson Ponto). Sumber-sumber lain menyatakan bahwa Sulastiyo tetap sebagai Dandim sampai pertengahan Agustus 1999.

Orang-orang ini, keduanya perwira Kopassus, tergolong dalam perwira TNI dengan pangkat paling tinggi dan paling berkuasa di Timor-Leste. Kenyataan bahwa tindakan-tindakan mereka dilaporkan secara rutin, dan tanpa sensor, di dalam satu laporan intelijen kepada Kepala Seksi Intelijen Korem, menunjukkan bahwa mereka tidak dianggap sebagai 'oknum' dan bahwa tindakan mereka nyatanya sejalan dengan norma dan prosedur TNI.

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Korban pertama yang jatuh di Kabupaten Manatuto pada 1999 bukanlah tokoh prokemerdekaan tetapi pemimpin milisi Morok, Filomeno Lopes da Cruz. Ia ditembak dan dibunuh pertengahan April, yang diduga dilakukan oleh pasukan Falintil, di Desa Seur Tulan, Kecamatan Laclubar. Pada hari-hari berikutnya, setidaknya tiga orang aktivis prokemerdekaan dibunuh oleh para prajurit TNI dan sebuah desa dibakar, tampaknya sebagai balasan atas pembunuhan Filomeno Lopes da Cruz.

Mereka yang dibunuh antara lain adalah Marcelino Soares dan Mateus. Kedua orang ini dilaporkan dibunuh pada malam 24 April oleh pasukan Rajawali dan prajurit-prajurit dari Koramil Laclubar di sekitar desa Orlalan. Menurut para saksi, kedua orang itu dipenggal kepalanya, dan potongan kepala mereka ditempatkan di atas kuburan darurat mereka. Pada malam yang sama prajurit Rajawali dan Koramil dilaporkan membakar Desa Manelima yang terletak di sebelahnya, dan membunuh seorang pemuda bernama Manuel Almeida, juga sebagai pembalasan atas kematian pemimpin milisi Filomeno Lopes da Cruz. Manuel Almeida sudah lama bekerja sebagai pengemudi untuk seorang pastor Katolik di Soibada, Padre Julio, tetapi rupanya prajurit TNI mencurigainya terlibat dalam pembunuhan Filomeno.

Setidaknya satu pembunuhan lain dan sejumlah kejadian penganiayaan berat atau penyiksaan dilaporkan terjadi pada pertengahan Mei. Kali ini pelaku utamanya adalah anggota-anggota milisi Moruk dan Mahadomi, walaupun jelas mereka bertindak sepersetujuan pihak berwenang sipil dan militer yang paling tinggi. Misalnya, pada 13 Mei milisi menangkap dua orang (João da Costa dan Paulino Soares) dan membawa mereka ke tempat tinggal Bupati, yang juga menjadi markas milisi dan tempat penahanan.* Kedua orang laki-laki itu, yang dicurigai memasok makanan bagi Falintil, ditahan selama dua minggu, dan dipukuli babak belur sebelum Gereja Katolik dan Palang Merah Internasional turun tangan dan berhasil membuat mereka dibebaskan.

Pelecehan dan intimidasi oleh milisi terus berlanjut selama periode UNAMET. Pada pertengahan Agustus, milisi dan prajurit TNI berkeliaran di seluruh kota Manatuto dan menyobeki poster-poster CNRT. Pada 19 Agustus, lagi-lagi dengan bantuan prajurit, milisi menghancurkan kantor CNRT. Para pejabat UNAMET melayangkan beberapa protes resmi kepada Bupati dan para pejabat lain atas dukungan mereka kepada milisi, dan tentang iklim politik yang jelas tidak adil

* Satu penjelasan tentang kejadian ini menyatakan bahwa kedua orang itu diserahkan kepada SGI.

di kabupaten ini. Protes-protes itu tampaknya menahan bentuk-bentuk kekerasan yang paling ekstrem, namun tidak mengubah hubungan antara pihak berwenang dan milisi.

Dengan diumumkannya hasil pemungutan suara pada 4 September dan kepergian staf UNAMET beberapa hari kemudian, panggung untuk kekerasan terbukapun kembali digelar. Selama dua minggu selanjutnya, setidaknya 18 orang dibunuh, ribuan orang dipindahkan secara paksa dari rumah-rumah mereka, dan banyak infrastruktur fisik di kabupaten ini dihancurkan.*

Usaha-usaha oleh Gereja Katolik dan para pemimpin kedua belah pihak mengarah pada penundaan kekerasan, dan dengan begitu memberi kesempatan kepada penduduk untuk menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Dalam hari-hari segera setelah hasil pemungutan suara diumumkan misalnya, para pemimpin prokemerdekaan dan pro-otonomi tampak mencapai kesepakatan untuk menghindari tindakan-tindakan kekerasan. Menurut salah satu kesaksian, bahkan ada satu kesepakatan untuk membubarkan milisi, sebagai imbalan atas janji bahwa Falintil tidak akan menyerang.

Namun ada beberapa tokoh kunci yang memilih mengabaikan kesepakatan tersebut. Salah satunya adalah Bupati Vidal Doutel Sarmento, yang menolak memperbolehkan milisi dibubarkan, dan berperan sangat penting dalam membagikan senjata kepada milisi setelah 4 September. Seperti yang dikemukakan di atas, senjata-senjata tersebut dilaporkan dibawa ke rumah Sarmento oleh anggota-anggota Kopassus pada 4 September, lalu dibagikan kepada anggota-anggota milisi Mahadomi.

Pada 6 September, pembakaran dimulai di kota Manatuto. Menurut penduduk yang mengamati dari bukit-bukit di belakang kota, bangunan pertama yang dijadikan sasaran adalah rumah para pemimpin terkemuka CNRT, seperti Wakil Sekretaris Pertama CNRT Manatuto, Boaventura Soares. Dalam beberapa hari, hampir semua bangunan di dalam kota telah dibakar atau dihancurkan. Seperti yang terjadi di seluruh Timor-Leste, prajurit-prajurit TNI berperan aktif dalam pengorganisasian dan pelaksanaan pembakaran. Pada 7 September Perwira Penghubung Militer UNAMET di Manatuto menyaksikan secara langsung prajurit-prajurit TNI menyiram bangunan dengan minyak dan kemudian membakarnya.

Pembunuhan-pembunuhan terjadi segera sesudah itu. Di antara mereka yang dibunuh adalah Abílio Amaral, seorang mahasiswa dan pendukung kemerdekaan yang bekerja pada pemerintah Kabupaten Manatuto. Amaral dilaporkan dibunuh di dalam atau di dekat basis TNI di Desa Ailili di Kecamatan Manatuto, setelah ditahan oleh tentara pada 10 September. Dua orang saksi yang melihatnya di basis TNI setelah 10 September menyatakan bahwa wajahnya memar dan bengkak, tampaknya akibat pukulan. Pada

* Parahnya pemindahan berbeda-beda di setiap kecamatan. Di Kecamatan Manatuto, hampir seluruh penduduk dipaksa pindah. Di Kecamatan Laclubar, sekitar setengahnya dipindahkan paksa, sementara di Soibada hanya sedikit yang dipaksa pergi dari rumahnya. Komunikasi pribadi dengan mantan staf UNAMET Manatuto, João Pequinho, Oktober 2002.

4 Oktober 1999 saksi lain melihat mayat tergeletak di belakang kamp TNI itu, dan meyakini bahwa itu adalah jenazah Abílio Amaral.* Pada September 2000, perwira Polisi Sipil UNTAET dilaporkan menemukan satu kuburan, dan mungkin lebih, di belakang barak TNI di wilayah yang sama.†

Korban lain dalam kekerasan sesudah pemungutan suara adalah António (Pinto) Soares, seorang anggota kelompok pemuda klandestin, yang ditembak dan dibunuh oleh prajurit-prajurit dari Kodim Manatuto pada 11 September. Segera setelah hasil pemungutan suara diumumkan, Soares pergi ke bukit-bukit di luar Manatuto bersama istri dan seorang anak kecil. Dini hari 11 September ia kembali ke kota dengan sekelompok pemuda klandestin untuk mencari makanan bagi mereka yang bersembunyi di bukit-bukit. Saat kembali pada hari yang sama Soares dan dua orang lainnya (João Pequinho dan Marito Lay), semuanya membawa karung beras besar, disergap dari belakang oleh tiga prajurit Kodim Manatuto. António Soares dirobohkan dengan sebuah peluru di kepalanya.‡

Manatuto juga menderita akibat amukan anggota Batalion Infanteri 745 TNI, ketika mereka bergerak dalam konvoi dari basisnya di Lautém menuju Dili pada 20-21 September. (Lihat studi kasus: Amuk Batalion 745.) Dalam minggu-minggu pertama September anggota batalion itu membunuh setidaknya 21 orang. Beberapa dari pembunuhan ini terjadi di dekat Desa Laleia, di Kabupaten Manatuto.

Mereka yang meninggal mencakup tiga orang laki-laki, yang jelas tidak bersenjata, yang dibunuh dalam serangan di sisi timur jembatan Laleia, dan seorang laki-laki lagi, yang diduga pejuang Falintil, yang ditikam dan ditembak oleh prajurit yang kemudian memotong salah satu telinganya. Tiga orang lainnya, termasuk seorang perempuan, yang dilaporkan ditahan dekat Laleia, dipukuli kemudian diserahkan kepada prajurit di Kodim Manatuto. Mereka tidak pernah kelihatan lagi dan tampaknya mereka dibunuh.§

Manufahi (Kodim 1634)

- Dandim: Mayor Drs. H.M. Sinaga
- Bupati: Nazario José Tilman de Andrade
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Abdul Rahim
- Milisi: Ablai
- Jumlah yang dibunuh: 27 orang

* UNTAET, Manatuto District Civpol, "History of Manatuto District 1999," 26 Oktober 2000.

† UNTAET, DHRO-Manatuto, "Report of the District Human Rights Officer for Manatuto covering the period 11-28 September 2000."

‡ João Soares Reis Pequinho, "Situasi keamanan di Manatuto kota berubah drastis dari keadaan yang aman ke keadaan yang menyeramkan," Dili, 16 Oktober 2002.

§ UNTAET, SCU, "Synopsis in Respect to TNI 745 Batallion and the Murder of Sander Thoenes," 9 September 2001.

Manufahi tidak banyak mengalami kekerasan dibandingkan kabupaten-kabupaten lain sepanjang tahun 1999, tetapi pelanggaran terhadap hak asasi manusia di sana tetap signifikan.* Setidaknya 27 orang dibunuh selama 1999, ribuan lainnya diungsikan paksa ke Timor Barat, dan ada kehancuran harta benda yang besar.

Milisi dan pihak berwenang

Para pelaku kekerasan di Manufahi terutama adalah anggota milisi setempat, Ablai, yang dibentuk Maret 1999. Akan tetapi, pasukan TNI bertanggung jawab langsung atas setidaknya tiga pembunuhan dan secara tidak langsung terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia yang lain. Sebagian besar dari mereka yang dibunuh adalah pendukung kemerdekaan, tetapi dua orang adalah milisi pro-otonomi. Semua pembunuhan yang diketahui, kecuali tiga, terjadi di Kecamatan Same, sementara sebagian besar wilayah kabupaten ini tidak mengalami jenis-jenis kekerasan yang hebat.

Kekerasan serius dilaporkan terjadi di Manufahi pada awal November 1998, beberapa waktu sebelum kekerasan dimulai di wilayah lain di Timor-Leste. Kekacauan dimulai di kecamatan Alas ketika pejuang Falintil membunuh tujuh orang prajurit TNI dalam rentang waktu dua minggu. Dalam satu operasi yang mendahului kekerasan selama 1999, pasukan TNI (termasuk unsur-unsur Batalion 744, Kodim, dan Koramil) bergabung dengan kekuatan milisi dan kesatuan-kesatuan pembantu untuk melancarkan serangan pembalasan yang besar terhadap orang-orang yang diduga pelaku, dan terhadap masyarakat yang dianggap mendukung mereka. Di masa awal operasi, sekitar dua lusin orang ditahan, sembilan orang dipukuli atau disiksa, dua orang dipukuli hingga mati, dan sekitar 1.000 penduduk mengungsi. Dalam minggu-minggu berikutnya, lebih daripada 13 orang diyakini telah dibunuh, semuanya dikenal sebagai orang perlawanan.

Kelompok-kelompok yang bergabung dengan TNI dalam operasi November 1998 adalah pendahulu dari Ablai, milisi yang dibentuk awal 1999. Banyak pemimpin kunci Ablai adalah anggota Gadapaksi, yang dibentuk 1995, atau anggota kesatuan bantuan angkatan darat yang sudah ada selama bertahun-tahun. Kesatuan bantuan ini biasanya dikenal sebagai 'Tentara Tiga Minggu,' suatu sebutan merujuk pada kenyataan bahwa anggota-anggotanya menjalani latihan selama tiga minggu yang dipimpin oleh Kopassus di basis Batalion 744 di Aileu pada 1995.

Seperti milisi-milisi lain di Timor-Leste, Ablai memiliki hubungan dekat dengan pihak berwenang militer dan sipil. Lapisan atas pimpinan Ablai memiliki hubungan yang sudah lama dengan Kopassus serta kesatuan-kesatuan dan perwira-perwira TNI yang lain. Komandan Ablai, Nazario Corte Real, misalnya, telah bekerja untuk Kopassus selama bertahun-tahun, dan telah menjalani latihan 'Tentara Tiga Minggu' pada 1995. Orang kedua dalam komando Ablai, Francisco Capella Ferrao,

* Kecuali disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada sumber-sumber berikut ini: UNTAET, DHRO-Manufahi, "Manufahi," Juni 2002; UNTAET, DHRO-Manufahi, "Manufahi Human Rights Events Timeline," Februari 2001; dan UNTAET, DHRO-Manufahi, "The Situation in Turiscai," Februari 2001.

bahkan lebih lama bekerja dengan TNI, menurut beberapa keterangan sejak akhir dasawarsa 1970-an.

Pada 1999, penghubung utama Ablai dan Kopassus adalah seorang anggota milisi (yang mungkin juga seorang personel Kopassus) bernama Nelson de Araújo. Selain keterlibatannya dalam sejumlah tindak kekerasan tahun 1999, de Araújo dituduh terlibat dalam pembunuhan terhadap seorang penjaga perdamaian asal Nepal di Suai pada Agustus 2000.* Tokoh kunci di pihak TNI adalah Komandan Komando Rayon Militer (Danramil) di Alas, António Pereira.

Ablai juga memiliki hubungan dengan milisi di wilayah lain Timor-Leste, dan melalui mereka memiliki hubungan pula dengan para pejabat militer. Upacara peresmian Ablai diselenggarakan pada Maret 1999 di Same, dengan dihadiri oleh pemimpin terkenal Aitarak (dan sebelumnya Gadapaksi) Eurico Guterres, yang dikenal punya hubungan dekat dengan pimpinan militer.

Ablai juga mendapatkan dukungan aktif dari beberapa pejabat sipil setempat, termasuk Mattius da Silva, Kepala Desa Taitudak, dan Baltazar Doutel Sarmento, Kepala Desa Mahaquidan, keduanya terletak di Kecamatan Alas. Tetapi hubungan antara Ablai dan pihak yang berwenang bukanlah sesuatu yang tanpa masalah. Khususnya, ada tanda-tanda perselisihan antara Bupati, Nazario Jose Tilman de Andrade, di satu pihak dengan kepemimpinan Ablai di pihak lain.

Walaupun bekerja untuk pemerintah Indonesia, de Andrade dianggap moderat, atau bahkan prokemerdekaan, dan menentang penggunaan kekerasan oleh milisi. Menurut beberapa keterangan, para komandan Ablai ingin membunuh dia dan pemimpin BRTT Jaime da Costa; dan hampir pasti bahwa ketua FPDK menyembunyikan seorang pemimpin Fretilin, dan dengan begitu menyelamatkan nyawanya. Apapun sebabnya, perselisihan itu tampak telah membatasi kekuatan dan keleluasaan Ablai untuk beroperasi. Hal ini mungkin membantu menjelaskan mengapa kekerasan selama 1999 relatif kurang serius di Manufahi dibandingkan sejumlah kabupaten yang lain. Campurtangan pejabat-pejabat setempat lainnya, seperti Camat Same, Filomeno Tilman, mungkin juga telah membantu membatasi kekerasan.

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Kekerasan di Manufahi muncul dalam dua gelombang berbeda yang terjadi di tempat-tempat yang berbeda di dalam kabupaten ini. Gelombang pertama pada April 1999 terjadi di wilayah Orema. Gelombang kedua pada September terpusat di wilayah Datino dan Betano.

Pelanggaran berat yang pertama pada 1999 terjadi pada 21 Februari ketika tiga orang hilang setelah dibawa ke sebuah pos TNI di dekat pasar di kota

* Pada Maret 2003, para penyelidik Kejahatan Berat hanya sedikit menemukan bukti untuk mendukung tuduhan-tuduhan ini dan melepaskan Nelson de Araújo dari tahanan. Namun kegagalan untuk menemukan bukti bisa jadi berhubungan dengan fakta bahwa penyelidikan di Distrik Manufahi, sampai tanggal tersebut, amat sangat terbatas.

Same. Ketegangan memuncak pada Maret khususnya setelah Eurico Guterres mengunjungi wilayah itu pada 11 Maret. Mulai saat itu, milisi dan perwira TNI serta beberapa pejabat sipil berulang kali memberikan ceramah pada pertemuan-pertemuan umum, dan mengeluarkan ancaman serta peringatan agar tidak memilih kemerdekaan. Ancaman umum yang disuarakan menjelang pemungutan suara adalah bahwa jika kemerdekaan menang, "darah akan mengalir dari barat sampai ke timur."

Pada 10 April, seorang pemimpin mahasiswa ditahan oleh milisi Ablai dan dipukuli hingga babak-belur.[*] Sekitar seminggu sesudahnya, dua orang milisi Ablai dari Orema dibunuh ketika berada di Dili. Sebab kematian mereka belum jelas, tetapi para pemimpin milisi di Manufahi menuduh pihak prokemerdekaan yang membunuh mereka. Jenazah mereka dikembalikan ke Same oleh TNI dan dikuburkan di makam TNI pada pertengahan April.

Pembunuhan dan pemakaman itu terjadi hanya beberapa hari sebelum Eurico Guterres berbicara di depan rapat umum pro-otonomi, di depan kantor Gubernur di Dili, dan mendesak yang hadir untuk melakukan tindakan terhadap para pendukung kemerdekaan. Pidato Guterres pada 17 April, diikuti tidak hanya oleh amuk kekerasan milisi di Dili, tetapi juga dengan meningkatnya kekerasan milisi di Manufahi. Rumah-rumah sebagian besar tokoh prokemerdekaan di Kabupaten Manufahi dibakar. Karena ketakutan, banyak penduduk yang lari menyelamatkan diri ke gereja di Same, ke bukit-bukit atau ke tempat yang relatif aman di Dili.

Setidaknya lima orang dibunuh dalam masa gelombang kekerasan pertama ini (17-25 April). Penduduk Orema, yang menjadi wilayah utama kegiatan milisi, juga melaporkan bahwa anggota Ablai memaksa mereka dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan ternak babi, kuda, dan orang-orang perempuan. Seorang laki-laki dilaporkan dibunuh ketika anak perempuannya menolak pergi dengan milisi. Setelah membunuhnya, milisi itu mengambil paksa perempuan itu. Perempuan itu lalu melaporkan bahwa dirinya dipaksa menjadi budak milisi, dan bahwa dirinya diperkosa oleh milisi.

Gelombang kekerasan kedua di Manufahi dimulai pada hari pemungutan suara, 30 Agustus, dan berlanjut selama hampir tiga minggu. Selama masa ini, setidaknya 15 orang dibunuh, dan ribuan lainnya dipindahkan dengan paksa. Kekerasan dimulai dengan penyiksaan, pembunuhan, dan pemenggalan kepala terhadap dua orang laki-laki pada 30 Agustus. Penggalan kepala dari dua orang tersebut dipertontonkan di hadapan umum, dengan maksud jelas untuk menyebar teror agar orang pergi ke Timor Barat.

Taktik itu, bersama dengan pembakaran rumah-rumah dan bangunan-bangunan umum secara sistematis oleh pasukan-pasukan milisi, Polri, dan TNI (termasuk Batalion 301), membuat banyak penduduk desa meninggalkan rumah mereka. Polanya agak berbeda dari satu wilayah ke wilayah yang lain, tetapi ada pola umum

* Sebagian keterangan menyebutkan bahwa ia dibacok dengan parang.

di seluruh kabupaten ini yakni bahwa penghancuran paling buruk, dan jumlah pengungsian paling besar, terjadi di sepanjang jalan besar yang menghubungkan kabupaten ini dengan perbatasan. Desa-desa yang paling terpencil di kabupaten ini tidak mengalami kerusakan yang besar, karena milisi tidak mau bersusah-payah pergi ke sana, atau karena desa-desa itu merupakan basis Falintil.

Kekerasan itu diakhiri dengan sebuah pembunuhan penutup. Di dekat Betano, sesaat sebelum berangkat dari Manufahi, milisi Ablai membunuh lebih daripada sepuluh orang dalam satu hari, 24 September. Saat pasukan INTERFET tiba, milisi telah pergi, demikian juga TNI, Polri, dan kebanyakan pejabat pemerintah sipil.

Oecussi (Kodim 1639)

- Dandim: Letnan Kolonel Kamiso Miran; Letnan Kolonel Bambang Sungesti
- Bupati: Filomeno Misquito da Costa
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Wilmar Marpaung
- Milisi: Sakunar
- Jumlah yang dibunuh: 170 orang

Kabupaten Oecussi termasuk yang paling banyak mengalami pelanggaran hak asasi manusia dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Timor-Leste sepanjang 1999.[*] Setidaknya 170 orang dibunuh selama tahun itu, dan sebagian besar pembunuhan terjadi pada minggu-minggu setelah pemungutan suara. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, ribuan orang meninggalkan rumah mereka dalam periode ini karena intimidasi dan kekerasan yang sistematis.

Milisi dan pihak berwenang

Kekuatan utama milisi di Kabupaten Oecussi, Sakunar, dibentuk dan didukung kuat oleh TNI, Polri, dan pihak berwenang sipil. Sakunar dibentuk pada April 1999 dengan dukungan penuh dari Gubernur Timor Timur Abílio Osório Soares, Bupati Dili Domingos Soares, dan dua komandan utama milisi di Timor-Leste, João Tavares dan Eurico Guterres.

Mulai dari saat dibentuk, Sakunar mendapatkan dukungan politik dan finansial dari Bupati Oecussi, Filomeno Misquito da Costa; Kapolres Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Wilmar Marpaung; dan yang paling penting, Dandim (sampai Agustus 1999) Letnan Kolonel Kamiso Miran dan penggantinya, Letnan Kolonel Bambang Sungesti.[†] Semua pejabat ini menghadiri upacara peresmian Sakunar pada 1 Mei 1999, yang

* Kecuali disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada sumber-sumber berikut ini: UNTAET, DHRO-Oecussi, "Report on Human Rights Violations During 1999: Oecussi District," November 2001; UNTAET, General Prosecutor, Indictment of Simao Lopes et al. (Kasus No. OE-12-99-SC), Dili, September 2001.

† Letnan Kolonel Sungesti menggantikan Letnan Kolonel Kamiso Miran pada 9 Agustus 1999.

dalam kesempatan ini para pendukung kemerdekaan diancam dan dipukuli di hadapan umum oleh milisi.

Hubungan Sakunar dengan pihak berwenang resmi tidak berhenti di sana. Dalam kesaksian di hadapan pengadilan di Jakarta pada April 2000, seorang mantan pemimpin Sakunar mengatakan bahwa ia telah menerima senjata dari dua orang perwira senior Kopassus, yang ia kenal sebagai "Bambang" dan "Tatang".* Walaupun pengadilan tidak berusaha mengklarifikasi identitas para perwira itu, ada kemungkinan bahwa mereka adalah Mayor Bambang Wisnumurty, Kepala Seksi Intelijen Korem, dan Kolonel Tatang Zaenuddin, Komandan Sektor Tempur B. Kedua orang ini terlibat dalam penggalangan dan koordinasi milisi di tempat-tempat lain di Timor-Leste.

Para organisator dan pemimpin utama Sakunar, dan pemicu utama kekerasan masa sesudah pemungutan suara, adalah personel aktif militer dan Polri serta pegawai negeri sipil. Mereka adalah Danramil Passabe, Anton(io) Sabraka; Babinsa dan pelatih militer di Desa Passabe, Sersan Andre Ulan; pegawai negeri dan komandan umum Sakunar, Simão Lopes; Kepala Desa Passabe dan anggota Polri, Gabriel Colo; dan Kepala Desa Cunha, Laurentino Soares (alias Moko).

Jaringan hubungan resmi ini, dan keanggotaan rangkap antara milisi dan badan-badan negara, memudahkan Sakunar beroperasi dengan kekebalan hukum, dan memastikan bahwa anggota-anggotanya memiliki sarana operasional dan logistik untuk melakukan pelanggaran sistematis hak asasi manusia.

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Setidaknya 12 dan mungkin lebih banyak lagi orang dibunuh di Oecussi dalam periode pra-pemungutan suara, dan sejumlah kejadian serangan fisik, intimidasi, serta penghancuran harta benda dilaporkan terjadi. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, para pemimpin dan aktivis CNRT menjadi sasaran tindakan-tindakan intimidasi dan kekerasan oleh kekuatan pro-otonomi, dan mereka termasuk di antara korban yang meninggal.† Namun bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain, Oecussi bukanlah pusat kegiatan militer atau milisi yang utama dalam periode pra-UNAMET dan periode UNAMET.

Keadaan itu berubah secara dramatis pada hari-hari akhir sebelum pemungutan suara dan dalam periode segera setelah pemungutan suara, khususnya setelah kepergian personel UNAMET dan pengamat internasional lainnya pada awal September 1999. Dalam beberapa minggu berikutnya lebih daripada 150 orang sipil dibunuh, sebagian dengan cara sangat mengerikan, dan membuat jumlah keseluruhan orang yang dibunuh di sana selama 1999 sedikitnya 170 orang. Selain itu, ribuan orang meninggalkan rumah mereka karena intimidasi dan kekerasan sistematis.

---

* Pemimpin milisi itu adalah Laurentino Moko. Karen Polglaze, "Timor militia leader back in court," AAP, 10 April 2000.

† Pada satu upacara umum di awal Mei, para pemimpin CNRT dipaksa untuk "secara sukarela" membubarkan organisasinya, dan menarik dukungan mereka pada kemerdekaan.

Apa yang disebut sebagai pembantaian Passabe pada September 1999 adalah yang paling sistematis dari semua tindakan kekerasan yang dilakukan dalam periode sesudah pemungutan suara di Timor-Leste. Dalam waktu tiga hari, mulai dari 8 hingga 10 September setidaknya 82 orang dibunuh. Semua korban adalah penduduk dari empat desa di Kecamatan Oesilo, bagian tenggara kabupaten ini. Sedikitnya 12 orang lainnya dibunuh bersama-sama di Desa Maquelab, di pantai utara, pada Oktober. Hampir semua desa yang dijadikan sasaran diketahui sebagai basis prokemerdekaan, dan para korban sebagian besar adalah pemimpin atau pendukung kemerdekaan. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Passabe dan Maquelab.)

Jumlah korban yang sangat besar dan sifat sistematis dari pembunuhan di Passabe dan Maquelab tampaknya dapat dikaitkan dengan tiga faktor utama. Pertama, seperti yang sudah dikemukakan, kekuatan milisi didukung kuat oleh semua pejabat sipil, militer, dan kepolisian di Kabupaten Oecussi.

Faktor kedua adalah kepergian lebih awal UNAMET dan personel internasional lainnya, dan kehadiran pasukan multinasional yang relatif lambat. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, personel UNAMET mendapatkan ancaman pada hari-hari awal September, yang membuat diambilnya keputusan untuk melakukan evakuasi ke Dili. Ini membuat Oecussi sepenuhnya tanpa pengamat internasional, suatu keadaan yang memungkinkan TNI, Polri, dan milisi Sakunar bebas bertindak dengan impunitas penuh. Pasukan INTERFET mulai datang di Dili pada 20 September dan ditempatkan ke kabupaten-kabupaten lain pada hari-hari berikutnya, tetapi mereka belum tiba di Oecussi sampai 22 Oktober, dan sekitar waktu itu puluhan penduduk sipil telah dibunuh.

Faktor ketiga yang terkait adalah kedekatan Kabupaten Oecussi dengan wilayah Indonesia, dan letaknya yang terkucil dari wilayah Timor-Leste yang lain. Sebagai kantong yang dikelilingi dari arah timur, barat, dan selatan oleh Timor Barat Indonesia, dan dibatasi oleh laut di utara, kabupaten ini pada dasarnya terpisah dari wilayah Timor-Leste yang lain. Posisi geografisnya berarti bahwa kekuatan TNI dan milisi dapat bergerak dengan mudah melintasi perbatasan masuk Indonesia, seperti yang mereka lakukan ketika berlangsungnya pembantaian Passabe.

Viqueque (Kodim 1630)

- Dandim: Letnan Kolonel Djoko Sukarsono; Letnan Kolonel Gustaf Hero
- Bupati: Martinho Fernandes
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Abdul Rahman
- Milisi: Makikit, 59/75 Junior
- Jumlah yang dibunuh: 8-30 orang

Kabupaten Viqueque mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang lebih rendah dibandingkan sebagian besar kabupaten lain, tetapi tidak sepenuhnya terlepas

dari kekerasan.[*] Paling tidak delapan orang, tetapi mungkin sebanyak 30 orang, dibunuh pada 1999, dan diperkirakan 10.000 orang dipindahkan secara paksa dari rumah-rumah mereka. Berkebalikan dari pola di tempat-tempat lain di Timor-Leste, sebagian besar pembunuhan di Viqueque terjadi sebelum pemungutan suara. Penghancuran fisik sangat berbeda-beda di dalam kabupaten ini. Di beberapa wilayah, 90% bangunan dihancurkan, sementara di wilayah lain hampir tidak ada penghancuran samasekali.

Milisi dan pihak berwenang

Dua kelompok milisi utama di Viqueque adalah Makikit dan 59/75 Junior. Bila dibandingkan dengan kelompok milisi di bagian barat, kedua milisi ini tidak begitu kuat. Di tiga dari lima kecamatan—Ossu, Uatolari, dan Uato Carbau—tidak ada milisi. Menurut satu perkiraan, di seluruh kabupaten ini pada pertengahan 1999 jumlah milisi kurang daripada 100 orang.

Kelemahan relatif milisi di Viqueque mungkin terkait dengan keberadaan Falintil yang kuat di sana, dan keengganan para camat maupun kepala desa dan warga biasa untuk menjadi milisi. Salah satu dari empat tempat pemusatan kekuatan Falintil adalah di Uai Mori yang terletak di perbatasan Viqueque, dan beberapa kecamatan dianggap sebagai basis Falintil. Juga ada beberapa indikasi bahwa sejumlah perwira TNI di Kabupaten Viqueque—dengan perkecualian perwira Kopassus dan Intelijen Militer—hanya memberikan dukungan terbatas kepada milisi, dan bahwa TNI dan Polri telah diinfiltrasi oleh pendukung kemerdekaan.[†] Dandim kedua, yaitu Letnan Kolonel Gustaf Hero, mengambil sikap moderat dalam masa setelah pemungutan suara.

Milisi Makikit khususnya aktif di Kecamatan Lacluta, yang sekaligus merupakan markasnya. Misalnya, pada Agustus milisi ini melaksanakan operasi terhadap pengungsi dalam negeri yang berusaha kembali ke rumah mereka di wilayah tersebut. Kelompok milisi 59/75 Junior—yang mengambil nama dari tahun pemberontakan melawan Portugis yang gagal di Viqueque (1959), dan tahun invasi Indonesia ke Timor-Leste (1975)— bermarkas di Desa Beobe, di kota Viqueque. Walaupun aktif dalam periode pra-UNAMET, namun di sebagian besar periode UNAMET milisi ini tidak menonjol. Pada pertengahan Agustus, milisi ini menjadi lebih agresif, mengintimidasi banyak penduduk setempat, dan menyerang kantor-kantor CNRT dan DSMPTT yang baru dibuka di kota Viqueque.

Menurut banyak keterangan, milisi Viqueque didukung kuat oleh Bupati Martinho Fernandes yang disebut-sebut pernah menjadi teman Prabowo Subianto, dan juga seorang anggota kehormatan Kopassus. Fernandes bahkan mengatakan kepada

---

* Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada sumber sumber berikut ini: UNTAET, DHRO-Viqueque, “Human Rights Violations: Viqueque District,” [tanpa tanggal]; dan UNAMET, MLO-Viqueque, “Outline of Pro-Integration Militias in Viqueque Area,” 6 Agustus 1999, dimuat dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

† Sampai dengan suatu hari pada Agustus, Dandim adalah Letnan Kolonel Djoko Soekarsono (alias Joko Suharsoyo). Ia digantikan oleh Letnan Kolonel Gustaf Hero.

delegasi pengamat internasional pada 1999 bahwa ia menganggap milisi adalah unsur yang sah dari perjuangan pro-otonomi, walaupun ada kenyataan bahwa mereka bersenjata. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, pendanaan untuk milisi disalurkan melalui kantor bupati.

Milisi juga mendapat pelatihan dan dukungan logistik dari TNI, khususnya Kopassus. Menurut Perwira Penghubung Militer UNAMET yang ditugaskan di kabupaten ini, sejumlah kecil prajurit Kopassus beroperasi dalam setiap unit milisi dan menjalankan fungsi komando dan kontrol, yang memungkinkan adanya koordinasi antarsub-unit dalam satu kelompok milisi dan dengan kelompok milisi yang lain. Unsur-unsur Kopassus juga dilaporkan secara rutin mengadakan latihan dengan milisi 59/75 Junior di basis milisi di Desa Beobe, Kecamatan Viqueque Kota. Laporan seorang Perwira Penghubung Militer UNAMET pada 5 Agustus 1999 menyimpulkan bahwa "59/75 Junior adalah instrumen penindasan politik yang didukung dan kemungkinan dikendalikan oleh Kopassus."*

Beberapa perwira TNI dalam struktur komando teritorial, khususnya Seksi Intelijen Kodim, juga terlibat langsung dalam mengoordinasi kegiatan milisi. Perwira yang paling terkemuka dan paling tinggi pangkatnya di antaranya: Kepala Seksi Intelijen Kodim, Letnan Yusuf Tandi; tiga bintara staf Intelijen Kodim, Sersan Andreas Prawin, Sersan Abdul Mansyur, dan Sersan Gabriel Tahu; dan Danramil Lacluta, Sersan Mayor Nicodemus Y.Y. , yang telah bertugas selama tujuh tahun dalam pasukan Kopassus sebelum menjadi Danramil.

Selain pendanaan resmi dan pelatihan, ada bukti kuat bahwa milisi di Viequeque menerima senjata dari pihak berwenang militer Indonesia. Para Perwira Penghubung Militer UNAMET menyaksikan milisi di Viqueque memanggul berbagai jenis senjataapi modern, termasuk senapan otomatis SP-1, dan pistol. Bupati mengaku kepada para pengamat internasional (IFET) bahwa 59/75 Junior memiliki senjata. Seorang mantan anggota milisi 59/75 Junior mengatakan kepada para penyelidik bahwa dua bintara Intelijen Kodim yang namanya sudah disebut di muka (Sersan Gabriel Tahu dan Sersan Andreas Prawin) telah mengatur 12 kotak senjata untuk dikirim kepada milisi di Beobe pada 8 Maret 1999. Saksi yang lain mengatakan bahwa 60 pucuk senjata disimpan di markas Kodim di Dilor, dan dibagikan pada malam hari oleh Danramil, Sersan Mayor Nicodemus Y.Y.

Akhirnya, milisi di Viqueque juga mendapat dukungan tidak langsung dari Batalion 406, batalion tempur yang ditempatkan di kabupaten ini. Sementara hanya sedikit bukti langsung tentang hubungan Batalion 406 dan milisi, pada awal Agustus para Perwira Penghubung Militer UNAMET menyimpulkan bahwa kesatuan militer itu mungkin telah membangun hubungan "yang bersahabat" dengan mereka. Laporan

* UNAMET, MLO-Viqueque, "Outline of Pro-Integration Militias in Viqueque Area," 6 Agustus 1999. Aitarak dilaporkan memberikan bantuan pelatihan milisi di kawasan Dilor, dan para Perwira Penghubung Militer UNAMET yakin bahwa mungkin milisi itu melakukannya sebagai satu organisasi samaran bagi Kopassus/SGI.

itu menyimpulkan, "sangat tidak mungkin bahwa Komandan BTT 406 Letnan Kolonel Sony tidak mengetahui kegiatan 59/75 mengingat ia demikian menonjol dalam urusan-urusan setempat."*

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Dalam bulan-bulan pertama 1999 hanya ada beberapa pelanggaran hak asasi manusia di Viequeque, tetapi pelanggaran mulai lebih sering terjadi dan lebih berat seiring dengan dimulainya perekrutan milisi pada Maret. Pada 20 Maret, setelah berkumpul di pos TNI di Dilor, Kecamatan Lacluta, milisi yang baru direkrut menyerang orang-orang di desa-desa sekitarnya, memukuli dan mengancam mereka yang dianggap mendukung kemerdekaan. Sekitar 160 orang ditahan sebentar di Koramil Dilor oleh TNI dan milisi Makikit, dan diperkirakan 500 orang dari wilayah tersebut meninggalkan rumah mereka karena ketakutan, dan mengungsi sampai 20 km jauhnya. Kekerasan semakin meningkat pada April, ketika milisi melancarkan operasi intimidasi terhadap orang-orang yang diduga tokoh prokemerdekaan di Kecamatan Lacluta dan Kecamatan Viqueque. Dalam satu insiden di Kecamatan Viqueque, pada 18 April, milisi 59/75 menculik 18 pemuda yang mereka curigai mendukung Falintil.

Namun, kekerasan paling buruk terjadi pada Mei. Menurut seorang mantan anggota milisi, setidaknya 14 orang dibunuh oleh milisi dalam dua kejadian terpisah, yaitu pada 2 Mei dan 13 Mei, dan jenazah mereka dikuburkan di perkuburan Beobe, Viqueque Kota. Penyelidik-penyelidik PBB kemudian menemukan sebanyak 18 makam di perkuburan tersebut, yang mereka yakini berisi tubuh dari orang-orang yang dibunuh pada Mei 1999. Pemeriksaan terhadap jenazah mereka mengungkap bahwa sebagian telah dibunuh dengan cara yang luarbiasa dan mengerikan—sebatang tulang binatang ditusukkan ke langit-langit mulut hingga menembus otak para korban.

Pada 30 Mei, 13 orang laki-laki dari Lacluta ditahan dengan tuduhan membantu Falintil. Mereka kemudian dipukuli dengan pipa dan kayu panjang. Pemukulan tersebut dilaporkan dilakukan di markas Koramil, di bawah pengawasan Danramil Lacluta, Sersan Mayor Nicodemus Y.Y.

Kegiatan milisi berkurang secara berarti seiring dengan penempatan UNAMET dan para pengamat internasional pada Juni. Dalam masa tiga bulan berikutnya suasana relatif tenang. Perkecualian paling serius terhadap keadaan itu terjadi pada 10-11 Agustus di kota Viqueque. Pada 10 Agustus, Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur (DSMPTT) secara resmi membuka kantornya di kota ini. Senja harinya, sekelompok milisi tiba di kantor itu dengan mengendarai beberapa sepeda motor dan truk dan mulai menembakkan senjatanya ke arah bangunan itu; tidak kurang dari 14 lubang peluru kemudian ditemukan di atap. Pada hari yang sama, dua mahasiswa anggota CNRT dituduh mencuri sebuah sepeda motor dan ditahan oleh TNI.

Pada hari berikutnya, 11 Agustus, kantor CNRT dan kantor DSMPTT diserang oleh milisi bersenjata. Petugas TNI dan Polri tidak menghentikannya. Kenyataannya, ada

* UNAMET, MLO-Viqueque, "Outline of Pro-Integration Militias in Viqueque Area," 6 Agustus 1999.

sejumlah saksi yang melihat beberapa prajurit TNI berjalan dengan tiga orang milisi di luar kantor DSMPTT. Kemudian pada hari yang sama sekelompok milisi bersenjata yang didukung oleh prajurit TNI, mengambil posisi di seberang sungai berhadapan dengan sekelompok mahasiswa. Anggota milisi (dan mungkin prajurit-prajurit TNI) menembakkan senjata, membunuh seorang mahasiswa. Dua orang pemuda dibunuh kemudian pada hari yang sama oleh milisi, dan tiga orang terluka.[*]

Akibat dari kejadian-kejadian ini, sebagian besar anggota DSMPTT dan CNRT meninggalkan kota Viqueque; banyak penduduk di desa-desa yang berdekatan juga meninggalkan rumah mereka. Dalam dua minggu selanjutnya terjadi peningkatan intimidasi milisi di sejumlah kecamatan, dengan ancaman bahwa jika pro-otonomi kalah, akibatnya akan lebih buruk lagi. Menurut satu perkiraan, operasi teror itu mendorong sekitar 1.700 orang mengungsi pada akhir Agustus.

Walaupun ada ancaman-ancaman ini, dan serangan-serangan serius pada pertengahan Agustus, periode sesudah pemungutan suara di Viqueque hampir bebas dari kekerasan, dengan hanya ada dua orang yang dilaporkan terbunuh. Situasi yang unik ini mungkin berhubungan dengan kelemahan relatif milisi di kabupaten ini dan kuatnya Falintil. Sikap moderat Dandim yang baru, Letnan Kolonel Gustaf Hero, bisa jadi merupakan satu faktor. Dalam suatu pertemuan yang diadakan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara, Letnan Kolonel Gustaf Hero dilaporkan mengumpulkan kedua belah pihak dan meminta mereka menghormati hasil pemungutan suara dan tidak melakukan kekerasan. Ia juga mengatakan akan berusaha mencegah kekerasan di masa sesudah pemungutan suara. Walaupun demikian, pasukan milisi dan TNI melakukan penghancuran di beberapa wilayah, dan sebanyak 10.000 penduduk meninggalkan Kabupaten Viqueque karena ketakutan.

Studi kasus: Insiden utama Hak Asasi Manusia

Realitas kekerasan yang mengerikan pada 1999 hampir mustahil dipahami. Dalam satu laporan yang dikeluarkan segera setelah mengunjungi Timor-Leste di akhir 1999, Komisi Penyelidik Internasional untuk Timor-Leste mengemukakan bahwa para anggotanya telah "dihadapkan pada kesaksian-kesaksian yang melampaui imajinasi mereka."[†] Bab ini bertujuan memberikan pemahaman terbatas tentang kenyataan yang mengerikan tersebut, dengan mengungkapkan kembali secara terperinci lima belas insiden utama hak asasi manusia pada 1999.

* Tiga orang yang meninggal diidentifikasi sebagai: Rogério Soares (alias Rogério Amaral), Carlos Sarmento, dan Mariano Soares Pinto (alias Mariano Gusmão).

† United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, "Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary General," Januari 2000, paragraf 34.

Beberapa kasus yang diperiksa di sini—seperti pembantaian di Gereja Liquiçá dan di Gereja Suai—relatif sudah diketahui dengan baik dan menjadi fokus proses hukum. Sementara kasus-kasus yang lain kurang diketahui, setidaknya di luar Timor-Leste. Kasus-kasus ini dimasukkan di sini karena kasus-kasus ini adalah bagian dari jalinan kekerasan dan penderitaan, dan seperti kasus-kasus lain yang terkenal, kasus-kasus ini memberikan pemahaman yang berharga mengenai pola umum kekerasan dan pertanggungjawaban yang dibahas di bagian lain dalam laporan ini.

Pembantaian di Gereja Liquiçá (6 April 1999)

Salah satu insiden kekerasan yang paling awal dan paling mengejutkan pada 1999 adalah pembantaian terhadap sebanyak 60 orang pengungsi di gereja Katolik di kota Liquiçá pada 6 April.* Serangan itu juga memberikan beberapa bukti terkuat tentang hubungan erat antara milisi dan pihak berwenang militer dan sipil.

Pembantaian di Gereja Liquiçá terjadi dengan latar belakang meningkatnya kekerasan milisi di kabupaten ini. Pada hari-hari sebelum pembantaian, anggota-anggota milisi BMP, bersama dengan prajurit TNI dan Polri, telah menyerang dan menahan sejumlah pemimpin CNRT yang dikenal di Kecamatan Liquiçá dan Kecamatan Maubara, tempat BMP berbasis. Selama serangan-serangan itu terjadi, pada 4 dan 5 April, puluhan rumah dibakar dan sejumlah penduduk sipil dibunuh.

Karena ketakutan oleh kekerasan yang meningkat, penduduk Liquiçá dan Maubara mulai mengungsi ke tempat-tempat yang mereka anggap aman, termasuk kompleks gereja Katolik. Suara tembakan senjata otomatis selama satu jam di siang hari pada 5 April, yang disusul kedatangan ratusan anggota milisi BMP, semakin mendesak mereka untuk pergi menyelamatkan diri. Menjelang petang, sekitar 2.000 orang, banyak dari mereka adalah perempuan dan anak-anak kecil, telah mengungsi di kompleks gereja. Beberapa berada di dalam gereja itu sementara yang lain berada di kediaman pastor setempat, Pastor Rafael dos Santos, yang bersebelahan dengan gereja.

Di luar kompleks gereja, para anggota milisi BMP dan prajurit TNI berkeliaran di jalan-jalan kota Liquiçá, untuk mencari para pemuda dan pemimpin prokemerdekaan. Beberapa anggota milisi dan prajurit tentara berkumpul di luar gereja dan menembak-nembakkan senjatanya ke udara, mengancam. Para pengungsi yang ketakutan untuk kembali ke rumah mereka memilih tinggal dan menginap di gereja.

* Kecuali jika dinyatakan lain, penjelasan ini didasarkan pada sumber-sumber berikut: KPP-HAM, "Report of the Indonesian Commission on Human Rights Violations in East Timor" (internal), Jakarta, Januari 2000; Kesaksian Pastor Rafael dos Santos, direkam dan dikompilasi di Sydney, Australia pada tanggal 27-28 Oktober 1999; UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., Dili [tanpa tanggal]; dan Polda Timor Timur, Direktorat Reserse, "Laporan Penanganan Kasus Liquisa" (No. R/355/IV/1999/Ditserse), Dili, 15 April 1999.

Pada pagi keesokan harinya, 6 April, para anggota milisi BMP yang bersenjatakan parang, pisau, tombak, dan berbagai macam senjataapi berkumpul di luar gereja. Yang juga hadir di tempat kejadian adalah pasukan TNI dari Kodim Liquiçá, Koramil Maubara, 'Satgas Tribuana' Kopassus, dan Batalion 143. Sepanjang pagi para anggota BMP dan beberapa prajurit mengejek dan mengancam para pengungsi, menyuruh mereka "menyerah". Menurut pastor paroki, Pastor Rafael, para anggota BMP mengancam pengungsi dengan mengatakan bahwa dua kelompok milisi lain (Mahidi dan Halilintar) akan bergabung dengan mereka pada pukul 10 pagi, dan mereka semua akan menyerang gereja. Selain melontarkan ancaman-ancaman, beberapa anggota milisi melempari dengan batu, yang mengakibatkan luka dan merusak kendaraan di halaman gereja. Beberapa anggota milisi juga menembakkan senjata rakitannya ke udara. Namun para prajurit TNI samasekali tidak turun tangan.

Sekitar 15 petugas polisi dari Polres Liquiçá dan satu peleton Brigade Mobil (Brimob) Dili juga ditugaskan di tempat kejadian, sepertinya untuk melindungi pengungsi. Namun beberapa jam sebelum serangan, para polisi terlihat berbincang-bincang akrab dengan para anggota milisi bersenjata, yang saat itu sudah berjumlah ratusan. Seperti prajurit-prajurit TNI, prajurit Brimob dan Polri ini tidak berusaha menangkap atau melucuti para anggota milisi, atau mencegah mereka mengancam orang-orang yang berada di dalam gereja.

Petugas Polri di tempat kejadian bukannya berusaha membubarkan milisi malah menuntut agar Pastor Rafael menyerahkan dua orang pemimpin prokemerdekaan—Kepala Desa Dato, Jacinto da Costa Pereira,* dan seorang lelaki lain. Pastor Rafael menjelaskan bahwa satu orang yang diminta tidak ada di tempat, dan ia menolak menyerahkan Jacinto da Costa Pereira kepada Polisi karena ia takut Jacinto akan dibunuh. Pastor itu juga menolak pernyataan, yang dibuat oleh para petugas Brimob dan milisi, bahwa Jacinto da Costa Pereira membawa sepucuk senjata ke dalam gereja.

Tidak bertindaknya Polri dan TNI di tengah meningkatnya kekerasan milisi sebenarnya tidak mengejutkan. Seperangkat bukti penting mengarah pada kesimpulan bahwa berkumpulnya para milisi di Liquiçá, dan serangan terhadap pengungsi, merupakan bagian dari rencana yang terorganisasi dengan baik, yang digerakkan oleh para pejabat tinggi militer dan sipil. Saat kejadian berlangsung, Dandim Letnan Kolonel Asep Kuswadi dan Bupati Leoneto Martins, berkali-kali rapat dengan komandan-komandan penting TNI, Kopassus, Polri, dan BMP.

Dalam salah satu rapat tersebut, yang dipimpin oleh Dandim pada pagi hari 6 April, para prajurit TNI diperingatkan akan kemungkinan adanya serangan milisi terhadap para pengungsi dalam negeri, tetapi mereka tidak diberi perintah untuk mencegahnya, atau melindungi orang-orang yang berada di kompleks gereja. Dalam rapat lain pada hari yang sama, Bupati dan Komandan BMP, Manuel de Sousa, memberitahu para pemimpin milisi bahwa mereka harus mempersiapkan

* Laporan KPP-HAM menyebut namanya sebagai Jacinto da Costa Conceição.

diri untuk menyerang gereja dan siap membunuh setiap pengungsi yang berusaha melarikan diri.

Rapat terakhir di Kodim Liquiçá, yang diadakan sesaat sebelum serangan, dihadiri oleh para pemimpin sipil dan militer yang paling penting di tingkat kabupaten dan provinsi. Mereka antara lain adalah: Wakil Danrem Timor Timur, Kolonel Mudjiono; Komandan Satgas Tribuana VIII Kopassus, Letnan Kolonel Yayat Sudrajat; Dandim Liquiçá, Letnan Kolonel Asep Kuswadi; Bupati, Leoneto Martins; dan Kepala Kepolisian Resor, Letnan Kolonel Adios Salova.

Segera setelah pertemuan tersebut berakhir, antara pukul 12 dan 1 siang, satu tembakan terdengar di sekitar gereja.[*] Para prajurit Brimob dan milisi BMP mulai menembakkan senjata mereka ke arah kompleks, dan serangan dimulai. Milisi memimpin serangan, namun pasukan TNI dan Brimob berada dekat di belakangnya.[†] Sebagian besar saksimata mengatakan bahwa beberapa prajurit TNI dan Brimob bersiaga tanpa berbuat apa-apa dan membiarkan milisi menyerang, sementara yang lain aktif bergabung dengan milisi.

Dakwaan yang dikeluarkan dalam kasus ini oleh Penuntut Umum UNTAET menyatakan bahwa "anggota-anggota TNI melepaskan tembakan ke arah kerumunan orang dan dengan membabibuta membunuh sejumlah orang."[‡] Pastor Rafael dos Santos, pastor paroki Liquiçá, memberikan kesaksian di bawah ini mengenai awal terjadinya pembantaian:

> *"... Saya mendengar tembakan dari kelompok Besi Merah Putih (BMP) dan Brimob di depan rumah paroki. Mereka menembak ke udara. Setelah itu anggota-anggota Besi Merah Putih dan Kodim masuk dan mengepung orang-orang yang berada di dalam kompleks gereja. Mereka mulai menembak siapa saja. Orang-orang yang didapati di luar gedung Paroki dibacok sampai jatuh ... Anggota milisi didampingi oleh prajurit Kodim dan unsur-unsur Brimob. Mereka memasuki kediaman pastor dan mulai membunuh orang-orang dengan parang dan menembak orang-orang di dalam rumah. Pada saat itu masih ada perempuan, anak-anak, dan laki-laki di dalam kompleks. Mereka mulai membunuh yang laki-laki dulu karena mereka berada dekat pintu. Para laki-laki ini sebelumnya mendorong perempuan dan anak-anak ke belakang."*[§]

---

* Menurut satu sumber, tembakan itu ditujukan ke arah pasukan Brimob oleh seorang Babinsa TNI dari Fatumasi, sebagai provokasi yang sengaja dimaksudkan untuk memancing penyerangan.

† Tuduhan tentang keterlibatan langsung prajurit TNI di dalam penyerangan di Liquiçá mungkin dikonfirmasi lebih lanjut oleh satu memorandum kepada Jenderal Wiranto, dari Kepala Staf Kodam IX, Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon. Dalam memo tersebut, yang dilaporkan diserahkan sebagai bukti di dalam salah satu sidang pengadilan di Jakarta, Simbolon disebut telah menegaskan bahwa para prajurit Kopassus dan Kodim mendukung kekuatan pro-otonomi dan menembakkan senjata-senjata mereka selama berlangsungnya insiden tersebut. Lihat *Suara Timor Lorosae*, 11 September 2002.

‡ UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., Dili, [tanpa tanggal], paragraf 112.

§ Kesaksian Pastor Rafael dos Santos, direkam dan dikumpulkan di Sydney, Australia tanggal 27 Oktober 1999, halaman 8.

Pasukan Brimob membantu penyerangan dengan melemparkan gas air mata ke dalam rumah paroki, untuk memaksa pengungsi keluar dari tempat itu. Ketika mereka lari dari gereja, mereka dibacok dengan parang dan pisau, atau ditembak. Penjelasan Pastor Rafael selanjutnya:

> *"Saya melihat para anggota Brimob memecahkan jendela rumah paroki dan melempar gas air mata berkali-kali ke dalam rumah paroki, sampai orang-orang yang berlindung di dalamnya keluar karena mereka tidak tahan dengan rasa pedih di mata mereka. Saat orang-orang keluar dari rumah Paroki, milisi mulai membunuh laki-laki, tetapi mereka tidak membunuh perempuan dan anak-anak. Kaum perempuan dan anak-anak dibiarkan meninggalkan kompleks, sementara laki-laki dibacok sampai mati."*[*]

Ketika sebagian besar pengungsi telah meninggalkan gereja dan rumah paroki, anggota-anggota BMP, Polri, dan prajurit TNI, termasuk Sersan TNI Tome Diogo, masuk mencari yang masih tersisa di dalam. Mereka yang ditemukan langsung dibunuh. Pastor Rafael menggambarkan kejadian ini:

> *"Setelah kami keluar dari rumah Paroki milisi Besi Merah Putih dan anggota Polres dan Kodim bergerak dari kamar ke kamar di dalam rumah Paroki menghancurkan barang-barang, mencari dan membunuh orang. Sejumlah pemimpin muda umat dari kaum prokemerdekaan Liquiçá berusaha bersembunyi di atap rumah. Milisi menarik turun atap rumah Paroki. Mereka menarik turun orang-orang muda itu dan membunuh mereka."*[†]

Kesaksian Pastor Rafael, dan khususnya pernyataannya bahwa tentara dan polisi bergabung dalam serangan tersebut, telah dikonfirmasi oleh saksi-saksi yang lain. Bersaksi di pengadilan terhadap Letnan Kolonel Asep Kuswadi, Letnan Kolonel (Pol.) Adios Salova, dan Leoneto Martins pada Juli 2002 di Jakarta, seseorang yang selamat dari pembantaian mengatakan bahwa dirinya melihat para prajurit tentara dan polisi berseragam menembakkan senjata ke dalam kompleks gereja: "Semua tembakan diarahkan ke gereja," katanya, dan yang menembak "bukan hanya polisi tetapi juga tentara."[‡]

---

* Kesaksian Pastor Rafael dos Santos, halaman 8.

† Kesaksian Pastor Rafael dos Santos, halaman 9.

‡ António Conceição Santos, dikutip dalam AFP, "Survivor Says Soldiers, Police Fired Shots at Refugee-filled Timor Church," 17 Juli 2002. Saksi yang lain, bersaksi di pengadilan di Jakarta terhadap Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur, Kolonel Timbul Silaen, mengatakan di hadapan pengadilan, "Saya melihat tentara memasuki gereja dan mereka bersenjata." Emilio Barreto, dikutip dalam Reuters, "Indonesian Soldiers Stormed Timor Church: Witness," 31 Mei 2002.

Laporan resmi Polri tentang pembantaian di Gereja Liquiçá menyatakan bahwa hanya lima orang terbunuh dalam serangan tersebut.[*] Penyelidikan independen menyatakan jumlah sebenarnya paling tidak 30, dan bisa jadi sebanyak 60 orang yang dibunuh.[†] Namun, jumlah korban secara pasti belum diketahui karena mayat mereka yang terbunuh dibawa pergi dan dilenyapkan segera setelah pembantaian. Dalam pernyataan kepada para penyelidik, para saksi menunjukkan bahwa puluhan mayat diangkut ke dalam truk oleh para prajurit TNI dan anggota milisi, dan dibuang atau dikubur di beberapa tempat.

Seorang saksi menyatakan, misalnya, bahwa dirinya dan enam orang laki-laki lainnya menerima perintah dari Danramil (Sersan Mayor Carlos Amaral) dan Camat Maubara (José Afat) untuk membantu menguburkan lima mayat.[‡] Menurut kesaksiannya, mayat-mayat itu dibawa ke Maubara dalam sebuah truk oleh para prajurit Kodim Liquiçá pada malam tanggal 6 April, dan dikuburkan kemudian pada malam yang sama, dekat rumah seorang anggota Koramil Maubara.[§] Kesaksian ini konsisten dengan satu laporan terpisah yang menyatakan bahwa sebuah truk yang mengangkut lima mayat dikemudikan dari Koramil Maubara ke pos BMP di jalan antara Liquiçá dan Maubara, dan bahwa para milisi di pos tersebut kemudian diperintahkan menggali lubang kubur yang berjarak 200 meter dari pos dan menguburkan mayat-mayat tersebut.[¶]

Saksi lain, seorang mantan anggota milisi BMP, mengatakan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia bahwa dirinya diperintahkan oleh seorang perwira TNI untuk membawa sebuah truk militer untuk mengangkut 15 mayat dari Liquiçá ke Danau Masin, satu rawa yang berada dekat jalan antara Liquiçá dan Maubara. Setelah membuang mayat-mayat itu, saksi berkata, ia diperintahkan

* Laporan tersebut disusun oleh Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Timor Timur, dan disampaikan kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 15 April 1999. Laporan tersebut adalah: Polda Timor Timur, Direktorat Reserse, "Laporan Penanganan Kasus Liquisa" (No. R/355/IV/1999/Ditserse), Dili, 15 April 1999.

† Satu laporan UNTAET dari bulan Desember menunjukkan bahwa Civpol memiliki satu daftar nama 61 orang yang diduga dibunuh dalam insiden ini, dan menyatakan bahwa "sudah diterima secara umum bahwa jumlah seluruhnya mungkin sekitar 50-60 orang." Lihat UNTAET, UNMO-Liquiçá, "History of Liquiçá District Through 1999," Desember 1999, halaman 3. Dalam laporannya pada Januari, KPP-HAM Indonesia menyimpulkan dengan lebih hati-hati bahwa "sedikitnya 30 orang" telah dibunuh. Satu surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Penuntut Umum UNTAET menyatakan bahwa "lebih dari seratus orang dibunuh atau dilukai" dalam insiden ini. Pastor Rafael yakin bahwa lebih dari seratus orang yang meninggal.

‡ Dikutip dalam KPP-HAM, "Report of the Indonesian Commission on Human Rights Violations in East Timor," (internal), Jakarta, Januari, 2000, halaman 17.

§ Para tentara yang diduga membawa mayat-mayat itu ke Maubara adalah Sersan Tome Diogo dan Sersan Jacob. KPP-HAM, "Report of the Indonesian Commission on Human Rights Violations in East Timor," (internal) Jakarta, Januari 2000, halaman 17.

¶ Ini juga konsisten dengan kesaksian bahwa Sersan TNI Tome Diogo mengendarai sebuah truk yang mengangkut lima mayat ke rumah sakit di Liquiçá pada malam hari tanggal 6 April 1999, sebelum mengemudikan truk itu lagi dengan mayat-mayat yang masih berada di dalamnya. Lihat UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., Dili, [tanpa tanggal], paragraf 120.

untuk kembali membawa truk tersebut ke Koramil Maubara.* Komnas HAM juga menemukan bahwa sejumlah mayat telah dilemparkan ke laut di wilayah Kecamatan Maubara, dengan menggunakan tujuh truk dan empat jip.†

Penghilangan mayat secara sistematis seperti yang digambarkan dalam kesaksian-kesaksian ini sepenuhnya sama dengan pola pembuangan mayat yang terjadi pada pembantaian di Gereja Suai pada 6 September, dan di kantor Kepolisian Resor Maliana pada 8 September. Bersama dengan bukti-bukti mendasar tentang keterlibatan TNI dan Polri dalam pembantaian itu sendiri, kehadiran para pejabat penting di tempat kejadian kejahatan, dan tanggung jawab para pejabat tersebut dalam membentuk dan mengoordinasikan BMP, bukti penghilangan mayat ini membuat nyaris pasti bahwa pembantaian di Gereja Liquiçá direncanakan oleh pihak-pihak berwenang TNI dan sipil tingkat tinggi.

Pembunuhan di Cailaco (12 April 1999)

Beberapa dari pelanggaran hak asasi manusia yang paling luarbiasa pada 1999 terjadi di Kabupaten Bobonaro, di mana paling tidak 229 penduduk sipil dibunuh dalam kekerasan politik, dan banyak lainnya menderita penyiksaan (termasuk pemerkosaan), pemukulan, penghancuran harta benda, dan pemindahan paksa. Semuanya kecuali sejumlah kecil korban adalah pendukung kemerdekaan. Para pelaku umumnya adalah anggota beberapa kelompok milisi yang beroperasi di kabupaten ini, tetapi dalam banyak kasus, pelaku utamanya adalah para perwira dan prajurit TNI.

Satu contoh yang paling jelas dari pola umum ini terjadi di Kecamatan Cailaco pada 12 April 1999.‡ Dalam dua kejadian terpisah pada hari yang sama, prajurit-prajurit TNI dan milisi menangkap dan dengan sengaja mengeksekusi tujuh orang. Mereka yang meninggal diidentifikasi sebagai: Carlito Mau Leto (32 tahun), Domingos Resi Mau (29 tahun), João Evangelista Lima Vidal (40 tahun), Paulino Soares (34 tahun), José Pau Lelo (37 tahun), António Soares (45 tahun), dan Manuel Maulelo Araújo.

Menurut satu surat dakwaan yang diajukan oleh Wakil Jaksa Agung Timor-Leste untuk Kejahatan Berat,§ ketujuh pembunuhan ini dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan sejumlah pejabat senior militer dan sipil, termasuk di dalamnya: Komandan Distrik Militer (Dandim) Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian; Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Letnan Sutrisno; Bupati, Guilherme dos Santos; komandan

* KPP-HAM, "Report of the Indonesian Commission on Human Rights Violations in East Timor," (internal) Jakarta, Januari 2000, halaman 18.

† KPP-HAM, "Report of the Indonesian Commission on Human Rights Violations in East Timor," (internal) Jakarta, Januari 2000.

‡ Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini berdasarkan pada UNTAET, DHRO-Bobonaro, "Bobonaro District 1999 report," September 2002.

§ Surat dakwaan diajukan pada 3 Februari 2003.

milisi, João Tavares; dan Ketua FPDK Kabupaten Bobonaro, Jorge Tavares. Surat dakwaan ini juga menyebut Letnan Sutrisno sebagai salah satu pelaku langsung dalam tujuh pembunuhan tersebut.

Menurut beberapa keterangan, pembunuhan Cailaco merupakan tindakan pembalasan terhadap pembunuhan tokoh pro-otonomi setempat, Manuel Gama, dan setidaknya seorang prajurit TNI, dalam sebuah penyergapan di dekat Desa Poegoa, Kecamatan Cailaco, pada pagi hari 12 April. Gama yang juga Kepala Keuangan pemerintah kabupaten dan belakangan diangkat menjadi wakil ketua FPDK di Maliana, sedang berkendaraan dari Cailaco ke Maliana dengan pengawalan beberapa prajurit TNI ketika serangan terjadi. Ia dan salah satu prajurit TNI ditembak dan dibunuh dalam jarak dekat, sementara seorang prajurit TNI lainnya dilaporkan selamat dari penyergapan.

Sampai dengan awal 2003, identitas para pembunuh Manuel Gama masih belum ditetapkan. Beberapa penduduk menyatakan bahwa serangan itu dilakukan oleh seorang anggota milisi Halilintar, sebagai satu dalih terencana untuk tindakan menghantam para pendukung kemerdekaan, yang kemudian menyusul. Sementara yang lain meyakini bahwa penyergapan dan pembunuhan tersebut merupakan kerja dari para pejuang Falintil, yang telah beroperasi di wilayah tersebut dalam beberapa bulan sebelumnya. Siapapun pelakunya, serangan itu memang menjadi pemicu sebuah operasi pembalasan, yang dalam operasi tersebut para penduduk setempat ditahan, dipukuli, dipindahkan dengan paksa, dan dibunuh oleh para prajurit TNI dan anggota milisi Halilintar.

Setelah mengetahui kematian Manuel Gama, komandan pos SGI di Marco, Mahalan Agus Salim, memerintahkan prajurit TNI dan milisi Halilintar untuk melacak pelakunya.[*] Beberapa tim prajurit dan milisi kemudian menyebar ke desa-desa di wilayah sekitar tempat penyerangan, mencari tersangka pembunuh.[†] Sepanjang masa pembersihan awal ini sekitar 30 orang penduduk, termasuk perempuan dan anak-anak, ditahan dan dipaksa berbaris menuju markas Koramil di Marco. Perempuan dan anak-anak ditahan secara terpisah selama empat hari sebelum kemudian dibebaskan. Beberapa dari laki-laki yang ditahan—termasuk Carlito Mau Leto dan Domingos Resi Mau yang belakangan dibunuh—mengalami pemukulan yang parah selama dalam penahanan. Pemukulan dimulai setelah perintah diterima dari Kodim di Maliana dan dari komandan milisi João Tavares.[‡] Menurut surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat:

* East Timor, Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Cailaco Indictment, paragraf 44.

† Surat dakwaan Cailaco menggambarkan operasi tersebut sebagai berikut: "Pada tanggal 12 April 1999, para anggota TNI dan milisi Halilintar menyerang penduduk sipil di Kecamatan Cailaco yang dianggap sebagai pendukung kemerdekaan. Serangan ini merupakan bagian integral dari operasi kekerasan yang sedang berjalan terhadap penduduk sipil Timor Timur." Cailaco Indictment, paragraf 42.

‡ Cailaco Indictment, paragraf 46-50.

> “Para tahanan diperintahkan untuk berbaring di lantai dan TNI dan anggota milisi yang hadir menghantam mereka dengan tinju dan sepatu bot. Mereka juga dipukuli dengan popor senapan ketika ditanyai tentang pembunuhan terhadap Manuel Gama.”[*]

Sejumlah tahanan dibebaskan, tetapi beberapa tetap berada dalam penahanan di Marco. Dua lainnya—Carlito Mau Leto dan Domingos Resi Mau—dibawa ke tempat pembunuhan Manuel Gama, dekat Desa Poegoa. Para prajurit dan anggota milisi juga sudah membawa tiga penduduk desa lainnya ke tempat itu, dan mulai memukuli dan menginterogasi mereka tentang pembunuhan terhadap Manuel Gama.[†] Para prajurit dan milisi yang berada di tempat itu berada di bawah wewenang Letnan Sutrisno, Kepala Seksi Intelijen Kodim Bobonaro. Letnan Sutrisno hadir ketika para prajurit dan milisi memukuli para tahanan. Menurut beberapa saksi, ia juga menendang wajah dan badan salah satu tahanan ketika terbaring di tanah dengan tangan terikat.[‡]

Setelah menerima kabar tentang kematian Manuel Gama, tokoh-tokoh senior TNI dan sipil di Maliana berkumpul di kantor Bupati untuk merencanakan tanggapan mereka. Mereka yang hadir mencakup: Dandim, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian; Bupati, Guilherme dos Santos; komandan milisi João Tavares; dan pimpinan FPDK kabupaten Bobonaro, Jorge Tavares. Menurut surat dakwaan, orang-orang tersebut membahas rencana untuk membunuh para anggota CNRT dan pegawai negeri sipil yang prokemerdekaan.[§]

Setelah rapat itu, kelompok tersebut bergerak dalam sebuah konvoi menuju ke dekat Desa Poegoa tempat Manuel Gama dibunuh, dan di mana setidaknya lima orang laki-laki ditahan oleh para prajurit TNI dan anggota milisi. Di sanalah, menurut para saksi, tiga orang laki-laki yang sebelumnya dipukuli, ditembak mati oleh prajurit-prajurit TNI. Keadaan di seputar pembunuhan ini tak meninggalkan keraguan bahwa ketiga orang itu dengan sengaja dieksekusi saat berada dalam tahanan, dan dengan kuat menunjukkan tanggung jawab langsung para perwira senior TNI dan komandan milisi, João Tavares.

Segera setelah mereka tiba di tempat pembunuhan, komandan milisi João Tavares dilaporkan berjalan ke arah salah satu tahanan dan berkata: “Orang-orang ini sudah menerima uang dari pemerintah, tetapi memberi makan Falintil. Kita harus bunuh orang-orang ini.”[¶] Mengikuti perintah ini, beberapa prajurit TNI menyeret ketiga tahanan—Carlito Mau Leto, Domingos Resi Mau, dan João Evangelista Lima Vidal—ke puncak sebuah bukit terdekat. Mereka diikuti Letnan Sutrisno, yang membawa senapan kaliber 5.56. Beberapa menit kemudian beberapa suara

* Cailaco Indictment, paragraf 51.

† Cailaco Indictment, paragraf 57-59.

‡ Cailaco Indictment, paragraf 66.

§ Cailaco Indictment, paragraf 73.

¶ Cailaco Indictment, paragraf 78.

tembakan terdengar dari arah tempat para tahanan dibawa. Saksi-saksi mengatakan bahwa suara tembakan itu seperti suara dari senapan kaliber 5.56. Ketiga orang itu tidak pernah terlihat lagi.*

Dari tempat pembunuhan, konvoi para pejabat, prajurit, dan anggota milisi kembali ke Marco, di mana para penduduk dan pegawai negeri sipil sudah diperintahkan berkumpul di rumah Manuel Gama. Di sana, menurut saksi-saksi, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian secara langsung mengancam para pegawai negeri kabupaten, dengan menunjukkan bahwa kalau mereka mendukung kemerdekaan mereka akan menderita nasib yang sama seperti tiga orang yang baru dibunuh di Poegoa. Kemudian, Letnan Sutrisno memberikan perintah untuk menangkap empat orang, yang semuanya dikenal sebagai pendukung kemerdekaan: Paulino Soares, José Pau Lelo, António Soares, dan Manuel Maulelo Araújo.

Keempat orang itu dipisahkan dari kerumunan dan dibawa pergi ke kompleks SGI yang letaknya bersebelahan dengan Koramil. Pada sore harinya, tanggal 12 April, mereka ditembak mati oleh para prajurit TNI dan anggota milisi Halilintar. Seperti dalam kasus tiga orang yang dibunuh terlebih dahulu di Poegoa, sedikit keraguan bahwa keempatnya dibunuh ketika ditahan, dan bahwa pembunuhan terhadap mereka diperintahkan oleh para perwira senior TNI, termasuk Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian dan Letnan Sutrisno.

Beberapa saat setelah keempat orang itu dibawa ke Koramil, Letnan Kolonel Siagian, João Tavares, dan Jorge Tavares pergi ke Koramil dan berbicara dengan Letnan Sutrisno.† Setelah pembicaraan mereka, para prajurit TNI dan milisi Halilintar diinstruksikan untuk mengisolasi wilayah tersebut, dan Letnan Sutrisno memberi perintah agar empat tahanan tadi dibawa keluar. Begitu mereka berada di luar, para tahanan disuruh melarikan diri. Paulino Soares, yang termuda dari keempat orang itu, mulai berlari dan segera ditembak mati. Ketiga orang lainnya kemudian dibunuh dengan tembakan yang dilepaskan para prajurit TNI dan anggota milisi yang mengelilingi kompleks. Tubuh keempat orang tersebut dikumpulkan dalam satu tumpukan dan dijaga oleh beberapa prajurit TNI.‡

Letnan Sutrisno telah diidentifikasi sebagai salah satu dari pelaku langsung empat pembunuhan tersebut. Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian, João Tavares, dan Jorge Tavares, hadir di lokasi dan tidak bertindak untuk menghentikan pembunuhan.§

Sampai dengan awal tahun 2003, mayat ketujuh korban pembunuhan Cailaco belum berhasil ditemukan. Para kerabat korban meyakini bahwa mayat-mayat itu dibawa oleh milisi dan prajurit TNI ke sebuah pantai dekat Atsabe, pada dini hari 13 April, dan dibuang ke laut. Tempat yang mungkin menjadi tempat pembuangan tubuh korban ditandai dengan sebuah monumen batu dan beberapa pakaian yang

* Cailaco Indictment, paragraf 79-81.

† Cailaco Indictment, paragraf 90.

‡ Cailaco Indictment, paragraf 97.

§ Cailaco Indictment, paragraf 92-96.

ditemukan di pantai pada pagi hari setelah pembunuhan, dan diyakini sebagai milik mereka yang meninggal. Di awal tahun 2000, sejumlah nelayan mengatakan kepada para penyelidik Polisi Sipil PBB bahwa pada pagi hari setelah pembunuhan mereka menemukan perahu-perahu mereka, yang semalam sebelumnya ditinggalkan di pantai, penuh dengan bercak darah dan dipindahkan dari tempat asalnya. Salah seorang nelayan mengatakan bahwa di pagi hari, ia melihat beberapa orang, yang digambarkannya sebagai milisi, mendorong satu truk sampah yang terperangkap di pasir.[*]

Tujuh pembunuhan yang terjadi pada 12 April 1999 menandai permulaan kampanye kekerasan sistematis yang secara resmi disetujui penguasa terhadap penduduk desa Kecamatan Cailaco yang dianggap sebagai pendukung kemerdekaan. (Lihat ringkasan kabupaten: Bobonaro.) Selama dua minggu berikutnya, para prajurit dan anggota milisi bersenjata melakukan patroli bersama, dan dalam patroli itu mereka membakar dan menjarah rumah-rumah, menahan dan memukuli ratusan penduduk desa, memerkosa perempuan dewasa dan remaja dalam jumlah yang belum diketahui, dan membunuh sebanyak 20 orang. Tidak ada tindakan yang pernah diambil oleh pihak berwenang Indonesia terhadap orang-orang yang diduga atau diketahui melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Pembantaian di rumah Carrascalão (17 April 1999)

Setidaknya 12 orang dibunuh di Dili pada 17 April 1999, ketika milisi dan para prajurit TNI menyerang rumah seorang warga terpandang, Manuel Carrascalão.[†] Mereka yang meninggal adalah di antara sekitar 150 orang yang mencari perlindungan di rumah itu akibat meningkatnya kekerasan milisi di seluruh Timor-Leste. Serangan itu memperjelas kerjasama erat antara milisi dan pihak berwenang militer dan sipil dalam melakukan tindakan-tindakan kekerasan di tahun 1999. Serangan itu juga memberikan bukti keterlibatan langsung para prajurit TNI dalam pelanggaran hak asasi manusia, dan keterlibatan para perwira tinggi TNI dalam tindakan-tindakan tersebut.

Serangan itu terjadi menjelang sore hari, sesaat setelah rapat umum besar pro-otonomi di depan kantor gubernur. Dihadiri oleh sekitar 5.000 orang, termasuk para pejabat penting pemerintah, dan sebanyak 1.645 orang milisi,[‡] rapat umum itu menandai peresmian kelompok milisi Aitarak, di bawah kepemimpinan Eurico Guterres. Dalam pidato utamanya, Guterres secara terbuka mengajak mereka yang hadir untuk "membersihkan" dan membunuh para pendukung kemerdekaan dan

* Lihat memorandum dari UNTAET DHRO-Bobonaro kepada SCU-Bobonaro, 16 Januari 2001 dan 27 April 2001.

† Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada UNTAET, DHRO-Dili, "Key Cases of HRVs/ Abuses in Dili District," September 2002, dan UNTAET, DHRO-Dili, "Dili Chronology," Dili, 2002.

‡ Jumlah anggota milisi ini diambil dari laporan rahasia TNI tentang kejadian tanggal 17 April 1999. Lihat: Dan Sat Gas Pam Dili kepada Dan Rem Up. Kasi Intel Rem 164/WD dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/200/1999 tanggal 17 (18?) April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16).

"para pengkhianat", dan khususnya anggota keluarga Carrascalão. Menurut satu kesaksian tentang peristiwa tersebut, Guterres mendesak mereka untuk "melancarkan pembersihan terhadap semua orang yang telah mengkhianati integrasi. Tangkap dan bunuh mereka kalau perlu."*

Satu laporan rahasia TNI tentang kejadian 17 April memberikan catatan yang lebih lengkap tentang pernyataan Guterres. Menurut dokumen tersebut, Guterres mengatakan:

> "Pasukan Aitarak akan melaksanakan operasi sisir terhadap anggota pegawai negeri sipil yang sudah memakan dan menggunakan fasilitas dinas tetapi mengkhianati perjuangan integrasi. Pasukan Aitarak akan memberantas siapa saja baik pejabat, tokoh masyarakat, maupun pengusaha yang benar-benar sudah membantu perjuangan kelompok antiintegrasi. Pasukan Aitarak tidak segan-segan menghabisi Ir. Mário Viegas Carrascalão beserta kelompoknya yang telah berkhianat."†

Rapat umum itu berakhir sekitar pukul 11.15 siang dengan rentetan tembakan senapan dari sekitar dua puluh anggota milisi. Segera sesudahnya, para milisi dan yang lainnya memulai pawai besar melalui jalan-jalan di kota Dili.‡ Pawai itu dengan cepat berubah menjadi amuk kekerasan, dan dalam pawai itu rumah-rumah, kendaraan-kendaraan, dan kantor-kantor milik orang-orang yang dianggap sebagai pendukung kemerdekaan diserang dan dihancurkan. Salah satu sasaran kekerasan yang pertama adalah kantor satu-satunya surat kabar di Timor-Leste, *Suara Timor Timur*. Walaupun surat kabar itu milik seorang pendukung integrasi, para milisi rupanya marah dengan pemberitaannya tentang pembantaian di Gereja Liquiçá pada 6 April. Dengan alasan tersebut, sekelompok milisi yang berbasis di Liquiçá, BMP, menyerang kantor surat kabar itu, mengancam para staf lokal dan wartawan asing, dan menghancurkan sebagian besar peralatan kantor. Di bagian kota yang lain, para milisi membakar atau menghancurkan rumah-rumah, toko-toko, dan kendaraan-kendaraan.§

Amuk kekerasan di seluruh Dili berpuncak pada serangan terhadap rumah Manuel Carrascalão. Rumah Carrascalão dijadikan sasaran, sebagian karena kubu prointegrasi menganggapnya sebagai pengkhianat. Manuel yang di masa lalu adalah pendukung integrasi dengan Indonesia, dan saudara mantan Gubernur Timor

---

* Dikutip dalam Amnesty International, "East Timor: Seize the Moment," ASA 21/49/99, 21 Juni 1999, halaman 20.

† Dan Sat Gas Pam Dili kepada Dan Rem Up. Kasi Intel Rem 164/WD dan lain lain. Telegram rahasia No. STR/200/1999, 17 (18?) April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16). Mário Viegas Carrascalão adalah saudara laki-laki Manuel Carrascalão, dan mantan Gubernur Timor Timur. Referensi di dalam dokumen ini lebih pada Mário daripada Manuel, yang bisa jadi sebuah kesalahan, atau mungkin merefleksikan pandangan Guterres bahwa Mário Viegas Carrascalão juga seorang pengkhianat.

‡ Rute tepat pawai tersebut diperinci dalam laporan rahasia TNI bertanggal 17 (18?) April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16).

§ Laporan rahasia TNI tentang kejadian ini mencatat penghancuran terhadap tujuh rumah atau toko, empat mobil, dan sebuah sepeda motor. (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16).

Timur, dalam tahun-tahun belakangan menjadi lebih kritis terhadap pemerintah Indonesia dan telah membentuk satu organisasi prokemerdekaan yang moderat, bernama Gerakan Rekonsiliasi dan Persatuan Rakyat Timor Timur (GRPRTT).

Rumah Carrascalão juga dijadikan sasaran karena ia telah membukanya sebagai tempat pengungsian bagi orang-orang yang menyelamatkan diri dari kekerasan yang meningkat di Turiscai, Maubara, Liquiçá, dan Alas. Dalam minggu-minggu sejak para pengungsi berlindung di sana, ia telah mendapatkan sejumlah ancaman. Carrascalão kemudian mengatakan kepada Amnesty International bahwa ia yakin ancaman-ancaman itu "disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak dari orang-orang yang diberinya tempat berlindung merupakan saksi dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia di seluruh Timor-Leste."[*]

Beberapa saat menjelang sore tanggal 17 April, sekelompok milisi Aitarak dan BMP mulai berkumpul di luar rumah Carrascalão. Beberapa berjalan kaki, sementara yang lain tiba dengan truk-truk besar. Salah satu truk dipergunakan untuk meruntuhkan pintu gerbang besi besar di depan rumah. Begitu gerbang terbuka, anggota milisi menyerbu masuk ke dalam halaman rumah dan, setelah memecahkan jendela-jendela, masuk ke dalam rumah itu sendiri. Para anggota milisi membawa berbagai macam senjata rakitan dan otomatis, dan dilaporkan berteriak-teriak mengancam, termasuk berseru "Bunuh Manuel Carrascalão!"[†]

Di dalam rumah, putra remaja Manuel Carrascalão, Manuelito, berusaha mencegah milisi menyerang para pengungsi. Segera sesudahnya, ia ditikam dan ditembak mati. Yang lainnya dibunuh atau dilukai parah oleh para milisi yang menggunakan parang dan pisau. Salah seorang milisi, Armando dos Santos, dituduh menikam seorang laki-laki bernama Antónino sampai mati dalam penyerangan ini. Pihak penuntut menuduh bahwa pisau dos Santos menjadi bengkok di tengah penikaman dan ia berhenti untuk meluruskan pisaunya sebelum menuntaskan pekerjaannya.[‡] Sejumlah pengungsi berusaha memanjat pagar untuk melarikan diri tetapi tidak berhasil karena rumah itu telah dikepung orang-orang bersenjata. Bersaksi di hadapan pengadilan di Jakarta terhadap Komandan Distrik Militer Dili, Letnan Kolonel Endar Priyanto di akhir 2002, seorang korban yang selamat berkata: "Saya berusaha melompati pagar dan lari tetapi beberapa orang mengejar saya dan saya dilukai dengan sebuah tebasan parang di punggung saya."[§]

* Amnesty International, "East Timor: Seize the Moment," ASA 21/49/99, 21 Juni 1999.

† Kesaksian Victor dos Santos, dikutip dalam "Saksi Kasus HAM TL Mengaku Lihat TNI Tembak Pengungsi," *Suara Timor Lorosae*, 27 September 2002.

‡ Armando dos Santos dituntut oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat dengan dakwaan kejahatan terhadap umat manusia pada 5 Juni 2001. Ia dinyatakan bersalah karena pembunuhan terhadap seorang pengungsi dengan vonis pengadilan tanggal 9 September 2002. Ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara untuk pembunuhan ini dan dua pembunuhan lainnya.

§ Kesaksian Florindo de Jesus, dikutip dalam "Indonesian Sodiers Among Attackers…," AFP, 8 Oktober 2002. Dokumen TNI tertanggal 17 (18?) April 1999 menyebutkan nama Florindo de Jesus sebagai salah satu dari lima orang yang "luka berat" akibat serangan (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16).

Serangan akhirnya berhenti dengan kedatangan satu kesatuan Brigade Mobil Polri. Sekitar 50 korban yang selamat dari pembantaian dibawa ke markas Kepolisian Resor (Polres) Dili, di mana mereka tetap dalam "perlindungan" untuk beberapa waktu. Di sana mereka bergabung dengan Manuel Carrascalão, anak perempuannya Christina, dan tokoh CNRT yang terkenal berani bicara Leandro Isaac.[*] Sebagian yang terluka diangkut ke dalam ambulans, namun mereka ini pun dalam keadaan tidak aman. Salah seorang yang selamat bersaksi bahwa ambulans yang mengangkut dirinya berhenti di depan markas Aitarak, di mana para milisi mengguncang-guncangkan ambulans sambil berteriak "Bunuh mereka! Bunuh mereka!"[†]

Jumlah yang tepat orang-orang yang dibunuh dalam penyerangan tersebut tidak diketahui. Laporan rahasia militer yang dikutip di atas mengatakan bahwa lima orang luka parah dan 13 orang terbunuh—12 dari mereka dibunuh di rumah Carrascalão dan seorang lainnya dibunuh di tempat lain. Organisasi-organisasi hak asasi manusia menyebutkan jumlah korban yang sedikit lebih besar, sementara yang lain (termasuk Manuel Carrascalão sendiri) menyatakan bahwa jumlah korban bisa jadi mencapai 60 orang.[‡] Juga tidak diketahui di mana tubuh orang-orang yang meninggal dibuang. Seorang saksi dilaporkan melihat banyak mayat diangkut ke atas sebuah truk besar tak bertanda segera setelah serangan, dan dibawa pergi ke tujuan yang tak diketahui.[§] Di akhir 1999, seorang saksi lain menyatakan kepada Komisi Penyelidik Internasional untuk Timor-Leste bahwa sebelas mayat dibawa dengan truk ke sebuah danau dekat Maubara, Kabupaten Liquiçá, tempat mayat-mayat itu dibuang.[¶]

Seperti dalam kasus-kasus kekerasan serius lain oleh milisi pada 1999, pihak berwenang militer dan kepolisian Indonesia berusaha menggambarkan serangan dan pembunuhan tersebut sebagai "bentrok" antara kelompok prointegrasi dan kelompok prokemerdekaan. Akan tetapi tidak terdapat bukti bahwa para pengungsi

* Polri mengatakan bahwa ada 96 orang yang berada dalam pengamanan polisi. Dari semuanya, 46 orang adalah mereka yang selamat dari pembantaian di rumah Carrascalão. Lihat Amnesty International, ASA 21/31/99.

† Kesaksian Victor dos Santos, dikutip dalam "Saksi Mengaku," *Suara Timor Lorosae*, 27 September 2002.

‡ Mereka yang dilaporkan mati mencakup: Adelino dos Santos (18), Afonso Ribeiro (25), Alberto dos Santos (30), Eduardo dos Santos (25), Januario Pereira (40), João da Silva (25), Manuel Gama Intan Carrascalão (16 atau 18), Marlito Correira, Rafael dos Santos (25), dan Raul dos Santos (30). Seorang laki-laki lagi, Manuel Pinto (50 atau 67) dilaporkan dibunuh di terminal bus Becora (atau Terminal Cameia) pada hari yang sama. Dari UNTAET, DHRO-Dili, "Dili Chronology," Dili, 2002, halaman 2. Pembunuhan terhadap Manuel Pinto dikonfirmasikan dalam laporan TNI tanggal 17 (18?) April 1999, yang menyebutkan dirinya sebagai pensiunan pegawai negeri yang bertugas pada Kodim Baucau (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16).

§ Kesaksian Florindo dos Santos, dikutip dalam "Saksi Mengaku," *Suara Timor Lorosae*, 27 September 2002.

¶ Menurut surat dakwaan untuk kasus ini yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat, mayat 11 korban dari Liquiçá dibawa dengan truk TNI ke Leboke, Liquiçá, pada 19 April untuk dikuburkan. Lihat Carrascalão Indictment (Dakwaan Carrascalão). Ada laporan yang tidak didukung bukti yang menyebutkan bahwa 30 mayat ditemukan dalam sebuah sumur dekat rumah Carrascalão di akhir September 1999. Lihat UNTAET, DHRO-Dili, "Key Cases of HRVs/Abuses in Dili District," Dili, September 2002.

di dalam rumah Manuel Carrascalão terlibat dalam kekerasan apapun. Sebaliknya, ada bukti penting tentang keterlibatan langsung TNI di dalam serangan ini, dan juga persetujuan yang salah pada kekerasan tersebut dari para pejabat tinggi TNI dan Polri.

Sejumlah orang yang selamat dari serangan telah memberikan kesaksian bahwa para prajurit TNI yang berpakaian biasa berada di antara para penyerang. Seorang saksi, pelajar dari Maubara yang bernama Florindo de Jesus, bersaksi di pengadilan: "Saya yakin bahwa TNI yang melancarkan serangan, karena saya mengenali beberapa orang di antara para penyerang sebagai anggota TNI dari Maubara."[*] Ketika ditanya lebih teperinci, ia memberikan nama enam prajurit, semuanya bertugas di Kecamatan Maubara. Salah satu dari mereka, kata Florindo de Jesus, adalah pamannya sendiri. Saksi yang lain, Victor dos Santos mengatakan kepada para penyelidik pada Juli 2000 bahwa di belakang milisi yang berpakaian kaos hitam dan bandana merah-putih, ia melihat puluhan orang bertubuh tegap dengan potongan rambut pendek: "Saya mengenali mereka sebagai prajurit TNI dari Koramil di Maubara."[†] Bersaksi di hadapan pengadilan di Jakarta terhadap Kepala Kepolisian Resor Dili, Letnan Kolonel Hulman Gultom, pada pertengahan 2002, Manuel Carrascalão mengatakan bahwa para prajurit TNI yang tidak berseragam bergabung dalam melakukan serangan.[‡]

Para perwira tinggi TNI dan Polri juga memfasilitasi pembunuhan melalui kegagalan mereka untuk bertindak saat kekerasan berlangsung sampai segalanya telah terjadi. Rapat umum sebelum pembantaian dihadiri sejumlah pejabat pemerintah yang paling senior di Timor-Leste termasuk Gubernur Timor Timur, Bupati Dili, dan Komandan Resor Militer Kolonel Tono Suratman. Rekaman video yang didapatkan para penyelidik PBB, lebih jauh lagi, menunjukkan Kolonel Tono Suratman berdiri di atas balkon lantai satu kantor gubernur, bersama dengan Mayor Jenderal Kiki Syahnakri (Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat), dan empat perwira senior militer lainnya.[§]

Tidak ada satupun dari para pejabat tersebut yang mengungkapkan di depan umum ketidaksetujuan atau kekhawatiran terhadap pernyataan Guterres atau keberadaan milisi bersenjata. Pihak berwenang militer atau kepolisian juga tidak satupun berusaha melucuti senjata sekian ratus milisi yang berpawai keliling kota Dili yang melanggar larangan hukum untuk membawa senjataapi. Laporan rahasia militer tentang kejadian tanggal 17 April, yang dikutip di atas, memberikan

---

* Kesaksian Florindo de Jesus dikutip dalam "Indonesian Soldiers Among Attackers in 1999 Dili Incident: Witness," AFP, 8 Oktober 2002.

† Kesaksian Victor dos Santos dikutip dalam "Saksi Kasus HAM TL," *Suara Timor Lorosae*, 27 September 2002. Dokumen TNI bertanggal 17 (18?) April 1999 menyebutkan nama Victor dos Santos sebagai salah satu dari lima orang yang "luka berat" akibat serangan tersebut (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16).

‡ Kesaksian Carrascalão dikutip dalam AFP, 7 Agustus 1999.

§ Rekaman video dimiliki oleh Unit Kejahatan Berat di Dili. Menurut beberapa keterangan yang belum dikukuhkan, para perwira lainnya itu mencakup: Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim dan Mayor Jenderal Adam Damiri.

uraian menyeluruh tentang pernyataan Guterres, dan tentang penghancuran serta pembunuhan yang menyusul kemudian, tetapi tidak menunjukkan adanya keprihatinan maupun niat untuk mengambil tindakan. Laporan tersebut hanya menyimpulkan bahwa persoalan ini akan ditangani Kepolisian Resor Dili.[*]

Bukti yang paling mencolok adalah kesengajaan di pihak perwira pimpinan TNI untuk Timor-Leste, Kolonel Tono Suratman untuk tidak mengambil tindakan apapun. Ketika Manuel Carrascalão pergi ke rumah Suratman menjelang sore hari 17 April untuk memita agar Suratman segera turun tangan menghentikan serangan yang akan terjadi terhadap para pengungsi, Suratman menolak memenuhi permintaan tersebut.[†] Penolakan Suratman telah dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Irlandia waktu itu, David Andrews, dan tokoh pro-otonomi, Basilio Araújo, keduanya pada saat itu sedang bersama dengan Suratman.[‡]

Mengingat pandangan politiknya, penjelasan Basilio Araújo mengungkapkan hal yang sangat penting. Bersaksi di hadapan pengadilan di Jakarta, Agustus 2002, ia mengatakan bahwa TNI tidak melakukan apapun untuk mencegah serangan ke rumah Carrascalão. Ketika diminta berkomentar terhadap pernyataan bahwa Tono Suratman sebenarnya bersikeras untuk membantu Carrascalão, Basilio menyampaikan kepada pengadilan: "Saya tidak melihat Pak Danrem [Suratman] berusaha untuk membantunya. Saya tidak melihatnya."[§] Yang juga mengungkapkan keterangan penting adalah pernyataan dari hakim ketua Indonesia dalam pengadilan terhadap Eurico Guterres pada November 2002. Hakim ini mengatakan: "Tono [Suratman] mengabaikan laporan dari Manuel bahwa rumahnya akan diserang para anggota milisi pro-Jakarta. Dia tidak mengambil tindakan sampai insiden tersebut terjadi."[¶]

Pihak Polri juga turut bertanggung jawab untuk pembunuhan di rumah Carrascalão, baik karena kegagalan mereka melakukan tindakan efektif untuk mencegah pembunuhan tersebut, maupun melalui kerja penyelidikan yang samasekali tidak memadai, dan mungkin dengan sengaja disalaharahkan. Para penyidik kepolisian disebutkan mendesak para saksi untuk mengatakan bahwa kekerasan dipancing oleh sebuah tembakan dari dalam rumah Carrascalão.[**] Patut diperhatikan bahwa Polri pernah mengajukan skenario "provokasi" yang tepat sama dalam kasus pembantaian di Gereja Liquiçá dan mereka melakukannya lagi di awal Juli ketika para milisi menyerang satu rombongan bantuan kemanusiaan. (Lihat studi kasus: Penyerangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan.) Dalam ketiga kasus

---

* Dan Sat Gas Pam Dili kepada Dan Rem Up. Kasi Intel Rem 164/WD dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/200/1999, 17 (18?) April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16).

† Menurut satu kesaksian tentang pertemuan tersebut, Suratman mengatakan kepada Carrascalão, "Kami tidak bisa berbuat apa-apa—kami netral. Anda yang tidak mau mengikuti permainan kami." Dikutip dalam Dili DHRO 1999 report, 15 September 2002.

‡ Lihat Ian Martin, *Self Determination in East Timor*, halaman 27.

§ Dikutip dalam *Jakarta Post*, 9 Agustus 2002.

¶ Dikutip dalam *Sydney Morning Herald*, berita ditulis oleh Hamish McDonald, 30 November 2002.

** Kesaksian Florindo dos Santos, dikutip dalam "Saksi Mengaku," *Suara Timor Lorosae*, 27 September 2002.

tersebut, klaim dari pihak Polri mengenai adanya provokasi sepenuhnya salah, dan tampak dirancang terutama untuk mengalihkan perhatian dari pelaku kejahatan yang sesungguhnya.

Pembunuhan dua mahasiswa di Hera (20 Mei 1999)

Pemuda dan mahasiswa termasuk yang dengan sengaja dijadikan sasaran oleh anggota milisi dan aparat keamanan Indonesia. Anggota-anggota organisasi prokemerdekaan, seperti Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur (DSMPTT), teramat rentan, dan banyak dari anggotanya yang diancam, dipukuli, dan dibunuh.

Dari semua kejadian yang sasarannya mahasiswa, yang paling terkenal adalah penahanan dan pembunuhan terhadap dua pemuda Augustino de Carvalho (24) dan Estevão Xavier Pereira (20) di Hera pada 20 Mei 1999.[*] Institut Politeknik Hera, tempat mereka belajar, sudah cukup lama menjadi fokus operasi bersama milisi dan TNI, sebagian karena banyak mahasiswa di sana menjadi anggota DSMPTT yang prokemerdekaan.

Pada 10 Mei, TNI dan milisi Aitarak menahan sekitar 100 orang mahasiswa dan penduduk Hera, yang berada di timur Dili, dan membawa mereka ke kantor Kepolisian Daerah (Polda) di Dili. Sebagian besar dari mereka kemudian dibebaskan, tetapi ini bukanlah akhir dari cerita. Setelah penangkapan, politeknik tersebut diduduki sekitar 50 prajurit pasukan paramiliter TNI di Timor-Leste yang dikenal sebagai pasukan Rajawali.[†]

Pada 20 Mei, dua mahasiswa (yang kemudian dibunuh) kembali ke kampus di Hera, dengan tujuh orang lainnya untuk mengambil barang-barang mereka. Dalam perjalanan kembali ke kendaraan, mereka ditahan untuk diinterogasi oleh para prajurit TNI.[‡] Seorang perempuan yang tinggal dekat kampus dan menyaksikan proses interogasi itu memberi penjelasan berikut tentang pertemuan para mahasiswa dengan prajurit-prajurit TNI:

> *"Saya dapat melihat dari halaman saya bahwa para mahasiswa ada di seberang jalan dekat ruang keamanan bersama dengan aparat militer. Aparat militer mengosongkan tas para mahasiswa itu dengan membuang isinya ke tanah. [Dua mahasiswa] itu juga tergeletak di tanah dan para prajurit menendang dan memukuli mereka sampai parah. Saya melihat hal ini selama sepuluh menit. Saya kemudian pergi ke dalam dan membawa anak perempuan saya karena saya*

* Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada laporan DHRO Dili, "Key Cases of HRVs/Abuses in Dili District," September 2002.

† Kesaksian dari seorang perempuan Timor Timur [nama dirahasiakan], direkam dan dikumpulkan di Australia oleh "East Timor Documentation Project," 3 Desember 1999.

‡ Menurut Amnesty Internasional, para prajurit itu adalah anggota pasukan Rajawali dan Batalion Infanteri 744. AI Doc. ASA 21/43/99.

tidak ingin diketahui melihat kejadian itu. Saya juga sangat ketakutan dan saya menangis …"[*]

Setelah ditanyai dan digeledah, kedua mahasiswa itu (Carvalho dan Pereira) dibawa pergi. Dalam menanggapi penyelidikan yang dilakukan oleh sebuah organisasi hak asasi manusia, Yayasan HAK, pihak yang berwajib mengatakan bahwa kedua orang itu telah melarikan diri dari tahanan. Namun ada alasan untuk meyakini bahwa mereka sesungguhnya telah dipukuli dan dibunuh. Cerita saksi yang baru saja dikutip, berlanjut:

> *"Sekitar pukul 3 sore, saya tetap mengkhawatirkan [kedua mahasiswa itu] dan saya ingin mencari tahu apa yang terjadi pada mereka. Saya pergi menyeberang ke Politeknik berpura-pura perlu mencuci pakaian. Dari tempat ini biasanya kami mendapatkan air. Saya berhasil melihat ke dalam ruang keamanan. Ada sekitar 25 prajurit di dalam ruangan dan juga [kedua mahasiswa itu], kedua tangan mereka diikat di balik punggung di lantai sudut ruangan. Ada sesuatu di dalam mulut mereka yang menghalangi mereka untuk berteriak. Ada dua atau empat tentara yang bergiliran memukuli mereka berkali-kali dengan batang kayu panjang yang diambil dari pohon di halaman saya … Sekitar pukul 9 malam, ketika lampu di rumah saya masih menyala, salah seorang tentara datang lagi ke rumah saya dan mengatakan bahwa saya seharusnya sudah tidur. Saya lalu mematikan lampu dan berpura-pura berangkat tidur. Segera sesudahnya saya mendengar dua suara tembakan berturutan yang datang dari seberang jalan dari arah ruang keamanan. Tembakan terdengar sangat dekat. Sekitar lima menit kemudian saya juga mendengar sebuah mobil dikendarai dengan sangat cepat keluar dari tempat yang sama. Dalam hati saya tahu bahwa suara tembakan itu berarti para mahasiswa itu sudah dibunuh."*[†]

Dalam sebuah penggalian kuburan, yang dilaksanakan pada 30 Agustus 2000, para penyelidik menemukan apa yang diyakini sebagai tubuh dua orang laki-laki, yang dikubur bersama dengan kedua belah tangannya terikat.

Penahanan sewenang-wenang dan pemerkosaan di Lolotoe (Mei-Juni 1999)

Korban pelanggaran hak asasi manusia berat pada 1999 meliputi banyak penduduk desa biasa yang hidup di wilayah-wilayah yang dianggap basis kekuatan prokemerdekaan. Di wilayah-wilayah semacam itu, kesatuan-kesatuan TNI

---

* Kesaksian dari seorang perempuan Timor Timur [nama dirahasiakan], direkam dan dikumpulkan di Australia oleh "East Timor Documentation Project," 3 Desember 1999.

† Kesaksian dari seorang perempuan Timor Timur [nama dirahasiakan], direkam dan dikumpulkan di Australia oleh "East Timor Documentation Project," 3 Desember 1999.

dan milisi mengadakan operasi bersama untuk melakukan pembersihan, yang mengarah pada serangkaian pelanggaran termasuk penahanan sewenang-wenang, pembunuhan, dan pemerkosaan.

Satu operasi pembersihan semacam itu dilakukan di Kecamatan Lolotoe, Kabupaten Bobonaro di akhir Mei 1999. Selama beberapa hari, pasukan TNI bersama dengan para anggota milisi Kaer Metin Merah Putih (KMP) menangkap ratusan orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan dan pemimpin CNRT. Banyak dari mereka yang ditahan dipukuli dengan parah dan beberapa disiksa atau dipotong anggota tubuhnya oleh para penangkapnya dalam usaha untuk memeras pengakuan tentang hubungan mereka dengan Falintil. Beberapa kejadian pemerkosaan dan perbudakan seksual oleh TNI dan anggota milisi juga dilaporkan terjadi dalam konteks penyerangan ini.

Korban-korban dari operasi Lolotoe mencakup seorang pemimpin CNRT dari Desa Guda, Mário Gonçalves. Ia ditahan pada 24 Mei dan disiksa oleh satu kelompok besar milisi KMP, di hadapan kepala desa. Satu surat dakwaan kejahatan terhadap umat manusia yang diajukan oleh Penuntut Umum UNTAET pada Mei 2001, menggambarkan siksaan yang dialami Mário Gonçalves sebagai berikut:

> "Ketika Mário Gonçalves keluar dari gereja ia dipukuli oleh para anggota milisi KMP sambil diseret ke lapangan di luar kantor CNRT. Di lapangan, Sabino Gouveia Leite [Kepala Desa], José Cardoso Fereira alias Mouzinho [wakil komandan KMP], dan João Franca da Silva alias Jhoni Franca [komandan KMP] memerintahkan para anggota milisi KMP untuk memukuli Mário Gonçalves secara bergantian. Sekitar 37 orang anggota milisi KMP memukuli Mário Gonçalves. João Franca da Silva alias Jhoni Franca juga menyerang Mário Gonçalves dengan sebilah parang, memotong lengan kanannya, dan menikamnya di pundak kiri.
>
> "Sabino Gouveia Leite menyuruh José Cardoso Fereira alias Mouzinho dan João Franca da Silva alias Jhoni Franca untuk memotong telinga Mário Gonçalves… Telinga itu lalu dilempar ke tanah dan Sabino Gouveia Leite dan João Franca da Silva alias Jhoni Franca memaksa Mário Gonçalves untuk memakannya. Mário Gonçalves, yang ketakutan akan dibunuh, melakukan apa yang diperintahkan dengan memakan telinga kanannya."[*]

Banyak dari mereka yang ditahan dalam pembersihan juga ditahan tanpa dakwaan di Komando Rayon Militer (Koramil) Lolotoe sampai suatu saat pada Juli 1999. Kesaksian dan dokumentasi tentang penahanan sewenang-wenang terhadap mereka, dan akhirnya pembebasan mereka, menjelaskan kerjasama erat dan rutin antara milisi dengan pihak berwenang militer dan sipil dalam pelanggaran hak-hak asasi manusia di Bobonaro.

* UNTAET, General Prosecutor, Indictment of João Franca da Silva et al., (Case No: BO-06.1-99-SC), 25 Mei 2001.

Satu dokumen yang mengonfirmasi kembalinya enam orang ke Desa Guda pada 8 Juli mengungkapkan banyak hal. Dokumen ini menjelaskan bahwa keenam orang itu ditahan untuk "pembinaan" sejak 22 Mei, bahwa mereka sekarang sedang dikembalikan ke desa mereka "dalam keadaan aman dan sehat," tetapi mereka bisa dipanggil untuk interogasi lebih lanjut di masa yang akan datang. Dokumen ini ditandatangani bersama oleh Komandan Rayon Militer Lolotoe Letnan Bambang Indra; Kepala Desa Guda, Sabino Gouveia Leite; dan Komandan KMP, José Cardoso Fereira (alias Mouzinho).* Ketiga orang ini dijadikan terdakwa pada 2001 untuk tindak kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan pada 1999.

Para perwira militer dan anggota milisi juga bekerjasama untuk menculik dan memerkosa perempuan dalam konteks operasi Lolotoe. Dalam satu kasus yang terkenal, tiga orang laki-laki menculik dan berulang-kali memerkosa tiga perempuan muda yang mereka curigai telah membantu Falintil. Dua dari pemerkosa yang disebut korban adalah tokoh-tokoh yang cukup dikenal, yaitu Komandan Rayon Militer, Letnan Bambang Indra, dan komandan milisi KMP, José Cardoso Fereira (alias Mouzinho). Orang ketiga adalah petugas intelijen TNI, Francisco Noronha.

Pemerkosaan tersebut terjadi selama beberapa hari di akhir Juni 1999 di sebuah hotel di kota Atambua di Timor Barat. Menurut salah seorang korban, petugas intelijen TNI Noronha dan pemimpin milisi Fereira mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka menolak untuk berhubungan seksual dengan ketiga orang itu, mereka akan dibunuh dan tubuh mereka akan dilempar ke laut. Dua dari laki-laki ini (Letnan Indra dan Fereira) membawa senjata otomatis, dan paling tidak satu orang melengkapi diri dengan teknologi kontrasepsi.

Salah satu korban kemudian menceritakan siksaan yang dialaminya. Ia mengatakan bahwa Francisco Noronha masuk ke kamarnya dan memberikan injeksi di pantatnya, dengan mengatakan kepadanya bahwa injeksi itu untuk mencegahnya hamil. Menurut penuturannya, Noronha kemudian mengatakan kepada perempuan itu bahwa ia telah mendengar bahwa namanya tercantum dalam daftar orang-orang yang bekerja untuk Falintil, dan oleh karena itu ia harus melayani Noronha. Kemudian Noronha mendorong korban untuk rebah di tempat tidur dan memerkosanya.

Setelah dua malam mengalami pemerkosaan berulang kali, dan empat hari lagi dalam penahanan, para perempuan itu akhirnya dibawa ke Koramil Lolotoe. Di sana salah satu dari tiga pemerkosa, Letnan Bambang Indra, dalam kedudukannya sebagai Komandan Rayon Militer, membuat sepucuk surat yang memberi mereka izin untuk kembali ke rumahnya.

* Lihat: "Surat Pengembalian," 8 Juli 1999 (HRU Collection, Doc. BOB #9). Nama Fereira muncul di dalam dokumen ini sebagai "José Mauzino Cardoso," tetapi jelas bahwa ini adalah orang yang sama dengan José Cardoso Fereira (alias Mouzhino) yang disebut dalam surat dakwaan.

Penyerangan terhadap UNAMET Maliana (29 Juni 1999)

Sekitar pukul 10 pagi tanggal 29 Juni 1999, sekitar 100 anggota kelompok milisi setempat, Dadurus Merah Putih (DMP), dari berbagai arah dengan cepat berdatangan ke kantor UNAMET di kota Maliana, Kabupaten Bobonaro, dan melempari kantor itu dengan batu. Bukti yang tersedia menunjukkan dengan jelas bahwa insiden itu direncanakan oleh para perwira Komando Distrik Militer, dan bahwa serangan itu diarahkan terhadap kompleks PBB dan orang-orang yang mengungsi di sana.*

Pada pagi hari 29 Juni, sekitar 30 orang pendukung kemerdekaan berkumpul di gerbang depan markas UNAMET untuk melaporkan serangan yang dilakukan para anggota milisi terhadap teman-teman dan sanak-saudara mereka pada malam sebelumnya. Pada pukul 10 pagi kerumunan di luar kompleks dan di lapangan besar seberang jalan diperkirakan mencapai 600 orang. Sementara sebagian besar kerumunan diyakini sebagai penonton biasa, sekelompok yang terdiri atas sekitar 100 orang yang mengenakan syal merah putih, sebagian dari mereka membawa parang, dikenali sebagai anggota milisi DMP. Identitas mereka kemudian dikonfirmasi oleh seorang pemimpin DMP, Paulus Fereira, dalam satu wawancara dengan seorang Pejabat Urusan Politik UNAMET.

Sesaat sebelum pukul 10.00, anggota-anggota kelompok milisi DMP terlihat berada di bawah pohon di ujung selatan lapangan, dekat pos Koramil. Dari sana, mereka bergerak cepat ke arah kompleks UNAMET, dengan batu-batuan di tangan. Rekaman film menunjukkan bahwa begitu mereka mencapai jalan, anggota-anggota milisi berlarian dan mulai melemparkan batu-batu ke arah gedung UNAMET. Rekaman itu juga memperlihatkan seorang laki-laki memakai jaket merah dan topi *baseball* di dekat tepi jalan, mengarahkan kelompok milisi dan menunjuk-nunjuk dengan tegas ke arah gedung UNAMET.

Batu-batu besar dilempar pertama kali menembus jendela-jendela yang menghadap ke jalan utama, dan kemudian melampaui tembok-tembok tinggi yang mengelilingi kompleks, menghancurkan jendela-jendela di sisi selatan dan timur bangunan. Hujan batu berlanjut masuk ke dalam kompleks selama 10 sampai 15 menit. Teriakan-teriakan para penyerang berlanjut untuk beberapa saat setelah lemparan batu mereda, dan para anggota milisi terlihat berada di lapangan besar yang berhadapan langsung dengan kompleks UNAMET selama beberapa jam sesudahnya.

Sebanyak 12 orang terluka dalam insiden tersebut, termasuk seorang Relawan PBB, dan beberapa dari sekitar 26 orang penduduk lokal yang melarikan diri masuk ke dalam kompleks UNAMET ketika serangan dimulai. Luka-luka yang diderita termasuk gegar otak, tulang remuk, luka koyak, dan memar yang parah; dan sedikitnya dua orang penduduk setempat jatuh pingsan akibat lemparan keras ke

---

* Kecuali jika disebutkan lain, uraian ini didasarkan pada laporan yang dibuat UNAMET tidak lama setelah kejadian dan diserahkan kepada para pejabat Pemerintah Indonesia. UNAMET, Political Affairs Office, "Report on 29 June Incident in Maliana," 5 Juli 1999. Dicetak ulang di dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book on Political and Human Rights in East Timor,* Dili, November 1999.

kepala mereka. Hujan batu juga berakibat kerusakan barang, baik bangunan PBB itu sendiri maupun kendaraan-kendaraan PBB.

Tindakan polisi terhadap kejadian ini sangatlah tidak memadai dan menunjukkan ketidakmauan, atau ketidakmampuan, untuk melakukan tindakan efektif terhadap milisi walaupun mereka jelas-jelas melakukan suatu tindak pidana. Karena tekanan internasional yang kuat, Polri menahan dan menyidik lima orang milisi karena peran mereka di dalam serangan tersebut. Namun, kasus ini tidak sungguh-sungguh diselidiki, dan setelah menerima hukuman percobaan, semua tersangka dibebaskan.

Kelemahan tindakan Polri tidak mungkin dikaitkan dengan kurangnya informasi sebelumnya mengenai kemungkinan adanya serangan. Dalam beberapa hari sebelum kejadian, petugas-petugas UNAMET dan pihak lain telah melaporkan kepada Polri tentang adanya sejumlah ancaman terhadap fasilitas dan personel PBB. Pada 28 Juni, para perwira Polisi Sipil PBB menyampaikan sebuah laporan yang bisa dipercaya bahwa serangan milisi terhadap UNAMET direncanakan untuk dilancarkan pada pagi hari tanggal 29 Juni.

Walaupun telah ada laporan-laporan sebelumnya seperti itu, tidak lebih daripada enam polisi biasa yang bertugas di depan markas UNAMET ketika serangan terjadi. Dua dari enam orang tersebut bisa jadi anggota unit bantuan Polri, yang dikenal sebagai Kamra. Ketika serangan ke kompleks PBB dimulai, seorang petugas Polri melakukan usaha sebentar tetapi tidak efektif untuk menghentikan, dan ia bersama rekan-rekannya segera berbalik dan lari mencari perlindungan. Rekaman film dari dalam kompleks menunjukkan bahwa sejumlah petugas kepolisian Indonesia berada di sana selama dan segera setelah serangan selesai. Setidaknya salah satu dari mereka dilaporkan sempat memberikan bantuan kepada staf PBB dan orang-orang yang berlindung di kompleks PBB.

Selain enam polisi yang berjaga di depan kantor UNAMET, sekitar 24 orang polisi disebutkan ditempatkan untuk membantu mengendalikan kerumunan orang di lapangan seberang jalan, sementara satu kontingen Brigade Mobil (Brimob) yang terdiri atas 20 orang dilaporkan ditempatkan untuk menjaga helikopter PBB yang telah mendarat di sana sekitar pukul 09.30. Namun tidak satupun dari pasukan ini yang bertindak mencegah kekerasan dan intimidasi, yang dibiarkan tanpa henti selama sekitar 15 sampai 20 menit. Sekitar 20 orang polisi Brigade Mobil (Brimob) akhirnya datang di tempat kejadian setelah kekerasan mereda.

Tindakan Polri yang tidak memadai tersebut sangat bermasalah mengingat dekatnya jarak antara kantor UNAMET dengan berbagai kantor Polri di Maliana dan cukup cepatnya insiden dilaporkan kepada mereka. Kantor Kepolisian Resor hanya berjarak sekitar 500 meter dari kantor UNAMET, dan ada sebuah kantor polisi (Kepolisian Sektor) sekitar 150 meter dari sana. Selain itu ada markas Komando Rayon Militer yang berjarak 100 meter dari kantor UNAMET. Sebuah panggilan darurat dikirimkan dari UNAMET ke alat operator kepolisian dalam menit pertama serangan dimulai, dan seorang wartawan secara langsung mengingatkan petugas-petugas Polres beberapa menit kemudian.

Yang sama bermasalahnya dengan tanggapan Polri yang lamban adalah tindakan Polri ketika pada akhirnya mereka tiba di tempat kejadian. Walaupun ada bukti yang jelas bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, baik polisi biasa maupun Brimob tidak melakukan satupun penahanan. Seperti yang sudah dikemukakan di atas, anggota-anggota milisi masih terlihat dan terdengar di wilayah sekitar kompleks UNAMET selama beberapa jam setelah serangan. Beberapa hari sesudahnya, milisi DMP tampak bebas beroperasi dan melakukan tindak intimidasi dan kekerasan, tanpa ada tindakan hukum.

Serangkaian perkembangan pada siang dan malam sebelum kejadian, dan unsur-unsur serangan itu sendiri, mengukuhkan dugaan mengenai hubungan antara kelompok milisi, Dadurus Merah Putih, dengan para perwira TNI di Maliana. Hubungan itu, seperti yang digambarkan secara terperinci di bawah, membantu menjelaskan mengapa Polri tidak mau atau tidak mampu mengendalikan kelompok milisi tersebut.

Pada 28 Juni, sehari sebelum kejadian, satu pertemuan lengkap milisi DMP diadakan pada pukul 07.30 di gedung olah raga di seberang lapangan kantor UNAMET. Yang hadir dalam pertemuan tersebut, menurut sejumlah laporan, adalah Komandan Distrik Militer (Dandim) Maliana, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian; Perwira Seksi Intelijen Kodim, Letnan Satu Sutrisno; Komandan DMP, Domingos dos Santos; dan dua pemimpin lain DMP, Mau Buti dan Julião Gomes. Tiga orang yang disebut terakhir adalah anggota TNI yang masih aktif atau sudah pensiun.

Dilaporkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Dandim Letnan Kolonel Siagian memberikan pengarahan kepada DMP tentang tugas-tugas mereka yang berkaitan dengan Konsultasi Rakyat dan kedatangan UNAMET. Para saksi melaporkan bahwa Siagian menekankan beberapa hal berikut: bahwa Konsultasi Rakyat tidak diperlukan di Kabupaten Bobonaro; bahwa tak seorangpun diperbolehkan mendekati kantor UNAMET; bahwa staf lokal UNAMET harus ditakut-takuti dan digantikan oleh anggota DMP; dan bahwa bendera UNAMET harus diturunkan. Seorang anggota DMP yang hadir pada saat itu bersaksi bahwa Letnan Kolonel Siagian juga mengatakan kepada para milisi agar tidak mengkhawatirkan tindakan atau reaksi dari Polri atau Brigade Mobil yang ditugaskan untuk menjaga kompleks PBB karena, menurut kata-katanya, “mereka adalah bagian dari kita.”

Pengamatan yang dilakukan pada pagi hari 29 Juni, dan kesaksian dari orang-orang yang ada di tempat kejadian, memperkuat tanpa sedikitpun keraguan akan kemungkinan hubungan antara para pejabat militer setempat dan milisi, dan tanggung jawab bersama mereka atas serangan yang terjadi.

Setidaknya dua saksimata setempat melaporkan melihat Perwira Seksi Intelijen Kodim Letnan Satu Sutrisno dan Komandan Distrik Militer Letnan Kolonel Siagian di tempat kejadian mengenakan pakaian sipil, dan kedua saksi itu sama mengatakan bahwa kedua perwira itu tidak melakukan apapun untuk mencegah serangan atau menghentikannya ketika serangan itu berlangsung. Ketika Pejabat Urusan Politik UNAMET tiba di tempat kejadian sekitar 15 menit setelah insiden dimulai, ia menemui Letnan Kolonel Siagian, yang kemudian memperkenalkannya kepada

tiga komandan milisi DMP, dengan mengatakan bahwa mereka ingin menjelaskan tindakan mereka kepada UNAMET. Para saksi setempat juga melaporkan nama-nama sejumlah anggota TNI aktif maupun yang sudah pensiun yang berada di antara kelompok milisi itu pada saat kejadian, semuanya memakai pakaian sipil. Akhirnya, penting diperhatikan bahwa, di akhir serangan, para anggota milisi membentuk formasi militer dan berbaris menuju pos militer setempat, yang berada sekitar 100 meter dari kompleks UNAMET.

Secara bersama, bukti-bukti ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kelompok milisi yang bertanggung jawab atas serangan tanggal 29 Juni, DMP, dikendalikan oleh perwira-perwira TNI di Maliana, dan lebih khusus lagi oleh Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian, dan Perwira Seksi Intelijen Kodim, Letnan Satu Sutrisno. Berdasarkan penemuan ini, sangatlah sulit untuk menghindar dari kesimpulan bahwa serangan tersebut, dan terbatasnya usaha resmi untuk mencegah dan menghentikan serangan itu, merupakan bagian dari usaha para pejabat yang berwenang ini untuk menghambat atau merongrong kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Penyerangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan (4 Juli 1999).

Pada 4 Juli sekitar pukul 4 sore hari Minggu, satu rombongan kendaraan yang baru kembali dari satu misi bantuan kemanusiaan membantu para pengungsi dalam negeri, diserang oleh sekitar 20 orang anggota milisi bersenjata Besi Merah Putih (BMP) ketika rombongan itu melewati kota Liquiçá. Seorang anggota staf UNAMET dijadikan sasaran langsung, banyak personel organisasi nonpemerintah yang diserang, dan salah satunya dibawa ke rumah sakit karena menderita luka serius di kepala. Kendaraan-kendaraan UNAMET dan organisasi nonpemerintah mengalami kerusakan berat.[*]

Sebagai tanggapan terhadap keadaan yang semakin tidak aman, diputuskan untuk mengungsikan semua personel UNAMET dari wilayah Liquiçá pada hari yang sama, dan sebuah helikopter dikirimkan dari Dili untuk evakuasi ini. Namun, rencana evakuasi harus dihentikan ketika satu kelompok lain milisi bersenjata, mungkin BMP, menyerang helikopter dengan batu-batu dan senapan rakitan. Usaha evakuasi kedua juga dihalangi ketika milisi mengepung personel UNAMET dan berusaha menyerang anggota staf lokal UNAMET.

Dua serangan itu terjadi di tengah serangkaian ancaman terhadap personel PBB di kota Liquiçá—dan hanya beberapa hari setelah serangan terhadap kantor UNAMET di Maliana serta intimidasi milisi terhadap personel PBB di Viqueque. Sejumlah insiden ini dilaporkan kepada pihak berwenang Kepolisian

* Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini berdasarkan pada laporan yang disusun UNAMET segera setelah kejadian, dan diserahkan kepada para pejabat pemerintah Indonesia. UNAMET, Political Affairs Office, "Report on the Liquiçá Incidents of 4 July," Dili, 12 Juli 1999. Dicetak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book on Political and Human Rights in East Timor*, Dili, November 1999.

Resor (Polres) di Liquiçá, sehingga kemudian ditempatkan sejumlah personel tambahan dari Brigade Mobil untuk melindungi staf UNAMET. Tetapi, berbagai peringatan dan penjagaan ini tidak menghasilkan pengaruh penting pada kebebasan milisi yang bergerak ke seluruh bagian kota dan melakukan tindakan intimidasi dan kekerasan.

Rombongan bantuan kemanusiaan itu meliputi sekitar 50 orang wakil organisasi-organisasi nonpemerintah setempat, dan sekitar 20 pengungsi dalam negeri yang telah dievakuasi dari beberapa desa di sepanjang perbatasan antara Ermera dan Liquiçá untuk mendapatkan perawatan medis. Kelompok itu disertai oleh Pejabat Urusan Kemanusiaan UNAMET dan seorang wakil dari UNHCR. Sekitar satu jam sebelum mencapai Liquiçá, dua orang Perwira Penghubung Militer UNAMET, yang berada di wilayah tersebut untuk penugasan lain, bergabung dengan rombongan ini.

Pada saat serangan terjadi, rombongan sedang berhenti dan banyak dari penumpangnya sedang memanfaatkan kesempatan untuk beristirahat dengan meluruskan kaki-kaki mereka atau membeli minuman dan makanan ringan di toko-toko sekitarnya. Pejabat Urusan Kemanusiaan meminta berhenti sejenak untuk berbicara dengan para Perwira Penghubung Militer UNAMET, yang berencana meninggalkan rombongan di tempat itu. Karena khawatir akan keamanan para pengungsi dalam negeri, Pejabat Urusan Kemanusiaan meminta para Perwira Penghubung Militer kembali ke wilayah distribusi bantuan kemanusiaan untuk memastikan agar penduduk tidak diganggu oleh milisi. Setelah menyelesaikan pembicaraannya, pejabat UNAMET itu mulai berjalan dari mobil Perwira Penghubung Militer, menyusuri jalan kembali, dan berbelok di sebuah sudut menuju ke bagian depan rombongan. Ketika ia berbelok itulah, ia menyaksikan saat-saat awal terjadinya serangan milisi.

Cuplikan gambar televisi dan kesaksian dari lebih daripada selusin orang, termasuk beberapa anggota BMP dan orang-orang yang menyaksikan, memungkinkan dibuatnya rekonstruksi insiden ini. Sekitar lima menit setelah rombongan berhenti di Liquiçá, sebuah mobil van mini berwarna hijau-biru dengan tulisan “Miramar” di sisinya melaju menuruni bukit dari selatan dan berhenti mendadak di dekat pertengahan deretan kendaraan yang sedang berhenti. Ketika mobil itu berhenti, sekitar 20 orang muda berlompatan dan mulai mendekati para staf organisasi nonpemerintah dan UNAMET, beberapa dari mereka berteriak “bunuh mereka!” Sebagian besar membawa parang, pisau, atau senapan rakitan. Setidaknya seorang anggota milisi membawa sepucuk senjata otomatis. Tanpa peringatan atau provokasi para anggota milisi mulai menyerang, mengayun-ayunkan parang dan pisaunya dengan cara mengancam, mengarahkan senapan-senapan mereka kepada para anggota rombongan, dan menghancurkan kaca jendela-jendela sebagian besar mobil. Serangan berlanjut ketika orang-orang berusaha menyelamatkan diri dengan berlari dan mengendarai mobil. Setidaknya dua orang saksimata mengatakan bahwa anggota-anggota milisi bersenjata mendekati dan menghunjamkan senjata-senjata ke dalam salah satu kendaraan UNAMET ketika mobil itu bergerak ke timur menuju jalan utama ke arah Dili.

Yang paling parah terkena serangan adalah staf organisasi nonpemerintah, tetapi personel UNAMET juga dijadikan sasaran. Pejabat Urusan Kemanusiaan UNAMET diancam oleh tiga orang milisi yang menodongkan senjatanya langsung ke dirinya dalam jarak dekat. Cuplikan gambar televisi juga menunjukkan si pejabat ini berusaha melindungi beberapa anggota rombongan, sebelum ia dan yang lainnya berbalik arah dan pergi menyelamatkan diri dengan sebuah mobil. Sebagian besar rombongan akhirnya berhasil bergerak ke kantor Polres Liquiçá yang berdekatan dengan tempat kejadian, sementara sekitar sepuluh orang pergi ke kantor Polsek. Akhirnya, semua anggota rombongan termasuk personel UNAMET dibawa ke Polres. Di sana Pejabat Urusan Kemanusiaan UNAMET secara sukarela menyerahkan kepada polisi sepucuk senapan rakitan yang ditemukan di dalam kendaraannya.

Beberapa orang mengalami luka-luka dalam serangan dan sebagian besar terguncang berat. Rekaman gambar film memperlihatkan bahwa satu orang ditendang secara brutal di kepala oleh seorang anggota BMP. Korban tersebut adalah Laurentino Soares, pengemudi salah satu mobil organisasi nonpemerintah, yang dibawa ke rumah sakit dengan luka parah di kepalanya. Seorang anggota BMP bersaksi bahwa Soares juga dihantam kepalanya dengan sepucuk senapan sebelum ditendangi. Dua anggota BMP juga mengalami luka tembak selama insiden. Mereka diidentifikasi sebagai Romaldo Coreia Martins, komandan pos BMP setempat dan anggota unit bantuan Polres Liquiçá (Kamra), dan Fernando Ramos, seorang anggota BMP dan petani. Ketiga korban dibawa ke rumah sakit militer Wirahusada di Dili, di mana mereka diwawancarai personel UNAMET pada 4 Juli dan kemudian pada 6 Juli. Laurentino Soares kemudian dipindahkan ke fasilitas medis yang lain. Enam orang yang dilaporkan hilang setelah serangan kemudian ditemukan.

Segera setelah serangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan ini, satu kelompok milisi bersenjata melancarkan serangan terpisah terhadap personel UNAMET yang bersiap mengungsi dari Liquiçá. Tidak ada yang terluka dalam kejadian ini dan semua personel akhirnya dibawa kembali ke Dili dengan selamat, tetapi serangan itu kembali menjelaskan ketidakmauan atau ketidakmampuan Polri untuk mencegahnya.

Keputusan untuk evakuasi sudah diambil sebagai tanggapan terhadap laporan-laporan awal tentang serangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan tersebut, dan rangkaian serangan dan ancaman terhadap PBB selama dua hari sebelumnya. Sebuah helikopter dikirim dari Dili ke tempat yang ditentukan di pantai dekat Liquiçá, dan semua staf PBB berkumpul di sebuah rumah bersiap untuk pindah ke tempat tersebut dalam satu rombongan. Ketika staf PBB menunggu, mereka dikawal oleh satu kontingen Brigade Mobil (Brimob).

Namun rencana evakuasi harus ditunda ketika dua anggota staf PBB, seorang Polisi Sipil dan Perwira Keamanan Lapangan, disergap oleh anggota-anggota milisi ketika mereka berkendaraan ke arah pantai menuju ke helikopter. Para anggota milisi membawa parang dan senjata rakitan dan mengacungkan senjata itu ke personel PBB. Walaupun ada ancaman seperti ini, kedua orang staf PBB itu

berhasil memacu kendaraannya ke pantai untuk memperingatkan penerbang dan para penumpang tentang kehadiran milisi, dan tentang kemungkinan serangan. Keputusan diambil untuk menerbangkan helikopter ke tempat lain untuk mengalihkan perhatian milisi keluar dari wilayah tersebut. Ketika helikopter bersiap lepas landas, milisi tiba dan mulai melempari helikopter dengan batu. Orang-orang yang hadir di tempat kejadian juga melaporkan bahwa tembakan juga dilepaskan ke arah helikopter.

Setelah helikopter itu lepas landas, rombongan PBB yang terdiri atas delapan buah mobil yang bersiap untuk evakuasi bergerak ke tempat evakuasi alternatif. Namun segera setelah tiba di tempat, mereka dikepung oleh para anggota milisi yang tiba dengan sebuah truk. Milisi memukul-mukul jendela mobil, mengacungkan senjata-senjata mereka kepada para penumpang dengan sikap mengancam, dan berusaha menarik sedikitnya satu orang staf lokal UNAMET dari dalam mobil. Polisi Indonesia yang ada di tempat kejadian tidak berbuat apapun untuk menghentikan serangan. Mereka tidak mencegah tindakan para anggota milisi, yang tetap berada di tempat dengan sikap mengancam.

Akhirnya, personel UNAMET berhasil keluar dari tempat kejadian. Tetapi ketika mereka bergerak ke arah Dili, mereka menghadapi penghalang jalan di dekat kantor Polres Liquiçá yang dijaga oleh dua orang milisi, salah satunya terlihat membawa sepucuk senapan otomatis. Karena tidak bisa melanjutkan perjalanan, rombongan itu berbelok memasuki kantor Polres Liquiçá, dan mereka bergabung dengan para anggota rombongan bantuan kemanusiaan yang sudah berada di sana. Kemudian pada malam yang sama, kedua rombongan kembali dalam satu konvoi ke Dili, dan sampai dengan selamat di kota itu sekitar pukul 10 malam.

Dalam satu kejadian yang berhubungan, dua mobil UNAMET yang telah dikirim dari Dili menghadapi satu penghalang jalan milisi beberapa kilometer di timur Liquiçá. Beberapa anggota milisi mengarahkan senjata rakitannya ke mobil PBB pertama yang membawa Polisi Indonesia, Kolonel Sitompul, dan Polisi Sipil PBB Superintendant Polden. Ketika mobil pertama sudah lewat, para milisi lalu mengarahkan senjatanya ke mobil kedua, yang mengangkut seorang perwira Polisi Sipil PBB lain. Setidaknya satu senjata rakitan ditembakkan ke arah mobil-mobil UNAMET, tetapi tidak timbul kerusakan atau luka-luka.

Bukti yang ada secara kuat menunjukkan bahwa Polri turut serta dalam serangan 4 Juli, atau paling sedikit tidak mau atau tidak mampu menghentikan serangan tersebut. Kesimpulan ini diperkuat oleh penolakan Polri memberikan pengawalan yang diminta untuk rombongan bantuan kemanusiaan, tindakan Polri yang tidak memadai ketika serangan sedang berlangsung, perilaku Polri segera setelah kejadian, dan sifat penyelidikan mereka selanjutnya. Satu segi yang sangat bermasalah dari tindakan Polri adalah energi yang mereka keluarkan untuk membangun tuduhan-tuduhan palsu tentang provokasi dari organisasi nonpemerintah dan UNAMET, sementara tidak mengambil tindakan apapun terhadap kelompok-kelompok milisi yang diketahui telah melakukan tindak pidana. Seperti dalam kasus penyerangan terhadap markas UNAMET di Maliana,

tekanan internasional membuat dilakukannya penahanan terhadap beberapa orang milisi. Tetapi, para tersangka segera dilepaskan setelah dijatuhi hukuman percobaan yang singkat.

Keprihatinan akan sikap pihak Polri terhadap rombongan bantuan kemanusiaan mulai muncul beberapa hari sebelum serangan milisi tanggal 4 Juli. Sebelum berangkat, organisasi-organisasi nonpemerintah—melalui UNAMET—telah meminta pengawalan dari Polri untuk menyertai rombongan, dan permintaan ini tampaknya disetujui. Namun, sesaat sebelum rombongan siap berangkat, pejabat Polri yang berwenang memberitahu UNAMET bahwa Polri tidak akan memberikan pengawalan. Alasan yang diberikan adalah bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan bukan mandat UNAMET, walaupun UNAMET menjelaskan bahwa UNAMET meminta pengawalan untuk organisasi nonpemerintah yang mengorganisasikan rombongan. Di pagi hari Minggu tanggal 4 Juli, UNAMET mengemukakan kepada Polri satu permintaan lagi agar, karena adanya ancaman serangan milisi, rombongan dikawal oleh Polri ketika dalam perjalanan pulang ke Dili. Ini disetujui, tetapi tidak terjadi. Tak bisa disangkal lagi, penolakan untuk memberikan satu pengawalan Polri menciptakan keadaan dalam mana suatu serangan dapat dengan mudah terjadi.

Polri juga gagal bertindak dengan efektif ketika serangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan sedang berlangsung, membiarkan insiden berlanjut tanpa halangan, dan tidak mengambil tindakan apapun untuk menahan orang-orang yang bertanggung jawab. Mengingat kenyataan bahwa insiden tersebut terjadi begitu dekat dengan kantor Polsek dan berjarak hanya beberapa menit, kalau mengendarai mobil, dari kantor Polres, kegagalan Polri untuk menghentikan serangan atau untuk menahan para pelaku patut dipermasalahkan.

Akhirnya, penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan pihak Polri dengan jelas ditandai sikap memihak. Dari semula, usaha Polri diarahkan untuk membuktikan tuduhan bahwa serangan "diprovokasi" oleh orang-orang yang berada di dalam rombongan bantuan kemanusiaan. Sementara itu, tidak ada usaha yang dilakukan untuk menahan atau menginvestigasi para anggota milisi yang terlihat menyerang rombongan dengan senjata. Kebanyakan bukti mengarah pada kesimpulan bahwa penyelidikan Polri dipengaruhi oleh pemimpin TNI, tidak memperhatikan prosedur kepolisian yang sesungguhnya.

Ringkasnya, sikap pasif dari pihak Polri terhadap para pelaku serangan, dan tidak memadainya penyelidikan mereka, dengan jelas menunjukkan bahwa milisi berada di bawah kendali dan dilindungi oleh pihak berwenang TNI, yang terhadapnya Polri tidak memiliki kekuasaan efektif.

Pembunuhan Staf UNAMET di Boboe Leten (30 Agustus 1999)

Yang termasuk menjadi sasaran pelanggaran berat hak asasi manusia baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara adalah staf lokal UNAMET. Setidaknya 14 orang staf lokal UNAMET dibunuh dalam tahun 1999, dan banyak lainnya yang menderita luka-luka, mendapat ancaman pembunuhan, dan dipindahkan secara paksa.*

Para staf lokal dijadikan sasaran karena diduga atau memang bersimpati prokemerdekaan, dan karena sikap umum antipati terhadap UNAMET. Antipati ini dipancing oleh tuduhan-tuduhan yang dibuat pejabat-pejabat Indonesia tentang pemihakan dan ketidakadilan UNAMET. Dengan kata lain, pembunuhan yang terjadi bukanlah tindak kekerasan yang acak tetapi pembunuhan bermotivasi politik. Lebih jauh lagi, dalam hampir setiap kasus, tindakan itu dilaksanakan dengan sepengetahuan atau keterlibatan langsung pasukan militer dan kepolisian Indonesia.

Pembunuhan terhadap dua anggota staf UNAMET, João Lopes dan Orlando Gomes, dan usaha pembunuhan terhadap staf ketiga, Alvaro Lopes, di Ermera adalah contoh-contoh paling jelas dari pola umum ini. Ketiga orang tersebut adalah staf UNAMET yang bekerja di tempat pemungutan suara di Desa Boboe Leten, di Kecamatan Atsabe. Mereka diserang oleh milisi bersenjata ketika sedang mengangkut kotak-kotak suara ke mobil UNAMET di akhir pemungutan suara pada 30 Agustus.†

Kesulitan dimulai di sore hari, ketika sekelompok milisi yang bersenjatakan parang, pisau, dan senapan tiba di tempat pemungutan suara, dan mulai mengeluarkan ancaman-ancaman terhadap staf lokal UNAMET. Para saksimata mengatakan bahwa milisi tiba dengan menggunakan sebuah mobil mirip jip berwarna biru gelap (sebuah Kijang), dan bahwa mereka disertai oleh beberapa anggota TNI yang membawa senjata otomatis.

Staf UNAMET melaporkan kehadiran milisi itu melalui radio dan mengungkapkan kecemasan akan keamanan kotak suara dan keselamatan mereka sendiri. Pesan itu disampaikan ke pusat pemungutan suara yang terdekat, di Lauana. Setelah menetapkan bahwa pemungutan suara sudah selesai di Lauana, regu Lauana diarahkan untuk segera membawa kendaraan mereka dan pergi berombongan dengan kawalan Polri ke Boboe Leten. Rombongan tiba di Boboe Leten sekitar pukul 5 sore. Dua atau tiga menit kemudian, pemimpin rombongan melaporkan

* Staf UNAMET yang diketahui telah dibunuh pada1999 adalah: João Lopes, Ruben Barros Soares, Domingos Pereira, José Ernesto Jesus Maia, Orlando Gomes, Leonel Silva de Oliveira, Manuel de Oliveira, Mariano da Costa, Ana Lemos, Carlos Maia, Abrui da Costa, Hilario Boavida da Silva, Francisco Taek, dan Paulos Kelo. Tidak jelas apakah semua yang dibunuh ini dijadikan sasaran karena mereka pegawai UNAMET, tetapi sebagian besar dibunuh karena alasan ini.

† Satu laporan internal TNI secara salah menyebutkan bahwa ketiga orang itu meninggal. Lihat: Telegram rahasia dari Dandim Ermera (Letnan Kolonel Muhammad Nur) kepada Danrem 164/WD (Kolonel Noer Muis), No. TR/148/1999, 31 Agustus 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #42).

melalui radio bahwa milisi sedang menembakkan senjata otomatis di sekitar tempat pemungutan suara. Serangan sedang berlangsung.*

Saat milisi dan prajurit TNI menembak-nembakkan senjata otomatis mereka, seseorang yang kemudian diidentifikasikan sebagai prajurit TNI, João da Costa, memasuki pusat pemungutan suara. Di sana ia menikam João Lopes yang sedang membawa sebuah kotak suara ke kendaraan UNAMET yang sedang menunggu. Milisi lalu menyeret Lopes keluar, di mana dua orang milisi lainnya menikamnya di punggung. Staf UNAMET berhasil mengambil Lopes dan menempatkannya di bagian belakang mobil UNAMET. Ia kemudian dibawa ke gedung Polisi Sipil PBB di kota Atsabe. Para perwira Polisi Sipil PBB mengupayakan perawatan medis darurat untuk mengatasi lubang di paru-paru korban dan banyaknya kehilangan darah. Walaupun upaya sudah dilakukan, João Lopes meninggal tidak lama setelah pukul 18.00.

Sementara itu di Boboe Leten, para milisi menyerang lagi dua petugas tempat pemungutan suara. Menurut satu laporan internal PBB, satu dari dua korban, Orlando Gomes, dipukuli babak-belur dengan tongkat, dan kemudian ditikam sampai mati oleh para milisi.† Tubuhnya dilaporkan dikuburkan di dalam sebuah selokan. Sisa jasadnya di kemudian hari diangkat dan dikuburkan kembali di tempat yang dekat dengan Pusat Pemungutan Suara.

Orang ketiga, Alvaro Lopes, juga diserang ketika sedang membawa sebuah kotak suara ke kendaraan PBB. Ia mengalami luka berat tetapi jiwanya selamat. Menurut laporan PBB yang dikutip di atas, anggota TNI João da Costa pertama menangkap lengan Alvaro dan kemudian menikamnya. Pisau masuk ke bagian sisi kiri bawah punggungnya dan tembus ke sisi kanan bawah rusuknya. Ia kemudian diseret ke sebuah pojok dan ditinggalkan di sana oleh para milisi yang tampaknya menganggapnya sudah meninggal. Ketika para milisi akhirnya pergi, ayah Alvaro mengambil Alvaro dan membawanya ke pergunungan, di mana ia merawat Alvaro dengan obat-obatan tradisional.

Satu penyelidikan UNAMET yang dilakukan pada hari selanjutnya menemukan bahwa perwira-perwira dan prajurit TNI secara langsung terlibat dalam serangan, dan bahwa yang lain telah menyetujui serangan tersebut. Penyelidikan itu juga mengungkapkan motivasi politik yang jelas di balik pembunuhan dan memberikan banyak bukti tentang ketakmemadaian tindakan Polri dan TNI untuk menangani insiden tersebut. Pengamatan ini dicantumkan dalam satu laporan internal UNAMET, bertanggal 31 Agustus, yang mencatat hal-hal penting dari kunjungan penyelidikan UNAMET ke Atsabe pada hari itu.‡

---

* UNAMET, HF pesan e-mail dari Ermera ke HQBPG, 30 Agustus 1999, Subject: "Murder of Locally Employed UNAMET Staff." Dicetak ulang dalam UNTAET, Political Affairs, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

† UNTAET, DHRO-Ermera, "Report on Human Rights Violations During 1999: Ermera District," [Maret 2000] halaman 28-39.

‡ UNAMET, Political Affairs Office, "Notes on Atsabe Investigation, 31 August 1999," dicetak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999. Untuk keterangan dari tangan pertama tentang kunjungan tersebut lihat Geoffrey Robinson, "The Fruitless Search for a Smoking Gun:

Mengenai persoalan keterlibatan TNI, laporan ini mencatat bahwa seorang perwira Polisi Sipil PBB telah bersaksi secara tertulis bahwa anggota-anggota TNI secara langsung terlibat dalam serangan di Boboe Leten. Laporan ini juga memberikan perhatian pada bukti persetujuan dan keterlibatan Komandan Rayon Militer (Danramil) dalam serangan tersebut. Sejumlah staf UNAMET menyaksikan, misalnya, bahwa kendaraan Kijang biru gelap yang dikendarai Danramil pada 31 Agustus adalah kendaraan yang sama dengan yang digunakan untuk membawa milisi ke tempat kejadian serangan. Lebih jauh, menurut laporan ini, Danramil mengaku kepada para pegawai UNAMET bahwa dirinya telah mengetahui rencana untuk menyerang UNAMET pada 30 Agustus, tetapi tidak melakukan apapun untuk mencegahnya. Menurut laporan ini, Danramil:

> "… mengungkapkan tidak adanya penyesalan atas kekerasan di malam sebelumnya, tetapi justru berusaha membenarkannya dengan alasan bahwa 'masyarakat' marah terhadap UNAMET yang bersikap tidak netral. Ia menyampaikan bahwa dirinya sudah mendapat laporan akan terjadinya suatu serangan terhadap personel UNAMET pada 30 Agustus, dan bahwa dirinya telah mengatakan kepada milisi agar tidak melukai staf <u>internasional</u> UNAMET. Ketika [pejabat UNAMET] bertanya mengapa ia tidak berusaha mencegah serangan itu seluruhnya, Danramil berkata bahwa jika ia campurtangan, milisi akan berbalik melawan dirinya."[*]

Mengenai motivasi di balik serangan, laporan tersebut menegaskan bahwa milisi bertindak dengan tujuan politis. Dikemukakan bahwa, dalam satu pembicaraan dengan para pejabat UNAMET pada 31 Agustus, "pemimpin milisi mengatakan bahwa orang-orangnya telah membunuh Tuan Lopes karena staf UNAMET tidak netral dan telah 'memaksa' masyarakat untuk tidak memilih otonomi. Ia juga mengatakan bahwa, oleh karena alasan yang sama, orang-orangnya tidak akan membiarkan kotak-kotak suara atau staf lokal UNAMET pergi."[†]

Akhirnya, mengenai tindakan pihak berwajib terhadap insiden tersebut, laporan UNAMET menggambarkannya sebagai "sepenuhnya tidak memadai" dan mengajukan pengamatan berikut mengenai perilaku pihak berwajib selama kunjungan UNAMET ke Atsabe pada 31 Agustus:

> "Tim pertama, yang tiba di Atsabe sekitar pukul 7, mendapati korban meninggal, João Lopes, dibaringkan di rumah Polisi Sipil PBB, ditemani keluarganya yang berduka, dan rumah itu

Tracing the Origins of Violence in East Timor," dalam Freek Columbijn dan J. Thomas Lindblad (penyunting), *Roots of Violence in Indonesia*, Leiden: KITLV Press, 2002, halaman 263 dan 267

* UNAMET, Political Affairs Office, "Notes on Atsabe Investigation, 31 August 1999." Dicetak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

† Ibid.

> dikelilingi oleh sekitar 50 orang anggota milisi bersenjata … Pembicaraan yang panjang dengan kepala kepolisian setempat (Kapolsek) dan seorang Perwira Penghubung Polisi di Polres Ermera menghasilkan jaminan bahwa milisi akan dibubarkan dan dikendalikan, tetapi tidak ada tindakan yang diambil, dan milisi tetap mempertahankan kehadirannya dengan bersenjata di wilayah sekitar rumah Polisi Sipil PBB … Menanggapi permintaan UNAMET yang berulang-ulang agar milisi diminta bubar, ia menjelaskan bahwa ia tidak berani mengajukan permintaan semacam itu."

Demikian juga, laporan ini mengemukakan, Danramil "menolak memberikan jaminan agar milisi dikendalikan, apalagi ditangkap."[*]

Satu delegasi tingkat tinggi TNI dan Polri dari Dili dan Ermera yang tiba kemudian di siang hari tanggal 31 Agustus berhasil meyakinkan milisi untuk membiarkan kotak-kotak suara dan staf lokal pergi. Namun, bahkan delegasi tersebut—termasuk Kolonel Polisi Made Pastika dari Dili, serta Dandim dan Kapolres dari Ermera—tidak mampu atau tidak mau mengamankan akses UNAMET ke tempat kejadian. Menurut laporan UNAMET ini, "Para pejabat militer dan kepolisian … terus bersikeras mengatakan bahwa keamanan tidak dapat dijamin, dan tidak mau menggunakan wewenangnya untuk memungkinkan dilakukannya kunjungan."[†]

Penyelidikan-penyelidikan dan pendokumentasian lebih lanjut telah membuktikan pengamatan awal ini, sekaligus menambah beberapa perincian penting. Penyelidikan-penyelidikan telah menemukan saksimata yang bisa mengidentifikasi nama-nama para penyerang. Secara signifikan, mereka yang disebut namanya mencakup empat orang yang diduga agen intelijen militer SGI dan tiga anggota reguler TNI.[‡] Bukti ini menambah bobot kesimpulan bahwa TNI terlibat secara langsung di dalam pembunuhan-pembunuhan ini.

Satu laporan rahasia militer tentang serangan tersebut, bertanggal 31 Agustus dan ditandatangani oleh Dandim Ermera, tidak memberikan bukti keterlibatan langsung TNI, tetapi mengungkapkan besarnya kecenderungan para perwira TNI untuk menerima atau mungkin berbagi pandangan dan penafsiran dengan milisi tentang kejadian-kejadian yang sudah berlangsung. Misalnya, penjelasan yang diberikan dalam laporan ini tentang pembunuhan-pembunuhan pada 30 Agustus sama dengan penjelasan yang diberikan pemimpin milisi kepada UNAMET pada 30 Agustus. Penjelasan dalam laporan ini menyebutkan: "Pada 30 Agustus 1999 pukul

---

* Ibid.

† Ibid.

‡ Mereka yang diduga sebagai agen SGI adalah: Manuel Gonçalves, Antónino Beremau, Miguel Gonçalves, dan Manuel Halimau. Tiga anggota TNI yang disebut adalah: João da Costa, Laurindo, dan Domingos de Deus Soares. UNAMET, DHRO-Ermera, Report on 1999, halaman 29-30.

17.00 WITA melihat kecurangan staf lokal UNAMET menimbulkan kemarahan masyarakat pro-otonomi, sehingga melakukan penganiayaan terhadap staf lokal UNAMET tersebut ...”*

Pemindahan paksa dan pembunuhan pengungsi di Dili (5-6 September 1999)

Karena ketakutan akan meningkatnya kekerasan, dalam hari-hari setelah pemungutan suara 30 Agustus banyak penduduk Dili melarikan diri ke bukit-bukit yang mengitari kota itu atau mencari tempat-tempat perlindungan di dalam kota. Pada 5 dan 6 September, tempat-tempat perlindungan ini diserang sekelompok besar milisi dan juga personel TNI dan Polri. Tempat-tempat itu sendiri dihancurkan dan dibakar, banyak pengungsi terluka berat, dan sedikitnya 17 orang dibunuh.†

Kisah-kisah yang disampaikan para saksimata menunjukkan bahwa serangan-serangan ini bukanlah serangan acak yang dilakukan oleh segerombolan milisi pencoleng yang berniat balas dendam, melainkan suatu operasi yang direncanakan dengan baik yang dimaksudkan untuk meneror pengungsi dan memaksa mereka pindah ke Timor Barat. Dalam pengertian tersebut, serangan-serangan tersebut merupakan contoh yang jelas dari metode-metode yang digunakan oleh pasukan keamanan dan milisi di seluruh Timor-Leste untuk pemindahan paksa sekitar 400.000 orang di hari-hari dan minggu-minggu setelah pemungutan suara.

Serangan pertama terjadi di Keuskupan Dili, tempat sekitar 300 orang mencari perlindungan di hari-hari sebelumnya. Sekitar tengah hari pada 5 September, sebanyak 50 orang anggota milisi Aitarak bersenjata mulai menyerang pengungsi di sana dan menghancurkan serta membakar bangunan-bangunan di kompleks tersebut. Serangan berlanjut sampai senja hari. Sejumlah besar personel TNI dan Polri ada di tempat kejadian selama penyerangan, tetapi tidak melakukan tindakan pencegahan, atau menghentikannya ketika serangan itu berlangsung. Yang terjadi justru sebagian anggota TNI dan Polri turut serta di dalam serangan tersebut.

Serangan berlangsung dalam dua tahap. Pertama, semua pengungsi dipaksa keluar dari kompleks dan menyeberang jalan menuju pelabuhan Dili. Kemudian, laki-laki dipisahkan dari perempuan dan anak-anak, dan selanjutnya diinterogasi serta dipukuli. Mereka yang diyakini sebagai mahasiswa, staf UNAMET, atau anggota CNRT dipisahkan untuk mendapatkan perlakuan yang lebih keras. Jumlah tepat korban tidak diketahui. Namun, para penyelidik telah menetapkan identitas lebih daripada 20 orang yang dijadikan sasaran tindakan tidak berperikemanusiaan selama serangan, dan sedikitnya 15 orang dibunuh atau dihilangkan.

---

* Telegram rahasia dari Dandim Ermera (Letnan Kolonel Muhammad Nur) Kepada Danrem 164/WD (Kolonel Noer Muis), No. TR/148/1999, 31 Agustus 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #42).

† Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada: East Timor, Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Eurico Guterres et al., Dili, 27 Februari 2003.

Ketika serangan terhadap Keuskupan Dili dimulai, beberapa pejabat paling senior militer, kepolisian, dan pemerintah sipil Indonesia sedang rapat di rumah Komandan Korem Timor Timur, Kolonel Noer Muis, yang berada dua kilometer dari tempat kejadian.[*] Menurut seorang asisten Uskup Belo, Manuel Abrantes, yang hadir dan mencatat isi rapat itu, Uskup Belo secara tegas meminta Jenderal Wiranto untuk menginstruksikan para komandan TNI dan Polri di Timor-Leste agar mengendalikan milisi.[†] Setelah berdiskusi beberapa lama, dan muncul penentangan jelas dari panglima tertinggi milisi, João Tavares, Uskup mengulangi permintaannya. Kali ini Jenderal Wiranto menjawab "Ya, Bapak Uskup."[‡] Namun, kejadian-kejadian di hari selanjutnya menunjukkan bahwa perintah seperti itu tidak pernah dikeluarkan atau perintah dikeluarkan tetapi diabaikan. Dalam waktu hanya beberapa jam kemudian di pagi hari 6 September, tiga tempat pengungsian utama di Dili diserang oleh anggota milisi bersenjata.

Salah satu sasaran adalah Biara Canossiana tempat sekitar 100 orang dan sembilan suster berlindung. Milisi menyeret mereka semua keluar dari kompleks biara, menyerang seorang suster, dan kemudian menghancurkan sebagian besar barang di dalam biara. Sasaran kedua adalah kompleks Komite Palang Merah Internasional (ICRC), tempat diperkirakan 2.000 orang berkumpul pada hari-hari setelah pemungutan suara. Dengan menembak-nembakkan senjata dan berteriak-teriak, anggota-anggota milisi memaksa para pengungsi keluar ke jalan, dan orang-orang yang dicurigai sebagai aktivis prokemerdekaan dipisahkan dari yang lain sebelum digiring pergi. Seperti dalam kasus Keuskupan Dili, personel TNI dan Polri mengambil bagian dalam serangan ini atau gagal bertindak mencegah serangan tersebut.

Serangan terhadap sekitar 5.000 orang yang mencari perlindungan di kediaman Uskup Belo merupakan kejadian yang paling luas diliput dan didokumentasikan secara menyeluruh dari tiga serangan pada 6 September. Lebih daripada 15 orang menderita luka parah dalam serangan ini, sedikitnya satu orang dibunuh, dan rumah Uskup dihancurkan hingga menjadi puing yang membara.

Serangan didahului dengan tanda-tanda buruk adanya keterlibatan pihak berwenang. Di awal pagi hari 6 September, Uskup Belo menghubungi Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur, Kolonel Timbul Silaen, untuk meminta bantuan

---

* Para pejabat militer, kepolisian, dan pemerintah sipil yang hadir pada rapat tanggal 5 September mencakup: Panglima TNI, Jenderal Wiranto; Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung; Panglima Daerah Militer IX, Mayor Jenderal Adam Damiri; perwira Satuan Tugas, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim; Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat (dan tidak lama kemudian menjadi Penguasa Darurat Militer), Mayor Jenderal Kiki Syahnakri; Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur, Kolonel Timbul Silaen; dan Komandan Resor Militer Timor Timur, Kolonel Noer Muis. Beberapa tokoh pro-otonomi terkemuka termasuk João Tavares dan Francisco Lopes da Cruz juga hadir. Lihat: Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Eurico Guterres et al., Dili, 27 Februari 2003.

† Kesaksian Manuel Abrantes, direkam dan dikumpulkan di Brisbane, Australia, 26 November 1999.

‡ Kesaksian Manuel Abrantes, halaman 6.

perlindungan dan mungkin mengevakuasi pengungsi. Kolonel Silaen disebutkan mengatakan bahwa dirinya tidak dapat membantu, dan menyarankan Uskup untuk menghubungi Komandan Resor Militer Timor Timur, Kolonel Noer Muis. Uskup kemudian menelepon Kolonel Muis, yang juga mengatakan tidak dapat membantu. Sekitar pukul 09.00 seorang perwira Kostrad yang tidak teridentifikasi tiba di kediaman Uskup untuk berbicara dengan Uskup. Perwira itu mengatakan kepada Uskup bahwa ia bermaksud melindungi diri Uskup dan tempat kediamannya, dan ia meminta Uskup untuk menelepon jika terjadi sesuatu. Ia kemudian pergi. Sekitar 15 menit kemudian, milisi mulai berdatangan.

Kelompok pertama terdiri atas 20 orang yang bertelanjang dada tidak mengenakan kaos oblong, tiba dengan mengendarai sepeda motor. Mereka disusul oleh banyak yang lain dengan mengendarai sejumlah mobil Kijang dan truk bak terbuka berwarna kuning. Mereka yang berada di dalam truk mengenakan ikat kepala merah putih. Seluruhnya ada lebih daripada 100 orang anggota milisi. Ketika mereka berkumpul, para milisi berteriak melecehkan para pengungsi di dalam, dengan menyebut mereka "Anak-anak pelacur", dan mengancam "Kami akan bunuh kalian; kami tahu kalian prokemerdekaan!" Beberapa dilaporkan berteriak "Cukimai!" dan "Kalian makan tahi kalian sendiri kalau mau merdeka!"[*]

Serangan kemudian dimulai dengan cara yang tampak terkoordinasi. Milisi mulai mengelilingi kompleks kediaman Uskup, yang dikitari oleh jalanan di semua sisinya. Pada putaran pertama, mereka menembakkan pistol, senjata otomatis, dan senapan rakitan ke dalam kompleks, memecahkan jendela-jendela, dan mengakibatkan sejumlah orang terluka. Pada putaran kedua, mereka melemparkan alat-alat peledak bakar (bom Molotov) ke dalam kompleks. Beberapa dari alat-alat peledak itu masuk ke rumah kediaman Uskup dan dalam waktu singkat rumah itu terbakar.[†]

Sementara itu banyak milisi yang bersenjatakan pedang dan senapan memasuki kompleks dan mulai menangkapi para pemuda sambil berteriak agar yang lain pergi. Orang-orang berteriak dan menangis, dan sejumlah orang terluka parah. Di antara mereka adalah seorang anak perempuan berusia tujuh tahun, yang kehilangan mata kirinya ketika dihantam oleh peluru nyasar, dan seorang anak laki-laki yang tertembak di belakang kepalanya.[‡]

Menurut surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat, personel TNI dan Polri secara aktif berpartisipasi di dalam serangan. Secara lebih spesifik, surat dakwaan itu menyatakan bahwa:

> "… anggota-anggota TNI dan Brimob memasuki kompleks dengan menembakkan senjata otomatis, menyerang pengungsi, dan memerintahkan mereka keluar. Anggota-anggota POLRI memasuki

* Kesaksian Manuel Abrantes, halaman 8.

† Kesaksian Manuel Abrantes, halaman 9.

‡ Anak perempuan itu adalah Liliana Trindade.

kompleks dan memerintahkan agar pengungsi keluar. Salah seorang anggota POLRI menyulut api di rumah Uskup Belo dengan sejumlah kaleng bensin."[*]

Akhirnya, para pengungsi berhasil keluar ke Travessa Lecidere, satu lapangan yang bersebelahan dengan kompleks kediaman Uskup. Unit-unit Polri dan TNI, dan setidaknya seorang perwira TNI, ada di sana selama operasi ini berlangsung.[†] Manuel Abrantes, yang berada di sana, menggambarkan kejadian ini:

> *"Ketika orang-orang meninggalkan kompleks, unit-unit Kostrad dan Polri muncul, termasuk Komandan Kostrad. Ketika kami diarahkan milisi ke Travessa Lecidere, para anggota milisi mengatakan, 'Jangan bicara, jangan berteriak. Kalau kalian berteriak, kami akan bunuh kalian.' Senjata-senjataapi diarahkan kepada kami oleh milisi, Polri, dan Kostrad."*[‡]

Di tengah kekacauan, Uskup meninggalkan kompleks kediamannya untuk berbicara dengan komandan Kostrad yang sebelumnya menawarkan bantuan. Setelah berbicara beberapa saat dengan komandan tersebut dan sejumlah perwira Polri, Uskup dibawa pergi. Awalnya Uskup dibawa ke kantor Kepolisian Daerah (Polda), kemudian diangkut dengan helikopter ke kota Baucau, di mana ia bergabung dengan Uskup Nascimento.

Sementara itu, di kompleks kediaman Uskup di Dili, lima atau enam anggota milisi menginterogasi sekumpulan pengungsi. Seorang pemimpin milisi, yang bersenjatakan sepucuk pistol dan sebuah granat dan mengenakan bendera Indonesia di kepalanya, mendesak untuk mengetahui apakah para pengungsi mendukung kemerdekaan atau integrasi. Para pengungsi berteriak bahwa mereka mendukung integrasi. Masih tetap dengan mengacungkan senjatanya, pemimpin milisi mendesak mereka untuk memberitahukan keberadaan anggota-anggota CNRT, menyebutkan nama dua pemimpin (Leandro Isaac dan Manuel Carrascalão). Saat interogasi sedang berlangsung, datang lagi beberapa orang milisi. Rombongan milisi yang baru, tampaknya BMP dari Liquiçá, memakai baret merah dan seragam tentara yang mirip dengan yang dipakai pasukan Kopassus.[§]

Pada sekitar pukul 13.00, komandan milisi memerintahkan pengungsi untuk mengumpulkan barang-barang mereka dan pergi ke markas Kepolisian Daerah

---

* Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Eurico Guterres et al., Dili, 27 Februari 2003, halaman 14.

† Seorang mantan informan SGI, Francisco Kalbuadi, mengatakan bahwa ia melihat Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin (Asisten Teritorial Kepala Staf Umum TNI) di tempat kejadian, dengan pakaian sipil, sedang mengarahkan operasi dari luar kompleks keuskupan tersebut. Syamsudin menolak tuduhan, dengan menyatakan bahwa pada saat itu ia berada di markas besar TNI di Jakarta. Lihat "Sjafrie Mengaku Berada di Mabes TNI," *Kompas*, 30 Desember 1999.

‡ Kesaksian Manuel Abrantes, halaman 10.

§ Kesaksian Manuel Abrantes, halaman 13.

(Polda) di bagian lain kota. Menurut Manuel Abrantes, komandan milisi mengancam pengungsi, dengan mengatakan bahwa jika mereka tidak pergi ke kantor polisi tersebut, "Kami akan bunuh kalian dan tidak akan bertanggung jawab."* Beberapa dari pengungsi berhasil melarikan diri ke arah pergunungan, tetapi sejumlah besar yang takut kehilangan nyawa, bergerak ke markas Polda yang berjarak tiga kilometer. Setelah satu masa penantian, mereka diangkut ke truk-truk dan dibawa ke Timor Barat untuk bergabung dengan 250.000 orang lain di pengasingan.

Pembantaian di Gereja Suai (6 September 1999)

Kabupaten Covalima merupakan tempat kejadian pelanggaran hak asasi manusia yang luas baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara 1999. Satu insiden terburuk di Kabupaten Covalima, dan yang paling buruk di seluruh Timor-Leste, adalah pembantaian di Gereja Ave Maria di kota Suai pada 6 September 1999.†

Sedikitnya 40 orang, tetapi mungkin juga mencapai 200 orang, dibunuh dalam pembantaian ini.‡ Dari 40 korban tersebut yang sudah diketahui identitasnya sampai akhir tahun 2002 adalah tiga orang pastor Katolik, sepuluh orang korban berusia di bawah 18 tahun, dan lebih daripada selusin orang perempuan. Mereka yang meninggal termasuk di antara 1.500-2.000 orang yang, karena meningkatnya kekerasan dan intimidasi milisi dan pasukan keamanan, mengungsi di gereja lama, di dalam tempat kediaman Pastor di sebelah gereja, dan di dalam gereja baru yang belum selesai dibangun yang berjarak beberapa ratus meter dari gereja lama.

Para pelaku utama pembantaian di gereja Suai dan kekerasan secara umum di Covalima pada 1999 adalah para anggota kelompok milisi utama Kabupaten Covalima, Laksaur, yang dipimpin Olivio Mendonça Moruk. Sebagian pelaku juga merupakan anggota dari kelompok milisi yang bermarkas di Ainaro, Mahidi, yang dipimpin oleh Cancio Lopes de Carvalho. Tetapi milisi tidak beroperasi sendiri. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, mereka dibentuk, dilatih, dipasok, dan dibina oleh perwira-perwira TNI. Mereka juga mendapatkan dukungan keuangan dan politik dari pemerintah sipil, dan dukungan atau persetujuan dari Polri dan Brigade Mobil di kabupaten ini.

* Kesaksian Manuel Abrantes, halaman 12.

† Penjelasan ini dikumpulkan dari berbagai sumber, mancakup: UNMISET, DHRO-Covalima, "Covalima District: 1999 Report"; Laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur (KPP-HAM), Januari 2000; James Dunn, "Crimes Against Humanity in East Timor, January to October 1999 –Their Nature and Causes," Februari 2001; Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Col. Herman Sedyono et al., Dili 7 April 2003; beberapa pernyataan saksi yang direkam dan dikumpulkan oleh para penyelidik PBB di Timor Timur antara 1999 dan 2002; dan liputan media terpilih tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Jakarta.

‡ KPP-HAM memperkirakan 50 orang yang dibunuh, sementara organisasi hak asasi manusia di Timor-Leste, Yayasan HAK memperkirakan antara 50 sampai 200 orang dibunuh. Surat dakwaan yang diajukan untuk kasus ini menyebutkan "antara 27 dan 200 penduduk sipil telah dibunuh selama serangan terjadi." Lihat Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Egidio Manek et al., Dili, 28 Februari 2003, halaman 232.

Para pejabat yang paling bertanggung jawab langsung atas pengendalian milisi di Covalima, dan bertanggung jawab langsung atas pembantaian di gereja Suai, adalah Bupati, Kolonel Herman Sedyono; Dandim, Letnan Kolonel Liliek Koeshadianto (alias Lilik Kushadiyanto), Kepala Kepolisian Resor Covalima, Letnan Kolonel (Pol.) Gatot Subiaktoro, dan Komandan Rayon Militer Suai, Letnan Sugito. Keempat orang tersebut terlihat membawa senjata di tempat kejadian pembantaian dan semuanya diduga ambil bagian di dalam serangan.*

Walaupun tidak dilaporkan berada di tempat kejadian pada saat serangan, dua perwira militer lainnya diduga turut bertanggung jawab atas pembantaian ini karena peran langsung mereka dalam memobilisasi dan mengoordinasi kegiatan milisi di Kabupaten Covalima. Mereka adalah Komandan Distrik Militer sampai akhir Agustus, Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus, dan seorang bintara intelijen TNI, Sersan Yus Nampun.

Pembantaian 6 September didahului ketegangan dan kekerasan selama beberapa bulan di kota Suai, yang sebagian besar terpusat pada para pengungsi dalam negeri di gereja. Para pengungsi pertama kali tiba di gereja itu pada awal 1999, setelah terjadi pembunuhan terhadap beberapa pemimpin CNRT dan serangkaian serangan milisi terhadap desa-desa yang dianggap sebagai basis kelompok prokemerdekaan. Satu kelompok pengungsi yang terdiri atas sekitar 300 orang pergi ke gereja di akhir Juni setelah para pejabat UNAMET memfasilitasi kembalinya mereka ke Suai dari tempat-tempat pengungsian mereka di gunung-gunung. Selama masa ini, milisi, Bupati, dan para pemimpin pro-otonomi lainnya, bersikap bermusuhan terhadap para pengungsi dalam negeri, dan terhadap para pastor dan suster yang memberi mereka tempat berlindung.

Dengan diumumkannya hasil pemungutan suara pada 4 September, milisi dan TNI memulai kekerasan yang segera berpusat pada para pengungsi dalam negeri di gereja. Pada 4 September itu, para anggota milisi Laksaur mulai mengancam, memukuli, dan membunuh penduduk di Desa Debos, di kota Suai, dan kemudian menjarah dan membakar rumah-rumah penduduk. Beberapa penduduk menyelamatkan diri ke wilayah perbukitan, sementara yang lain bergabung dengan ratusan pengungsi yang sudah berlindung di gereja. Sedikitnya tiga orang dibunuh. Pada 5 September, pasukan TNI, termasuk Danramil Suai, Letnan Sugito, bergabung dengan milisi membakar, menjarah, dan menembakkan senjata mereka di wilayah sekitar gereja. Pada hari itu, setidaknya satu orang lagi ditembak mati oleh milisi Laksaur, dan aliran pengungsi terus meningkat.

Dimulai sekitar pukul 08.00 pagi hari berikutnya, 6 September, para komandan milisi Laksaur mengadakan pertemuan dengan sejumlah perwira TNI, pertama di Koramil Salele, yang juga berfungsi sebagai markas milisi di wilayah tersebut, dan kemudian di Kodim di Suai. Setelah pertemuan di Koramil Salele, para anggota

* Lihat Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Col. Herman Sedyono et al., Dili, 7 April 2003, halaman 42. Herman Sedyono mengakui di pengadilan di Jakarta bahwa ia berada di gereja tersebut selama pembantaian, tetapi mengaku bahwa ia berusaha menghentikan kekerasan. Lihat AP, 30 Juli 2002.

milisi Laksaur diberitahu bahwa mereka akan menyerang gereja Suai pada hari itu. Sekitar pukul 10.00, para anggota milisi Laksaur dan Mahidi yang bersenjatakan parang, pedang, dan senjataapi mulai berkumpul di sekitar kompleks gereja, sambil mengancam dan mengejek para pengungsi yang berada di dalam. Menurut para saksi, seorang anggota milisi memasuki kompleks dan berkata kepada salah seorang pastor (Pastor Hilario Madeira) bahwa truk-truk akan segera tiba untuk mengangkut para pengungsi ke Timor Barat. Selanjutnya pada hari yang sama, para prajurit TNI dan unit-unit Brigade Mobil tiba dan mengambil posisi di sekitar gereja.

Sementara itu, komandan-komandan Laksaur dan beberapa anggota milisi telah berkumpul di rumah Bupati, Herman Sedyono. Mereka bersenjatakan senapan, pedang, dan parang. Sekitar pukul 14.30, para anggota milisi meninggalkan rumah bupati dan bergerak menuju gereja. Bupati, yang mengenakan seragam TNI dan bersenjatakan sepucuk senapan, mengikuti mereka ke gereja dengan menggunakan mobil.

Di dalam gereja, kecemasan terus meningkat. Telah ada sejumlah peringatan akan adanya penyerangan terencana. Salah satunya datang dari seorang milisi yang memasuki kompleks pengungsian di pagi hari untuk mencari keponakannya, dan mendesak agar para pengungsi pergi selagi mereka bisa. Peringatan-peringatan lain datang melalui telepon. Ketua DPRD Kabupaten menelepon gereja untuk menawarkan bantuan untuk membawa pengungsi ke tempat yang aman. Akhirnya, sekitar pukul 12 siang, para pastor mulai mendesak para pengungsi untuk mengemasi barang-barang mereka dan bersiap pergi. Ratusan laki-laki muda, yang dianggap kemungkinan dijadikan sasaran serangan, beranjak pergi tetapi sebanyak 1.500 orang, sebagian besar dari mereka, perempuan dan anak-anak, tetap berada di dalam gereja.

Segera setelah pukul 14.30 serangan dimulai. Menurut para saksi, dua buah granat dilemparkan dan kemudian milisi dan TNI mulai menembakkan senjatanya ke dalam kompleks gereja. Serangan berlangsung selama sekitar tiga jam. Para saksimata dan jaksa penuntut mengatakan bahwa sejumlah pejabat tinggi berada di tempat kejadian sepanjang serangan itu dan ambil bagian di dalam serangan. Mereka mencakup: Bupati, Kolonel (Purn.) Herman Sedyono; Dandim, Letnan Kolonel Liliek Koeshadianto; Kepala Kepolisian Resor, Letnan Kolonel (Pol.) Gatot Subiaktoro; dan Danramil Letnan Sugito.[*]

Yang pertama memasuki gereja adalah sejumlah anggota milisi Laksaur dan Mahidi, bersenjatakan parang, pedang, pisau, dan senjataapi rakitan. Di belakang mereka ada kelompok campuran prajurit TNI dan anggota milisi. Menurut para saksi, anggota milisi pertama-tama bergerak menuju ke bangunan tempat tinggal pastor dan tempat tinggal suster, yang bersebelahan dengan gereja lama. Ketika mereka bergerak masuk mereka membacok, menikam, dan menembak sebanyak

* Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Col. Herman Sedyono et al., Dili, 28 Februari 2003, halaman 42. Surat dakwaan ini juga menyebutkan nama 14 orang personel TNI yang ambil bagian dalam pembunuhan di gereja tersebut.

mungkin orang yang ada di jalur gerak mereka. Di luar kompleks gereja, menurut para saksi, unit-unit TNI dan Brigade Mobil berbaris mengepung dalam jarak tertentu dari mana mereka menembak orang-orang yang melarikan diri dari kekacauan di dalam.

Beberapa saksi melaporkan bahwa mereka mendengar ada tiga sampai lima ledakan besar, yang mereka yakini sebagai ledakan granat, pada saat serangan. Seorang saksi, yang bersembunyi di dalam tempat tinggal pastor, mengatakan bahwa sebuah granat dilemparkan ke kamar Pastor Hilario. Ruangan itu lalu diberondong dengan tembakan senapan otomatis.

Di antara orang-orang yang pertama dibunuh terdapat tiga orang pastor, yaitu Pastor Hilario Madeira, Pastor Francisco Soares, keduanya orang Timor-Leste, dan Pastor Tarsisius Dewanto, orang Indonesia. Kejadian pembunuhan mereka yang sebenarnya masih tidak jelas, tetapi pernyataan-pernyataan para saksi menunjukkan bahwa mereka dengan jelas bisa dikenali sebagai pastor pada saat pembunuhan mereka. Bagaimanapun, ketiganya dikenal masyarakat Suai, dan mereka dibunuh di dalam atau di dekat tempat tinggal pastor di gereja lama, sehingga tidak mungkin ada keraguan mengenai identitas mereka.

Para saksi sama mengatakan bahwa Pastor Hilario ditembak dan juga ditikam atau dibacok oleh seorang milisi Laksaur (Egidio Manek) saat ia muncul dari ruangannya di bangunan tempat tinggal pastor. Seorang saksi menyatakan bahwa ia melihat mayat Pastor Hilario tergeletak di lantai ruang duduk di dalam rumahnya. Pastor Francisco juga dikatakan ditikam dan dibacok sampai mati oleh seorang milisi Laksaur (Americo) di dekat tempat tinggalnya. Menurut pernyataan salah seorang saksi, sesaat sebelum dibunuh ia memohon kepada para penyerangnya untuk membebaskan perempuan dan anak-anak. Pastor Dewanto, pastor Indonesia, dilaporkan dibunuh oleh tembakan di dalam atau di dekat gereja lama. Salah seorang saksi mengatakan bahwa ketika Pastor Dewanto akan dibunuh, seorang penyerang berteriak "Jangan bunuh dia! Dia orang kita!" Tetapi peringatan datang terlambat.

Sekitar pukul 17.00 pembunuhan akhirnya berhenti. Sejumlah besar dari mereka yang selamat, beberapa darinya adalah perempuan, dikeluarkan dari kompleks gereja oleh para prajurit TNI dan milisi. Ketika mereka berjalan, mereka diperintahkan untuk tidak melihat sekeliling mereka, tetapi mereka mau tidak mau melihat mayat-mayat bergelimpangan di sekitar kompleks gereja. Seorang saksi mengatakan bahwa darah mengalir seperti arus panjang dari dalam gereja, melintasi kompleks gereja dan mencapai jalan di luar. Dari gereja, orang-orang yang selamat dibawa ke markas Kodim dan ke sebuah sekolah dasar yang ada di dekatnya, di mana mereka diinterogasi. Beberapa dari mereka ditahan di sana selama delapan hari, dan setidaknya seorang perempuan dilaporkan diserang secara seksual oleh seorang milisi ketika berada di dalam penahanan.*

* Laporan ini dibuat oleh ayah korban. Ia mengidentifikasikan anggota milisi tersebut sebagai Alipio.

Pagi-pagi sekali di hari selanjutnya, 7 September, para pemimpin TNI dan milisi mempersiapkan pembuangan mayat dan penghancuran sebanyak mungkin bukti. Menurut salah satu surat dakwaan yang diajukan untuk kasus ini, orang-orang yang secara langsung terlibat dalam usaha pembuangan jasad korban mencakup mantan Dandim, Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus dan Danramil Suai Letnan Sugito.[*] Sedikitnya 27 mayat, dan mungkin lebih banyak lagi, dilemparkan ke atas truk-truk (jenis, warna, dan nomor registrasinya diketahui) dan dibawa ke luar kota, menyeberangi perbatasan ke Timor Barat.

Seorang anggota Polri yang bertugas di Mettamauk, Wemasa, Timor Barat mengatakan kepada para penyelidik bahwa truk-truk yang mengangkut mayat berhenti di pos Polri tempatnya bertugas sekitar pukul 08.30 tanggal 7 September.[†] Saksi ini melihat bahwa Letnan Sugito, Danramil Suai, ada di dalam truk, dan mengatakan kepadanya bahwa yang mati berasal dari gereja di Suai. Saksi lain mengatakan bahwa ia melihat mayat-mayat itu dikuburkan di dekat pantai di Desa Alas Selatan di Kabupaten Belu, Timor Barat sekitar pukul 09.00 tanggal 7 September. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan penguburan dipimpin oleh Letnan Sugito dan mencakup tiga prajurit TNI dan satu peleton milisi Laksaur dari Suai.

Di akhir November 1999, para jaksa penyelidik Indonesia pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh para saksi dan menemukan tiga kuburan massal. Dari kuburan ini mereka mengangkat jenazah dari 27 orang, yang terdiri atas 16 orang laki-laki, delapan orang perempuan, dan tiga lainnya tidak bisa dikenali jenis kelaminnya. Di antara mayat-mayat yang diangkat terdapat mayat seorang anak berusia sekitar lima tahun, seorang pemuda yang kedua belah paha dan tulang pinggulnya hilang, dan seorang perempuan remaja yang telanjang dan tubuhnya telah dibakar.

Selain mayat-mayat yang dikuburkan di Timor Barat, dan mayat-mayat lain yang diduga dilemparkan ke laut, sejumlah besar mayat yang belum diketahui jumlahnya dilaporkan dikumpulkan menjadi satu di gereja Suai dan dibakar sampai tak dapat dikenali lagi. Para penyelidik yang mengunjungi tempat itu pada akhir tahun 1999 menemukan apa yang tampak seperti tulang dan tengkorak manusia yang hangus. Berdasarkan informasi ini, dan pernyataan-pernyataan yang dikumpulkan dari keluarga-keluarga dan pejabat-pejabat setempat, pada akhir 2002 para penyelidik hak asasi manusia PBB berhasil mengidentifikasikan 40 orang yang telah meninggal di dalam pembantaian tersebut. Tetapi, perkiraan yang bisa dipercaya tentang jumlah yang meninggal berkisar sebanyak 200 orang.

---

* Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Egidio Manek et al., Dili, 7 April 2003, halaman 42.

† Perwira itu diidentifikasikan sebagai Sersan Mayor (Pol.) Kanakadja, Kapolsek Mettamauk, Wemasa.

Pembantaian di Kantor Polisi Maliana (8 September 1999)

Di Kabupaten Bobonaro terjadi sejumlah pembunuhan massal pada September 1999. Sifat sistematis dari pembunuhan ini, kehadiran para perwira TNI dan Polri di tempat kejadian, serta usaha sengaja untuk melenyapkan mayat korban, semuanya merupakan bukti sangat kuat bahwa pembunuhan sudah direncanakan dan diorganisasikan oleh pihak berwenang Indonesia.

Pembunuhan massal yang paling terkenal dan yang paling mengungkapkan pertanggungjawaban pemerintah adalah serangan terhadap para pengungsi di Kepolisian Resor (Polres) di kota Maliana pada 8 September. Para korban adalah sebagian dari sekian ratus penduduk Maliana yang mencari tempat berlindung di kantor Polres ketika kota itu diguncang kekerasan setelah pemungutan suara 30 Agustus. Sebanyak 14 orang, beberapa di antaranya anak-anak, dibunuh dalam serangan tersebut.[*] Selain itu, setidaknya 13 orang yang melarikan diri dari tempat kejadian dibunuh pada hari selanjutnya di dekat Mulau, dan dua orang lainnya dibunuh di atau dekat kantor Polres pada 10 September. Seluruhnya sekitar 71 orang dibunuh di Kecamatan Maliana saja dalam periode 2-29 September.

Kesaksian para saksi menegaskan bahwa pembantaian di kantor Polres Maliana dilakukan bersama oleh para prajurit TNI dari Kodim 1636 dan para anggota milisi DMP, di bawah pengawasan perwira-perwira TNI dan SGI.[†] Para saksi juga mengatakan bahwa pasukan Polri dan Brimob tidak bertindak apapun untuk mencegah serangan, menghentikannya ketika serangan sedang berlangsung, atau menangkap para pelaku ketika pembantaian sudah selesai.

Para perwira TNI yang secara langsung terlibat di dalam serangan antara lain: mantan Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian, dan Kepala Seksi Intelijen Kodim Letnan Sutrisno. Letnan Kolonel Siagian rupanya sudah dilepaskan dari jabatannya pada pertengahan Agustus karena banyaknya bukti bahwa ia memberikan dukungan pada kekerasan milisi. Namun dalam kenyataannya, ia tidak pernah meninggalkan Maliana sepanjang minggu-minggu setelah pemindahannya. Walaupun ia mengenakan pakaian sipil sebagai ganti seragam TNI, ia terus bertindak dalam posisi komando selama periode tersebut. Dalam hari-hari menjelang pembantaian ia berulang kali terlihat berada di kantor Polres, di mana ia ambil bagian dalam pertemuan-pertemuan dengan Kepala Polres dan pemimpin milisi João Tavares.

Pembantaian di kantor Polres didahului dengan beberapa hari meningkatnya kekerasan di dalam kota Maliana, dan dalam kejadian kekerasan tersebut beberapa orang dieksekusi, banyak yang diserang dan diancam, dan sekitar 80% dari semua bangunan

---

* Perkiraan yang lebih besar yang diumumkan dalam minggu-minggu dan bulan-bulan setelah pembantaian tampaknya menggambarkan jumlah orang yang dibunuh di wilayah tersebut pada sekitar waktu pembantaian, hanya beberapa dari mereka yang benar-benar dibunuh di kantor Polres.

† Ada tuduhan yang belum dikonfirmasikan bahwa unsur-unsur dari Batalion Lintas Udara 700 Kostrad, yang dilaporkan ditempatkan di Maliana pada awal tahun 1999, juga terlibat.

yang dibakar atau dihancurkan. Para penduduk yang tidak bisa melarikan diri ke bukit-bukit mulai berkumpul di kantor Polres segera setelah pemungutan suara.

Salah seorang yang mengungsi dengan keluarganya adalah seorang mantan anggota Polri. Ia kemudian memberitahu para penyelidik bagaimana milisi bersenjata dan prajurit TNI datang ke desanya, Lahomea, menyebarkan pesan teror:

> *"Mereka semua mengepung desa dan mereka mengumumkan dalam bahasa Indonesia dan Tetum: 'Karena kalian semua adalah pendukung kemerdekaan kami harus membunuh kalian semua.' Kami takut bahwa mereka akan kembali dan melakukan apa yang mereka umumkan, maka saya dan keluarga saya bersama dengan kerabat kami mulai mengemas barang-barang kami dan pindah ke markas Polri di mana kami yakin kami akan mendapatkan perlindungan."*[*]

Untuk sementara waktu, para pengungsi tampak aman di kantor Polres, namun ada tanda-tanda ancaman bahaya. Mulai dari 3 September, banyak anggota milisi dan prajurit TNI terlihat bergerak bebas keluar masuk kompleks kantor Polres, dan berkeliaran di antara para pengungsi.[†] Lebih jauh lagi, antara 3 dan 7 September, beberapa rapat berlangsung di kantor Polres yang dihadiri mantan Dandim, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian; Kapolres, Mayor Budi Susilo; dan pemimpin pro-otonomi João Tavares dan Natalino Monteiro.

Di pagi hari 7 September, kelompok ini mengadakan rapat terakhir di kantor Polres.[‡] Setelah rapat diakhiri, Kapolres dan wakilnya memberitahu para pengungsi bahwa mereka harus pindah ke satu tempat di belakang kompleks kepolisian, sepertinya untuk memberi ruang kepada para petugas Polri dan keluarga mereka.[§] Pihak penuntut menuduh bahwa instruksi ini merupakan satu tipuan yang dilakukan oleh para pejabat tersebut untuk mengonsentrasikan para pengungsi di satu tempat sebelum sebuah serangan terjadi, dan di tempat mereka dikelompokkan itulah para pengungsi terjebak dan dibunuh ketika serangan dimulai pada keesokan harinya.

Beberapa jam sebelum serangan, pada 8 September, puluhan milisi berkumpul di Koramil. Di sana mereka dibagi ke dalam empat kelompok dan mendapatkan petunjuk singkat tentang misi mereka dari para perwira TNI dan SGI. Dua kelompok ditugaskan membentuk pagar pengamanan di sekeliling kantor Polres. Dua kelompok lainnya ditugaskan mencari dan membunuh pemimpin-pemimpin prokemerdekaan yang berlindung di kompleks kantor Polres. Sebelum berangkat ke kantor Polres, wajah beberapa orang milisi dicat hitam oleh para prajurit SGI.

---

* Kesaksian tertulis oleh Manuel Gomes da Silva kepada UNAMET, 27 Oktober 1999.

† Seorang saksi memberikan daftar nama 38 orang milisi dan prajurit yang ia lihat berada di dalam kompleks tersebut selama periode ini. Dari 38 nama yang ada dalam daftar, 12 orang diidentifikasikan sebagai prajurit TNI. Kesaksian Luis Cairo dalam satu kesaksian tertulis bersama mengenai pembunuhan terhadap Manuel Barros, 17 Maret 2000.

‡ Kesaksian tertulis bersama oleh Vicente dos Santos, Victor dos Reis, dan Luis Cairo, 17 Maret 2000.

§ Kesaksian tertulis bersama oleh Vicente dos Santos, Victor dos Reis, dan Luis Cairo, 17 Maret 2000.

Serangan dimulai pada sekitar pukul 17.30. Dua buah truk berhenti di depan kantor Polres dan tiga truk lainnya berhenti di sebatang jalan yang memanjang di sisi kompleks ini.* Kendaraan-kendaraan ini dipenuhi dengan prajurit dan milisi, yang bersenjatakan parang, pisau, dan pedang. Banyak dari milisi berpakaian hitam dan mengenakan kedok "Ninja" atau bendera Indonesia untuk menutupi muka mereka. Para prajurit TNI, sebagian besar dari mereka mengenakan celana tempur dan kaus oblong hitam, membawa senapan otomatis dan pistol. Ketika kendaraan-kendaraan tersebut berhenti, para prajurit dan milisi melompat turun dan mengambil posisi di dalam dan di sekitar kompleks. Beberapa prajurit TNI menutup jalan utama di sepanjang depan kantor Polres, sementara yang lain membentuk pagar mengelilingi kompleks kantor.

Sementara itu banyak milisi dan prajurit TNI memasuki kompleks dari pintu masuk di samping dan berlari memasuki tempat para pengungsi berkumpul. Seorang saksi menggambarkan saat awal penyerangan:

> *"Saya melihat milisi berlarian ke segala arah, mengejar laki-laki dan anak laki-laki untuk membunuh mereka … Para pengungsi berteriak ketakutan tetapi mereka tidak dapat melarikan diri karena milisi dan TNI semuanya mengurung tempat itu."*†

Dalam keadaan panik, banyak pengungsi yang lari ke pos keamanan di pintu gerbang depan kompleks, tetapi para prajurit Brimob di sana menyuruh mereka untuk kembali ke tenda mereka. Tidak semuanya melakukannya, tetapi mereka yang melakukannya kemudian menyaksikan serangan dimulai.

Di antara korban pertama adalah seorang anak laki-laki berusia 13 tahun, José Barros Soares, yang dibacok hingga mati oleh milisi sementara adik perempuannya melihat peristiwa itu.‡ Namun kekerasan tidaklah seacak seperti yang tampak di tempat kejadian. Para penyerang jelas memilih tokoh-tokoh prokemerdekaan terkenal untuk dibunuh. Korban pembunuhan meliputi sejumlah pemimpin CNRT, serta seorang camat, dua orang kepala desa, dan beberapa pegawai negeri simpatisan prokemerdekaan.§

* Penjelasan berikut tentang serangan ini diambil dari kesaksian beberapa saksi mata, meliputi: saksi "FB-1" diwawancarai oleh UNAMET, 29 Oktober 1999; saksi "FG-1" diwawancarai oleh UNTAET, 12 November 1999; Manuel Gomes da Silva yang memberikan kesaksian kepada UNAMET, 27 Oktober 1999; dan kesaksian tertulis bersama oleh Vicente dos Santos, Victor dos Reis, dan Luis Cairo, 17 Maret 2000.

† Wawancara UNTAET dengan saksi "FG-1," 12 November 1999.

‡ Seorang wartawan barat melaporkan pada tahun 2001 bahwa sejumlah anak lain—Renato Gonçalves (12), Victorino Lopes (11), dan Francisco Barreto (10)— telah dibunuh di dalam pembantaian di kantor polisi itu. Lihat Mark Dodd, "Widows who share a legacy of murder," *Suara Timor Lorosae*, 10 Agustus 2001. Laporan ini tampaknya salah. Beberapa anak dibunuh di Maliana bersama dengan ayah mereka, pada pagi hari 8 September, tetapi mereka tidak dibunuh di kantor Polres.

§ Orang-orang yang dilaporkan dibunuh di kantor Polres mencakup: Lourenço Gomes, tokoh klandestin tingkat tinggi; Manuel Barros, tokoh pro-kemerdekaan terkenal; Julio Barros, Camat Maliana; Domingos Pereira, Kepala Desa Ritabou; dan Damião, mantan Kepala Desa Tapo.

Milisi juga menyasar keluarga tokoh-tokoh prokemerdekaan. Menurut sebuah laporan, misalnya, milisi yang membunuh José Barros Soares, berkata kepada saudara perempuannya bahwa mereka membunuhnya karena mereka tidak dapat menemukan ayahnya, seorang tokoh prokemerdekaan yang terkenal. Yang juga dipilih untuk dibunuh adalah anggota-anggota TNI dan Polri yang dianggap menjadi simpatisan prokemerdekaan.*

Dalam beberapa kejadian, para penyerang menanyakan korban yang dimaksudkan dengan menyebutkan nama mereka. Dalam kasus yang lain, mereka tampak telah mengetahui dengan tepat tempat korban berada di tempat pengungsian. Seorang saksi mengatakan bahwa para penyerang memiliki daftar nama yang menjadi rujukan mereka saat mereka memasuki kompleks pengungsian.

> *"Saya sedang memasak dan tiba-tiba milisi datang dengan mobil-mobil, dan orang-orang mulai berlarian ke sana-kemari. Lalu ketika orang-orang mulai tenang para milisi dibagi ke dalam beberapa kelompok dan mereka memasuki tenda-tenda mencari orang-orang yang [namanya] ada di dalam daftar untuk dibunuh."*†

Di antara mereka yang dijadikan sasaran dengan cara seperti ini adalah tokoh prokemerdekaan yang terkenal dari Maliana, Manuel Barros, yang mengungsi di kantor Polres bersama dengan keluarganya pada 2 September. Sedikitnya empat orang menyaksikan pembunuhan terhadap dirinya, termasuk seorang laki-laki yang berada hanya beberapa meter jauhnya ketika pembunuhan itu terjadi.

Menurut kesaksian dari laki-laki tersebut, segera setelah serangan terhadap kompleks pengungsi dimulai, tiga orang milisi berjalan langsung menuju Manuel Barros dan mulai berbicara kepadanya dengan sikap agresif. Pertama mereka memerintahkannya untuk berdiri, kemudian duduk, dan lalu merentangkan tangannya. Ketika ia merentangkan tangannya, satu dari tiga orang milisi menerjang ke depan dan menikam dirinya di dada dengan pisau. Manuel Barros segera jatuh ke tanah dan meninggal seketika. Tubuhnya kemudian diseret keluar oleh tiga orang milisi.‡

Banyak saksi yang mengatakan bahwa mereka melihat Kapolres, Mayor Budi Susilo, di dalam kompleks ketika pembunuhan terjadi, dan beberapa saksi mengungkapkan bahwa mereka melihat Kepala Seksi Intelijen Kodim, Letnan Sutrisno, mengendarai sepeda motor dekat Koramil pada malam tanggal 8 September. Setidaknya satu orang saksi mengatakan melihat Letnan Kolonel Siagian maupun Letnan Sutrisno di sekitar kantor Polres: "Ketika saya berjalan keluar kompleks," saksi ini mengatakan

---

* Mereka meliputi Domingos P.Gonçalves, seorang prajurit TNI dan Filomeno Guterres, seorang polisi, yang dibunuh di atau dekat kantor polisi pada tanggal 10 September 1999. Wawancara UNTAET dengan saksi "FG-1," 12 November 1999.

† Wawancara dengan Teresinha de Jesus Calao oleh Jill Jolliffe, 16 November 1999.

‡ Kesaksian Victor dos Reis, dalam kesaksian tertulis bersama, 17 Maret 2000. Lihat juga wawancara dengan Duarte Barros, oleh Jill Jolliffe, 11 November 1999.

kepada seorang wartawan, "saya melihat Komandan Kodim [Siagian] di sana, dengan Kepala Seksi Intel, Letnan Sutrisno. Mereka menunggu sesuatu di dekat mobil Kijang.[*]

Serangan berlanjut sampai sekitar pukul 21.00, dan pelenyapan mayat dengan segera dimulai. Seperti dalam kasus-kasus pembunuhan massal lainnya pada 1999, proses pelenyapan dilakukan secara metodis dan di bawah pengarahan perwira-perwira TNI, yang merupakan petunjuk bahwa proses itu telah direncanakan sebelumnya oleh pihak berwenang. Hal ini jelas dilakukan untuk menyembunyikan bukti telah terjadinya suatu kejahatan.

Listrik di wilayah itu diputus dan mayat-mayat diangkut ke atas dua truk atau lebih di dalam selubung kegelapan. Menurut seorang laki-laki yang diperintahkan membantu mengangkut mayat-mayat itu ke atas truk, seorang perwira TNI melacak identitas dan jumlah orang yang meninggal.[†] Truk-truk kemudian dikendarai keluar kota ke Batugade, satu basis kelompok pro-otonomi dekat perbatasan dengan Indonesia. TNI telah membuat persiapan dengan pemimpin milisi setempat, Ruben Tavares (keponakan João Tavares) dan Ruben Gonçalves, untuk menerima mayat-mayat tersebut dan melenyapkannya. Menurut para jaksa penuntut, anggota milisi mengisi karung-karung beras besar dengan pasir dan mengikatkannya pada mayat-mayat tersebut. Dengan dibebani karung-karung pasir, mayat-mayat kemudian dibawa ke tengah laut dengan perahu-perahu nelayan dan dilemparkan keluar.

Sifat sistematis dan terencana dari kejahatan di kantor Polres Maliana juga diperjelas dengan pembunuhan-pembunuhan selanjutnya yang cirinya sama, seperti yang terjadi dua hari sesudahnya. Setidaknya 13 orang yang berusaha menyelamatkan diri dari serangan di kantor Polres tersebut diburu, ditangkap, dan dibunuh dengan pisau dan parang pada 9 September di Danau Mulau di luar kota Maliana. Sehari kemudian, pada 10 September, dua orang Timor-Leste anggota Polri dibunuh dengan cara yang sama, karena dicurigai berpihak pada kelompok prokemerdekaan.[‡]

Seperti para korban di kantor Polres Maliana, orang-orang yang dibunuh pada 9 dan 10 September adalah para pemimpin terkemuka prokemerdekaan dan orang-orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan.[§] Dan seperti mereka, mayat orang-orang yang dibunuh pada 9 dan 10 September dilenyapkan dalam usaha

* Wawancara dengan Duarte Barros, oleh Jill Jolliffe, 11 November 1999. Saksi lain mengatakan bahwa dirinya melihat mantan Dandim, Letnan Kolonel Siagian, dan Perwira Seksi Intelijen Kodim, Letnan Sutrisno, berada di dalam kompleks Polres pada saat pembunuhan. Wawancara dengan Teresinha de Jesus Calao, oleh Jill Jolliffe, 16 November 1999.

† Wawancara dengan saksi "FB-1" oleh UNAMET, 29 Oktober 1999.

‡ Dua orang polisi yang dibunuh adalah Filomeno Guterres dan Martino Lopes Amaral. Mayat mereka ditemukan di dalam satu sumur yang dalam di dalam kantor Polres Maliana, dan diangkat oleh INTERFET pada 11 November 1999.

§ Mereka yang dibunuh di Mulau pada 9 September mencakup: Carlos Maia, Lamberto Benevides, Manuel Magalhães de Oliveira, Paulo da Silva, Lucas da Costa, Agostino Marques, Albino Marques, Domingos Titi Mau, dan Vicente Lobato.

menyembunyikan kejahatan. Sisa-sisa tubuh dari dua orang yang dibunuh di Mulau kemudian ditemukan di pantai Batugade, sekitar 50 kilometer dari tempat kejadian pembunuhan mereka.*

Karena usaha yang terencana dengan baik untuk menghilangkan mayat korban, jumlah orang yang dibunuh di kantor Polres Maliana pada 8 September, dan selama dua hari sesudahnya, sangat sulit ditentukan. Menurut para jaksa penuntut, setidaknya 14 orang dibunuh di kantor Polres pada 8 September. Bersama dengan 13 orang yang dibunuh di Mulau pada 9 September, dan dua lainnya yang dibunuh pada 10 September, jumlah orang yang meninggal dalam dua hari tersebut sekitar 29 orang. Untuk Kabupaten Bobonaro secara keseluruhan, jumlah orang yang dibunuh dalam September 1999 sekitar 111 orang, dan beberapa perkiraan menyebutkan jumlahnya mencapai 200 orang. Namun, dengan kuatnya kemungkinan bahwa sebanyak 40 mayat dilemparkan ke laut, jumlah pasti mereka yang meninggal, atau tempat peristirahatan terakhir mereka, tampaknya tidak akan pernah diketahui.

Pembantaian di kantor Polres Maliana ini penting bukan saja karena jumlah orang yang meninggal di sana, tetapi karena pembantaian itu dengan jelas memperlihatkan hubungan operasional yang erat antara milisi, TNI, dan Polri. Karenanya, hal itu juga menunjukkan dengan jelas pertanggungjawaban pihak yang berwenang atas pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia yang termasuk kategori kejahatan terhadap umat manusia.

Pembantaian di Passabe dan Maquelab (September-Oktober 1999)

Dibandingkan dengan beberapa kabupaten yang lain, Kabupaten Oecussi bukanlah pusat utama kegiatan militer atau milisi di sebagian besar tahun 1999. Keadaan berubah secara dramatis di masa sesudah pemungutan suara, khususnya setelah kepergian personel UNAMET dan pengamat internasional lainnya di awal September 1999. Selama beberapa minggu kemudian lebih daripada 150 penduduk sipil dibunuh, beberapa dengan cara yang sangat mengerikan, dan menghasilkan jumlah yang meninggal di Kabupaten Oecussi pada 1999 setidaknya 170 orang.†

Kekerasan terburuk di Kabupaten Oecussi, dan mungkin di seluruh Timor-Leste, terjadi di Desa Passabe dan Maquelab. Di sana, sekitar 100 orang dengan sengaja dibunuh dalam apa yang dikenal sebagai pembantaian Passabe dan Maquelab. Delapan puluh dua korban adalah penduduk dari empat desa di Kecamatan Oesilo, yang terletak di bagian tenggara Oecussi; mereka dibunuh secara bersama-sama di dekat Passabe pada 8-10 September. Setidaknya 12 orang lagi sengaja dibunuh di

* Dua yang ditemukan di Batugade adalah Carlos Maia dan Lamberto Benevides. Memo dari UNTAET District Human Rights Officer, Bobonaro, kepada Serious Crimes Unit, 3 Oktober 2000.

† Kecuali jika disebutkan lain, uraian ini didasarkan pada laporan UNTAET, DHRO-Oecussi, “Report on Human Rights Violations During 1999: Oecussi District,” November 2001; dan UNTAET, General Prosecutor, Indictment of Simão Lopes et al., Dili, September 2001.

Desa Maquelab, di pantai utara pada 20 Oktober, hanya dua hari sebelum pasukan INTERFET tiba di Kabupaten Oecussi. Hampir semua desa yang dijadikan sasaran diketahui sebagai basis kuat prokemerdekaan, dan para korban sebagian besar adalah pemimpin atau pendukung kemerdekaan.

Rangkaian kejadian yang dikenal sebagai pembantaian Passabe dimulai pada awal pagi tanggal 8 September. Sekitar pukul 6 pagi kurang lebih 200 anggota milisi Sakunar, yang disertai prajurit-prajurit Batalion 745 TNI, menyerang Desa Tumin, Quebesilo, Nonquican, dan Nibin, di Kecamatan Oesilo, dekat perbatasan dengan Indonesia. Serangan dilancarkan secara serentak dari tiga arah yang berbeda, yang menunjukkan adanya tindakan koordinasi dan perencanaan.

Serangan memang didahului dengan sejumlah pertemuan antara para pemimpin milisi Sakunar dan perwira TNI. Dalam satu pertemuan tanggal 7 September, yang diadakan di pos TNI di Padimau dan dihadiri sekitar 30 orang, Komandan Sakunar Simão Lopes menyusun rencana untuk menyerang desa-desa. Pertemuan kedua terjadi di pagi hari selanjutnya, 8 September, di rumah Kepala Desa Passabe (dan pemimpin milisi Sakunar), Gabriel Colo. Pada pertemuan tersebut, desa-desa tertentu diidentifikasi sebagai sasaran. Setelah itu para milisi berangkat dengan berjalan kaki disertai dengan setidaknya empat prajurit TNI.

Bukti lebih jauh tentang adanya perencanaan, dan peran TNI dalam koordinasi, terdapat dalam fakta bahwa sebagian penduduk desa-desa yang dijadikan sasaran telah mendapatkan peringatan lebih dahulu dari kerabat-kerabat yang tinggal di kota perbatasan Imbate di wilayah Indonesia tentang akan adanya serangan. Rupanya, milisi dan TNI telah menetapkan sebuah basis operasional di Imbate, yang dimaksudkan berfungsi sebagai satu tempat berkumpul setelah serangan awal tanggal 8 September.

Banyak penduduk yang memperhatikan peringatan dini itu lalu menyelamatkan diri ke gunung-gunung sebelum serangan terjadi. Mereka yang tetap tinggal menjadi sasaran serangan terencana oleh para milisi dan tentara yang bersenjatakan senjataapi otomatis dan rakitan, serta parang, pisau, dan tombak. Sedikitnya 18 orang dibunuh dalam serangan awal ini dan lima lainnya menderita luka parah.* Sejumlah rumah dijarah dan dibakar.

Setelah pembunuhan, mereka yang selamat dari desa-desa yang dijadikan sasaran dikumpulkan oleh milisi Sakunar dan dipaksa menyeberang perbatasan ke kota Imbate di wilayah Indonesia. Di Imbate mereka diharuskan melalui sebuah proses penyaringan dan pemilihan yang lagi-lagi menunjukkan sebuah tindakan dengan perencanaan sebelumnya, dan dengan maksud yang jelas untuk menyasar kelompok tertentu dalam penduduk. Selama dua hari, pada 8 dan 9 September, semua yang dibawa ke Imbate didaftarkan di kantor kecamatan dan dibagi menjadi beberapa kelompok menurut umur, tingkat pendidikan, dan asal desa.

* Untuk nama-nama orang yang diketahui telah dibunuh, lihat UNTAET, General Prosecutor, Indictment of Simão Lopes et al.

Petang tanggal 9 September, satu kelompok yang terdiri atas 80 orang pemuda dengan pendidikan di atas rata-rata, dari Desa Quebesilo dan Tumin, dipisahkan dari yang lain. Sekitar pukul 18.00 mereka diikat secara berpasangan, dengan tangan-tangan mereka terikat di balik punggung masing-masing. Dikelilingi oleh sejumlah besar milisi dan perwira TNI Letnan Kolonel Sabraka dan bintara Sersan Andre Ulan, serta anggota Polri Gabriel Colo, mereka dipaksa berbaris keluar kota Imbate. Dengan TNI, Polri, dan anggota milisi yang mengancam dan memukuli mereka, mereka berjalan di sepanjang perbatasan menuju desa Sungkaen, di mana mereka menyeberangi sungai masuk ke Timor-Leste, dan kemudian turun sepanjang tepian sungai menuju Desa Passabe.

Tidak jauh dari Passabe, di sebuah tempat yang disebut Nifu Panef, para tahanan diperintahkan berhenti dan berbaris di sepanjang tepi sungai. Jarak dari kepala ke ekor barisan sekitar beberapa ratus meter. Di sanalah, sekitar pukul 1 dini hari, pada 10 September, sebuah isyarat diberikan, lalu para milisi dan prajurit TNI mulai membacok para pemuda itu hingga mati dengan parang dan pedang. Beberapa penyerang juga menggunakan senjataapi.

Sekitar pukul 6 pagi, keesokan harinya, masih tanggal 10 September, sekitar 100 lelaki dari Desa Passabe disuruh oleh para milisi untuk mengumpulkan alat-alat yang cocok untuk kerja perbaikan jalan. Mereka kemudian dibawa ke tempat pembunuhan dan diperintahkan menguburkan mayat-mayat di tempat mereka dirobohkan. Para penduduk desa diberitahu bahwa mereka akan dibunuh jika mereka memberikan keterangan tentang apa yang sudah mereka lihat.

Bukti tentang serangan ini kemudian dikumpulkan dari tujuh orang yang berhasil menyelamatkan diri dan lari menuju semak-semak. Sebagian besar dari mereka mengalami luka yang mengancam nyawa akibat parang dan pisau dan beberapa mengalami luka tembak yang parah. Foto-foto yang diambil para penyelidik beberapa bulan setelah kejadian menggambarkan betapa parahnya luka-luka tersebut. Para penyelidik memeriksa tempat pembantaian pada 2000, dan menemukan setidaknya sisa tubuh 47 manusia. Sembilan di antaranya tidak memiliki tengkorak, yang menunjukkan bahwa korban kemungkinan dipenggal oleh para penyerangnya. Para penyelidik juga menemukan bahan pengikat ada bersama sisa-sisa tubuh tersebut, yang membenarkan kesaksian dari orang-orang yang selamat bahwa mereka diikat oleh para penangkap.

Pembunuhan terjadi di tengah malam dan tempat kejadian diterangi hanya dengan sedikit lampu minyak tanah, sehingga orang-orang yang selamat kesulitan mengidentifikasi semua orang yang terlibat dalam pembunuhan. Namun, perancang dan pelaku penting dari pembantaian tersebut yang diketahui meliputi: Danramil Passabe, Letnan Anton Sabraka; Babinsa (bintara TNI) desa Passabe, Sersan Andre Ulan; anggota Polri dan Kepala Desa Passabe, Gabriel Colo; dan Kepala Desa Cunha, Laurentino Soares (alias Moko).

Pembantaian kedua di periode sesudah pemungutan suara di Oecussi terjadi di wilayah sekitar Maquelab pada 20 Oktober 1999. Sekali lagi, pelaku-pelaku utama

adalah anggota milisi Sakunar, dan para korban adalah orang-orang yang dicurigai maupun yang diketahui sebagai pendukung kemerdekaan. Dua orang pegawai lokal UNAMET juga termasuk di antara mereka yang meninggal.

Sebelum pembantaian ini terjadi, penduduk Maquelab sebagian besar terhindar dari operasi teror. Nasib baik mereka sebagian besar ditentukan oleh usaha-usaha dari mantan kepala desa mereka yang, walaupun sudah digantikan oleh tokoh pro-otonomi, berhasil meyakinkan kelompok milisi lokal untuk tidak menggunakan kekerasan. Namun pembantaian tanggal 20 Oktober sudah berada di luar kemampuannya untuk mengendalikan. Para anggota milisi yang terlibat bukanlah orang-orang setempat, tetapi bagian dari satu kelompok besar yang bergerak ke mana-mana dan terlibat dalam operasi pembersihan yang sistematis. Pada hari mereka mencapai Maquelab, kelompok milisi telah membunuh dua orang di Desa Bokos dan satu lagi di Sai Laut.

Kesulitan di Maquelab dimulai menjelang siang hari 20 Oktober, ketika milisi bersenjata dengan mengendarai delapan truk tiba di wilayah tersebut dan mulai mencari orang-orang yang telah lari ke gunung-gunung. Setelah menemukan sebuah kelompok besar, milisi menyatakan bahwa mereka datang untuk membawa mereka kembali ke desa supaya mereka kemudian bisa pergi dengan aman ke Timor Barat. Para anggota milisi lalu mengumpulkan sekitar 300 orang dan menggiring mereka kembali ke desa dalam barisan. Dalam perjalanan beberapa dari lelaki yang diringkus dipukuli. Sekitar pukul 14.00 dua pemimpin CNRT ditarik keluar dari kelompok dan dibawa ke belakang pasar Maquelab lalu dibunuh di sana.

Sekitar 30 menit kemudian, Wakil Komandan Sakunar, Laurentino Soares (alias Moko), tiba di tempat kejadian dan memerintahkan kelompok penduduk desa itu untuk duduk. Ia kemudian memilih empat orang laki-laki dan memerintahkan mereka berdiri. Saat penduduk yang lainnya melihat dengan ketakutan, Laurentino Soares mengangkat senjatanya dan menembak keempat laki-laki tersebut. Para korban adalah: kepala keamanan CNRT dan staf lokal UNAMET, Francisco Taek; anggota staf lokal UNAMET yang lain, Paulos Kelo; seorang mahasiswa prokemerdekaan, Mateus Ton; dan seorang pemimpin CNRT, Augustinho Sufa.

Segera setelah eksekusi ini, dan tampaknya berdasarkan komando, milisi Sakunar mulai membakar semua rumah dan bangunan di Maquelab, tanpa kecuali. Sepanjang siang dan sore hari mereka juga membunuh enam orang lain, dan mungkin tujuh orang, penduduk desa, sebelum pergi ke Timor Barat. Pasukan INTERFET tiba di Kabupaten Oecussi dua hari kemudian.

Pemerkosaan dan pembunuhan Ana Lemos (13 September 1999)

Korban pelanggaran hak asasi manusia di tahun 1999 mencakup perempuan dewasa dan remaja. Seperti laki-laki, mereka dijadikan sasaran karena keanggotaan mereka di dalam organisasi-organisasi prokemerdekaan. Mereka juga dijadikan sasaran karena kegiatan politik dari suami atau saudara laki-laki mereka. Ini adalah praktik

yang sudah lama dilakukan pasukan keamanan Indonesia sebelum kejadian pada 1999. Kaum perempuan dewasa dan remaja dijadikan sasaran kekerasan yang sama jenisnya dengan yang dialami kaum laki-laki, yang mencakup pemukulan, penyiksaan, pembunuhan, dan pemindahan paksa. Namun selain itu, mereka mengalami kejahatan yang berkaitan dengan seksualitas, seperti serangan seksual dan perkosaan, dalam jumlah yang tidak proporsional.

Nasib banyak kaum perempuan Timor-Leste pada 1999 digambarkan melalui pengalaman Ana Xavier da Conceição Lemos, seorang aktivis prokemerdekaan dan ibu tiga anak dari Kabupaten Ermera. Ia dipukuli, diperkosa, dan dibunuh oleh para anggota milisi dan prajurit TNI di awal September 1999.*

Ana Lemos adalah seorang anggota ternama dari OMT, satu organisasi perempuan prokemerdekaan yang terkemuka. Begitu ada kesempatan pada 1999, ia berkampanye secara aktif untuk kemerdekaan, secara terbuka mengkritik kekuasaan Indonesia dalam pertemuan-pertemuan politik. Dua saudara laki-lakinya juga terlibat dalam organisasi prokemerdekaan, satu orang di CNRT dan yang lainnya sebagai anggota Falintil.

Sebagai akibat dari kegiatan dan hubungan dengan kelompok prokemerdekaan ini, Ana Lemos menjadi sasaran ancaman yang berulang-ulang dan kekerasan fisik dari milisi pro-Indonesia. Misalnya, pada April 1999, rumahnya dikepung dan jendelanya dipecahkan oleh para anggota milisi Darah Integrasi, yang juga mencuri uang sejumlah Rp400.000,00 dari rumahnya. Ancaman agak mereda dengan kehadiran pejabat UNAMET di Kabupaten Ermera pada Juni, tetapi milisi tidak pernah berhenti bergerak sepenuhnya. Kenyataannya, selama masa itu, Ana Lemos melaporkan kepada para pejabat UNAMET bahwa ia takut akan keselamatan nyawanya. Ketakutannya terbukti benar.

Di hari pemungutan suara, Ana Lemos bekerja sebagai pengawas antrean di tempat pemungutan suara di Poetete, di Kecamatan Ermera. Pada saat penutupan pemungutan suara, milisi setempat mengancam menyerang, sehingga sebagian besar orang CNRT memutuskan pergi ke tempat kantonisasi Falintil di gunung-gunung yang berdekatan. Sebaliknya Ana Lemos justru kembali ke Gleno ke tempat anak-anaknya. Dengan bantuan seorang anggota Brigade Mobil Polri yang bersimpati, ia menuju ke sana bersama dengan dua orang mahasiswa, kembali ke rumahnya di Gleno sekitar pukul 20.00 tanggal 30 Agustus.

Beberapa saat sekitar tengah malam seorang anggota TNI yang ia kenal, Sersan Melky, datang ke rumahnya bersama dengan beberapa orang laki-laki lain yang diduga anggota milisi. Dua tembakan dilepaskan sehingga jendela dan lampu-lampu di rumahnya hancur. Ana dan kedua mahasiswa awalnya bersembunyi di

* Kecuali jika disebutkan lain, uraian ini didasarkan pada sumber-sumber berikut ini: UNTAET, DHRO-Ermera, "Report on Human Rights Violations During 1999: Ermera District" [Maret 2000]; dan Helene van Klinken, "Taking the Risk, Paying the Price: East Timorese Vote in Ermera," dalam Tanter, Selden and Shalom (penyunting), *Bitter Flowers, Sweet flowers: East Timor, Indonesia, and the World Community*. Rowman & Littlefield, 2001, halaman 91-107. Helene van Klinken adalah Pejabat Urusan Politik UNAMET yang ditugaskan di Ermera pada 1999.

bawah tempat tidur, tetapi orang-orang itu mengarahkan senapan ke arah mereka, sehingga mereka keluar. Ketiga orang itu diinterogasi dan selama interogasi mereka dipukuli.

Sersan Melky yang memimpin interogasi sangat marah kepada Ana Lemos. Ia mengatakan bahwa ia telah melindungi Ana Lemos ketika milisi menyerang Gleno pada 10 April, tetapi ternyata Ana tetap gigih dengan kegiatan prokemerdekaannya. Ia mengancam bahwa, jika Ana melaporkan pertemuan ini kepada UNAMET, ia akan menangkapnya bersama ketiga anaknya setelah PBB pergi. Ia memukuli Ana beberapa kali, menarik rambutnya dan membantingnya. Sementara itu, para anggota milisi mengobrak-abrik rumah Ana untuk mencari uang dan barang-barang lain, yang kemudian mereka ambil dengan mengklaim bahwa barang-barang itu adalah milik Indonesia. Jalur telepon ke rumahnya juga diputus.

Setelah para penyerang itu pergi, Ana dan kedua mahasiswa bersembunyi di taman sebuah pura Bali yang tidak jauh dari rumahnya. Keesokannya di pagi hari, 31 Agustus, ia menghubungi petugas Brigade Mobil yang telah membantu dirinya di hari sebelumnya, dan petugas itu membawa ketiga orang itu ke rumahnya, dan kemudian ke markas UNAMET di Gleno. Namun di sana pun, keselamatan mereka samasekali tak bisa dijamin. Milisi telah mulai berkumpul dengan sikap mengancam di wilayah sekitar kantor, dan hal ini secara efektif mencegah staf PBB meninggalkan kantor. Di luar, para milisi berkeliling di jalanan, membakar gedung-gedung dan menembak-nembakkan senjata mereka.

Karena keadaan keamanan yang memburuk, para pejabat UNAMET memutuskan memindahkan semua staf, kecuali sekelompok kecil staf, ke Dili. Selama beberapa jam, mereka berunding dengan Polri, TNI, dan pemimpin milisi untuk mengizinkan pemindahan yang aman bagi mereka untuk keluar dari kompleks. Anggota milisi bersikeras bahwa para staf lokal, dan orang Timor-Leste lainnya, tidak diperbolehkan pergi, sementara UNAMET juga bersikukuh bahwa mereka harus diizinkan. Akhirnya, kesepakatan dicapai dan sebuah konvoi mobil diisi penumpang dan siap diberangkatkan. Namun, bahkan pada tahap ini para anggota milisi bersenjata dan pasukan keamanan menginspeksi semua kendaraan untuk mencari tokoh-tokoh prokemerdekaan yang dikenal.

Di dalam salah satu mobil, yang dikendarai oleh Pejabat Urusan Kemanusiaan UNAMET, Patrick Burgess, terdapat Ana Lemos, yang diapit di antara dua orang anggota staf internasional, dan mukanya ditutupi dengan selembar syal. Ketika para milisi memeriksa dari satu mobil ke mobil lainnya, petugas Brigade Mobil yang simpatik itu berdiri di samping mobil tersebut dan berbincang-bincang dengan Patrick Burgess. Dengan melakukan hal itu, ia secara efektif mencegah milisi menemukan Ana Lemos di sana dan memastikan bahwa Ana berhasil dengan aman pergi ke Dili bersama UNAMET.

Konvoi tiba di markas besar UNAMET di Dili pada malam harinya. Ana Lemos tinggal di Dili selama beberapa hari, lalu pindah ke tempat baru setiap beberapa hari. Akhirnya setelah terjadinya sebuah serangan terhadap Sekolah Don Bosco

tempat ia tinggal sementara, ia pergi ke kantor Kepolisian Daerah (Polda). Setibanya di sana, ia dilaporkan bertemu dengan bekas suaminya, ayah dari ketiga anak-anaknya. Keduanya dilaporkan berdebat tentang anak-anak mereka, yang tetap berada di Gleno. Sesaat sesudahnya, Ana Lemos pergi berjalan kaki ke Gleno.

Ana baru sampai di luar kota Gleno saat ia dilaporkan diambil oleh seorang perwira TNI, dibawa ke Kodim, dan diinterogasi. Dari Kodim, ia dilaporkan dipindahkan ke kantor milisi Darah Merah di Gleno. Tidak diketahui berapa lama ia ditahan di sana, dan tidak juga pasti apa yang terjadi pada saat itu, tetapi ketika ia kembali ke rumah ibunya pada 11 September tubuhnya penuh dengan memar. Ia mengatakan kepada ibunya bahwa ia telah dipukuli. Ia mengatakan kepada seorang teman dekatnya, Aliança Gonçalves, bahwa ketika ditahan di Kodim pada hari sebelumnya ia diperkosa oleh Sersan Melky. Menurut Aliança, Ana Lemos mengatakan bahwa Sersan Melky mengancam dirinya dengan sebuah pistol dan mengatakan bahwa ia akan membunuhnya kalau tidak mau bekerjasama.

Pada malam tanggal 11 September, sebuah pesta besar diadakan di sebuah Sekolah Dasar di Gleno, di mana seekor sapi disembelih untuk dimakan. Menurut satu orang kakak laki-laki Ana Lemos, anggota CNRT Flaviano Lemos, seorang anggota milisi di pesta tersebut berkata kepada yang lainnya: "Mari kita membunuh perempuan yang suka bermain politik." Pada malam yang sama, Ana Lemos memberi ibunya sejumlah uang dan beras, dan mengatakan kepada ibunya bahwa mereka akan membunuh dirinya.

Sekitar pukul 9 pagi tanggal 13 September, Ana Lemos diambil dari rumahnya oleh anggota milisi yang tak dikenal. Ibunya meminta untuk turut bersama tetapi tidak diizinkan. Itulah saat terakhir Ana Lemos terlihat masih hidup. Dua hari kemudian, pada 15 September ibunya beserta ketiga anaknya dibawa ke Atambua. Seorang anggota milisi mengatakan kepada ibunya bahwa dirinya tidak perlu susah-susah menunggu Ana karena Ana tidak akan pernah kembali.

Pada 5 November, pakaian yang dikenakan Ana Lemos saat terakhir kali terlihat, ditemukan di sekitar 4 kilometer di jalan menuju Aileu. Tidak jauh dari pakaian itu, ditemukan mayat seorang perempuan. Atas permintaan anggota keluarga Ana, pada Maret 2000 mayat itu diangkat. Pemeriksaan forensik menetapkan bahwa sangat mungkin tubuh perempuan itu adalah Ana Lemos.

Tersangka utama penculikan dan pembunuhan terhadap Ana Lemos adalah: Zeca Pereira, pemimpin milisi Darah Merah di Gleno; Lucas, pemimpin milisi Naga Merah di Hatolia; dan Hilario, seorang prajurit TNI. Sesuai dengan penjelasan di atas, Sersan TNI Melky secara langsung bertanggung jawab atas serangan terhadap Ana Lemos pada 31 Agustus, dan ia dicurigai kuat terlibat dalam penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap Ana Lemos.

Kini Ana Lemos dianggap sebagai pahlawan di Distrik Ermera. Sekolah Dasar di kota Gleno didedikasikan untuk mengenang dirinya, dan sisa tubuhnya dikuburkan di bawah monumen yang dibangun di kota yang sama untuk memperingati kemerdekaan Timor-Leste pada Mei 2002.

Amukan Batalion 745 (20-21 September 1999)

Hanya sedikit orang asing yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia pada 1999. Satu perkecualian tragis adalah wartawan Belanda Sander Robert Thoenes yang dibunuh prajurit-prajurit TNI pada 21 September di Dili. Pembunuhan Thoenes hanyalah satu tindakan akhir dalam satu operasi terencana pembunuhan dan penghancuran yang dilaksanakan oleh unsur-unsur Batalion 745 TNI saat batalion itu mundur dari markasnya di Desa Fuiloro, Kabupaten Lautém di bulan September. Ketika tindakan amuk ini akhirnya usai, para anggota batalion telah membunuh setidaknya 21 orang, dan membakar atau menghancurkan puluhan rumah.

Ada indikasi kuat bahwa kekerasan direncanakan dan diarahkan oleh para perwira TNI. Sesaat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara, seorang Komandan Peleton pada Batalion 745, Letnan Camilo dos Santos, dilaporkan mengatakan kepada anakbuahnya bahwa jika pemungutan suara hasilnya adalah kemenangan kemerdekaan, tugas mereka adalah menghancurkan rumah-rumah, membunuh ternak, dan membunuh para pendukung CNRT. Perintah-perintah itu agaknya berasal dari Komandan Batalion 745, Mayor Jacob Sarosa. Menurut tuntutan pidana yang diajukan terhadap Mayor Sarosa oleh Kejaksaan Agung Timor Leste:

> "Pada pukul 7 pagi tanggal 30 Agustus 1999, hari Konsultasi Rakyat, Mayor Jacob Djoko Sarosa memerintahkan para prajurit Timor-Leste untuk berbaris. Ia memberi pengarahan kepada para prajurit. Sambil menunjukkan kepada mereka selembar bendera Indonesia dan selembar bendera CNRT ia kemudian mengatakan bahwa siapapun yang memilih CNRT akan dibunuh."[*]

Rupanya perintah-perintah tersebut masih berlaku, dan pada 17 September, Batalion 745 bergerak dari markasnya di Fuiloro ke Desa Lautém di pantai utara. Dari sana, sebagian besar batalion diangkut dengan kapal pengangkut pasukan menuju Indonesia, tetapi sekitar 120 anggota beserta keluarganya, dan 20 prajurit dari Kodim setempat, tetap tinggal untuk melaksanakan tugas konvoi. Konvoi itu terdiri atas sekitar 40 sepeda motor dan lebih daripada 60 kendaraan berbagai jenis, termasuk setidaknya satu truk TNI yang dilengkapi dengan senapan 12,7 mm. Semua prajurit di dalam konvoi dipersenjatai dengan senjata otomatis dan banyak yang memakai ikat kepala berwarna merah putih. Mereka dipimpin oleh Komandan Batalion 745, Mayor Sarosa.

Pada tahap itu unit-unit TNI, mencakup Batalion 745, telah melakukan serangkaian pelanggaran berat hak asasi manusia di Lautém. Ini mencakup pembunuhan terhadap sekitar 10 orang antara 8 dan 13 September (Lihat ringkasan kabupaten: Lautém).[†]

---

* General Prosecutor of the Democratic Republic of Timor Leste, Indictment of Maj. Jacob Djoko Sarosa and Lt. Camilo dos Santos, Dili, 6 November 2002, paragraf 10.

† Indictment of Maj. Jacob Djoko Sarosa et al., paragraf 12-40.

Namun, tindakan kekerasan TNI yang terencana ini benar-benar membesar pada 20 September dengan pembunuhan terhadap tiga orang laki-laki di dekat sebuah gudang beras di kota Lautém. Sisa-sisa tiga tubuh manusia yang hangus ditemukan di sebuah perkuburan dekat gudang itu dua tahun kemudian. Beberapa saksi mengisahkan bahwa ketiga orang tersebut—Amílcar Barros, João Gomes, dan Agusto Venancio Soares—ditahan, dipukuli, ditembak, dan kemudian dibakar oleh para prajurit TNI, yang meliputi para anggota Batalion 745.[*] Mereka juga mengatakan bahwa Komandan Batalion 745, Mayor Sarosa, dan Komandan Peleton, Letnan dos Santos, hadir dalam serangan tetapi tidak bertindak mencegah atau menghentikannya.[†]

Kemudian pada hari yang sama, 20 September, konvoi Batalion 745 mulai bergerak dari Lautém ke Desa Laga di Kabupaten Baucau. Setelah berkemah semalam di Laga, para anggota batalion menghancurkan dan membakar tempat tinggal mereka dan sejumlah rumah di desa itu sebelum pergi.

Ketika bergerak ke barat, pada 21 September, para anggota Batalion 745 dilaporkan membunuh dua orang pemuda yang mereka dapatkan sedang mengendarai sebuah sepeda motor di sepanjang jalan utama dari Baucau. Para saksimata mengatakan bahwa kedua pemuda itu—Egas da Silva dan Abreu da Costa—dihentikan di dekat Desa Buile, Kecamatan Laga, dan kemudian ditembak oleh para serdadu ketika mereka berusaha melarikan diri. Menurut surat dakwaan yang diajukan oleh Kejaksaan Agung Timor Leste, Abreu da Costa ditembak di kaki kanan dan mata kanannya, dan Egas da Silva ditembak di perut, leher, dan dada.[‡] Seorang kerabat dari kedua laki-laki itu belakangan mengatakan kepada seorang wartawan, “Saya selalu bermimpi tentang mereka.”[§]

Kemudian pada hari yang sama, para anggota Batalion 745 membunuh setidaknya empat orang lagi, termasuk dua orang perempuan ketika para serdadu itu melewati Desa Buruma dan Caibada, di dekat kota Baucau. Keempat korban—Victor Belo, Carlos da Costa Ribeiro, Elisita da Silva, dan Lucinda da Silva—dibunuh ketika para prajurit melancarkan serangan ke desa-desa, dan menembak membabibuta ke arah penduduk sipil ketika mereka berlarian menyelamatkan diri. Menurut para anggota keluarga dan teman-teman, Victor Belo ditembak oleh dua prajurit di belakang konvoi setelah kembali untuk mengunci pintu rumahnya; Carlos da Costa Ribeiro ditembak di kepala di dalam rumahnya; Lucinda da Silva ditembak di dada ketika melarikan diri dari tentara; dan Elisita da Silva meninggal setelah ditembak di kedua kakinya.[¶]

---

* Para prajurit dari Batalion 621 juga disebut ambil bagian dalam pembunuhan ini.

† UNTAET, SCU, “Synopsis in Respect to TNI 745 Battalion and the Murder of Sander Thoenes,” 9 September 2001.

‡ Indictment of Maj. Sarosa et al., paragraf 65.

§ Dikutip dalam Cameron W. Barr, “A Brutal Exit: Battalion 745,” Bagian 1 dari 4, *Christian Science Monitor*, 13 Maret 2000.

¶ Cameron W. Barr, “A Brutal Exit: Battalion 745,” Bagian 3 dari 4, *Christian Science Monitor*, 13 Maret 2000.

Ayah Elisita da Silva menceritakan tentang serangan itu sebagai berikut:

> *"Ketika saya melihat konvoi TNI mereka sudah menembakkan senjata-senjata mereka ke arah semak-semak. Ada tembakan senapan satu-satu dan otomatis dan mereka juga menembakkan peluncur granat ke hutan. Saya juga melihat para prajurit TNI berjalan kaki menyisir dari rumah ke rumah dan tanah semak untuk mencari orang-orang. Sehingga kami (Jacinta, Elisita, Cezarina, dan Zelia) bersembunyi di balik sebuah batu besar, yang ada di sebelah rumah kami. Beberapa saat kemudian dua orang prajurit TNI menahan saya… Setelah para prajurit membebaskan saya, saya langsung pergi ke belakang rumah saya dan saya melihat anak perempuan saya Elisita telah ditembak di kedua kakinya. Kedua kakinya patah dan banyak darah mengalir. Dia masih hidup dan mengatakan kepada saya bahwa dia sangat kesakitan."*[*]

Para prajurit Batalion 745 melakukan beberapa pembunuhan lagi di dekat Desa Laleia, Kabupaten Manatuto, sebelah barat Baucau. Mereka yang meninggal adalah tiga orang laki-laki, yang tidak bersenjata, yang dibunuh ketika berlangsung serangan ke sisi timur jembatan Laleia, dan seorang laki-laki yang diduga pejuang Falintil, yang ditikam dan ditembak oleh para serdadu yang kemudian memotong salah satu telinganya. Tiga orang lainnya, termasuk seorang perempuan, dilaporkan ditahan di dekat Laleia, dipukuli, dan kemudian diserahkan kepada tentara di Kodim Manatuto. Mereka tidak kelihatan lagi dan diduga sudah dibunuh.[†] Beberapa dari korban dieksekusi ketika berada dalam tahanan, dan dilaporkan eksekusi itu dilaksanakan atas perintah dari perwira-perwira TNI.[‡]

Kekerasan lain, meliputi setidaknya tiga pembunuhan lagi, berlangsung ketika konvoi Batalion 745 bergerak memasuki Dili menjelang petang hari 21 September. Melintasi sepanjang Jalan Becora sekitar pukul 16.30, seorang jurnalis Inggris, Jon Swain, dan seorang fotografer Amerika, Chip Hires, berpapasan dengan konvoi ini. Kedua wartawan ini, yang disertai seorang penerjemah, Anacleto da Silva, menaiki sebuah taksi biru tua, yang dikemudikan seorang penduduk setempat, Sancho Ramos da Resurição.[§]

Menurut sejumlah saksi, para prajurit dari konvoi berhenti dan mengepung taksi, dan mulai melancarkan gangguan serta menarik-narik pintu mobil. Seorang serdadu menghantam kepala si pengemudi dengan popor senapannya, "menyebabkan bola mata kanannya keluar dari kelopak mata."[¶] Si penerjemah, Anacleto da Silva, dilaporkan ditarik dari taksi dan dibawa ke dalam kendaraan TNI. Seorang saksi

---

* Direkam dalam UNTAET, SCU, "Synopsis in Respect ot TNI 745 Battallion," 9 September 2001.

† UNTAET, SCU, "Synopsis in Respect to TNI 745 Battalion," 9 September 2001.

‡ Ibid.

§ Sumber-sumber yang berbeda menyebutkan nama pengemudi sebagai 'Sanjo Ramos' dan 'Sanchos Ramos Daressuricao.'

¶ Indictment of Maj. Sarosa et al., paragraf 88.

mengatakan kepada para penyelidik PBB bahwa dirinya melihat seseorang yang sesuai dengan gambaran sosok Anacleto dipukuli para prajurit Batalion 745 di Korem Dili pada malam hari itu. Anacleto tidak pernah terlihat lagi dan diyakini telah dibunuh.[*]

Sejumlah tentara menggeledah taksi dan menyita semua milik wartawan tersebut, termasuk kamera-kamera, rol-rol film, dan sebuah tas. Seorang prajurit kemudian menembak ban mobil dan radiator taksi untuk mencegah para wartawan melanjutkan perjalanannya. Pengemudi taksi di kemudian hari bersaksi di hadapan para penyelidik PBB bahwa Letnan Camilo dos Santos dari Batalion 745 ambil bagian dalam penyerangan itu.[†]

Juga hadir di tempat kejadian adalah Komandan Batalion, Mayor Jacob Sarosa. Selama kejadian, ia dilaporkan mengatakan kepada para wartawan bahwa prajuritnya, "sangat marah, sangat marah terhadap PBB dan anda sekalian orang-orang Barat. Anda harus mengerti."[‡] Dalam satu wawancara dengan penyelidik PBB pada November 1999, Mayor Sarosa membantah mengetahui adanya, atau terlibat dalam, pemukulan terhadap pengemudi atau penculikan terhadap si penerjemah.[§] Tetapi ia mengakui bahwa taksi itu dihentikan dan digeledah, barang-barang milik para wartawan disita dan dihancurkan, dan ban mobil taksi ditembak, berdasarkan perintahnya.

Masih di sore hari 21 September, sekitar 400 meter lagi melalui Jalan Becora, para prajurit Batalion 745 kembali membunuh satu orang lagi, Manuel Andreas. Pembunuhan itu disaksikan oleh dua orang, dan salah satunya yang memberikan kesaksian berikut ini kepada para penyelidik:

> *"Sore hari itu, saya kira sekitar pukul 5 sore, saya sendiri, Manuel [yang kemudian dibunuh], dan António… mulai berjalan di sepanjang jalan utama menuju jembatan dan sungai. Saya kira António berada di depan, kemudian saya, dan Manuel di belakang kami. Ketika kami berjalan, saya mendengar ledakan tembakan senapan dan melihat langsung ke depan bahwa António telah ditembak di lengan kanannya. Pada saat yang sama saya melihat Manuel jatuh ke tanah dan mulai berteriak. Saya lalu melihat bahwa dia telah ditembak di dada. Tembakan berlanjut sehingga saya dan António berlari mencari perlindungan di perbukitan."*[¶]

Tindakan terakhir dalam kekerasan dua hari Batalion 745 terjadi segera sesudahnya, sekitar 300 meter lebih lanjut di Jalan Becora. Di sana para prajurit membunuh dan memotong bagian tubuh wartawan Belanda Sander Robert Thoenes.

* UNTAET, DHRO-Dili, "Key Cases of HRVs/Abuses in Dili District," 15 September 2002.

† UNTAET, SCU, "Synopsis in Respect to TNI 745 Batallion," 9 September 2001.

‡ UNTAET, DHRO-Dili, "Key Cases," 15 September 2002.

§ Ibid.

¶ UNTAET, SCU, "Synopsis in Respect to TNI 745 Batallion," 9 September 2001.

Sander Thoenes baru tiba di Dili untuk meliput kehadiran INTERFET untuk suratkabar *Financial Times*. Menurut para saksi ia pergi dari Hotel Turismo sekitar pukul 17.00 tanggal 21 September, dengan menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh pengemudi setempat, Florindo da Conceição Araújo. Ketika mereka menyusuri Jalan Becora, mereka berpapasan dengan beberapa prajurit TNI mengendarai sepeda motor, membawa senjata otomatis. Para prajurit meneriaki kedua orang itu agar berhenti. Namun karena ketakutan akan keselamatan diri dan penumpangnya, si pengemudi berusaha berputar berbalik arah dan melarikan diri. Para prajurit membuka tembakan, dan sepeda motor terguling yang menyebabkan pengemudi dan penumpangnya jatuh ke tanah. Si pengemudi berhasil melarikan diri, meninggalkan Sander Thoenes tergeletak di jalan.[*]

Para saksi mengatakan bahwa empat atau lima prajurit lalu menyeret Sander Thoenes keluar dari jalan ke dalam satu tempat tertutup, tempat di mana tubuhnya ditemukan keesokan paginya.[†] Ia ditembak di dadanya, dan penyerangnya memotong telinga kirinya dan menyayat sebagian wajahnya dengan ketepatan ilmu bedah. Sebagian jari Sander Thoenes juga hilang, tetapi diyakini bahwa luka-luka ini terjadi ketika sepeda motor jatuh.

Menurut seorang ahli patologi Australia yang melakukan pemeriksaan pasca kematian (*post-mortem*) terhadap tubuh Thoenes di Darwin pada 24 September 1999, sebab kematiannya adalah satu tembakan tunggal ke dada. Pada 2001, seorang penyelidik Belanda dan seorang polisi militer Australia menulis: "Bisa disimpulkan … [bahwa] Sander Thoenes dibunuh oleh seorang militer dari Batalion 745 TNI dengan satu tembakan di punggung."[‡]

Segera sesudah pembunuhan Thoenes, konvoi Batalion 745 bergerak ke markas Korem di pusat kota Dili. Di sana, bersama dengan kesatuan-kesatuan Korem dan Brimob, mereka menerima pengarahan singkat dari Komandan Korem yang baru diangkat, Kolonel Noer Muis. Menurut para saksi, Kolonel Muis memerintahkan para anggota Batalion 745 untuk segera meninggalkan kota segera setelah mereka makan dan mengisi kembali tangki bensin kendaraan. Ia juga memerintahkan mereka untuk tidak mengatakan apapun tentang tindakan mereka selama dua hari sebelumnya. Menurut satu kesaksian, kata-katanya adalah sebagai berikut:

> "Kalian tidak perlu mengatakan kepada siapapun tentang apa yang telah kalian lakukan selama perjalanan ke sini. Istri kalianpun jangan diberi tahu. Dari Dili ke Kupang jalanan aman, kalian tidak perlu menembak."[§]

---

* INTERFET, Investigation Section, "Alleged Murder of Sander Robert Thoenes – Interim Report," Dili, 24 November 1999.

† Para saksi itu dikutip dalam Cameron W. Barr, "A Brutal Exit: Battalion 745," Bagian 4 dari 4, *Christian Science Monitor*, 17 Maret 2000; dan dalam INTERFET, Investigation Section, "Alleged Murder of Sander Robert Thoenes – Interim Report," Dili, 24 November 1999.

‡ Dikutip dalam INTERFET, Investigation Section, "Alleged Murder of Sander Robert Thoenes –Interim Report," Dili, 24 November 1999.

§ Indictment of Maj. Sarosa et al., paragraf 104.

Pada malam harinya, konvoi bergerak ke luar Dili, mencapai kota perbatasan Balibó tanpa insiden lebih lanjut. Pada hari selanjutnya, 22 September, konvoi itu melanjutkan perjalanan ke Kupang, tiba sekitar pukul 22.00. Beberapa saat setelah sampai di sana, Mayor Sarosa, Letnan Camilo, dan Letnan James diwawancarai oleh polisi militer TNI. Ketiganya kemudian ditahan selama satu atau dua minggu.[*]

Lepas dari penahanan singkat ini, sampai dengan Maret 2003 tidak ada satu pun dari anggota Batalion 745 yang dihukum sehubungan dengan pembunuhan dan tindak pidana lain yang diuraikan di sini. Para jaksa penyelidik Indonesia mengaku tidak menemukan bukti mengenai keterlibatan TNI dalam suatu pembunuhan, dan semua jaksa Indonesia memilih tidak mengajukan kasus-kasus ini ke pengadilan.

Pembunuhan rohaniwan Los Palos (25 September 1999)

Satu aspek yang paling mengejutkan dari strategi pro-otonomi, baik sebelum dan sesudah pemungutan suara, adalah mengarahkan sasaran pada rohaniwan dan tempat-tempat ibadah Katolik Roma. Pembantaian di Gereja Liquiçá dan Suai masing-masing pada April dan September dan serangan terhadap kediaman Uskup Dili pada September tampaknya sengaja diperhitungkan untuk meneror penduduk yang 80% menganut agama Katolik Roma. Serangan-serangan itu juga dimotivasi oleh satu anggapan bahwa Gereja telah mendukung posisi prokemerdekaan.

Kedua motivasi ini jelas terlihat dalam salah satu peristiwa kekerasan yang paling mengerikan selama periode setelah pemungutan suara: penyergapan dan pembunuhan dengan cara eksekusi terhadap satu kelompok yang terdiri atas lima rohaniwan dan empat orang awam oleh sekelompok milisi di Lautém pada 25 September.[†] Para korban mencakup seorang biarawati yang dibacok dengan parang ketika ia berlutut, berdoa di tepi jalan, kemudian dilempar ke sungai dan ditembak mati.[‡]

Pengadilan terhadap para pelaku, yang semuanya tergabung dalam kelompok milisi Tim Alfa, mengukuhkan bahwa pembunuhan tersebut direncanakan dengan baik dan bermotivasi politik. Para pemimpin operasi mengetahui identitas tokoh-tokoh agama yang mereka bunuh dan menganggap mereka sebagai sasaran yang sah karena bersimpati pada kelompok prokemerdekaan. Penting bahwa pengadilan juga menegaskan bahwa Tim Alfa diorganisasikan oleh, menerima perintah dari, dan memiliki “hubungan dekat dan kontak terus-menerus” dengan Kopassus, dan khususnya dengan komandan di wilayah tersebut, Letnan Syaful Anwar.[§]

* INTERFET, Investigation Section, “Alleged Murder of Sander Robert Thoenes – Interim Report,” Dili, 24 November 1999.

† Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan berikut didasarkan pada bukti dan kesaksian yang direkam dalam: Dili District Court, Special Panel for Serious Crimes, “Judgement” dalam kasus Joni Marques et al., 11 Desember 2001.

‡ Orang-orang yang meninggal diidentifikasi dalam proses pengadilan sebagai: Suster Emilia Cazzaniga, Suster Celeste de Carvalho, Bruder Jacinto Xavier, Bruder Fernando dos Santos, Bruder Fernando da Conceição, Agus Muliawan, Cristovão Rudi Barreto, Titi Sandora Lopes, dan Izinho Freitas Amaral. Lihat “Judgement,” Joni Marques et al., Desember 2001.

§ Kesaksian Joni Marques, dalam “Judgement,” halaman 52-57 dan 398.

Pada 25 September, komandan Tim Alfa, Joni Marques, dan sejumlah anggota lain berangkat dari pelabuhan Com, di Kabupaten Lautém, menuju kota Lautém. Tujuan utama perjalanan mereka adalah untuk mendapatkan beras dari gudang dekat Lautém, tetapi ada alasan untuk mempercayai bahwa niat mereka sesungguhnya adalah untuk menyergap dan membunuh para rohaniwan. Indikasi paling jelas bahwa mereka tidak sepenuhnya berniat mengambil beras adalah bahwa mereka meluncur melewati gudang beras. Selain itu, setidaknya tujuh orang dari kelompok tersebut bersenjatakan senapan otomatis SKS, jenis senjata yang digunakan pasukan keamanan Indonesia, dan sebagian besar juga membawa parang dan pisau.

Sekitar satu kilometer setelah melalui Lautém, rombongan milisi ini melewati dua orang pemuda yang sedang mendorong sebuah gerobak di jalan. Komandan milisi Joni Marques memerintahkan sopirnya berhenti, dan para anggota milisi melompat keluar serta mengejar dua orang tersebut, dengan melemparkan batu-batu dan menembakkan senjata mereka ke arah dua orang tersebut. Salah seorang di antaranya, José Pereira, terluka tetapi berhasil melarikan diri.[*] Orang yang kedua, Izinho Freitas Amaral, tertangkap, diikat pada sebatang pohon di dekat tepi jalan, dan kemudian dibunuh. Dalam temuannya tentang kasus ini pada Desember 2001, Panel Khusus Kejahatan Berat pada Pengadilan Distrik Dili menyimpulkan bahwa milisi telah mengejar dua orang pemuda dan membunuh salah satu dari mereka untuk memastikan tidak ada saksi untuk kejahatan yang akan mereka lakukan.[†]

Joni Marques kemudian memerintahkan anakbuahnya menyiapkan sebuah penghalang jalan dengan menempatkan batu-batu besar di tengah jalan. Beberapa orang milisi ditempatkan di bukit yang berdekatan sebagai pengawas, dan yang lain mengambil posisi di dalam sebatang parit dengan senjata yang diarahkan ke jalan. Seorang saksi mengingat bahwa setelah menyiapkan penghalang jalan, Joni Marques mengatakan: “Sekarang kita akan menunggu para Suster yang akan menuju Baucau… dan ketika mereka datang kita bunuh mereka semua.”[‡]

Sekitar pukul 14.30 pada hari yang sama, sebuah kendaraan roda empat berwarna abu-abu mulai terlihat dari arah Lautém dan bergerak ke barat menuju Baucau. Ada delapan orang di dalam mobil, termasuk dua orang biarawati, tiga orang Bruder/ Pastor, seorang wartawan, dan dua orang awam. Ketika kendaraan berhenti di dekat penghalang jalan, Joni Marques dan dua milisi lainnya mulai menembaki mobil tersebut dengan senjata otomatisnya, yang langsung membunuh pengemudi dan sebagian penumpangnya.

Ketika salah seorang dari para penumpang yang selamat berusaha keluar dari kendaraan, seorang anggota milisi menangkapnya dan menyeretnya ke sungai

* Untuk penjelasan José Pereira tentang peristiwa ini, lihat “Judgement,” Joni Marques et al., halaman 264-265.

† “Judgement,” Joni Marques et al., halaman 403-403.

‡ “Judgement,” Joni Marques et al., Kesaksian Manuel da Costa, halaman 279.

tempat ia ditembak mati. Milisi yang sama menyiramkan minyak ke tubuh tiga orang lain yang selamat dan membakar mereka. Salah satu dari ketiga orang itu lari dari mobil ke sungai, tetapi di sana Joni Marques dan seorang laki-laki lain menembaknya sampai mati.

Salah seorang suster, Suster Erminia, keluar dari kendaraan dan berlutut di pinggir jalan untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, seorang milisi (Horacio) membacoknya dengan parang. Milisi yang lain (Pedro da Costa) bersaksi bahwa ia berteriak, "Jangan bunuh Suster!" Tetapi Joni Marques menjawab, "Bunuh mereka semua! Mereka semua CNRT!" Seorang milisi kemudian mengambil Suster Erminia dan melemparkannya ke dalam sungai sebelum menembaknya dua kali. Di pengadilan, seorang saksi mengungkapkan:

> *"Saya melihat seorang suster duduk di samping [parit]. Ada satu tubuh di samping suster itu. Saya melihat kerudung suster itu ada di pundaknya. Suster itu berbicara kepada saya dalam bahasa Tetum. Saya tidak dapat mengingat semua kata-katanya, tetapi saya ingat ia berkata, 'Oh! Tuhan!'"* *

Pada saat itu, Joni Marques memerintahkan anakbuahnya mendorong kendaraan para rohaniwan itu ke dalam sungai. Beberapa saksi mengatakan bahwa ia berteriak: "Kemari dan dorong mobil ini, kalian bajingan!" Orang-orang itu melakukannya, walaupun masih ada satu orang di dalam mobil. Ketika orang itu keluar dari mobil, ia ditembak mati.

Para penyerang kemudian berbalik ke Izinho Freitas Amaral, orang muda yang awalnya mereka ikat ke sebatang pohon. Seorang milisi memotong telinga Izinho dan membacok lehernya dengan sebilah pedang. Ia kemudian didorong ke dalam sungai, selanjutnya ditembak mati. Akhirnya Joni Marques melemparkan sebuah granat ke dalam sungai, tempat mereka yang mati dan terluka tergeletak, untuk memastikan bahwa tidak akan ada yang selamat.

Untuk kejahatan ini, dan kejahatan lain yang dilakukan pada 1999, Joni Marques dan dua anggota lain milisi Tim Alfa dinyatakan bersalah dan dihukum selama 33 tahun dan 4 bulan penjara. Enam anggota milisi yang lain mendapatkan hukuman berkisar antara 5 sampai 19 tahun. Hingga Maret 2003 tidak ada perwira TNI yang diadili sehubungan dengan kejahatan ini.

* "Judgement," Joni Marques et al., Kesaksian Gilberto da Costa, halaman 6-271.

Tanggung jawab individual dan komando

Bukti yang ditampilkan di dalam laporan ini secara konklusif menunjukkan bahwa kekerasan pada 1999 adalah bagian dari serangan yang luas dan sistematis terhadap penduduk sipil, dan dalam kekerasan tersebut para pendukung kemerdekaan Timor-Leste dengan sengaja dijadikan sasaran. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang dibahas bukan hanya merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, melainkan juga kejahatan terhadap umat manusia.* Masih tetap perlu dikaji dengan baik siapa yang harus bertanggung jawab untuk kejahatan-kejahatan tersebut.

Dalam pengertian tertentu, jawabannya sudah jelas: pihak yang bertanggung jawab adalah milisi, prajurit TNI, dan petugas Polri yang langsung melakukan kejahatan tersebut. Banyak dari mereka telah didakwa, dan sebagian di antaranya telah diadili di Timor Leste dan Indonesia, untuk satu atau beberapa tindakan pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilakukan pada 1999. Namun, tanggung jawab untuk kejahatan terhadap umat manusia tidak berhenti pada para pelaku langsung saja. Menurut hukum internasional, maupun hukum dalam negeri di Indonesia dan Timor-Leste, tanggung jawab ini juga meluas pada orang-orang yang memerintahkan atau memfasilitasi kejahatan-kejahatan tersebut, dan orang-orang yang gagal mengambil tindakan yang mencukupi untuk menghentikan kejahatan tersebut atau menghukum para pelakunya.

Atas dasar tersebut, laporan ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab untuk kejahatan terhadap umat manusia di tahun 1999 menjangkau sampai tingkat tertinggi pimpinan militer, kepolisian, dan pemerintah sipil Indonesia. Lebih tepatnya, laporan ini mengidentifikasi sekitar 80 perwira militer dan pejabat sipil, berpangkat letnan kolonel dan bupati atau lebih tinggi, yang agaknya mengemban tanggung jawab hukum atas kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan pada 1999 (Lihat Tabel 1). Sebagian di antara mereka terlibat aktif melakukan, memerintahkan, atau melancarkan terjadinya kejahatan, dan dengan demikian bisa dikatakan memiliki 'tanggung jawab pidana individual' atas kejahatan-kejahatan tersebut. Lainnya gagal menghentikan kekerasan itu atau menghukum bawahan mereka, dan dengan demikian memiliki 'tanggung jawab komando' atas kejahatan-kejahatan tersebut.

Bukti yang ditampilkan dalam laporan ini, dan dibahas dalam bab ini, juga menjadi pengingat bahwa dalam menangani masalah pertanggungjawaban, harus dilihat apa yang ada di balik tindakan tindakan-tindakan individu, harus dikaji akibat dari norma serta praktik kelembagaan dan negara. Karenanya, laporan ini menyampaikan bahwa tanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada 1999 juga ada pada angkatan bersenjata Indonesia sebagai suatu lembaga, dan pada negara Indonesia.

* Walaupun tidak diajukan di dalam laporan ini, banyak dari tindakan yang dipersoalkan juga merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.

Tanggung jawab pidana individual

Konsep tanggung jawab pidana individual dijabarkan dalam Pasal 25 Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional,* dan dalam hukum nasional Timor Leste dan Indonesia. Dalam Pasal 14 Regulasi UNTAET No. 15/2000, yang berdasarkan pada Pasal 25 Statuta Roma, seseorang dikatakan memiliki tanggung jawab pidana individual jika yang bersangkutan melakukan, memerintahkan, meminta, membantu, mengajak ,atau menyumbang pelaksanaan, atau usaha pelaksanaan sebuah kejahatan berat. Lebih tepatnya, Pasal 14.3 menyatakan bahwa:

> "… seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dikenai hukuman atas suatu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi panel [kejahatan berat] kalau orang yang bersangkutan:
>
> (a) melakukan kejahatan tersebut, baik secara sendirian, bersama orang lain atau melalui orang lain, tanpa memandang apakah orang lain itu bertanggung jawab secara pidana;
>
> (b) memerintahkan, meminta, atau mengajak dilakukannya kejahatan itu yang dalam kenyataan terjadi atau diupayakan terjadi;
>
> (c) untuk keperluan memperlancar dilakukannya kejahatan tersebut, membantu, bersekongkol, atau mendukung pelaksanaan atau upaya pelaksanaannya, termasuk menyediakan sarana untuk pelaksanaannya;
>
> (d) dengan satu atau lain cara menyumbang pada pelaksanaan atau upaya pelaksanaan kejahatan tersebut oleh sekelompok orang yang bertindak dengan satu tujuan bersama…"

Klarifikasi lebih jauh dari konsep tanggung jawab pidana individual di dalam hukum internasional ditemukan dalam keputusan Banding Tadic (15 Juli 1999) pada Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia/*International Court Tribunal for Yugoslavia* (ICTY). Keputusan itu membedakan antara keterlibatan dalam satu kejahatan melalui "membantu dan bersekongkol" dengan keterlibatan dalam memajukan "tujuan kriminal bersama".† Kedua bentuk keterlibatan ini menjadi landasan bagi tanggung jawab pidana individual untuk suatu kejahatan terhadap umat manusia. Perbedaan utama antara dua konsep ini terletak pada kekhususan tindakan-tindakan yang diuraikan, di mana "membantu dan bersekongkol" menyiratkan tingkat kekhususan yang lebih besar daripada tindakan memajukan "tujuan kriminal bersama". Dalam bahasa keputusan ICTY:

---

* Teks lengkap Statuta Roma dapat dilihat dalam situs jaringan Pengadilan Pidana Internasional: http://www.un.org/law/icc/

† Keputusan Banding Tadic, 15 Juli 1999: http://www/un.org/icty/tadic/appeal/judgement/index.htm paragraf 185-230.

> "Orang yang membantu dan bersekongkol melakukan tindakan yang secara khusus diarahkan untuk membantu, mendorong, atau memberikan dukungan moral pada pelaksanaan kejahatan khusus tertentu (pembunuhan, pembasmian, pemerkosaan, penyiksaan, penghancuran yang disengaja terhadap barang sipil, dan sebagainya), dan dukungan ini berpengaruh besar pada pelaksanaan tindak kejahatan yang dimaksudkan. Sebaliknya, dalam kasus bertindak untuk mengejar tujuan atau rancangan bersama, adalah cukup bagi peserta untuk melakukan tindakan-tindakan yang dengan satu atau lain cara diarahkan untuk mencapai rencana atau tujuan bersama."*

Keputusan Banding Tadic juga memperjelas bahwa rencana, rancangan, maupun tujuan pidana bersama tidak harus dirancang atau dirumuskan terlebih dulu. "Rencana atau tujuan bersama bisa terwujud tanpa persiapan dan dapat disimpulkan dari fakta bahwa banyak orang bertindak serempak untuk melakukan suatu upaya pidana bersama."†

Dengan statuta-statuta ini sebagai panduan, dan berdasarkan bukti yang dikemukakan dalam laporan ini, maka bisa diidentifikasi nama puluhan anggota milisi, pejabat-pejabat TNI, Polri, dan pemerintah sipil sebagai pihak yang secara individual bertanggung jawab atas kejahatan terhadap umat manusia. Tentu saja, daftar nama ini mencakup anggota milisi yang secara langsung melakukan tindakan-tindakan pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap para pendukung kemerdekaan dalam 1999. Daftar ini juga mencakup sejumlah anggota TNI dan Polri berpangkat rendah yang secara langsung melakukan atau memerintahkan kejahatan itu. Banyak dari mereka telah didakwa oleh Wakil Jaksa Agung Timor-Leste untuk Kejahatan Berat, dan sebagian telah didakwa dan diadili di hadapan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Indonesia.‡

Sebagian besar tersangka yang secara formal didakwa dengan pertanggungjawaban pidana individual adalah milisi biasa atau para pemimpin milisi yang 'menarik pelatuk.' Namun, sebagian di antara mereka telah didakwa dengan pertanggungjawaban individual atas tindakan membantu, bersekongkol, atau dengan cara lain menyumbang pada pelaksanaan kejahatan itu. Atas dasar itulah maka Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, Mayor Jenderal Adam Damiri, Kolonel Tono Suratman, Letnan Kolonel Yayat Sudrajat, dan Gubernur Abílio Osório Soares didakwa oleh Wakil Jaksa Agung Timor-Leste untuk

---

* Ibid., paragraf 229 (iii).

† Ibid., paragraf 227 (ii).

‡ Sampai dengan akhir Mei 2003, pihak berwenang di Timor Leste telah mengeluarkan 60 surat dakwaan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian pada 1999, yang menuntut 247 individu, sebagian besar dengan dakwaan kejahatan terhadap umat manusia. Lihat UNMISET, Serious Crimes Unit, "Serious Crimes Update V/03," Dili, 28 Mei 2003. Sementara itu, pihak berwenang Indonesia telah mengeluarkan dakwaan terhadap seluruhnya 18 individu dengan dakwaan kejahatan terhadap umat manusia. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang kedua proses hukum tersebut ikuti Bab 12.

Kejahatan Berat pada Februari 2003.* Bukti dalam laporan ini mendukung dengan kuat tuduhan-tuduhan dalam dakwaan tersebut.

Namun, selain itu bukti-bukti yang ditampilkan di sini menunjukkan bahwa para perwira dan pejabat lain juga mengemban tanggung jawab pidana individual atas kejahatan yang dilakukan pada 1999. Memang, uraian Regulasi No. 15/2000 dan keputusan ICTY atas Banding Tadic 1999 yang dikutip di atas membenarkan bahwa pihak yang bertanggung jawab untuk kejahatan terhadap umat manusia di Timor-Leste—di luar pelaku langsung dari kejahatan tersebut—bisa mencakup setiap orang yang melakukan salah satu atau lebih daripada hal-hal berikut ini:

- membantu membentuk milisi dan merekrut para anggotanya;
- membuat pernyataan terbuka mendukung milisi;
- memberikan pengakuan hukum dan politik kepada milisi;
- memberikan pelatihan dan pembinaan militer kepada milisi;
- melakukan koordinasi atau mengadakan operasi tempur bersama dengan kelompok-kelompok milisi;
- memberikan senjata dan/atau amunisi kepada milisi;
- memberikan dukungan finansial dan/atau material kepada milisi.

Dengan berlimpahnya bukti dalam laporan ini mengenai peran pihak berwenang Indonesia dalam melakukan hal-hal tersebut, maka masuk akal jika dikatakan bahwa ada lusinan pejabat militer, kepolisian, dan pemerintah sipil yang mengemban tanggung jawab pidana individual untuk kejahatan terhadap umat manusia di Timor-Leste. Para tersangka utama ini tercantum dalam Tabel 1.

Manajer dan perencana

Sementara banyak pejabat yang mungkin mengemban tanggung jawab hukum individual untuk kejahatan-kejahatan pada 1999, tetapi membedakan berbagai jenis atau derajat kesalahan itu ada gunanya. Ada dua kategori umum di luar 'penarik pelatuk' yang dikemukakan di sini: *pertama*, mereka yang mengelola kelompok-kelompok milisi di Timor-Leste pada 1999; dan *kedua*, mereka yang bertanggung jawab menyusun dan mengoordinasikan seluruh kebijakan yang membutuhkan penggalangan milisi dan penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil.

Dalam kategori pertama, yang bisa kita sebut sebagai 'manajer' kekerasan, mencakup: semua komandan milisi, semua Komandan Kopassus dan Komandan Sektor, sebagian besar (tidak semua) Komandan Distrik Militer (Dandim), sejumlah (tidak semua) Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), Gubernur, dan sejumlah (tidak semua) Bupati.† Tidak diragukan bahwa banyak dari "manajer"

* East Timor, Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment of Wiranto et al., Februari 2003.

† Dandim yang mungkin tidak termasuk dalam kategori ini adalah Dandim Aileu, Baucau, Manatuto (Letnan Kolonel Gerson Ponto), Manufahi, dan Viqueque. Kapolres yang tidak bisa dianggap sebagai 'manajer' kekerasan adalah Kapolres Aileu, Baucau, Ermera, Lautem, Liquiçá (Mayor Joko Irianto), Ma-

ini membantu dan bersekongkol, dan dalam beberapa kasus memerintahkan tindak pidana tertentu. Setidaknya, keterlibatan mereka itu berupa memajukan suatu 'tujuan kriminal bersama' yang mencakup pelaksanaan kejahatan terhadap umat manusia. Namun, bisa diajukan alasan yang kuat bahwa mereka tidak akan dan tidak dapat melakukan semua ini jika tidak ada kebijakan umum yang diawali dan dikoordinasikan oleh pejabat-pejabat tingkat lebih tinggi—yang dapat kita sebut sebagai 'perencana.'

Dalam kategori kedua ini, para 'perencana' mencakup selusin, dan mungkin lebih, perwira tinggi TNI dan pejabat sipil tingkat Kabinet. Bukti yang dikemukakan dalam laporan ini menunjukkan bahwa perwira-perwira dan pejabat-pejabat berikut ini sangat mungkin terlibat dalam perencanaan, dan setidaknya mereka harus menjadi sasaran penyelidikan pidana lanjutan:

1. Mayor Jenderal Kiki Syahnakri
   Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat; Penguasa Darurat Militer di Timor Timur
2. Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin
   Asisten Teritorial Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia
3. Brigadir Jenderal Arifuddin
   Direktur 'A' BAIS
4. Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim
   Kepala BIA (sampai Januari 1999); Anggota, Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur
5. Mayor Jenderal Adam Damiri
   Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana
6. Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon
   Kepala Staf Komando Daerah Militer IX/Udayana
7. Kolonel Tono Suratman
   Komandan Komando Resor Militer 164/WD (sampai 13 Agustus 1999)
8. Kolonel Noer Muis
   Komandan Komando Resor Militer 164/WD (mulai 13 Agustus 1999)
9. Letnan Kolonel Yayat Sudrajat
   Komandan Satgas Tribuana-VIII (Kopassus), Timor Timur
10. Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung
    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
11. Letnan Jenderal (Purn.) Hendropriyono
    Menteri Transmigrasi dan Pemukiman
12. Mayor Jenderal (Purn.) Yunus Yosfiah
    Menteri Penerangan

natuto, Manufahi, dan Viqueque. Demikian juga, Bupati Baucau, Ermera, dan Manufahi harus dikeluarkan dari daftar 'manajer' kekerasan.

Penting untuk dicatat bahwa hampir semua perwira yang tercantum dalam daftar ini pernah ditugaskan bersama satuan-satuan Kopassus di Timor-Leste atau memiliki sejarah karier di Kopassus atau intelijen militer.* Peran sangat penting perwira-perwira Kopassus dan intelijen di dalam kekerasan tahun 1999 itu sesuai dengan pola lama pertanggungjawaban atas pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor-Leste dan Indonesia, dan ini menunjukkan adanya masalah serius kelembagaan yang mendasar dalam angkatan bersenjata Indonesia. Karenanya, pengkajian yang memadai tentang sebab-sebab kekerasan 1999 dan tanggung jawab atasnya harus melampaui masalah tanggung jawab pidana individual, dan mengkaji pola-pola komando dan kontrol yang lebih luas dalam aparat militer dan negara Indonesia.

Tanggung jawab komando

Hukum internasional menyatakan bahwa, dalam keadaan tertentu, para komandan militer serta atasan kepolisian dan sipil dapat dimintai pertanggungjawaban hukum untuk kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan oleh bawahannya. Prinsip tersebut, yang secara umum disebut 'tanggung jawab komando,' dinyatakan di dalam Pasal 28 Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional.† Asas yang sama juga disebutkan dalam hukum nasional Indonesia dan Timor Leste. Mengambil dari Statuta Roma, Pasal 16 dari Regulasi UNTAET No. 15/2000 menetapkan bahwa seorang komandan atau atasan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan bawahannya jika ia:

> "… mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa bawahan tersebut akan atau telah melakukan tindakan itu, dan atasan itu gagal mengambil tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk mencegah tindakan itu atau menghukum pelakunya."‡

Pada dasarnya, berdasarkan 'tanggung jawab komando' itulah para jaksa penuntut di Indonesia dan di Timor-Leste mendakwa sejumlah pejabat TNI, Polri, dan pemerintah sipil tingkat tinggi. Misalnya pada Februari 2003 Wakil Jaksa Agung Timor-Leste untuk Kejahatan Berat mengeluarkan satu surat dakwaan yang mendakwa tujuh perwira TNI—Jenderal Wiranto, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, Mayor Jenderal Adam Damiri, Kolonel Tono Suratman, Kolonel Noer Muis, dan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat—bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan para bawahan mereka, sesuai dengan Pasal 16 Regulasi UNTAET No. 15/2000.

---

* Mereka yang punya sejarah karier Kopassus dan/atau posisi intelijen mencakup: Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung, Letnan Jenderal (Purn.) Hendropriyono, Mayor Jenderal (Purn.) Yunus Yosfiah, Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Brigadir Jenderal Arifuddin, Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon, Kolonel Tono Suratman, Kolonel Noer Muis, dan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat.

† Teks lengkap Statuta Roma dapat ditemukan dalam situs jaringan Pengadilan Pidana Internasional: http://www.un.org/law/icc/.

‡ UNTAET Regulation No. 2000/15 (6 Juni 2000) "On the Establishment of Panels with Exclusive Jurisdiction over Serious Criminal Offences."

Bukti yang diajukan dalam laporan ini mendukung dakwaan tersebut. Laporan ini juga menunjukkan bahwa banyak perwira militer yang lain, dan pejabat kepolisian serta pemerintah sipil, agaknya juga mengemban tanggung jawab komando atas kejahatan yang dilakukan selama 1999. Sekitar 80 perwira dan pejabat yang diduga mengemban tanggung jawab tersebut disebutkan dalam Tabel 1. Penilaian tentang kesalahan mereka dibuat berdasarkan analisis mengenai bukti yang disampaikan dalam laporan ini, yang berhubungan dengan tiga unsur yang diperlukan untuk membuktikan 'tanggung jawab komando'—*pertama*, adanya hubungan atasan-bawahan; *kedua*, bahwa atasan mengetahui atau punya alasan untuk mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya; dan *ketiga*, bahwa atasan gagal melakukan tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk mencegah kejahatan-kejahatan tersebut dan menghukum para pelakunya. Ketiga unsur tersebut dibahas di bawah ini.

Hubungan atasan-bawahan

Jalur wewenang militer, kepolisian, dan pemerintah sipil di Timor-Leste sangat kompleks dan sering tidak jelas. Jalur komando formal tidak selalu menandakan wewenang yang nyata atau yang berlaku. Oleh karena itu untuk menentukan apakah hubungan atasan-bawahan itu ada, diperlukan pengamatan lebih teliti baik terhadap jalur wewenang formal maupun informal yang berlangsung pada 1999.

Menurut hukum Indonesia, Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia pada 1999 adalah Presiden, B.J. Habibie.[*] Prakarsa-prakarsa strategis penting, seperti keputusan untuk menyelenggarakan referendum di Timor-Leste dan pengumuman Keadaan Darurat pada 7 September 1999, memerlukan persetujuannya. Karena itu dapat dikemukakan argumen bahwa tanggung jawab komando paling tinggi untuk setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggota angkatan bersenjata Indonesia di Timor-Leste pada 1999, atau orang-orang yang beroperasi di bawah komando mereka, ada pada presiden.[†] Di lain pihak, ada keraguan besar apakah Presiden Habibie memang memiliki kekuasaan lebih daripada sekadar kontrol teoretis terhadap hierarki TNI pada 1999. Memang, seperti yang dicatat dalam bagian lain laporan ini, perwira-perwira tinggi TNI rupanya menentang kebijakan politik Habibie tentang Timor-Leste dan berusaha menggagalkannya. Dalam keadaan seperti itu, sulit untuk menyatakan bahwa Habibie memiliki komando efektif atas bawahannya dalam TNI, atau atas milisi.

Menurut hukum dan juga dalam praktiknya, tanggung jawab komando atas satuan-satuan TNI di Timor-Leste terletak pada Panglima TNI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal Wiranto. Sebagai Panglima TNI, Jenderal Wiranto berada di puncak jalur komando teritorial militer yang merentang melalui Panglima Kodam IX/Udayana, Mayor Jenderal Adam Damiri, dan Kepala Stafnya, Brigadir

* Kedudukan Presiden sebagai Panglima Tertinggi dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan tahun 1983 dan suatu Keputusan Presiden yang dikeluarkan pada 1983.

† Sebenarnya, sebagian dari yang telah diadili sejak tahun 1999 (misalnya Kolonel Timbul Silaen dan Eurico Guterres) telah menegaskan bahwa tanggung jawab utama untuk kekerasan di Timor Timur berada pada Habibie.

Jenderal Mahidin Simbolon, ke Komandan Korem 164/Wira Dharma, Kolonel Tono Suratman dan Kolonel Noer Muis, Wakil Komandan Korem, Kolonel Mudjiono, dan Kepala Staf Korem, Letnan Kolonel Supadi, serta di bawah mereka, 13 Komandan Kodim, 62 Komandan Koramil, dan 442 Babinsa di tingkat desa. Di dalam rantai komando teritorial ini, para perwira komandan di setiap tingkat bertanggung jawab langsung atas tindakan para perwira dan prajurit yang berada di tingkat lebih rendah. Seperti yang sudah diperkirakan, ada variasi di dalam wewenang efektif sejumlah komandan, dan pertanyaan telah dikemukakan mengenai wewenang Jenderal Wiranto terhadap sejumlah bawahannya. Namun, secara luas rantai komando teritorial resmi ini mencerminkan hubungan atasan-bawahan yang nyata.

Sebagian besar kesatuan TNI lain yang ditugaskan di Timor-Leste pada 1999—seperti Batalion Infanteri 744 dan 745 yang berpangkalan tetap di sana, dan berbagai batalion tempur yang dikirim bertugas di sana dalam waktu tertentu—juga beroperasi di dalam rantai komando ini. Namun, ada beberapa perkecualian penting. Dua pasukan tempur elite, Kopassus dan Kostrad, langsung berada di bawah komando markas besar mereka masing-masing di Jakarta. Dengan demikian, jika kejahatan dilakukan atau diperlancar oleh para perwira atau prajurit Kopassus dan Kostrad, tanggung jawab komando bisa jadi secara formal tidak terletak pada perwira di dalam rantai komando teritorial (Kodam, Korem, Kodim, dan sebagainya) tetapi pada komandan kesatuan-kesatuan tersebut, seperti komandan Kopassus di Timor-Leste Letnan Kolonel Yayat Sudrajat, pada komandan-komandan tertinggi mereka di Jakarta, yaitu Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal Syahrir dan Panglima Kostrad Letnan Jenderal Djamari Chaniago, dan akhirnya Jenderal Wiranto. Status dari kesatuan-kesatuan yang dikelompokkan di dalam Sektor Tempur TNI A dan B di Timor-Leste kurang jelas. Namun sebagai perwira Kopassus, para komandan Sektor tampaknya beroperasi di luar rantai komando teritorial normal, dan bertanggung jawab kepada komandan mereka dalam Kopassus.

Sejumlah perwira tinggi di markas besar Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia, dan BIA/BAIS agaknya juga memiliki tanggung jawab komando efektif terhadap perwira-perwira rendah dan pasukan-pasukan di Timor-Leste. Di markas besar Angkatan Darat di Jakarta para perwira kunci meliputi: Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo dan Asisten Operasinya (yang kemudian juga menjadi Penguasa Keadaan Darurat), Mayor Jenderal Kiki Syahnakri. Di markas besar Tentara Nasional Indonesia, para tokoh utamanya adalah: Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal Sugiono; Asisten Teritorial, Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin; dan Asisten Operasi, Mayor Jenderal Endriartono Sutarto. Di dalam BIA/BAIS, tokoh sentral pada 1999 adalah Kepala BIA/BAIS, Letnan Jenderal Tyasno Sudarto, Direktur 'A', Brigadir Jenderal Arifuddin, dan Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Kepala BIA sampai Januari 1999 dan sesudah itu anggota senior Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur.

Wewenang administratif atas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara formal ada di tangan Jenderal Wiranto, dalam kedudukannya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Tetapi, tanggung jawab komando operasional terletak di tangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal (Pol.)

Roesmanhadi. Di bawahnya, rantai komando Polri selanjutnya turun melalui Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur, Kolonel Timbul Silaen, ke Kepala Kepolisian yang ada di 13 kabupaten, 62 kecamatan, dan 442 desa. Brigade Mobil (Brimob) Polri dan kesatuan-kesatuan Polri lainnya yang secara khusus ditugaskan di Timor-Leste untuk Konsultasi Rakyat berada di bawah komando Kepala Kepolisian Daerah.*

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bagian lain laporan ini, wewenang para pejabat Polri dibatasi oleh TNI. Ini terutama dalam hal tindakan Polri terhadap prajurit TNI dan milisi. Para pejabat Polri yang berusaha menghentikan kekerasan TNI atau milisi kemudian menjadi sasaran pembalasan, dan sebagian dari mereka dibunuh. Walaupun demikian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Kepolisian Resor memegang wewenang efektif atas polisi bawahan mereka masing-masing dan, dalam beberapa kasus, memegang pula wewenang efektif atas kelompok-kelompok milisi.†

Jalur wewenang di dalam aparat pemerintah sipil di Timor-Leste serupa, bercampur baur juga. Wewenang Gubernur, Abílio Osório Soares, 13 bupati, dan ratusan pejabat pemerintah sipil yang lebih rendah juga dibatasi oleh TNI. Walaupun demikian, gubernur dan bupati juga punya kendali nyata terhadap bawahannya, dan beberapa bahkan memegang kedudukan dengan wewenang tertentu dalam kelompok-kelompok milisi. Dengan demikian, walaupun gubernur dan bupati bukan merupakan tokoh paling kuat di dalam struktur kekuasaan, mereka memiliki wewenang terhadap bawahan mereka.

Di tingkat nasional, beberapa Menteri Kabinet terlibat di dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintah tentang Timor-Leste, dan memiliki wewenang efektif atas beberapa kelompok pro-Indonesia. Mereka mencakup: Menteri Transmigrasi dan Pemukiman, Letnan Jenderal (Purn.) Hendropriyono; Menteri Penerangan, Mayor Jenderal (Purn.) Yunus Yosfiah; dan Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung. Di antara mereka, Letnan Jenderal Feisal Tanjung sudah pasti memiliki wewenang terbesar, baik secara formal maupun informal. Dalam kedudukannya sebagai Menteri Koordinator, Tanjung secara efektif membentuk dan mengawasi pelaksanaan strategi politik tentang Timor-Leste. Sebagai menteri yang bertanggung jawab atas Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur, ia juga berada di puncak jaringan para perwira dan pejabat, yang mencakup Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, yang diyakini mengendalikan kelompok-kelompok milisi Timor-Leste.‡

* Satu-satunya perkecualian terhadapnya terjadi ketika pasukan Brimob secara resmi ditempatkan di bawah komando (BKO) TNI, yang dalam hal ini tanggung jawab komando keseluruhan dialihkan kepada seorang perwira TNI.

† Para pejabat Polri yang memiliki wewenang nyata terhadap kelompok-kelompok milisi meliputi: Kepala Kepolisian Daerah, Kolonel Timbul Silaen dan para Kepala Kepolisian Resor di Kabupaten Ainaro, Bobonaro, Covalima, Dili, Liquiçá (Letnan Kolonel Adios Salova), dan Oecussi.

‡ Bersaksi di pengadilan terhadap dirinya di Jakarta, mantan Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur Kolonel Timbul Silaen mengatakan bahwa Letnan Jenderal Tanjung yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban untuk kekerasan pada 1999. "Yang bertanggung jawab untuk bidang keamanan di tingkat nasional adalah Feisal Tanjung dan Wiranto. Saya hanya perwira lapangan …" Dikutip dalam *Jakarta Post*, 25 April 2002.

Rantai komando militer, kepolisian, dan pemerintah sipil ini berlaku selama sebagian besar 1999. Namun, rantai komando ini mengalami dua perubahan penting segera setelah periode pemungutan suara. Pertama, pada 4 September 1999, TNI mengambil komando atas seluruh operasi keamanan di Timor-Leste, dan menurunkan Polri dan pemerintah sipil pada peran pendukung.[*] Pengaturan baru ini dilembagakan di bawah satu struktur komando yang diberi nama "Ko-ops Nusra" (Komando Operasi TNI Nusa Tenggara) di bawah komando Mayor Jenderal Damiri.[†]

Perubahan kedua terjadi tepat tengah malam 7 September 1999, ketika Keadaan Darurat secara resmi diumumkan di Timor-Leste.[‡] Sejak itu, sampai dengan akhir September 1999 ketika Keadaan Darurat dicabut, berlaku satu rantai komando yang sangat berbeda. Selama periode tersebut semua operasi militer, kepolisian, dan pemerintah sipil di Timor-Leste secara resmi berada di bawah kendali Penguasa Darurat Militer, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, yang bertanggung jawab kepada Jenderal Wiranto dan, menurut teorinya, kepada Presiden Habibie sebagai Panglima Tertinggi.[§]

Dengan begitu, pada prinsipnya bisa ditentukan dengan ketepatan tertentu perwira dan pejabat yang mana yang memikul tanggung jawab komando keseluruhan atas tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan bawahan mereka pada waktu tertentu dalam 1999. Sebagai contoh, tanggung jawab untuk kejahatan yang dilakukan sebelum 4 September 1999 ada di tangan TNI, dan dalam beberapa kasus di tangan Polri dan pejabat sipil, atau gabungan dari ketiganya. Tanggung jawab komando untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam jangka waktu 4-7 September 1999 ada di tangan para perwira TNI dalam rantai komando normal, tetapi bukan pada pejabat Polri atau pemerintah sipil. Tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan setelah pukul 00.00 pada 7 September secara resmi ada di tangan para perwira TNI, dan khususnya Penguasa Darurat Militer Mayor Jenderal Kiki Syahnakri.

Namun dalam praktiknya, penetapan tanggung jawab komando selama masa ini agak lebih rumit, terutama karena mereka yang memegang jabatan resmi tidak selalu memegang komando efektif atas para bawahan mereka.

---

* Jenderal Wiranto bersaksi bahwa perubahan terjadi pada 5 September 1999, tetapi dokumen-dokumen waktu itu menyiratkan bahwa perubahan terjadi pada 4 September. Lihat: Telegram rahasia kepada Kepala Staf Umum TNI (No. B/01/IX/1999), 4 September 1999, ditandatangani oleh Mayor Jenderal Damiri sebagai "Panglima Komando Operasi TNI Nusra" (Koleksi Yayasan HAK, Doc #47).

† Bersaksi di pengadilan terhadap Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur Kolonel Timbul Silaen, Jenderal Wiranto menjelaskan bahwa keputusan itu diambil di markas besar TNI karena dinilai bahwa Polri tidak akan mampu mengendalikan keadaan. Lihat *Jakarta Post*, 9 April 2002.

‡ Keputusan Presiden memberlakukan Keadaan Darurat itu bertanggal 6 September 1999. "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999, tentang Keadaan Darurat Militer di Timtim."

§ Wewenang Penguasa Darurat Militer dinyatakan dalam satu surat perintah yang dikeluarkan oleh Jenderal Wiranto bertanggal 20 September 1999. Lihat: Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima TNI, "Surat Keputusan Nomor Skep/821/P/IX/1999, tentang Ketentuan Penggunaan Wewenang Penguasa Darurat Militer Daerah Timor Timur" (Koleksi HRU, Doc. TNI #10).

Masalah ini paling jelas dalam kasus Penguasa Darurat Militer, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri. Walaupun pengangkatan resminya menjadi Penguasa Darurat Militer berlaku mulai pukul 00.00 tanggal 7 September, namun ia tidak memegang komando efektif sampai beberapa hari kemudian, mungkin sampai malam 9 September. Sampai dengan saat itu tanggung jawab komando secara efektif berada di tangan Mayor Jenderal Adam Damiri dalam kedudukannya sebagai Panglima Ko-ops Nusra. Ini tidak berarti bahwa Syahnakri lepas dari masalah. Sebaliknya, sebagai Penguasa Darurat Militer ia jelas mengemban tanggung jawab komando untuk banyak kejahatan yang dilakukan oleh pasukan TNI, Polri, dan milisi setelah 9 September. Lebih jauh, ia kemungkinan juga mengemban tanggung jawab individual dan komando untuk perannya di dalam menggalang dan mendukung milisi jauh sebelum pemberlakuan Keadaan Darurat.

Kesulitan yang agak lain berpengaruh pada penilaian tentang kesalahan sedikitnya dua perwira lain TNI: Jenderal Wiranto dan Kolonel Noer Muis. Sebagaimana telah dikemukakan di bagian lain laporan ini, ada pendapat bahwa Wiranto dan Muis tidak punya kontrol efektif terhadap setidaknya beberapa perwira dan prajurit yang secara resmi berada di bawah komando mereka, khususnya dalam periode segera setelah pemungutan suara. Jika memang demikian, tanggung jawab mereka untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bawahan mereka menjadi terbuka untuk dipertanyakan. Akan tetapi, jika tindakan-tindakan yang disebutkan itu dipandang sebagai kelanjutan dari kebijakan yang telah lama ada yang melanggar hukum internasional, dan yang mengenainya perwira-perwira itu memikul tanggung jawab, kasus untuk pertanggungjawaban mereka akan menjadi lebih kuat lagi. Argumen seperti itu bisa berlaku untuk Jenderal Wiranto.

Kasus-kasus ini mengingatkan bahwa wewenang komando efektif tidak jelas dengan sendirinya begitu saja, tetapi harus dibuktikan. Hal yang sama berlaku bagi klaim mengenai <u>ketiadaan</u> wewenang efektif. Klaim semacam itu telah digunakan, secara tidak jujur, sebagai satu strategi pembelaan hukum oleh beberapa perwira TNI dan Polri yang didakwa dan diadili di pengadilan Indonesia. Misalnya, dalam pengadilan terhadap dirinya pada Juli 2002, Mayor Jenderal Adam Damiri menolak semua dakwaan terhadap dirinya karena ia "tidak berada di lapangan" pada saat kejadian yang dipersoalkan.[*] Penolakannya akan tanggung jawab komando didukung oleh Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, yang memberikan kesaksian bahwa Damiri tidak memiliki "komando efektif" atas pasukan-pasukan di lapangan, dan oleh karena itu "tidak dapat diadili untuk sesuatu yang dilakukan oleh prajurit TNI di Timor Timur."[†]

Pengakuan-pengakuan itu sungguh tidak benar, terutama paling jelas untuk hari-hari kritis awal September ketika Damiri menjadi Panglima Ko-ops Nusra dan kenyataannya berada di lapangan di Timor-Leste.[‡] Lebih jauh lagi pengakuan-pengakuan itu

* *Jakarta Post*, 11 Juli 2002.

† *Suara Timor Lorosae*, 12 September 2002.

‡ Kepala UNAMET, Ian Martin, menemui Mayor Jenderal Damiri di Dili pada sedikitnya dua kesempatan dalam periode tersebut, pada tanggal 2 dan 8 September 1999. Komunikasi pribadi, 4 Juni 2003.

bertentangan dengan pernyataan berulang-ulang dari pihak berwenang Indonesia selama 1999 bahwa pasukan TNI sangat disiplin dan bahwa pihak berwenang sepenuhnya mengendalikan keadaan keamanan.* Seperti yang dicatat oleh Komisi Penyelidik Internasional di Timor Leste dalam laporannya pada Januari 2000:

> *"Sepanjang [1999] Pemerintah … memberikan jaminan berulang kali kepada PBB dan rakyat Timor-Leste bahwa pemerintah akan mengambil tindakan-tindakan untuk menjamin keamanan dan memelihara hukum dan ketertiban. Tidak sekalipun Pemerintah Indonesia mengungkapkan ketidakmampuannya untuk melakukan hal tersebut atau keinginannya untuk menyerahkan tanggung jawab ini."*†

Di luar persoalan wewenang formal dan efektif ini, penentuan tanggung jawab komando untuk kejahatan terhadap umat manusia terletak pada dua kriteria lain: apakah seorang perwira atasan mengetahui atau punya alasan untuk mengetahui kejahatan yang dipersoalkan, dan apakah perwira atasan itu melakukan tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk mencegah kejahatan yang terjadi dan menghukum para pelakunya. Dalam bahasa Regulasi UNTAET No. 15/2000, seorang komandan atau atasan dapat dianggap bertanggung jawab untuk tindak pidana yang dilakukan seorang bawahan hanya jika ia "mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa bawahan tersebut akan atau telah melakukan tindakan itu, dan atasan itu gagal mengambil tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk mencegah tindakan itu atau menghukum pelakunya."‡

"Mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui"

Apakah para perwira dan pejabat dalam rantai komando mengetahui, atau memiliki alasan untuk mengetahui, akan keterlibatan bawahannya dalam kekerasan yang luas dan sistematis pada 1999? Jawabannya adalah bahwa, tanpa keraguan, para komandan penting punya alasan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Lebih lanjut, dalam beberapa kasus tertentu bisa dibuktikan bahwa mereka mengetahuinya.§

---

* Misalnya, ketika ditanya pada awal 1999 apakah ia bisa memercayai semua bagian angkatan bersenjata Indonesia, Menteri Luar Negeri Ali Alatas menjawab: "Ya, angkatan bersenjata kami sungguh sangat berdisiplin." Lihat ABC, *Four Corners*, "A License to Kill," 15 Maret 1999, transkrip, halaman 14.

† United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, "Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary General," Januari 2000, paragraf 64.

‡ UNTAET Regulation No. 2000/15 (6 Juni 2000) "On the Establishment of Panels with Exclusive Jurisdiction Over Serious Criminal Offences."

§ Indikator-indikator yang ditunjukkan oleh Komite Pakar PBB mengenai Bekas Yugoslavia di dalam menentukan apakah seorang perwira tinggi mengetahui kejahatan yang dilakukan adalah: jumlah, jenis, dan lingkup dari tindakan-tindakan ilegal; waktu terjadinya tindakan-tindakan ilegal itu; logistik yang digunakan; luasnya kejadian dari tindakan-tindakan tersebut; lokasi geografis dari tindakan-tindakan tersebut; *modus operandi* dari tindakan-tindakan ilegal yang sama; perwira dan staf yang terlibat; dan tempat keberadaan komandan pada saat kejadian.

Kasus umum bahwa para perwira dan pejabat penting memiliki alasan untuk mengetahui kejahatan yang dilakukan dikemukakan dalam surat dakwaan Wakil Jaksa Agung yang dikeluarkan pada Februari 2003 terhadap Jenderal Wiranto dan lain-lain. Khusus mengenai Jenderal Wiranto, surat dakwaan itu menyebutkan:

> "211. Selama tahun 1998 dan 1999 WIRANTO sering melakukan perjalanan ke Timor Leste. Selama kunjungan tersebut dia bertemu dengan para tokoh masyarakat Timor Leste, anggota pers dan pejabat yang mewakili masyarakat internasional, termasuk Pejabat Hubungan Militer dan pejabat lain dari Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Leste [UNAMET].
>
> 212. Pada pertemuan-pertemuan ini dia berulang kali diberitahu akan tindak kekerasan dan kejahatan lain yang dilakukan oleh TNI dan kelompok milisi di Timor Leste. Pada pertemuan ini terdapat permintaan agar dia mengendalikan TNI dan kelompok-kelompok milisi yang melakukan kejahatan tersebut."*

Surat dakwaan tersebut juga membuat tuduhan serupa terhadap perwira-perwira TNI yang lain: Zacky Anwar Makarim, Kiki Syahnakri, Adam Damiri, Tono Suratman, Noer Muis, dan Yayat Sudrajat. Lebih lanjut, karena struktur militer, kepolisian, dan pemerintah sipil yang diuraikan secara ringkas dalam bagian sebelumnya, cukup alasan untuk menganggap bahwa pengetahuan mengenai kejahatan yang dilakukan itu tidak hanya ada pada orang-orang ini, tetapi mencakup banyak dari orang-orang yang menduduki posisi-posisi komando penting. Pernyataan tersebut didukung oleh butir-butir fakta berikut ini, yang semuanya telah diuraikan dalam bagian lain laporan ini.

Antara Juni dan Oktober 1999, para pejabat senior UNAMET secara teratur memberikan penjelasan tertulis maupun lisan mengenai pola-pola umum, dan kejadian-kejadian tertentu, kekerasan kepada para pejabat tingkat tinggi TNI, Polri, dan pemerintah sipil. Penjelasan-penjelasan ini berulang-kali mempertegas bukti mengenai hubungan erat antara TNI dan milisi.† Penjelasan dan pengaduan juga secara rutin disampaikan kepada pejabat yang berwenang Indonesia oleh

---

* Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Surat Dakwaan Wiranto dan lain-lain, 22 Februari 2003.

† Penjelasan tertulis yang diberikan oleh pejabat-pejabat UNAMET mencakup: dua berkas bukti tentang penyalahgunaan dana pemerintah dan penggunaan desakan jabatan untuk mendukung kampanye pro-otonomi, disampaikan kepada pemerintah Indonesia pada 16 Juni dan 14 Juli 1999; laporan terperinci tentang insiden Maliana pada 29 Juni, dan insiden Liquiçá pada 4 Juli, diserahkan kepada pemerintah pada pertengahan Juli 1999; surat bertanggal 5 Agustus dari kepala misi UNAMET Ian Martin kepada Ketua Satuan Tugas Tarmidzi yang mengungkapkan keprihatinan yang mendalam tentang serangan terhadap staf UNAMET, dan tentang kemungkinan perilaku kriminal dari para pejabat pemerintah daerah di Bobonaro; sepucuk surat bertanggal 19 Agustus, dari Ian Martin kepada Tarmidzi, dan sepucuk surat lain dari Kepala Perwira Penghubung Militer UNAMET, Brigadir Jenderal Rezaq kepada Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, yang menguraikan keterlibatan para perwira TNI yang disebutkan namanya dalam mendukung milisi, dan meminta pemindahan para perwira tersebut. Komunikasi pribadi, Ian Martin, 4 Juni 2003.

perwakilan berbagai pemerintah, organisasi-organisasi internasional seperti Amnesty Internasional dan Human Rights Watch, serta organisasi-organisasi nonpemerintah setempat seperti Fokupers dan Yayasan HAK. Dugaan dan informasi terperinci tentang kekerasan juga berlimpah dalam media Timor-Leste, Indonesia, dan internasional.

Selain informasi yang mereka terima dari sumber-sumber luar semacam itu, para pejabat tinggi Indonesia sering menerima laporan lisan maupun tertulis tentang keadaan di Timor-Leste melalui hierarki komandonya sendiri. Seperti yang dilaporkan dikatakan Jenderal Wiranto kepada para penyelidik Indonesia pada Desember 1999: "Tentu, saya menerima laporan secara teratur dan saya mempelajari laporan-laporan tersebut, dan pada saat-saat kritis laporan itu diteruskan kepada Presiden."[*] Walaupun laporan-laporan internal ini kebanyakan tidak menyinggung persoalan keterlibatan langsung TNI dengan milisi, beberapa di antaranya menyebutkan adanya hubungan, dan menguraikan kekerasan secara terperinci.[†]

Singkatnya, jelas bahwa banyak dari mereka yang berada dalam posisi tanggung jawab komando, sampai pada dan termasuk pejabat-pejabat tertinggi di negeri itu mengetahui, atau punya alasan untuk mengetahui, mengenai kekerasan kriminal di Timor-Leste dan mengenai keterlibatan bawahan mereka dalam kekerasan tersebut. Kesimpulan ini kuat mendukung tuduhan yang dibuat dalam surat dakwaan terhadap Wiranto dan enam perwira TNI lainnya yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Agung Timor-Leste pada Februari 2003. Kesimpulan ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan—dan kemungkinan pertanggungjawaban komando bagi mereka—tidak terbatas pada tujuh perwira yang disebut dalam surat dakwaan tersebut, tetapi mencakup puluhan pejabat tinggi lainnya dari TNI, Polri, dan pemerintah sipil.

"Tindakan yang diperlukan dan mencukupi"

Karena para pejabat senior TNI, Polri, dan pemerintah sipil dalam rantai komando mengetahui, atau memiliki alasan untuk mengetahui, mengenai kekerasan,

---

* Dikutip dalam Kevin O'Rourke, *Reformasi: The Struggle for Power in Post Soeharto Indonesia*, Sydney: Allen & Unwin, 2002, halaman 352.

† Laporan-laporan itu mencakup: satu telegram rahasia TNI dari Kolonel Suratman, bertanggal 28 Januari 1999, menguraikan beberapa pembunuhan terhadap penduduk sipil yang belum lama dilakukan oleh milisi (Koleksi Yayasan HAK, Doc #7); satu telegram rahasia TNI, bertanggal 18 April 1999 menguraikan kekerasan milisi yang luas di Dili pada 17 April 1999 yang dalam kekerasan tersebut 13 orang penduduk sipil dibunuh (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16); satu telegram rahasia TNI bertanggal 21 April 1999, dari Kepala Staf Korem 164 mengenai beberapa kasus keterlibatan langsung TNI dalam pembunuhan di luar hukum, dan menyebutkan secara khusus ditemukannya dua mayat manusia di Triloka, Baucau (Koleksi Yayasan HAK Doc #48); "Laporan Garnadi" rahasia, bertanggal 3 Juli 1999 yang menyebutkan milisi sebagai 'pahlawan integrasi' (Koleksi Yayasan HAK, Doc #35); satu telegram rahasia TNI bertanggal 31 Agustus 1999, menguraikan pembunuhan terhadap dua orang staf UNAMET di Boboe Leten, tanggal 30 Agustus 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #42); sepucuk surat dari Jenderal Wiranto kepada Presiden Habibie, bertanggal 6 September 1999, menguraikan kekerasan dan penghancuran luas di Timor Timur, dan menyebutkan hubungan emosional yang dekat antara TNI dan milisi sebagai satu faktor yang menghambat tindakan tegas terhadap milisi (Koleksi HRU, Doc. TNI #7).

persoalan tanggung jawab komando untuk kekerasan tersebut bergantung pada apakah, dalam bahasa Regulasi UNTAET No. 15/2000, para perwira tersebut melakukan “tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk mencegah tindak kekerasan tersebut atau menghukum para pelakunya.” Jawabannya adalah bahwa, dengan sedikit perkecualian, orang-orang yang memiliki wewenang itu tidak melakukannya.* Sesungguhnya, seperti yang ditunjukkan laporan ini, para pejabat TNI dan Polri secara konsisten mendorong atau sedikitnya membiarkan tindakan-tindakan kekerasan itu dan hanya sedikit dari para pelaku yang pernah ditahan atau diadili.

Kegagalan yang sangat penting ini secara substansial memperkuat pendapat bahwa tanggung jawab komando atas kekerasan terletak di tangan para perwira TNI, dan pada tingkat yang lebih rendah di tangan para pejabat tinggi sipil dan Polri. Bukti-bukti juga sangat mendukung tuduhan di dalam surat dakwaan Wakil Jaksa Agung Timor-Leste Februari 2003 terhadap Wiranto dan lain-lain bahwa:

> “Selama tahun 1999 WIRANTO [dan terdakwa lainnya] gagal mengambil tindakan yang diperlukan dan yang layak untuk mencegah kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya dan dia gagal mengambil tindakan yang diperlukan dan yang layak untuk menghukum para pelaku kejahatan tersebut.”†

Satu kemungkinan penjelasan tentang kegagalan para pejabat untuk menghentikan kejahatan atau menghukum para pelakunya adalah karena mereka tidak memiliki kemampuan material untuk melakukannya. Seperti yang sudah dikemukakan, hal itu kemungkinan yang terjadi pada sebagian besar pejabat sipil di Timor-Leste karena, dengan beberapa perkecualian, wewenang efektif mereka terhadap milisi dan para prajurit TNI sangat dibatasi oleh TNI. Walaupun demikian, gubernur dan 13 bupati memiliki kemampuan material dan tanggung jawab untuk menghentikan dan menghukum kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bawahan sipil mereka. Hal yang sama juga terjadi pada para pejabat Polri. Kemampuan mereka untuk menghentikan dan menghukum kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para prajurit TNI dan milisi dibatasi oleh subordinasi efektif Polri pada TNI. Meskipun demikian, Kepala Kepolisian Daerah dan 13 Kepala Kepolisian Resor memiliki kemampuan material untuk menghentikan dan menghukum tindakan tidak sah yang dilakukan oleh petugas-petugas polisi bawahan mereka dan, dalam beberapa kasus, oleh kelompok-kelompok milisi.

---

* Menurut pernyataan Mayor General Peter Cosgrove, Panglima INTERFET, pada akhir 1999: “Buktinya adalah bahwa berlangsung kekerasan yang luas dan tak terkendali yang dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi dan itu menunjukkan bahwa tingkat kontrol atas hukum dan ketertiban biasa [dan] kejahatan-kejahatan kekerasan yang sedang dilakukan oleh TNI, tidak memadai.” Dikutip dalam ABC, *Four Corners*, “The Vanishing,” 18 Oktober 1999, transkrip, halaman 10.

† Timor-Leste, Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Surat Dakwaan Wiranto dan lain-lain, Februari 2003, paragraf 213.

Kurangnya kemampuan material bukanlah masalah bagi sebagian besar komandan TNI. Sebaliknya, seperti yang ditunjukkan secara meyakinkan di dalam laporan ini, para perwira TNI bisa mengontrol waktu, sebaran wilayah, dan karakter kekerasan dengan ketepatan luarbiasa. Karena menggalang milisi dan menyediakan pelatihan, senjata, dukungan finansial, dan logistik bagi mereka, para pejabat TNI berada pada posisi untuk menjalankan kontrol yang kuat atas tindakan-tindakan milisi. Kontrol mereka atas para prajurit TNI, dengan sedikit perkecualian, bahkan lebih pasti lagi. Jika saja para komandan senior berniat menghentikan kekerasan selamanya dan menghukum para pelakunya, mereka dapat melakukannya tanpa kesulitan. Dalam suatu pertemuan dengan Ian Martin pada 7 Juli 1999, Jenderal Wiranto mengatakan bahwa jika Falintil bersedia menyerahkan senjata mereka kepada polisi Indonesia, ia bisa menjamin bahwa milisi akan dilucuti dalam waktu dua hari.[*]

Harus dicatat bahwa sejumlah perwira TNI melakukan tindakan yang mereka klaim ditujukan untuk menghentikan atau mengendalikan kekerasan. Misalnya, dalam beberapa kesempatan pada 1999, Kolonel Tono Suratman memerintahkan bawahannya untuk meningkatkan pengawasan terhadap kelompok-kelompok milisi, melucuti senjata mereka, dan menghentikan operasi bersama TNI-milisi.[†] Pada pertengahan Agustus 1999, rupanya untuk menanggapi tekanan internasional, Jenderal Wiranto mengganti Komandan Korem Kolonel Tono Suratman dengan Kolonel Noer Muis, dan mengganti Komandan Kodim Bobonaro dan Covalima.[‡] Menurut laporan-laporan, Presiden Habibie maupun Jenderal Wiranto secara berkala menegur perwira-perwira TNI yang bertugas di Timor-Leste karena gagal mengendalikan milisi.[§] Presiden Habibie memberlakukan Keadaan Darurat, atas saran Jenderal Wiranto, sebagai langkah untuk memulihkan hukum dan ketertiban. Terakhir, menurut sejumlah kesaksian, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri dan Letnan Kolonel Noer Muis, berusaha, namun tidak berhasil, untuk mengendalikan kekerasan selama masa Keadaan Darurat.

Jika dilihat begitu saja, berbagai inisiatif ini menunjukkan bahwa ada usaha yang dilakukan oleh sejumlah komandan—Kolonel Tono Suratman, Jenderal Wiranto, Presiden Habibie, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, dan Kolonel Noer Muis—untuk membendung tindakan milisi, mengendalikan TNI, dan membatasi kekerasan. Klaim ini memerlukan pembahasan lebih lanjut, baik demi bersikap adil kepada para pejabat yang terlibat, maupun untuk membantu memperjelas masalah tanggung jawab komando.

---

* Pertemuan tersebut dilangsungkan di Jakarta. Komunikasi pribadi, Ian Martin, 4 Juni 2003.

† Untuk perinciannya, lihat Bab 4 dan 7 laporan ini.

‡ "Indonesia Changes Military Command in East Timor," AFP, 13 Agustus 1999. Dijelaskan kepada UNAMET bahwa perubahan-perubahan ini merupakan bagian dari satu usaha untuk menjalankan kontrol pusat terhadap militer dan milisi di Timor Timur. Komunikasi pribadi, Ian Martin, 20 November 2000.

§ *Peristiwa*, 21 Juli 1999.

Harus dikatakan bahwa sebagian dari inisiatif yang disebutkan jelas bukan merupakan tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk menghentikan kejahatan atau menghukum para pelaku. Sebagaimana yang telah diperinci dalam bagian lain laporan ini, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kolonel Tono Suratman tidak lebih daripada gerakan taktis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan politik jangka pendek, baik dengan menyembunyikan sifat hubungan milisi-TNI dari pengamatan delegasi luar negeri, atau dengan menjawab tekanan internasional yang semakin meningkat agar diambil tindakan, tetapi tanpa menghentikan secara efektif kekerasan yang sudah direncanakan. Lebih jauh, tidak ada bukti bahwa Kolonel Tono Suratman pernah melakukan satu usaha yang sungguh-sungguh untuk menghukum para pelaku kejahatan.

Ada lebih banyak debat tentang inisiatif-inisiatif lain yang dicatat di atas, termasuk pemindahan beberapa perwira TNI pada Agustus 1999, keputusan untuk memberlakukan Keadaan Darurat, dan upaya-upaya yang disebutkan dilakukan untuk mengendalikan kekerasan selama masa Keadaan Darurat. Sebagian pengamat beranggapan bahwa tindakan-tindakan ini tak lebih daripada sekadar tabir asap yang dimaksudkan untuk menipu atau mengalihkan pendapat internasional. Untuk mendukung pandangan tersebut, bisa diingat bahwa tindakan-tindakan tersebut samasekali tidak efektif dan, dalam hal Keadaan Darurat, bersamaan dengan berlangsungnya pemburukan—bukannya perbaikan—keamanan. Lagi pula, seperti halnya usaha Kolonel Tono Suratman, inisiatif-inisiatif lain ini tidak mencakup penghukuman terhadap orang-orang yang diketahui sebagai pelaku kejahatan.

Pengamat-pengamat lain menyatakan bahwa usaha menghentikan kekerasan ini memang sungguh-sungguh, tetapi gagal karena perlawanan yang kuat dari para anggota milisi serta prajurit dan perwira TNI. Jika penafsiran ini benar—dan ini masih tetap merupakan satu persoalan yang terbuka—maka ini akan cenderung membatasi tanggung jawab pada beberapa perwira tertentu untuk sebagian kejahatan yang dilakukan oleh para bawahan mereka. Namun, penafsiran ini tidak akan memengaruhi kesimpulan umum di sini bahwa perwira-perwira tinggi TNI gagal melakukan tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk menghentikan kejahatan terhadap umat manusia atau menghukum para pelakunya.

Singkatnya, bukti yang dikemukakan dalam laporan ini menunjukkan bahwa sebagian besar, walaupun mungkin tidak semua, perwira TNI yang berada di dalam rantai komando, sebagaimana juga sebagian pejabat tinggi Polri dan pemerintah sipil, mengetahui, atau memiliki alasan untuk mengetahui kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bawahan mereka, dan memiliki kemampuan material untuk menghentikan kejahatan-kejahatan tersebut dan menghukum para pelakunya, namun gagal untuk melakukan tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk itu. Karena itu, bukti-bukti bukan hanya dengan kuat mendukung tuduhan yang dibuat dalam surat dakwaan yang dibuat di Timor-Leste pada Februari 2003 terhadap Wiranto dan lain-lain, namun juga menunjukkan bahwa tanggung jawab komando tidak hanya terbatas pada orang-orang yang namanya tercantum dalam surat dakwaan tersebut.

Menghadapi meningkatnya bukti mengenai keterlibatan TNI di dalam kekerasan tersebut, pada akhir 1999 Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas menyatakan bahwa, di luar milisi, tanggung jawab untuk kekerasan besar-besaran di Timor-Leste mungkin terletak di tangan 'oknum-oknum' tertentu di dalam TNI. "Kami mengakui", katanya, "bahwa ada oknum-oknum …. [yang] telah mendukung sebagian tindakan milisi."* Bukti-bukti yang dikemukakan dalam laporan ini menyangkal klaim bahwa keterlibatan pejabat hanya terbatas pada 'oknum-oknum' itu. Sebaliknya, bukti-bukti menunjukkan bahwa yang bertanggung jawab mencakup banyak pejabat tertinggi militer, kepolisian, dan pemerintah sipil di Indonesia.

Dari perspektif hukum internasional dan nasional, ada dua jenis pihak yang bertanggung jawab yang bisa diidentifikasi. Pertama, mereka yang mengemban 'tanggung jawab pidana individual' baik karena secara langsung melakukan kejahatan ataupun karena membantu orang lain melakukannya. Kedua, mereka yang mengemban 'tanggung jawab komando' karena gagal menghentikan atau menghukum kejahatan yang dilakukan oleh bawahan mereka. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang sudah diterima luas ini, laporan ini mengidentifikasikan sekitar 80 pejabat TNI, Polri, dan pemerintah sipil yang kemungkinan bertanggung jawab atas kejahatan terhadap umat manusia, dan karena itu harus menjadi fokus penyelidikan pidana lanjutan.

Tanggung jawab internasional

Tanggung jawab para pejabat Indonesia sesungguhnya hanya sebagian dari cerita. Status politik Timor-Leste menjadi subyek perselisihan internasional selama 24 tahun, dan kekerasan tahun 1999 terjadi dalam konteks satu operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditujukan untuk penyelesaian perselisihan tersebut. Karena itu setiap pembahasan tentang pertanggungjawaban atas kekerasan tersebut harus mengkaji peran masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara anggotanya yang paling kuat.

Bab ini mengemukakan bahwa, terlepas dari bantuan mereka untuk mengakhiri kekerasan, anggota-anggota masyarakat internasional yang besar kekuatannya, melalui tindakan maupun kelalaian mereka, secara politik dan moral bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi pada 1999. Bab ini juga mengemukakan bahwa PBB memiliki tanggung jawab khusus untuk menjamin bahwa para pelaku kekerasan di Timor-Leste dihadapkan ke pengadilan. Bab ini menyimpulkan bahwa suatu mahkamah pengadilan pidana internasional untuk Timor-Leste harus didirikan pada kesempatan paling awal dan bahwa Dewan Keamanan serta Sekretaris Jenderal PBB harus memelopori tindakan ini.

* Dikutip dalam ABC, *Four Corners*, "The Vanishing," 18 Oktober 1999, transkrip, halaman 10.

Tanggung jawab internasional

Pejabat-pejabat Indonesia berusaha menyalahkan UNAMET untuk terjadinya kekerasan di Timor-Leste, khususnya dalam periode setelah pemungutan suara. Kritik biasanya berpusat pada tuduhan bahwa UNAMET bersikap berat sebelah dan curang dalam penyelenggaraan referendum. Bersaksi dalam pengadilan terhadap mantan Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur Kolonel Timbul Silaen, Jenderal Wiranto misalnya mengatakan: "Ketidaknetralan UNAMET pada saat yang bersejarah tersebut memancing kemarahan di kalangan rakyat Timor-Leste yang merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil…"[*] Tuduhan serupa juga dibuat oleh banyak pejabat militer dan pemerintah yang lain.[†]

Sebagian pejabat juga menuduh UNAMET bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan karena mengambil alih kendali keamanan di Timor-Leste dari TNI dan Polri. Pada September 2002, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim bersaksi di satu pengadilan Indonesia bahwa TNI tidak bisa memelihara keamanan karena "UNAMET harus diberitahu tentang semua pergerakan TNI."[‡] Bersaksi di depan pengadilan terhadap mantan Gubernur Abílio Soares, Mayor Jenderal Adam Damiri mempersalahkan UNAMET bahkan dengan lebih langsung. Ia dilaporkan mengatakan kepada pengadilan:

> "Menurut resolusi PBB, tanggung jawab keamanan sebelum, selama, dan setelah pemungutan suara berada di tangan Polisi Sipil PBB … TNI telah 'disingkirkan' dari urusan ini."[§]

Pernyataan ini sangat jelas salah. Kesepakatan 5 Mei dengan sangat jelas menyatakan bahwa tanggung jawab keamanan berada di tangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sama halnya, pernyataan yang sering diulang-ulang mengenai UNAMET yang berat sebelah tidak pernah didukung dengan bukti. Sebenarnya, ketika pernyataan itu diajukan kepada Komisi Pemilihan Independen, badan tersebut menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut tidak berdasar.

---

* Dikutip dalam "Jakarta Troops Faced 'Mission Impossible' in E. Timor: Wiranto," *Jakarta Post*, 9 April 1999.

† Dalam Desember 1999, misalnya, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim mengatakan kepada para penyelidik Indonesia bahwa UNAMET telah memasok senjata kepada Falintil dan bahwa kecurangan UNAMET mengakibatkan kekerasan setelah pemungutan suara. Lihat "Persiapan Pemanggilan KPP HAM Timtim," *Kompas* 9 Desember 1999. Pada 2000, Kolonel Noer Muis mengeluarkan 'buku putih' yang menyatakan bahwa kecurangan UNAMET yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Lihat "TNI 'White Paper' Tells of Referendum Fraud," *Suara Timor Lorosae*, 10 Oktober 2000.

‡ Dikutip dalam *Suara Timor Lorosae*, 12 September 2002.

§ Dikutip dalam *Jakarta Post*, 13 Mei 2002. Dalam satu telegram kepada kantor pusat PBB di New York bertanggal 13 Mei 2002, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB di Timor Leste Sergio Vieira de Mello menyebut tuduhan Damiri sebagai "suatu penghinaan." Pada kesempatan yang terpisah, Mayor Jenderal Damiri mengeluh bahwa "UNAMET yang membuat Jakarta mengganti komandan Kodim Suai Letnan Kolonel Achmad Mas Agus untuk alasan yang tidak jelas, sehingga saya menunjuk [Letnan Kolonel] Liliek [Koeshadianto] untuk mengisi kekosongan. UNAMET juga melarang militer untuk berpatroli." Dikutip dalam *Jakarta Post*, 20 Juni 2002.

Namun, jika tuduhan tertentu dari Indonesia tentang tanggung jawab UNAMET dalam kekerasan 1999 tidak meyakinkan, tetap ada dasar untuk mengatakan bahwa masyarakat internasional juga mengemban tanggung jawab. Argumen utama dalam hal ini adalah bahwa anggota-anggota masyarakat internasional yang besar kekuatannya telah memudahkan terjadinya kekerasan, baik karena persetujuan diam-diam mereka yang sudah lama pada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Indonesia di Timor-Leste sejak 1975, maupun karena kegagalan mereka untuk mengambil langkah yang diperlukan dan mencukupi untuk menghentikan kekerasan 1999 yang telah banyak diperkirakan sebelumnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memang mengutuk invasi Indonesia pada 1975 melalui serangkaian resolusi. Tetapi selama 24 tahun pendudukan, tidak ada tindakan nyata yang dilakukan untuk memaksa Indonesia mundur dari Timor-Leste atau untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang luas oleh pasukan Indonesia dan kakitangannya. Sebaliknya negara-negara yang berada pada posisi paling kuat untuk melakukan sesuatu, seperti Amerika Serikat dan Australia, nyatanya memperlancar pendudukan dan kekerasan. Sampai dengan 1999, perilaku dari negara-negara kuat itu ditandai oleh perpaduan antara dukungan terbuka, tidak bertindak, dan bungkam, yang tujuan utamanya jelas untuk memelihara hubungan bersahabat dengan pemerintah Indonesia dan TNI.

Sikap negara-negara kuat tersebut semacam itu lebih daripada sekadar fakta sejarah yang patut disesali. Sikap itu membuat negara-negara tersebut terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama pendudukan Indonesia. Hal yang sama bisa dikatakan mengenai tindakan sejumlah badan internasional, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), serta perusahaan-perusahaan yang telah menjual senjata kepada Indonesia. Setidaknya, negara-negara, badan-badan, dan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak turut menyumbang dalam pelaksanaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste. Pada umumnya mereka tidak berbuat demikian.

Persoalan persetujuan diam-diam dan keterlibatan masyarakat internasional dipertegas oleh posisi yang diambil oleh negara-negara penting mengenai masalah keamanan untuk Konsultasi Rakyat 1999. Walaupun kekerasan milisi meningkat awal 1999 dan ada perkiraan yang patut dipercaya bahwa keadaan akan semakin buruk, negara-negara yang paling berpengaruh tidak melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk memastikan adanya pengaturan keamanan yang efektif untuk referendum. Sebaliknya, Kesepakatan 5 Mei menunjuk aparat keamanan Indonesia sebagai pemegang tanggung jawab tunggal untuk memelihara hukum dan ketertiban. Bahkan pandangan yang sekilas pada sejarah angkatan bersenjata Indonesia dan perilaku mereka di Timor-Leste jelas menunjukkan betapa berbahayanya pendekatan ini.

Sebagian orang yang mengetahui perundingan-perundingan pada awal 1999 menyatakan bahwa dalam perundingan-perundingan tersebut diajukan usulan kuat tentang kehadiran pasukan PBB, tetapi semua ini dengan tegas ditolak oleh para pejabat Indonesia. Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB untuk Timor-Leste, Duta

Besar Jamsheed Marker, misalnya, menulis bahwa saran mengenai kehadiran pasukan PBB ditolak dengan tegas oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas pada satu pertemuan pada Maret 1999.* Sama halnya, ketika Perdana Menteri Australia John Howard mengangkat kemungkinan pasukan penjaga perdamaian PBB pada satu pertemuan dengan Presiden Habibie akhir April 1999, Habibie dikatakan menjadi "meledak", menolak samasekali penempatan pasukan asing di wilayah 'Indonesia'.†

Namun ada alasan untuk meragukan bahwa persoalan pasukan penjaga perdamaian PBB diperdebatkan begitu sengit seperti yang telah diklaim oleh para peserta itu. Dalam satu jumpa pers di New York, April 1999, yang mengumumkan telah dicapainya satu kesepakatan, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas mengatakan kepada para wartawan bahwa "dalam pembicaraan-pembicaraan kami, pasukan penjaga perdamaian PBB tidak diangkat sebagai masalah."‡ Dalam jumpa pers yang sama, Duta Besar Marker menjelaskan keputusan untuk tidak mendorong pengiriman pasukan penjaga perdamaian, dengan mengatakan: "Kami tidak menganggap perlu mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, menerjunkan sejumlah besar pasukan Helm Biru ke sana. Kami tidak menganggap bahwa keadaannya menuntut demikian."§

Posisi lemah yang diambil selama perundingan tersebut jelas dipengaruhi oleh posisi sejumlah kecil negara kuat. Misalnya, Marker telah mencatat bahwa para perunding PBB menghadapi tekanan kuat dari pemerintah Amerika Serikat dan Australia agar tidak menekan terlalu keras pada masalah keamanan.¶ Sama dengan itu, seorang pejabat PBB yang mengetahui perundingan-perundingan itu telah menulis tentang keengganan mendalam dari negara-negara penting untuk mendukung pengerahan suatu pasukan militer atau polisi internasional.** Hasilnya yang patut disesali adalah bahwa argumen untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian PBB tidak pernah dibuat secara sungguh-sungguh. Seperti yang diakui kemudian oleh seorang diplomat yang bertugas di Jakarta, selama berlangsungnya perundingan "setiap orang terlalu banyak menyerah."††

* Jamsheed Marker, *East Timor: a Memoir of the Negotiations for Independence*, Jefferson, N.C.: McFarland & Company, 2003, halaman 139.

† Ini merupakan keterangan Howard mengenai pertemuan itu, seperti yang dilaporkan dalam Greenlees dan Garran, *Deliverance*, halaman 145.

‡ United Nations, Press Release SG/SM/6966, 23 April 1999.

§ United Nations, Press Release SG/SM/6966, 23 April 1999.

¶ Marker, *East Timor*, halaman 153-154. Patut dicatat bahwa sudah pada akhir Februari 1999, pejabat-pejabat tinggi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang sangat ingin menghindari membuat Pemerintah Indonesia merasa terkucil, masih tetap mencari alternatif-alternatif selain pemungutan suara langsung di Timor-Leste. Dalam keadaan itu, sulit dibayangkan bahwa para pejabat AS akan mendesak keras untuk pembentukan suatu pasukan penjaga perdamaian PBB.

** Tamrat Samuel, "East Timor: The Path to Self-Determination," dalam Chandra Lekha Sriram dan Karin Wermester (penyunting), F*rom Promise to Practice: Strengthening UN Capacities for the Prevention of Violent Conflict*, Boulder: Lynne Reiner, 2003, halaman 211-212 dan 225.

†† *Financial Times*, 7 September 1999.

Kegagalan untuk mendapatkan pengaturan keamanan yang memadai punya akibat langsung di Timor-Leste, di mana TNI dan milisi kakitangan mereka melanjutkan meneror dan membunuh para pendukung kemerdekaan. Keadaan keamanan begitu buruk sehingga segera setelah mulai masuknya PBB pada Mei 1999, muncul pertanyaan mengenai apakah tepat jika pemungutan suara tetap dilakukan. Posisi UNAMET mengenai persoalan tersebut bukan merupakan satu kesimpulan yang pasti. Dalam serangkaian penilaian yang disusun pada Juni dan Juli, para analis UNAMET berpendapat bahwa tidak satupun kriteria keamanan yang disebutkan di dalam memorandum Sekretaris Jenderal PBB awal Mei sudah dipenuhi, dan karena itu referendum hendaknya tidak dilanjutkan.

Akhirnya posisi tersebut tidak bertahan. Namun adalah keliru untuk menyimpulkan bahwa keputusan PBB melanjutkan pemungutan suara itu ceroboh seperti yang dikatakan sebagian pengkritik. Keputusan PBB itu sebagian bertolak dari ketidakpastian keadaan di lapangan dan indikasi-indikasi bahwa kekerasan mungkin masih bisa dikendalikan. Para pejabat senior UNAMET berpandangan bahwa tekanan politik yang terus-menerus mungkin meyakinkan pihak berwenang Indonesia untuk menghentikan milisi dan membiarkan pemungutan suara berlanjut dengan hanya sedikit gangguan. Keputusan untuk melanjutkan juga didukung oleh pemimpin utama perlawanan Xanana Gusmão dan banyak orang Timor-Leste lainnya. Mereka menyebutkan bahwa penundaan hanya akan menguntungkan pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan—pihak yang sama yang tidak ingin menyaksikan suatu pengungkapan bebas kehendak rakyat.

Namun, keputusan untuk terus maju sangat dipengaruhi oleh tekanan politik yang berasal dari PBB di New York dan dari ibukota berbagai negara kuat. Pada tingkat politik, posisi PBB dibatasi oleh kepentingan lima anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Posisi PBB juga diarahkan oleh kelompok lima negara yang secara khusus bersidang di New York untuk tujuan ini, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Jepang, yang secara informal dikenal sebagai Kelompok Inti (Core Group). Lima Anggota Tetap dan Kelompok Inti amat sangat ingin untuk maju dengan referendum dan enggan melakukan apapun yang mungkin bisa membuat pemerintah dan militer Indonesia gusar.[*] Di samping itu juga ada tekanan terus-menerus dari pemerintah Indonesia. Dipahami bahwa setiap pernyataan maupun resolusi Dewan Keamanan yang tidak mendapatkan dukungan dari Indonesia akan ditolak oleh Cina dan Rusia; dan sebagai akibatnya prakarsa semacam itu umumnya dihindari.

Ketika menjadi jelas bahwa pemungutan suara akan dilanjutkan, sejumlah pengamat berpandangan bahwa harus diturunkan suatu pasukan penjaga perdamaian internasional bersenjata—dan bahwa hal ini harus terjadi sebelum hari pemungutan suara. Di antara mereka yang sampai pada kesimpulan tersebut adalah satu delegasi dari Kanada. Di akhir kunjungan mereka pada 12 Agustus 1999, jurubicara delegasi

* Negara-negara anggota Dewan Keamanan dan negara-negara utama "juga sangat berkeinginan untuk tidak memberikan kesan bahwa kegiatan kekerasan sedang mengancam menggagalkan proses." Tamrat Samuel, "East Timor: Path to Self Determination," halaman 213.

tersebut mengatakan: "Kecuali Indonesia memenuhi kewajibannya, kami yakin pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Timor-Leste sesegera mungkin sangat perlu dilakukan."* Satu delegasi Kongres Amerika Serikat membuat pernyataan yang sama tegasnya pada akhir Agustus 1999.

Namun, gagasan menempatkan pasukan penjaga perdamaian sebelum pemungutan suara tidak pernah beranjak dari itu. Alasannya sederhana: gagasan tersebut aktif ditentang oleh negara-negara utama di Dewan Keamanan, terutama Amerika Serikat. Seperti yang dicatat oleh harian *New York Times* awal September 1999, "… tidak ada negara utama di Dewan Keamanan yang mendesakkan pembentukan pasukan bersenjata penjaga perdamaian. Para diplomat mengatakan bahwa Amerika Serikat, khususnya, tetap menentang tindakan semacam itu."† Ini tidak berarti bahwa Amerika Serikat dan negara-negara lainnya diam di tengah meningkatnya kekerasan. Ada banyak kritik yang dilontarkan. Pada Juni, misalnya, wakil panglima angkatan bersenjata Australia, Marsekal Udara Doug Riding, memberikan pesan yang sangat tegas kepada para pejabat tinggi TNI mengenai dukungan resmi TNI kepada milisi. Kritik lebih jauh disuarakan dalam pertemuan negara-negara donor untuk Indonesia di Paris pada akhir Juli dan sekali lagi disuarakan menjelang hari pemungutan suara akhir Agustus.‡ Tetapi tidak pernah ada pembahasan yang sungguh-sungguh mengenai pasukan penjaga perdamaian. Sebaliknya, negara-negara utama dan Dewan Keamanan PBB sebagai satu lembaga, bersikukuh pada posisi bahwa keamanan adalah tanggung jawab pemerintah Indonesia.

Ketika staf PBB atau pengamat luar bertanya atau mendesakkan penempatan pasukan penjaga perdamaian, jawabannya adalah bahwa tidak mungkin menempatkan pasukan penjaga perdamaian tanpa persetujuan Indonesia, atau dengan menyebutkan Bab VII Piagam PBB.§ Juga dikatakan, sejak sedini Juli bahwa diperlukan waktu yang terlalu lama—setidaknya tiga bulan—untuk memobilisasi pasukan semacam itu sehingga tidak ada gunanya membicarakan penempatan pada masa sebelum pemungutan suara.

Penting bahwa saat ketika Dewan Keamanan akhirnya memberikan dukungan mutlak bagi Pasukan Multi-Nasional (MNF – *Multi-National Force*) pimpinan Australia pada 15 September 1999, resolusinya (No. 1264) menyebutkan Bab VII dari Piagam PBB dan memberikan wewenang kepada MNF untuk menggunakan semua sarana yang diperlukan untuk memulihkan keamanan. Lebih lanjut,

* Pembicara adalah anggota parlemen dari New Democratic Party, Svend Robinson. Dikutip dalam AFP, 12 Agustus 1999.

† *New York Times*, 6 September 1999.

‡ Untuk kritik dan ancaman pada pertemuan Paris, lihat AFP, 27 Juli 1999. Untuk ungkapan keprihatinan di akhir Agustus, lihat *Australian Financial Review*, 19 Agustus 1999.

§ Pasal 42 dari Bab VII Piagam PBB (1945) menyatakan bahwa jika tindakan-tindakan lain terbukti tidak memadai, Dewan Keamanan "bisa mengambil tindakan dengan kekuatan udara, laut, atau darat yang diperlukan untuk memelihara atau memulihkan kedamaian dan keamanan internasional." Sebagian pembela hak asasi manusia pada waktu itu berpendapat bahwa resolusi Bab VII tidak diperlukan karena PBB tidak pernah mengakui kedaulatan Indonesia di Timor-Leste. Namun pendapat tersebut tampaknya tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh di dalam Dewan Keamanan.

terlepas dari pernyataan sebelumnya bahwa diperlukan waktu tiga bulan untuk penempatan pasukan, MNF telah ada di lapangan dalam waktu seminggu setelah resolusi Dewan Keamanan itu. Dengan kata lain, semua yang dikatakan mengenai ketidakmungkinan menempatkan pasukan penjaga perdamaian tidak sepenuhnya benar. Apa yang mencegahnya terjadi lebih cepat bukanlah suatu 'realitas politik' yang tidak dapat diubah dan bahkan juga bukan kesulitan logistik, tetapi lebih karena sangat kurangnya kemauan politik.*

Apapun alasannya, penentangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tetap dipertahankan Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya, setidaknya sampai 10 September—hampir dua minggu setelah milisi dan TNI mulai melancarkan kekerasannya pada 30 Agustus. Ini tidak berarti bahwa Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya tidak melakukan apapun selama periode ini.† Presiden Clinton dua kali menulis surat kepada Presiden Habibie mengungkapkan keprihatinannya dan mendesak agar pemerintah Indonesia melakukan segala upaya untuk memulihkan keamanan. Pada 8 September, Panglima pasukan AS di Pasifik, Laksamana Dennis Blair, pergi ke Jakarta untuk menyampaikan pesan yang sama secara langsung kepada Jenderal Wiranto. Perdana Menteri Australia John Howard dan para perwira tinggi angkatan bersenjata Australia juga berulang kali berhubungan dengan rekan-rekan mereka di Jakarta.

Betapapun tidak lazim dan jujur, prakarsa-prakarsa yang dilakukan itu samasekali tidak cukup untuk mengubah keadaan lapangan di Timor-Leste. Dan begitulah, UNAMET tidak dapat berbuat apa-apa ketika kekerasan merebak. Tepat pada hari-hari itulah dan dalam masa dua pekan sebelum MNF disetujui dan dikerahkan, Timor-Leste dibakar rata dengan tanah, lebih daripada seribu orang dibunuh, dan kira-kira separuh penduduk Timor-Leste dipindahkan secara paksa.

Singkatnya, bisa dikemukakan pendapat yang kuat bahwa tanggung jawab politik dan moral, jika bukan tanggung jawab hukum untuk kekerasan 1999, sebagian ada pada masyarakat internasional dan khususnya pada beberapa negara anggota PBB yang paling kuat. Melalui tindakan dan pembiaran mereka, negara-negara penting secara efektif memperlancar invasi ke Timor-Leste dan, bersama badan-badan dan perusahaan-perusahaan internasional, memfasilitasi suatu pola historis pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor-Leste. Lebih langsung, karena gagal mengambil tindakan efektif untuk mencegah kekerasan yang sudah banyak diperkirakan pada 1999, anggota-anggota penting masyarakat internasional memperlancar kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Indonesia dan milisi.

* Tamrat Samuel, yang bertanggung jawab atas Timor-Leste dan Indonesia di dalam Departemen Politik PBB sejak 1992 hingga 2000, menulis bahwa "nyaris tidak ada keinginan dari negara-negara penting untuk mengerahkan suatu pasukan penjaga perdamaian." Samuel, "East Timor: The Path to Self Determination," halaman 211.

† Untuk pembahasan mengenai tanggapan internasional terhadap krisis di awal September, lihat Greenlees dan Garran, *Deliverance*, Bab 12. Lihat juga, Geoffrey Robinson, "If You Leave Us Here, We Will Die," dalam Nicolaus Mills dan Kira Brunner (penyunting), *The New Killing Fields: Massacre and the Politics of Intervention*, New York: Basic Books, halaman 159-183.

Dukungan untuk pandangan ini, secara paradoks, justru terletak pada efektivitas tindakan-tindakan yang akhirnya diambil oleh negara-negara dan badan-badan yang sama pada pertengahan September 1999. Menanggapi kemarahan publik yang semakin meningkat, Amerika Serikat dan pemerintah negara-negara penting lainnya, serta Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, akhirnya melakukan tindakan menekan Tentara Nasional Indonesia dan milisi kakitangan mereka. Untuk pertama kalinya dalam waktu 24 tahun, pihak-pihak ini memberikan tekanan yang sungguh-sungguh dan bersama-sama terhadap pemerintah Indonesia dengan memutus hubungan militer dan mengancam menghentikan bantuan ekonomi. Prakarsa ini terjadi bersamaan dengan kunjungan yang tidak biasa dari satu delegasi Dewan Keamanan PBB ke Jakarta dan Dili, yang mendesak pemerintah Indonesia untuk menerima intervensi internasional. Di bawah tekanan yang besarnya belum pernah terjadi sebelumnya ini, pada 12 September pemerintah Indonesia sepakat mengizinkan penempatan pasukan bersenjata internasional. Pasukan tersebut mendarat sekitar seminggu kemudian dan setelah bertugas selama beberapa minggu kekerasan yang paling buruk sudah dihentikan.

Tanggung jawab PBB: Masalah keadilan

Jika anggota-anggota masyarakat internasional memikul tanggung jawab, karena bungkam dan tidak bertindak, atas kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan pada 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai satu lembaga menanggung satu beban tambahan: tanggung jawab untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak akan lepas dari penghukuman.

Tentu saja memastikan bahwa para pelaku kejahatan terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional dihadapkan ke pengadilan merupakan perhatian umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi dalam kasus Timor-Leste tahun 1999, prinsip umum tersebut berlaku dengan kekuatan khusus, karena tiga alasan. *Pertama*, kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan pada 1999 terjadi dalam konteks suatu proses yang dikelola oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mandat yang jelas dari Dewan Keamanan.[*] *Kedua*, kejahatan tersebut merupakan pelanggaran langsung terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan Kesepakatan 5 Mei antara Indonesia, Portugal, dan PBB.[†] *Ketiga*, resolusi-resolusi yang diadopsi Dewan Keamanan dan Komisi Hak Asasi Manusia sejak September 1999 secara tersurat mempercayakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membawa para pelaku kejahatan tersebut ke hadapan pengadilan.[‡] Beberapa tahun telah berlalu sejak

---

* PBB juga memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan Piagam PBB, sehubungan dengan peran sentralnya dalam proses dekolonisasi Timor-Leste.

† Lebih jauh, berdasarkan Kesepakatan 5 Mei, PBB secara efektif menjadi otoritas yang memerintah di Timor-Leste setelah pemungutan suara. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa PBB memiliki kewajiban hukum yang sama dengan kewajiban suatu negara untuk menghadapkan ke pengadilan para pelaku kejahatan terhadap umat manusia.

‡ Resolusi Dewan Kemanan No. 1272 (25 Oktober 1999) menyebutkan dengan jelas bahwa Dewan

komitmen-komitmen itu dibuat, tetapi para pelaku utama kejahatan tersebut masih terus bebas berkeliaran.

Tanggung jawab khusus PBB ditegaskan oleh Komisi Penyelidik Internasional mengenai Timor-Leste, satu badan yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal pada November 1999.* Dalam laporannya, Komisi ini menegaskan bahwa:

> "Tindakan-tindakan melanggar hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional di Timor-Leste diarahkan untuk melawan keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam, dan bertentangan dengan kesepakatan yang dicapai oleh Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan tersebut. Berdasarkan Pasal 25 Piagam, Negara-Negara Anggota setuju menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan. Perlawanan terorganisasi di Timor-Leste terhadap keputusan Dewan Keamanan menuntut perhatian dan tanggapan internasional tertentu. Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai satu organisasi, berkepentingan untuk ambil bagian dalam seluruh proses penyelidikan, penetapan pertanggungjawaban, dan penghukuman mereka yang bertanggung jawab, dan dalam memajukan rekonsiliasi."†

Perlu dikemukakan bahwa pandangan Komisi ini didukung oleh Sekretaris Jenderal Kofi Annan. Lebih lanjut Sekretaris Jenderal menegaskan tekadnya untuk bekerjasama dan memantau kemajuan dalam urusan ini. Dalam suratnya pada Januari 2000 kepada Ketua Dewan Keamanan dan lain-lain, yang mengantarkan laporan Komisi tersebut, Annan menulis:

"mengutuk semua kekerasan dan tindakan yang mendukung kekerasan di Timor-Leste… dan menuntut agar semua yang bertanggung jawab dihadapkan ke pengadilan." Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB 1999/S-4/1 tanggal 27 September 1999 menegaskan bahwa masyarakat internasional akan mengerahkan semua usaha untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste akan dihadapkan ke pengadilan.

* Komisi ini dibentuk sesuai dengan Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB 1999/S-4/1 tanggal 27 September 1999, yang disahkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam keputusannya 1999/293 tanggal 15 November 1999. Komisi diberi mandat untuk "mengumpulkan dan menyusun secara sistematis keterangan tentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan-tindakan yang mungkin merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan di Timor Timur sejak Januari 1999."

† United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, "Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary-General," Januari 2000, paragraf 146-147.

> "Seperti ditunjukkan laporan ini, tindakan-tindakan melanggar hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional diarahkan untuk melawan keputusan Dewan Keamanan dan bertentangan dengan kesepakatan yang dicapai oleh Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjalankan keputusan Dewan Keamanan. Fakta ini menegaskan perlunya membuat para pelaku bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka … Saya ingin meyakinkan Negara-Negara Anggota mengenai tekad kuat saya untuk bekerjasama dengan proses-proses antarpemerintah dalam urusan penting ini. Saya akan memantau dari dekat kemajuan untuk mencapai tanggapan yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional."*

Mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk melaksanakan komitmen ini, Komisi Penyelidik sangat jelas. Komisi ini merekomendasikan agar Dewan Keamanan PBB membentuk suatu pengadilan pidana internasional, sama dengan yang pernah dibentuk untuk Rwanda dan bekas Yugoslavia. Secara khusus Komisi Penyelidik merekomendasikan bahwa:

> "Perserikatan Bangsa-Bangsa harus membentuk suatu pengadilan pidana internasional yang terdiri atas hakim-hakim yang ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebaiknya dengan partisipasi anggota dari Timor-Leste dan Indonesia. Pengadilan akan bertempat di Indonesia, Timor-Leste, dan wilayah lain yang relevan untuk menerima pengaduan dan mengadili serta menghukum mereka yang didakwa oleh badan penyelidik independen melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia fundamental dan hukum humaniter internasional yang terjadi di Timor-Leste sejak Januari 1999 tanpa memandang kebangsaan individu yang bersangkutan atau di mana orang-orang itu berada ketika pelanggaran dilakukan."†

Tiga Pelapor Khusus PBB yang melakukan penyelidikan di Timor-Leste akhir 1999 membuat rekomendasi yang pada dasarnya sama.‡ Dalam laporan mereka pada

---

* United Nations, Secretary-General, Identical Letters to the President of the General Assembly, the President of Security Council and the Chairperson of the Commission on Human Rights, (UN. A/54/726,S/2000/59), 31 Januari 2000. Surat pengantar untuk laporan: United Nations, Office of the High Commissioner or Human Rights, "Report of the International Commission of Inquiry on East Timor To the Secretary General," Januari 2000.

† United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, "Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary General," Januari 2000, paragraf 153.

‡ Berdasarkan Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB 1999/S-4/1 tanggal 27 September 1999, tiga Pelapor Khusus PBB menyelenggarakan satu misi bersama ke Timor-Leste pada November 1999. Ketiganya adalah: Pelapor Khusus untuk pembunuhan di luar hukum, seketika, atau sewenang-wenang; Pelapor Khusus untuk persoalan penyiksaan; dan Pelapor Khusus untuk kekerasan terhadap perempuan, sebab-sebab, dan konsekuensinya. Laporan mereka, *Situation of Human Rights in East Timor* (UN No. A/54/660) dikeluarkan pada 10 Desember 1999.

Desember 1999, mereka berpendapat bahwa, sesuai dengan norma-norma hukum internasional yang sudah diterima, tanggung jawab utama untuk menyelidiki kejahatan di Timor-Leste dan membawa para pelaku kejahatan ke pengadilan berada di tangan Pemerintah Indonesia. Sejalan dengan itu mereka berpendapat bahwa pihak berwenang Indonesia harus diberi kesempatan melakukan penyelidikan dan penuntutan sebelum tindakan yang lebih jauh dipertimbangkan. Namun, mereka mengemukakan bahwa jika pihak berwenang Indonesia gagal membuat kemajuan yang memuaskan di dalam kerja tersebut, akan menjadi pantas untuk membentuk suatu pengadilan pidana internasional. Lebih khusus, para Pelapor Khusus PBB tersebut merekomendasikan bahwa:

> "Kecuali dalam waktu beberapa bulan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelidiki keterlibatan TNI dalam tindak kekerasan tahun lalu memberikan hasil, dalam hal memberikan penjelasan yang bisa dipercaya dan menghadapkan ke pengadilan para pelakunya—baik pelaku langsung maupun yang memegang tanggung jawab komando—Dewan Keamanan harus mempertimbangkan pembentukan suatu pengadilan pidana internasional untuk keperluan tersebut. Ini sebaiknya dilakukan dengan persetujuan Pemerintah Indonesia, tetapi persetujuan seperti itu tidak bisa dijadikan syarat. Pengadilan tersebut harus memiliki yurisdiksi atas semua kejahatan menurut hukum internasional yang dilakukan oleh pihak manapun di dalam Wilayah [Timor-Leste] sejak kepergian Kekuasaan kolonial [Portugal]."[*]

Para Pelapor Khusus memperjelas bahwa keperluan membentuk pengadilan pidana internasional bergantung pada memadai tidaknya langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak berwenang nasional Indonesia. Karena itu cukup adil untuk menanyakan: apa kemajuan yang telah dibuat dalam waktu bertahun-tahun setelah disampaikannya rekomendasi tersebut. Jawaban sederhananya adalah: sangat sedikit.

Terutama untuk menanggapi tuntutan pembentukan pengadilan internasional, pada 2001 pemerintah Indonesia membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc untuk mengadili kasus-kasus yang muncul dari kejadian kekerasan di Timor-Leste.[†] Setelah keterlambatan yang cukup lama, pada Januari 2002 akhirnya dikeluarkan surat dakwaan terhadap 18 orang untuk kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan pada 1999. Terdakwa meliputi sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri, termasuk Mayor Jenderal Adam Damiri, Brigadir Jenderal Noer Muis, dan Kolonel (Pol.) Timbul Silaen. Dari 18 orang yang diadili, dua belas orang diputus bebas dalam pengadilan tingkat pertama, dan empat orang lagi diputus bebas di tingkat banding. Dua orang yang dinyatakan terbukti bersalah adalah mantan Gubernur

* UN, *Situation of Human Rights in East Timor* (UN NO. A/54/660), 10 Desember 1999, halaman 14.

† Pengadilan tersebut didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 96/2001.

Timor Timur, Abílio Osório Soares, dan pemimpin milisi Eurico Guterres, yang keduanya adalah orang Timor-Leste. Tidak ada perwira atau pejabat Indonesia yang dipenjarakan, dan sebagian dari mereka justru dipromosikan dan diangkat ke jabatan komando yang sangat penting.*

Laporan ini bukanlah tempat untuk sebuah analisis yang tuntas mengenai sidang-sidang tersebut atau mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang menyelenggarakannya.† Namun, beberapa butir umum dapat dibuat untuk menilai efektivitasnya dalam memperjelas fakta dan menghadapkan para pelaku pelanggaran ke pengadilan.

Pertama, ada masalah fatal dengan mandat pengadilan ini. Yang paling mencolok, keputusan Presiden yang menjadi dasar pembentukan pengadilan ini membatasi yurisdiksi pengadilan pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hanya dalam dua bulan pada 1999 (April dan September), dan hanya di tiga kabupaten dari tiga belas kabupaten di Timor-Leste (Dili, Liquiçá, dan Covalima). Keputusan tersebut secara efektif membuat kebanyakan kejahatan tidak akan pernah diselidiki atau diadili, dan bahwa sifat luas dan sistematis dari kejahatan-kejahatan tersebut tidak akan dibuktikan.

Kedua, Kejaksaan Agung memutuskan hanya menuntut empat kasus dan dengan demikian membatasi kemungkinan membuktikan bahwa kekerasan tersebut berlangsung luas dan sistematis. Lebih lanjut, para tersangka utama—mencakup banyak perwira tinggi yang disebutkan dalam laporan ini dan laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia sendiri—tidak masuk dalam jajaran terdakwa. Nama-nama yang paling mencolok tidak dicantumkan adalah Jenderal Wiranto, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, dan Mayor Jenderal Kiki Syahnakri.

Ketiga, dakwaan disiapkan dengan buruk dan dengan argumentasi yang lemah. Umumnya para jaksa penuntut gagal memanfaatkan bukti dokumenter dan kesaksian yang berlimpah yang ada pada mereka. Kebanyakan juga terlihat enggan mengajukan kasus mereka dengan kuat, terutama terhadap perwira-perwira tinggi TNI. Permintaan jaksa untuk membebaskan Mayor Jenderal Adam Damiri pada pertengahan 2003 memperlihatkan masalah ini.‡ Lebih lanjut, dalam beberapa kasus para hakim tampak lebih pandai dan bersemangat daripada para jaksa penuntut di dalam mengungkapkan bukti yang memberatkan tertuduh.

Terakhir, pelaksanaan sidang pengadilan dan tanggapan dari pejabat pemerintah serta kehakiman menunjukkan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dibentuk dan sidang-sidangnya dijalankan terutama untuk mengelakkan tuntutan

* Misalnya, pada saat diajukan ke pengadilan pada 2002, Mayor Jenderal Adam Damiri telah menduduki jabatan yang besar kekuasaannya, Asisten Operasi Kepala Staf Umum TNI. Dalam kedudukan itu, ia berperan sentral dalam penyelenggaraan operasi militer TNI di Aceh yang dimulai pada Mei 2003.

† Untuk analisis yang terperinci tentang sidang-sidang tersebut, lihat David Cohen, *Intended to Fail: Trials Before The Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta*, New York: International Center for Transitional Justice, 2003.

‡ Lihat "Indonesia Wants to Acquit General in Human Rights Case," *New York Times*, 8 Juni 2003.

pembentukan pengadilan pidana internasional, bukan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan.

Karena alasan-alasan tersebut dan alasan-alasan lain, organisasi-organisasi hak asasi manusia terkemuka seperti Amnesty International dan Human Rights Watch menyebut proses itu secara mendasar lemah dan merupakan ejekan kepada keadilan. Pada awal 2003, misalnya, Amnesty International menulis bahwa: "Proses di Indonesia sangat terbatas lingkupnya dan, walaupun ada hukuman terhadap beberapa orang, pada dasarnya gagal mencapai tujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan."[*] Organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga hak asasi manusia yang bisa dipercaya di Indonesia maupun di Timor-Leste telah mencapai kesimpulan yang amat mirip.[†] Demikian juga dengan kelompok-kelompok keagamaan. Pada Mei 2003, satu kelompok yang terdiri atas 92 pemimpin dan organisasi keagamaan dari seluruh Amerika Serikat mengeluarkan satu pernyataan mengecam pengadilan Indonesia dan menyerukan pembentukan suatu pengadilan internasional.[‡]

Terlepas dari kepentingan mereka memelihara hubungan baik dengan Indonesia, pemerintah negara-negara penting juga bersikap kritis terhadap proses pengadilan di Indonesia. Misalnya, pada akhir 2002 Departemen Luar Negeri AS menyatakan kecewa dengan pembebasan para terdakwa yang baru saja dilakukan oleh pengadilan dan mengemukakan bahwa para penuntut "terus-menerus gagal menggunakan sumberdaya dan bukti yang tersedia pada mereka dari PBB dan lainnya dalam mendokumentasikan kekejaman-kekejaman di Timor-Leste."[§] Senada dengan itu, pada Juni 2003 Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengungkapkan keprihatinannya atas permintaan jaksa penuntut untuk membebaskan Mayor Jenderal Adam Damiri. "Sementara tidak memberikan penilaian sebelum putusan akhir dicapai," katanya, "kami mendapati sungguh mengecewakan bahwa justru jaksa penuntut yang mengusahakan putusan tidak bersalah dalam kasus ini."[¶]

Singkatnya, cukup adil untuk menyimpulkan bahwa proses hukum nasional Indonesia tidak membawa hasil, baik dalam hal mengungkapkan fakta secara bisa dipercaya maupun dalam menghadapkan para pelaku ke pengadilan.

---

* Amnesty International, *Indonesia & Timor Leste: International Responsibility for Justice*, AI Doc. ASA 03/001/2003, London, April 2003, halaman 1. Dokumen ini juga berisi ringkasan yang berguna mengenai keprihatinan utama Amnesty Internasional terhadap proses pengadilan tersebut.

† Aliansi Nasional untuk Pengadilan Internasional, satu koalisi dari sekitar 20 organisasi non-pemerintah di Timor Leste, menyebut pengadilan itu sebagai "sandiwara yang memalukan." Surat kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, 13 Maret 2003.

‡ Lihat, "An International Tribunal Must Be Established for East Timor: A Statement from U.S. Religious Leaders and Organizations," tersedia pada situs jaringan East Timor Action Network (ETAN): www.etan.org/action/action2/relig.htm

§ Dikutip dalam "Lt. Col. Endar Priyanto", *Masters of Terror*, http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm

¶ Duta Besar Amerika Serikat Ralph L. Boyce, dikutip dalam "Indonesia Wants to Acquit General in Human Rights Case," *New York Times*, 8 Juni 2003.

Bagaimana dengan proses hukum di Timor-Leste sendiri? Di sini beritanya sedikit lebih baik, namun samasekali tidak cukup baik. Pada sisi positifnya, beberapa perangkat dasar peradilan untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan berat, termasuk kejahatan terhadap umat manusia, sekarang ada di Timor-Leste. Pada 2000, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1272 (1999), UNTAET telah memberlakukan statuta membentuk Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Pengadilan Distrik Dili untuk mengadili kejahatan berat, termasuk kejahatan terhadap umat manusia.[*] Berdasarkan statuta ini, norma-norma hukum internasional diadopsi sebagai landasan untuk menuntut dan mengadili kejahatan-kejahatan semacam itu. UNTAET juga membentuk satu Unit Kejahatan Berat (Serious Crimes Unit – SCU) dengan wewenang menyelidiki kejahatan-kejahatan berat yang terjadi antara 1 Januari dan 25 Oktober 1999 dan menuntut semua yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan tersebut.[†]

Setelah serangkaian permulaan yang salah dan keterlambatan, pada 2002 mekanisme ini mulai membuahkan hasil yang penting. Sampai akhir Mei 2003, 60 surat dakwaan telah dibuat terhadap 247 individu, yang sebagian besar dituntut atas kejahatan terhadap umat manusia.[‡] Dakwaan itu mencakup sekitar 40% dari seluruh pembunuhan yang dilaporkan terjadi selama 1999. Khususnya, mereka yang dituntut sampai Mei 2003 mencakup banyak perwira tinggi TNI yang diidentifikasi sebagai tersangka dalam laporan ini, termasuk Jenderal Wiranto dan tujuh perwira dan pejabat tinggi lainnya.

Hasil ini mengesankan, apalagi dicapai di tengah hambatan logistik dan politik yang besar. Namun, sedikit saja alasan untuk optimistis. Paling jelas, sampai akhir Mei 2003 lebih daripada 65% dari orang yang didakwa berada dengan bebas di Indonesia.[§] Dan nyaris tidak ada kemungkinan bahwa pejabat dan perwira tinggi yang telah didakwa—yaitu para manajer dan perencana kekerasan—akan pernah diadili melalui proses hukum di Timor-Leste. Alasan utamanya karena Pemerintah Indonesia samasekali menolak mengekstradisi para tersangka ke Timor-Leste atau mengakui kompetensi pengadilan Timor Leste untuk mengadili mereka.[¶] Akibatnya, kasus-kasus yang telah diadili sampai sekarang atau yang mungkin diadili di masa depan hanyalah kasus-kasus yang pelakunya milisi lokal.

* Statuta itu adalah Regulasi UNTAET No. 15/2000 (6 Juni 2000) "On the Establishment of Panels with Exclusive Jurisdiction Over Serious Criminal Offences." Kejahatan berat yang menjadi yurisdiksi panel tersebut adalah: genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap umat manusia, pembunuhan, penyerangan seksual, dan penyiksaan.

† Setelah kemerdekaan Timor Leste pada 20 Mei 2002, Unit Kejahatan Berat beroperasi di bawah otoritas hukum Kejaksaan Agung Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Lihat Serious Crimes Unit (SCU), "Serious Crimes Update V/03," 28 Mei 2003.

‡ SCU, "Serious Crimes Update V/03," Dili, 28 Mei 2003.

§ Angkanya adalah 169 dari 247 terdakwa. Lihat SCU, "Serious Crime Update V/03," Dili, 28 Mei 2003.

¶ Menanggapi Surat Dakwaan Jenderal Wiranto dan lain-lain, yang dikeluarkan pada Februari 2003, Menteri Luar Negeri Indonesia dikutip mengatakan: "[Pengadilan Timor Leste] samasekali bukan pengadilan internasional… mereka tidak memiliki yurisdiksi internasional dan oleh karena itu secara hukum mereka tidak memiliki wewenang untuk menangkap orang-orang bukan Timor Timur." ABC Radio, 25 Februari 2003.

Masalah lain yang berkaitan adalah bahwa Pemerintah Timor-Leste enggan mengambil tanggung jawab mengadili pejabat tinggi Indonesia.[*] Keengganan itu bisa dipahami. Sebagai negara kecil yang baru lahir, yang dimiskinkan dan dihancurkan oleh perang dan pendudukan dalam waktu yang lama serta memiliki perbatasan yang masih rentan dengan Indonesia, Timor Leste tidak dapat diharapkan memimpin proses yang mahal dan kompleks untuk menghadapkan sejumlah pejabat paling berkuasa di Indonesia ke pengadilan. Lagi pula, kalaupun pemerintah berniat mengambil tugas ini, mereka akan sangat terhalangi oleh kekurangan sumberdaya, kapasitas, dan keahlian di dalam badan peradilan baru negeri itu.[†]

Keadaan semakin buruk karena sekarang ada ketidakpastian tentang masa depan Unit Kejahatan Berat dan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat yang mandatnya dari PBB, dua lembaga yang melaksanakan tugas mendasar penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan.[‡] Sampai saat ini pekerjaan mereka sangat bergantung pada staf PBB serta dana PBB dan internasional. Ketika bantuan menurun dan seiring dengan habisnya mandat UNMISET pada Mei 2005, kemajuan di semua bidang ini dapat diperkirakan melambat dan bahkan mungkin akan berhenti.[§]

Dalam keadaan seperti ini, sangat tidak mungkin bahwa sistem peradilan Timor Leste, betapapun baiknya, akan memberikan hasil yang memuaskan dalam pencarian keadilan atas kejahatan terhadap umat manusia yang terjadi pada 1999. Dengan kegagalan nyata proses pengadilan Indonesia sendiri, berarti semua jalan pengadilan nasional yang tersedia untuk mengadili para pelaku pelanggaran sekarang sudah habis ditempuh. Ini adalah keadaan yang tepat dan mutlak untuk menuntut kejahatan semacam itu di bawah yurisdiksi universal yang lebih luas. Lebih-lebih, itulah tindakan yang diusulkan oleh para Pelapor Khusus PBB dan Komisi Penyelidik Internasional mengenai Timor Leste hampir empat tahun lalu.

Karena alasan-alasan tersebut, laporan ini menyimpulkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa harus membentuk—sesungguhnya memiliki tugas mulia untuk membentuk—suatu pengadilan pidana internasional untuk mengadili kejahatan terhadap umat manusia yang terjadi di Timor-Leste. Lebih khusus, laporan ini mendesak Sekretaris Jenderal dan Dewan Keamanan PBB untuk memimpin dalam penanganan masalah ini, sesuai dengan komitmen yang mereka nyatakan untuk memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan.

---

* Presiden Xanana Gusmão khususnya sangat hati-hati dalam hal ini. Perdana Menteri Mari Alkatiri telah meminta pembentukan sebuah pengadilan internasional di negara ketiga yang netral. Lihat, "East Timor PM Wants International Tribunal To Try Indonesian Officers," AP, 30 Mei 2003.

† Untuk ringkasan yang berguna tentang masalah yang dihadapi badan peradilan Timor-Leste pada 2003, lihat Judicial System Monitoring Programme (JSMP), "JSMP Background Paper on the Justice Sector," dipersiapkan untuk The Timor-Leste and Development Partners Meeting, Juni 2003. Lihat juga UNMISET, Press Release, "Justice Sector Consultation Meeting Ends: 'Fair and efficient justice key to a democratic state'," Dili, 6 Juni 2003.

‡ Pada waktu laporan ini ditulis, SCU diperkirakan menyeselesaikan penyelidikannya dalam November 2004 dan Panel Khusus menyelesaikan persidangan dalam Mei 2005.

§ Masalah-masalah ini dibahas secara lebih terperinci dalam Amnesty International, *Indonesia & Timor Leste: International Responsibility for Justice*, AI Doc. ASA03/001/2003, London, April 2003, halaman 8.

Tabel 1: Perwira dan pejabat senior yang diduga mengemban tanggung jawab individual dan komando untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor-Leste, 1999		
Militer		
Markas Besar TNI dan Angkatan Darat		
1	Jenderal Wiranto	Panglima Tentara Nasional Indonesia & Menteri Pertahanan dan Keamanan
2	Jenderal Subagyo Hadisiswoyo	Kepala Staf Angkatan Darat
3	*Mayor Jenderal Kiki Syahnakri	Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat & Penguasa Darurat Militer, Timor Timur
4	Letnan Jenderal Sugiono	Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia
5	*Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin	Asisten Teritorial Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia
6	Mayor Jenderal Endriartono Sutarto	Asisten Operasi Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia
7	Letnan Jenderal Djamari Chaniago	Panglima Kostrad
8	Mayor Jenderal Syahrir	Komandan Jenderal Kopassus
9	Letnan Jenderal Tyasno Sudarto	Kepala BAIS (sebelum April 1999, BIA)
10	*Brigadir Jenderal Arifuddin	Direktur A, BAIS (sebelum April 1999, BIA)
11	*Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim	Kepala BIA (sampai Januari 1999) & Anggota Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur
Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana		
1	*Mayor Jenderal Adam Damiri	Panglima Kodam IX/Udayana
2	*Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon	Kepala Staf Kodam IX/Udayana
Komando Resor Militer (Korem) 164/WD		
1	*Kolonel Tono Suratman	Komandan Korem 164/WD (sampai 13 Agustus 1999)
2	*Kolonel Noer Muis	Komandan Korem 164/WD (mulai 13 Agustus 1999)
3	Kolonel Mudjiono	Wakil Komandan Korem 164/WD (sampai Mei/Juni 1999)
4	Letnan Kolonel Supadi	Kepala Staf`Korem 164/WD
5	Mayor R.M. Bambang Wisnumurty	Kepala Seksi Intelijen Korem 164/WD
Komando Distrik Militer (Kodim) 1627-1639		
1	Mayor Maman Rahman	Komandan Kodim 1632/Aileu
2	*Letnan Kolonel Paulus Gatot Rudianto	Komandan Kodim 1633/Ainaro
3	Letnan Kolonel Hisar Richard Hutajulu	Komandan Kodim 1628/Baucau
4	*Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian	Komandan Kodim 1636/Bobonaro
5	*Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus	Komandan Kodim 1635/Covalima
6	*Letnan Kolonel Liliek Koeshadianto	Komandan Kodim 1635/Covalima (mulai 29 Agustus sampai 7 September 1999)
7	*Letnan Kolonel Endar Priyanto	Komandan Kodim 1627/Dili (sampai 9 Agustus 1999)

8	*Letnan Kolonel Soedjarwo	Komandan Kodim 1627/Dili (mulai 9 Agustus 1999)
9	*Letnan Kolonel Muhamad Nur	Komandan Kodim 1637/Ermera
10	*Letnan Kolonel Sudrajat A.S.	Komandan Kodim 1629/Lautém
11	*Letnan Kolonel Asep Kuswadi	Komandan Kodim 1638/Liquiçá
12	*Letnan Kolonel Sulastiyo	Komandan Kodim 1631/Manatuto
13	Letnan Kolonel Gerson Ponto	Komandan Kodim 1631/Manatuto
14	Mayor Drs. H.M. Sinaga	Komandan Kodim 1634/Manufahi
15	*Letnan Kolonel Kamiso Miran	Komandan Kodim 1639/Oecussi
16	*Letnan Kolonel Bambang Sungesti	Komandan Kodim 1639/Oecussi
17	Letnan Kolonel Djoko Sukarsono	Komandan Kodim 1630/Viqueque (sampai sekitar Agustus 1999)
18	Letnan Kolonel Gustaf Hero	Komandan Kodim 1630/Viqueque (mulai sekitar Agustus 1999)
Kopassus dan Komando Sektor		
1	*Letnan Kolonel Yayat Sudrajat	Komandan Satgas Tribuana VIII (Kopassus)
2	*Kolonel Sunarko	Komandan Sektor A (sampai 21 Juni 1999)
3	*Kolonel Irwan Kusnadi	Komandan Sektor A (mulai 21 Juni 1999)
4	*Kolonel Tatang Zaenuddin	Komandan Sektor B (sampai 21 Juli 1999)
5	*Letnan Kolonel Nyus Rahasia	Wakil Komandan Sektor B
6	*Kolonel Gerhan Lantara	Komandan Darurat Militer Sektor A (September 1999)
Batalion Tempur		
1	*Letnan Kolonel Yakraman Yagus	Komandan Batalion Infanteri 744
2	*Mayor Jacob Sarosa	Komandan Batalion Infanteri 745
3	Komandan	Komandan Batalion Infanteri 143
4	Komandan	Komandan Batalion Infanteri 301
5	Komandan	Komandan Batalion Infanteri 406
6	Komandan	Komandan Batalion Infanteri 621

Polri		
Nasional (Polri) dan Daerah (Polda)		
1	Jenderal (Pol.) Roesmanhadi	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
2	*Kolonel (Pol.) Timbul Silaen	Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur
Distrik (Polres)		
1	Letnan Kolonel (Pol.) Bambang Hermanu	Kepala Kepolisian Resor Aileu
2	*Mayor (Pol.) Drs. Rizali, SH	Kepala Kepolisian Resor Ainaro
3	Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Sodak C. Marpaung	Kepala Kepolisian Resor Baucau
4	*Mayor (Pol.) Drs. Budi Susilo	Kepala Kepolisian Resor Bobonaro

5	*Letnan Kolonel (Pol.) Gatot Subiaktoro	Kepala Kepolisian Resor Covalima
6	*Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Hulman Gultom	Kepala Kepolisian Resor Dili
7	Letnan Kolonel (Pol.) Ery T.B. Gultom	Kepala Kepolisian Resor Ermera
8	Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Irsan Wijaya	Kepala Kepolisian Resor Lautém
9	*Letnan Kolonel (Pol.) Adios Salova	Kepala Kepolisian Resor Liquiçá
10	Mayor (Pol.) Drs. Joko Irianto	Kepala Kepolisian Resor Liquiçá
11	Letnan Kolonel (Pol.) Drs. J. A. Sumampow	Kepala Kepolisian Resor Manatuto
12	Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Abdul Rachim	Kepala Kepolisian Resor Manufahi
13	*Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Wilmar Marpaung	Kepala Kepolisian Resor Oecussi
14	Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Abdul Rahman	Kepala Kepolisian Resor Viqueque

Pejabat sipil		
Nasional dan Provinsi		
1	*Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung	Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2	*Letnan Jenderal (Purn.) A. M. Hendropriyono	Menteri Transmigrasi dan Pemukiman
3	*Mayor Jenderal (Purn.) Yunus Yosfiah	Menteri Penerangan
4	*Abílio Osório Soares	Gubernur Timor Timur
Kabupaten		
1	*Kolonel (Purn.) Suprapto Tarman	Bupati Aileu
2	*Evaristo Doutel Sarmento	Bupati Ainaro
3	Virgílio Marçal	Bupati Baucau
4	*Guilherme dos Santos	Bupati Bobonaro
5	*Kolonel Herman Sedyono	Bupati Covalima
6	*Domingos M.D. Soares	Bupati Dili
7	Constantino Soares	Bupati Ermera
8	*Edmundo da Conceição Silva	Bupati Lautém
9	*Leoneto Martins	Bupati Liquiçá
10	*Vidal Doutel Sarmento	Bupati Manatuto
11	Nazario José Tilman de Andrade	Bupati Manufahi
12	*Filomeno Misquito da Costa	Bupati Oecussi
13	*Martino Fernandes	Bupati Viqueque

Nama-nama yang diberi tanda asterisk (*) adalah mereka yang diduga mengemban tanggung jawab individual dan komando.

Tabel 2: Perwira dan pejabat penting pada 1999 (berdasarkan urutan abjad)		
Perwira Militer (Nasional)		
1	Brigadir Jenderal Arifuddin	Direktur A, BAIS (sebelum April 1999, BIA)
2	Letnan Jenderal Djamari Chaniago	Panglima Kostrad (Pangkostrad)
3	Jenderal Subagyo Hadisiswoyo	Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)
4	Mayor Jenderal Amirul Isnaeni (sudah meninggal dunia)	Wakil Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Darat (Waaspam KSAD) Wakil Penguasa Darurat Militer, Timor Timur (September 1999)
5	Letnan Jenderal Johny Lumintang	Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad)
6	Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim	Kepala BIA (sampai Januari 1999) Anggota Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur
7	Laksamana Muda Yoost F. Mengko	Asisten Intelijen Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (Asintel Kasum)
8	Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon	Kepala Staf Komando Daerah Militer IX/Udayana
9	Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin	Asisten Teritorial Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (Aster Kasum)
10	Letnan Jenderal Tyasno Sudarto	Kepala BAIS (sebelum April 1999, BIA)
11	Letnan Jenderal Sugiono	Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (Kasum)
12	Mayor Jenderal Endriartono Sutarto	Asisten Operasi Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (Asops Kasum)
13	Mayor Jenderal Kiki Syahnakri	Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat (Asops KSAD) Penguasa Darurat Militer Timor Timur (September 1999)
14	Mayor Jenderal Syahrir M.S.	Komandan Jenderal Kopassus
15	Jenderal Wiranto	Panglima Tentara Nasional Indonesia & Menteri Pertahanan dan Keamanan
16	Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono	Kepala Staf Teritorial Tentara Nasional Indonesia (Kaster)
Perwira Militer (Daerah Militer IX dan Timor Timur)		
1	Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus	Komandan Komando Distrik Militer 1635/Covalima
2	Mayor Jenderal Adam R. Damiri	Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana
3	Letnan Kolonel Gustaf Hero	Komandan Komando Distrik Militer 1630/Viqueque
4	Letnan Kolonel Hisar Richard Hutajulu	Komandan Komando Distrik Militer 1628/Baucau
5	Letnan Kolonel Liliek Koeshadianto	Komandan Komando Distrik Militer 1635/Covalima
6	Kolonel Irwan Kusnadi	Komandan Sektor A, Timor Timur (setelah 21 Juni 1999)

7	Letnan Kolonel Asep Kuswadi	Komandan Komando Distrik Militer 1638/Liquiçá
8	Kolonel Gerhan Lantara	Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 (Brigif Linud 17) Komandan Darurat Militer Sektor A Timor Timur (9-27 September 1999)
9	Letnan Kolonel Kamiso Miran	Komandan Komando Distrik Militer 1639/Oecussi
10	Kolonel Mudjiono	Wakil Komandan Komando Resor Militer 164/WD (sampai Mei atau Juni 1999)
11	Kolonel Noer Muis	Komandan Komando Resor Militer 164/WD (mulai 13 Agustus 1999)
12	Letnan Kolonel Muhamad Nur	Komandan Komando Distrik Militer 1637/Ermera
13	Letnan Kolonel Endar Priyanto	Komandan Komando Distrik Militer 1627/Dili (sampai 9 Agustus 1999)
14	Letnan Kolonel Nyus Rahasia (Nus Rahardja)	Wakil Komandan Sektor B Timor Timur
15	Mayor Maman Rahman	Komandan Komando Distrik Militer 1632/Aileu
16	Letnan Kolonel Paulus Gatot Rudianto	Komandan Komando Distrik Militer 1633/Ainaro
17	Letnan Kolonel Hardiono Saroso	Kepala Staf Komando Resor Militer 164/WD
18	Mayor Jacob Djoko Sarosa	Komandan Batalion Infanteri 745
19	Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian	Komandan Komando Distrik Militer 1636/Bobonaro
20	Mayor Drs. H.M. Sinaga	Komandan Komando Distrik Militer 1634/Manufahi
21	Letnan Kolonel Soedjarwo	Komandan Batalion Infanteri 303 Kostrad Komandan Komando Distrik Militer 1627/Dili (mulai 9 Agustus 1999)
22	Letnan Kolonel Sudrajat	Komandan Komando Distrik Militer 1629/Lautém
23	Letnan Kolonel Yayat Sudrajat	Komandan Satgas Tribuana VIII (Kopassus), Timor Timur Komandan Satuan Tugas Intelijen (SGI), Komando Resor Militer 164/WD
24	Letnan Kolonel Djoko Sukarsono	Komandan Komando Distrik Militer 1630/Viqueque
25	Letnan Kolonel Sulastiyo	Komandan Komando Distrik Militer 1631/Manatuto
26	Kolonel Sunarko	Asisten Intelijen Komandan Jenderal Kopassus Komandan Sektor A, Timor Timur (sampai 21 Juni 1999)
27	Letnan Kolonel Bambang Sungesti	Komandan Komando Distrik Militer 1639/Oecussi
28	Letnan Kolonel Supadi	Kepala Staf Komando Resor Militer 164/WD
29	Kolonel Tono Suratman	Komandan Komando Resor Militer 164/WD (sampai 13 Agustus 1999)
30	Letnan Kolonel Suwondo	Komandan Komando Distrik Militer 1634/Manufahi
31	Mayor Jenderal Kiki Syahnakri	Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat Penguasa Darurat Militer Timor Timur (September 1999)

32	Mayor R.M. Bambang Wisnumurty	Kepala Seksi Intelijen Komando Resor Militer 164/WD
33	Letnan Kolonel Yakraman Yagus	Komandan Batalion Infanteri 744, Timor Timur
34	Kolonel Tatang Zaenuddin	Komandan Sektor B, Timor Timur (sampai 21 Juli 1999)

Perwira Polisi		
1	Letnan Kolonel (Pol.) Ery T.B. Gultom	Kepala Kepolisian Resor Ermera
2	Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Hulman Gultom	Kepala Kepolisian Resor Dili
3	Letnan Kolonel (Pol.) Bambang Hermanu	Kepala Kepolisian Resor Aileu
4	Mayor (Pol.) Drs. Joko Irianto	Kepala Kepolisian Resor Liquiçá
5	Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Sodak C. Marpaung	Kepala Kepolisian Resor Baucau
6	Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Wilmar Marpaung	Kepala Kepolisian Resor Oecussi
7	Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Abdul Rachim	Kepala Kepolisian Resor Manufahi
8	Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Abdul Rahman	Kepala Kepolisian Resor Viqueque
9	Mayor (Pol.) Drs. Rizali SH	Kepala Kepolisian Resor Ainaro
10	Letnan Kolonel (Pol.) Adios Salova	Kepala Kepolisian Resor Liquiçá
11	Kolonel Timbul Silaen	Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur
12	Letnan Kolonel (Pol.) Gatot Subiaktoro	Kepala Kepolisian Resor Covalima
13	Letnan Kolonel (Pol.) Drs. J. A. Sumampow	Kepala Kepolisian Resor Manatuto
14	Mayor (Pol.) Drs. Budi Susilo	Kepala Kepolisian Resor Bobonaro
15	Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Irsan Wijaya	Kepala Kepolisian Resor Lautém

Pejabat Sipil (Nasional)		
1	Ali Alatas	Menteri Luar Negeri
2	Mayor Jenderal (Purn.) H.R. Garnadi	Asisten I Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
3	B.J. Habibie	Presiden
4	Letnan Jenderal (Purn.) A.M. Hendropriyono	Menteri Transmigrasi dan Pemukiman
5	Brigadir Jenderal Glenny Khairupan	Anggota Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur
6	Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung	Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

7	Mayor Jenderal Sintong Panjaitan	Penasihat Militer Presiden Habibie
8	Mayor Jenderal (Purn.) Yunus Yosfiah	Menteri Peneranganttt

Pejabat Sipil (Timor Timur)		
1	Nazario José Tilman de Andrade	Bupati Manufahi
2	Filomeno Misquito da Costa	Bupati Oecussi
3	Martino Fernandes	Bupati Viqueque
4	Leoneto Martins	Bupati Liquiçá
5	Guilherme dos Santos	Bupati Bobonaro
6	Evaristo Doutel Sarmento	Bupati Ainaro
7	Vidal Doutel Sarmento	Bupati Manatuto
8	Kolonel Herman Sedyono	Bupati Covalima
9	Edmundo da Conceição Silva	Bupati Lautém
10	Constantino Soares	Bupati Ermera
11	Domingos M.D. Soares	Bupati Dili
12	Kolonel (Purn.) Suprapto Tarman	Bupati Aileu

Tabel 3: Kelompok milisi pro-Indonesia di Timor-Leste, 1999

Kabupaten	Kelompok milisi
Alieu	AHI
Ainaro	Mahidi, Laksaur
Baucau	Saka, Sera, Forum Komunikasi Partisan (FKP)
Bobonaro	Halilintar, Dadurus Merah Putih (DMP), Firmi Merah Putih, Saka Loromonu, Armui Merah Putih, Guntur Merah Putih, Hametin Merah Putih, Harimau Merah Putih, Kaer Metin Merah Putih
Covalima	Laksaur, Mahidi
Dili	Aitarak
Ermera	Darah Integrasi, Darah Merah, Naga Merah, Tim Pancasila, Aitarak
Lautém	Tim Alfa
Liquiçá	Besi Merah Putih (BMP), Pana
Manatuto	Morok, Mahadomi
Manufahi	ABLAI
Oecussi	Sakunar
Viqueque	Makikit, 59/75 Junior

Kronologi: Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor-Leste *

1960

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memasukkan "Timor dan wilayahnya" dalam daftar wilayah tak berpemerintahan sendiri. Timor-Leste diperintah oleh Portugal sebagai wilayah provinsi seberang lautan.

1974

Menyusul perubahan Pemerintah, Portugal mengakui berlakunya ketentuan-ketentuan Piagam PBB tentang wilayah tak berpemerintahan sendiri dan hak wilayah kolonial di bawah pemerintahannya, termasuk Timor-Leste, untuk menentukan nasib sendiri, yang mencakup kemerdekaan.

1975

Setelah bentrokan kekerasan terjadi di antara kelompok-kelompok yang menginginkan kemerdekaan dan yang menginginkan integrasi dengan Indonesia, Portugal meninggalkan wilayah tersebut dan Indonesia menginvasi Timor-Leste.

1976

Indonesia menganeksasi Timor-Leste sebagai provinsinya yang ke-27. Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah mengakui integrasi ini.

1982

Sekretaris Jenderal PBB memulai pembicaraan tidak resmi dengan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Portugal dengan tujuan memperbaiki situasi kemanusiaan di Timor-Leste dan menyelesaikan status wilayah tersebut.

1995

Sekretaris Jenderal memulai suatu proses untuk mengembangkan dialog antar-rakyat Timor-Leste dengan menyediakan satu forum untuk orang Timor-Leste dari semua pandangan politik untuk menjajaki gagasan-gagasan untuk memperbaiki keadaan.

1998

Pada Juni, Presiden Indonesia B.J. Habibie mengusulkan otonomi untuk Timor-Leste dengan syarat rakyat Timor-Leste menerima integrasi ke Indonesia. Usulan itu ditolak oleh para pemimpin perlawanan Timor-Leste.

Mulai Agustus sampai Oktober, Sekretaris Jenderal Kofi Annan bersama Menteri Luar Negeri Indonesia dan Portugal, mengadakan pembahasan mendalam tentang usulan Indonesia mengenai status khusus berdasarkan otonomi luas bagi Timor-Leste.

1999

27 Januari

Presiden Habibie menyatakan dalam satu pernyataan publik bahwa pemerintahnya mungkin siap untuk mempertimbangkan kemerdekaan bagi Timor-Leste. Pembicaraan dimulai di New York antara Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB, Jamsheed Marker, dan Direktur Jenderal Departemen Luar Negeri Indonesia dan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Portugal.

11 Maret

Pada perundingan tiga pihak tingkat menteri di New York, dicapai kesepakatan mengenai penggunaan pemungutan suara langsung untuk meminta pendapat rakyat Timor-Leste tentang apakah mereka menerima atau menolak usulan otonomi.

21 April

Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menyambut penandatanganan kesepakatan yang diprakarsai oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, yang mewajibkan semua pihak di Timor-Leste untuk mengakhiri kekerasan di Wilayah itu.

5 Mei

Perundingan-perundingan di New York menghasilkan serangkaian kesepakatan antara Indonesia dan Portugal. Kedua Pemerintah mempercayakan kepada Sekretaris Jenderal untuk menyelenggarakan suatu "Konsultasi Rakyat" dalam rangka memastikan apakah rakyat Timor-Leste menerima atau menolak otonomi khusus untuk Timor-Leste di dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

1 Juni

Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB (Special Representative of the Secretary-General – SRSG) di Timor-Leste yang baru ditunjuk, Ian Martin tiba di Dili, Timor-Leste.

11 Juni

Dewan Keamanan PBB secara resmi membentuk UNAMET sampai dengan akhir Agustus 1999. Dalam resolusi 1246 (1999) yang diadopsi secara bulat, Dewan mengesahkan usulan Sekretaris Jenderal untuk membentuk satu misi yang anggotanya mencakup sejumlah 280 orang perwira polisi sipil untuk memberikan saran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 50 orang perwira penghubung militer untuk memelihara hubungan dengan Tentara Nasional Indonesia. Dewan menegaskan kembali tanggung jawab pemerintah Indonesia memelihara perdamaian dan keamanan di Timor-Leste untuk menjamin integritas pemungutan suara dan keamanan bagi staf dan pengamat internasional.

* *Dari situs jaringan publik Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (UNTAET), 2002.*

18 Juni

Pada satu konferensi pers di Dili, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB Ian Martin mengatakan bahwa kekerasan yang terus berlanjut telah memaksa puluhan ribu rakyat Timor-Leste meninggalkan rumah mereka, menciptakan suatu "hambatan serius" bagi persiapan pemungutan suara mengenai masa depan wilayah itu.

23 Juni

Sekretaris Jenderal Kofi Annan memutuskan menunda pemungutan suara Timor-Leste selama dua minggu, dengan menyebut kekerasan yang tidak menyusut dan persoalan logistik sebagai penyebab. Ketika melapor kepada Dewan Keamanan, Sekretaris Jenderal mengatakan bahwa keadaan keamanan dan tidak adanya kesempatan yang sama untuk semua pihak tidak memungkinkan proses konsultasi ini bergerak maju. Pendaftaran pemilih ditunda sampai 13 Juli untuk memberikan waktu bagi penempatan staf PBB di seluruh wilayah itu dan memberikan waktu kepada pihak berwenang Indonesia untuk mengatasi masalah keamanan.

6 Juli

Setelah terjadinya serangan terhadap personel PBB di Maliana dan Liquiçá, para anggota Dewan Keamanan menuntut penghentian segera kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh milisi di Wilayah itu.

16 Juli

Pendaftaran pemilih dimulai setelah penundaan selama tiga hari untuk memberikan waktu kepada pihak berwenang Indonesia untuk menyelesaikan masalah keamanan yang masih ada.

5 Agustus

Pendaftaran pemilih ditutup. UNAMET telah mendaftar 451.792 orang calon pemilih di antara lebih daripada 800.000 orang penduduk yang tinggal di Timor-Leste dan di luar negeri.

9 Agustus

Para pendukung dan penentang usulan otonomi untuk Timor-Leste menandatangani ketentuan tata tertib untuk masa kampanye sebelum pemungutan suara tanggal 30 Agustus.

14 Agustus

Kampanye untuk Konsultasi Rakyat dimulai.

18 Agustus

Menanggapi peningkatan kegiatan milisi, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal (SRSG) Ian Martin, Duta Besar Agus Tarmidzi, Ketua Satuan Tugas Indonesia,

dan para pejabat penting kepolisian Indonesia mengunjungi Viqueque, Suai, dan Maliana, di mana mereka membahas langkah-langkah pengamanan tambahan bersama dengan kepolisian, militer, dan pemerintah lokal.

19 Agustus

Para pemimpin Timor-Leste dari kelompok-kelompok prokemerdekaan dan pro-otonomi menyepakati pembentukan satu komisi beranggotakan 25 orang untuk memperkuat rekonsiliasi dan kerjasama di wilayah itu sebelum hasil pemungutan suara yang diselenggarakan oleh PBB dilaksanakan.

20 Agustus

Tindak kekerasan mencemari kampanye di Timor-Leste ketika milisi prointegrasi mengganggu rakyat yang menghadiri rapat umum prokemerdekaan di Suai. Di Manatuto, perwira penghubung militer yang bertugas di UNAMET diancam oleh milisi.

24 Agustus

Pihak berwenang Indonesia memberikan jaminan kepada UNAMET bahwa mereka akan berusaha menciptakan suasana yang aman. Para anggota Dewan Keamanan mengungkapkan keprihatinan mendalam mereka pada berlanjutnya intimidasi dan kekerasan di Timor-Leste dan menyerukan kepada semua pihak agar memenuhi janji mereka untuk melucuti dan menyimpan senjata mereka.

26 Agustus

Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB Ian Martin mengatakan dalam satu konferensi pers di Dili bahwa PBB berkehendak melanjutkan pemungutan suara walaupun kekerasan yang mematikan merebak belakangan ini. Di New York, dalam satu rapat Dewan Keamanan perwakilan Indonesia menjanjikan komitmen negaranya untuk menjamin adanya suasana yang aman, sebagaimana yang diharuskan dalam Kesepakatan 5 Mei.

Dewan Keamanan memperpanjang mandat UNAMET sampai 30 November. Dalam satu keputusan bulat, Dewan mengadopsi resolusi 126 (1999) mengesahkan usulan Sekretaris Jenderal untuk mengubah susunan Misi PBB di Timor-Leste untuk tahap peralihan setelah pemungutan suara 30 Agustus.

27 Agustus

UNAMET memfasilitasi pertemuan bersejarah antara para pejuang kemerdekaan Falintil dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tempat kantonisasi utama Falintil di Timor-Leste.

29 Agustus

Sehari menjelang pelaksanaan Konsultasi Rakyat, Sekretaris Jenderal PBB mengeluarkan seruan kepada rakyat Timor-Leste agar semua pihak “menjalankan tanggungjawabnya di hadapan sejarah”.

30 Agustus

UNAMET menyatakan bahwa setidaknya 95 persen dari para pemilih yang terdaftar memberikan suara mereka dalam Konsultasi Rakyat; jumlah pemilih seluruhnya lebih daripada 430.000 orang.

31 Agustus

Para anggota Komisi Konsultasi Rakyat Timor-Leste bersidang untuk pertama kalinya. Komisi ini terdiri atas masing-masing 10 orang anggota dari kubu prokemerdekaan dan pro-otonomi, serta lima orang anggota yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB.

1 September

Kekerasan meledak di luar kompleks UNAMET di Dili ketika anggota-anggota milisi menyerang pendukung-pendukung prokemerdekaan.

2 September

Milisi prointegrasi, yang dalam kasus-kasus tertentu memperoleh dukungan dari unsur-unsur pasukan keamanan Indonesia, melancarkan serangan kekerasan, penjarahan, dan pembakaran harta-benda di seluruh Timor-Leste.

4 September

UNAMET mengumumkan hasil pemungutan suara: 94.388 suara atau 21,5 persen rakyat Timor-Leste memberikan suara pada usulan otonomi khusus dan 344.580 suara atau 78,5 persen memberikan suara menentang. Seluruhnya sebanyak 446.953 orang Timor-Leste memberikan suaranya di dalam dan di luar wilayah tersebut.

5 September

Sekretaris Jenderal PBB meningkatkan usahanya untuk memastikan Indonesia melakukan tindakan mendesak untuk mengendalikan keadaan di dalam batas waktu tertentu, atau memastikan Indonesia memberikan kesepakatan bagi penempatan segera suatu pasukan keamanan internasional.

8 September

Satu delegasi yang terdiri atas lima anggota Dewan Keamanan dikirimkan ke Jakarta dan Timor-Leste untuk membahas dengan Pemerintah Indonesia tentang langkah-langkah konkret untuk pelaksanaan damai Kesepakatan 5 Mei. Di New York anggota Dewan Keamanan mendukung pandangan Sekretaris Jenderal bahwa jika keadaan keamanan di Timor-Leste tidak membaik "dalam waktu yang sangat singkat," mereka akan harus mempertimbangkan tindakan lebih lanjut untuk membantu Pemerintah Indonesia menyelesaikan krisis yang sedang terjadi di wilayah itu.

10 September

Ketika keadaan tanpa hukum meningkat di Timor-Leste dan anggota-anggota milisi mengancam akan menyerang kompleks PBB di Dili, Sekretaris Jenderal

PBB secara terbuka mendesak Pemerintah Indonesia untuk menerima tawaran bantuan dari sejumlah Pemerintah, termasuk Australia, Selandia Baru, Filipina, dan Malaysia, "tanpa menunda lagi." Jika Pemerintah Indonesia menolaknya, katanya dalam satu konferensi pers, maka ia tidak dapat lari dari tanggung jawab "atas sesuatu yang bisa jadi merupakan, menurut laporan-laporan yang kami terima, kejahatan terhadap umat manusia."

12 September

Ketika lima anggota delegasi tersebut mengakhiri kunjungannya ke Jakarta, Pemerintah Indonesia setuju menerima tawaran bantuan dari masyarakat internasional. Dewan Keamanan mengesahkan satu pasukan multinasional (INTERFET) di bawah struktur komando tunggal yang dipimpin oleh Australia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memulai usaha bantuan kemanusiaan berskala besar. Pada saat yang sama, perhatian yang meningkat diberikan kepada kepulangan sukarela sekitar 250.000 orang Timor-Leste dari Timor Barat dan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan kawasan.

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai mundur dari Timor-Leste.

28 September

Indonesia dan Portugal, pada satu rapat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menegaskan kembali kesepakatan mereka untuk pengalihan kekuasaan di Timor-Leste kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka juga sepakat tentang perlunya tindakan-tindakan *ad hoc* untuk mengisi kekosongan akibat kepergian dini pemerintah sipil Indonesia.

UNAMET mendirikan kembali markas besarnya di Dili dan segera memulai usaha-usaha untuk memulihkan kapasitas logistiknya dan menempatkan kembali personel UNAMET ketika kondisi memungkinkan.

19 Oktober

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mengakui hasil Konsultasi Rakyat.

25 Oktober

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi 1272 (1999) mendirikan Pemerintah Transisi PBB di Timor-Leste (United Nations Transitional Administration in East Timor – UNTAET). Misi ini terdiri atas tiga unsur utama: pemerintahan dan administrasi publik; bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi darurat; dan satu unsur militer dengan kekuatan resmi mencapai 8.950 prajurit dan 200 pengamat militer.

27 Oktober

Seruan Gabungan Antar-Lembaga untuk Timor-Leste (Consolidated Inter-Agency Appeal for East Timor), yang dipimpin oleh Bank Dunia, diluncurkan

di Jenewa untuk mengumpulkan uang sejumlah USD199 juta guna memenuhi kebutuhan mendesak kemanusiaan hingga Juni 2000.

1 November

Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terakhir meninggalkan Timor-Leste. Akhir dari pendudukan selama 24 tahun ditandai dengan upacara perpisahan yang dihadiri oleh para anggota Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat di Timor Timur, TNI, para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta pemimpin perlawanan rakyat Timor-Leste dan Presiden Dewan Nasional Perlawanan Rakyat Timor-Leste (CNRT) Xanana Gusmão.

Misi penilaian antarlembaga yang dipimpin oleh Bank Dunia tiba di Dili dan mengadakan rapat di markas besar UNTAET dengan Xanana Gusmão dan Pejabat SRSG Ian Martin.

2 November

Milisi yang bermusuhan menghalangi usaha UNHCR di kamp-kamp pengungsi Timor Barat di kawasan Atambua sehingga perlu dilakukan tindakan polisi.

8 November

Tiga Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa memulai penyelidikan awal mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste.

15 November

Dewan Sosial dan Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC – Economic and Social Council) mengesahkan penyelenggaraan satu penyelidikan internasional terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste. Dewan melakukan pemungutan suara dengan hasil 27-10, dengan 11 suara abstain, mendukung satu resolusi yang disusun oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk mengirimkan para ahli dengan tugas mengumpulkan keterangan tentang kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di Timor-Leste sejak Januari 1999.

17 November

Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB (SRSG) dan Administrator Transisi yang baru ditunjuk Sergio Vieira de Mello mulai bertugas di Timor-Leste.

17 November

Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB (SRSG) dan Administrator Transisi yang baru ditunjuk Sergio Vieira de Mello mulai bertugas di Timor-Leste.

21 November

Komisi internasional penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste beranggotakan lima orang tiba di Dili. Komisi itu dipimpin oleh Sonia Picado.

22 November

SRSG pergi ke Timor Barat di mana ia dan Duta Besar Amerika Serikat Richard Holbrooke menyaksikan penandatanganan satu perjanjian antara INTERFET dan Tentara Nasional Indonesia yang dibuat untuk mempercepat kembalinya pengungsi dari Timor Barat.

UNHCR melaporkan bahwa walaupun gangguan dari milisi terus berlanjut, lebih daripada 90.000 orang telah kembali ke Timor-Leste.

27 November

SRSG menandatangani yang pertama dari serangkaian ketentuan hukum yang menentukan dasar dari pemerintahan UNTAET di Wilayah itu. Regulasi No. 1/1999 menetapkan kewenangan Administrator Transisi dan tata hukum untuk Wilayah itu.

1 Desember

José Ramos-Horta, Penerima Penghargaan Nobel, kembali ke Timor-Leste setelah 24 tahun di pengasingan. Ia disertai oleh SRSG.

2 Desember

SRSG menandatangani Regulasi No. 2/1999 tentang pembentukan Dewan Konsultasi Nasional (National Consultative Council – NCC) satu badan bersama Timor-Leste-UNTAET beranggotakan 15 orang. Melalui badan ini para wakil rakyat Timor-Leste dapat ambil bagian aktif di dalam proses pembuatan keputusan selama masa transisi.

3 Desember

UNTAET menetapkan, melalui regulasi No. 3/1999, satu Komisi Dinas Peradilan Transisi yang terdiri atas lima orang, yaitu tiga orang Timor-Leste dan dua orang internasional.

17 Desember

Satu konferensi donor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan di Tokyo menghasilkan bantuan lebih daripada USD500 juta dalam bentuk janji untuk membangun kembali Timor-Leste.

20 Desember

Pengamat militer PBB menemukan satu perkuburan massal di wilayah kantong Timor-Leste Oecussi. Delapan belas tempat penguburan dibongkar, beberapa di antaranya berisi lebih daripada satu mayat.

2000

3 Januari

UNTAET resmi mengambil kendali atas Pelabuhan Udara Dili. Satu perusahaan penerbangan Australia mulai terbang tiga kali seminggu ke Darwin sejak tanggal 18 Januari.

12 Januari

UNTAET, INTERFET, dan para pejabat militer Indonesia menandatangani Memorandum Kesepahaman yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama di perbatasan antara Timor-Leste dan Timor Barat.

19 Januari

UNTAET, yang bertindak atas nama Timor-Leste menandatangani Memorandum Kesepahaman yang memperpanjang masa berlaku Perjanjian Celah Timor dengan Pemerintah Australia.

21 Januari

Sekretaris Jenderal PBB menunjuk Letnan Jenderal Jaime de los Santos dari Filipina sebagai Panglima Pasukan unsur militer UNTAET.

31 Januari

Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan laporan pertamanya tentang kerja UNTAET. Ia mengatakan bahwa bencana kemanusiaan yang terjadi setelah Konsultasi Rakyat telah menjadi krisis yang paling menekan yang dihadapi oleh UNTAET.

15 Februari

Sekretaris Jenderal PBB memulai kunjungan resmi ke Jakarta selama dua hari, yang merupakan kunjungan pertamanya sejak menduduki jabatan, dan bertemu dengan para pejabat Indonesia.

17 Februari

Sekretaris Jenderal tiba di Timor-Leste untuk kunjungan selama dua hari. Di Dili ia bertemu dengan pemimpin gerakan kemerdekaan Xanana Gusmão, Penerima Penghargaan Nobel Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo, dan Uskup Basilio Nascimento.

21 Februari

Presiden Bank Dunia James Wolfensohn, Xanana Gusmão, dan SRSG menandatangani perjanjian hibah untuk pencairan dana sebesar USD 21,5 juta selama dua setengah tahun untuk pemberdayaan masyarakat dan proyek-proyek pemerintah lokal.

23 Februari

INTERFET secara resmi menyerahkan komando militernya atas Wilayah itu kepada UNTAET.

Rencana eksploitasi gas senilai USD1,4 juta di Celah Timor disetujui.

28 Februari

UNTAET dan INTERFET menuntaskan pengaturan administratif untuk pengalihan tanggung jawab keamanan.

29 Februari

Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid mengunjungi Timor-Leste. Presiden menandatangani satu komunike dengan SRSG, menetapkan, antara lain, satu peraturan perbatasan untuk lalu lintas orang dan barang antara Timor-Leste dan Indonesia, kerjasama dalam bidang hukum, dan kelanjutan bantuan bagi mahasiswa Timor-Leste yang ingin belajar di universitas-universitas di Indonesia.

3 Maret

Serangkaian serangan bersenjata terhadap pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan orang Timor-Leste menyebabkan UNTAET menyatakan wilayah bagian barat sebagai wilayah dengan "ancaman tinggi."

27 Maret

Satu sekolah kepolisian yang didukung oleh UNTAET dibuka di Dili.

29 Maret

SRSG dan Jaksa Agung Indonesia, Marzuki Darusman, menetapkan satu kesepakatan sementara delapan minggu mengenai pemberian bantuan timbal-balik dalam bidang hukum, peradilan, dan hak asasi manusia.

31 Maret

Pemerintah Indonesia menambah waktu selama tiga bulan untuk batas waktu pengembalian pengungsi dan menarik keputusannya untuk menghentikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi, dengan mengemukakan bahwa akan meminta bantuan dari masyarakat internasional.

SRSG meminta Menteri Pertahanan Indonesia, Mahfud MD, untuk mengendalikan setiap "ekstremis" dan menghentikan serangan milisi ke Timor-Leste oleh milisi yang berpangkalan di Indonesia. Menteri Pertahanan mengatakan bahwa tentara maupun polisi Indonesia tidak terlibat mendukung kelompok-kelompok milisi di Timor Barat.

3 April

UNTAET, Bank Dunia, dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme – UNDP) menandatangani satu perjanjian hibah sebesar USD499.000 untuk proyek penciptaan lapangan kerja bagi golongan masyarakat miskin di Dili.

5 April

UNTAET mengumumkan keputusannya untuk menunjuk orang Timor-Leste pada posisi-posisi administratif tinggi di dalam pemerintah baru di Dili, yaitu sebagai wakil administrator distrik dan wakil kepala departemen. SRSG mengumumkan pembentukan Dewan Penasihat Distrik untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Timor-Leste untuk menyuarakan pandangannya mengenai semua persoalan penting.

11 April

Panglima Pasukan UNTAET dan Komandan Tentara Nasional Indonesia di Timor Barat menandatangani Memorandum Kesepahaman mengenai keamanan, lintas perbatasan, pengembalian pengungsi, dan bantuan kemanusiaan di sepanjang perbatasan antara Timor-Leste dan Timor Barat. Memorandum Kesepahaman menegaskan Memorandum 12 Januari, menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak diperbolehkan membawa senjata melintasi perbatasan dan menegaskan bahwa kedua pihak sepakat bekerjasama untuk melaporkan dan menyelidiki insiden di perbatasan.

28 April

Dinas Pos Timor-Leste mulai beroperasi.

12 Mei

Pengadilan Distrik Dili membuka sidang terbuka pertamanya.

19 Mei

Lebih daripada delapan puluh orang dipastikan meninggal, sebagian besar dari mereka pengungsi Timor-Leste, dalam banjir besar yang melanda Timor Barat. Sekitar 21.000 orang diperkirakan meninggalkan rumah, 16.000 di antaranya berasal dari 21 kamp pengungsi Timor-Leste di Kabupaten Belu di Timor Barat bagian tenggara.

30 Mei

Pada pembukaan Konferensi tentang Rekonstruksi Timor-Leste yang diadakan di Dili, UNTAET menyarankan satu periode pemerintahan bersama antara UNTAET dan Timor-Leste sebelum pengalihan kekuasaan penuh.

7 Juni

UNTAET dan Bank Dunia menandatangani hibah sebesar USD12,7 juta untuk membantu memperbaiki sektor kesehatan Timor-Leste.

8 Juni

SRSG dan Xanana Gusmão bertemu dengan Gubernur Timor Barat untuk membahas bagaimana mempercepat pemulangan pengungsi dan meningkatkan perdagangan di pulau Timor.

20 Juni

UNHCR dan organisasi-organisasi bantuan lainnya menghentikan kegiatan di tiga kamp pengungsi di dekat Kupang, menyusul apa yang digambarkan sebagai insiden keamanan yang serius ancaman dan intimidasi terhadap staf mereka.

21 Juni

UNTAET dan CNRT menyepakati satu struktur dan komposisi baru untuk Dewan Konsultasi Nasional (National Consultative Council – NCC). NCC yang baru diperluas ini akan beranggotakan 33 orang. Para anggota meliputi 13 wakil distrik, tujuh wakil dari CNRT, dan tiga wakil dari kelompok-kelompok politik lainnya. Anggota-anggota lainnya mewakili kelompok pemuda, kelompok perempuan, organisasi nonpemerintah, serta komunitas Katolik, Protestan dan Muslim, asosiasi profesional dan petani, gerakan buruh, dan komunitas bisnis. Semua anggota termasuk ketua NCC adalah orang Timor-Leste.

23 Juni

Di Lisabon, komunitas donor menjanjikan kelanjutan dukungan untuk rekonstruksi Timor-Leste dan administrasi pemerintah baru Timor-Leste, dan mengesahkan satu program kerja untuk pembangunan Wilayah itu hingga Desember 2000. Para donor mengisyaratkan dukungan mereka untuk menutup kekurangan pembiayaan sejumlah USD16 juta untuk tahun anggaran selanjutnya.

12 Juli

NCC mengesahkan satu regulasi menetapkan satu Kabinet Transisi yang terdiri atas empat orang Timor-Leste dan empat orang dari UNTAET.

Sekretaris Jenderal menunjuk Letnan Jenderal Boonsrang Niumpradit dari Muangthai sebagai Panglima Pasukan unsur militer UNTAET mulai 19 Juli 2000.

50 orang lulusan pertama Akademi Kepolisian Timor-Leste secara resmi melaksanakan tugasnya sebagai petugas polisi.

17 Juli

Kabinet Transisi mengadakan rapat pertamanya di Dili.

24 Juli

Seorang prajurit UNTAET dari kontingen Selandia Baru terbunuh menyusul tembak-menembak dengan satu kelompok bersenjata di dekat perbatasan dengan Timor Barat. Ini kematian pertama yang terkait dengan pertempuran seorang penjaga perdamaian PBB di Timor-Leste.

27 Juli

Pada pertemuan di Indonesia antara SRSG, Panglima Pasukan UNTAET, dan Komandan TNI di Timor Barat, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, disepakati pembentukan satu komite *ad hoc* bersama yang terdiri atas Tentara Nasional Indonesia dan pasukan penjaga perdamaian PBB, untuk menyelidiki pembunuhan terhadap prajurit UNTAET pada 24 Juli.

31 Juli

UNTAET meresmikan program pelatihan diplomatik Timor-Leste pertama di Dili.

3 Agustus

Dewan Keamanan menyerukan kepada Pemerintah Indonesia agar bekerjasama erat dengan PBB untuk mengakhiri serangan lintas batas dari Timor Barat dan melucuti milisi yang masih beroperasi di wilayah perbatasan.

10 Agustus

Seorang prajurit UNTAET dari kontingen Nepal terbunuh dalam tembak-menembak dengan milisi di Suai dekat perbatasan dengan Timor Barat.

23 Agustus

Satu delegasi tingkat tinggi Indonesia memberikan penjelasan kepada SRSG tentang kebijakan baru Pemerintah Indonesia mengenai pengungsi dan mengatakan bahwa kamp-kamp pengungsi di Timor Barat akan ditutup dalam waktu tiga sampai enam bulan dengan koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

25 Agustus

Hukuman pidana pertama di Timor-Leste dijatuhkan oleh Pengadilan Distrik Dili.

6 September

Tiga orang staf UNHCR dibunuh di Atambua, Timor Barat, menyusul serangan yang dilakukan oleh milisi bersenjata terhadap kantor UNHCR.

8 September

Dewan Keamanan mengadopsi resolusi 1319 yang mendesak "bahwa pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah segera, dalam pemenuhan tanggungjawabnya, melucuti dan membubarkan segera milisi, memulihkan hukum dan ketertiban di wilayah-wilayah yang terkena di Timor Barat, menjamin keselamatan dan keamanan di kamp-kamp pengungsi dan untuk para pekerja kemanusiaan, serta mencegah penyerangan lintas batas ke wilayah Timor-Leste".

12 September

Kabinet Transisi Timor-Leste menyetujui pembentukan Angkatan Pertahanan Timor-Leste (East Timor Defence Force – ETDF) dengan bekas prajurit Falintil menjadi kekuatan inti berkekuatan 3.000 orang.

23 Oktober

Presiden CNRT Xanana Gusmão dipilih menjadi ketua Dewan Nasional (National Council – NC) Timor-Leste, satu badan pendahulu parlemen Timor-Leste.

10 November

Satu delegasi Dewan Keamanan mengunjungi Timor Barat dan Timor-Leste untuk membahas pelaksanaan resolusi 1272, yang memberi mandat kepada

UNTAET untuk mempersiapkan Timor-Leste menuju kemerdekaan. Di Timor Barat, delegasi meninjau pelaksanaan resolusi 1319, khususnya perlunya melucuti dan membubarkan kelompok-kelompok milisi dan pemulangan pengungsi ke Timor-Leste.

15 November

Universitas Nasional Timor Lorosae dibuka.

1 Desember

Surat dakwaan pertama terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan berat di Timor-Leste disampaikan kepada Pengadilan Distrik Dili.

11 Desember

Surat dakwaan pertama yang berisi dakwaan "kejahatan terhadap umat manusia" yang dilakukan di Timor-Leste diajukan ke pengadilan.

13 Desember

Kabinet Transisi Timor-Leste menyepakati satu usulan untuk membentuk Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi.

2001

3 Januari

Tentara Nasional Indonesia dan pasukan perdamaian PBB sepakat untuk melancarkan operasi keamanan bersama di sepanjang perbatasan Timor-Leste dan provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia, di Timor Barat.

17 Januari

Kabinet Transisi Timor-Leste menyetujui rancangan regulasi-regulasi mengenai pendirian angkatan pertahanan untuk Timor-Leste dan mengenai pendaftaran partai-partai politik.

31 Januari

Melalui Resolusi 1338 (2001) Dewan Keamanan memperpanjang mandat UNTAET hingga 31 Januari 2002.

1 Februari

Pada satu upacara di Aileu yang menandai peralihan Falintil menjadi Angkatan Pertahanan Timor-Leste, Panglima Falintil Taur Matan Ruak ditunjuk sebagai Panglima Angkatan Pertahanan, dengan pangkat Brigadir Jenderal.

16 Maret

SRSG mengumumkan bahwa pemilihan umum demokratis yang pertama di Timor-Leste akan diadakan tanggal 30 Agustus 2001, setelah penandatangan Regulasi tentang Pemilihan Umum Majelis Konstituante.

17 Maret

UNTAET memulai pendaftaran penduduk Timor-Leste, satu langkah penting ke arah penyelenggaraan pemilihan umum pertama anggota Majelis Konstituante.

4 Mei

Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukum enam orang antara 10 dan 20 bulan penjara atas peran mereka dalam pembunuhan terhadap tiga orang staf UNHCR di Atambua, Timor Barat, 6 September 2000. Sekretaris Jenderal Kofi Annan menyebut hukuman yang ringan itu sebagai "tanggapan yang samasekali tidak bisa diterima."

7 Mei

Pendaftaran partai politik dan kandidat independen untuk pemilihan umum anggota Majelis Konstituante dimulai.

9 Juni

Organisasi payung perlawanan Timor-Leste, CNRT, dibubarkan untuk membuka jalan bagi berbagai partai politik untuk ambil bagian dalam pemilihan umum mendatang.

23 Juni

Pendaftaran penduduk berakhir dengan angka 778.998 orang Timor-Leste yang terdaftar dan diberi kartu identitas sementara.

28 Juni

SRSG memberikan pidato kenegaraan yang pertama di hadapan Dewan Nasional Timor-Leste, dengan memberikan laporan yang terperinci dan mendalam tentang kerja dan kemajuan yang dicapai, tantangan-tantangan yang ada di depan, dan kembali menyerukan dibuatnya satu Pakta Kesatuan Nasional.

3 Juli

Disepakati satu Pengaturan antara Administrasi Transisi Timor-Leste dan Pemerintah Australia yang memberikan 90 persen pendapatan dari cadangan gas dan minyak di Laut Timor kepada Timor-Leste.

30 Agustus

Ratusan ribu orang Timor-Leste menuju ke tempat pemungutan suara untuk memilih para anggota Majelis Konstituante, dalam pemilihan umum demokratis Timor-Leste yang pertama.

6 September

Fretilin dinyatakan sebagai partai pemenang, dengan meraih 57,3% suara, dalam pemilihan umum Majelis Konstituante Timor-Leste.

20 September

Dua puluh empat orang anggota Dewan Menteri Pemerintah Transisi Kedua Timor-Leste disumpah di hadapan masyarakat luas di Dili. Dewan yang baru ini menggantikan Kabinet Transisi.

22 Oktober

Ketua Majelis Konstituante Francisco Guterres menandatangani satu resolusi mengadopsi rekomendasi majelis agar UNTAET menyerahkan kedaulatan kepada lembaga-lembaga pemerintah Timor-Leste terpilih pada 20 Mei 2002.

26 Oktober

Batalion pertama Angkatan Pertahanan Timor-Leste resmi dilantik.

31 Oktober

Dewan Keamanan mendukung rekomendasi Sekretaris Jenderal Kofi Annan agar PBB melanjutkan perannya di Timor-Leste setelah kemerdekaan wilayah itu tahun berikutnya, dengan menegaskan bahwa penarikan mundur yang terlalu dini kehadiran internasional akan dapat menimbulkan destabilisasi pada sejumlah bidang penting.

26 November

UNTAET memulai pengurangan kekuatan militer yang telah dijadwalkan.

SRSG menyambut kedatangan di Timor-Leste Komisaris Polisi Sipil UNTAET yang baru Peter Miller yang berasal dari Kanada.

30 November

Majelis Konstituante menyetujui struktur umum rancangan pertama Konstitusi Timor-Leste.

11 Desember

Putusan bersalah yang pertama untuk kejahatan terhadap umat manusia dijatuhkan oleh Panel Kejahatan Berat Dili.

13 Desember

Konferensi Donor untuk Timor-Leste diadakan di Oslo, Norwegia, berakhir dengan ungkapan penghargaan dari negara-negara yang berpartisipasi pada kemajuan Timor-Leste dan perlunya memelihara momentum kemajuan yang telah dicapai sejauh ini.

2002

31 Januari

Dewan Keamanan secara bulat menerima resolusi 1392 (2002) yang memperpanjang mandat UNTAET sampai 20 Mei 2002.

Majelis Konstituante memilih mengubah dirinya menjadi parlemen pertama Timor-Leste setelah persetujuan akhir Konstitusi.

18 Februari

Jaksa penuntut internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mendakwa 17 orang milisi dan anggota Tentara Nasional Indonesia untuk kejahatan terhadap umat manusia yang diduga dilakukan pada 1999.

7 Maret

Seorang anggota milisi prointegrasi dinyatakan bersalah membunuh seorang anggota pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 24 Juli 2000 dan dihukum enam tahun penjara oleh satu pengadilan Indonesia.

22 Maret

Majelis Konstituante Timor-Leste menandatangani pemberlakuan Konstitusi pertama Timor-Leste.

14 April

Pemilihan presiden Timor-Leste diselenggarakan. Francisco Xavier do Amaral dan Xanana Gusmão menjadi calon.

17 April

Xanana Gusmão diumumkan sebagai Presiden terpilih Timor-Leste setelah memenangkan 82,7% suara dalam pemilihan umum presiden.

20 Mei

Timor-Leste menjadi negara merdeka.

Catatan tentang sumber

Kecuali sedikit perkecualian, dokumen-dokumen yang dikutip dalam laporan ini disimpan dalam arsip tertutup milik badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan pemerintah, dan organisasi-organisasi nonpemerintah. Kumpulan dokumen yang paling penting adalah milik: i) Unit Hak Asasi Manusia (Human Rights Unit – HRU) UNMISET di Dili; ii) Unit Kejahatan Berat (Serious Crimes Unit – SCU) di Kantor Jaksa Agung Timor-Leste; dan iii) organisasi hak asasi manusia Yayasan HAK. Penulis beruntung karena diberi izin mempelajari berkas-berkas dari semua koleksi tersebut untuk keperluan penyusunan laporan ini. Untuk memudahkan pencarian kembali di masa mendatang dokumen-dokumen yang dikutip, asal-usul dari setiap dokumen dicantumkan pada setiap referensi, bersama dengan nomor dokumen yang bersangkutan. Jadi, dokumen-dokumen yang berasal dari Human Rights Unit (HRU) ditulis sebagai 'Koleksi HRU, Doc. #X;' yang berasal dari Serious Crimes Unit ditulis sebagai 'Koleksi SCU, Doc. #X;' dan yang berasal dari Yayasan HAK ditulis sebagai 'Koleksi Yayasan HAK, Doc. #X."

Beberapa bagian dari laporan ini berdasarkan pada karya-karya penulis yang telah diterbitkan. Pembahasan tentang militer Indonesia pada Bab 2 diambil dari: "Indonesia – On a New Course?" dalam Muthiah Alagappa (penyunting), *Coercion and Governance: The Declining Political Role of the Military in Asia*, Stanford: Stanford University Press, 2001, halaman 226-256. Beberapa bagian dari Bab 4 dan banyak bagian dari Bab 5 bersumber dari "The Fruitless Search for a Smoking Gun: Tracing the Origins of Violence in East Timor," dalam Freek Columbijn dan J. Thomas Lindblad (penyunting), *Roots of Violence in Indonesia*, Leiden: KITLV Press, 2002, halaman 243-276. Pembahasan tentang sejarah milisi dalam Bab 6, walaupun dengan beberapa perbaikan, pada dasarnya diambil dari: "People's War: Militias in East Timor and Indonesia," *South East Asia Research*, 9, 3, halaman 271-318. Dalam Bab 10, studi kasus 10.6 dan 10.7 merupakan versi yang sedikit diperbaiki dari laporan internal yang disusun oleh penulis sebagai Pejabat Urusan Politik UNAMET pada 1999. Beberapa bagian dari Bab 12 diambil dari: "If You Leave Us Here, We Will Die," dalam Nicolaus Mills dan Kira Brunner (penyunting), *The New Killing Fields: Massacre and the Politics of Intervention*, New York: Basic Books, halaman 159-183.

Catatan tentang penulis

Geoffrey Robinson adalah seorang Guru Besar Madya dan Wakil Kepala Urusan Pascasarjana, pada Jurusan Sejarah, University of California, Los Angeles (UCLA). Ia mendapatkan BA dari McGill University dan Ph.D dari Cornell University. Ia menulis *The Dark Side of Paradise:Political Violence in Bali* (Cornell University Press, 1995) dan sejumlah tulisan akademis mengenai sejarah dan politik Indonesia dan Timor-Leste. Dalam kurun waktu 1989-1994 ia bekerja pada kantor pusat Amnesty International di London, memimpin penelitian dan menulis sejumlah laporan utama mengenai Indonesia, Timor-Leste, dan Filipina. Sejak Juni sampai November 1999, ia bekerja sebagai Pejabat Urusan Politik pada Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste (UNAMET).

Lampiran 2:

Data dan metode statistik

Data dan metode statistik

3255 | Pendahuluan

3255 | Relevansi dari analisis data empiris terhadap mandat Komisi

3257 | Sumber-sumber data

3257 | Human Rights Violations Database (HRVD)

3257 | Proses pengambilan pernyataan oleh Komisi

3259 | Ciri demografis para deponen

3260 | Kemungkinan bias sampel dalam proses pengambilan pernyataan

3261 | Amnesty International

3262 | Fokupers

3262 | Pemberian kode terhadap sumber-sumber kualitatif (pernyataan naratif CAVR, Amnesty International, dan Fokupers)

3264 | Hasil pengumpulan data HRVD

3265 | Retrospective Mortality Survei (RMS)

3265 | Sampel statistis yang digunakan dalam RMS

3266 | Desain Angket dan pengembangan Retrospective Mortality Survei

3268 | Pelaksanaan survei dan pekerjaan lapangan

3269 | Graveyard Census Database (GCD)

3269 | Pengumpulan data GCD

3270 | Gambaran metodologis tentang teknik-teknik penyuntingan data, pembersihan, dan normalisasi nama

3270 | Pembersihan dan penyuntingan basis data

3271 | Penyuntingan dan pembersihan tanggal

3271 | Penyuntingan dan pembersihan usia

3272 | Penyuntingan dan pembersihan kode-kode pelanggaran dan hubungan

3272 | Penyuntingan dan pembersihan kode lokasi geografis

3272 | Deduplikasi pemakaman dan makam GCD

3273 | Proses pembersihan nama-nama

3274 | Penguraian nama

3275 | Kanonikalisasi nama

3277 | Pengodean jenis kelamin dan etnik

3277 | Konversi data

3278 | Tinjauan pertalian catatan (*record linkage*)

3279 | Aturan-aturan pencocokan

3279 | Pencocokan nama-nama

3280 | Pencocokan jenis kelamin dan etnis

3280 | Pencocokan lokasi

3281 | Mencocokkan tanggal

3281 | Pembatasan tingkat pencatatan

3282 | Pencocokan intra-sistem

3282 | Pencocokan fatal intra-sistem HRVD

3283 | Pencocokan fatal intra-sistem RMS

3283 | Pencocokan nonfatal intra-sistem HRVD

3283 | Penilaian dan pencocokan auto-kanonikalisasi nama nonfatal

3285 | Ulasan pencocokan nonfatal intra-sistem HRVD oleh ahli hubungan data

3286 | Pencocokan Antarsistem

3286 | Tahap 1 – Pencocokan yang Dihasilkan Komputer

3287 | Tahap 2 – Pencocokan dengan bantuan komputer

3287 | Tahap 3 – Pencocokan data yang tidak jelas

3288 | Pencocokan fatal pasangan-baik antarsistem

3290 | Pengolahan data pelanggaran yang dilaporkan melibatkan kelompok-kelompok korban tak dikenal

3291 | Teknik-teknik perkiraan statistik yang digunakan dalam analisis pelanggaran fatal dan pemindahan

3291 | Kalkulasi beban RMS

3293 | Penentuan tanggal RMS untuk analisa pemindahan

3293 | Penyesuaian beban RMS untuk perkiraan angka kematian

3295 | Analisis sensitivitas terhadap asumsi-asumsi dalam pengukuran kembali angka kematian (*mortality re-weighting*)

3296 | *Multiple System Estimation* (MSE): motivasi dan teori

3299 | Mengalokasikan GCD menurut jenis kematian

3300 | Analisis sensitivitas hilangnya pengetahuan sosial: penyesuaian-penyesuaian untuk perkiraan yang terlalu rendah

Daftar tabel:

3260 | **Tabel 1 :** Pernyataan yang diberikan, relatif terhadap jenis kelamin pemberi pernyataan

3264 | **Tabel 2:** Matriks pencatatan perhitungan untuk Basis Data Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HRVD)

3268 | **Tabel 3:** Daftar aldeia yang tidak dihitung dalam pengambilan sampel

3274 | **Tabel 4:** Contoh penulisan nama Portugis orang Timor-Leste

3274 | **Tabel 5:** Contoh penulisan nama asli orang Timor-Leste

3278 | **Tabel 6:** Tabel perhitungan total yang tercatat oleh basis data sebelum dan sesudah pembersihan

3288 | **Tabel 7:** Matriks hasil pencocokan antarsistem

3289 | **Tabel 8:** Tabel total catatan perhitungan pencocokan antarsistem dan persentase pelanggaran fatal menurut pasangan set data

3291 | **Tabel 9:** Tingkat duplikasi di antara korban-kelompok

3299 | **Tabel 10:** Tabel perkiraan proporsi kematian, menurut periode dan cara kematian

Daftar grafik:

3258 | **Grafik 1:** Jumlah pernyataan yang diberikan, berdasarkan distrik

3259 | **Grafik 2:** Jumlah pernyataan, berdasarkan usia dan jenis kelamin pemberi pernyataan

3302 | **Grafik 3:** Perkiraan tingkat kematian kasar bagi Timor-Leste

3302 | **Grafik 4:** Perkiraan kematian total akibat kelaparan dan penyakit di Timor-Leste (berdasarkan MSE)

3303 | **Grafik 5:** Perkiraan kematian total akibat kelaparan dan penyakit di Timor-Leste (berdasarkan RMS)

Lampiran 2:
Data dan metode statistik

Pendahuluan

1. Kejadian menyangkut hak asasi manusia adalah masalah rumit. Seorang saksimata atau korban bisa melaporkan tentang satu atau beberapa korban, yang masing-masing bisa saja mengalami satu atau banyak pelanggaran. Setiap pelanggaran bisa saja melibatkan satu atau banyak pelaku. Dengan demikian, interaksi antara orang-orang yang berbeda dalam ribuan kejadian sejenis ini mengharuskan adanya metode-metode identifikasi dan agregasi empiris yang cermat untuk mendukung analisis kuantitatif yang valid dan bisa dipercaya.

2. Untuk menjamin kualitas data, Komisi menempuh beberapa proses. Apendiks metodologis ini mengetengahkan data dan metode yang digunakan untuk memperoleh hasil data statistik Komisi.

3. Apendiks ini dibagi dalam enam bagian utama. Bagian 1 mengetengahkan garis besar tentang relevansi dari analisis data empiris terhadap mandat Komisi. Bagian 2 mengetengahkan gambaran terperinci tentang set-set data yang berbeda yang digunakan dalam analisis statistik Komisi. Bagian 3 menggambarkan penyuntingan data, pembersihan, dan teknik normalisasi nama yang diterapkan terhadap data. Bagian 4 mengetengahkan berbagai tabulasi perekaman pada tahapan yang berbeda dari proses konversi data. Bagian 5 mengetengahkan berbagai teknik deduplikasi dan pertalian pencatatan (*record linkage*) yang digunakan untuk mencocokkan laporan-laporan berganda tentang korban perorangan yang sama. Bagian 6 mendokumentasikan proses pengolahan data yang digunakan untuk menerangkan laporan-laporan berganda atas kelompok-kelompok korban yang tidak dikenal. Akhirnya, Bagian 7 mengetengahkan teknik estimasi statistik yang digunakan untuk mendapatkan estimasi total dari magnitudo dan pola pelanggaran dan pemindahan selama periode acuan Komisi.

Relevansi dari analisis data empiris terhadap mandat Komisi

4. Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) membantu Komisi mengumpulkan dan menganalisis data pelanggaran hak asasi manusia yang berhubungan dengan periode mandat Komisi, 1974-1999.* Apendiks ini menjelaskan bagaimana data ditata dan diproses.

* HRDAG adalah sebuah divisi dari Benetech Inc di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Para staf HRDAG termasuk para ahli statistik, pemrogram komputer, dan ahli pencatatan. Para anggota HRDAG telah bekerja dalam proyek-proyek dokumentasi dan analisis hak asasi manusia berskala luas di lima benua, di lebih daripada belasan negara selama 20 tahun terakhir. HRDAG telah bekerja dengan komisi kebenaran resmi di Haiti, Afrika Selatan, Guatemala, Peru, Ghana, dan Sierra Leone; dengan Pengadilan

5. Komisi membutuhkan sebuah sistem manajemen informasi untuk mengatur dan menyusun data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang digarisbawahi dalam mandatnya. Secara khusus, sistem manajemen informasi Komisi harus menyediakan informasi tentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang pada gilirannya harus menyediakan:

- Analisis statistik deskriptif tentang pola umum dan kecenderungan pelanggaran supaya dapat menggambarkan "sifat" pelanggaran hak asasi manusia (jenis pelanggaran yang dilakukan).[1]
- Proyeksi statistik dari total pelanggaran untuk menetapkan "tingkat" pelanggaran hak asasi manusia (jumlah total pelanggaran yang dilakukan).[2]
- Hipotesis statistik yang menguji pengulangan pelanggaran tertentu untuk menginvestigasi apakah pola pelanggaran tertentu merupakan "pola pelanggaran yang sistematis".[3]
- Analisis pada tingkat kasus dengan pengarsipan dan pencarian basis data untuk menjelaskan "anteseden, keadaan, faktor, konteks, motif, dan perspektif" yang mengakibatkan pelanggaran dalam skala besar.[4]
- Analisis kuantitatif terstruktur dan pengujian hipotesis untuk menyelidiki apakah "pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia merupakan hasil dari perencanaan yang disengaja, kebijakan, atau otorisasi" dari pihak partai tertentu dalam konflik.[5]
- Penjelasan resmi dari metodologi keilmuan dan statistik yang digunakan untuk menunjukkan bahwa temuan-temuan Komisi didasarkan pada "informasi faktual dan obyektif dan bukti-bukti yang dikumpulkan atau diterima oleh Komisi atau diberikan sebagai bantuan".[6]

6. Komisi menyadari bahwa setelah mengalami pelanggaran hak asasi manusia, banyak korban dan keluarga mereka hidup dalam kebisuan, ketakutan, dan keterasingan, sering lebih daripada 25 tahun lamanya. Karena itu, Komisi harus memikirkan sistem manajemen pengumpulan data dan informasi yang dapat sekaligus menghasilkan data historis yang dapat dipercaya dan memajukan partisipasi publik dalam proses-proses pencarian kebenaran.

Kejahatan Internasional untuk bekas Yugoslavia; dan dengan kelompok-kelompok hak asasi nonpemerintah di El Salvador, Kamboja, Guatemala, Kolombia, Afghanistan, Sri Lanka, dan Iran. Untuk informasi selanjutnya lihat http://www.hrdag.org.

Sumber-sumber data

7. Seksi ini mengetengahkan ciri-ciri dari tiga basis data statistik utama yang dikembangkan oleh Komisi untuk melaksanakan analisis kuantitatif terhadap pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan memajukan rekonsiliasi di Timor-Leste. Human Rights Violations Database (HRVD) adalah kumpulan pernyataan naratif dari para korban, dari laporan kualitatif Amnesty International (AI), dan dari data-data yang dikumpulkan oleh Fokupers, sebuah organisasi nonpemerintah Timor-Leste. Retrospective Mortality Survey (RMS) adalah sebuah sampel acak survei rumahtangga yang digunakan untuk memperkirakan pemindahan dan kematian selama periode mandat Komisi. Basis Data Sensus Makam (Graveyard Census Database, GCD) adalah sebuah sensus menyeluruh tentang permakaman umum di ke-13 distrik di Timor-Leste.

8. Paduan data dari ketiga aliran data Komisi—HRVD, RMS, dan GCD—digunakan untuk membuat perkiraan demografis independen terhadap keseluruhan tingkat, pola, kecenderungan, dan tingkat pertanggungjawaban terhadap pelanggaran fatal masa lalu di Timor-Leste.

Human Rights Violations Database (HRVD)

9. Bagian berikut ini akan menggambarkan tiga proyek dokumentasi yang dilakukan untuk membentuk Basis Data Pelanggaran Hak Asasi Manusia dari Komisi. Proses transformasi informasi kualitatif dari proyek-proyek dokumentasi ini ke dalam data statistik juga diketengahkan. Akhirnya, rekaman perhitungan dari ketiga proyek dokumentasi juga diutarakan.

Proses pengambilan pernyataan oleh Komisi

10. Pada Februari 2003, Komisi mulai mengumpulkan pernyataan naratif dari orang-orang di ketigabelas distrik di Timor-Leste dan dari orang-orang Timor-Leste yang saat itu tinggal di Timor Barat. Pernyataan-pernyataan ini adalah dasar dari HRVD. Komisi membuka kantor di ke-13 distrik untuk melaksanakan mandatnya. Secara keseluruhan, ada 7.669 pernyataan naratif yang relevan yang dikumpulkan, yang mendokumentasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan. Pernyataan naratif ini menyediakan informasi baik tentang pelanggaran fatal maupun pelanggaran nonfatal selama periode acuan Komisi.[*] Proses pengambilan pernyataan meliputi ke-65 subdistrik di ke-13 distrik di Timor-Leste.[†] Selain pengumpulan

* Tim-tim Komisi mengumpulkan sejumlah 7,824 pernyataan. Beberapa dari pernyataan-pernyataan ini (155 pernyataan) tidak dimasukkan ke dalam HRVD karena tidak menyebutkan pelanggaran yang berhubungan dengan mandat Komisi ataupun pelanggaran yang disebutkan tidak dalam cakupan periode acuan Komisi.

† Tim-tim distrik dari Komisi secara umum bekerja dengan komunitas-komunitas sesuai dengan identifikasi secara lokal terhadap subdistrik, desa, dan *aldeia*. Ketika Komisi memulai pekerjaannya pada awal 2002, jumlah dari subdistrik di Timor-Leste adalah 65; namun, Kantor Statistik Nasional dan Survei Suco Timor-Leste pada 2001melaporkan 64 subdistrik.

pernyataan di tingkat distrik, Komisi juga mengumpulkan 86 pernyataan dari para pengungsi Timor-Leste dan orang-orang lainnya yang tinggal di Timor Barat, melalui kemitraan Komisi dengan sebuah koalisi dari LSM-LSM yang berbasis di Timor Barat.*

11. Mengingat pemberian pernyataan secara keseluruhan bersifat sukarela dari pihak deponen, dan didasarkan pada suatu pengambilan sampel yang mungkin, persebaran pernyataan di sepanjang lokasi-lokasi geografis tidaklah seragam. Sebagaimana ditunjukkan oleh grafik di bawah ini, Komisi pada dasarnya mengumpulkan lebih banyak pernyataan dari para deponen di Bobonaro dan Ermera daripada di distrik-distrik lain. (Lihat paragraf 18 untuk gambaran terperinci tentang faktor-faktor yang mungkin memengaruhi proses pemilihan sampel selama proses pengambilan pernyataan Komisi.)

Jumlah pernyataan yang diberikan, berdasarkan distrik
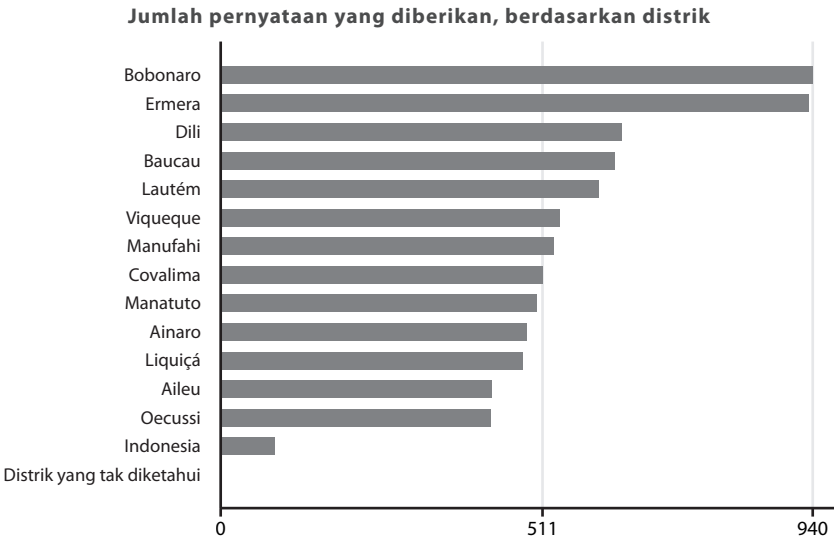
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

12. Untuk menganalisis informasi kualitatif ini secara statistik, informasi tersebut dikodifikasi ke dalam sebuah basis data FoxPro dengan menggunakan standar-standar desain dari model data "Siapa Melakukan Apa Terhadap Siapa".[7] Meskipun data-data ini menyediakan banyak pengetahuan yang bermanfaat, proses pengambilan pernyataan Komisi yang menghasilkan data-data ini tidak memakai sistem pengambilan sampel acak berbasis kemungkinan (*probability-*

* Koalisi LSM terdiri atas CIS (Center for Internally Displaced Persons Service), Truk-F, Lakmas (Lembaga Advokasi Kekerasan Masyarakat Sipil) Cendana Wangi, Yabiku, dan Yayasan Peduli Indonesia (YPI). Staf dari LSM-LSM ini mengumpulkan pernyataan dari orang-orang Timor-Leste yang tinggal di Belu, Kefa-menanu, Soe, dan Kupang di Timor Barat antara Februari dan Agustus 2003.

based random sample). Komisi cenderung menerima pernyataan dari mereka yang bersedia merelakan informasi yang bisa mereka ingat. Sebagai hasilnya, data naratif, secara tersendiri, tidak bisa dianggap sebagai data yang secara statistik mewakili keseluruhan tingkat dan pola pelanggaran di Timor-Leste.

Ciri demografis para deponen

13. Sekitar 21,4% (1.642/7.669) dari semua deponen dalam proses pengambilan pernyataan Komisi adalah perempuan. Dalam beberapa komunitas, para perempuan tidak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi Komisi karena mereka diharapkan tinggal di rumah. Selain itu, hanya sedikit perempuan yang merupakan anggota dari organisasi formal yang memiliki akses kepada informasi menyangkut pekerjaan Komisi, dan sejumlah orang lain ragu atau malu untuk memberikan kesaksian.*

14. Komisi menerima pernyataan dari orang dewasa dari segala usia. Baik laki-laki maupun perempuan, jumlah tertinggi deponen adalah dari kelompok umur 40-44, sebagaimana terlihat dalam bagan di bawah ini.

Jumlah pernyataan, berdasarkan usia dan jenis kelamin pemberi pernyataan
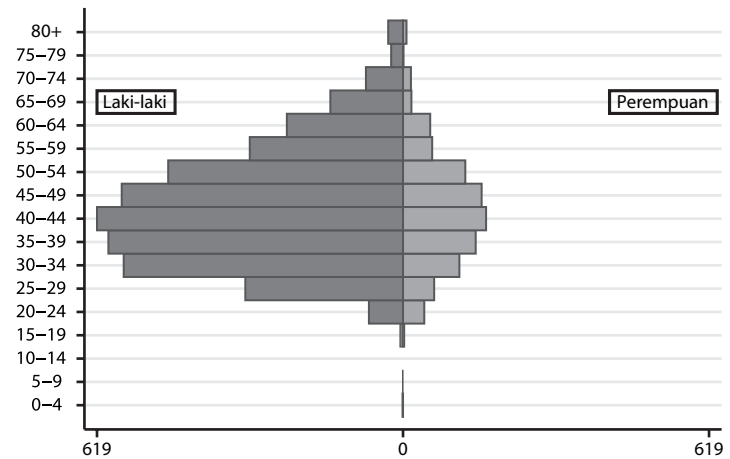
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR
Catatan: 34,6% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

15. Meskipun ada perbedaan mendasar dalam tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan pernyataan Komisi, deponen perempuan cenderung berbicara tentang pelanggaran terhadap diri mereka (ketimbang tentang pelanggaran terhadap orang lain) dalam proporsi yang kurang lebih sama

* CAVR, dokumen internal: Laporan Evaluasi Proses Pengambilan Pernyataan CAVR. Arsip CAVR

dengan deponen laki-laki. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini, dari semua pelanggaran yang dilaporkan oleh perempuan, 30,6% (2.939/9.605) adalah pelanggaran terhadap diri mereka, sementara untuk deponen laki-laki, 35.3% (17,438/49,382) dari pelanggaran yang dilaporkan adalah terhadap diri mereka.

Tabel 1: Pernyataan yang diberikan, relatif terhadap jenis kelamin pemberi pernyataan

Jenis kelamin deponen	Deponen sama dengan korban	Deponen berbeda dari korban	% (Deponen sama dengan korban)	% (Deponen berbeda dari korban)	Total
Perempuan	2939	6666	30.6	69.4	9605
Lelaki	17438	31944	35.3	64.7	49382
Tak tercatat	8	979	0.8	99.2	987
	20385	39589	34.0	66.0	59974

16. Tantangan sosial, budaya, dan ekonomi yang dihadapi perempuan dapat membatasi partisipasi mereka dalam sosialisasi dan proses pengambilan pernyataan Komisi. Namun, temuan-temuan statistik Komisi sesuai dengan klaim bahwa kebanyakan korban pembunuhan, penghilangan, penyiksaan, dan penganiayaan adalah laki-laki muda. Sebaliknya, mayoritas terbesar pelanggaran seksual yang terdokumentasi oleh Komisi dialami oleh korban perempuan. (Lihat Bagian 6: Profil pelanggaran Hak Asasi Manusia.)

17. Para pengambil pernyataan mewawancarai para deponen dalam bahasa Tetum, bahasa Indonesia, atau bahasa dan dialek Timor-Leste lainnya (yang merupakan bahasa lisan meskipun tidak umum ditulis), kemudian menuliskan teks wawancara dalam bahasa Tetum atau Indonesia. Formulir pengambilan pernyataan tersedia dalam bahasa Tetum dan Indonesia. Dari 7.669 <s00101> pernyataan yang diterima Komisi dan ditemukan berada dalam mandat Komisi, 81,7% adalah dalam bahasa Tetum, 17,0% dalam bahasa Indonesia, 1,2% dalam bahasa Timor- Leste lainnya, dan 0,1% dalam bahasa yang tidak ditentukan <s00002>. Karena formulir pengambilan pernyataan Komisi adalah dalam bahasa Tetum dan Indonesia, pernyataan yang diberikan dalam bahasa lain dituliskan oleh pengambil pernyataan ke dalam formulir resmi baik dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Tetum sebelum memasuki tahap kodifikasi, pemasukan data, dan analisis pernyataan naratif.

Kemungkinan bias sampel dalam proses pengambilan pernyataan

18. Sebagaimana dibahas dalam bagian lain dalam lampiran ini, sifat sukarela dari proses pengambilan pernyataan Komisi berujung pada suatu tingkat "seleksi sendiri". "Seleksi sendiri" ini, pada gilirannya, menimbulkan sejumlah faktor yang memengaruhi siapa saja yang bisa memberikan pernyataan seperti:

- Orang-orang yang tinggal di wilayah terpencil atau pegunungan yang sangat jauh dari pengumpulan data (seperti kota kabupaten) punya kesempatan

lebih kecil untuk menjadi sampel daripada mereka yang lebih dekat ke kota-kota setempat dan ibukota-ibukota distrik

- Orang-orang yang aktif secara sosial dan/atau tangkas secara fisik lebih mungkin memberikan pernyataan daripada mereka yang sakit, orang tua, penyandang cacat, atau yang mempunyai trauma
- Orang-orang yang aktif dalam komunitas setempat atau berhubungan dekat dengan pejabat desa, subdistrik, atau distrik setempat dan para tetua lebih besar kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam proses sosialisasi dan pengambilan pernyataan karena usaha-usaha pengumpulan pernyataan secara lokal sering diatur lewat struktur dan pejabat desa setempat
- Orang-orang yang meninggal sebelum Komisi dibentuk tidak berkesempatan mengungkapkan cerita mereka kepada Komisi; karena itu, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu cenderung kurang sering dilaporkan ketimbang peristiwa-peristiwa yang lebih kemudian
- Orang-orang dengan akses yang kecil atau tidak punya akses samasekali kepada media dan komunikasi massal lebih kecil kemungkinannya untuk mendekati Komisi, dan
- Orang-orang dari konstituen yang memusuhi Komisi lebih kecil kemungkinannya untuk membuat pernyataan

19. Untuk menjawab masalah bias sampel, Komisi melengkapi proses pengambilan pernyataan dengan kumpulan pernyataan naratif dari Fokupers dan dengan informasi sumber sekunder dari Amnesty International. Selain itu, untuk memperhitungkan bias dalam mengukur pemindahan dan pelanggaran fatal, Komisi mengembangkan Retrospective Mortality Survey (Survei Kematian Retrospektif) yang mengumpulkan informasi terstruktur dari sebuah sampel kemungkinan acak dari berbagai rumahtangga di Timor-Leste. (Lihat seksi di bawah untuk pemaparan yang lebih lengkap dari desain teknik sampling dan instrumen survei yang digunakan untuk Retrospective Mortality Survey).

Amnesty International

20. Amnesty International melaporkan tentang situasi hak asasi manusia Timor-Leste selama periode mandat Komisi sebagian besar dengan cara mengumpulkan informasi melalui jaringan kerja bawahtanah di Timor-Leste dan melalui hubungannya dengan diaspora Timor-Leste di Australia dan Portugal.

21. Komisi menerima 322 laporan dan dokumen dari Amnesty International, yang disusun antara 1975 dan 1999.*

* Komisi tidak berhasil mendapatkan Laporan-laporan Amnesty International berikut ini: ASA 21/12/83 UA 212/83 21 September; ASA 21/16/85 Disappearances; ASA 21/44/85 Unfair Trials and Possible Torture in Timor-Leste; ASA 21/22/87 Statement on ET by AI to the UN Special Committee on Decolonisation; ASA 21/23/87 ET: Releases of Political Prisoners; ASA 21/14/91 AI statement to UN Special Committee on Decolonisation - Appendix I and II; ASA 21/24/91 Timor-Leste: After the massacre – Appendix 1. Sebagai akibatnya, analisis statistik Komisi terhadap pelanggaran-pelanggaran di Timor-Leste yang dilaporkan

22. Laporan kualitatif dan Urgent Actions dari Amnesty International dikodifikasi dan dimasukkan ke dalam Human Rights Violations Database Komisi dengan menggunakan metode dan standar yang sama yang digunakan untuk pernyataan yang dikumpulkan oleh Komisi. Informasi yang dikumpulkan dari Amnesty International menggambarkan situasi umum hak asasi manusia di Timor-Leste, karena hal ini dipantau oleh komunitas hak asasi manusia internasional pada saat itu.

Fokupers

23. Forum Komunikasi untuk Perempuan Loro Sae (Fokupers), sebuah LSM hak asasi manusia setempat, membangun sebuah basis data pelanggaran setelah terjadi serangkaian kekerasan yang berhubungan dengan Konsultasi Rakyat 1999.* Basis data Fokupers dibangun dari wawancara-wawancara berkelanjutan yang dilaksanakan oleh staf Fokupers dengan perempuan-perempuan Timor-Leste. Semula, tujuan utama dari wawancara itu berkaitan dengan pekerjaan konseling yang dilakukan oleh Fokupers. Namun, tujuan-tujuan itu diperluas dengan memasukkan dokumentasi untuk maksud-maksud penyelidikan oleh otoritas hukum yang kompeten, seperti Unit Kejahatan Berat PBB. Pernyataan-pernyataan naratif diambil dalam bahasa Tetum.

24. Fokupers membangun basis datanya untuk mendukung publikasi laporan tentang kekerasan terhadap perempuan. Basis data asli Fokupers dipusatkan pada mengetengahkan data biografis para korban, peristiwa-peristiwa naratif yang digambarkan, danmengidentifikasi pelanggaran yang terjadi serta pelaku yang terlibat. Pada Juli 2004, Fokupers menyerahkan data-data ini kepada Komisi dalam kesepakatan bahwa identifikasi perorangan dari pelaku, korban, atau anggota keluarga dalam basis data tidak akan dicantumkan dalam Laporan Akhir Komisi. Staf Komisi memberikan kode ulang terhadap data-data tersebut, berdasarkan definisi-definisi terstandar dan skema pengodean Komisi, sehingga data-data ini dapat dianalisis sejalan dengan Basis Data Pelanggaran Hak Asasi Manusia Komisi (HRVD).

Pemberian kode terhadap sumber-sumber kualitatif (pernyataan naratif CAVR, Amnesty International, dan Fokupers)

25. Pengodean data adalah proses mentransformasi informasi naratif tak berstruktur tentang pelanggaran, korban, dan pelaku ke dalam suatu satuan yang bisa dihitung dari elemen-elemen data, tanpa membuang informasi penting atau menyalahartikan informasi yang terkumpul itu.

---

oleh Amnesty International tidak mencantumkan tindakan dan insiden terkait yang tercakup dalam laporan-laporan ini.

* Fokupers didirikan pada 1997 untuk mendukung korban kekerasan politik melalui program konseling dan bentuk bantuan lainnya kepada perempuan korban pelanggaran, termasuk mantan tahanan politik, janda perang, dan istri para tahanan politik. Mandat Fokupers juga meliputi memajukan hak asasi perempuan di antara penduduk lokal, terutama perempuan Timor-Leste.

26. Pada Oktober 2003, tim pengolahan data Komisi memeriksa kembali proses pengodean dan pemasukan data untuk mengidentifikasi kesalahan sistematis dan inkonsistensi dalam proses pengodean dan pemasukan data. Pada saat itu, 2.473 pernyataan telah terkodifikasi dan dimasukkan ke dalam basis data Komisi. Sebuah sampel acak atas 15% dari pernyataan (yaitu 371 pernyataan) dalam basis data diambil dan distratifikasi berdasarkan distrik di mana pernyataan tersebut diambil.

27. Setiap pernyataan diterima oleh seorang juru kode: sang pemberi kode mengode kembali pernyataan itu tanpa melihat bagaimana pernyataan itu dikodei sebelumnya. Lalu hasil kedua dibandingkan dengan pengodean sebelumnya dan kesalahan-kesalahan dalam pengodean pertama diidentifikasi, dicatat, dan diperbaiki. Selain itu, juru kode juga memeriksa kembali entri basis data untuk pernyataan ini dan mengidentifikasi dan mencatat jika ada kesalahan dan memperbaikinya.

28. Dari 371 pernyataan yang diperiksa kembali, teridentifikasi 416 kesalahan pengodean. 58% (241/416) dari kesalahan-kesalahan ini adalah kesalahan pengodean pelanggaran, 12% (49/416) kesalahan berhubungan dengan pengodean afiliasi korban, 10% (42/416) berhubungan dengan tingkat kekhususan lokasi yang dikodei, 9% (36/416) berhubungan dengan afiliasi institusional dari pelaku. Dari 416 kesalahan pengodean yang teridentifikasi, 70% (291/416) di antaranya adalah kesalahan tidak-diidentifikasi (yaitu, ketika tindakan tidak diidentifikasi sebagai sebuah pelanggaran atau orang atau lokasi tidak diidentifikasi oleh pemberi kode). 17% (71/416) kesalahan pengodean karena pemberi kode menggolongkan suatu tindakan sebagai sebuah pelanggaran meskipun apa yang digambarkan dalam naratif tidak memenuhi definisi dan kondisi-kondisi pembatasan dari kosakata terkontrol dari Komisi. Akhirnya, 13% (54/416) kesalahan pengodean adalah akibat dari klasifikasi yang salah terhadap suatu tindakan, dengan memasukkannya ke dalam kategori pelanggaran yang salah.

29. Sebagai hasil dari pemeriksaan kembali terhadap pengodean ini, tim pengolah data mengambil tiga langkah untuk mengurangi kesalahan-kesalahan seperti itu selanjutnya: (1) sejumlah revisi dilakukan terhadap kosakata terkontrol dari Komisi; (2) diadakan sebuah lokakarya di mana hasil pemeriksaan kembali itu diketengahkan kepada tim pengodean dan pelatihan lebih lanjut dilakukan dalam hal-hal yang diperlukan; dan (3) dilaksanakannya latihan penulisan kode dalam kelompok reguler di mana para pemberi kode mengode pernyataan yang sama dan memeriksa kembali konsistensi dari pilihan pengodean mereka dengan menggunakan ulasan kualitatif maupun pengukuran Inter-Rater Reliability (IRR) kuantitatif.*

30. Jenis-jenis revisi utama yang dilakukan terhadap kosakata terkontrol Komisi adalah:

- Pengurangan dalam kategori pelanggaran menjadi sebuah daftar yang lebih dapat diatur
- Penghalusan atas kondisi-kondisi yang membatasi dari kategori pelanggaran yang secara konseptual serupa (seperti penyiksaan dan penganiayaan)

* Inter-Rater Reliability adalah tingkatan di mana dua atau lebih pemberi kode setuju. Inter-Rater Reliability menjawab persoalan konsistensi dari implementasi dari sebuah sistem pengodean.

- Memusatkan kembali kosakata terkontrol hanya kepada pengukuran pelanggaran, tidak lagi baik untuk pengukuran pelanggaran maupun dampak fisik dan psikologis dari pelanggaran-pelanggaran ini
- Menyederhanakan definisi-definisi kategori pelanggaran dan menjamin sintaksis dari definisi tersebut lebih konsisten dengan kekhususan informasi yang dikumpulkan di dalam pernyataan-pernyataan (sebagai contoh, istilah-istilah teknis hukum dibahasakan ke dalam bahasa umum atau dihilangkan, karena istilah-istilah itu tidak sesuai dengan kenyataan historis yang diukur)
- Revisi terhadap daftar aktor-aktor institusional; baik penyederhanaan daftar itu maupun penyusunan hierarkis institusi-institusi yang mencerminkan hubungan struktural di antara institusi-institusi tersebut.

Hasil pengumpulan data HRVD

31. Kombinasi tiga sumber data HRVD menghasilkan sebuah basis data dengan pencatatan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Pencatatan ini mengetengahkan korban-korban perorangan dan kelompok, baik yang menderita pelanggaran fatal maupun nonfatal. Tabel ini menunjukkan perincian jumlah pencatatan yang dikumpulkan dalam setiap basis data. Perhatikan bahwa angka-angka mewakili total data sebelum dilakukan pembersihan, di mana pencatatan yang invalid dan berganda dikeluarkan dari basis data.

Tabel 2: Matriks pencatatan perhitungan untuk Basis Data Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HRVD)

	Jumlah pernyataan	Jumlah satuan	Pelanggaran fatal	Pelanggaran nonfatal
Pernyataan CAVR	7779	38812	6778	31595
Amnesty International	267	547	122	631
Fokupers	423	4888	376	3983
Total	**8.469**	**4.4247**	**7.276**	**36.209**

32. Kelompok merupakan catatan tentang korban tak bernama yang mengidentifikasi dua atau lebih korban. Sejumlah korban mengalami pelanggaran nonfatal yang berganda, yang lainnya mengalami hanya satu pelanggaran fatal. Karena itu, total pelanggaran tidak sama dengan jumlah korban.

Retrospective Mortality Survei (RMS)

33. Komisi melakukan sebuah Retrospective Mortality Survei (RMS) untuk menyediakan sebuah perkiraan berbasis kemungkinan terhadap pemindahan dan kematian. Survei ini menarik sebuah sampel acak bertingkat dari rumahtangga, dan menggunakan angket terstruktur untuk mengumpulkan informasi tentang kematian dalam keluarga dan kejadian pemindahan selama periode acuan Komisi. Survei ini memungkinkan perkiraan statistik terhadap tingkatan kematian secara alami, kematian yang berhubungan dengan kelaparan, kematian yang berhubungan dengan konflik, dan perpindahan.

Sampel statistis yang digunakan dalam RMS

34. Sampel RMS didasarkan pada dua tahapan penyusunan sampel. Tahapan pertama adalah sebuah sampel dari 2.336 *aldeia* di Timor-Leste, dan tahapan kedua adalah sampel dari rumahtangga dalam *aldeia-aldeia* terpilih.*

35. Populasi dari rumahtangga ditingkatkan menurut variabel-variabel berikut ini: kota/desa, lokasi distrik, dan tingginya populasi.† Metode stratifikasi implisit digunakan sehingga daftar *aldeia* disortir berdasarkan tingkatan variabel-variabel berikut ini: kota/desa, distrik, dan ketinggian dari permukaan laut, dan sebuah sampel acak sistematis memilih *aldeia-aldeia* di setiap variabel-variabel terstratifikasi.‡ Sebuah pengukuran kumulatif dari besarnya variabel diciptakan dan sebuah sampel interval dikalkulasi sebagai jumlah kluster (144) dibagi dengan total pengukuran besarannya (180.015), yang setara dengan 1.250,1. Sekumpulan angka acak antara 1 dan 1.250,1 diambil (397,235) dan *aldeia* dengan pengukuran kumulatif dari besaran di atas jumlah itu dipilih sebagai sampel. 1250,1 ditambahkan secara berulang ke angka awal yang dibangun secara acak dan *aldeia* diseleksi dari sepanjang daftar itu dalam cara yang sama.

* *Aldeia* adalah unit administratif terkecil di Timor-Leste. Umumnya, sebuah *aldeia* adalah sebuah perkampungan dari sekelompok rumah di sebuah wilayah setempat. Biasanya, sebuah *suco* (desa) terdiri atas tiga atau empat *aldeia*, dan sekelompok *suco* membentuk satu subdistrik yang merupakan bagian administratif dari sebuah distrik. Menurut Survei Suco Timor-Leste 2001 terdapat 13 distrik, 64 subdistrik, 498 *suco*, dan 2.336 *aldeia* di Timor-Leste. Tim distrik Komisi umumnya bekerja di seluruh 65 wilayah yang dianggap berbagai komunitas sebagai subdistrik, karena batas-batas administratif membutuhkan waktu untuk ditata kembali menyusul berakhirnya pendudukan.

† Stratifikasi adalah proses pengelompokan anggota populasi ke dalam subkelompok yang relatif homogen sebelum dilakukan pengambilan sampel. Strata ini perlu terpisah (eksklusif) satu sama lain sehingga setiap unsur dalam populasi hanya dapat dimasukkan ke dalam satu stratum. Strata tersebut juga harus lengkap secara kolektif, di mana tidak boleh ada unsur populasi yang diabaikan. Sampel acak dengan demikian diterapkan pada setiap stratum. Sampel acakbertingkat sering meningkatkan keterwakilan sampel dengan mengurangi kesalahan pengambilan sampel.

‡ Komisi menggunakan sebuah metode yang dikenal sebagai Kemungkinan Proporsional terhadap Besaran [*Probability Proportional to Size*] (dalam hal ini 'besaran' atau '*size*' menunjuk kepada jumlah rumahtangga dan bukan menunjuk kepada populasi, meskipun keduanya jelas saling berhubungan). Metode tersebut merupakan rancangan umum dalam survei jenis ini.

36. Keputusan untuk menarik sebuah angka pasti dari 20 rumahtangga, ketimbang suatu angka yang proporsional terhadap besaran *aldeia* atau metode alokasi yang lain, terutama merupakan pertimbangan operasional. Menyeleksi sebuah jumlah pasti dari rumahtangga per aldeia adalah salah satu cara untuk menjaga kontrol atas keseluruhan besaran sampel dan agar mempunyai sebuah perkiraan penyebaran beban kerja yang sama di antara para pewawancara.

37. Komisi mempertimbangkan kelayakan menggabungkan responden Timor-Leste yang masih mengungsi di Timor Barat ke dalam populasi acuan.* Namun, keprihatinan atas keamanan, aspek operasional, dan kualitas data yang muncul dari kondisi di Timor Barat menyulitkan pelaksanaan survei di sana. Karena itu, populasi acuan yang disampelkan oleh Komisi terdiri atas semua rumahtangga dalam ketigabelas distrik di Timor-Leste.

38. Adalah tidak optimal, baik karena alasan-alasan statistik maupun operasional, untuk membolehkan *aldeia-aldeia* yang mempunyai kurang daripada 20 rumahtangga untuk disampelkan. Karena itu, *aldeia* yang kecil digabungkan dengan *aldeia* di sekitarnya (yang tidak selalu harus berdekatan atau berbatasan), sebelum pengambilan sampel dilakukan, sehingga perkiraan jumlah rumahtangga dalam sebuah kluster (diartikan sebagai sebuah *aldeia* atau sekelompok *aldeia*) sekurang-kurang adalah 40, untuk mengurangi kemungkinan bahwa sebuah kluster sampel mempunyai kurang daripada 20 rumahtangga. Dalam kenyataan, karena ketidakakuratan dari kerangka ini, setibanya di sebuah *aldeia*, sebuah tim lapangan bisa saja menemukan bahwa *aldeia* itu mempunyai kurang daripada 20 rumahtangga, baik karena jumlah rumahtangga yang dilaporkan dalam sensus tahun 1990 tidak akurat, maupun karena telah terjadi perubahan dalam tahun-tahun antara. Karena alasan ini ke 144 kluster *aldeia* sampel sebenarnya terdiri atas 165 *aldeia*. Secara operasional, ini berarti bahwa dalam kluster-kluster ini, para pewawancara harus menarik sampel acak 20 rumahtangga dari antara gabungan jumlah total rumahtangga dalam kluster itu.

Desain Angket dan pengembangan Retrospective Mortality Survei

39. Angket RMS dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan berikut:

- Untuk menghasilkan perkiraan total kematian di Timor-Leste antara 1974 dan 1999, dengan menggunakan baik teknik-teknik perkiraan berbasis survei dan teknik-teknik Perkiraan Sistem Berganda (*Multiple Systems Estimation*), dan
- Untuk mengembangkan analisis berbasis survei yang memperkirakan dan menggambarkan gerakan perpindahan yang rumit di Timor-Leste sepanjang periode mandat Komisi.

* Seksi 3.3 Regulasi 2001/10 menyatakan: "Komisi dapat melaksanakan semua kegiatan yang konsisten dengan pemenuhan mandatnya dalam Regulasi saat ini."

40. Sebagai hasilnya, angket itu ditata dalam modul-modul berikut ini:

- Sebuah register/daftar rumahtangga
- Sebuah daftar perpindahan kepala rumahtangga
- Sebuah riwayat kelahiran perempuan dewasa
- Sebuah riwayat saudara kandung laki-laki/perempuan dewasa
- Sebuah riwayat pengasuhan laki-laki/perempuan dewasa
- Sebuah seksi umum pelanggaran hak asasi manusia

41. Angket ini* diulas oleh tiga ahli statistik hak asasi manusia yang bukan merupakan bagian dari Komisi† dan beberapa orang spesialis di Komisi. Melalui proses ulasan ini, perbaikan dilakukan terhadap tampilan dan rancangan angket, dan sejumlah masalah peristilahan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Tetum diidentifikasi.

42. Satu paket yang terdiri atas delapan wawancara kognitif dilaksanakan selama tahap pengembangan angket itu.Wawancara kognitif ini bertujuan menjelajahi proses kognitif responden. Wawancara ini mencoba mengidentifikasi kesulitan dan kemungkinan jalan keluar terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh responden dalam (i) pemahaman terhadap pertanyaan, (ii) mengingat kembali informasi yang relevan, (iii) proses-proses keputusan, dan (iv) proses-proses tanggapan.‡ Sebanyak delapan orang—empat dalam kondisi kerja dan empat di lapangan—berpartisipasi dalam wawancara kognitif ini. Pengertian berharga diperoleh dari penyelidikan terhadap ingatan responden terhadap tanggal. Secara khusus, proses dan tanggapan kognitif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan waktu dan tanggal menunjukkan bahwa sering, ketika seorang responden menjawab "Tidak Tahu", mereka mungkin hanya tidak mengetahui tanggal yang pasti menurut kalender Gregorian. Namun, tanggapan mereka menunjukkan bahwa sering waktu dari berbagai peristiwa lebih mudah diingat dengan merujuk kepada penanda waktu yang lain seperti peristiwa-peristiwa besar lainnya, atau titik tertentu dalam siklus pertanian atau musim.

43. Dari proses wawancara kognitif, kami mengembangkan pemeriksaan tanggal terstruktur yang meminta responden menyempitkan tanggal kejadian ke dalam sebuah "masa enam-bulan" di mana dapat ditentukan peristiwa-peristiwa besar seperti hari libur, atau petunjuk alam atau fisik (tingginya tanaman jagung atau tanaman lainnya, musim hujan atau musim kering). Proses wawancara kognitif ini juga menunjukkan bahwa konsep waktu seperti 'awal', 'pertengahan' dan 'akhir' tidak dimengerti oleh semua responden, sehingga penyempitan jendela waktu lebih lanjut tidaklah mungkin.

* Lihat angket survei dalam Apendiks dari Annex ini.

† Fritz Scheuren, Presiden Asosiasi Statistik Amerika (American Statistical Association), konsultan untuk HRDAG dalam proyek untuk Kosovo, Guatemala, dan Peru; William Seltzer, Fordham University; dan Jana Asher, penulis pendamping laporan HRDAG di Kosovo, Sierra Leone, dan Peru.

‡ Tourangeau 1984

44. Selama wawancara kognitif dan tes lapangan, responden sering hanya menjawab "tidak tahu" atau "ke gunung/hutan" sebagai tempat ke mana mereka mengungsi. Sebagai hasil wawancara kognitif, satu seri pemeriksaan yang teliti dibuat untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci tentang tempat di mana orang-orang mengungsi.

45. Setelah ulasan di antara sesama staf Komisi dan proses wawancara kognitif, angket final kemudian diterjemahkan serta diterjemahkan-balik ke dalam bahasa Indonesia dan Tetum. Angket tersebut kemudian diuji di lapangan selama lima hari di *aldeia-aldeia* di Dili, yang bukan merupakan bagian dari sampel. Sebagai hasil tes lapangan ini, dibuat sejumlah kecil perbaikan pertanyaan berturutan, serta ketatabahasaan dan sintaksis.

Pelaksanaan survei dan pekerjaan lapangan

46. Dalam setiap rumahtangga sampel, kepala rumahtangga menanggapi baik registrasi rumahtangga (dalam mana semua penghuni rumah dicatat) maupun seksi perpindahan. Seorang laki-laki dewasa kemudian secara acak menyeleksi dari populasi perempuan dewasa dari rumahtangga itu untuk menjawab modul riwayat kelahiran perempuan dewasa.

47. Sebelum meninggalkan setiap *aldeia*, semua angket diperiksa oleh penyelia lapangan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki jika ada kesalahan dan inkonsistensi dalam angket yang sudah dilengkapi. Dua koordinator lapangan mendampingi tim yang terdiri atas 22 enumerator (penghitung) survei ke lapangan.

48. Dua belas *aldeia* yang dimasukkan dalam sampel tidak dapat dikunjungi oleh tim penghitung. Tim ini tidak dapat melakukan wawancara di ke-12 *aldeia* ini mengingat masalah keamanan pada saat itu. Tabel di bawah mendaftarkan 12 *aldeia* yang tidak dihitung.

Tabel 3: Daftar *aldeia* yang tidak dihitung dalam pengambilan sampel

Distrik	Subdistrik	*Suco*	*Aldeia*
Alieu	Remexio	Liurai	Coto Mori
Baucau	Fatumaca	Samalari	Osso Luga
Baucau	Laga	Samalari	Soru Gua
Bobonaro	Atabae	Atabae	Heleso
Bobonaro	Bobonaro	Tapo	Tapo
Covalima	Fohorem	Datorua	Fatulidun
Lautém	Iliomar	Ailebere	Heitali
Lautém	Lospalos	Fuiluro	Kuluhun
Liquiça	Bazartete	Fahilebo	Fatu Neso
Oecusse	Passabe	Abani	Na Nos
Viqueque	Ossu	Uaibobo	Sogau
Viqueque	Uatu-Lari	Matahoi	Loko Loko

49. Selain itu, di beberapa *aldeia* kurang daripada 10 rumahtangga dapat dihitung, mengakibatkan sejumlah ketiadaan tanggapan (*non-response*) tambahan. Secara keseluruhan, dari 1.440 rumahtangga dalam kerangka sampel, terdapat 3,1% (44/1.440) angka *non-response*. Karena rendahnya angka non-respons, tidak ada pertalian statistik nyata yang harus dilakukan untuk mengontrol non-respons dalam survei ini.

Graveyard Census Database (GCD)

50. Untuk membangun data kematian dasar untuk Timor-Leste, Komisi melakukan sensus terhadap permakaman umum di ke-13 distrik di Timor-Leste. Melalui proses ini, informasi yang tersedia tentang nama, tanggal kelahiran, tanggal kematian, dan agama dikumpulkan. Batu nisan yang tidak mempunyai informasi sejenis ini juga dihitung dan ukurannya dicatat.* Dengan mengumpulkan informasi ini, Komisi menciptakan sebuah sistem registrasi vital *de facto* bagi populasi penduduk Timor-Leste. Dengan kata lain, GCD membuat daftar dasar atas beberapa—atau mungkin hampir semua—kematian, yang dapat digunakan untuk analisis kematian di luar proyek ini.

Pengumpulan data GCD

51. Untuk membantu sensus Komisi atas pemakaman umum di Timor-Leste, daftar pemakaman umum yang diketahui di Timor-Leste dilengkapi oleh staf lapangan CAVR atas konsultasi dengan para pejabat setingkat desa (*suco*), dan jika memungkinkan di tingkat *aldeia*. Sebuah 'pemakaman umum' dalam penelitian ini diartikan sebagai sebuah lokasi yang disediakan secara khusus untuk pemakaman orang yang meninggal. Pengertian ini meliputi tempat pemakaman bersama yang berada di tanah milik umum atau tanah yang dimiliki oleh lembaga agama. Namun, tidak termasuk pemakaman keluarga yang bertempat di tanah milik pribadi.

52. Data GCD dikumpulkan oleh dua tim pengumpul data yang berbeda. Tim pertama mengumpulkan 128.751 catatan dari 803 kuburan, yang dimasukkan ke dalam serangkaian program pengolah data Excel. Tim pertama meliput bagian-bagian dari ke-13 distrik, namun hanya Dili yang diliput secara lengkap. Tim kedua menjangkau semua distrik, kecuali Dili, untuk menyelesaikan sensus ini. Mereka mengumpulkan 153.057 catatan tambahan dari 1.779 kuburan. Tim kedua menggunakan program basis data FoxPro untuk memasukkan data mereka.

53. Tim pencatat Komisi mendokumentasikan semua batu nisan dalam pemakaman umum—baik yang ditandai maupun yang tidak ditandai. Kuburan yang bertanda adalah kuburan yang mempunyai struktur fisik yang mengenang kehidupan seseorang, dengan tulisan yang dapat dibaca dalam bahasa Inggris, Indonesia,

* Ukuran batu nisan tak mengandung informasi itu dapat digunakan sebagai sebuah indikator terdekat apakah orang yang meninggal itu anak-anak atau dewasa.

Tetum, maupun Portugis.* Pada semua batu nisan bertanda yang dapat dihitung, informasi berikut ini diberi kode jika terdapat dalam batu nisan: nama lengkap, tanggal lahir, dan tanggal mati. Batu nisan tak bernama biasa berupa salib kecil sederhana atau tanda penguburan yang lainnya, tanpa nama atau informasi tentang tanggal kematian. Para penghitung diminta mencatat informasi tentang agama, jenis bahan, dan ukuran kuburan, jika informasi tersebut dapat dilihat dari batu nisan, baik untuk batu nisan yang bernama maupun yang tidak bernama.

Gambaran metodologis tentang teknik-teknik penyuntingan data, pembersihan, dan normalisasi nama

54. Ketiga basis data yang digunakan oleh Komisi mengharuskan teknik-teknik penyuntingan data, pembersihan, dan normalisasi nama agar data-data tersebut bisa dibandingkan dan dikaitkan di antara basis-basis data itu. Beberapa bulan dihabiskan untuk memeriksa kembali data-data ini atas kesalahan pengetikan atau pengejaan yang nyata, dan sebuah sampel acak pemeriksaan kembali dilakukan untuk menjamin akurasi data. Masalah teknis muncul dalam pengalihan data dari struktur satu basis data ke basis data yang lain, dan hal tersebut juga diidentifikasi dan diperbaiki.

Pembersihan dan penyuntingan basis data

55. Tim pengolahan data melakukan sebuah pemeriksaan lengkap (dan perbaikan di mana perlu) terhadap semua catatan HRVD menyangkut:

- Informasi yang hilang menyangkut distrik/subdistrik
- Informasi tanggal pelanggaran yang tidak masuk akal (misalnya hari = 42, bulan =13)
- Catatan di mana pelanggaran terjadi sebelum tanggal lahir korban
- Catatan di mana pelanggaran terjadi setelah tanggal mati korban
- Pernyataan di mana deponen dikodei sebagai korban pelanggaran fatal
- Catatan di mana usia korban dikodei sebagai 0 atau dengan angka negatif
- Catatan di mana usia korban dikodei sebagai lebih daripada 75 tahun
- Catatan di mana tidak ada kode pelanggaran yang tercatat
- Catatan di mana tidak ada korban yang tercatat untuk sebuah pelanggaran terkode
- Catatan di mana tidak ada pelaku (individual/institusional) ditetapkan dalam sebuah pelanggaran terkode

* Karena kurangnya sumber, Komisi tidak dapat menghitung pemakaman Cina.

56. Selain pemeriksaan kembali secara menyeluruh dan cepat sebagaimana digambarkan di atas, tim pengodean juga memeriksa sampel acak sederhana dari catatan-catatan tentang pelanggaran fatal, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, perekrutan paksa, pelanggaran berbasis seksual, dan pemindahan. Maksud dari pemeriksaan secara cepat ini adalah untuk mengidentifikasi apakah ada kesalahan sistematis dalam afiliasi dari para korban dan tanggung jawab pelaku institusional. Satu inkonsistensi utama teridentifikasi—antara lain di mana afiliasi korban tidak diberikan untuk semua korban dari satu pelanggaran atau beberapa pelanggaran yang terjadi dalam tindakan yang sama atau tindakan-tindakan yang berkaitan erat dalam hal waktu. Catatan-catatan ini diidentifikasi, dan aturan yang memadai diberlakukan untuk memberikan afiliasi korban secara benar di seluruh pelanggaran dalam tindakan yang sama atau aksi terdekat dari aktor yang sama.

Penyuntingan dan pembersihan tanggal

57. Catatan yang jelas mempunyai kesalahan, seperti tanggal lahir, pelanggaran, atau kematian yang baru diakibatkan kemudian, diteliti dan dibetulkan. Hal ini terutama biasa terjadi dalam basis data GCD di mana penanda kuburan sangat kecil sehingga empat digit lengkap dari tahun tidak dapat dituliskan. Sistem pemasukan data tidak bisa menerima penanggalan tahun dengan dua digit, yang seharusnya seperti dalam 1900-an, sebagaimana juga dalam 2000-an. Para pencatat dari tim yang berbeda kadang menggunakan standar pengodean tanggal yang berbeda. Ada yang menggunakan standar Eropa HH-BB-TTTT, ada yang menggunakan standar Amerika Serikat BB-HH-TTTT", ada yang menggunakan format TTTT-BB-HH, atau variasi dari standar-standar ini dengan menggunakan tahun dua digit. Lagipula, kadang tanda pemisah yang berbeda digunakan di antara tahun, bulan, dan hari—antara lain '/', '.', dan '-'. Sebagai akibatnya, semua format penanggalan di sepanjang ketiga set data ini dipetakan ke dalam format terstandar, TTTTBBHH.

58. Jika Tanggal Lahir (TL) berada setelah Tanggal Mati (TM), tanggal-tanggal ini dipertukarkan. Dua jenis kesalahan yang menyebabkan penamaan bulan lebih daripada 12 atau penamaan hari lebih daripada 31 juga diidentifikasi dan diteliti. Komisi melihat bahwa beberapa kesalahan disebabkan oleh variasi setting format penanggalan pada komputer tempat data-data dimasukkan.

59. Kesalahan lain hanyalah kesalahan pengetikan. Catatan dari HRVD dan RMS diperbaiki dengan memeriksa kembali bahan-bahan catatan asli dan memasukkan perbaikan ke basis data. Untuk basis data GCD tidak cukup waktu untuk memeriksa kembali secara manual sumber-sumber itu, sehingga jika kesalahan tidak mudah dibetulkan, nilai dalam bidang penanggalan itu (bulan atau hari) dibiarkan kosong.

Penyuntingan dan pembersihan usia

60. Data usia diperiksa atas kemungkinan kesalahan pengetikan, sebagai contoh, orang-orang dengan usia di atas 100 tahun. Sumber dari pencatatan ini diperiksa kembali untuk memverifikasi data dan perbaikan dilakukan bilamana perlu.

Jika Tanggal Lahir dan Tanggal Mati diketahui, usia ditetapkan. Nilai usia GCD dikalkulasi dan sebuah bidang penanggalan yang baru dibangun untuk membantu memudahkan pencocokan.

Penyuntingan dan pembersihan kode-kode pelanggaran dan hubungan

61. Pemeriksaan kembali dilakukan terhadap kode pelanggaran dan kode hubungan dalam HRVD dan kode RMS yang teridentifikasi tidak valid atau bertentangan dengan data lain dalam sebuah catatan tertentu (sebagai contoh, seorang perempuan dikodei sebagai ayah). Kertas berkas-berkas sumber untuk pencatatan-pencatatan ini diperiksa kembali dan perbaikan dilakukan terhadap basis data.

Penyuntingan dan pembersihan kode lokasi geografis

62. Data lokasi geografis untuk basis data RMS dan HRVD dikodei sesuai standar geokode Timor-Leste yang ditetapkan oleh pemerintah dan disetujui untuk digunakan oleh Komisi. Lokasi-lokasi dibagi dalam empat tingkat administratif—Distrik, Subdistrik, *Suco* (Desa), dan *Aldeia*. Untuk lokasi yang berada di luar Timor-Leste, kode untuk Timor Barat dan Jawa diciptakan dan jika lokasi tidak diketahui, lokasi-lokasi itu ditandai untuk kode yang terpisah untuk tempat yang tidak diketahui. Setiap perkuburan diberikan sebuah kode khusus yang disebut 'id', untuk membedakan antara berbagai perkuburan dalam wilayah geografis yang sama

63. GCD tidak dikumpulkan menurut standar kode geografis Timor-Leste, sehingga diterjemahkan ke dalam kode-kode standar.

Deduplikasi pemakaman dan makam GCD

64. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya penggandaan pencatatan terhadap kuburan dan perkuburan dalam basis data.

- Tim pengumpulan data yang berbeda secara kurang hati-hati melakukan pencatatan terhadap perkuburan yang sama. Banyak perkuburan tidak mempunyai papan nama penunjuk, menyebabkan sulit untuk mengidentifikasi catatan berganda hanya dengan nama mengacu kepada nama perkuburan.
- Lokasi *suco* (desa) dan *aldeia* tertentu sering sangat sulit ditentukan dalam beberapa wilayah pedalaman. Bahkan jika perkuburan mempunyai nama yang sama, bisa saja dikodei ke dalam lokasi geografis yang berbeda. Tambahan lagi, banyak perkuburan mempunyai nama yang sama (Santa Cruz adalah nama yang paling umum), yang berarti bahwa nama perkuburan saja tidak cukup untuk menentukan perkuburan yang digandakan dalam pengodean untuk kode geografis yang berbeda.

- Banyak perkuburan di Timor-Leste tidak ditata secara linear. Hal ini kadang menyebabkan tim pencatat melewati batu nisan yang sama, dan mencatatnya lebih daripada satu kali.
- Karena sangat banyaknya jumlah berkas-berkas kertas yang dibutuhkan untuk mengumpulkan semua data ini, ada kemungkinan duplikasi pemasukan data.

65. Adalah mungkin untuk menemukan keterkaitan antara id perkuburan dengan mengamati nama orang yang meninggal, lokasi perkuburan, nama perkuburan, dan tanggal lahir dan tanggal kematian yang lengkap setelah dicocokkan.* Ketika jejeran duplikasi ditemukan, salah satu perkuburan dikeluarkan dari set data yang digunakan untuk analisis. Walaupun banyak orang mempunyai nama depan dan nama belakang yang sama, dan kemungkinan kesamaan tanggal kematian, kemungkinannya kecil sekali untuk mereka mempunyai tanggal lahir dan tanggal mati yang sama. Oleh karena itu, setiap pencatatan yang mengandung nama depan, nama belakang, tanggal lahir, dan tanggal mati yang sama dianggap sebagai penggandaan, dan hanya satu pencatatan yang dipertahankan dalam basis data untuk analisis.

66. Tujuan dari proses deduplikasi GCD adalah untuk menjamin bahwa orang yang mati hanya dihitung sekali. Telah dipikirkan sejak awal bahwa selama pemindahan paksa orang-orang dapat semula dikuburkan di tempat mereka meninggal, kemudian jenazah diambil oleh sanak keluarganya dan dikuburkan kembali di perkuburan di *aldeia* asal mereka. Juga dipikirkan bahwa jika jenazah tidak ditemukan, sebuah tanda peringatan di perkuburan setempat dapat saja dibangun atau dipasang. Meskipun hal ini mungkin saja terjadi, pemeriksaan kembali secara teliti terhadap data tidak mengungkapkan bahwa penguburan kembali atau penandaan terhadap jenazah yang tidak ditemukan dengan sebuah batu peringatan merupakan praktik umum. Lagipula, ketika jenazah telah ditemukan, penanda pertama akan disingkirkan atau ditempatkan bersama-sama dengan jenazah, dengan demikian mencegah perhitungan berulang. Orang-orang mati yang tidak pernah dikuburkan atau yang tidak dikuburkan di perkuburan umum, tidak termasuk dalam GCD. Untuk dapat menghitung orang mati yang tidak termasuk dalam kesaksian HRVD, wawancara RMS, dan data kuburan GCD, kami melakukan perkiraan sistem berganda terhadap total kematian. Analisis ini dijelaskan di bawah

Proses pembersihan nama-nama

67. Nama orang-orang dalam data Komisi perlu ditangani dalam dua cara. Pertama, nama-nama tersebut perlu diuraikan dalam tiga kategori nama—depan, tengah/kecil, dan belakang. Setelah tahap ini selesai, kanonikalisasi nama diperlukan untuk membantu pertalian catatan. Kanonikalisasi adalah sebuah proses mereduksi setiap nama ke dalam kemungkinan bentuk yang paling sederhana dan paling signifikan, tanpa kehilangan keumumannya.

---

* Sebuah pencatatan yang lengkap adalah pencatatan yang mempunyai hari, bulan, dan tahun, baik untuk Tanggal Lahir maupun untuk Tanggal Mati.

68. Nama-nama orang mengandung sejumlah variasi yang penting dalam pengejaan, dalam pembagian ke dalam tiga bidang nama dan dalam tanda baca. Variasi nama mempunyai banyak alasan. Dalam pernyataan-pernyataan naratif bersifat terbuka, seperti HRVD, deponen bisa saja merupakan keluarga dekat, teman, tetangga, atau kenalan jauh dari korban, dan dia bisa saja tahu atau tidak tahu bagaimana mengeja nama dari korban yang dilaporkan. Transkripsi oleh pengambil pernyataan dapat saja memberlakukan aturan ejaan dan tanda baca tambahan dan bahkan memasukan ejaan yang salah. Demikian juga perubahan ejaan dan tanda baca dapat terjadi pada tahap pengodean data dan pemasukan data

Penguraian nama

69. Untuk menjawab variasi penting dalam bagaimana nama-nama dibagi ke dalam tiga bidang nama; depan, belakang, tengah/kecil, nama-nama itu diuraikan menurut aturan yang ketat. HRDAG memutuskan membagi nama-nama dengan menggunakan nama depan yang 'pertama' untuk *depan*, dan nama belakang yang paling 'belakang' sebagai *belakang*, kemudian semua nama yang lain dimasukkan ke dalam bidang nama *tengah/kecil*. Selain itu preposisi (contohnya, de, da, do, dos) dikeluarkan dari bidang nama karena penggunaan dari preposisi ini tidak konsisten dalam data.

70. Sebagai contoh, nama Portugis Maria Luisa da Costa da Silva dapat dimasukkan ke dalam basis data sebagai:

Tabel 4: Contoh penulisan nama Portugis orang Timor-Leste

Nama Depan	Nama Tengah/nama kecil	Nama Belakang
MARIA LUISA		DA COSTA DA SILVA
MARIA	LUISA	DA COSTA DA SILVA
MARIA LUISA	DA COSTA	DA SILVA
MARIA	LUISA DA COSTA	DA SILVA
MARIA LUISA		SILVA

71. Proses penempatan nama akan menstandardisasi nama-nama ini, sehingga nama depan adalah Maria sementara nama belakang hanyalah Silva. Semua nama yang lain, tanpa preposisi, dipindahkan ke bidang nama tengah/nama kecil.

72. Nama asli Timor-Leste Mau Bere dapat dimasukkan sebagai:

Tabel 5: Contoh penulisan nama asli orang Timor-Leste

Nama depan	Nama tengah/nama kecil	Nama belakang
MAU BERE		
MAUBERE		
MAU		BERE
		MAUBERE

73. Penempatan nama dalam kasus ini akan menempatkan Mau di bidang nama depan dan Bere di bidang nama belakang.

Kanonikalisasi nama

74. Kanonikalisasi nama diterapkan kepada bidang nama depan dan nama belakang dari pencatatan setelah penempatan untuk membantu mencocokkan secara lebih mudah, khususnya algoritma otomatis untuk hubungan pencatatan (record linkage). Variasi-variasi ejaan untuk nama-nama disaring ke dalam sebuah from representatif tunggal untuk setiap nama. Sebagai contoh, variasi ejaan berikut ini dikanonikalisasi menjadi AGUSTINO:

- AGUSTINUHO
- AAGUSTINO
- AGUSTIO
- AGUSTINUS
- AUGUSTINHO
- AGUSTINO
- AGUSTINU
- AGUSTONIO
- AGUSRINO
- AGUSTINHO
- AGUSTIMHO
- AGSSTINHO
- AGSTINHO
- AUGUSTINO
- AGOSTINHO
- AGUASTINHO
- ANTGOSTINHO
- AGUSTINHU
- AGOTINHO
- AGOSTINO

75. Nama-nama asli orang Timor-Leste lebih sulit untuk dikanonikalisasi karena umumnya hanya sepanjang empat atau lima huruf dan sejumlah pencatatan yang tampaknya merupakan variasi ejaan pada kenyataannya adalah nama yang jelas berbeda. Kanonikalisasi yang konservatif diberlakukan terhadap nama-nama asli orang Timor-Leste dan kemudian diuji dengan keterhubungan sampel dengan pencatatan animis yang melihat pada tanggal, usia, dan tempat informasi untuk menentukan kanonikalisasi tambahan untuk diterapkan.

76. Setelah beberapa penempatan terhadap nama-nama tersebut untuk dikanonikalisasi, sebuah bidang baru dibuat dengan nama dieja secara terbalik. Kemudian, dengan menyortir bidang baru ini kita dapat menemukan nama-nama tambahan untuk dikanonikalisasi menjadi bentuk tunggal karena huruf awal dapat bervariasi menurut pengucapan, tetapi silabel akhir cenderung sama. Proses ini terbukti sangat menolong dalam menemukan kanonikal tambahan.

77. Ada juga nama-nama Cina, Indonesia (Muslim), dan nama-nama Anglo-Saxon di dalam basis-basis data ini, seperti halnya nama-nama Portugis dan nama asli orang Timor. Relatif sedikitnya jumlah nama-nama Cina, Indonesia, dan Anglo-Saxon tidak membutuhkan penanganan khusus. Staf orang Timor-Leste, di Timor, mengidentifikasi apakah nama-nama adalah nama asli untuk penerapan aturan-aturan dan algoritma yang sesuai, karena nama-nama asli Timor-Leste tidak selalu spesifik menurut jenis kelamin.

78. Basis-basis data HRVD dan RMS lebih kecil daripada GCD, sehingga kami menganonikalisasi basis-basis data itu terlebih dahulu. Kemudian, kami menerapkan daftar nama kanonikal terhadap GCD. Nama-nama hasil kanonikalisasi kemudian diperiksa kembali untuk mengidentifikasi kanonikal tambahan.

79. Selama proses kanonikalisasi, beberapa huruf dalam nama-nama ternyata bisa saling menggantikan, dan ini umumnya terjadi dengan nama-nama Portugis. Huruf-huruf S, J, G, dan Z sering saling menggantikan satu sama lain dalam nama-nama tersebut. Juga, huruf-huruf V, U, W, dan B juga sering saling menggantikan. Yang kurang sering terjadi adalah huruf-huruf H dan E saling menggantikan, atau dihilangkan begitu saja, contohnya Helder/Elder, Henrique/Enrique. Satu contoh dari saling menggantikan adalah nama Virginia, yang dapat dieja dengan B atau V. Sebagai contoh, variasi ejaan yang ditemukan untuk VIRGINIA kanonikal antara lain BIRGINIA, BERGINA.

80. Nama-nama yang dimulai dengan huruf-huruf ini dibandingkan satu sama lain untuk membantu dalam proses kanonikalisasi. Jika nama-nama itu mempunyai lebih daripada satu huruf yang bisa saling menggantikan atau huruf yang bisa tergantikan itu berada di bagian tengah atau akhir sebuah nama, sangat sulit menemukan kemungkinan kanonikal. Oleh karena itu, sebuah program ditulis yang membangun sebuah daftar nama di mana kombinasi dari huruf-huruf yang saling menggantikan cocok nama kanonikal yang lain. Ahli jaringan pencatatan mengulas kombinasi-kombinasi ini untuk menentukan apakah kombinasi-kombinasi tersebut harus dikanonikalisasi ataukah kombinasi itu adalah nama-nama yang jelas khas. Jika ada kanonikalisasi tambahan karena adanya huruf yang saling menggantikan, huruf yang cenderung dipilih untuk kanonikal adalah S (untuk S, J, G, dan Z), V (untuk V, U, W, B), dan H (untuk H dan E).

81. Sebagai tambahan, dalam proses kanonikal, diperhatikan bahwa ANJU dan ANJO sering dikutip sebagai nama depan atau satu-satunya nama dalam sebuah pencatatan. *Anju* umumnya digunakan untuk menunjuk kepada bayi yang meninggal dan sering ditemukan dalam pencatatan GCD jika seorang anak

meninggal sebelum dibaptis dan karenanya tidak diberikan sebuah nama Kristen. Pencatatan dengan menggunakan S dan sebuah nama belakang digunakan untuk proses pencocokan karena ada beberapa data yang teridentifikasi, namun pencatatan dengan *ANJU* semata sangat ambigu untuk dibuat keputusan yang beralasan untuk pencocokan.

Pengodean jenis kelamin dan etnik

82. Selama proses kanonikalisasi, nama depan Portugis diperiksa kembali dengan frekuensi pengodean jenis kelamin laki-laki, perempuan, dan yang tidak diketahui.* Pengodean jenis kelamin yang jelas salah dibetulkan. Sebagaimana dengan kebanyakan nama Latin, nama-nama yang berakhir dengan A umumnya seorang perempuan dan nama yang berakhir dengan O (atau U) biasanya laki-laki. Jika nama depan berakhir dengan huruf-huruf lain selain A, O, atau U, frekuensi antara pengodean laki-laki dan pengodean perempuan diteliti dan jika perbedaannya besar, yang menunjukkan bahwa beberapa pencatatan telah dikodei secara salah selama pemasukan data, maka perbaikan dilakukan terhadap basis data.

Konversi data

83. Demi melancarkan semua langkah pengolahan data yang berhubungan dengan mencocokkan pencatatan yang berganda, setiap set data ditransfer dari FoxPro aslinya atau program basis data Excel, ke program basis data Analzyer.† Skema basis data FoxPro pertama-tama digandakan dalam PostgreSQL untuk dimasukkan ke dalam Analzyer. Struktur basis data relasional untuk data HRVD dan RMS disimpan dalam Analzyer.

84. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah total pencatatan dari setiap set data yang dimasukkan ke dalam Analzyer. Harap dicatat bahwa jumlah total ini merefleksikan perubahan pembersihan data yang mengakibatkan dibuangnya pencatatan-pencatatan yang berganda atau invalid.

* Frekuensi merupakan hitungan kemunculan suatu nama atau kode dalam bidang tertentu. Nilai dengan frekuensi sangat rendah dapat saja menunjukkan suatu potensi kesalahan atau salah eja dalam data.

† Analzyer adalah aplikasi sumber yang bebas dan terbuka yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis informasi tentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia berskala besar. Untuk informasi selengkapnya tentang Analzyer, lihat website HDRAG pada http://www.hrdag.org/resources/data_software.shtml

Tabel 6: Perhitungan total yang tercatat oleh basis data sebelum dan sesudah pembersihan				
Basis data	**Pra-Pembersihan**	**Pasca Pembersihan**	**Perhitungan/% Fatal**	**Perhitungan/% Nonfatal**
HRVD	41.456	37.651		
RMS	4.883	4.619		
GCD				n/a1*

Tinjauan pertalian catatan (*record linkage*)

85. Berbagai individu yang dilaporkan dalam HRVD dan RMS kadang dilaporkan beberapa kali, oleh deponen yang berbeda dan mungkin juga muncul dalam catatan GCD. Untuk memastikan agar analisa statistik dapat mengontrol laporan berganda untuk orang yang sama, data tersebut membutuhkan analisa hubungan pencatatan, juga dikenal sebagai pencocokan. Pencocokan diterapkan pada dua kategori umum untuk kajian ini—pelanggaran fatal dan nonfatal. Pelanggaran-pelanggaran fatal termasuk pembunuhan warga sipil, kematian karena penelantaran, penghilangan, dan kematian petempur. Kategori pelanggaran nonfatal mencakup percobaan pembunuhan warga sipil, penahanan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, kekerasan seksual, perlakuan buruk, pemindahan, perkawinan paksa, halangan atas hak-hak reproduktif, pengadilan tidak adil, penghancuran rumah, penghancuran ternak, pemerasan, pengancaman, perekrutan paksa, dan kerja paksa.

86. Ada dua jenis pencocokan yang dilakukan untuk keperluan perkiraan statistik: pencocokan intra-sistem dan antarsistem. Pencocokan intra-sistem menghubungkan catatan-catatan yang mengidentifikasi orang yang sama dalam sebuah set data tunggal, dan masing-masing catatan bisa cocok dengan nol, satu, atau banyak catatan lain dalam set data tersebut. Pencocokan antar-sistem menggabungkan dua atau lebih daftar pencatatan yang khas dari sumber-sumber data yang berbeda secara bersamaan sehingga sebuah perkiraan sistem berganda dapat dilakukan. Pencocokan catatan-catatan dalam proses pencocokan antarsistem hanya dapat cocok dengan nol atau satu catatan lain dalam setiap set data lainnya.

87. Karena rumitnya pencocokan antarsistem dan pembatasan waktu kerja, data pelanggaran nonfatal dalam HRVD dan RMS hanya mempunyai pencocokan intra-sistem untuk statistik deskriptif. Data fatal, termasuk data GCD, telah dicocokkan secara intra-sistem maupun antarsistem sebagai landasan bagi kalkulasi perkiraan

* Bidang ini tidak berlaku untuk bidang GCD karena menurut definisi, seseorang yang dikubur di sebuah pemakaman berarti sudah meninggal.

sistem berganda. Pencocokan dilakukan menggunakan tiga metode: pencocokan manual dengan tangan, pencocokan oleh komputer, dan pencocokan yang dibantu oleh komputer. Tiap metode ini dapat melibatkan lebih daripada satu *pass*.[*]

Aturan-aturan pencocokan

88. Tiap catatan tunggal dibandingkan ke semua catatan lainnya dalam setiap set data untuk mencari pencocokan yang mungkin dan dianggap cocok ketika angka-angka penting dari nilai-nilai bidang cocok *persis*, *sangat dekat* atau *tidak bertentangan*. Bidang-bidang yang digunakan untuk pencocokan adalah: nama_depan, nama_belakang, usia, jenis kelamin, Tanggal Lahir (date_of_birth, DOB), Tanggal Mati (date_of_death, DOD), Tempat Lahir (place_of_birth, POB), dan Tempat Mati (place_of_death, POD). Bidang untuk nama tengah/nama kecil dan tempat wawancara juga digunakan untuk keperluan klarifikasi, tapi bukanlah merupakan bidang-bidang yang tersedia di ketiga set data ini, dan sering jarang tersedia. Meskipun bukan merupakan bagian dari aturan-aturan pencocokan, data-data ini tetap dipertimbangkan oleh ahli penghubungan catatan, tapi tidak digunakan dalam pencocok otomatis oleh komputer manapun.

89. Keputusan-keputusan pencocokan yang digunakan untuk data Komisi cenderung mencocokkan data secara berlebih.[†] Pencocokan berlebih mengurangi jumlah catatan khas dan karena itu akan cenderung mengurangi perkiraan. Pencocokan berlebihan lebih sering dipakai dalam kasus-kasus di mana terdapat ketidakpastian bahwa suatu pencocokan akurat, untuk menghasilkan perkiraan-perkiraan yang konservatif.

Pencocokan nama-nama

90. Bidang-bidang nama depan dan nama belakang tidak selalu lengkap; sebagian hanya inisial atau tidak ada salah satu dari nama depan atau belakang. Diupayakan dilakukan pencocokan atas setiap catatan meskipun tidak lengkap; tapi untuk pencocokan fatal, catatan-catatan yang tidak memiliki nama depan atau belakang atau hanya berupa inisial, dihapus dari pencocokan karena tidak cukup data untuk membuat penilaian yang dapat diandalkan. Untuk pencocokan nonfatal, diupayakan mencocokkan pelanggaran-pelanggaran dengan DOB, DOD, dan informasi lokasi kematian dengan catatan-catatan lain dengan nilai sama pada bidang-bidang tersebut, meskipun tidak ada nama atau catatan tersebut hanya berupa inisial. Catatan-catatan dengan data nama yang kurang lengkap sangat bergantung pada tanggal dan tempat yang sempurna untuk dapat dicocokkan dengan catatan-catatan lain. Banyak orang bisa saja meninggal pada hari dan tempat yang sama, dan untuk mengetahui orang yang mana untuk dicocokkan dengan nama yang tidak lengkap, sangatlah sulit dan tidak dapat diandalkan.

* *Pass* adalah tinjauan atas semua data dalam sebuah set data berdasarkan urutan atau algoritma untuk mencari kecocokan.

† Kelebihan pencocokan (*over-matching*) artinya hubungan-hubungan dibuat antara catatan-catatan yang mungkin saja tidak digandakan.

Pencocokan jenis kelamin dan etnis

91. Bilamana jenis kelamin korban diketahui, hanya mungkin dapat dicocokkan dengan catatan-catatan dari jenis kelamin sama atau yang jenis kelaminnya tidak diketahui. Catatan-catatan di mana jenis kelamin ditandai Tidak Diketahui bisa dicocokkan dengan catatan-catatan yang dikodei Laki atau Perempuan, tapi dalam grup yang cocok, kode-kode jenis kelamin tidak bisa bertentangan dengan catatan-catatan lain dalam grup tersebut.

Pencocokan lokasi

92. Kode-kode lokasi geografis yang digunakan untuk data Komisi dibagi dalam empat tingkatan: distrik, subdistrik, *suco* (desa), dan *aldeia*. Basis data GCD adalah satu-satunya set data yang menguraikan informasi lokasi sampai tingkat *aldeia*, jadi tidak digunakan untuk keperluan pencocokan. Seringnya pemindahan membuat para saksi sulit menunjuk secara tepat informasi lokasi, kecuali di tempat-tempat pelanggaran terjadi, di tempat saksi tinggal saat itu, atau tempat mereka semula mengalami pemindahan. Orang bisa saja mengalami pemindahan beberapa kali di beberapa lokasi, dan karena konflik berlangsung selama tiga dekade, untuk mengingat lokasi yang tepat bisa saja mengalami kesalahan-kesalahan.

93. Selain itu, batas-batas antara berbagai lokasi geografis dipengaruhi oleh tiga faktor: perubahan nama tempat dan batas geografis dari batas-batas administratif seiring waktu; tidak persisnya batas-batas, terutama di daerah pedalaman; dan kemungkinan kesalahan dalam pengumpulan, pengodean, dan pemasukan data. Karena itu, pencocokan di sana-sini dalam suatu distrik dan di antara distrik-distrik yang berbatasan dipertimbangkan juga. Kemungkinan kecocokan antara sebuah subdistrik dengan *suco* yang berdekatan juga diberikan preferensi yang lebih tinggi. Dalam mempelajari data secara teliti, catatan-catatan yang cocok pada lebih banyak bidang data selain tempat, memperkuat penilaian kami untuk pencocokan lokasi. Jika HRVD mendokumentasi sebuah kematian pada lokasi yang sama dengan lokasi wawancara, diasumsikan bahwa informasi lokasi sangat mungkin akurat.

94. Dalam kasus-kasus yang langka, pencocokan dilakukan dengan melanggar aturan untuk data lokasi, tapi hanya jika jelas catatan-catatan tersebut mengidentifikasi orang yang sama, dan bahwa kesalahan-kesalahan umum pengetikan diperhitungkan untuk perbedaan tersebut. Jika ada lebih daripada satu kemungkinan pencocokan, algoritma pencocokan dicobakan untuk dicocokkan dengan catatan-catatan yang kurang spesifik agar dapat menyisakan catatan-catatan yang lebih spesifik untuk digunakan pada pencocokan berikutnya.* Jika ada persebaran yang merata antara

* Catatan-catatan dihubungkan bersama dan data yang khas untuk setiap catatan disimpan, karena yang bertentangan dengan duplikasi dihapus. Sebagai hasilnya, perlu dilihat keragaman dalam catatan-catatan yang cocok untuk mengetahui jika perbedaan-perbedaan itu akan mengubah analisis secara mendasar.

lokasi dalam tingkatan geografis tertentu, lokasi yang kurang spesifik dipilih dan jika ada satu yang tidak lebih kurang spesifik, dari satu yang dipilih secara acak untuk menjadi 'rep rec'.*

Mencocokkan tanggal

95. Karena konflik di Timor-Leste terjadi dalam waktu yang panjang, banyak responden tidak mengingat tanggal dan tempat pasti dari kejadian-kejadian yang berlangsung. Data GCD diasumsikan lebih akurat dalam informasi tanggal dan tempat karena mayat-mayat biasanya dikubur sesaat setelah kematian, dan dekat dengan tempat kematian. Ketika pencocokan dilakukan pada bidang tanggal, ahli hubungan catatan (*record linkage expert*) akan menghubungkan catatan-catatan yang lebih atau kurang tiga tahun dari yang lainnya. Jarang terdapat pengecualian untuk aturan ini, dan hanya dilakukan ketika bidang-bidang data lainnya cocok secara kuat. Catatan-catatan dengan data bulan dan tanggal sering tidak akurat dalam data HRVD dan RMS, karena ingatan cenderung salah dalam periode waktu lama seperti itu. Untuk itu, tanggal-tanggal yang lebih spesifik dicocokkan satu sama lain jika tanggal-tanggal itu berdekatan, dan dicocokkan pada tanggal-tanggal yang kurang spesifik jika mereka tidak berdekatan.

Pembatasan tingkat pencatatan

96. Pembatasan pencocokan dilakukan untuk mencegah kelebihan pencocokan (*overmatching*). Secara khusus, pencocokan berikut tidak diperbolehkan:

- Catatan-catatan tentang korban-korban dari pernyataan yang sama (karena setiap pernyataan mengidentifikasi korban tertentu yang bisa saja mempunyai nama yang sama karena hubungan keluarga)
- Dua korban nonfatal tidak bisa dicocokkan jika mereka dilaporkan dalam sumber catatan yang sama (karena pengodean data dan metode representasi basis data yang digunakan mencegah duplikasi catatan dari satu pernyataan tunggal dimasukkan dalam basis data)
- Seorang deponen tidak bisa dicocokkan dengan sebuah pelanggaran fatal
- Sebuah catatan nonfatal tidak dapat dicocokkan dengan sebuah catatan fatal jika tanggal tertentu yang dihubungkan dengan pelanggaran nonfatal terjadi sebelum Tanggal Lahir (DOB) catatan fatal
- Sebuah catatan nonfatal tidak dapat dicocokkan dengan sebuah catatan fatal jika tanggal tertentu yang dihubungkan dengan pelanggaran nonfatal terjadi setelah Tanggal Mati (DOD) dari catatan fatal.

* 'rep rec' adalah catatan yang mewakili secara baik kelompok-kelompok catatan pencocokan dengan data yang paling lengkap. Catatan-catatan dengan tanggal dan tempat yang sangat umum dalam kelompok atau catatan dengan tempat atau tanggal yang lebih pasti dianggap lebih lengkap. Semakin lengkap data, semakin baik setiap putaran pencocokan yang berikutnya dari pencocokan intra-sistem maupun pencocokan antarsistem. Karena catatan-catatan ini dihubungkan bersama dan data yang khas untuk setiap catatan disimpan, serta yang merupakan duplikasi dihapuskan, sangat penting untuk memperhatikan variasi dalam catatan-catatan pencocokan untuk melihat jika perbedaan-perbedaan itu dapat mengubah analisis secara berarti.

Pencocokan intra-sistem

97. Dalam sebuah set data, seseorang bisa saja diidentifikasi oleh beberapa saksimata. Pencocokan intra-sistem menghubungkan catatan-catatan yang mengidentifikasi orang yang sama, untuk menghasilkan daftar orang dengan nama khas, untuk mencegah kelebihan perhitungan, dan akhirnya, kelebihan perkiraan. Pencocokan intra-sistem sangat rumit dan sulit untuk dilakukan dalam sebuah basis data, karena seseorang bisa cocok dengan sejumlah *n* catatan lainnya dalam set data. Karena itu, data diatur dalam sebuah program pengolah data (*spreadsheet*), yang lebih memudahkan untuk mengatur dan mengatur kembali data-data tersebut dalam berbagai cara untuk menemukan hubungan-hubungan yang perlu dibuat.

98. Pencocokan intra-sistem yang dilakukan terhadap sebuah set data sebelum catatan-catatannya digabung dengan set data lain dapat memperlihatkan pola-pola yang melekat pada proyek pengumpulan data tersebut. Sebagian pola-pola ini mungkin saja merupakan kesalahan sistematis dalam pengumpulan, pengodean, atau pemasukan data, atau bisa saja merupakan hasil dari struktur pengumpulan data tersebut. Pengamatan pola-pola ini dalam setiap set data perlu dilakukan, dan jika perlu, dilakukan perbaikan kesalahan-kesalahan yang digarisbawahi.

99. Ketiga set data Komisi jika dikombinasikan akan menjadi sangat besar untuk memungkinkan pencocokan data berkualitas tinggi, karena sejumlah pola itu tidak akan terlacak oleh mata manusia. Jika ketiga set data itu dikombinasikan ke dalam sebuah daftar tunggal, hasilnya adalah daftar yang terdiri atas lebih daripada 160.000 catatan. Mencari catatan-catatan yang cocok dalam daftar sepanjang ini akan sangat sulit bagi seorang pembaca.

Pencocokan fatal intra-sistem HRVD

100. Pertama-tama, pencocokan intra-sistem pada data fatal dalam HRVD dilakukan untuk menghubungkan catatan-catatan yang mendeskripsikan korban yang sama. Catatan-catatan itu dimasukkan ke dalam *spreadsheet* dan disortir berdasarkan nama depan, nama belakang, POD, dan DOD, untuk menemukan catatan-catatan yang cocok.

101. Saat catatan-catatan dihubungkan, sebuah 'rep rec' dipilih.* Setelah setiap penyortiran, sebuah *pass* pencocokan dilakukan dan catatan-catatan yang berhubungan dalam sebuah grup pencocokan disembunyikan (tapi tidak dihilangkan) dari berkas data yang dihasilkan, sehingga hanya tinggal 'rep rec'-nya. Ini mengurangi *noise* dalam data-data tersebut. *Noise* diartikan sebagai catatan-catatan non-'rep rec' dalam sebuah kelompok pencocokan yang mengalihkan pencocok dari kemungkinan hubungan-hubungan 'rep rec' dengan calon pencocokan lainnya. Semakin sedikit daftar catatan yang khas, semakin mudah untuk melihat kemungkinan kecocokan dan pola-pola lain di dalam data. Setiap *pass* berikutnya mengidentifikasi kecocokan

* Sebuah 'rep rec' adalah catatan yang mewakili grup yang dicocokkan, karena ada lebih daripada satu kemungkinan cocok.

tambahan, dan akhirnya, sebuah daftar catatan yang khas disaring dari keseluruhan set data. Sekurang-kurangnya lima *pass* dilakukan pada tiap set data.

102. Keseluruhan 15.043 catatan fatal dari set data HRVD direduksi menjadi sebuah daftar yang terdiri atas 11.145 korban khas. Semua catatan itu kemudian dimasukkan kembali ke dalam sistem pencocokan data Analzyer. Catatan-catatan yang cocok dihubungkan kembali dengan "rep rec" untuk dianalisis jika semua pencocokan telah dilakukan.

Pencocokan fatal intra-sistem RMS

103. Pencocokan fatal intra-sistem RMS dilakukan dalam sebuah *spreadsheet* setelah pencocokan intra-HRVD dilakukan. Pencocokan intra-sistem RMS menggunakan bidang-bidang yang sama dengan pencocokan intra-sistem HRVD dan juga melihat sumber dari pencatatan tersebut. Pencatatan-pencatatan kematian yang dikumpulkan dari rumahtangga yang sama tidak boleh dicocokkan satu sama lain karena pencatatan-pencatatan tersebut mengidentifikasi individu-individu khas, meskipun mereka memiliki nama dan DOD yang sama.

104. Sebanyak 4.883 catatan fatal set data RMS direduksi ke dalam sebuah daftar yang terdiri atas 4.619 korban khas.

105. Hubungan-hubungan yang dihasilkan dari set data HRVD dan RMS dimasukkan kembali ke dalam model data Analyzer untuk digunakan dalam pencocokan yang dibantu komputer (*computer-assisted*) dan pencocokan yang dihasilkan komputer (*computer-generated*), dan untuk menghasilkan data untuk analisa. Informasi dan pola-pola yang didokumentasi oleh ahli hubungan catatan (*record linkage expert*) dalam tahap pencocokan menggunakan tangan kemudian digunakan untuk menghasilkan aturan-aturan pencocokan dan algoritma untuk proses-proses pencocokan yang dibantu komputer dan pencocokan yang dihasilkan komputer

Pencocokan nonfatal intra-sistem HRVD

106. Algoritma komputer diatur untuk membersihkan dan mencocokkan pelanggaran nonfatal dalam HRVD. Langkah ini disebut sebagai *auto-matching*. Algoritma pencocokan otomatis untuk pelanggaran-pelanggaran nonfatal dalam HRVD dikembangkan karena batasan waktu dan sumber daya tidak memungkinkan penggunaan seorang ahli hubungan catatan. Jumlah korban nonfatal tiga kali lipat dari jumlah korban fatal yang dilaporkan dalam HRVD.

107. HRVD mempunyai 41.546 catatan. Pencocokan otomatis intra-sistem menghasilkan sebuah daftar yang terdiri atas 37.651 korban khas pelanggaran fatal dan nonfatal.

Penilaian dan pencocokan auto-kanonikalisasi nama nonfatal

108. Langkah pertama dalam proses auto-kanonikalisasi adalah membuat sebuah tabel dengan versi yang sudah bersih dari semua (fatal dan nonfatal) nama asli dalam basis data. Untuk nama depan, versi-versi tersebut di-*normalised*, *normalised-terse*,

first word of normalised (disebut first-namefirst), dan *first word of normalised-terse* (disebut first-namefirst-terse). Metode yang sama diterapkan pada nama belakang, namun kata terakhir yang digunakan, bukan kata pertama. Lalu, untuk setiap nama korban dari pelanggaran nonfatal, dicoba untuk dicocokkan dengan kombinasi nama lengkap nonfatal yang telah dinormalisasi berikut ini, pada semua nama lengkap fatal kanonikalisasi-tangan yang telah dinormalisasi:

- nama depan + nama bealakang
- nama depan -pendek + nama belakang-pendek
- namadepan-pertama + namabealakang-terakhir
- nama depan-pertama-pendek + nama belakang-terakhir-pendek

109. Program pencocokan ini mencocokkan satu set lengkap informasi sebelum mencoba mencocokkan dengan informasi kurang lengkap. Pencocokan nama-nama nonfatal ke nama-nama fatal ini hanya dilakukan untuk nama-nama fatal yang telah dinormalisasi yang telah dipetakan ke dalam nama kanonikal yang khas; dengan informasi semakin pendek, jumlah nama yang dinormalisasi yang "diperbolehkan" untuk dicocokkan makin sedikit (yang diimbangi dengan fakta bahwa lebih mudah untuk membuat kecocokan, karena informasi yang kurang pendek lebih tahan terhadap keragaman pengodean dan kesalahan-kesalahan pemasukan data).

110. Untuk nama-nama lengkap yang tidak bisa dikanonikalisasi, nama depan dan nama belakang dikanonikalisasi secara independen. Urutan pencocokan nama depan adalah sebagai berikut:

- Nama depan
- Nama depan-pendek
- Nama depan-pertama
- Nama depan-pertama-pendek

111. Proses pencocokan berikutnya dikembangkan untuk mengikuti ronde pencocokan awal berdasarkan pada proses pembersihan dan pencocokan otomatis. Proses ini mencari kemungkinan kecocokan dengan nama-nama non-normalisasi dan mengidentifikasi kepadatan informasi per bidang data dari setiap catatan nama. Persentase catatan-catatan yang mengandung nilai-nilai tidak kosong untuk masing-masing bidang data adalah sebagai berikut:

- 9% memiliki tanggal_lahir (semunya memiliki lahir_geo1)
- 44% memiliki lahir_suco_lokasi
- 50% memiliki lahir_subdistrik_lokasi
- 53% memiliki lahir_distrik_lokasi
- 70% memiliki Nama depan
- 94% memiliki Jenis Kelamin
- 100% memiliki Nama belakang (karena ini adalah bidang wajib yang dibutuhkan untuk pencocokan)

112. Karena bidang nama belakang adalah satu-satunya bidang non-kosong untuk semua catatan, hanya bidang ini yang bisa digunakan dalam indeks *blocking*. *Blocking* melihat catatan-catatan di mana bidang yang di-*block* memiliki nilai sama. *Blocking* untuk bidang nama belakang dilakukan pada empat huruf pertama tiap nama. Algoritma pencocokan harus dikalibrasi dengan hati-hati: jika terdapat banyak bidang kosong, maka kecocokan lebih dekat dengan bidang-bidang non-kosong harus dilakukan (juga, kecocokan pada nama-nama belakang yang umum dihargai lebih sedikit).

113. Ada tiga jenis “kedekatan” yang bervariasi:

- Jumlah huruf dalam nama yang cocok (4, 8, atau semua)
- Jumlah tingkatan dalam lokasi kelahiran yang cocok (dari 1 sampai 3), dan
- Kedekatan yang diperlukan dari tanggal-tanggal (dari 1/3 tahun sampai 3 tahun)

114. Dengan dua pertiga dari nama-nama korban telah dikanonikalisasi secara otomatis, dan satu set peraturan yang didefinisikan dengan baik untuk kedekatan pencocokan yang diwajibkan untuk jumlah berbeda dari bidang-bidang non-kosong, tingkat kecocokan yang dihasilkan adalah sekitar 15% (dibandingkan dengan 25% untuk data pelanggaran fatal yang dicocokkan secara manual).

115. Tingkat kecocokan 15% untuk pelanggaran-pelanggaran nonfatal terlihat masuk akal karena:

- Hanya dua pertiga dari catatan-catatan nama yang dapat dikanonikalisasi, dan
- Biasanya diharapkan kepadatan laporan yang tinggi untuk pelanggaran-pelanggaran fatal karena biasanya pelanggaran-pelanggaran ini lebih mudah diidentifikasi dan lebih mudah diingat oleh banyak orang dalam jaringan sosial korban.

116. Sistem pencocokan otomatis inter-sistem pada data nonfatal mengurangi set data dari sejumlah 44.203 catatan menjadi sebuah daftar dengan jumlah 31.568 catatan khas korban.

Ulasan pencocokan nonfatal intra-sistem HRVD oleh ahli hubungan data

117. Ahli Hubungan Data mempelajari sampel hasil-hasil pencocokan-otomatis untuk memastikan tidak ada kesalahan pencocokan (yaitu kelebihan pencocokan). Tidak ada pola sistematis kelebihan pencocokan yang ditemukan dalam peninjauan kembali sampel acak jika 10% dari grup yang cocok dicatat. Grup catatan terbesar yang dicocokkan satu sama lain terdiri atas 20 catatan. Peninjauan dilakukan pada grup terbesar untuk memastikan apakah ukuran kecocokan mereka dapat terima.

118. Pencocokan intra-sistem untuk data fatal menghasilkan daftar kombinasi dari individu-individu khas yang semuanya telah meninggal, meskipun penyebab kematian berbeda-beda. Ketika pencocokan intra dilakukan pada pelanggaran-pelanggaran nonfatal, seorang korban dapat mengalami satu atau lebih pelanggaran, dalam satu atau lebih hari, pada satu atau lebih tempat. Pencocokan nonfatal

memperlihatkan pelanggaran HAM yang dialami korban-korban individual, di mana seorang korban mungkin mengalami pelanggaran lain yang mungkin saja menimbulkan kematian atau tidak.

Pencocokan antarsistem

119. Pencocokan antarsistem menghubungkan daftar-daftar individu yang khas dari berbagai set data dan dilakukan secara kumulatif dalam berbagai pasangan atau set data. Pencocokan antarsistem hanya diterapkan pada data fatal. Pertama, pencocokan antarsistem diterapkan dengan menggunakan 11.126 catatan cocok intra-sistem dari HRVD pada 4.619 catatan cocok intra-sistem RMS dalam aplikasi Analyzer Record Linkage. Set data *sumber* fatal RMS dicocokkan dengan set data *target* fatal HRVD.[*]

Tahap 1 – Pencocokan yang dihasilkan komputer

120. Pencocokan ketat (disebut sebagai pencocokan P1) secara otomatis mengidentifikasi 'pasangan pasti'.[†] Dengan menghasilkan 'pasangan pasti' melalui proses P1 otomatis menghilangkan inefisiensi yang ada jika manusia yang harus melakukan perbandingan setiap catatan di dalam atau di antara basis data, dengan setiap catatan lainnya.

121. Pencocokan berdasarkan algoritma diterapkan pada data untuk menghasilkan daftar pasangan potensial yang dianggap tinggi kemungkinannya. Kalkulasi yang didasarkan pada probabilitas dan frekuensi tiap bidang data dalam sebuah catatan dipertimbangkan dan diurutkan berdasar peringkat, dan tingkat ambang batas ditentukan di mana pencocokan yang sedang dibuat kemungkinan benar. Ambang batas ditentukan setelah dilakukan peninjauan dari pencocokan berbasis algoritma yang mungkin, yang mengeliminasi kebutuhan akan tenaga manusia untuk membandingkan setiap catatan untuk pasangan yang mungkin. Pencocokan potensial di bawah ambang batas tersebut ditangani dalam satu dari dua cara, bergantung pada apakah pencocokan dilakukan untuk fatal atau nonfatal, dan pencocokan intra-sistem atau antarsistem.

122. Untuk pencocokan antarsistem untuk data pelanggaran-pelanggaran fatal, kumpulan pencocokan yang dihasilkan algoritma dimasukkan ke dalam sistem pencocokan data Analyzer dan seorang ahli hubungan catatan (*record linkage expert*) mengulas target-target pencocokan yang dibantu komputer tersebut untuk setiap sumber catatan yang tidak tercocokkan. Pencocokan nonfatal intra-sistem sepenuhnya otomatis dengan hasil yang ditinjau oleh ahli hubungan catatan untuk memastikan kelebihan atau kekurangan ekstrem pencocokan tidak terjadi.

---

* Penunjukan sumber dan target ditentukan oleh jumlah catatan dalam dataset. Dari kedua dataset, yang lebih kecil dari kedua dataset menjadi sumber dan yang lebih besar adalah target. Ini untuk mengurangi angka atau catatan yang harus dibandingkan, tetapi tiap catatan dari kedua dataset dibandingkan terhadap semua pasangan potensialnya.

† Sebuah 'pasangan pasti' terjadi ketika dua atau lebih catatan dalam sebuah basis data cocok satu sama lain dan ketika semua bidang-bidang di mana keputusan pencocokan dibuat, identik.

Tahap 2 – Pencocokan dengan bantuan komputer

123. Pencocokan dengan bantuan komputer, disebut dengan P2, dilakukan berdasar algoritma yang menghasilkan banyak kecocokan potensial antara catatan-catatan sumber dan target, yang dianggap sangat mungkin, tapi memerlukan peninjauan oleh manusia untuk memilih mana dari catatan-catatan yang tertimbang yang merupakan pasangan yang paling baik. Kalkulasi berdasar probabilitas dan frekuensi tiap bidang data antara pasangan-pasangan catatan dipertimbangkan dan diurutkan berdasar nama, tanggal lahir, tanggal kematian, tempat lahir, dan tempat kematian. Dengan menggunakan *interface* pencocokan Analyzer, ahli hubungan catatan memilih catatan target mana dari kumpulan tersebut, jika ada, yang cocok dengan catatan sumber yang sedang diperiksa.

124. Aturan-aturan pencocokan intersistem fatal P2 adalah:

- Jenis kelamin sumber dan target harus sama, di mana jenis kelamin diketahui.
- Inisial pertama dari nama-nama antara sumber dan tujuan (-tujuan) harus sama.
- Untuk target (-target), di mana DOB dan DOD diketahui, salah satu tanggal harus berada dalam jarak lima tahun dari tanggal sumber.
- Jika sumber dan target(-target) potensial mempunyai DOB atau DOD yang "sempurna", paling tidak salah satu dari bidang pencocokan lainnya harus sama.

125. Setelah pencocokan antarsistem dilakukan antara set data HRVD dan RMS dalam Analyzer, daftar para korban fatal khas yang dihasilkan dimasukkan ke dalam sebuah *spreadsheet*. Catatan-catatan itu kemudian diurutkan pada berbagai bidang data untuk menentukan apakah kecocokan yang mungkin lainnya dapat ditemukan. Ini tidak saja berfungsi untuk mendapatkan kecocokan yang terlewat, tapi juga mengukur sebaik apa fungsi algoritma pencocokan tersebut. Penyempurnaan algoritma tambahan dilakukan sebagai hasil dari tinjauan ahli hubungan catatan, untuk memastikan *pass* pencocokan suksesif akan lebih teliti dan akurat.

Tahap 3 – Pencocokan data yang tidak jelas

126. Dalam pencocokan Tahap 3 (P3), catatan-catatan yang mengandung terlalu banyak bidang kosong, atau catatan-catatan individu bernama umum dari area sama, atau yang meninggal dalam periode waktu sama, dicocokkan. Pencocokan ini tidak memiliki cukup data untuk secara spesifik menentukan, misalnya, pasangan sumber/target mana yang tepat, jadi satu dipilih secara acak dari tujuan-tujuan tersebut. Sebagai contoh, Mau Bere adalah nama yang sangat umum di berbagai tempat di negeri ini, dan 1999 adalah tahun di mana mereka meninggal. Kemungkinannya kecil ada pencocokan intra-sistem yang terlewat, karena dua alasan. Pertama, mereka adalah catatan-catatan yang sering datang dari pernyataan kesaksian yang sama, yang mengindikasikan mereka adalah anggota keluarga yang memiliki nama sama. Kedua, GCD mencatat banyak kematian dalam pemakaman yang sama dengan nama dan tanggal sama (atau tanpa tanggal), tapi tidak banyak

informasi yang dapat mengidentifikasi dalam set data HRVD dan RMS untuk membedakan mereka menjadi individu-individu khas.

127. Proses pencocokan P3 menjadikan kecocokan-kecocokan di mana ada probabilitas yang sama akan kecocokan bagus sebuah catatan, yang tidak memerlukan penilaian ahli hubungan catatan.

Pencocokan fatal pasangan-baik antarsistem

128. Pasangan pencocokan antarsistem HRVD dan RMS menghasilkan daftar baru korban-korban khas, yang disebut set data HRVD/RMS. Set data ini termasuk 10.594 catatan yang ditemukan hanya dalam set data HRVD, 4.087 catatan yang ditemukan hanya dalam RMS set data, dan 532 catatan yang ditemukan dalam HRVD dan RMS. 15.213 catatan-catatan khas total ini kemudian dicocokkan secara antarsistem dengan 149.267 catatan dalam set data GCD. Set data HRVD/RMS menjadi sumber datanya dan GCD target datanya. Pencocokan secara berpasangan antara set data HRVD/RMS ke dalam GCD menghasilkan 157.000 nama orang yang telah meninggal. Total ini termasuk catatan-catatan di luar mandat atau tidak memiliki tanggal kematian, yang bisa memverifikasi apakah mereka meninggal dalam periode mandat. Hanya catatan-catatan yang memiliki tanggal kematian dalam periode mandat yang digunakan untuk analisa.

129. Hubungan-hubungan dalam dan antara set data digunakan dalam memperkirakan jumlah total kematian karena konflik. Catatan-catatan dalam daftar akhir ini dapat dihubungkan kembali ke dalam set data tunggal, atau kombinasi dari ketiga set data. Di bawah ini adalah matriks sederhana yang menunjukkan hasil dari pencocokan fatal antarsistem terakhir yang mencocokkan hubungan antara berbagai set data.[*]

Tabel 7: Matriks hasil pencocokan antarsistem

	Hanya HRVD	Hanya RMS	Hanya GCD	HRVD & RMS	HRVD & GCD	RMS & GCD	HRVD/ RMS/ GCD	Total
Jumlah	5.203	2.148	141.787	382	5.391	1.939	150	157.000
Persen	3,31	1,37	90,31	0,24	3,43	1,24	0,1	100

130. Jika pencocokan intra-sistem menangkap semua kecocokan yang mungkin, maka hanya nol atau satu kecocokan potensial yang mungkin selama pencocokan antarsistem. Kecocokan bisa terlewat jika catatan-catatan yang sedang diperiksa memiliki bidang-bidang data yang hilang, yang menjadikannya tidak jelas apakah

* Ini adalah total yang tidak dipertimbangkan, termasuk catatan-catatan tanpa tanggal, tanggal di luar jangka waktu, tanpatempat, dan tempat di luar Timor-Leste. Catatan-catatan di luar jangkauan ini kemudian dihilangkan dari analisa.

kedua catatan tersebut harus dihubungkan. Kesalahan manusia juga mungkin ketika melihat besarnya kuantitas data yang ada dalam pekerjaan Komisi. Secara umum, sebuah kecocokan diasumsikan ketika mayoritas bidang data cocok, atau bobot kecocokan catatan-catatan tersebut masih dalam toleransi. Jika tidak terdapat cukup bidang dengan data lengkap, sulit untuk menentukan dengan kepastian yang beralasan apakah suatu catatan seharusnya disertakan atau tidak disertakan dalam pencocokan dengan catatan lainnya. Kasus yang ke dua terutama benar untuk nama-nama asli Timor yang sangat umum, seperti Mau Bere, di mana banyak orang, dari tempat sama, meninggal atau dibunuh pada waktu yang sama.

131. Setelah menyelesaikan pencocokan antarsistem dalam Analyzer, data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah *spreadsheet* untuk ditinjau oleh ahli hubungan catatan. Dengan melihat data yang diurut berdasar variabel-variabel berbeda, dengan proses berganda—baik oleh manusia atau otomatis—dapat secara yakin disimpulkan bahwa semua kemungkinan pencocokan yang seharusnya dilakukan, telah diproses. Selain itu, proses pencocokan antarsistem dapat dianggap sebagai suatu pengukuran Inter-Rater Reliability (IRR), karena menemukan contoh-contoh di mana pencocokan terlewati dalam tahap intra-sistem. Dengan kembali pada data intra-sistem dan menerapkan pencocokan yang terlewat, dimungkinkan untuk mengukur bukan saja IRR tapi juga memperbaiki data, yang menghasilkan data yang lebih bisa diandalkan yang dengannya perkiraan dapat dilakukan.

Tabel 8: Tabel total catatan perhitungan pencocokan antarsistem dan persentase pelanggaran fatal menurut pasangan set data

Langkah	HRVD ke RMS	HRVD/RMS ke GCD
Mulai perhitungan	HRVD + RMS=HRVD/RMS	
Pencocokan Spreadsheet	Hitung & Persen	
Diperbaiki dari yang terlewat	Hitung & Persen	
HRVD/RMS total	Hitung & Persen	
Mulai perhitungan		HRVD/RMS + GCD = MSE
Pencocokan P1		Hitung & Persen
Pencocokan P2		Hitung & Persen
Pencocokan P3		Hitung & Persen
Total Perhitungan untuk MSE		Hitung & Persen

Pengolahan data pelanggaran yang dilaporkan melibatkan kelompok-kelompok korban tak dikenal

132. Selama proses pengambilan pernyataan, seorang deponen mungkin saja telah berbicara tentang satu atau banyak korban. Terkadang, ketika korban berganda dilaporkan oleh seorang deponen, ia tidak mengetahui beberapa atau semua dari nama-nama para korban tersebut. Di dalam proses pengambilan pernyataan Komisi, 1,9% (1.419/75.443) dari catatan tentang korban yang didokumentasikan oleh Komisi, deponen tidak mengetahui nama korban-korban yang mengalami pelanggaran sebagai anggota dari kelompok yang lebih besar.

133. Untuk mengintegrasi data ini ke dalam analisa Komisi, dan menimbang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap individu-individu yang diketahui namanya maupun kelompok-kelompok yang tidak diketahui namanya, beberapa pengolahan data lebih lanjut dibutuhkan untuk memperhitungkan kemungkinan duplikasi pencatatan pelanggaran terhadap kelompok korban yang dilaporkan. Langkah-langkah pengolahan untuk mencegah duplikasi ini

- mengidentifikasi catatan-catatan pelanggaran (terhadap kelompok korban tak dikenal) yang tampak digambarkan sebagai kelompok korban yang sama, dan kemudian
- memilih sebuah catatan korban dari kelompok catatan-catatan kemungkinan duplikasi untuk dipertahankan sebagai "rep rec" dari pelanggaran yang dilaporkan tersebut

134. Tidak seperti data pelanggaran terhadap individu (yang sedikit tidaknya mengandung pengidentifikasian pribadi, seperti nama, umur, dan jenis kelamin), pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan atas kelompok pada umumnya tidak mengandung pengidentifikasian pribadi yang terperinci dari kelompok korban. Akibatnya, catatan-catatan korban-kelompok dicocokkan dengan cara membandingkan variabel-variabel berikut dari setiap pelanggaran yang dilaporkan terhadap sebuah kelompok:

- distrik di mana pelanggaran dilaporkan terjadi
- jenis pelanggaran yang ke dalamnya pelanggaran tersebut dikodekan, dan
- tahun dan bulan pada waktu pelanggaran dilaporkan terjadi

135. Kemudian, setelah semua catatan jenis korban-kelompok dicocokkan bersama untuk membentuk sebuah kluster (kelompok sampel), catatan dengan jumlah kelompok paling besar di dalam setiap kluster dipertahankan. Semua catatan yang lain dianggap sebagai catatan duplikasi dan karenanya dikeluarkan dari set data.

136. Tingkat duplikasi di antara korban-kelompok ditunjukkan di dalam tabel di bawah ini. Tabel ini menunjukkan berapa banyak salinan pelanggaran duplikasi per jenis pelanggaran yang diidentifikasi dalam set data dan jumlah catatan pelanggaran

kelompok surplus yang dikeluarkan dari analisa Komisi tentang pelanggaran atas korban-kelompok.

Tabel 9: Tingkat duplikasi di antara korban-kelompok												
	Penahanan		Penyiksaan		Penga-niayaan		Pemindahan		Pelanggaran lain		Semua pe-langgaran	
Jilid 1	Obs	Sur-plus	Obs	Sur-plus	Obs	Sur-plus	Obs	Sur-plus	Obs	Sur-plus	Obs	Sur-plus
1	441	0	134	0	121	0	180	0	736	0	1612	0
2	150	75	26	13	30	15	68	34	206	103	480	240
3	69	46	15	10	9	6	21	14	87	58	201	134
4	56	42	4	3	8	6	16	12	60	45	144	108
5	25	20	0	0	5	4	10	8	30	24	70	56
6	6	5	0	0	6	5	12	10	12	10	36	30
7	0	0	0	0	7	6	0	0	0	0	7	6
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12	11	0	0	0	0	0	0	12	11	24	22
13	13	12	0	0	0	0	0	0	13	12	26	24
Total	772	211	179	26	186	42	307	78	1156	263	2600	620

Teknik-teknik perkiraan statistik yang digunakan dalam analisis pelanggaran fatal dan pemindahan

137. Bagian ini menjelaskan tentang teknik estimasi berbasis survei dan metode estimasi sistem berganda yang digunakan untuk membuat estimasi dari total tingkatan dan pola kematian dan pemindahan selama masa acuan Komisi.

Kalkulasi beban RMS

138. Sampling survei telah dijelaskan sebelumnya: pada 2003, tim-tim kerja lapangan CAVR mewawancarai 1.396 rumahtangga yang dipilih dari 138 *aldeia* dan kelompok-kelompok *aldeia*, yang disebut sebagai kluster. Kluster-kluster ini dipilih dengan metode yang disebut 'Probability Proportional to Size' (PPS) dan kemudian

sepuluh (atau 20) rumahtangga dipilih dengan sampel acak sederhana dari dalam setiap kluster. Apabila setiap kluster memiliki jumlah rumahtangga sampel yang persis sama, probabilitas sampel dari setiap rumahtangga akan sama—proses yang disebut sebagai '*self-weighting*'.[8] Karena *sampling* atas 20 rumahtangga dalam kluster multi-*aldeia* dan non-respons dalam kluster lainnya, tidak semua kluster memiliki jumlah sampel rumahtangga yang sama; namun, 78,5% dari kluster sampel memiliki tepatnya 10 rumahtangga yang dijadikan sampel. Non-respons adalah 3,1%, sehingga tidak ada penyesuaian non-respons yang perlu dilakukan. Beban statistik kemudian dihitung dengan cara berikut ini.

139. Untuk setiap kluster, penyesuaian untuk ukuran kluster yang berbeda adalah:

- kluster_penyesuaian = median_kluster_ukuran / kluster_ukuran

140. Kemungkinan kasar sampling rumahtangga 1990 adalah

- sp_1990 = (jumlah total Rumahtangga [RT] tersampel) / (total RT di tahun 1990) =1.396/168.858 sp

141. Maka, untuk setiap kluster, beban PPS adalah

- pps_beban_1990_kasar = (1/sp_1990) * kluster_penyesuaian

142. Ada perubahan populasi yang cukup besar karena migrasi dan pertumbuhan antara 1990 dan 2004, ketika survei ini dilakukan. Sebelum beban statistika ini bisa diperkirakan, jumlah total rumahtangga di setiap *aldeia* disesuaikan dari sensus 1990 dengan menggunakan data dari sensus 2004. Di dalam desain sampel, kluster-kluster dipilih dengan menggunakan jumlah rumahtangga untuk setiap *aldeia* yang dilaporkan pada sensus 1990. Pada waktu kalkulasi ini selesai (April 2005), data enumerasi sensus Timor-Leste pada 2004 hanya tersedia terpisah-pisah berdasarkan tingkat subdistrik, tapi tidak berdasarkan *suco* (desa) atau *aldeia*.* Patut dicatat bahwa penyesuaian beban statistika 1990-2004 tidaklah memengaruhi jumlah keseluruhan beban, yang dipatok pada jumlah rumahtangga yang ada pada 2004. Penyesuaian beban ini memengaruhi sebanyak apa rumahtangga di tempat-tempat yang berbeda memengaruhi proyeksi data.

143. Dua subdistrik yang terdaftar pada 1990 tidaklah terdaftar pada hasil sensus 2004: Fatumaca di Baucau menjadi bagian dari subdistrik Baucau, dan di Oecussi, Pante Macassar B dimasukkan ke dalam Pante Macassar. Untuk kedua subdistrik ini, jumlah rumahtangga pada 2004 diperkirakan dengan menggunakan proporsi rumahtangga di dalam wilayah subdistrik yang menyerap dan terserap pada 1990 dikalikan dengan total rumahtangga di subdistrik yang menyerap di tahun 2004.

144. Walaupun jumlah total rumahtangga 2004 tersedia dari sensus pada tingkat subdistrik, RMS memiliki terlalu sedikit respons pada tingkat subdistrik untuk dapat memperkirakan beban atas subdistrik untuk memiliki data yang mencukupi (29 dari 59 subdistrik sampel memiliki kurang daripada 20 respons). Maka, beban

* Lihat http://dne.mopf.gov.tp untuk data sensus.

statistika 1990 dicocokkan pada jumlah total distrik 2004 dengan menggunakan perhitungan berikut:

- distrik_penyesuaian = (Total RT di tahun 2004 di distrik ini)/(Total 1990 beban di distrik ini)pps_beban_2004 = pps_beban_1990_penyesuan_kasar * distrik

145. Dengan memaksakan beban statistika untuk dicocokkan dengan jumlah rumahtangga distrik pada sensus 2004, beban statistika dinormalisasikan untuk dijumlahkan ke total rumahtangga pada 2004 (194.943). Kesalahan-kesalahan terdapat dalam hasil diperhitungkan dengan menggunakan modul survei standar Strata.[9] Modul-modul ini menggunakan variabel desain survei (stratum, unit sampling primer, dan beban sampling) untuk membuat estimasi beban dari total dan perkiraan seri Taylor dari kesalahan sampling. Estimasi kesalahan ini mengambil sampling acak dengan beban sampling yang tidak sama. Asumsi ini konservatif (yaitu, ia akan cenderung untuk menyepelekan kesalahan sampling) dengan mempertimbangkan beban statistika yang dihitung dengan metode PPS yang dijelaskan sebelumnya.[10] File-file data elektronik yang digunakan untuk kalkulasi-kalkulasi ini tersedia di http://www.hrdag.org/timor

Penentuan tanggal RMS untuk analisa pemindahan

146. Survei ini menanyakan kepada responden kapan mereka pindah dari setiap lokasi selama periode 1974-1999. Ketika para responden tidak yakin akan tanggal pasti dari waktu pindah mereka, sering mereka mengidentifikasi tahun pindah mereka dengan titik tertentu dalam siklus pertanian atau apakah itu adalah musim kering atau hujan. Untuk setiap tanggal parsial atau musiman ini, kami menentukan pemindahan ke dalam kuartal di mana masa atau musim itu terjadi. Jika identifikasi tanggal parsial dapat terjadi di dalam lebih daripada satu kuartal, ia ditetapkan secara acak ke dalam satu kuartal. Dari 2.024 proses pindah yang diartikan oleh responden sebagai kejadian pemindahan, 76,6% setidak-tidaknya diidentifikasikan ke dalam kuartal, dan 15,7% lainnya diidentifikasikan atas musim. Hanya 7,7% kejadian pemindahan diidentifikasikan atas tahun tanpa menyebutkan bulan.

Penyesuaian beban RMS untuk perkiraan angka kematian

147. Kalkulasi beban statistika mengasumsi bahwa kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh setiap rumahtangga hanya bisa dilaporkan oleh rumahtangga tersebut. Asumsi ini ialah hasil dari beban yang merupakan resiprokal dari probabilitas *sampling* untuk setiap rumahtangga. Karena itu, apabila ada lebih daripada satu rumahtangga yang dapat memberikan informasi tentang sebuah kematian tertentu, probabilitas *sampling* murni untuk kematian tersebut lebih besar dari probabilitas untuk satu rumahtangga. Kematian yang dilaporkan oleh responden survei melanggar asumsi laporan-tunggal-rumahtangga karena untuk setiap kematian, mungkin ada lebih daripada satu rumahtangga yang dapat memberi laporan tentang kematian

tersebut. Di antara 5.402 jumlah total kematian yang dilaporkan oleh responden, 545 dilaporkan lebih daripada satu kali (laporan yang terduplikasi ini diidentifikasi dan dikeluarkan sebelum proses perkiraan). Duplikasi laporan yang terimplisit di dalam perkiraan beban survei diubah dengan menyesuaikan beban dengan cara yang dijelaskan di bawah ini.

148. Sebelum beban survei dapat digunakan untuk memperkirakan angka kematian total, angka tersebut harus disesuaikan untuk menghitung jumlah rumahtangga yang merupakan responden potensial untuk setiap kematian. Yaitu, untuk setiap kematian, berapa anggota keluarga yang selamat sampai 2003 untuk menjadi responden potensial dalam survey ini? Banyak informasi yang dibutuhkan untuk perhitungan ini tersedia dalam survei ini karena anggota keluarga responden juga adalah anggota keluarga almarhum/almarhumah. Jumlah anggota keluarga yang selamat dari setiap korban *D* dikalkulasi berdasarkan anggota keluarga yang dilaporkan oleh responden *R* dengan menggunakan aturan-aturan sebagai berikut:

- Jika *D* adalah orangtua dari *R*, jumlah anggota keluarga yang diharapkan selamat pada 2003 adalah penjumlahan dari:
    - » Dianggap bahwa orangtua dari *D* adalah 25 tahun lebih tua dari *D* (atau 50 tahun lebih tua dari *R*, jika usia *D* tidak dilaporkan); gunakan probabilitas selamat kondisional spesifik-umur (yang dikalkulasi dari survei ini) untuk memperkirakan jumlah orangtua yang diharapkan masih hidup pada 2003
    - » Hitung saudara-saudara kandung *R* sebagai anak-anak dari *D*
    - » Dengan rata-rata terdekat tingkat kesuburan total adalah 5 sebelum 1975, dianggap bahwa *D* mempunyai empat saudara dengan usia masing-masing (-4, -2, +2, +4) tahun dari usia *D* (jika usia *D* hilang, pasang usia *D terhadap usia R* + 25), hitung usia saudara kandung pada 2003, dan kalikan masing-masing dengan kemungkinan bersyarat untuk selamat sampai usia tersebut, dan tambahkan keempat saudara kandung itu

- Jika *D* adalah seorang saudara dari *R*
    - » *Orangtua D adalah orangtua R*, langsung hitung orang yang selamat
    - » *Saudara R adalah saudara D*, langsung hitung orang yang selamat

149. Dianggap bahwa *D* mempunyai jumlah anak dewasa yang selamat yang sama dengan *R*.

- Jika *D* adalah anak dari *R*
    - » *R* dan pasangannya adalah orangtua, langsung hitung orang yang selamat
    - » Anak-anak dewasa dari *R* adalah saudara-saudara kandung *D*, langsung hitung orang yang selamat
    - » Dianggap tidak ada anak dewasa yang selamat dari *D*.

150. Kalkulasi ini menghasilkan anggota keluarga dewasa yang diperkirakan selamat untuk setiap *D*, juga menunjukkan siapa dari anggota-anggota keluarga yang selamat ini tinggal dalam rumahtangga *R*, yang siapa yang tinggal di rumahtangga yang lain.

151. Untuk mengonversi anggota keluarga dewasa yang diperkirakan selamat dari *D* ke dalam sebuah penyesuaian untuk beban sampling, jumlah anggota keluarga harus dikonversi ke dalam sebuah jumlah perkiraan rumahtangga di mana anggota keluarga tersebut tinggal. Terdapat kira-kira 0,5 anggota keluarga *D* (selain *R*) tinggal di rumahtangga *R*. Anggap bahwa rumahtangga lain di mana anggota keluarga *D* tinggal mempunyai jumlah pemusatan anggota keluarga per rumahtangga yang sama dengan rumahtangga *R* (yaitu 1,5 anggota per rumahtangga). Maka, apabila *D* mempunyai *L* anggota keluarga yang selamat yang tinggal di luar rumahtangga *R*, maka ada $a = 1 + L/1{,}5$ rumahtangga yang dapat memberikan informasi tentang *D*. Beban survei yang disesuaikan untuk kemungkinan laporan berganda atas *D* dengan membagi setiap beban *sampling D* dengan faktor ini, *a*. Kalkulasi ini mengasumsikan bahwa rumahtangga responden potensial lainnya ada dalam kluster yang sama dengan *R*, atau bahwa mereka ada dalam kluster dengan kemungkinan sampling yang sama dalam kluster.

Analisis sensitivitas terhadap asumsi-asumsi dalam pengukuran kembali angka kematian (*mortality re-weighting*)

152. Ada sejumlah asumsi dalam pencocokan beban untuk perkiraan angka kematian, antara lain sebagai berikut:

- Perbedaan periode antara generasi-generasi (diasumsikan 25 tahun)
- Jumlah saudara kandung yang dimiliki orang tua responden (diasumsikan empat)
- Jarak kelahiran saudara kandung orang tua (diasumsikan dua tahun)
- Jumlah anak dewasa yang dimiliki saudara kandung responden (diasumsikan setara dengan anak-anak responden).

153. Asumsi-asumsi ini dites dengan menggunakan variasi-variasi berikut, dan total angka kematian tahunan dikalkulasi:

- Penjarakan antar-generasi bervariasi antara 18 dan 30 tahun
- Jumlah saudara dari orangtua responden diasumsikan telah bertambah menjadi enam
- Jarak kelahiran meningkat menjadi lima tahun antarsaudara
- Jumlah anak dewasa yang dimiliki saudara responden diasumsikan menjadi dua kali lipat dari anak-anak responden

154. .Untuk setiap varian perkiraan, total tahunan diuji (dengan menggunakan *two-mean t-test*) terhadap model utama. Tidak satu tahun pun di setiap model varian yang berbeda secara penting pada $p<0{,}05$. Nilai p minimum adalah 0,13, dan itu

adalah sebuah *outlier*: nilai terendah kedua dari p adalah 0,23. Karena itu, perkiraan ini tidak sensitif secara mendasar terhadap asumsi mengenai struktur keluarga.

155. Meskipun perkiraan-perkiraan ini kaku terhadap asumsi-asumsi tentang struktur keluarga yang digunakan untuk mengestimasi jumlah anggota keluarga yang selamat yang dapat memberikan informasi tentang D, magnitudo dari yang diperkirakan sensitif terhadap model yang digunakan untuk mentransformasi perkiraan anggota keluarga yang selamat untuk memperkirakan rumahtangga yang mengandung anggota keluarga. Perkiraan jumlah anggota keluarga yang selamat adalah L, dan perkiraan jumlah rumahtangga yang mempunyai anggota keluarga dari almarhum/almarhumah D, merupakan a, adalah a = 1 + L/1,5. Denominator 1,5 didapatkan dari rata-rata jumlah anggota keluarga untuk D (termasuk R) yang hidup di rumahtangga R (0,5).Memvariasikan rata-rata ini dari 0 sampai 3 (diasumsikan 1-4 anggota keluarga dewasa yang selamat per rumahtangga), meragamkan perkiraan hasil dari kematian total yang diperkirakan (oleh semua penyebab) dari -14.2% ke +19.6%. Dampak dari meragamkan model ini berkurang sepanjang waktu, dengan variasi terbesar ditemukan pada awal tahun 1972-1975 (-21%, +26%) dan variasi terkecil ditemukan pada tahun-tahun yang lebih kemudian yaitu 2001- 2003 (-11%, +16.2%). Pengurangan ini konsisten sepanjang waktu.

156. Dengan adanya jumlah yang konstan dari anggota keluarga yang selamat, sedikit saja anggota keluarga yang selamat per rumahtangga sudah dapat berarti bahwa lebih banyak kemungkinan rumahtangga yang dilaporkan, bahwa ada kemungkinan perkiraan sampel yang tinggi per kematian yang dilaporkan, dan bahwa beban sampel per kematian yang dilaporkan yang rendah, dan karenanya perkiraan total kematian lebih rendah; lebih banyak orang dewasa per rumahtangga yang membalikkan logika ini.

157. Meskipun total perkiraan bervariasi dengan perubahan-perubahan dalam model-model yang mentransformasikan anggota-anggota keluarga ke dalam rumahtangga-rumahtangga, polanya tetap sama. Koefisien korelasi untuk model utama ke model-model rendah (0) dan tinggi (3) di atas masing-masing adalah 0,99. Meskipun model anggota keluarga-per-rumahtangga memang memengaruhi magnitudo total dari kematian-kematian yang diperkirakan, model ini tidak memengaruhi pola-pola perkiraan sepanjang waktu.

Multiple System Estimation (MSE): motivasi dan teori

158. Analisis survei bersifat konservatif dalam pengertian bahwa analisa tersebut mengoreksi kemungkinan laporan berganda dengan mencocokkan kematian di seluruh rumahtangga, dan karena ada penyesuaian terhadap beban sampling yang didasarkan pada perkiraan jumlah rumahtangga yang dapat memberikan informasi tentang setiap kematian. Walaupun sejumlah kematian dapat saja dilaporkan oleh beberapa rumahtangga, ada juga kematian-kematian lain yang terjadi selama 1974-1999 di mana tidak ada anggota keluarga yang selamat pada 2003. Jika seluruh anggota keluarga meninggal selama periode mandat Komisi, mungkin saja tidak

ada anggota keluarga kolineal yang dapat memberikan informasi pada 2003. Karena keterbatasan ini, sebuah metode pengganti untuk memperkirakan total kematian dapat saja melakukan pengecekan pada survei yang diperkirakan.[*]

159. MSE menggunakan beberapa daftar populasi yang dikumpulkan secara terpisah yang tidak lengkap. Daftar-daftar ini mengidentifikasi kecocokan elemen-elemen yang sama sepanjang daftar-daftar itu untuk dapat memperkirakan jumlah elemen yang hilang dari seluruh daftar. Dalam proyek ini, kematian-kematian yang didokumentasikan dalam HRVD, RMS, dan GCD dicocokkan sepanjang ketiga sistem dengan menggunakan nama, tanggal kematian, lokasi kematian dan tanggal lahir.

160. Bentuk paling dasar dari teknik ini adalah *capture-tag-recapture*, yang menggunakan hanya dua daftar.

161. Penjelasan teknis tentang bagaimana sebuah perhitungan akan anggota yang tidak diketahui dari populasi dapat diperkirakan adalah sebagai berikut. Anggap saja ada kasus dari dua proyek P1 (sebuah daftar individu-individu A) dan P2 (sebuah daftar individu-individu B). Ada individu-individu M yang cocok di sepanjang daftar, dalam sebuah universe total individu-individu N (N tidak diketahui). Jika semua orang dalam universe N mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul dalam Daftar 1, maka kemungkinan seorang individu tertentu dilaporkan oleh P1 adalah:

Pr(terdapat dalam daftar 1) $= \underline{A}$

162. Demikian juga, jika semua orang dalam universe N mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul dalam Daftar 2, maka kemungkinan seorang individu tertentu dilaporkan oleh P2 adalah:

Pr(terdapat dalam daftar 2) $= \underline{B}$

163. Kemungkinan seorang individu tertentu terdapat/tertangkap dalam kedua daftar adalah

Pr(terdapat dalam daftar 1 dan daftar 2) $= \underline{M}$

164. Menurut definisi, kemungkinan dari sebuah peristiwa mengandung dua peristiwa yang terpisah adalah hasil dari kemungkinan independen itu. Kerena itu,

Pr(terdapat dalam daftar 1 dan 2) = Pr(terdapat dalam daftar 1) x Pr(terdapat dalam daftar 2)

Di mana $\underline{M} = \underline{A})(N)$: dengan persamaan ini, kita memperoleh jawaban untuk N. Dengan mengatur ulang elemen-elemen persamaan ini, kita memperoleh:

* Penjelasan ini sesuai P Ball, J Asher, D Sulmont, D Manrique, "How many Peruvians have died? An estimate of the total number of victims killed or disappeared in the armed internal conflict between 1980 and 2000", a report to the Peruvian Truth and Reconciliation Commission. Washington, DC: AAAS. 28 August 2004. tersedia online pada http://shr.aaas.org/hrdag/peru.

$$\underline{M} = \frac{\cdot B}{2}$$

Dan kemudian dikalikan dengan N,

$$N = \frac{\cdot}{N}$$

Dikalikan lagi dengan M° = °B, dan akhirnya dibagi dengan M, menghasilkan

$$N = \frac{\cdot}{M}$$

Catat bahwa dalam persamaan terakhir, jumlah kematian total *N* dapat diperkirakan dengan menggunakan total dari *A* dan *B* dan dari pencocokan antara mereka, *M*.

165. Ada banyak asumsi terimplisit dalam solusi ini. Sebagai contoh, tidak satu pun daftar yang mempunyai perorangan yang dilaporkan dua kali dan bahwa pencocokan antardaftar bersifat akurat. Dalam proyek ini kedua asumsi ini dikendalikan selama pengolahan data sebagaimana dijelaskan dalam bagian pencocokan.

166. Asumsi lain yang inheren dalam model *capture-tag-recapture* lebih sulit ditangani. Pertama, metode ini mengasumsikan bahwa individu-individu tidak memasuki atau keluar dari semesta (*universe*) ini selama proses penciptaan daftar-daftar itu, dan kedua bahwa daftar-daftar ini diseleksi secara acak dari populasi. Dalam proyek dokumentasi hak asasi manusia, asumsi pertama biasanya menjadi irrelevan karena dokumentasi terjadi secara retrospektif. Asumsi kedua tidak mungkin memuaskan, dan harus digantikan oleh asumsi bahwa perkiraan itu kaku terhadap proses-proses seleksi.

167. Asumsi yang lain adalah bahwa daftar itu independen, yaitu, bahwa kemungkinan bahwa seorang individual ada dalam daftar kedua adalah independen dari kemungkinan bahwa individual itu terdapat dalam daftar pertama. Asumsi terakhir adalah homogenitas: bahwa individu yang membentuk universe semuanya mempunyai kemungkinan yang sama untuk tertangkap dalam daftar.

168. Jika satu saja dari asumsi-asumsi ini terganggu, metode *capture-tag-recapture* tidak akan menghasilkan sebuah estimasi yang memadai tentang besarnya populasi total. Jika ada lebih daripada dua daftar dengan informasi yang memadai, masalah ketergantungan atau heterogenitas sering dapat diatasi melalui spesifikasi dan seleksi atas model-model yang tepat. Namun, dalam data untuk HRVD, RMS, dan GCD, hanya ada dua sistem yang dapat digunakan (RMS-GCD untuk kematian karena lapar atau kesakitan, dan HRVD-GCD untuk pembunuhan).* Pada dirinya

* Aplikasi awal dari estimasi sistem berganda terhadap estimasi demografis adalah oleh C Chandra Sekar dan W Edwards Deming, "On a Method of Estimating Birth and Death Rates and the Extent of Registration," *Journal of the American Statistical Association*, March 1949. Sebuah diskusi menyeluruh tentang estimasi untuk pendekatan dual system dan kesalahan kalkulasi yang mungkin berhubungan tersedia dalam Yvonne M M Bishop, Stephen E Fienberg dan Paul H. Holland. *Discrete Multivariate*

sendiri perkiraan-perkiraan ini tidak akan memadai, tetapi dalam kombinasi dengan perkiraan RMS, perkiraan-perkiraan ini menyediakan informasi tambahan yang bermanfaat.

Mengalokasikan GCD menurut jenis kematian

169. Data kuburan tidak memasukan cara kematian. Terdapat 89.894 kubur dengan setidak-tidaknya sebuah inisial awal (atau nama), sebuah nama belakang dan sebuah tahun antara 1972 dan 2003. Ada sejumlah 7.117 cocok baik dengan HRVD atau dengan RMS (atau keduanya), dan melalui kecocokan ini, cara kematian dapat diketahui dari catatan tentang cara yang cocok dengan kematian. Sisanya 82.717 catatan GCD perlu dialokasikan ke dalam empat kategori cara kematian (pembunuhan, kematian karena kelaparan atau kesakitan, kematian Petempur, dan kematian lainnya). Dari RMS, proporsi kematian tahunan menurut keempat jenis ini ditunjukkan dalam tabel di bawah. Catat bahwa proporsi ini tidak mengikutsertakan kematian di mana cara kematian tidak diketahui (204 dari 3,235 kematian yang dilaporkan dalam RMS antara 1969 dan 2004 mempunyai cara kematian yang tidak diketahui).

Tabel 10: Perkiraan proporsi kematian, menurut periode dan cara kematian

Periode	Pembunuhan	Kelaparan/Kesakitan	Petempur	Lain-lain
1972 - 1974	0,9%	95,9%	0,0%	3,2%
Marjin kesalahan	1,8%	5,1%	0,0%	4,9%
1975-1982	11,2%	83,0%	4,4%	1,4%
Marjin kesalahan	4,7%	5,1%	2,5%	0,6%
1983-1998	5,5%	86,5%	0,7%	7,2%
Marjin kesalahan	2,5%	3,7%	0,6%	2,5%
1999	16,2%	83,0%	0,4%	0,4%
Marjin kesalahan	10,2%	10,2%	0,8%	0,8%
2000-2003	3,5%	86,9%	0,8%	8,9%
Marjin kesalahan	3,1%	6,5%	1,6%	4,9%
Total	8,3%	85.1%	2,4%	4,3%
Marjin kesalahan	2,7%	3.1%	1,2%	1,2%

170. Proporsi ini digunakan untuk mengalokasikan catatan GCD yang belum tercocokkan ke dalam cara khusus kematian untuk digunakan di dalam kalkulasi MSE untuk setiap tahun: proporsi dari periode ini yang mengandung setiap tahun

Analysis: Theory and Practice. Cambridge, MA: MIT Press. 1975. Untuk komentar tentang penggunaan metode-metode ini dalam analisis hak asasi manusia, lihat Fritz Scheuren, "History Corner," The American Statistician, Februari 2004

digunakan mengalokasikan kematian GCD dalam tahun itu. Marjin kesalahan dari alokasi dimasukkan dalam kesalahan yang diperkirakan untuk perkiraan MSE.

Analisis sensitivitas hilangnya pengetahuan sosial: penyesuaian-penyesuaian untuk perkiraan yang terlalu rendah

171. Survei ini menanyakan kepada responden tentang kematian orangtua, saudara kandung, atau anak-anak mereka. Namun, beberapa kematian tidak menyisakan orangtua, saudara kandung, maupun anak-anak tetap hidup ketika survei ini dilaksanakan pada tahun 2004. Jika kematian-kematian telah terjadi lama di waktu lalu, bahkan anak-anak dari orang yang mati juga mati semuanya, tidak ada yang bisa melaporkan kematian-kematian tersebut. Dalam kasus lain keluarga yang kecil dapat saja menderita kematian semua anggota keluarga, sehingga tak seorangpun yang selamat untuk melaporkan kematian-kematian tersebut. Karena survei ini memperkirakan angka (atau tingkatan) kematian di masa lalu, perkiraan yang terlalu rendah yang merupakan akibat dari hilangnya pengetahuan sosial tentu saja menjadi sangat hebat. Namun, bahkan dalam waktu yang belum terlalu lama (sebagai contoh, di tahun 2003 karena survei dilakukan tahun 2004), adalah tidak mungkin untuk mendokumentasikan sejumlah kematian yang tidak mempunyai seorang pun yang selamat. Sebagai contoh, orang-orang yang tidak mempunyai orangtua, saudara kandung, atau anak-anak, yang meninggal di tahun 2003 tidak dapat dilaporkan dalam survei ini.

172. Tingkat kematian kasar (per 1.000 orang) adalah sebuah perkiraan tentang berapa banyak orang meninggal, secara total, per tahun. Tingkat kematian kasar ini adalah standar demografik dan indikator kesehatan, yang biasanya diperkirakan dengan metode-metode tidak langsung dengan menggunakan catatan-catatan sensus. Untuk Timor-Leste, tingkat ini sulit diperkirakan karena kualitas data sensus tahun 1980 dan 1990 masih dipertentangkan.[11] CDR yang diperkirakan oleh Biro Amerika Serikat untuk Sensus bagi Timor-Leste ditunjukkan untuk tahun 1990-2004. Tingkat keseluruhan untuk Indonesia ditunjukkan dalam tahun 1983. Perkiraan yang ditunjukkan untuk tahun 1971 yang berasal dari pemerintah Indonesia mengklaim bahwa di seluruh Indonesia antara 1971 dan 1990, CDR menurun sampai 45%; perkiraan tahun 1971 yang ditunjukkan di sini adalah perkiraan 1990 untuk Timor-Leste digelembungkan oleh faktor ini. Suatu CDR yang sudah diperhitungkan juga ditunjukkan dengan secara linear disisipkan antara perkiraan tahun 1971 dan perkiraan tahun 1990-2004

173. Selain perkiraan CDR, CDR dari RMS Komisi juga ditunjukkan. Perkiraan ini adalah total perkiraan kematian dibagi dengan perkiraan populasi untuk tahun itu (dikalikan 1.000). Ada beberapa pengamatan yang dibuat mengenai grafik ini. Pertama, CDR yang diperkirakan oleh Biro Amerika Serikat adalah dalam interval yang dipercaya dari CDR yang diperkirakan oleh RMS yang dimulai pada 1993. Pada 2003 interval yang dipercaya dari RMS CDR (4,2 – 6,6) mengandung perkiraan Biro Amerika Serikat (6,4), sebagaimana ditunjukkan dalam grafik

dengan adanya puncak pada akhir garis CAVR. Artinya, meskipun RMS sangat rendah memperkirakan tingkat kematian dalam tahun-tahun damai yang "normal" 1972-1974, sejak pertengahan 1990-an, RMS sesuai dengan hasil yang didapatkan melalui metode-metode tidak langsung yang digunakan oleh Biro Amerika Serikat. Pengamatan ini sesuai dengan gagasan bahwa perkiraan RMS mempunyai bias penurunan yang meningkat ke masa lalu.

174. Selama tahun-tahun di mana catatan-catatan historis menyatakan bahwa kematian yang sangat berlebihan terjadi, interpolasi linear CDR memperkirakan terlalu rendah kematian-kematian tersebut. Tahun-tahun ini termasuk tahun 1975-1979 dan 1999. Hal ini sesuai dengan arti literal dari kematian "berlebihan". (Tidak ada CDR berbasis sensus yang diperkirakan untuk periode tahun 1975-1979). Melihat lebih jauh ke belakang, CDR berbasis survei menangkap sedikit penurunan dari total CDR (sebuah grafik yang sama dapat digambarkan untuk MSE yang diperkirakan atas waktu, dengan hasil yang sama).

175. Untuk menyesuaikan RMS, kematian-kematian yang tidak diketahui karena hilangnya pengetahuan sosial harus di perkiraan sepanjang waktu. Model yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Angka kematian diperkirakan oleh CDR dan populasi yang sudah diperhitungkan untuk setiap tahun diperkirakan (kematian-kematian CDR), ditunjukkan sebagai tingkat dalam bagan di bawah ini
- pecahan dari kematian-kematian CDR yang terjadi karena kelaparan dan kesakitan diperkirakan dengan menggunakan pecahan dari semua kematian yang dilaporkan dalam survei yang dikarenakan oleh kelaparan dan kesakitan (serupa dengan alokasi yang digunakan untuk data GCD yang tidak tercocokkan). Dalam survei ini, pecahan nilai rata-rata (dan nilai tengah) dari semua kematian (selama bertahun-tahun) yang dihubungkan dengan kelaparan dan kesakitan adalah 0,80, dan 50% dari semua tahun adalah antara jenjang 0,754 – 0,846;
- rasio kematian-kematian terestimasi terhadap kematian_CDR dikalkulasikan untuk tahun-tahun damai (1972-1974 dan 2002-2003); ini adalah pecahan dari "kematian-kematian yang dapat diingat" yang disebut "pecahan memori;"
- Pecahan memori untuk 1975-2001 diperkirakan oleh interpolasi linear dengan menggunakan persamaan berikut
- Pecahan memori teperkirakan (MSE) = -39.1 + 0.0200*tahun
- Pecahan memori terperkirakan (RMS) = -43.9 + 0.0224*tahun
- Pecahan memori untuk MSE berkisar dari 0.241-0.936, di mana untuk RMS, pecahan memori tersebut berkisar dari 0.228 sampai 0.846. Perbedaan ini mempunyai pengaruh yang luar biasa pada hasil/keluaran.
- Perkiraan tersesuaikan dikalkulasi sebagai perkiraan asli dibagi dengan pecahan memori untuk setiap tahun.

Perkiraan kasar tingkat kematian bagi Timor-Leste
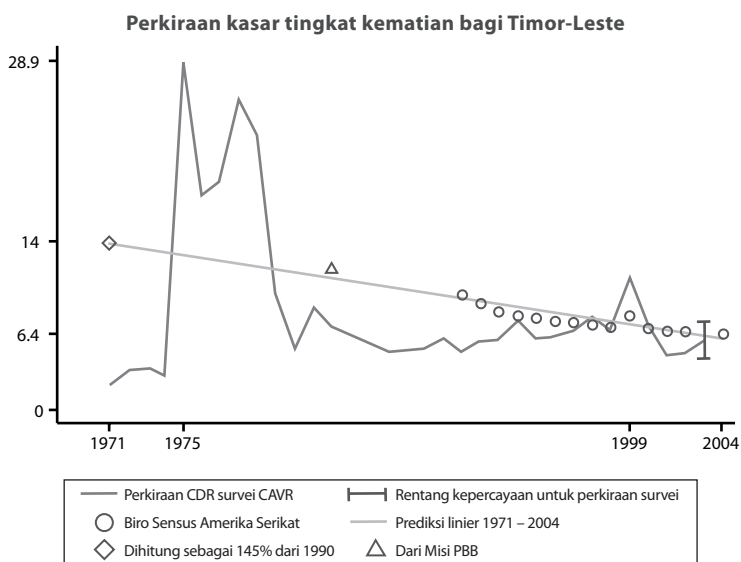
176. Perkiraan tersesuaikan disampaikan di bawah ini dalam dua bagan di bawah ini. Catat bahwa dalam kedua grafik itu, perkiraan kasar dan perkiraan yang tersesuaikan bertemu saat mendekati 2003. Dampak dari pecahan memori yang tinggi untuk MSE yang berhubungan dengan RMS jelas dalam perkiraan total kematian lebih daripada *baseline* CDR: perkiraan tersesuaikan MSE adalah 104.000 kematian sedangkan perkiraan tersesuaikan RMS adalah 183.300 kematian.
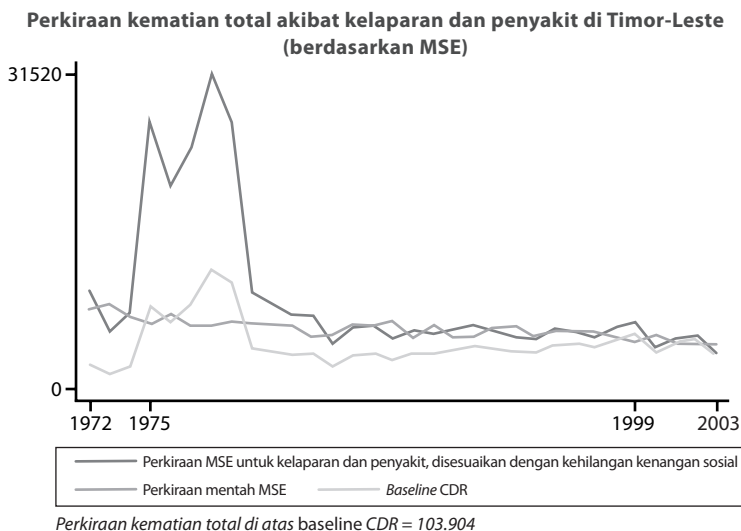
Perkiraan kematian total akibat kelaparan dan penyakit di Timor-Leste (berdasarkan MSE)

Perkiraan kematian total di atas baseline *CDR = 103.904*
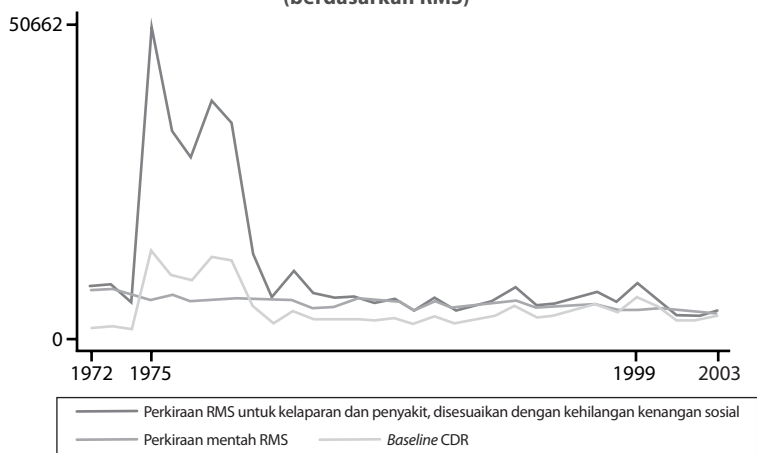
Perkiraan kematian total di atas baseline *CDR = 183.332*

177. Kedua perkiraan ini bergantung kepada sejumlah asumsi, termasuk asumsi tentang bentuk penurunan CDR sejak awal 1970-an sampai akhir 1990-an dan tentang sifat dari hilangnya memori sosial. Perubahan secara harus namun tidak linear dalam hilangnya memori sosial (entah melengkung naik atau melengkung turun) tidak akan mengubah perkiraan secara berarti. Namun, jika perkiraan terlalu rendah dalam MSE dan RMS yang disebabkan karena kehilangan memori sosial tidak berkelanjutan atau sebaliknya sangat berbeda untuk 1972-1974 yang berhubungan dengan tahun-tahun puncak 1975-1979, penyesuaian yang dilakukan di sini tidak akan mengoreksi secara memadai terhadap perkiraan yang terlalu rendah itu. Kedua model ini bergantung pada kalkulasi CDR dari data sensus 1980 dan 1990 dan metode-metode tidak langsung yang digunakan oleh Biro Sensus Amerika Serikat. Ada kesalahan sampling dan non-sampling yang tidak tergambarkan dalam grafik-grafik atau statistik, tetapi kesalahan-kesalahan itu tentu saja mendasar.

178. Namun, model-model ini mempunyai keuntungan menunjukkan bahwa dalam penyesuaian, perkiraan total kematian tahunan yang dikarenakan oleh kelaparan atau kesakitan lebih dekat kecocokannya dengan baseline kematian-kematian CDR untuk periode sebelum invasi (1972-1974) dan untuk periode 1984-1998.

179. Ada sejumlah alasan untuk memilih perkiraan MSE daripada perkiraan RMS. Meskipun RMS lebih dekat kecocokannya dengan perkiraan kematian-kematian CDR dalam tahun-tahun setelah pendudukan yang mendekati waktu damai, 2002-2003, MSE lebih dekat kecocokannya dengan perkiraan kematian total CDR sebelum pendudukan. Untuk tujuan perkiraan ini, periode yang paling relevan

adalah periode 1975-1979, dan pilihan perkiraan harus dituntun oleh kesesuaian yang terbaik segera sebelum periode ini. Alasan kedua untuk memilih MSE adalah bahwa MSE didasarkan pada data yang sangat lebih banyak dari RMS sendiri: MSE menggunakan data GCD di samping data RMS

180. Kesimpulan yang paling kuat yang dapat dibuat adalah bahwa perkiraan RMS dan MSE yang tak tersesuaikan terlalu rendah. Bagian 6: Profil Pelanggaran Hak Asasi Manusia, menyediakan sebuah pemeriksaan terhadap dukungan statistik untuk temuan-temuan dalam hubungan dengan jumlah pelanggaran fatal selama periode mandat Komisi.

Catatan akhir

1. Regulasi UNTAET 2001/10 Seksi 13.1(a)(i).
2. Regulasi UNTAET 2001/10 Seksi 13.1(a)(i).
3. Regulasi UNTAET 2001/10 Seksi 13.1(a)(i).
4. Regulasi UNTAET 2001/10 Seksi 13.1(a)(ii).
5. Regulasi UNTAET 2001/10 Seksi 13.1(a)(iv).
6. Regulasi UNTAET 2001/10 Seksi 13.1(d).
7. Patrick Ball, Who *Did What to Whom Handbook*, dan Patrick Ball et al, *HR Database Design Methods*. Amerika Serikat.
8. Paul S Levy and Stanley Lemeshow, Sampling of Populations, Chapter 11, Wiley, New York, 1999.
9. Stata Corporation, Stata Survey Data Reference Manual, v. 8, College Station, TX: Stata. 2003.
10. Donna Brogan, "Sampling error estimation for survey data", dalam Household Sample Surveys in Developing and Transition Countries, United Nations Publication ST/ESA/STAT/SER.F/96, Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, 2005.
11. lihat misalnya, Ben Kiernan, "The Demography of Genocide in Southeast Asia: The Death Tolls in Cambodia, 1975-79, and Timor-Leste, 1975-80." *Critical Asian Studies* 35:4 (2003), h. 585-597.

Lampiran 3:

Ringkas dakwaan

Ringkas dakwaan

3312 | Kesimpulan tuduhan/dakwaan menurut distrik

3312 | Aileu

3312 | 5-2001

3312 | 6-2001

3312 | 20-2003

3312 | 35-2003

3313 | Ainaro

3313 | 7-2001

3313 | 6-2003

3314 | 11-2004

3315 | Baucau

3315 | 33-2003

3316 | 10-2002

3316 | Bobonaro

3316 | 1-2000

3316 | 10-2000

3317 | 1-2001

3317 | 2-2001

3317 | 4-2001

3317 | 8-2001

3318 | 10-2001

3318 | 6-2002

3318 | 7-2002

3319 | 8-2002

3319 | 2-2003

3321 | 15-2003

3322 | 18-2003

3325 | 5-2004

3326 | 6-2004

3326 | Covalima

3326 | 5-2000

3326 | 13-2001

3326 | 1-2003

3327 | 7-2003

3327 | 8-2003

3327 | 9-2003

3330 | 14-2003
3332 | 34-2003
3332 | 1-2004
3332 | 4-2004
3334 | 7-2004
3334 | 8-2004
3334 | 9-2004

3334 | Dili
3334 | 14-2001
3335 | 16-2003
3335 | 17-2003
3335 | 2-2002
3336 | 11-2003
3336 | 12-2003
3336 | 13-2003
3337 | 24-2003
3339 | 25-2003
3339 | 27-2003
3339 | 28-2003
3339 | 29-2003
3340 | 10-2004
3340 | 10-2002

3340 | Ermera
3340 | 2-2000
3341 | 3-2000
3341 | 7-2000
3341 | 12-2000
3341 | 9-2002
3341 | 2-2004
3341 | 12-2004

3342 | Lautém
3342 | 9-2000
3343 | 3-2001
3343 | 10-2002
3344 | 12-2002

3345 | Liquiçá
3345 | 11-2001
3345 | 16-2001
3345 | 19-2001

3345 | 21-2001
3347 | 23-2003

3347 | Manatuto
3347 | 11-2002

3348 | Manufahi
3348 | 8-2000
3348 | 3-2002
3348 | 18-2001
3349 | 13-2004
3350 | 14-2004

3350 | Oecussi
3350 | 20-2001
3352 | 4-2002
3352 | 5-2002
3352 | 13-2002
3352 | 3-2003
3352 | 4-2003
3353 | 10-2003
3353 | 19-2003
3353 | 22-2003
3354 | 30-2003
3355 | 31-2003
3355 | 32-2003

3355 | Viqueque
3355 | 3-2004

3356 | Timor Barat
3356 | 11-2000

3356 | Dakwaan Nasional
3356 | 5-2003

Lampiran 3:

Ringkas dakwaan

Lampiran ini bukan merupakan bagian dari temuan Komisi melainkan merupakan rangkuman dari semua dakwaan yang disubmisikan kepada Panel Khusus Kejahatan Berat untuk disidangkan oleh Unit Kejahatan Berat. Regulasi UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor) 2000/11 memberikan yurisdiksi khusus kepada Unit Kejahatan Berat menyangkut kejahatan-kejahatan:

- pemusnahan
- kejahatan perang
- kejahatan terhadap kemanusiaan
- pembunuhan
- penyerangan seksual, dan
- penyiksaan

yang terjadi antara 1 Januari dan 25 Oktober 1999. Unit Kejahatan Berat berakhir pada Mei 2005 dengan berakhirnya misi UNMISET (United Nations Assistance Mission in East Timor) saat PBB menarik dukungannya. Komisi menerbitkan rangkuman ini sebagai sebuah Annex dari Laporan Akhir Komisi dalam upaya menyampaikan secara utuh semua informasi yang relevan tentang mereka yang bertanggung jawab terhadap kejahatan berat yang dilakukan di Timor-Leste, dan dengan ini membantu menjawab masalah impunitas terhadap kasus-kasus ini yang masih berkelanjutan. Dakwan-dakwaan ini diatur secara alfabetis menurut distrik.

Kesimpulan tuduhan/dakwaan menurut distrik*

Aileu†

5-2001

Gaspar Leki
Seorang serdadu TNI, didakwa membunuh satu orang di Aileu pada 9 September 1999. Dia dihukum oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat karena menyebabkan kematian satu orang akibat ketidakpedulian.

6-2001

Agusto dos Santos
Seorang anggota milisi AHI, didakwa membunuh salah satu orang di Aileu (Aileu) pada 4 September 1999. Dia dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

20-2003

Domingos A Carlos
Sersan Babinsa Aissirimou (Aileu, Aileu)

Carlos Soares
Anggota milisi AHI, dan

Almeida Martins
Anggota milisi AHI

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan karena pembunuhan dua orang pada 6 September 1999 dekat Desa Aissirimou (Aileu). Para tertuduh kabarnya masih hidup bebas di Indonesia.

35-2003

Adolfo Amaral
Seorang serdadu TNI didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan karena pembunuhan satu orang dan percobaan pembunuhan orang lain pada 6 September 1999 di Kotolau (Laulara Aileu). Dia kabarnya masih hidup bebas di Indonesia.

* Penomoran terhadap rangkuman dakwaan ini adalah penomoran kasus dari Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dan bukan penomoran dari dakwaan Unit Kejahatan Berat. Beberapa dakwaan ditarik kembali oleh Jaksa Penuntut di depan persidangan dan dakwaan-dakwaan ini tidak dimasukkan di sini.

† Ejaan nama tempat dan aksen nama orang sesuai dengan Pedoman Penulisan CAVR dan berbeda di sana-sini dengan nama-nama tempat dan orang dalam dakwaan-dakwaan Unit Kejahatan Berat

Ainaro

7-2001

Anigio de Oliveria
Seorang anggota milisi Mahidi, didakwa untuk pembunuhan satu orang di Ainaro, pada 5 September 1999. Dia dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

6-2003

Cancio Lopes de Carvalho
Komandan Umum milisi Mahidi

Nemezio Lopes de Carvalho
Petugas intelijen milisi Mahidi, Koordinator milisi Mahidi, Ainaro.

Orlando Baptista
Komandan Kompi B milisi Mahidi

Celestinho Barros
Anggota milisi Mahidi

Bernardo Barros
Anggota milisi Mahidi

Francisco Mendez
Anggota milisi Mahidi

Fernando Lopes
Anggota milisi Mahidi

João Baptista
Anggota milisi Mahidi

Martinho Lopes
Anggota milisi Mahidi

Francisco Atelulo (alias Chico Zumalai)
Anggota milisi Mahidi

Manuel Gomes
Komandan Kompi A, milisi Mahidi

Felismino Lopes
Anggota milisi Mahidi

José Lokomau (alias **Gadapaksi**)
Komandan pleton milisi Mahidi

José Beldasi
Komandan pleton milisi Mahidi

Adriano Lopes Titimau
Anggota milisi Mahidi

Afonso Caldas
Anggota milisi Mahidi

Gilverto Lopes
Anggota milisi Mahidi

Marcelo Gomes
Anggota milisi Mahidi, dan

Marcelino Beremali
Komandan pleton milisi Mahidi.

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pembunuhan dua orang dan tindakan tidak berperikemanusiaan lain pada atau kira-kira pada 3 Januari 1999 di Manutasi (Ainaro)
2. pembunuhan satu orang pada 5 September 1999 di Cassa (Ainaro, Ainaro)
3. pembunuhan satu orang pada atau kira-kira pada 12 September 1999 di Cassa (Ainaro, Ainaro)
4. pembunuhan 11 orang, dan tindakan tidak berperikemanusiaan lain terhadap enam orang. Tindakan penyiksaan terhadap satu orang dan deportasi serta penghancuran harta benda penduduk sipil di Maununo pada 23 September 1999 di Maununo (Ainaro).

Semua tertuduh kabarnya masih bebas di Indonesia.

11-2004

Cesario Tilman
Seorang serdadu TNI dan anggota milisi Mahidi, dan

Letnan Julius Adu
Komandan Koramil, sub-distrik Hatu Udo, Ainaro

Didakwa kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pembunuhan satu orang pada 12 September 1999 di Hatu Udo (Ainaro)
2. pembunuhan empat orang pada 19 September 1999 di Hatu Udo (Ainaro)
3. pendeportasian penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya dari Ainaro antara 5 September dan 30 Oktober 1999
4. tindakan kekerasan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara Februari dan 30 Oktober 1999.

Tuduhan tindakan kekerasan termasuk penahanan ilegal dan pemukulan, pendeportasian, pembunuhan dan penghancuran harta benda, pembunuhan lima orang, pemenjaraan, pendeportasian paksa, dan tindakan kekerasan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya pada September dan Oktober 1999 di Ainaro.

Para tertuduh kabarnya masih bebas di Indonesia.

Baucau

33-2003

Richard Hutadjulu
Letnan Kolonel, Komandan Kodim Distrik Baucau

Karel Polla
Kapten, Kepala Staf dan Wakil Komandan Kodim Distrik Baucau

Irwan (LNU)
Sersan satu, seksi intelijen, Kodim 1628

Faustino do Santos
Sersan satu seksi intelijen Kodim 1628

Tomas Cardoso alias **Tomas Maurade**
Sersan dua, seksi intelijen, Kodim 1628

Manuel Ariate
Sersan dua, seksi intelijen Kodim 1628

Agustinho Soares
Kopral satu, seksi intelijen, Kodim 1628

Adelino Freitas
Prajurit satu, seksi intelijen Kodim 1628

Jeronimo Soares
Prajurit satu, seksi intelijen, Kodim 1628

Domingos Filipe
Prajurit dua seksi intelijen Kodim 1628, anggota Tim Saka

Domingos Alaguia
Anggota Kodim 1628

Joanico C. Belo
Komandan Tim Saka, Komandan PPI sector A, sersan satu Kopassus

Igidio Sarmento
Wakil Komandan PPI Sektor A, prajurit satu Kodim 1628

Celestino Morreira
Wakil Komandan Tim Saka Quelicai

Cosme Morreira
Wakil Komandan Tim Saka Quelicai

Virgilio Soares
Wakil Komandan Tim Saka Quelicai, dan

Cristiano Ximenes
pertahanan sipil [HANSIP] Indonesia

Didakwa kejahatan terhadap kemanusiaan untuk

1. pembunuhan tiga orang dan tindakan tidak berperikemanusiaan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 26 Maret 1999 di Baucau (Baucau)
2. pembunuhan satu orang dan tindakan tidak berperikemanusiaan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 27 Mei 1999 di Baucau (Baucau)
3. penyiksaan lima orang pada atau kira-kira pada 27 dan 28 Mei 1999 di Baucau (Baucau)
4. pembunuhan satu orang dan penghancuran harta benda penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di Desa Abo, Aldeia Liri, dan Kota Quelicai (Baucau)
5. pembunuhan satu orang pada 11 September 1999 di Laga (Baucau)

Semua tertuduh kabarnya masih bebas di Indonesia.

10-2002

Mayor Jacob Djoko Sarosa
Komandan TNI Batalion 745, dan

Camilo do Santos
Komandan Pleton Batalion 745

Didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pembunuhan 21 orang selama September 1999 di distrik-distrik Lautém, Baucau, dan Dili.
2. pemenjaraan tiga orang pada atau kira-kira pada 10 September 1999 di Fuiloro, Lospalos, Lautém
3. tindakan tidak berperikemanusiaan lain terhadap satu orang dan penahanan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 21 September 1999 di Becora (Dili)

Mereka kabarnya masih bebas di Indonesia.

Bobonaro

1-2000

João Fernandes
Seorang anggota milisi Dadurus Merah Putih didakwa membunuh satu orang pada 8 September 1999 di pos Polisi Maliana (Bobonaro). Dia dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

10-2000

Manuel G L Bere
Seorang anggota milisi Dadurus Merah Putih, didakwa untuk pembunuhan terhadap satu orang selama September 1999 di Maliana. Dia dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

1-2001

Francisco Pedro Geger
Seorang anggota milisi FIRMI, didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan, penyiksaan, dan tindakan tidak berperikemanusiaan lain terhadap delapan orang di benteng Balibó (Balibó) pada 6 September 1999, pembunuhan terhadap dua orang, dan percobaan pembunuhan terhadap satu orang pada 15 September 1999 di Batugade. Dia dihukum untuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

2-2001

Agusto A Tavares
Seorang anggota milisi Halilintar, didakwa dalam pembunuhan terhadap satu orang di Memo (Maliana) selama Agustus 1999. Dia dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

4-2001

Bambang Indra
Komandan Koramil TNI di Lolotoe Bobonaro

Francisco Noronha
Anggota milisi Kaer Metin Merah Putih

Sabino Goveia Leite
Kepala Desa Guda

João Franca da Silva
Komandan milisi Kaer Metin Merah Putih, dan

José Cordoso Ferreira
Komandan milisi Kaer Metin Merah Putih

Didakwa terhadap pembunuhan dan penyiksaan empat orang, pemerkosaan tiga orang, dan penahanan disertai tindakan kekerasan fisik, serta tindakan tidak berperikemanusiaan dan penyiksaan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di Lolotoe, (Bobonaro) antara Mei dan September 1999.

Sabino Goveia Leite, João Franca da Silva, dan José Cardoso Ferreira dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat. Bambang Indra dan Francisco Noronha kabarnya masih bebas di Indonesia.

8-2001

Francisco dos Santos Laku
Seorang serdadu TNI, didakwa untuk pembunuhan satu orang pada 7 September 1999 di Balibó (Bobonaro). Dia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

10-2001

Lino de Carvalho
Anggota milisi Saka Loronmonu

Ruben Monteiro
G. Wakil Komandan milisi Saka Loronmonu, dan

Ruben Pereira Tavares
Komandan, milisi Saka Loronmonu

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap pembunuhan satu orang di Maudeku, Lotan, Batugade selama September 1999 dan tindakan tidak berperikemanusiaan lain terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya, dan dilakukan pada 14 April, 16 April, dan 7 Mei 1999.

Lino de Carvalho didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat. Dua terdakwa lainnya kabarnya masih bebas di Indonesia.

6-2002

Paulino de Jesus
Seorang serdadu TNI didakwa untuk pembunuhan satu orang dan percobaan pembunuhan orang lain pada atau kira-kira pada 10 September 1999 di Lourba (Bobonaro, Bobonaro). Panel Khusus untuk Kejahatan Berat menyatakan dia bersalah atas kedua dakwaan. Sidang naik banding membalikkan pernyataan bersalah ini. Dia sekarang kabarnya masih bebas di Indonesia.

7-2002

Salvador Soares
Anggota milisi Dadurus Merah Putih (DMP)

Sutrisno
Anggota TNI KODIM 1636

Assis Fontes alias **Atzis Montes**
Serdadu TNI

João Batista
Anggota milisi DMP

Vitalis Fernandes
Anggota milisi DMP

Marito L. Morreira
Anggota milisi DMP

José Soares
Anggota milisi DMP

Humberto Lopes
Komandan milisi DMP

Martinho Afonso
Anggota milisi DMP dan

Manuel
(LNU) (tidak ada afiliasi yang disebutkan)

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap dua orang dan penyiksaan satu orang pada 2 September 1999 di Raifun (Maliana, Bobonaro). Salvador Soares dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan di beberapa pengadilan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat. Para terdakwa yang lain kabarnya masih bebas di Indonesia.

8-2002

Paulo Goncalves
Komandan milisi Halilintar

Marcelino Leto
Wakil Komandan milisi Halilintar, dan

Rosalino Pires
Anggota milisi Halilintar

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pemerkosaan dan penyiksaan terhadap enam orang dan tindakan kekerasan terhadap tujuh orang di Atabae, Bobonaro, antara Februari dan September 1999. Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

2-2003

Burhanuddin Siagian
Komandan Kodim 1636, Maliana (Bobonaro)

Letnan Sutrisno
Kepala Intelijen TNI Kodim 1636

Assis Fontes
Sersan Mayor SGI TNI Kodim 1636

Mahalan Agus Salim
Komandan pos SGI TNI di Marco

Tito Leto Bere
Serdadu TNI, Cailaco

Yohanes Leodesi
Serdadu TNI, Cailaco

Guilherme Atusuri
Serdadu TNI, Cailaco

Haerola LNU
Komandan TNI, pos BTT Purugoa

Manuel Mau Bere
Serdadu TNI, Cailaco

Silvano Siga Mau
Serdadu TNI, Cailaco

Manuel Bere Lete
Serdadu TNI, Cailaco

Gustavão Soares
Serdadu TNI, Cailaco

Arlindo Bere Dasi
Serdadu TNI, Cailaco

Agustinho Lopes
Serdadu TNI, Cailaco

Manuel Lopes
Serdadu TNI

João Da Silva Tavares
Panglima milisi PPI Timor Timur

Jorge Tavares
Ketua FPDK, Bobonaro

Paulo Goncalves
Komandan milisi Halilintar, Bobonaro

Francisco V. Bili Ato
Wakil Komandan milisi Halilintar, Bobonaro

Feliciano Mau Bere
Anggota milisi Halilintar, Bobonaro

José Apalagi
Anggota milisi Halilintar, Bobonaro

Arcanzo Pereira
Anggota milisi Halilintar, Bobonaro

Carlito Gama
Anggota milisi Halilintar, Bobonaro

Adão Salsinha Babo
Komandan milisi Guntur, Cailaco

Flaviano Dasi Leto
Wakil Komandan milisi Guntur, Cailaco

Aparicio Miguel
Anggota milisi Guntur, Cailaco

Justinho Borges
Anggota milisi Guntur, Cailaco

Arnold Soares [alias **Jamie**]
Anggota milisi Guntur, Cailaco

Rui Bere Loe
Anggota milisi Guntur, Cailaco

Agustinho Bili Tael
Anggota milisi Guntur, Cailaco

João Coli
Anggota milisi DMP Maliana

Manuel Maia
Anggota milisi DMP Maliana

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk

1. pembunuhan, penyiksaan dan penahanan terhadap dua orang pada atau kira-kira pada 21 dan 22 Maret 1999 di Maliana (Bobonaro)
2. penyiksaan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 13 April 1999 di Maliana (Bobonaro)
3. penyiksaan dan tindakan melanggar hukum dengan penahanan illegal atas penduduk yang tidak diketahui jumlahnya pada 12 April 1999 di Marco, Cailaco (Bobonaro)
4. penyiksaan lima orang dan pembunuhan tiga orang pada 12 April 1999 di Purugoa, Cailaco (Bobonaro)
5. pembunuhan empat orang pada atau kira-kira pada 12 April 1999 di Marco, Cailaco (Bobonaro)
6. pemindahan penduduk secara paksa dan tindakan tidak menyenangkan dengan penghancuran harta benda penduduk sipil di Cailaco (Bobonaro) antara 12 dan 20 April 1999
7. pembunuhan atau tindakan tidak menyenangkan dengan penahanan illegal terhadap dua orang pada atau kira-kira pada 19 April 1999 di Purugoa, Cailaco (Bobonaro)
8. pembunuhan dua orang pada atau kira-kira pada 19 April 1999 di Marco, Cailaco (Bobonaro)
9. pembunuhan dua orang pada atau kira-kira pada 20 April 1999 di Marco, Cailaco (Bobonaro)

Semua terdakwa kabarnya masih bebas di Indonesia.

15-2003

Lima tentara TNI didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas pemerkosaan, penyiksaan, dan pendeportasian atau pemindahan paksa penduduk antara bulan Maret dan September di Timor Timur. Seluruh terdakwa kabarnya masih bebas di Indonesia [Beberapa perincian disembunyaikan atas permintaan Satuan Kejahatan Berat demi melindungi para korban.]

18-2003

Burhanuddin Siagian
Letnan Kolonel TNI, Komandan Kodim 1636, Maliana

Bambang G. Supriyanto
Letnan Kolonel TNI, Komandan Kodim 1636, Maliana

Sutrisno
Letnan TNI, Kepala seksi Intelijen Kodim 1636, Maliana

M. Yusuf
Letnan TNI, Kepala Operasi Kodim 1636, Maliana

Rizal
Serdadu SGI, Maliana

Domingos do Santos
Sersan TNI, seksi intelijen Kodim 1636, Maliana

Julião Lopes
Sersan TNI, seksi Intelijen Kodim 1636 Maliana

Mau Muti
Sersan TNI, seksi intelijen Kodim 1636, Maliana

Manuel Lopes
Sersan TNI, seksi Intelijen Kodim 1636 Maliana

Frederico M Pires
Sersan TNI, seksi Intelijen Kodim 1636 Maliana

José Bere Laka
Seksi Intelijen TNI Kodim 1636 Maliana

Alvaro Mali
Sersan TNI, seksi Intelijen Kodim 1636 Maliana

Francisco Fernandes
Sersan TNI, seksi Intelijen KODIM 1636-01 Maliana

Miguel Soares
Sersan TNI, seksi Intelijen Kodim 1636 Maliana

José Simão
Sersan TNI, seksi Intelijen Kodim 1636 Maliana

Rue Bere Tali
Kopral TNI, Seksi Intelijen Kodim 1636 Maliana

Romeo da Silva
Kopral TNI, Seksi Intelijen Kodim 1636 Maliana

Domingos dos Santos de Carvalho
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Budi Susilo
Kapolres distrik Bobonaro

Clementino da Costa
Sersan Polisi, Polres Maliana

Guilherme do Santos
Bupati Distrik Bobonaro

João da Silva Tavares
Panglima milisi PPI Timor Timur

Jorge Tavares
Ketua FPDK distrik Bobonaro

Natalino Monteiro Goncalves
Komandan milisi Dadurus Merah Putih Maliana

Marcos Tato Mali
Wakil Komandan milisi Dadurus Merah Putih Maliana

Ruben Tavares
Komandan milisi Saka Loronmonu Batugade

Ruben Monteiro Goncalves
Wakil Komandan milisi Saka Loronmonu

João alias Laho
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Luis Cardoso
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Armindo Soares
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

António de Jesus
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Inacio da Conceiçao
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

João Coli
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Alfredo alias Mau
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Francisco Bere Masak
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Fernando (LNU)
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Jacinto LNU
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

João Baptista
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

João Kometa
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

José Lopes
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Luis Mali Dao
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Marito Morreira
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Mateus Monis
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Leoneto Martins
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Manuel Cansil
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Rui Kele
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Elias Pereira
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Afonso Davidson
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Leoneto Monis
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Mau Xesta
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Bernardino LNU
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Zerniah LNU
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Zeferino LNU
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

João do S Nunes
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Daniel LNU
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Baptista de Sousa
Anggota milisi Dadurus Merah Putih, dan

Aparicio Guterres
Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk beberapa tindakan yang dilakukan di Maliana selama 1999, secara spesifik:

1. penyiksaan satu orang pada 8 Mei 1999 di Lalebol, Bobonaro (Bobonaro)
2. pembunuhan dua orang pada atau kira-kira pada 15 Mei 1999 di dekat jembatan Nunura (Maliana, Bobonaro)
3. pembunuhan satu orang pada 18 Agustus 1999 di Buipira (Lahomea, Maliana, Bobonaro)
4. pembunuhan satu orang dan percobaan pembunuhan- satu orang lagi pada atau kira-kira pada 2 September 1999 di Maliana, Bobonaro
5. pembunuhan penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya dan percobaan pembunuhan atas dua orang pada atau kira-kira pada 8 September 1999 di pos Polres (Maliana, Bobonaro)
6. pembunuhan atas satu orang pada atau kira-kira pada 9 September 1999 di Mulau (Maliana, Bobonaro)
7. pembunuhan atas satu orang pada atau kira-kira pada 9 September 1999 di Genuhaan (Odomau, Maliana, Bobonaro)
8. pembunuhan atas satu orang pada atau kira-kira pada 13 September 1999 di Genuhaan (Odomau, Maliana, Bobonaro)
9. pembunuhan atas dua orang pada atau kira-kira pada 13 September 1999 di Akadiru Laran (Maliana, Bobonaro)
10. tindakan tidak menyenangkan terhadap penduduk sipil di distrik Bobonaro selama 1999

Aparicio Guterres
Dibebaskan dari seluruh tuntutan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dalam sidang yang terpisah.

Para terdakwa lain kabarnya masih bebas di Indonesia.

5-2004

Ruben Goncalves
Komandan Gabungan milisi Saka Loronmonu

Ruben Tavares
Komandan Gabungan milisi Saka Loronmonu

João Oliveira
Komandan milisi FIRMI, Balibó, Bobonaro

Joaquim Maia Pereira
Wakil Komandan milisi FIRMI, Balibó, Bobonaro

João da Silva Tavares
Panglima milisi PPI Timor Timur

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. penyiksaan dan pembunuhan satu orang pada 16 April 1999 di Batugade
2. pembunuhan satu orang pada atau kira-kira pada 13 Mei 1999 di Batugade
3. penyiksaan dua orang pada 11 Mei 1999 di Balibó
4. tindakan tidak menyenangkan terhadap 38 penduduk sipil antara 2 dan 6 September 1999 di Balibó
5. penyiksaan 14 orang antara 2 dan 6 September 1999 di Balibó
6. pembunuhan delapan orang pada 6 September 1999 di Balibó
7. pembunuhan satu orang pada 7 September 1999 di Batugade
8. pembunuhan dua orang dan percobaan pembunuhan terhadap satu orang pada 15 September 1999 dekat Batugade

Semua terdakwa kabarnya masih bebas di Indonesia.

6-2004

Frans Tallo
Seorang Komandan Pleton Saka Loronmonu didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu penyiksaan atas satu orang dan pembunuhan 11 orang lainnya pada April, Mei, dan September 1999 di Batugade. Dia dikabarkan masih bebas di Indonesia.

Covalima

5-2000

Yoseph Leki
Seorang anggota milisi Laksaur, telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembunuhan terhadap empat orang di Salele dan hutan Wea pada 25 dan 26 Mei 1999. Ia telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

13-2001

Mercurious José de Deus
Seorang anggota milisi Laksaur didakwa untuk pembunuhan satu orang pada September 1999 di Fatumean, Distrik Covalima. Dia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

1-2003

Damião da Costa Nunes
Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan karena pembunuhan tiga orang di Distrik Covalima antara Agustus dan September 1999. Dia kemudian dihukum atas dasar kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

7-2003

Joanico Gusmão
Seorang anggota milisi Laksaur didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk tindakan pembunuhan satu orang pada 5 September 1999 di Sukaer Laran (Suai, Covalima). Dia kemudian dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

8-2003

Miguel Mau
Didakwa untuk kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan empat orang dan tindakan kekerasan sembilan orang pada 23 April 1999 di Tilomar dan pembunuhan penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya pada 6 September 1999 di Gereja Avê Maria (Suai).

Dia kemudian dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat

9-2003

Egidio Manek
Wakil Komandan milisi Laksaur Distrik Covalima, anggota Gadapaksi

Maternus Bere
Komandan milisi Laksaur Suai

Pedro Teles
Komandan milisi Laksaur Fatululik

Hendrikus Mali
Komandan milisi Laksaur, Fatumean

Cosmas Amaral
Komandan milisi Laksaur, Fohorem

Alipio Gusmão alias **Alipio Mau**
Komandan Operasi milisi Laksaur, Leogore, kota Suai

Baltazar da Costa Nunes
Anggota milisi Laksaur

Domingos Mali alias **Bete Aloi**
Anggota milisi Laksaur

Illidio Gusmão
Anggota milisi Laksaur

Joaquim Berek alias **Berek Bot**
Anggota milisi Laksaur

Olivio Tatoo Bau
Anggota milisi Laksaur

Gabriel Nahak
Anggota milisi Laksaur

Americo Mali
Anggota milisi Laksaur, dan

Zito da Silva alias **Zito Saek**
Anggota milisi Laksaur

Didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan kepada penduduk sipil di distrik Covalima pada tahun 1999. Secara spesifik:

1. penyiksaan satu orang pada atau kira-kira pada 27 Januari 1999 di Uma Merah (Tilomar, Covalima)
2. penyiksaan terhadap tiga orang pada atau kira-kira pada 26 Februari 1999 di Uma Merah (Tilomar, Covalima)
3. penyiksaan satu orang pada atau kira-kira pada 14 April 1999 di Uma Merah (Tilomar, Covalima)
4. penyiksaan terhadap enam orang pada atau kira-kira pada 23 April 1999 di Desa Belulik Leten (Fatumean, Covalima)
5. penyiksaan terhadap empat orang pada atau kira-kira pada 23 April 1999 di Nikir (Raihun, Tilomar, Covalima)
6. penyiksaan terhadap sembilan orang pada atau kira-kira pada 23 April 1999 di Fatukmetan (Tilomar, Covalima)
7. penyiksaan satu orang pada atau kira-kira pada 26 April 1999 di Leogore (Suai, Covalima)
8. penyiksaan terhadap dua orang pada atau kira-kira pada 26 April 1999 di Leogore (Suai, Covalima)
9. penghancuran harta benda penduduk sipil Wetaba pada atau kira-kira pada 22 April 1999 di Wetaba (Raihun, Tilomar, Covalima)
10. penyiksaan terhadap sembilan orang pada atau kira-kira pada 30 April 1999 di Salele (Tilomar, Covalima)
11. penyiksaan terhadap dua orang pada atau kira-kira pada 24 April 1999 di Raihun (Tilomar, Covalima)
12. pelenyapan disengaja terhadap dua orang pada atau kira-kira pada 19 April 1999 di Matai (Suai, Covalima)
13. pembunuhan satu orang pada atau kira-kira pada 12 April 1999 di Suai (Covalima)
14. pelenyapan disengaja terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 23 April 1999 di Caicoli (Tilomar, Covalima)
15. pembunuhan terhadap empat orang pada atau kira-kira pada 23 April 1999 di Raihun (Tilomar, Covalima)
16. pembunuhan satu orang dan percobaan pembunuhan terhadap satu orang lain pada atau kira-kira pada 13 Mei 1999 di Fatuloro (Fatululik, Covalima)

17. pembunuhan satu orang pada atau kira-kira pada 28 Mei 1999 di hutan Uma Wesei (Suai, Covalima)
18. pembunuhan satu orang pada atau kira-kira pada 28 Mei 1999 di Alastehen (Fatumean, Covalima)
19. pembunuhan satu orang pada atau kira-kira pada 27 Agustus 1999 di Mota Ulun, Fatumean (Covalima)
20. penyiksaan terhadap dua orang dan tindakan tidak berperikemanusiaan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 5 September 1999 di Suai (Covalima)
21. penyiksaan terhadap dua orang pada atau kira-kira pada 17 September 1999 di Tilomar (Covalima)
22. pembunuhan terhadap dua orang pada atau kira-kira pada 4 September 1999 di Belulik Leten (Fatumean,Covalima)
23. pembunuhan satu orang pada atau kira-kira pada 5 September 1999 di Debos (Suai, Covalima)
24. hukuman mati terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di Gereja Avê Maria (Suai, Covalima)
25. penculikan satu orang pada atau kira-kira pada 6 September 1999 di Suai (Covalima)
26. pembunuhan terhadap dua orang pada atau kira-kira pada 6 September 1999 di Manekiik (Fatumean, Covalima)
27. pembunuhan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 7 September 1999 di Maukatar (Covalima)
28. pembunuhan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 7 September 1999 di Suai (Covalima)
29. tindakan kekerasan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 7 September 1999 di Suai (Covalima)
30. pembunuhan satu orang dan penculikan terhadap satu orang lain pada atau kira-kira pada 8 September 1999 di Suai (Covalima)
31. pembunuhan terhadap dua orang dan percobaan pembunuhan terhadap satu orang lain pada atau kira-kira pada 9 September 1999 di Suai (Covalima)
32. pembunuhan terhadap 14 orang pada atau kira-kira pada 12 September 1999 di Lactos (Fohorem, Covalima)
33. pembunuhan terhadap dua orang pada atau kira-kira pada 12 September 1999 di Kulit (Tilomar, Covalima)
34. tindakan kekerasan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 19 September 1999 di Alastehen (Fatumean, Covalima)
35. pembunuhan terhadap tiga orang dan tindakan tidak berperikemenusiaan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 25 September 1999 di hutan Wea, Covalima

36. pembunuhan terhadap dua orang pada atau kira-kira pada 26 September 1999 di hutan Wesei (Covalima)
37. pembunuhan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 26 September 1999 di hutan Wesei (Covalima)
38. pembunuhan terhadap tiga orang pada atau kira-kira pada 5 Oktober 1999 di hutan Laketo (Lookeu, Covalima)
39. pembunuhan satu orang pada atau kira-kira pada 5 Oktober 1999 di Suai (Covalima)
40. pelenyapan disengaja terhadap tiga orang pada atau kira-kira pada 17 Oktober 1999 di Bora (Timor Barat, Indonesia)
41. pemerkosaan satu orang antara 6 September dan 15 Desember 1999 di dekat Wemasa (Timor Barat, Indonesia)
42. pendeportasian dan tindakan kekerasan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di distrik Covalima antara 5 September dan 30 Oktober 1999

Semua tertuduh kabarnya masih bebas di Indonesia.

14-2003

Kolonel Herman Sediyono
Bupati Distrik Covalima, serdadu TNI

Letnan Kolonel Achmad Mas Agus
Komandan Kodim 1635 (Covalima) antara Januari dan 4 September 1999 dan 7 September sampai 4 Oktober 1999

Letnan Kolonel Lilik Koeshardianto
Komandan Kodim 1635 (Covalima) antara 4 September dan 7 September 1999

Letnan Kolonel Gatot Subiaktoro
Kapolres Covalima

Kapten Achmad Syamsuddin
Kasdim Kodim 1635

Letnan Sugito
Komandan Koramil 1635-01 (Suai)

Letnan Widodo
Komandan Koramil 1635-02 (Tilomar)

Letnan Ari alias **Komandan Ari**
Komandan Koramil 1635-05 Batalion 143 (Fohorem)

Sersan Mayor Harun Tateny
Komandan Koramil 1635-05

Sersan Mayor Supoyo
Komandan Koramil 1635-0? (Salele)

Simão Nahak
Serdadu TNI

Raul Halek
Serdadu TNI

Americo Seran
Babinsa Lohorai, Matai TNI

Julio Borges
Wakil Komandan Lactos pos TNI

Leoneto Cardoso
Serdadu TNI, dan

Anito Lau
Serdadu TNI Lactos pos Fohorem

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. tindakan kekerasan dan penyiksaan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara Januari dan April 1999 di distrik Covalima termasuk di antaranya
2. penyiksaan satu orang pada atau kira-kira pada 14 April 1999 di Uma Merah (Tilomar, Covalima)
3. penyiksaan terhadap enam orang pada atau kira-kira pada 23 April 1999 di Belilik Leten (Fatumean, Covalima)
4. penyiksaan terhadap empat orang pada atau kira-kira pada 23 April 1999 di Nikir, Raihun (Tilomar, Covalima)
5. pembunuhan atas penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara Januari dan Agustus 1999 di Distrik Covalima termasuk di antaranya
6. pembunuhan terhadap empat orang pada atau kira-kira pada 23 April 1999 di Nikir (Tilomar, Covalima)
7. pembunuhan satu orang pada atau kira-kira pada 13 Mei 1999 di Nikir (Tilomar, Covalima)
8. pelenyapan yang disengaja terhadap empat orang pada April 1999 di Distrik Covalima
9. pembunuhan terhadap empat orang antara 4 dan 5 September 1999 di Distrik Covalima
10. pembunuhan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di Gereja Avê Maria (Suai, Covalima) pada atau kira-kira pada 6 September 1999
11. penculikan terhadap satu orang antara 6 dan 7 September 1999 di Suai (Covalima)
12. pembunuhan terhadap empat orang antara 6 dan 8 September 1999 di Covalima

13. pembunuhan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya, dan percobaan pembunuhan terhadap satu orang, dan penculikan terhadap tujuh orang antara 4 dan 26 September 1999 di Covalima
14. pembunuhan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di Desa Lactos pada atau kira-kira pada 12 September 1999 di Covalima
15. pendeportasian penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara 5 September dan 30 Oktober 1999 di Covalima
16. hukuman mati terhadap penduduk yang tidak diketahui jumlahnya antara 5 September dan 30 Oktober 1999 di Covalima

Seluruh terdakwa kabarnya masih bebas di Indonesia.

34-2003

Francisco Pereira
Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan terhadap satu orang, penahanan terhadap empat orang dan penyiksaan terhadap dua orang pada April dan Mei 1999 di Zumalai, Covalima. Dia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan tersebut.

1-2004

Xisto Barros
Anggota milisi Laksaur

Cesar Mendonca
Anggota milisi Laksaur, dan

Josep Nahak
Anggota milisi Laksaur

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pembunuhan tiga orang dan percobaan pembunuhan terhadap tiga orang pada 4 dan 5 Oktober 1999 di hutan Lookeu
2. beberapa tindakan kekerasan yang terjadi antara April dan Oktober 1999 di Distrik Covalima termasuk pembunuhan, percobaan pembunuhan, penahanan, pemenjaraan, dan pendeportasian penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya

Josep Nahak
Diputuskan tidak layak disidangkan.

Kedua terdakwa lainnya dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan di atas.

4-2004

Vasco da Cruz
Komandan milisi Mahidi Zumalai

Domingos Alves
Kepala Desa Raimea, Wakil Komandan milisi Mahidi

Guilhermino de Araujo
Kepala Desa Mape, Ketua BRTT Zumalai

Napoleão dos Santos
Komandan Kompi milisi Mahidi di Bailaco, Raimea

Simao Tasion
Komandan Kompi milisi Mahidi di Beco 1

Lino Barreto
Pertahanan Sipil [HANSIP], milisi Mahidi, dan

Cancio Lopes de Carvalho
Komandan Umum milisi Mahidi Timor Timur

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pemenjaraan atau bentuk penahanan lain dan penyiksaan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di Zumalai antara Januari dan Oktober 1999
2. pembunuhan satu orang pada 24 Januari 1999 di Mape (Zumalai, Covalima)
3. pembunuhan terhadap tiga orang pada 24 Januari 1999 di Lour (Zumalai, Covalima)
4. pembunuhan satu orang dan pelenyapan disengaja terhadap dua orang pada 13 April 1999 di Zumalai
5. pembunuhan terhadap tiga orang pada 27 Maret 1999 di Mape (Zumalai, Covalima)
6. pembunuhan terhadap satu orang pada 17 April 1999 di Zulo (Zumalai Covalima)
7. pembunuhan terhadap empat orang pada 4 Mei 1999 di Mape (Zumalai, Covalima)
8. pembunuhan satu orang pada 18 Juni 1999 di Mape (Zumalai, Covalima)
9. penculikan satu orang pada 5 September 1999 di Fatuleto (Zumalai, Covalima)
10. pembunuhan dua orang pada 5 September 1999 di Beco 1 (Suai, Covalima)
11. pembunuhan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya pada atau kira-kira pada 6 September 1999 di Gereja Avê Maria, Suai (Covalima)
12. pembunuhan satu orang pada 12 September 1999 di Fatuleto (Zumalai, Covalima)
13. pembunuhan satu orang pada 12 September 1999 di Kamenasa (Suai, Covalima)
14. pembunuhan satu orang pada 13 September 1999 di Zulo (Zumalai, Covalima)
15. pembunuhan terhadap dua orang selama September 1999 di Kamenasa (Suai, Covalima)

16. penghancuran harta benda penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya selama September 1999 di Zumalai dan Suai (Covalima)
17. pendeportasian atau pemindahan secara paksa terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di Zumalai dan Covalima dari 30 Agustus sampai 30 Oktober 1999

Seluruh tertuduh dikabarkan masih bebas di Indonesia.

7-2004

Tomas Lopes M Udin
Wakil Komandan Kompi milisi Mahidi, didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan satu orang dan percobaan pembunuhan terhadap satu orang lainnya pada 12 September 1999 di Kamenasa, Suai, Distrik Covalima. Dia dikabarkan masih bebas di Indonesia.

8-2004

Domingos Maubuti
Anggota milisi Mahidi Mape (Zumalai), dan

Adriano Nascimento
Angota milisi Mahidi Mape (Zumalai)

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pemerkosaan dan pembunuhan satu orang dan pembunuhan dua orang lainnya pada 17 April 1999 di Mape (Zumalai, Covalima)
2. pembunuhan satu orang dan percobaan pembunuhan terhadap satu orang lainnya pada 18 Juni 1999 di Mape (Zumalai, Covalima)
3. pembunuhan satu orang pada 13 September 1999 di Zulo (Zumalai, Covalima)

Semua terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

9-2004

Alfredo Breok
Seorang anggota milisi Mahidi, telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan dua orang, pada 24 Januari 1999 di Mape (Zumalai, Covalima) dan satu orang lainnya pada 12 September 1999 di Fatuleto (Zumalai, Covalima). Dia dikabarkan masih bebas di Indonesia.

Dili

14-2001

Francisco Soares
Seorang serdadu TNI, telah didakwa atas perkosaan terhadap satu orang di Useleo, Dili pada atau kira-kira pada 12 September 1999. Dia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

16-2003

Beny Ludji
Komandan Kompi A, Milisi Aitarak dan

José Pereira
Anggota Milisi Aitarak

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan dua orang pada 1 September 1999 di Mascarinhas (Dili). Mereka berdua dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

17-2003

José Lopes da Cruz Mendonca
Seorang anggota Milisi Aitarak telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan terhadap satu orang pada 1 September 1999 di Mascarinhas, Dili. Dia dikabarkan masih bebas di Indonesia.

2-2002

Marculino Soares
Komandan milisi Besi Merah Putih (BMP) Guico, Maubara, Liquiçá

Eurico Guterres
Wakil Panglima Milisi, Pasukan Pejuang Integrasi (PPI)

Manuel Sousa
Komandan Milisi BMP, Liquiçá

João Sera
Wakil Komandan Milisi BMP, Liquiçá

Floriano da Silva
Komandan Milisi BMP Gugleur, Liquiçá

Tomé Diogo
Opsir TNI

José Mateus
Serdadu TNI

António Gomes
Serdadu TNI

António Bescau
Serdadu TNI

Teofilo da S. Ribeiro
Serdadu TNI

Jorge Viegas
Serdadu TNI

Mateus Metan
Anggota BMP

Domingos Bondia
Anggota BMP

Fernando Sousa
Anggota BMP dan

Armindo Carrion
Anggota BMP

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan terhadap 13 orang demikian juga atas perlakuan semena-mena dan tindakan yang tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sehubungan dengan serangan yang terjadi di Distrik Dili pada 17 April 1999. Dalam sidang yang terpisah, Marculino Soares telah didakwa oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Terdakwa yang lain dikabarkan masih bebas di Indonesia.

11-2003

Marcelino Soares
Babinsa untuk Hera (Hera, Dili). Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembunuhan terhadap satu orang, penyiksaan tiga orang, dan tindakan semena-mena melalui penahanan yang tidak sah tiga orang pada atau sekitar 20 April 1999. Dia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

12-2003

Domingos Amati
Anggota Milisi Aitarak, dan

Francisco Matos
Anggota Milisi Aitarak

Telah didakwa atas pembunuhan terhadap satu orang pada 5 September 1999 di Hera (Dili).

Keduanya dinyatakan bersalah oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat.

13-2003

Eurico Guterres
Komandan Milisi Aitarak

Mateus de Carvalho
Komandan Kompi D (Hera) Milisi Aitarak

Timbul Silaen
Kepala Polisi Daerah Timor Timur (Kapolda)

Adolfo Viera Leão
Serdadu TNI

Agus Suwarno
Kapten TNI

António Ximenes
Anggota Milisi Aitarak

B. Marcelino
Wakil Komandan Kompi C (Becora) Milisi Aitarak

Caitano da Silva
Komandan Militer Bidau Santana (Pos 12) Milisi Aitarak

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. Penghancuran harta benda milik penduduk sipil, tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap penduduk sipil, pembunuhan terhadap sembilan orang, dan penghilangan paksa terhadap 6 orang sebagai balasan atas serangan terhadap Dioses Dili pada 5 September 1999
2. Penghancuran harta benda milik penduduk sipil dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya sehubungan dengan serangan terhadap tempat tinggal Uskup Belo, Biara Canossian, dan markas Palang Merah pada 6 September 1999
3. Tindakan yang tidak manusiawi lainnya terhadap satu orang sehubungan dengan serangan terhadap Acacio Riberio pada 6 September 1999
4. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk sipil yang tidak diketahui jumlah pastinya antara 5 dan 9 September 1999

Semua terdakwa diperkirakan berada di Indonesia.

24-2003

Mateus de Carvalho
Komandan Kompi D (Hera) Milisi Aitarak

António Adolfo
Komandan Milisi Aitarak Metinaro

Luis da Costa Oliveira (alias **Luis Metan**)
Wakil Komandan Milisi Aitarak Metinaro

Letnan Agus Yuli
Komandan TNI Rajawali Hera

Letnan Untung
Komandan Koramil Metinaro

António Pinto (alias **António B. atau Mautersa**)
Serdadu TNI

Mário Malekat
Serdadu TNI

Lino 'Watulari'
Anggota Milisi Aitarak

Manuel da Silva
Anggota Milisi Aitarak

Gaspar da Silva
Anggota Milisi Aitarak

Florindo Malimeta
Anggota Milisi Aitarak

Domingos Beremau
Anggota Milisi Aitarak

Pedro Sousa
Anggota Milisi Aitarak

Domingos Teebuti
Anggota Milisi Aitarak

Mateus Malimeta
Anggota Milisi Aitarak

José Soares
Serdadu TNI

Matias Soares
Anggota Milisi Aitarak, dan

Joaquim Godinho
Serdadu TNI

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. penahanan terhadap tiga orang, penyiksaan terhadap tiga orang, pembunuhan terhadap satu orang di Hera (Dili) pada 20 April 1999
2. penculikan terhadap satu orang pada 1 Mei 1999 di Hera
3. penculikan, pembunuhan, dan penyiksaan dua orang pada 8 Mei 1999 di Hera
4. penahanan dan penyiksaan terhadap dua orang pada 20 Mei 1999 di Hera
5. penyiksaan dan pembunuhan terhadap dua orang pada 31 Agustus 1999 di Akanunu, Hera (Dili)
6. tindakan semena-mena dan pemindahan penduduk secara paksa terhadap sejumlah penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di Metinaro antara 5 dan 8 September 1999
7. pembunuhan terhadap satu orang pada 6 September 1999 di Hera
8. pembunuhan terhadap satu orang pada 7 September 1999 di Metinaro
9. tindakan tidak manusiawi terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya pada atau sekitar 12 September 1999 di Metinaro

Semua terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

25-2003

Julio Fernandes
Seorang serdadu TNI, telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk penghancuran harta benda dan deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara 5 dan 8 September 1999, dan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya pada 12 September 1999 di Metinaro. Ia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

27-2003

Rudolfo Alves Correia
Seorang sedadu TNI, telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembunuhan terhadap satu orang pada 6 September 1999 di Hera, (Dili). Ia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

28-2003

Alarico Mesquita
Anggota milisi Aitarak

Florindo Morreira
Anggota milisi Aitarak

Domingos Amati
Anggota milisi Aitarak

Francisco Matos
Anggota milisi Aitarak

Lorenco Tavares
Anggota milisi Aitarak

Mateus Guterres
Anggota milisi Aitarak, dan

Angelino da Costa
Anggota milisi Aitarak

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk tindakan semena-mena dan penyiksaan terhadap dua orang pada 8 Mei 1999 di Akanunu, Hera (Dili). Mereka semua dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat.

29-2003

Florindo Morreira
Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan dan penyiksaan terhadap dua orang di Akanunu, Hera (Dili) pada 31 Agustus 1999. Dibebaskan dari seluruh tuntutan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat.

10-2004

Letnan Kolonel Hulman Gultom
Kepala Polres Distrik Dili

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas

1. pembunuhan terhadap satu orang pada 14 Februari 1999 di Kota Dili
2. pembunuhan terhadap12 orang pada 17 April 1999 di kediaman Manuel Carrascalão di Kota Dili
3. pembunuhan terhadap satu orang di jembatan Kuluhan pada 27 Agustus 1999
4. deportasi atau pemindahan paksa sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara 5 dan 9 September 1999
5. tindakan semena-mena terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya. Tuntutan tindakan semena-mena terdiri atas pembunuhan, penyerangan secara fisik, ancaman serangan fisik, penahanan di luar hukum, penghancuran harta benda antara Februari dan September 1999, termasuk serangan terhadap Dioses Dili pada 5 September, serangan terhadap rumah Uskup Belo, Biara Canossian, dan markas Palang Merah pada 6 September, di Distrik Dili.

Dia dikabarkan masih bebas di Indonesia.

10-2002

Mayor Jacob Djoko Sarosa
Komandan TNI Batalion 745, dan

Camilo do Santos
Komandan Pleton batalion 745

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas:

1. pembunuhan terhadap 21 orang selama September 1999 di distrik-distrik Lautém, Baucau, dan Dili.
2. penahanan terhadap tiga orang pada atau sekitar 10 September 1999 di Fuiloro, Lospalos, Lautém
3. tindakan yang tidak manusiawi lainnya terhadap satu orang dan penahanan terhadap satu orang pada atau sekitar 21 September 1999 di Becora (Dili)

Keduanya dikabarkan masih bebas di Indonesia.

Ermera

2-2000

Julio Fernandez
Seorang anggota Falintil, telah didakwa atas pembunuhan terhadap satu orang di Gleno (Ermera) pada 26 September 1999. Ia telah didakwa oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

3-2000

Carlos Soares Carmona
Telah didakwa atas pembunuhan terhadap satu orang di Asulau (Hatolia, Ermera) pada 28 Mei 1999. Ia kemudian dinyatakan bersalah oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

7-2000

Agustinho da Costa
Seorang anggota Tim Pancasila, telah didakwa atas pembunuhan terhadap satu orang di Atara (Atsabe, Ermera) pada 28 Mei 1999. Ia telah didakwa oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

12-2000

Carlos Soares
Seorang anggota Milisi Darah Integrasi telah didakwa atas pembunuhan terhadap satu orang, yang terjadi di Auleun (Letefoho, Ermera) pada 10 September 1999. Ia kemudian dinyatakan bersalah oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas pembunuhan.

9-2002

Carlos Soares
Anggota Falintil, telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembunuhan terhadap satu orang di Aitura, Estado, Ermera pada 19 September 1999. Ia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

2-2004

Domingos de Deus
Serdadu TNI Koramil Atsabe, Kepala Desa Malabe, Anggota Tim Pancasila

Mohamad Roni
Komandan Koramil Atsabe, dan

João da Costa
Sersan Dua Koramil Atsabe, Babinsa Desa Atara, Komandan Tim Pancasila

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan dua orang dan percobaan pembunuhan satu orang dalam serangan atas tempat pemungutan suara Baboe Leten (Atsabe, Ermera) pada 30 Agustus 1999. Domingos de Deus dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Terdakwa lainnya dikabarkan masih bebas di Indonesia.

12-2004

Letnan Kolonel Muhammad Nur
Komandan Kodim 1637 Ermera

Sersan satu Melky
Anggota Kodim, Komandan Operasi

Sersan Dua Hilário
Serdadu TNI

Lukas Martins
Komandan milisi Darah Merah sub-distrik Hatulia

Jeca Pereira
Komandan milisi Darah Merah sub-distrik Ermera

Cipriano da Costa
Komandan Pleton milisi Darah Merah sub-distrik Hatulia

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pembunuhan terhadap satu orang pada atau sekitar 4 April 1999 di Ermera (Ermera)
2. pembunuhan terhadap satu orang pada atau sekitar 17 Mei 1999 di Hatolia (Ermera)
3. pembunuhan terhadap satu orang pada atau sekitar 19 Mei 1999 di Hatulia (Ermera)
4. pembunuhan terhadap satu orang pada atau sekitar 8 Juni 1999 di Hatulia (Ermera)
5. pembunuhan dua orang pada atau sekitar 31 Agustus 1999 di Hatulia (Ermera)
6. pembunuhan dua orang pada atau sekitar 6 September 1999 di Hatulia (Ermera)
7. pembunuhan terhadap satu orang pada atau sekitar 13 September 1999 di Letefoho (Ermera)
8. pembunuhan terhadap satu orang pada atau sekitar 14 September 1999 di Letefoho (Ermera)
9. pembunuhan dua orang pada atau sekitar 13 September 1999 di Ermera (Ermera)
10. pembunuhan dan penyiksaan terhadap satu orang pada atau sekitar 5 September 1999 di Hatulia (Ermera)
11. pembunuhan dan penyiksaan terhadap satu orang pada atau sekitar 13 Mei 1999 di Hatulia (Ermera)

Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

Lautém

9-2000

Jony Marques
Anggota Kopassus, Komandan Milisi Tim Alfa 1994-1996

Manuel da Costa
Komandan Milisi Tim Alfa

João da Costa
Anggota milisi Tim Alfa

Paulo da Costa
Dihubungkan dengan milisi Tim Alfa

Amelio da Costa
PAM Swakarsa

Hilario da Silva
Dihubungkan dengan milisi Tim Alfa

Gonsalo do Santos
Dihubungkan dengan milisi Tim Alfa

Alarico Fernandes
Dihubungkan dengan milisi Tim Alfa

Mauterca Monis
Anggota milisi Tim Alfa

Gilberto Fernandes
Anggota milisi Tim Alfa

Syaful Anwar
Wakil Komandan Infanteri Pertama, Kopassus

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan karena pembunuhan 13 orang, penyiksaan terhadap satu orang, pendeportasian dan pemindahan paksa penduduk, dan tindakan kekerasan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di Desa Leuro dan desa-desa lain di Lospalos antara April dan September 1999.

Seluruh tertuduh dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat kecuali Syaful Anwar yang kabarnya masih bebas di Indonesia.

3-2001

José Valenti
Seorang anggota milisi Tim Alfa, telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembunuhan terhadap satu orang di Lautém pada atau sekitar 25 September 1999. Ia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

10-2002

Mayor Jacob Djoko Sarosa
Komandan TNI Batalion 745, dan

Camilo do Santos
Komandan Peleton Batalion 745

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pembunuhan terhadap 21 orang selama September 1999 di Distrik Lautém, Baucau, dan Dili.

2. penahanan terhadap tiga orang pada atau sekitar 10 September 1999 di Fuiloro, Lospalos, Lautém
3. tindakan yang tidak manusiawi lainnya terhadap satu orang dan penahanan terhadap satu orang pada atau sekitar 21 September 1999 di Becora (Dili)

Keduanya dikabarkan masih bebas di Indonesia.

12-2002

Inacio de Oliveira
Komandan Seksi Tim Alfa

Gilberto Fernandes
Seorang anggota Tim Alfa

José da Costa
Anggota Tim Alfa dan BRTT

Edmundo da Conceição
Bupati Distrik Lautém, Ketua BRTT, dan anggota kehormatan Kopassus

Rahman Zulkarnaen
Letnan Satu Infanteri, Komandan Kopassus di Lospalos, Lautém

Syaful Anwar
Sersan satu Infanteri, Kopassus di Lospalos

Thomas da Costa
Anggota BRTT dan Komandan Kompi Tim Alfa

Anton Regu
Anggota Tim Alfa

Joaquim Januario
Anggota Tim Alfa

Lamberto do Santos
Anggota Tim Alfa dan BRTT

Martinho da Costa
Anggota Tim Alfa dan BRTT dan

José Solari
Anggota BRTT

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan terhadap satu orang dan tindakan semena-mena terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya pada 27 Agustus 1999 di Lospalos. Dalam sidang terpisah, Inacio de Olivera, Gilberto Fernandes, dan José da Costa telah dituntut oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, atas kekerasan terhadap harta benda atau manusia oleh sekelompok orang yang bergabung untuk tujuan yang sama. Terdakwa lainnya dikabarkan masih bebas di Indonesia.

Liquiçá

11-2001

Anastasio Martins
Anggota milisi Besi Merah Putih, dan

Domingos Goncalves
Anggota milisi Besi Merah Putih

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu pembunuhan tujuh orang di Liquiçá dan pendeportasian atau pemindahan paksa penduduk sipil di Metagou, Bukmera, dan Legimea selama September 1999. Mereka berdua dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

16-2001

Armando dos Santos
Komandan Peleton milisi Besi Merah Putih telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas:

1. pembunuhan atas sekelompok orang yang tidak diketahui jumlah keseluruhannya dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap satu orang selama Maret 1999 di Gugleur (Maubara, Liquiçá)
2. pembunuhan atas sekelompok orang yang tidak diketahui jumlah keseluruhannya di Kota Liquiçá (Liquiçá) pada 6 April 1999
3. pembunuhan atas sekelompok orang yang tidak diketahui jumlah keseluruhannya di Distrik Dili pada 17 April 1999.

Dia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

19-2001

Abilio Mendes Correia

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas:

1. pembunuhan dua orang pada atau sekitar 27 April 1999 di Tutuge (Loidahar, Liquiçá)
2. tindakan tidak manusiawi dan penyiksaan terhadap satu orang pada atau sekitar 9 Agustus 1999 di Tutuge (Loidahar, Liquiçá)

Dia kemudian dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat.

21-2001

Leoneto Martins
Bupati Distrik Liquiçá

Agustinho Alves Correia
Camat Liquiçá

Jose Afaat
Camat Maubara

Asep Kuswandi
Komandan Kodim Liquiçá

Purwanto
Wakil Komandan TNI, Liquiçá

Carlos Amaral
Komandan Koramil Maubara

Domianus Y. Sade
Komandan Koramil Bazartete

Adios Salosa
Komandan Polri Liquiçá

Tomé Diogo
Anggota TNI, Opsir Intelijen

Domingos Mendes
Serdadu TNI, Maubara

Henrique Morreira
Opsir TNI, Bazartete

Jorge Viegas
Opsir TNI, Maubara

Manuel Sousa
Komandan milisi Besi Merah Putih (BMP) Liquiçá

João Sera
Wakil Komandan Milisi BMP Liquiçá

Felipe Grasiano
(Tidak ada catatan afiliasi)

Zacarias Alves
Komandan milisi BMP Bazartete dan Liquiçá

Jacinto Goncalves
Komandan milisi BMP Bazartete

Floriano da Silva
Komandan milisi BMP Gugleur

Domingos Goncalves
Komandan milisi BMP Bazartete

Victor da Cruz
Anggota milisi BMP Bazartete

Victor Lopes
Komandan milisi BMP Bazartete

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk beberapa insiden yang terjadi di Distrik Liquiçá antara Januari dan September 1999. Mereka dituntut atas:

1. pembantaian dan pembunuhan atas lebih daripada 50 warga sipil , tindakan tidak manusiawi yang dilakukan terhadap ratusan warga sipil, sebagai balasan atas serangan terhadap gereja Liquiçá di Liquiçá Dato (Liquiçá, Liquiçá) pada 6 April 1999
2. tindakan semena-mena terhadap penduduk sipil yang dilakukan antara Januari 1999 dan September 1999 di Distrik Liquiçá
3. pembunuhan terhadap satu orang pada 7 April 1999 di Maubara
4. pembunuhan dua orang, penghilangan paksa atas satu orang pada 5 April 1999 di Liquiçá (Liquiçá)
5. pembunuhan terhadap satu orang pada 9 April 1999 di Maumeta (Bazartete)
6. pembunuhan terhadaptiga individu pada 15 April 1999 di Maumeta (Bazartete)
7. pembunuhan atas dua orang pada 27 April 1999 di Tutuge (Liodahar)
8. tindakan tidak manusiawi terhadap satu orang, penghilangan paksa atas satu orang pada atau sekitar 9 Agustus 1999 di Tutuge (Loidahar)
9. pembunuhan terhadap tiga orang pada 4 September 1999 di Metagou (Bazartete)
10. pembunuhan terhadap satu orang pada 7 September 1999 di Bukmera (Bazartete)
11. deportasi atas ratusan warga sipil dari Liquiçá antara 5 September dan19 September 1999.

Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

23-2003

Rusdin Maubere
Seorang penasihat milisi Besi Merah Putih, telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas penghilangan paksa dan penyiksaan terhadap satu orang pada 26 April 1999 di Bazartete, Liquiçá. Ia kemudian dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat.

Manatuto

11-2002

Vidal Doutel Sarmento
Bupati Manatuto

Filomeno Brito
Komandan Seksi milisi Mahadomi

António D. Sarmento
Komandan Seksi milisi Mahadomi

Thomas dos Reis
Komandan Seksi milisi Mahadomi dan

Aleixo de Carvalho
Komandan milisi Mahadomi

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pembunuhan terhadap satu orang dan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan terhadap satu orang pada atau sekitar 16 Mei 1999 di Laleia (Manatuto)
2. penahanan dan penyiksaan atas tiga orang antara 11 dan14 Mei 1999 di Manatuto (Manatuto)
3. tindakan semena-mena terhadap penduduk sipil Manatuto antara Mei dan Oktober 1999
4. pemindahan penduduk secara paksa asal Manatuto pada September 1999
5. pembunuhan terhadap lima orang dan tindakan tidak manusiawi terhadap dua orang antara 7 dan 14 September 1999 di Distrik Manatuto.

Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

Manufahi

8-2000

Mateus Tilman
Seorang anggota milisi Ablai, telah didakwa atas usaha pembunuhan terhadap enam orang, perlakuan semena-mena berat, dan penghancuran harta benda sebagai balasan atas sebuah serangan terhadap penduduk sipil Holarua (Same, Manufahi) pada 2 September 1999. Dia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

3-2002

Bernardino da Costa
Komandan milisi Tim Sasurut-Ablai (Same) telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembunuhan terhadap tujuh orang dan deportasi atau perpindahan penduduk sipil secara paksa, penahanan, atau pelanggaran kebebasan secara fisik dan tindakan semena-mena terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di Distrik Same selama April, Agustus, dan September 1999. Dia dikabarkan masih bebas di Indonesia.

18-2001

Benjamin Sarmento
Wakil Komandan milisi Tim Sasurut, Ablai

Romerio Tilman
Komandan ke tiga dari milisi Tim Sasurut, Ablai

João Sarmento
Anggota milisi Ablai

Domingos Mendonca
Anggota milisi Ablai

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan terhadap tujuh orang dan penahanan atau pelanggaran kebebasan secara fisik lainnya, pendeportasian atau pemindahan penduduk sipil secara paksa, dan tindakan semena-mena terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di distrik Manufahi selama April, Agustus, dan September 1999.

Mereka semua dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

13-2004

Nazario V. dos S. Cortereal
Komandan Umum milisi Ablai Manufahi

Francisco Capela Ferrão
Wakil Komandan milisi Ablai Manufahi, dan Komandan Same

Kapten Sugyono
Komandan Kopassus Manufahi

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk tindakan semena-mena atas kejahatan yang dilakukan di Distrik Manufahi selama 1999 termasuk:

1. pembunuhan dua orang pada17 April 1999 di Orluli
2. pembunuhan terhadap satu orang pada 17 April 1999 di Grotu Lau
3. pembunuhan terhadap satu orang pada 17 April 1999 di Fahikeo
4. pembunuhan terhadap satu orang pada 24 April 1999 di Same
5. pembunuhan terhadap satu orang pada 28 April 1999 di Beikala
6. pembunuhan dua orang pada 30 Agustus 1999 di Datina
7. pembunuhan terhadap satu orang pada 3 September 1999 di Holarua
8. pembunuhan terhadap satu orang pada 9 September 1999 di Datina
9. pembunuhan terhadap satu orang pada 9 September 1999 di Fahi-Luhan
10. pembunuhan terhadap satu orang pada 12 September 1999 di Ailuli (Letefoho)
11. pembunuhan terhadap satu orang pada 16 September 1999 di Ladiqui (Letefoho)
12. pembunuhan terhadap empat orang pada 24 September 1999 dekat Betano
13. pembunuhan terhadap satu orang di September 1999 di Selihasan (Betano)
14. pembunuhan terhadap satu orang pada 20 Oktober 1999 di Beikala
15. usaha pembunuhan atas satu orang pada 5 Agustus 1999 di Same

16. melukai tiga orang pada 2 September 1999
17. penahanan di luar hukum atas sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya dari 30 Agustus sampai 9 September 1999
18. pemindahan paksa penduduk distrik Manufahi dari 5 September sampai dengan 25 Oktober 1999
19. penghancuran harta benda milik sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara Agustus dan25 Oktober 1999

Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

14-2004

Letnan Sumino
Komandan Koramil Same

Guilhermino Marcal
Komandan Kompi Ablai milisi Holarua (Same) dan

José Laranzeira
Komandan Kompi milisi Ablai Daisua (Same)

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pembunuhan dua orang pada 17 April 1999 di Same (Manufahi)
2. pembunuhan terhadap satu orang pada 24 April 1999 di Distrik Manufahi
3. pembunuhan terhadap empat orang pada 24 September 1999 di Distrik Manufahi
4. tindakan yang tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap empat orang pada atau sekitar 2 September 1999 di Manufahi
5. pemindahan paksa sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara 5 September dan 30 Oktober 1999 di distrik Manufahi
6. tindakan semena-mena terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara Januari dan Oktober 1999

Para terdakwa diperkirakan masih berada di Indonesia.

Oecussi

20-2001

Florencio Takaqui alias Taquai
Anggota, milisi Sakunar

Simão Lopes
Komandan Tertinggi, milisi Sakunar

Domingos Obe
Anggota, milisi Sakunar

Tomas Bubun
Anggota, milisi Sakunar

Laurentino Soares
Komandan, milisi Sakunar

Julio da Costa
Anggota, milisi Sakunar

Gabriel Kolo
Komandan, milisi Sakunar

António Sabraca
Komandan, milisi Sakunar dan anggota TNI Passabe

Elvis Lopes
Anggota, milisi Sakunar

Bonafacio Bobo
Anggota, milisi Sakunar dan

Andre Ulan
Sersan, anggota TNI

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai balasan atas lima insiden yang terjadi di Passabe (Oecussi) pada 1999. Mereka dituntut atas:

1. pembantaian 47 orang pada 10 September 1999
2. pembunuhan terhadap 18 orang pada 8 September 1999 di Nibin, Desa Usi Taqueno Tumin dan Quibiselo, Desa Bobo Manat
3. penahanan atau pembatasan berat atas kebebasan fisik terhadap 43 orang di Polres Passabe pada 18 April 1999
4. tindakan yang tidak manusiawi lainnya terhadap satu orang yang terjadi pada 9 Agustus 1999
5. tindakan yang tidak manusiawi lainnya terhadap satu orang pada 8 September 1999
6. tindakan yang tidak manusiawi lainnya terhadap delapan orang pada 10 September 1999
7. deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya pada 9 September 1999.
8. tindakan semena-mena terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara April dan September di distrik Oecussi

Florencio Takaqui alias Taquai
Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan, dalam sidang yang terpisah, oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat.

Terdakwa lainnya dikabarkan masih bebas di Indonesia.

4-2002

X (Nama disembunyikan oleh Keputusan Pengadilan)
Telah didakwa pembunuhan terhadap tiga orang di Nitibe, Tumin dan Quiobeselo pada 10 September 1999. X telah dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

5-2002

Umbertus Ena
Anggota Milisi Sakunar, dan

Carlos Ena
Anggota Milisi Sakunar

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan dua orang dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang ditujukan untuk menimbulkan penderitaan secara berat terhadap satu orang di Naetuna (Passabe) di atau sekitar 9 September 1999. Panel Khusus Kejahatan Berat menghukum Umbertus Ena atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan membebaskan Carlos Ena atas kedua tuntutan tersebut.

13-2002

Laurentino Soares
Komandan Milisi Sakunar, dan

Bonafacio Bobo
Komandan Milisi Sakunar

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan atas delapan orang di Makelab, Taiboco I (Pante Makassar, Oecussi) pada atau sekitar 20 Oktober 1999. Kedua terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

3-2003

Agustinho Atolan
Komandan Milisi Sakunar Naetuna, telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembunuhan terhadap satu orang yang terjadi pada 8 September 1999 di Nitas (Nibin, Oesilo, Oecussi). Dia kemudian dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

4-2003

Anton Lelan Sufa
Pemimpin milisi Sakunar Bebo; dan

Agustinho Cloe
Anggota milisi Sakunar Bebo

Agustinho Cab
Anggota milisi Sakunar Bebo

Lazarus Tuli
Anggota milisi Sakunar Bebo

Lino Beno
Anggota milisi Sakunar Bebo

António L. Simão
Anggota milisi Sakunar Bebo, dan

Domingos Metan
Anggota milisi Sakunar

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan dua orang dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap satu orang pada atau sekitar 16 September 1999 di Netensuan (Nitibe, Oecussi). Semua terdakwa telah dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

10-2003

Mateus Lao
Seorang anggota Milisi Sakunar, telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembunuhan terhadap satu orang di Naetuna (Passabe, Oecussi) pada 1 September 1999. Ia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

19-2003

Liberatus Manu
Anggota Milisi Sakunar, dan

Aleixo Sepa
Anggota Milisi Sakunar

Telah didakwa atas pembunuhan terhadap empat orang dan usaha pembunuhan atas satu orang lainnya pada 8 dan 9 September 1999 di Passabe (Oecussi). Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

22-2003

Januario da Costa
Komandan Milisi Sakunar Passabe, dan

Mateus Punef
Anggota Milisi Sakunar

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pembunuhan terhadap 18 orang dan tindakan tidak manusiawi terhadap tiga orang pada 8 September 1999 di Nibin, Tumin, dan Quibiselo (Nitibe, Oecussi)
2. deportasi atau pemindahan paksa penduduk terhadap seorang penduduk sipil di Tumin pada 9 September 1999

3. pembantaian 47 orang, tindakan yang tidak manusiawi lainnya terhadap 7 orang, pada 10 September 1999 di Tumin, Nibin, dan Quibiselo, dan tindakan semena-mena terhadap seorang penduduk sipil
4. tindakan semena-mena terhadap satu orang penduduk sipil antara 8 dan 10 September 1999 di Nitibe Oecussi

Januario da Costa dan **Mateus Punef** dihukum oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

30-2003

Laurentino Soares
Wakil Komandan Milisi Sakunar

Herman Naubasa
Anggota Milisi Sakunar

Nyongky Wankai
Anggota Milisi Sakunar

Eddie Talan
Anggota Milisi Sakunar

Luis Infien
Anggota Milisi Sakunar

Firminio Auni
Anggota Milisi Sakunar

Felipe Poto
Anggota Milisi Sakunar

Ala Uni
Anggota Milisi Sakunar, dan

Domingos Cav
Seorang anggota Milisi Sakunar,

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk beberapa pelanggaran yang terjadi di Pante Macassar (Oecussi) yakni:

1. pembunuhan terhadap satu orang di Bihala pada 22 September 1999
2. pembunuhan terhadap satu orang dan usaha pembunuhan atas satu orang pada 23 September 1999 di Cutete
3. pembunuhan terhadap tiga orang, penculikan atas empat orang, dan tindakan tidak manusiawi terhadap satu orang di Sikone
4. pembunuhan terhadap satu orang pada 13 Oktober 1999 di Kolam Cina
5. pembunuhan terhadap tiga orang pada 14 Oktober 1999 di Desa Tono/Lifau

Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

31-2003

Samuel Vaz
Anggota milisi Sakunar

Luis Infien
Anggota milisi Sakunar

Saran Bariak
Anggota milisi Sakunar dan

Lalu Manus
Anggota milisi Sakunar,

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan terhadap tiga orang pada 13 September 1999 di Padiae, Pante Makassar, Oecussi. Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

32-2003

Jorge Ulan
Serdadu TNI

João Gomes
Serdadu TNI, dan

Blasius Manek
Serdadu TNI

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan dua orang dan upaya pembunuhan terhadap dua orang pada 11 September 1999 di Nunbei (Pante Makassar, Oecussi). Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

Viqueque

3-2004

Letnan Kolonel Djoko Soeharsoyo
Komandan Kodim 1630 (sampai 15 Agustus 1999)

Letnan Kolonel Gustaf Heru
Komandan Kodim 1630 (sejak 15 Agustus 1999)

Letnan Satu Minton
Komandan Kopassus, Kodim 1630

Letnan Satu Yusuf Tandi
Kepala seksi Intelejen Kodim 1630

Sersan Kepala Andreas Prawin
Serdadu TNI Seksi Intelejen, Babinsa Carau Balu (Viqueque, Viqueque)

Martinho Fernandes
Bupati Distrik Viqueque, Komandan milisi Makikit, Ketua FPDK Viqueque dan Anggota Kehormatan Kopassus

Emiliano Joaquim Gomes
Asisten dua Distrik Viqueque, Wakil Komandan milisi Makikit, Wakil Ketua FPDK Viqueque dan Anggota Kehormatan Kopassus

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. penyiksaan dan pembunuhan atas satu orang pada 3 Mei 1999 di kota Viqueque tua
2. pembunuhan terhadap satu orang pada atau sekitar 4 Mei 1999 di kota Viqueque tua
3. pembunuhan terhadap satu orang pada 10 Mei 1999 di Buicaren
4. pembunuhan terhadap satu orang pada 27 June 1999 di Anawain (Viqueque)
5. pembunuhan terhadap tiga orang pada 11 Agustus 1999 di Beloi
6. pembunuhan terhadap satu orang pada 18 September 1999 di Beaco
7. deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa pada atau sekitar 10 September 1999 di Distrik Viqueque
8. tindakan semena-mena terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara 1 Januari dan 25 September 1999 di Viqueque

Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

Timor Barat

11-2000

Leonardos Kasa
Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas satu kali pemerkosaan yang terjadi di Betun (Timor Barat) pada 10 September 1999. Panel khusus untuk Kejahatan Berat menyatakan bahwa ia tidak memiliki jurisdiksi atas kasus ini dan kasusnya dibatalkan.

Dakwaan Nasional

5-2003

Wiranto
Jenderal TNI, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Komandan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Zacky Anwar Makarim
Mayor Jenderal; Kepala Tim Khusus/Ajudan Jenderal Satuan Tugas; Anggota Satuan Tugas Pengawasan Konsultasi Umum di Timor-Timur

Kiki Syahnakri
Mayor Jenderal; asisten Operasi untuk Kepala Staff Angkatan Darat; Panglima Komando Darurat Militer di Timor-Timur

Adam R Damiri
Mayor Jenderal; Komandan Militer Komando Militer Regional IX (Bali, Nusa Tenggara Timur dan Barat, dan Timor-Timur)

Suhartono Suratman
Kolonel; Komandan Korem 164 (Timor-Timur) sampai dengan 13 Agustus 1999

Mohamad Noer Muiz
Komandan Korem 164 (Timor-Timur) sejak 13 Agustus, 1999

Yayat Sudrajat
Letnan Kolonel; Komandan Satuan Tugas Tribuana VIII Komando Militer Sub-Regional 164 (Timor-Timur) dan

Abilio José Osório Soares
Gubernur Timor-Timur

Telah didakwa sebagai perorangan dan atasan dalam pembunuhan, deportasi, atau pemindahan penduduk sipil secara paksa dan tindakan semena-mena terhadap ratusan ribu warga Timor-Leste selama 1999. Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

Lampiran 4:
Ucapan terimakasih

Pendahuluan

Kami ingin menyatakan penghargaan sedalam-dalamnya pada semua orang yang berkontribusi pada Laporan ini, dalam berbagai peran. Tanpa pengetahuan, keahlian, dedikasi, kemurahan-hati, dan pengorbanan banyak organisasi, teman, dan kolega—dari Timor-Leste, Indonesia, dan penjuru dunia lainnya—karya besar ini tidak mungkin diselesaikan.

Mereka yang paling berjasa adalah semua yang memberi “bahan mentah” untuk pekerjaan ini: saudara-saudari kami yang telah membagi pengalaman dan informasi kepada Komisi lewat pernyataan, wawancara, dan kesaksian publik; mereka yang memberikan buku, dokumen, dan masukan; staf kami yang mengumpulkan dan merekam data; mereka yang mengorganisasi dan mengarsipkan bahan-bahan ini melalui berbagai tahapan sehingga menjadi Laporan ini; mereka yang bekerja sebagai penganalisa, peneliti, penerjemah, penyunting, dan mereka yang membuat desain, tata-letak, dan pencetakan Laporan ini. Dan terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih yang hangat kepada mereka yang memungkinkan produksi Laporan ini: staf administrasi dan pendukung kami, dan pemerintah serta lembaga multilateral dan organisasi pemerintah yang telah memberikan dukungan yang tak terhingga kepada Komisi dalam bentuk dana maupun jasa atau benda.

Nama-nama mereka telah disebutkan dalam halaman-halaman berikut ini. Kami berterima kasih kepada mereka yang telah bersama kami mempunyai visi untuk Timor-Leste yang telah berekonsiliasi, dan berkomitmen pada hak asasi manusia. Kami berterima kasih atas sumbangan mereka untuk mewujudkan visi ini lewat karya ini.

Komisaris Nasional

Donor

Pekerjaan Komisi telah menjadi nyata lewat bantuan dari pemerintah dan lembaga multilateral serta organisasi non-pemerintah yang nama-namanya disebutkan di bawah ini:

Donor	Kontribusi (dalam USD)
Australia - AusAID	363.341,42 plus 7 penasihat melalui ABV, AVI, AYAD, CBF, dan peralatan
Benetec (Human Rights Data Analysis Group)	Analisis statistik
Catholic Relief Services (Kupang)	12.814,70
CEP (TFET administrator lewat World Bank)	166.400,00
Denmark (via UNDP)	82.526,00 plus 2 penasihat
EC (via UNDP, melibatkan BCPT)	224.350,00 plus 4 penasihat
EC (via UNHCR)	350.512,22
Finlandia	19.995,00
Hivos	34.249,33
ICTJ	Bantuan teknis dan konferensi luarnegeri
Inggris Raya	931.347,19 plus 2 Penasihat
Irlandia	493.156,85
Jepang	999.361,64
Jerman - GTZ	240.946,28 plus 1 penasihat dan 1 peneliti
Kanada - CIDA	190.075,55
Mennonite Central Committee, US	1 penasihat
Norwegia	252.838,10
OHCHR - (via Unit Hak Asasi Manusia PBB, Timor-Leste)	Penerjemahan, bantuan teknis, plus lima penasihat
PIKUL, Timor Barat	4.117,60
Portugal	Penerjemahan ke dalam bahasa Portugis
Selandia Baru	764.382,20
Swedia (via UNDP)	541.078,00
UNDP	Manajemen sebagian kontribusi donor dan peralatan
UNHCR	Advokasi donor, manajemen, dan peralatan
UNTAET / UNMISET/ UNOTIL	2 penasihat dan peralatan

UN Volunteers	
USA - USAID	Hibah barang senilai 395.168,50, plus tiga penasihat
US Institute for Peace	80.000,00

Masukan

- Akihisa Matsuno: buku
- Aktivis perempuan Timor-Leste
- Amnesty International: laporan
- Associação dos Prisioneiros Politicos (ASSEPOL): dokumen riset
- Australian Council for International Development (ACFID): dokumen dan buku
- Catholic Relief Services (CRS): 1978-1979 kelaparan
- Clive Scollay: *footage* video
- Fokupers
- Geoffrey Gunn, riset
- Geoffrey Robinson: riset mengenai penentuan nasib sendiri
- Helene van Klinken, riset
- Hugh Dowson: dokumen UK yang telah dibuka
- Human Rights Watch: laporan
- International Centre for Transitional Justice (ICTJ): buku
- John Waddingham: bahan riset
- Jill Jolliffe: riset mengenai tahanan politik
- Jose Ramos-Horta: dokumen Santa Cruz
- Keluarga Dr. Herb Feith: perpustakaan
- Koalisi LSM Timor Barat (CIS, Truk-F, Lakmas, Yabiku, YPI, PIKUL, CRS)
- Komnas Perempuan dan Tim Kemanusiaan Timor Barat
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM): bahan riset
- Mayor Jenderal Mario Lemos Pires: buku
- Manuel Carceres: foto
- National Security Archives: dokumen AS yang sudah dibuka
- Nelson Goncalves: foto
- Office of High Commissioner for Human Rights: Laporan Geoffrey Robinson mengenai kejadian 1999

- Pat Walsh: buku
- Pemerintah Australia: dokumen rahasia yang sudah dibuka dan buku
- Pemerintah Jepang: dokumen
- Pemerintah Selandia Baru: dokumen yang sudah dibuka
- Penny Tweedie: foto
- Suzannah Linton: riset hukum
- Unit Kejahatan Berat PBB: UNPOL riset tentang Craras, Balibó, dan Santa Cruz
- UNICEF: bahan mengenai anak-anak
- UNMISET Unit Hak Asasi Manusia: buku
- Yayasan HAK

Peserta Audiensi Publik Nasional

Perempuan dalam Konflik

Beatriz Miranda Guterres, Bibileo, Viqueque

Domingas Ulan, Oecussi

Feliciana Cardoso, Covalima

Fernanda dos Reis Araujo, Vila Verde, Dili

Fernanda Soares, Mascarinhas, Dili

Ines da Conceicao Lemos, Ermera

Joao Fernandes, Manufahi

Komnas Perempuan, Indonesia

Leonia Amaral Soares, Manatuto

Maria Antonia Santos Sousa, Manatuto

Maria Josefina Cardoso, Ainaro

Mario Carrascalao, Dili

Natalia dos Santos, Liquiçá

Olga Corte-Real, Manufahi

Olga da Silva Amaral, Mauxiga, Ainaro

Rita da Silva, Maubisse, Ainaro

Tim Kemanusiaan Timor Barat (TKTB), Indonesia

Vitoria Henrique, Dili

Tahanan Politik

Ade Rostina Sitompul, Indonesia
Adelino Soares, Sakoko, Ermera
Antonio Aitahan Matak, Dili
Bernadino Villanova, Atauro, Dili
Ceu Federer, Dili
David da Conceicao da Costa Thon, Bemori, Dili
Gil Guterres, Dili
Gracilda Quimarães, Lautém
Gregorio Saldanha, Dili
Joao Baltazar Martins, Mandarin, Dili
Joao Vinhas, Lautém
Julio Alvaro, Lahane, Dili
Luhut Pangaribuan, Indonesia
Maria da Silva, Bidau, Dili
Maria Jose Franco Pereira, Santa Cruz, Dili
Mariano Soares, Viqueque
Martinho Martins, Dili

Pemindahan paksa dan kelaparan

Abilio dos Santos Belo, Mau Chiga, Ainaro
Antonio Pires, Mau Chiga, Ainaro
Francisco Soares Pinto, Lautém
Gilman dos Santos, Dili
Joana Pereira, Fatuhada, Dili
Joao Sereno, Covalima
Manuel Carceres da Costa, Dili
Maria Jose da Costa, Letefoho, Manufahi
Mario Nicolao dos Reis, Baucau
Merlindi da Conceicao, Liquiçá
Pat Walsh, Australia
Rosalina da Costa, Rotuto, Manufahi

Konflik Internal 1974-1976

Antonio Serpa Ximenis, Laleia, Manatuto
Clementino dos Reis Amaral, Dili

Domingos de Oliveira, Australia
Francisco (Lu'olo) Guterres, Dili
Francisco Xavier do Amaral, Lecidere, Dili
Frederico Almeida Santos, Audian, Dili
James Dunn, Australia
Joao Carrascalao, Dili
Jose Ramos-Horta, Dili
Jusuf Wanandi, Indonesia (mengirim makalah)
Kay Rala Xanana Gusmao, Dili
Manuel Agostinho Freitas, Lepo, Covalima
Manuel Duarte, Horahu, Ermera
Mari Alkatiri, Dili
Mario Viegas Carrascalao, Comoro, Dili
Mario Lemos Pires, Portugal
Monis da Maia, Manleuana, Dili
Paulo Freitas da Silva Bairo Formosa, Dili
Rogerio Tiago Lobato, Dili
Tomas Goncalves, Farol, Dili

Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional

Abel Guterres, Australia
Arnold Kohen, USA
Asvi Warman Adam, Indonesia
David Scott, Australia
Filomena de Almeida, Dili
Francesc Vendrell, Brussels
Gary Gray, USA
Ian Martin, New York
Kenneth Chan, Australia
Luisa Teotonio Pereira, Portugal
Monika Nakamura, Japan
Nugroho Katjasungkana, Indonesia
Suzannah Linton, Malaysia
Yeni Rosa Damayanti, Indonesia

Anak-anak dan Konflik

Aida Maria dos Anjos, Bairo Pite, Dili
Alexandrino da Costa, Dili
Alfredo Alves, Marconi, Dili
Belchior Francisco Alves Pereira, Kuluhun, Dili
Constantino X. Ornai, Balide, Dili
Dulce de Jesus Soares, Dili
Guilherme dos Reis Fernandes, Vila Verde, Dili
Isabel dos Santos Neves, Turiscai, Manufahi
Joao da Silva, Becora, Dili
Julieta Jesuirina dos Santos, Liquiçá
Manuel Carceres da Costa, Dili
Marciana da Costa, Aituri Laran, Dili
Naldo Gil da Costa, Kuluhun, Dili
Petrus Kanisius, Bairo Pite, Dili

Pembantaian

Alexandre da Costa Araujo, Saboria, Aileu
Angelo Araujo Fernandes, Fuiloro, Lospalos
Antonio Amado J.R. Guterres, Laclo, Manatuto
Berta Caetano, Rasa, Lospalos
Domingos Maria Alves, Tulatakeu, Aileu
Felismina dos Santos Conceicao,Taibessi, Dili
Felismina Soares, Turiscai, Manufahi
Florentino de Jesus Martins, Talimoro-Ermera
Geoffrey Robinson, USA
Helen Todd, Malaysia
Herminia Mendes, Liquiçá
Ilidio Maria de Jesus, Welaluho, Manufahi
Jose Gomes, Bibileo/Lalerek Mutin, Viqueque
Lucio Maneses Lopes, Santa Cruz, Dili
Mariana Marques, Muapitine, Lospalos
Mateus Soares, Orana, Manufahi
Max Stahl, UK
Olinda Pinto Martins, Bibileo / Lalerek Mutin, Viqueque
Simplicio Celestino de Jesus, Bairro Pite, Dili

Komunitas CAVR

Pendirian CAVR

Panitia Pengarah

Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, Yayasan Hak
Cristina Planas, UNHCR
Francisco Branco, asosiasi bekas tahanan politik
Francisco Guterres, CNRT
Galuh Wandita Soedjatmoko, UNTAET
Jacinto das Neves Raimundo Alves, asosiasi bekas tahanan politik
Manuel Abrantes, Komisi Keadilan dan Perdamaian, Dioses Dili
Maria Domingas Alves, Fokupers
Maria Olandina Isabel Caeiro Alves, Etwave
Patrick Burgess, UNTAET
Pe. Domingos Soares, CNRT
Ricardo Ribeiro, Presidium Juventude

Kantor Interim

Ai Kihara, penjangkauan komunitas
Ana Mesquita, pengembangan program
Cathy Molnar, administrasi
David McCann, pengembangan sistem
Dev Terway, logistik
Dircia M. C. G. de Andrade, administrasi
Emily Langston, hukum
Filipe dos Santos, logistik
Francisco Branco, staf penghubung
Gagat Handoyo, sumberdaya manusia
Galuh Wandita Soedjatmoko, pengembangan program
Henrik Boejen, keuangan
Inge Lempp, penerjemahan
Jacinto das Neves Raimundo Alves, staf penghubung
Jane Alexander, pengembangan program
Joann Kingsley, teknologi informasi
John Rouw, hubungan masyarakat

Jose Estevao Soares, staf penghubung

Katrina Skaetzens, hukum

Kendelle Clark, pengembangan program

Kieran Dwyer, pengembangan kelembagaan/pembangunan kapasitas/hubungan masyarakat

Matt Tilleard, kesekretariatan

Pat Walsh, koordinasi

Suzanne Butscher, keuangan

Suzanne Loughlin, pengembangan program

Ustinia Guterres, administrasi

Vicki Tchong, administrasi

Panel untuk menyeleksi komisaris nasional dan regional

Aleixo Ximenes, Dioses Dili dan Baucau

Brigida Correia, Trabalhista

Cecilio Caminha Freitas, Forum NGO

Dennis McNamara, DSRSG UNTAET

Francisco Branco, asosiasi bekas tahanan politik

Galuh Wandita Soedjatmoko, UNTAET Kantor Hak Asasi Manusia

Jacinto Alves Correia, asosiasi keluarga orang hilang

Jacob Martins dos Reis Fernandes, Fretilin

Joao Francisco dos Reis Amaral, KOTA

Maria Barreto, Rede Feto

Patrick Burgess, UNTAET Kantor Hak Asasi Manusia

Quiteria da Costa, UDT

Ricardo Ribeiro, Presidium Juventude

Pelaksanaan mandat CAVR di tingkat nasional

Komisaris Nasional

Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, Ketua

Fr. Jovito Rego de Jesus Araujo, Wakil Ketua

Isabel Amaral Guterres

Jose Estevao Soares

Jacinto das Neves Raimundo Alves

Maria Olandina Isabel Caeiro Alves

Pdt. Agustinho de Vasconselos

Staff, penasihat, dan relawan di kantor nasional

Abel dos Santos, riset
Abilio Guterres, keamanan
Adelina da Cruz, sumberdaya manusia
Afonso Aleixo, penerjemahan
Afonso Lemos, keamanan
Aidalia de Fatima, dukungan program
Akihisa Matsuno, riset
Alexandra Van den Bergh, penulis
Alexandre M. Pires, pembaca pernyataan
Alexandrina Flores dos Santos, rekonsiliasi
Alvaro da Silva, pengambil pernyataan
Amanda Ramsay, perpustakaan
Americo de Araujo, reparasi
Amy Rothschild, hukum
Ana M. Mesquita Freitas, statistika
Ana Mesquita, pengembangan program
Ana Paula Maia, riset
Anna Bonomini, perpustakaan
Anna Russell, perpustakaan
Annie Keogh, editorial
Anthony Goldstone, co-manajer laporan final
Antonia Carmen da Cruz, radio/editorial
Antonio Goncalves, fotografer
Antonio Lima, kemanan
Apolinario da Silva Gusmao, keuangan
Aretha Kakerissa, penerjemahan
Arief W. Djati, editorial
Aristides Gusmão Sarmento, radio
Arsisto Ambyo, editorial
Arthur Morato, penyediaan/*procurement*
Aventino de Jesus Baptista Ximenes, koordinasi regional/produksi
Barbara Bee, perpustakaan
Benjamin Larke, rekonsiliasi
Bernardete Jong dos Santos, media/produksi
Bernardo Cardoso, koordinasi regional

Bernardo de Sá Nogueira, penerjemahan
Bonifacio Mateus da Costa, keamanan
Bryn Thorne-George, produksi
Cancio Ximenes Soares, radio
Candido de Deus, keamanan
Canisius C. Ximenes, teknologi informasi
Carla Farjado, reparasi
Carlito Carminha, fotografer
Carlos Perreira, keamanan
Celina da Costa Jeronimo, keuangan
Celina Martins, dukungan korban/produksi
Cesaltino B. Ximenes, pembaca pernyataan
Charmaine Chew, riset
Chris Roper, transkripsi
Christian Evert, teknologi informasi
Christine Hanson, pemeriksa fakta
Christine Schenk, produksi
Christine Vertucci, penghubung donor
Claire Taylor, keuangan
Constantino Pinto, administrasi
Cornelia de J. Soares, pemasukan data
Cornelio de Araujo, keamanan
Cristovao Perreira, rekonsiliasi/penulis
Daniel Gomes, administrasi
Darmawan Zaini, penerjemahan
David Alves Lopes, penulis
Deborah Katzman, dukungan korban
Delene Cuddihy, arsip
Deonisia M. Fernandes, rekonsiliasi
Derek Streulens, editorial
Dilva D. R. F. B. Costa, statistika
Diogo Neto Fraga, riset/penulis
Dircia M.C.G. de Andrade, administrasi/kampanye/arsip
Diva Maria Alves, pengembangan kelembagaan
Domingas da Silva, pemasukan data
Domingos Moniz, pemasukan data

Domingos S.F. Leite, rekonsiliasi
Domingos Savio Soares, sumberdaya manusia
Dominic Gray, penerjemahan
Douglas Kammen, riset
Duarte da Silva, pengembangan kelembagaan/kampanye
Dulce Junior, pengembangan kelembagaan
Dulce Trindade da Costa, arsip
Dwi Anggorowati Indrasari, penerjemahan
Eduardo Gonzalez, konsultan
Eleanor Taylor-Nicholson, editorial
Elisio P. Guterres Soares, pemasukan data
Elsa do Rosario Viegas da Costa, riset/pemeriksaan fakta
Emilio Barreto, rekonsiliasi/kampanye
Emily Chew, produksi
Emily Harwell, riset
Emily Langston, editorial
Emma Coupland, penghubung donor /pemeriksaan fakta
Eoghan Walsh, editorial
Ernestina dos Santos, statistika
Eufrasia da Crus, statistika
Eurico Celestino dos Reis Araujo, penerjemahan
Evalisa dos Reis Alves, pemasukan data
Fatima Gomes, pembersih
Felismina dos Santos da Conceicao, rekonsiliasi
Filipe H. dos Santos, logistik
Fiona Gleadow, arsip
Firman Maulana, penerjemahan
Florentina dos Santos, statistika
Florival A. dos Santos, keuangan
Francisca da Silva, hubungan masyarakat
Francisca Maia, produksi
Fred Rawski, riset
Fulgencio Aquino Vieira, riset/penulis/pemeriksa fakta
Galuh Wandita Soedjatmoko, manajemen program, wakil direktur, editorial
Geoffrey Gunn, riset
Geraldine Rodwell, arsip

Germano da Costa Boavida, penerjemahan

Gerry Van Klinken, riset

Gil Barros, pemasukan data/kesekretariatan

Gil Madeira, penerjemahan/produksi

Gunardi Handoko, penerjemahan

Harry Wibowo, editorial

Helene van Klinken, riset

Helio Freitas, riset/penulis/pemeriksa fakta

Hendrique M. de Jesus, logistik

Henriqueta D. C. Braz, statistika

Hermenegildo da Silva, pengambil pernyataan/pembaca pernyataan/penulis

Herminia H.F. de Oliveira, pengambil pernyataan/pembaca pernyataan/pemeriksa fakta

Hersri Setiawan, editorial

Horacio Abilio, teknologi informasi

Horacio de Almeida, penulis

Howard Varney, penulis

Hugo Fernandes, pencarian kebenaran/co-manajer laporan final

Ian White, produser film

Ignatius Edi Yuwono, logistik

Inge Lempp, penerjemah

Isabel Fernandes de Lima, sumberdaya manusia

Istutiah Gunawan Mitchell, penerjemah

Jacob Domingos Freitas, logistik/supir

Jacqueline Baker, riset

Jaime Agustinho Hanjam, sumberdaya manusia

Jaimito Candido da Costa, rekonsiliasi/kampanye

Jana Asher, statistika

Jason Good, arsip

Joao Baptista, direktur eksekutif

Joao F. Rendes, radio

Joao Francisco dos Reis Amaral, administrasi

Joao M.P. da Costa, radio

Joao M.S. Barreto, administrasi publik

Joao Maia Pereira, logistik/supir

Joao Rui Sarmento, pemasukan data

Joaquim Fonseca, konsultan
John Rouw, penasihat media
John Sheridan, pameran
John Waddingham, editorial
Jose Amaral, pemasukan data
Jose Caetano Guterres, dukungan program /arsip
Jose Custodio Marcal, hubungan masyarakat/arsip
Jose Goncalves de Araujo, riset
Jose Guilherme dos Reis, logistik
Jose Julio Soares, dukungan korban
Jose Meneses Serrao, dukungan korban
Jose Monis, logistik
Jose Virginia R.M. Cabral, riset
Josefa E. F.S. Guterres, pengambil pernyataan/pembaca pernyataan
Juliana da Silva, statistika
Juliana Do Rosario, pembersih
Juliao da Costa Cristovao Caetano, pengambil pernyataan/audiensi publik/produksi
Julie-Ann Ellis, editorial
Julien Poulson, desain grafis
Justin Fisher, statistika
Juvita dos Santos Guterres, koordinasi regional
Karen Campbell-Nelson, riset/editorial
Ken Ward, basis data
Kieran Dwyer, pengembangan kelembagaan/produksi/editorial
Kurnia Joedawinata, penerjemahan
Lakota Moira, desainer grafis
Lamartinho de Oliveira, hubungan media
Laura Henry, arsip
Laurindo Borges, keamanan
Leila Safira Assegaf, penerjemahan
Les Johnson, keuangan
Ligia Hermenegildo da Costa, keuangan
Ligia M. Lobato, statistika
Lisete Quintao, editorial
Liz Thompson, arsip
Luciana Ferrero, penerjemahan

Lucio B. N. Freitas, pembaca pernyataan
Lucio M.C.J. dos Santos, direktur eksekutif
Luisinha P. Martins, statistika
Lurdes Silveira, dukungan korban
Maeni Calado, penulis/pemeriksa fakta
Maggie McCafferty, arsip
Manuel da Cruz, pemasukan data
Manuel Fernandes Freitas, riset
Manuel Viegas, penerjemahan
Manuel X.M. Siqueira, logistik
Margaret Reid, arsip
Maria Aniceta F., pembaca pernyataan
Maria Linda X. Parada, pembaca pernyataan
Maria Rita Pires, produksi
Mariano N. de Carvalho, logistik/supir
Mario da Silva, logistik/supir
Mario Perreira de Jesus, keuangan
Mark Eastwood, keuangan
Martinho Mendes Perreira, hubungan masyarakat
Mateus Amaral, logistik/supir
Matheos Viktor Messakh, editorial
Matthew Easton, penulis
Maxine McKinney, dukungan korban
Megan Hirst, hukum
Melanie Lotfali, dukungan korban/editorial
Michelle Dukich, statistika
Miki Salman, penerjemahan
Monica Cardoso, pengembangan kelembagaan
Nadira Khalid, penerjemahan
Natercia D. J. Barreto, statistika
Nelson Freitas, teknologi informasi
Noemia Gomes Ferreira, riset
Noemio Alves, riset
Norberta Gomez, arsip
Nugroho Katjasungkana, riset/editorial
Orlando do Rego, logistik/supir

Palmira Carvalho, statistika
Pascoela da Costa, statistika
Pat Walsh, penasihat khusus/direktur eksekutif
Patrick Ball, statistika
Patrick Burgess, penasihat hukum utama
Paula Pinto, editorial
Penny Davies, arsip
Perpetua Sousa de Carvalho, pemasukan data
Peter Hoskings, dukungan korban
Peter Richardson, keuangan
Phyllis Ferguson, editorial
Piers Pigou, riset
Poriaman Sitanggang, fotografer
Rae Sheridan, pameran
Raimundo da Costa, administrasi
Remigia Viana, kesekretariatan
Remizio Soares, pembersih
Riamirta Dwiandini, penerjemahan
Ric Curnow, produksi video
Robin Taudevin, penulis
Romaldo Caetano, teknologi informasi
Romana Amelia Guterres, keuangan
Romesh da Silva, statistika
Rosario B. Amaral, statistika
Rosario de Araujo, dukungan program
Rose Magno, fotografer
Ross Clark, penulis
Rowan McRae, hukum
Salvador C. Amaral, logistik
Sancho Goncalves, pengambil pernyataan
Sandro Mendes Vong, logistik/supir
Sanne Van Den Bergh, riset/editorial
Santiago F. Belo, pembaca pernyataan/pemasukan data
Sebastiao do Rego Guterres, penerjemahan
Shakib Shahidian, penerjemahan
Sharon Riley, keuangan

Silvia V. D. S. Lopes, statistika

Simon Poppewell, editorial

Sophie Khan, riset

Stephanie Curran, editorial

Stephanie Lowe, produksi

Stephen Malloch, multimedia/teknologi informasi

Suryono, penerjemahan

Susana Barnes, pemrosesan data

Suzannah Linton, hukum

Suzannah Walsh, editorial

Teodoro Soares, riset

Teresa M. Abi Luis, rekonsiliasi

Teresa Maria de Carvalho, pengambilan pernyataan/pembaca pernyataan/pemasukan data

Titi Irawati, informasi publik

Toby Gibson, desain grafis

Tomas Manuel Correia, audiensi publik

Valentina Yulitah Dyah Utari, penerjemahan

Vanessa Corine Hearman, penerjemahan

Wendy Nimmo, keuangan

Willy van Rooijen, keuangan

Zelda Grimshaw, editorial

Zelia Maria da Costa, koordinasi regional

Zulmira M. Fernandes, statistika

Pelaksanaan mandat CAVR ditingkat regional

Komisaris Regional

Alarico da Costa dos Reis, Ainaro

Albino da Silva, Lospalos

Aleixo Ximenes, Baucau

Ana de Fatima Cunha, Maliana

Ana Maria dos Santos, Liquiçá

Antonio Alves Fahik, Covalima

Antonio Hermenegildo da Costa, Oecussi

Arnold Sunny, Oecussi

Carolina M.E. do Rosario, Baucau

Daniel Sarmento Soares,Viqueque
Domingas dos Santos, Maliana
Eduardo de Deus Barreto, Ermera
Egidio Maia, Ermera
Filomena Barros Perreira, Ainaro
Francisco dos Reis Magno, Maliana
Francisco Martins, Aileu
Geraldo Gomes, Manatuto/kampanye
Helena H.C. Gomes, Viqueque
Idelfonso Perreira, Manatuto
Jaime da Costa, Manufahi
Jose Joanico Pereira dos Santos, Dili
Jose Antonio Ote, Oecussi
Justino Valentin, Lospalos/penulis
Maria Fernandes Mendes, Liquiçá
Maria Nunes, Covalima
Meta Mendonca, Aileu/produksi
Pedro de Correia Lebre, Dili
Saturnio Tilman, Manufahi
Teresinha Maria Cardoso, Dili

Staf Kantor Regional

Aileu

Rosa Tilman de J. Santos, koordinasi regional/riset
Vicente das Neves, keuangan
Felipe de Araujo, logistik/supir
Francisco Vila Nova, keuangan
Domingos Aleixo, keuangan

Baucau

Armando Marques, koordinasi regional/arsip
Arthur Egas M. Freitas, keuangan
Paul R. Perreira, logistik/supir
Julio Ximenes Ribeiro, koordinasi regional
Mario Soares, koordinasi regional
Fernando dos Reis, keuangan

Januario da Costa, keamanan
Joao da Costa, keamanan
Joao de Brito X. Lica, hubungan masyarakat/keamanan

Bobonaro

Adriano Joao, koordinasi regional/penulis
Marcelino das Dores Ferreira, keuangan
Alberto S. G. Torrezao, logistik/supir
Julio de Deus, keamanan
Francisco Almeida, keamanan

Covalima

Francisco Duarte, koordinasi regional
Simao Luan, administrasi
Julio do Carmo, logistics/supir
Salvador Cardoso Amaral, keamanan
Henrique M. de Jesus, keamanan

Dili

Januario Magalhaes, koordinator regional
Maria Pascoela S. Perreira, keuangan
Livio dos Santos, logistik/supir
Francisco Duarte Guterres, koordinator regional
Jose Cornelio Guterres, koordinator regional
Jacinto da C. S., logistik/supir
Joaquim J. Perreira, keamanan
Albino Fatima, keamanan

Oecussi

Domingos Naro, keuangan
Domingos de C. Ximenes, keamanan
Firminio Fuca, keamanan

Staf Distrik

Aileu

Anabela C. de Andrade, pengambil pernyataan
Candido Maria Alves, koordinator distrik

Daniel Koli, logistik/supir
Francisco Sales Sarmento, hubungan masyarakat
Gastao Mendonca, pengambil pernyataan
Helia de Deus, pengambil pernyataan
Joanico da Silva, rekonsiliasi
Leonilda Barros Paixao, rekonsiliasi
Lordes da Silva, pengambil pernyataan
Maria Diamantina Martins, dukungan program
Martinho Rodrigues, pengambil pernyataan
Pedro Maia, pengambil pernyataan

Ainaro

Albertina R.B. Barros Amaral, pengambil pernyataan/pembaca data
Alberto da Reisureicao da S, koordinasi distrik
Alcino de Araujo, rekonsiliasi
Ana Maria Perreira, pengambil pernyataan
Arsenio Amaral, logistik/supir
Augusto Mendonca, pengambil pernyataan
Eduardo Almeida Barros, pengambil pernyataan
Martinha Ines Soi, rekonsiliasi
Silveira Maria de Araujo, dukungan korban
Tarcisio Mota, hubungan masyarakat

Baucau

Antonio F. Ximenes, hubungan masyarakat
Benvinda C. Rodrigues, pengambil pernyataan
Celestino D. C. Ximenes, koordinasi distrik/statistika
Cipriana Mendonca, pengambil pernyataan
Cristina Evonia Torres, dukungan korban
Jacinto H. Tomas, logistik/supir
Joana Aparicio G, dukungan korban
Juvinal E. Cabral, pengambil pernyataan/pembaca data
Lourenca Ximoes, rekonsiliasi
Manuel Tomas A. C., pengambil pernyataan/statistika
Sergio F. da Costa, rekonsiliasi
Virgina M.M. da Piedade, pengambil pernyataan

Bobonaro

Alfredo Cipriano Amaral, rekonsiliasi
Antonio Barreto Magno, pengambil pernyataan
Carmelita M. Amaral, pengambil pernyataan/statistika
Domingas Amaral Guterres, rekonsiliasi
Francisca Alzira, dukungan korban
Guilherme Goncalves Caeiro, koordinasi distrik/kampanye
Jose da Conceicao, hubungan masyarakat
Lambertus Koi Mau, logistik/supir
Marciana Goveia Leite, pengambil pernyataan/pembaca data
Roberto Gabriel, pengambil pernyataan/statistik

Covalima

Antonio Ximenes da Silva, logistik/supir
Bendita C. Barros, pengambil pernyataan
Cornelio Ferreira, rekonsiliasi
Filomena D.J. Moniz, pengambil pernyataan
Lidia do Carmo, rekonsiliasi
Lito da Costa Amaral, pengambil pernyataan
Maria B. de Deus, dukungan korban
mateus Alves, koordinator distrik
Thomas Barros, pengambil pernyataan
Vasco Cabecas de Araujo, hubungan masyarakat

Dili

Adriana Maria Candida Perreira, pengambil pernyataan/pembaca data
Agustinho de Rosa Fernandes Quintao, koordinator distrik
Ambrosio Graciano, pengambil pernyataan/pemasukan data
Charles de Carvalho Amaral, logistik/supir
Chiquito C. Guterres, rekonsiliasi/koordinator distrik/penulis/pemeriksa fakta
Duarte Goncalves, pengambil pernyataan/pembaca data
Jacinto D.S. Guterres, rekonsiliasi
Jorge H. de O. Martins, rekonsiliasi
Lolina Celeste, dukungan korban
Luizinha Ximenes G.A, dukungan korban
Natalino de J., hubungan masyarakat
Recardina Amaral de Araujo, pengambil pernyataan/pemasukan data

Ermera

Adriano Soares Lemos, pengambil pernyataan/pembaca data
Agusinho Soares, hubungan masyarakat
Antoninho S. Ximenes, rekonsiliasi
Fernanda A.P, pengambil pernyataan
Fernando Amado de Deus, logistik/supir
Jacinta A. Perreira, pengambil pernyataan
Mario Lopes, pengambil pernyataan
Maximiano C.L, logistik/supir
Romenia M. Perreira, dukungan korban
Valentin Rosario Babo, koordinator distrik
Virginia Perreira, rekonsiliasi

Lautém

Abilio Q. Pinto, pengambil pernyataan
Acacio dos Santos, koordinator distrik
Francisco dos Santos, rekonsiliasi
Gaspar de Sousa, pengambil pernyataan
Joao Vinhas, logistik/supir
Julio Maria de Jesus, hubungan masyarakat
Lolalina da C. Freitas, pengambil pernyataan
Marcelina de J. da Silva, pengambil pernyataan
Martinha da Costa Hornay, pengambil pernyataan/statistika
Octavio Ximenes, pengambil pernyataan/pemasukan data
Paula Jose Neves, dukungan korban
Serginha F. da Conceicao, rekonsiliasi

Liquiçá

Cristina A. Alves Liu, rekonsiliasi
Edelmiro Jose de Jesus, rekonsiliasi
Eurico dos Santos, pengambil pernyataan
Evaristo Paulo dos Santos, pengambil pernyataan/pemasukan data
Fatima L. Alves, pengambil pernyataan
Jaime Felipe Babo, logistik/supir
Jaimito Minezes, pengambil pernyataan
Joaquim Araujo dos Santos, hubungan masyarakat
Juvita Abuk; pengambil pernyataan

Liberata M. Filomena fos Santos, dukungan korban
Manuel Luis, hubungan masyarakat
Vicente de Jesus, koordinator distrik

Manatuto

Amelia Barros Gusmao, pengambil pernyataan/pembaca data
Carlito Pinto, pengambil pernyataan
Celestino Tomas Soares, koordinator distrik
Cesaltina B. Gomes, dukungan korban
Ciriaco da Costa, rekonsiliasi
David Xavier; hubungan masyarakat
Francisco Soares, logistik/supir
Jose Guteres Lay, pengambil pernyataan, statistika
Luciana Guterres, pengambil pernyataan
Maria Aguida Alves, dukungan korban
Rita G. Correia, rekonsiliasi

Manufahi

Abel Oliveira T. Belo, logistik/supir
Afonso Henrique C.M, koordinator distrik
Carlos Fernandes, hubungan masyarakat
Filipe Neri, pengambil pernyataan
Francisca M.M.D. Sarmento, pengambil pernyataan/pembaca data
Gregoriano P.P. Tilman, pengambil pernyataan
Laurindo Reis Fernandes, rekonsiliasi
Ligia Ferreira, rekonsiliasi
Robelia M.M.C, dukungan korban
Sancha Maria Xavier, pengambil pernyataan/pembaca data

Oecussi

Amelia Perreira, dukungan korban
Andre Lao, pengambil pernyataan/pembaca data
Brigida M. Napan, rekonsiliasi
Emilia Hornai, pengambil pernyataan
Fidelio Gonsalo Ribeiro, hubungan masyarakat
Francisco Colo, logistik/supir
Fredos Elo, pengambil pernyataan

Inacia Tamela, dukungan korban
Jacinta Goncalves, pengambil pernyataan/statistika
Jaime Corbafo, koordinator distrik
Januari Nesi, rekonsiliasi

Viqueque

Alzira dos Santos, pengambil pernyataan/pembaca data
Arthur Mario, pengambil pernyataan/statistika
Helena Soares, rekonsiliasi
Henrique M.L. Pinto, koordinator distrik
Jose Moniz, logistik/supir
Jose S. Amaral, rekonsiliasi
Napoleao de Almeida, pengambil pernyataan
Olimmpia da Silva, dukungan korban
Pascoal G. Martins, hubungan masyarakat
Rosa de Jesus, pengambil pernyataan

Dewan Penasihat

Ana Pessoa
Bishop Alberto Ricardo da Silva
Bishop Basilio do Nascimento
Bishop Carlos Felipe Ximenes Belo, SDB
Ian Martin
Jose Ramos-Horta
Maria Fatima Gomes
Mary Robinson
Munir Said Thalib
Saparinah Sadli
Sergio Vieira de Mello

Mereka yang memberi pernyataan pada CAVR

Sebanyak 7.824 orang dari seluruh penjuru Timor-Leste memberi pernyataan kepada CAVR tentang pengalaman mereka pada periode mandat CAVR. Nama-nama mereka tidak dicantumkan di sini karena ruang yang ada tidak mencukupi dan untuk menghargai kerahasiaan yang telah diminta oleh sebagian orang yang memberi pernyataan kepada CAVR.

CAVR ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada setiap orang yang telah memberi pernyataan pada CAVR, yang telah membantu kami untuk mengungkapkan fakta dan mencari kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusi yang terjadi selama periode mandat.

Mereka yang berpartisipasi dalam PRK

Sebanyak 1.541 orang memberi pernyataan pada Proses Rekonsiliasi Komunitas. 1.371 dari mereka selesai menjalankan proses audiensi PRK. Sekali lagi, karena alasan karena ruang yang tidak mencukupi dan asas kerahasiaan nama-nama mereka tidak dicantumkan disini.

CAVR ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada setiap orang dan komunitas yang telah berpartisipasi dalam Proses Rekonsiliasi Komunitas.

Peserta lokakarya pemulihan

Ainaro

Agapito Xavier
Ana Maria
Angelina da Costa
Bendita da Silva
David Rodriques
Esperanca Mendonca
Felismina Araujo
Fernanda da Costa
Jacinta da Silva
Margarida Pereira
Martinha da Costa
Olga Corte-Real

Aileu

Antonia Sarmento
Cornelio Soares Pinto
Evaristo Moniz
Gaspar Belo
Joana Martins
Joao Baptista
Joao Mendonca
Jose da Costa
Juliana Martins
Marcos Exposto
Martinho da Costa
Moises da Costa Braz
Odelia Frederico
Terezinha Lere Brito

Baucau

Alberto Freitas
Celestina Guterres
Deolindo Hornai Ximenes
Domingas Sebastiana
Domingos da Costa
Etelvina Ximenes
Filomena Belo
Joaquina dos Reis Gaio
Maria Teresa
Rosa Belo
Teresa Belo

Covalima

Albertina Rica
Ana Amaral
Jose Braz Tilman
Maria Cardoso
Maria da Costa
Martinha Amaral

Olinda de Araujo
Romao Clementino
Rosa Colo Bere
Rosalina Moniz
Rosalinda Abuk
Salvador Gusmao
Vitoria Cardoso

Dili

Acacio da Costa Carvalho
Antonio Lima
Aquino Pereira
Berta Soares
Carlos Barreto
Cristovao Paixao
Filomena Alves
Floriana Nunes Saldanha
Geronimo Ximenes
Hilaria Olandina C.
Ines de Carvalho
Joao Bosco Pinto
Jose Amaral
Jose Nunu Lopes
Jose Soares
Maria Araujo Alves
Maria Lucia
Rita de Oliveira
Rofino Soares
Romeo da Conceição
Silveiro Martins

Ermera

Abrao Aleixo Conceição
Adriano Soares
Alda Babo
Alda Martins

Carlito Soares
Delfin Pereira
Felixberto S. M. Ximenes
Imaculada da Conceição
Juliana da Cruz
Juliana Soares
Luis Tilman
Luiza Doutel Pereira
Olandina dos Santos
Rafael Freitas
Rosita Madeira

Lautém

Amelia da Costa
Angelina da Silva
Antonio Miranda
Casimiro Justo dos Santos
Cristina Quimaraes
Eudosia da Costa
Felixberta Madeira
Jeremias dos Reis
Joana Pinto
Luis da Costa
Luis Mouzinho
Maria Martins
Maria Ornai
Marta Ximenes
Regina Freitas
Sita Jeronimo
Zeferino Freitas

Liquiçá

Celestina Soares
Domingos Santana Cardoso
Florindo de Jesus
Humberto Afonso

Jose da Silva
Manuel S. Lopes
Roberto Nunes
Virginia dos Santos

Maliana

Angelina Nunes
Bernadino Loe Leto
Fernando Gusmao
Flaviano Daubere
Jacob dos Santos
Luis Afonso
Maria Belo Asis
Maria Soares
Mario Bereceu
Mario Goncalves
Olandina Veronica
Sabina Marcelo Martins
Veronica Moniz

Manatuto

Adriano Pereira
Beatris Soares
Joana da Costa
Joana da Costa
Joao da Cunha
Jose dos Santos
Lurdes Esperito Santos
Maria Jose
Olinda
Victor de Jesus

Manufahi

Carlito da Costa
Alarico dos Santos
Amandi da Costa

Camelia da Costa
Lucia de Jesus
Mateus Torejao
Mateus da C. Amaral
Oecussi
Fatima Aban
Filomena Elu
Jacinta Abi
Manuel Infen
Marcelina Poto
Paulina Foni
Teresa Sila

Viqueque

Aquelina
Daniel da Silva
Etelvina da Costa Guterres
Mateus Soares
Placido
Raimundo Ruas
Saturlina Ximenes
Sixto Fernandes

Daftar istilah dan singkatan

Singkatan/ istilah	Kepanjangan	Keterangan/Terjemahan
a política comanda fuzil		politik memerintah senjata
ABC	Australian Broadcasting Corporation	
ABITL	Asosiasaun Biblioteka no Informasaun Timor-Leste	Asosiasi Perpustakaan dan Informasi Timor-Leste
ABLAI	Aku Berjuang Laksanakan Amanat Integrasi	Milisi dari Same
ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	Setelah restrukturisasi 1 April 1999, disebut Tentara Nasional Indonesia (TNI)
ACET	Australian Coalition for East Timor	Jaringan Solidaritas Australia untuk Timor-Leste
ACFID	Australian Council for International Development	
ACFOA	Australian Council for Overseas Aid	
Aditla	Associação Democratica para a Integração de Timor Leste na Austrália	Asosiasi Demokratis untuk Integrasi Timor-Leste ke dalam Australia
AETA	Australia East Timor Association	
AFFET	Australian for a Free East TImor	
AHC	Australian High Commission	
AHI	Alieu Hametin Integrasi	Alieu Memperkuat Integrasi (milisi dari Alieu)
AI	Amnesty International	
AIETD	All-Inclusive intra-East Timorese Dialogue	Dialog Menyeluruh Antar-orang Timor
Aitarak		Berarti “duri” (milisi dari Dili)
AKSI	Aksi Solidaritas Indonesia	Kelompok solidaritas Australia untuk Indonesia
ALP	Australian Labor Party	Partai Buruh Australia
ANC	African National Congress	Kongres Nasional Afrika
Apartidarismo		tradisi militer Portugis untuk berada di luar politik
APCET	Asia-Pacific Coalition for East Timor	Koalisi Asia-Pasifik untuk Timor-Leste, kelompok solidaritas yang berbasis di Filipina
APEC	Asia Pacific Economic Co-operation	Kelompok Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik

APIK	Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan	
Apodeti	Associacão Popular Democratica Timorense	Asosiasi Demokratik Populer Timor
arma branca		pasukan putih, disebut juga *força popular*, unit pertahanan sipil
ARMUI	Atabae Rela Mati untuk Integrasi	Milisi dari Atabae
ASA	Asia Students' Association	Asosiasi Pelajar Asia, kelompok solidaritas yang berbasis di Hong Kong
ASDT	Associação Popular Democrática Timorense	Perkumpulan Kerakyatan Demokratik Timor
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations	Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara
Asintel	Asisten Intelijen	
ASSEPOL	Association of Ex-political Prisoner	Asosiasi mantan tahanan politik
Assistente Comissáriado		asisten komisariat
ASTO	Association de Solidarite avec Timor-Oriental	Asosiasi Solidaritas Bersama Timor-Leste, kelompok solidaritas Timor-Leste berbasis di Prancis
AW	Asia Watch	
AWD	Action for World Development	LSM Australia
Babinsa	Bintara Pembina Desa	
BAe	British Aerospace	
Bais	Badan Intelijen Strategis	
Bakin	Badan Koordinasi Intelijen Negara	
BAP	Berita Acara Pemeriksaan	
Bappeda	Badan Perencana Pembangunan Daerah	
bases de apoio		basis resistansi
BBC	British Broadcasting Corporation	
BCET	British Coalition for East Timor	Jaringan Solidaritas Inggris
BCIET	British Campaign for an Independent East Timor	Kelompok solidaritas Inggris (pra-1980)
BENETECH	Beneficent Technology	Organisasi analisis data, berbasis di Amerika Serikat
Binpolda	Bintara Polisi Desa	
BKKBN	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	
BMP	Besi Merah Putih	Milisi dari Liquiçá

BP7	Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	
BPS	Biro Pusat Statistik	
Brichoq	Brigada de Choque	Brigade Gerak Cepat
Brigada Dinamisadora		Brigade Dinamisator
Brimob	Brigade Mobil	
BRTT	Barisan Rakyat Timor Timur	Pro-otonomi
BTT	Batalion Tenaga Teritorial	
CAA	Community Aid Abroad	
CAAT	Campaign Against the Arms Trade	LSM Inggris
Cartão Salva Conduto		"Kartu Perlakuan Aman", digunakan oleh Fretilin semasa konflik internal 1975
CAVR	Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliacao	Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi
CAWG	Canada Asia Working Group	Kelompok Kerja Asia-Kanada
CCF	Comite Central Fretilin	Komite Sentral Fretilin
CCR	Centre for Constitutional Rights	Pusat Hak Konstitusional, Amerika Serikat
CCT	Centro para a Cidadania Timorense	Pusat Kewarganegaraan Timor, kelompok bantuan, berbasis di Portugal
CDPM	Comissão para os Direitos do Povo Maubere	Komisi untuk Hak-hak Rakyat Maubere (kelompok solidaritas Portugis)
CDR	Comité Democrático Revolucionária	Komite Demokratis Revolusioner
CE	Comité Executivo, atau Comité Executivo da CNRM na Frente Clandestina	Komite Eksekutif atau Komite Eksekutif CNRM bagi Front Klandestin
CEDAW	Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women	Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan
Ceforpol	Centro da Formação Política	Pusat Pendidikan Politik
Celcom	Celula de Comunidade	Sel Masyarakat
CEL/FA	Comité Executivo da Luta/Frente Armada	Komite Eksekutif Perjuangan/Front Bersenjata
CEL/FC	Comité Executivo da Luta/Frente Clandestina	Komite Eksekutif Perjuangan/Front Klandestin
CEP	Community Empowerment Project	Proyek Pemberdayaan Komunitas, didanai oleh TFET dan dikelola oleh Bank Dunia
Centro de Instrução		pusat pelatihan tentara
cerco e aniquilamento		pengepungan dan pemusnahan

Cernac	Centros da Resistência Nacional	Pusat Resistansi Nasional
Cezo	Comité Executivo da Zona	Komite Eksekutif Zona
CIA	Central Intelligence Agency	Organisasi pemerintah Amerika Serikat
CIDAC	Centro de Informação e Documentação Amílcar Cabral	Pusat Dokumentasi dan Informasi Antikolonial, di Portugal
CIET	Campaign for an Independent East Timor	Kampanye Timor-Leste Merdeka, berbasis di Australia dan Inggris
CIIR	Catholic Institute for International Relations	Lembaga Katolik untuk Hubungan Internasional, berbasis di Inggris
CNRM	Conselho Nacional da Resistência Maubere	Dewan Nasional Resistansi Maubere
CNRT	Conselho Nacional de Resistência Timorense	Dewan Nasional Resistansi Rakyat Timor
comandante da zona		komandan zona
comando da região		komando region
comando da zona		komando zona
comando de sector		komando sektor
Comissão de Inquêrito		Komisi Penyelidikan
Comissário Político Nacional		Komisaris Politik Nasional
Companhias		kompi
CPA	Communist Party of Australia	Partai Komunis Australia
CPCC	Comissão de Planeomento e Coordinacao de Capanha	Komisi untuk Perencanaan dan Koordinasi Kampanye
CPN	Comissão Política Nacional	Komisi Politik Nasional
CPD-RDTL	Conselho Popular de Defesa Republica de Timor-Leste	Dewan Pertahanan Populer Republik Timor-Leste
CPLP	Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	Komunitas Negara-negara Berbahasa Portugis
CRC	Convention on the Rights of the Child	Konvensi Hak Anak, PBB
Crèche		tempat penitipan anak
Critíca - auto critíca		kritik-otokritik
CRNJT	Comissão do Resistência Nacional do Jovem de Timor-Leste	Komisi Timor-Leste untuk Resistansi Pemuda Nasional
CRRN	Conselho Revolucionario de Resistência Nacional	Dewan Revolusioner Resistansi Nasional
CRS	Catholic Relief Services	LSM, berpusat di Amerika Serikat
CSIS	Centre for Strategic and International Studies	Berpusat di Jakarta

CSRNET	Comissão Secreto da Resistência Nacional dos Estudantes Timorense	Komisi Rahasia Resistansi Nasional Pelajar/Mahasiswa Timor-Leste
Curlog	Penghancuran Logistik	Operasi militer untuk menghancurkan pasokan Falintil, setelah 1984
Dandim	Komandan Kodim	
Danramil	Komandan Koramil	
Danton	Komandan Peleton	
DDII	Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia	
DEF	Delegação Externa da Fretilin	Delegasi Luar Negeri Fretilin
Depnaker	Departemen Tenaga Kerja	
Despartidarização		pemutusan hubungan kepartaian
DFSE	Delegação da Fretilin em Serviço no Exterior	Fretilin dalam Tugas Luar Negeri
DMP	Dadurus Merah Putih	Kibaran Merah Putih, milisi dari Maliana
Dolog	Depot Logistik	
DOPI	Departemento da Orientação Política e Ideológica	Departemen Orientasi Politik dan Ideologi
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat	
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
DRSE	Delegação da Resistência em Serviço no Exterior	Delegasi Resistansi dalam Tugas Luar Negeri
DSMPTT	Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor-Timur	
ECHO	European Commission Humanitarian Office	Komisi Eropa Kantor Humaniter
ECHR	European Court of Human Rights	Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia
EEC	European Economic Community	Komunitas Ekonomi Eropa
ELSAM	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat	
Equipa		kelompok kerja
Escuiteiro		Kepanduan Katolik
Estado Maior das Falintil		Staf Umum Falintil
Estafeta		Kurir klandestin untuk Resistansi
ETISC	East Timor Ireland Solidarity Campaign	
ETADEP	East Timor Agriculture and Development Project	Proyek Pembangunan dan Pertanian Timor Timur, LSM Timor-Leste

ETAN/Canada	East Timor Alert Network	Kelompok solidaritas Kanada
ETAN/US	East Timor Action Network	Kelompok solidaritas Amerika Serikat
ETCJ	East Timor Coalition Japan	Kelompok solidaritas Jepang
ETHRC	East Timor Human Rights Centre	Kelompok pemantau masalah hak asasi manusia, berbasis di Australia
ETSSC	East Timor Students Solidarity Council	*lihat* DSMPTT
ETRA	East Timor Relief Association	Kelompok solidaritas Australia
ETTA	East Timor Transitional Administration	Dibentuk semasa misi UNTAET
ET-WAVE	East Timorese Women against Violence and for Child Care	LSM Perempuan Timor-Leste
EU	European Union	Uni Eropa
FADE	Forças Auto Defesa	Pasukan Pertahanan-diri (Timor-Leste)
Falintil	Forças Armada de Libertação Nacional de Timor-Leste	Tentara Bersenjata Pembebasan Nasional Timor-Leste
FBP	Fabrica de Braco de Prata	Pistol Portugis (digunakan semasa konflik internal)
FD	Frente Diplomatica	Front Diplomatik (Timor-Leste)
FDTL	Forças de Defesa de Timor-Leste	Pasukan Pertahanan Timor-Leste
Felectil	Frente Estudantil Clandestina de Timor-Leste	Front Pelajar/Mahasiswa Klandestin Timor-Leste
FET	Friends of East Timor	Sahabat Timor-Leste, kelompok solidaritas Australia, berbasis di Perth
FNLA	Frente Nacional para a Libertação de Angola	Front Nasional Pembebasan Angola
Fokupers	Forum Komunikasi untuk Perempuan Lorosae	
Força Auto Defesa		Pasukan Pertahanan
Forsarepetil	Forum Sarjana Pro-Referendum dan Pembangunan Timor-Leste	
Forsolidareste	Forum Solidaritas Timor-Leste	
Fortilos	Forum Solidaritas Rakyat Timor Lorosa'e	
FPDK	Forum Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan	
FPI	Frente Politico Internal	Front Politik Dalam Negeri
Frelimo	Frente de Libertação de Moçambique	Front Pembebasan Mozambik
Frente Armada		Front Perjuangan Bersenjata
Frente Clandestina		Front Perjuangan Klandestin
Frente Diplomática		Front Perjuangan Diplomatik
Fretilin	Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente	Front Revolusioner Timor-Leste Merdeka

G3		Senapan G3, senapan standar yang dikeluarkan NATO, aslinya buatan Heckler&Koch dari Jerman, digunakan oleh militer Portugis
Gadapaksi	Garda Muda Penegak Integrasi	Kadang disebut juga sebagai 'Garda Paksi' atau 'Gardapaksi'
Golkar	Golongan Karya	
GPK	Gerakan Pengacau Keamanan	Istilah Indonesia untuk Fretilin/Falintil.
GUETISG	Glasgow University East Timor and Indonesia Support Group	
Halilintar		Milisi dari Bobonaro
HAM	Hak Asasi Manusia	
Hansip	Pertahanan Sipil	
HPPMAI	Himpunan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Anti-Integrasi	
HRDAG	Human Rights Data Analysis Group	Kelompok Analisis Data Hak Asasi Manusia
HRVD	Human Rights Violations Database	Basis data pelanggaran hak asasi manusia
HRW	Human Rights Watch	
IAPC	Indonesia Australia Programme for Cooperation	Program Kerjasama Indonesia Australia
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights	
ICESCR	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights	
ICIET	International Commission of Inquiry on East Timor	Penyelidik Internasional atas Timor-Leste
ICJ	International Court of Justice	Mahkamah Internasional
ICRC	International Committee of the Red Cross	Komite Internasional Palang Merah
ICTJ	International Center for Transitional Justice	Berbasis di New York
IDP	Internally Displaced Persons	Pengungsi internal
IETP	Indonesia East Timor Programme	
IFET	International Federation for East Timor	Jaringan solidaritas global
IGGI	Inter-governmental Group on Indonesia	Konsorsium bantuan multilateral untuk Indonesia
IMF	International Monetary Fund	Dana Moneter Internasional

Imparsial		Organisasi yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.
Impettu	Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur	
INFID	International NGO Forum on Indonesian Development	
Infight	Indonesian Front for Human Rights	
Interfet	International Force for East Timor	Pasukan internasional PBB, tiba di Timor-Leste pada 20 September 1999
IOM	International Organisation for Migration	Organisasi Migrasi Internasional
IPJET	International Platform of Jurists for East Timor	Kelompok solidaritas Belanda
IPTL	Igerja Protestante Timor-Leste	Gereja Protestan di Timor-Leste
IRC	International Refugee Council	
IWGIA	International Working Group on Indigenous Affairs	Berbasis di Denmark
JAM	Joint Assessment Mission	Misi yang dikelola oleh Bank Dunia, dibentuk pada September 1999 untuk menilai apa saja kebutuhan Timor-Leste
JCCJP	Japan Catholic Council for Peace and Justice	
JCDET	Joint Committee for the Defense of East Timor	LSM Indonesia
JICA	Japanese International Co-operation Agency	
JKPIT	Jaringan Kesehatan Perempuan Indonesia Timur	
JRS	Jesuit Refugee Services	
JSMP	Justice System Monitoring Program	
Kaditsospol	Kepala Direktorat Sosial Politik	
Kaixa	Kaixa Central	Secara harfiah berarti “kotak”: suatu unit dalam jaringan Klandestin yang berfungsi menyediakan bantuan logistik
Kapolsek	Kepala Polisi Sektor	
Kapolwil	Kepala Kepolisian Wilayah	
Kasdim	Kepala Staf Kodim	
Kasi I	Kepala Seksi I (Intelijen)	
katuas		para tetua

Kiper	Komite Independen Pemantau Suara	
KIN	Koordinasi Intelijen Nasional	
KMP	Kaer Metin Merah Putih	Pegang Erat Merah Putih (milisi dari Bobonaro)
Kodam	Komando Daerah Militer	
Kodim	Komando Distrik Militer	
Kolakops	Komando Pelaksanaan Operasi	
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	
Kontras	Komisi untuk Orang-orang Hilang dan Korban Kekerasan	
Kopassandha	Komando Pasukan Sandhi Yudha	Komando perang rahasia, pasukan khusus, 1971 – 1986
Kopassus	Komando Pasukan Khusus	1986 – sekarang
Kopkamtib	Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban	
Koramil	Komando Rayon Militer	
Korpri	Korps Pegawai Republik Indonesia	
Kostrad	Komando Cadangan Strategis AD	
KOTA	Klibur Oan Timor Aswain	Perkumpulan Ksatria Putra Timor
Kotis	Komando Taktis	
Kowil	Komando Wilayah	
KPN	Komisi Penyelidikan Nasional	
KPPHAM	Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM	Diadakan untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Timor-Leste
KPS	Komisi Perdamaian dan Stabilitas	
KUHAP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana	
KUHPM	Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer	
Laksaur		Milisi dari Covalima
Levantamento		pemberontakan
Linud	Lintas Udara	
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	
LP	Lembaga Pemasyarakatan	

LKMD	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa	
M-16		Senapan otomatis buatan Amerika Serikat yang digunakan oleh militer Indonesia
Mahidi	Mati Hidup Demi Integrasi	Milisi dari Ainaro
Mamtim	Mahasiswa Muslim Asal Timor Timur	
Manual e Programa Politicos da Fretilin		Pedoman dan Program Politik Fretilin
mata dalan		pemimpin
Maubere		Istilah yang dipakai oleh Fretilin pada 1974 untuk mengacu kepada masyarakat Timor biasa.
MFA	Movimento das Forças Armadas	Gerakan Angkatan Bersenjata, bertanggung jawab menggulingkan rezim Portugis Salazar-Caetano pada 25 April 1974.
Miplin	Milicia Popular de Libertacao Nacional	Milisi Rakyat untuk Pembebasan Nasional
MMIETS	Mary McKillop Institute of East Timor Students	LSM Australia
MoU	Memorandum of Understanding	Catatan perjanjian
MPLA	Movimento Popular de Libertação de Angola	Gerakan Populer Pembebasan Angola
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat	
MSF	Médecins Sans Frontières	Dokter Lintas-Batas
Mudika	Muda-mudi Katolik	
MUITD	Movimento para Unidade e Independência de Timor-Dili	Gerakan untuk Persatuan dan Kemerdekaan Rakyat Timor
Nanggala		Kode untuk Kopassus
NATO	North Atlantic Treaty Organization	
NCCJP	Netherlands Catholic Comission for Justice and Peace	
Nurep	Nucleo da Resistência Popular	Inti Resistansi Rakyat, struktur klandestin di tingkat desa.
OCR	Organização Coordinadora Inter-Regional	Organisasi Koordinasi Antar-Wilayah
ODIR	Orgão Directiva Regional	Organ Pengarah Regional
OHCHR	Office of the High Commissioner of Human Rights	Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (di PBB)
OJETIL	Organização da Juventude e dos Estudantes de Timor-Leste	Organisasi Pemuda dan Pelajar dari Timor-Leste

OPB	Operasi Pagar Betis	Disebut juga dengan Operasi Kikis, operasi militer Indonesia pada awal 1980-an
OPJT	Organização Popular Juventude de Timor	Organisasi Rakyat Pemuda Timor
OPMT	Organização Popular de Mulher Timor	Organisasi Rakyat Perempuan Timor
OPS	Organização Popular de Seguranca	Organisasi keamanan
Opsus	Operasi Khusus	
OSIS	Organisasi Siswa Intra-Sekolah	
OV-10	OV-10A Bronco	Pesawat terbang ringan buatan Amerika Serikat yang digunakan oleh militer Indonesia.
Pangdam	Panglima Kodam	
Pasmar	Pasukan Maritim	
A Paz é Possivel em Timor-Leste		Perdamaian Mungkin Dicapai di Timor-Leste, kelompok solidaritas Portugis
PBHI	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia	
PCI	Pax Cristi International	
PDI-P	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan	
pelotões		peleton
Permesta	Perjuangan Rakyat Semesta	Gerakan separatis dari Sulawesi Utara
PGI	Persatuan Gereja Indonesia	
PIDE	Polícia Internacional de Defesa do Estado	Polisi Internasional untuk Pertahanan Negara, polisi rahasia Portugis
PIJAR	Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi	Kelompok solidaritas Indonesia
Pikul	Pengembangan Institusi dan Kapasitas Lokal	LSM Indonesia
PKF	Peacekeeping Forces	Pasukan Perdamaian PBB
PKI	Partai Komunis Indonesia	
PKK	Program Kesejahteraan Keluarga	
PMLF	Partido Marxista-Leninista Fretilin	Partai Marxis-Leninis Fretilin
PMP	Pendidikan Moral Pancasila	
PNT	Partido Nacionalista TImorense	Partai Nasionalis Timor
PNTL	Policia Nacional Timor-Leste	Polisi Nasional Timor-Leste
POKASTIM	Kelompok Kerja Kesejahteraan dan Pendidikan Timor Timur	Kelompok solidaritas Indonesia

Polda	Polisi Daerah	
Polri	Polisi Republik Indonesia	
Polsek	Polisi Sektoral	
Polres	Polisi Resort	
Polwil	Polisi Wilayah	
POM	Polisi Militer	
PPATN	Panti Penyantunan Anak Taruna Negara	
PPI	Pasukan Pejuang Integrasi	
PR	Pax Romana	Organsiasi Perdamaian Katolik
Prada	Prajurit Dua	
Pratu	Prajurit Satu	
PRD	Partai Rakyat Demokratik	
PRK	Prosedur Rekonsiliasi Komunitas	Salah satu mandat CAVR
Propriedade estatal		Lahan milik negara
Protap	Prosedur Tetap	
PRRI	Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia	
PSD	Partido Social Democratica	Di Timor-Leste
PSDC	Partido Social Democrata Cristão	Partai Sosial Demokratik Kristen (Guinea Bissau)
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat	
Quartel Geral		Markas besar militer Portugis di Dili
RAFT	Reunite in Australia the Families of East Timor	Kelompok solidaritas yang berbasis di Melbourne
Ratih	Rakyat Terlatih	
RDT-L	Republica Democratica Timor-Leste	Republik Demokratik Timor-Leste
Renal	Rehabilitacão Nacional	Pusat penahanan Fretilin, 1976 - 1979
Renetil	Resistência Nacional Estudantes de Timor-Leste	Resistansi Nasional Pelajar/Mahasiswa Timor-Leste
Repelita	Rencana Pembangunan Lima Tahun	
RER	Reajustamento Estrutural da Resistência e Proposta da Paz	Penyesuaian-Ulang Struktural Resistansi dan Usulan Perdamaian
RK	Rukun Keluarga	Setingkat di atas RT
RMS	Retrospective Mortality Survey	Survei Tingkat Kematian Retrospektif

RPKAD	Resimen Para-Komando Angkatan Darat	Nama Pasukan Khusus sebelum menjadi Kopassandha
RT	Rukun Tetangga	
RTP	Resimen Tim Tempur	
SAETA	Sydney Australia East Timor Association	
Sagrada Familia		"Keluarga Suci" – organisasi klandestin kuasi-religius
Sakunar		Kalajengking, milisi dari Oecussi
Sang Tai Hoo		Bekas toko Cina yang dipakai oleh militer Indonesia sebagai pusat penahanan
SAPT	Sociedade Agricola Patria e Trabalho	Perusahaan pertanian Portugis yang beroperasi di Timor-Leste semasa kolonial.
SARET	Special Autonomous Region of East Timor	
Satgas	Satuan Tugas	
Satgas Intel	Satuan Tugas Intelijen	
Satgas P3TT	Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur	
Satpur	Satuan Tempur	
SCU	Serious Crimes Unit	Unit Kejahatan Berat, dibentuk oleh UNTAET; setelah kemerdekaan Timor-Leste, dimasukkan dalam struktur Kantor Jaksa Agung.
Sekwilda	Sekretariat Wilayah Daerah	
SGI	Satuan Gabungan Intelijen	Sampai 1993.
Simonov	Senapan Simonov	Senapan semi-otomatis Rusia, digunakan oleh polisi Indonesia
Solidamor	Solidaritas Indonesia untuk Perdamaian Timor Timur	
SPRIM	Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Maubere	
SRSG	Special Representative of the Secretary General	Wakil Khusus Sekretaris Jenderal
Sub Chefe do Estado Maior		Wakil Kepala Staf
suicido ideológico		'bunuh diri ideologis'
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional	

TAPOL	Tahanan Politik	Juga merupakan nama kelompok yang berbasis di London, yang memaparkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia
TFET	Tenaga Bantuan Operasi	Anak-anak dan kaum lelaki yang digunakan oleh ABRI sebagai pengangkut barang, pembantu, dsb.
TFET	Trust Fund for East Timor	Dikelola oleh Bank Dunia
Tim Alfa		Milisi dari Lospalos
Tim Saka		Kelompok paramiliter Baucau yang menjadi milisi pada 1999.
Tim Sera		Kelompok paramiliter Baucau yang menjadi milisi pada 1999.
TIS	Timor Information Service	Layanan Informasi Timor, LSM Australia
TKTB	Tim Kemanusiaan Timor Barat	
TNI	Tentara Nasional Indonesia	
Tokodede		Bahasa yang dipakai di Distrik Liquiçá
Trabalhista	Partido Trabalhista	Partai Buruh (Timor-Leste)
TPD	Tim Pembina Desa	
TPPP	Tim Pelaksana Pembangunan Pusat	
TPR	Tentara Pembebasan Rakyat	
TVTL	Televisi Timor-Leste	
UDHR	Universal Decralation of Human Rights	
UDT	União Democratica Timorense	Uni Demokratik Timor
UNAA	United Nations Association of Australia	
UNAMET	United Nations Mission in East Timor	Misi PBB yang dibentuk untuk melaksanakan Konsultasi Rakyat pada 30 Agustus 1999
UNATIL	Universidade Nacional Timor-Leste	Nama universitas tertua di Dili setelah 1999 (sebelumnya Untim)
UNHCR	United Nations Commission on Human Rights	
UNDP	United Nations Development Program	
Unetim	União Nacional dos Estudantes de Timor	Persatuan Nasional Pelajar Timor
UNFPA	United Nations Population Fund	
UNHCHR	United Nations High Commissioner for Human Rights	
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees	

UNICEF	United Nations Children's Fund	
UNITA	União Nacional para a Independência Total de Angola	Persatuan Nasional untuk Kemerdekaan Penuh Angola
Unidade Nacional		Persatuan Nasional
UNMISET	United Nations Mission of Support in East Timor	20 Mei 2002 – 19 Mei 2005
UNSCD	United Nations Special Committee on Decolonisation	
UNTAET	UN Transitional Administration in East Timor	25 Oktober 1999 – 19 Mei 2002
UNTAS	Unidades Timor Asswain	Persatuan Ksatria Timor
Untim	Universitas Timor TImur	Nama lama universitas tertua di Dili (sebelum 2000)
USAID	U.S. Agency for International Development	
vias de canais		Saluran penghubung
Wanra	Perlawanan Rakyat	
WB	World Bank	Bank Dunia
WCC	World Council of Churches	
WFP	World Food Programme	
WHO	World Health Organisation	
WTO	World Trade Organisation	
WV	World Vision	
YAKIN	Yayasan Kesejahteraan Islam Nasrullah	
Yayasan HAK	Yayasan Hukum, Hak Asasi, dan Keadilan	
YLBHI	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia	
Yon Armed	Yonif Artileri Medan	
Yonif	Batalion Infanteri	
Zipur	Zeni Tempur	
zonas libertadas		zona bebas

Indeks

5 Mei, Kesepakatan 159, 304, 315 - 322, 325, 326, 328, 422, 439, 669, 699, 770, 1169, 1173, 1198, 1247,1928, 1930, 1932, 2547, 2631, 2635, 2651, 2652, 2653

12 November, Peristiwa. *Lihat* Santa Cruz, Pembantaian

A

a política comanda fuzil 455, 473, 474

ABITL 52

Abdul Hakim 2089

Abdul Hakim Garuda Nusantara 807

Abdul Mansyur 3127

Abdul Rachim 2678

Abdul Rahman 2678, 3125

Abdul Rivai 2660, 2663, 2669

Abdulgani, Ruslan 177, 671

Abdurrahman Wahid. *Lihat* Wahid, Abdurrahman

Ablai 308, 1149, 1182, 1187, 1191, 1205, 1218, 1227, 1228, 2168, 2169, 2641, 2956, 2981, 2998, 3000, 3028, 3053, 3075, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3348, 3349, 3350

ABRI 174, 183, 214, 226, 228, 230- 231, 234 -237, 240 - 262, 266 - 269, 271, 274, 275, 277 - 282, 295, 304, 308, 309, 354, 357, 359 - 361, 375 - 411,

415, 416, 425 - 429, 431, 432, 438, 439, 442, 854, 883, 884, 888, 892, 893, 897, 901, 903, 904, 906, 907, 916, 925 - 934, 939 - 941, 944, 946, 948, 966, 971, 975, 978 - 979, 981 - 991, 999 - 1002, 1007, 1012, 1020 - 1042, 1050, 1051, 1055 -1061, 1065, 1069 - 1070, 1076 - 1077, 1080, 1085, 1097, 1099, 1101, 1104, 1110, 1114, 1118, 1121 - 1123, 1126, 1128, 1134, 1144, 1145, 1148, 1151, 1152, 1155, 1156, 1158, 1159, 1169, 1235, 1238, 1240, 1242, 1244, 1246 - 1249, 1251, 1904 - 1927, 1931, 1934 - 1939, 1942, 1945, 1947 - 1949, 1951, 1953, 1954, 1956, 1960 - 1967, 2134 - 2138, 2140 - 2145, 2148 - 2155, 2161, 2190 - 2194, 2198 - 2209, 2212, 2213, 2218, 2221, 2231 - 2234, 2240, 2244, 2250, 2258, 2266, 2292, 2293, 2295, 2298, 2299, 2302, 2306, 2321, 2327, 2329 - 2331, 2333, 2337, 2343, 2344, 2346, 2348 - 2351, 2358, 2361 - 2363, 2370, 2372, 2374, 2376, 2380, 2382, 2386, 2400, 2414, 2421, 2526, 2536, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2560, 2561, 2572, 2573, 2576, 2599, 2607, 2621, 2623, 2635, 2641, 2644, 2653

Manunggal KB 2483

dan Dwifungsi 380, 2460

dan Tim Alfa 403, 415, 421, 1184, 1186, 1190, 1203, 1226, 2311, 2366, 2956, 2981, 3016, 3040, 3047, 3076, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3187, 3188, 3189, 3342, 3343, 3344

dan Tim Asahan 403

dan Tim Lorico 1089

dan Tim Makikit 1103, 1168

dan Tim Morok 403
dan Tim Nuklir 402, 970, 972, 973, 1243
dan Tim Pancasila 1168, 1181, 1184, 1191, 1192, 1225, 1930
dan Tim Saka 415, 419, 953, 1149, 1218, 2298, 2311, 2956, 2957, 3016, 3076
dan Tim Sasurut 1191
dan Tim Sera 403, 415
dan Tim Sukarelawan 958
dan Tim Susi 207, 214, 226, 400, 416, 883, 884
dan Tim Tuti 883
dan Tim Umi 883
Lihat juga ABRI/TNI, militer Indonesia, TNI

ABRI/TNI 2526, 2536, 2540, 2541, 2544, 2574, 2576, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2609

ACET 800

ACFOA 44, 209, 213, 256, 342, 350, 363, 364, 742, 779, 784, 786, 794, 805, 830, 2051, 2053

Action for World Development 255

Achmad Mas Agus 1167, 2669, 3330

Achmad Syamsuddin 3330

Achmad Yahya 2666

acolhimento 20, 48, 51, 2771, 2772, 2773, 2775, 2776, 2777, 2820, 2905, 2911

ACTU 780

Adão, Manuel 2336

Adam Malik. *Lihat* Malik, Adam.

Adi Mulyono 2669

Adios Salova 2678

Aditla 172

Aditjondro, George 805, 809, 810, 812

Administrator Apostolik 740, 742, 743, 744

Administrator Transisi *Lihat* de Mello, Sérgio Vieira

Adolfo, António 3337

Adu, Julius 3314

Aeri Harapan 806

AETA 780, 799

Afaat, Jose 3346

AFFET 799

Afonso, Martinho 3319

Agama, Henrike 3008

agresi 129

Agus Suharyanto 2673

Agus Suwarno 3337

Agus Tarmidzi 2642

Agus Tarmizi 2964

Agus Yuli 3337

AHI 2170, 2227, 2384, 2956, 3068, 3069, 3070, 3026, 3069

Ahmad Mas Agus 2999, 3086, 3087, 3166, 3169, 3087

AIETD 302, 310, 497, 695, 734, 770

Aileu Hametin Integrasi. *Lihat* AHI

Ainaro 29

Aitana, Gerakan 1056. *Lihat juga* Operasi Keamanan

Aitarak 313, 321, 324, 327, 332, 1168, 1174, 1179, 1180, 1184, 1186, 1188, 1194, 1209, 1211, 1214 - 1216, 1224, 1248, 1249, 1278,1931, 2183, 2298, 2317, 2350, 2547, 2548, 2636 - 2638, 2641 - 2643, 2646, 2693, 2955 - 2957, 2960, 2962, 2976, 2981, 2993, 2997, 3003, 3017, 3019, 3023, 3026, 3028, 3029, 3035, 3038, 3040, 3043, 3054, 3062, 3064 - 3066, 3069, 3070, 3076, 3086, 3090 - 3092, 3065, 3066, 3086, 3090, 3092, 3093, 3098, 3127, 3335 - 3339, 3093, 3095, 3097, 3098, 3107, 3113, 3121, 3139, 3140 - 3142, 3145, 3161

Aitahan Matak 486, 505, 507, 508, 1987, 1994, 1997, 2000, 2001, 2002

aksi lompat pagar 298, 299

Aku Berjuang Laksanakan Amanat Integrasi. *Lihat* ABLAI

Aku Hidup untuk Integrasi 1168

Aku Rela Mati untuk Indonesia. *Lihat* ARMUI

Aktivisme melawan Kekerasan terhadap Perempuan 2877

Alaguia, Domingos 3315

Al Anshar 2408

Alap-Alap 403

Alatas, Ali 291, 305, 310, 311, 312, 314, 329, 677, 678, 688, 696, 734, 768, 785, 1986, 2002, 2008, 2654, 2945, 2988, 3050, 3207, 3210, 2945, 3050, 3201

Ala Uni 3354

Albrecht, Carolus 1203, 2975, 3095

Albright, Madeleine 729

Aleixo, José 3070

Ali Moertopo 673,684, 2580, 2662

Aldeia, Alves 169, 170, 663

Aldrich, George H. 675

Alegria, Petrus Kanisius 2391, 2398, 2399

Alex, David 268, 276

Alfa 415

Alfaro, Julio 54

Ali Moertopo 178, 191, 194, 195, 197, 201, 224, 384, 387

Ali Musa 887, 948

Aileu Hametin Integrasi. *Lihat* AHI

Alkatiri, Mari 64,171, 181, 184, 211, 218, 223, 345, 346, 347, 349, 350, 352, 355, 471, 483, 486, 499, 753, 754, 755, 760, 764, 765, 813, 857, 858, 859, 883, 918, 923,1957, 2597, 2801

All-Inclusive Intra-East Timorese Dialogue 14

Almeida, Marçal de 412

Aloysius Rani 1107, 1125, 1126, 1131, 1138, 1141, 1142, 1272

Alves, Alfredo 408, 443, 2296, 2303, 2306, 2308, 2375, 2391, 2396, 2410, 2411

Alves, Domingos 3333

Alves, Domingos Maria. *Lihat* Ambulan

Alves, Hermenegildo 203, 459, 460, 2331

Alves, Jacinto das Neves Raimundo 22 - 26, 455, 460, 461, 471, 481, 482,487, 509, 1108, 1109, 1120,

1131, 1145, 1256, 1998, 2016, 2017, 2019, 2024, 2029, 2031, 2034, 2037

Alves, João Baptista Fernandes 499

Alves, Leonardo 1033

Alves, Maria Olandina Isabel Caeiro 23, 24, 25, 774

Alves, Merita 944, 946, 948, 1259

Alves, Paulo 510

Amahorseja, Hendrik 788, 806

Amaral, Adolfo 3312

Amaral, Carlos 3109, 3134, 3346

Amaral, Clementino 238, 351, 353, 355

Amaral, Cosmos 1210, 3327

Amaral, Francisco João 61

Amaral, Francisco Xavier do 171, 181, 182, 209, 213, 216 - 219, 237, 241, 244, 245, 343, 347 - 356, 470, 471, 473, 477 - 479, 483, 858, 863, 870, 877, 882, 919, 920, 924, 937, 1005, 1013 - 1017, 1020, 1021, 1027, 1033, 1237, 1957, 1959, 2606, 2617, 2801

Amaral, João Francisco 23

Amaral, Leão P dos Reis. 499, 2089

Amaral, Moises do 752, 765

Amaral, Olga 2085, 2089, 2092, 2098

Amaral, Xavier do 721, 753

Amati, Domingos 3336, 3339

Ambulan 1017, 1018

AMD 437

Amerika Serikat 10, 44, 45, 172, 174, 193, 199, 222, 224, 225, 228, 241, 243, 244, 248, 252, 256, 261, 280,

314, 319, 328, 337, 358, 359, 361 - 363, 1989, 2006, 2078, 2079, 2564, 2566, 2580, 2629 - 2632, 2655, 2864, 2865, 2916, 2940, 2943, 2980, 3012, 3015, 3088, 3209, 3210, 3211 - 3214, 3219, 2943, 3210, 3219

Kongres 659, 725, 752, 779

Amien Rais 305, 811

Amirul Isnaeni 395, 2954

Amnesty International 38, 287, 365, 891, 894, 1097, 1134 - 1136, 1189, 1986, 1987, 1988, 1995, 1996, 2000, 2002, 2007 - 2009, 2012, 2018, 2019, 2022, 2038, 2052, 2053, 2061, 2069, 2072, 2082 – 2083, 3257, 3261, 3262, 3264

An-Nur 2402

Anderson, Benedict 793

Anderson, Russell 1108

Andrade, Antonio 2668

Andrade, Filomeno 499

Andrade, Nazario José Tilman de 3000, 3119, 3121

Andreas Prawin 3127, 3355

Andreas Sugianto 2964

Andrews, David 313, 3027, 3144

angka kematian kasar 547

Angkatan Bersenjata 2877, 2888, 2889, 2901

Angkatan Pertahanan Timor-Leste. *Lihat* FDTL

Angola 168, 177, 218, 222

Anjos, Eduardo dos 915, 967, 990, 1034

Anjos, Virgílio dos 1066, 1072 *Lihat juga* Ular Rheik

Annan, Kofi 159, 292, 303, 310, 315, 323, 336, 337, 367, 669, 678, 695, 696, 699, 734, 769, 777, 795, 813, 2630 2944, 2947, 2986, 3215

ANP 182

Antonia, Maria 1007, 1008, 1017, 1035

Antunes, Melo 667

Anucai, Tomás 2331

Anwar, Dewi Fortuna 45

Anyelir, Revolusi 9, 10, 2597, 2625, 2627, 2937

apakabar 800

Apalagi, José 3320

apartidarismo 184, 203, 205, 2886

APEC 298, 331, 336, 337, 716, 734, 802

APCET 798, 804, 809

Apodeti 10, 25, 82, 89, 116, 172, 178 - 183, 188 - 193, 195, 198, 205, 206, 211, 215, 221 - 224, 229, 231, 233, 234, 235, 346, 354, 396, 397, 399 - 403, 424, 426, 427, 433, 442, 751,861 - 864, 874, 879 - 881, 887, 897, 900, 902, 914 - 922, 930, 937, 960, 1005 - 1008, 1051, 1157, 1234 - 1236, 1904, 1941, 1957, 1966, 2121, 2122, 2355, 2368, 2370, 2409, 2528, 2531, 2532, 2533, 2534, 2538, 2539, 2541, 2549, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2605, 2612, 2613, 2620, 2621, 2626, 2636, 2893, 2901, 2938, 2956, 3017, 3043, 3073

Aquino, Pedro 913, 914, 921

Araújo, Abilio 181, 184, 284, 486, 754, 755, 756, 759, 761, 763 - 767

Araújo, Alberto 499

Araújo, Arnaldo de 424

Araújo, Arnaldo dos Reis 172, 234, 237, 239, 425, 426, 445, 2391, 2398, 2399, 2455

Araújo, Basilio 307, 325, 329, 3025, 3063, 3144

Araújo, Fernando de 808, 809, 2500, 2509

Araújo, Guilhermina 486, 754, 765

Araujo, Guilhermino de 3333

Araújo, Jose Bonifacio dos Reis 428

Araújo, Padre Jovito do Rêgo de 23, 24, 64

Araújo, Pedro 3070

Araújo, Rosario de 61

Araújo, Rui 1106

Araújo, Tito Soares de 2132

Archer, Robert 791, 792

Ariate, Manuel 3315

Arifuddin (Brigadir Jenderal) 3060, 3064, 3194, 3197, 3195

Aritonang, John Harlan 1107,1139

armas brancas 2300, 2333. Lihat juga Força Auto Defesa

Armed. *Lihat* Artileri Medan

Armstrong, AG 707

Armstrong, Bill 783

Armui Merah Putih 2223, 2226, 2311, 2312, 2315, 2316, 3079, 3081

Armyn Ali 2661

Artawi Sahari 2665

Arte Moris 2809, 2816

Artidjo Alkostar 2020, 2029, 2108

Artileri Medan 927, 928, 954, 990

Aruan, Binsar 1121, 1130, 1137

ASDT 9, 171, 172, 176, 180, 183, 184, 185, 186, 343, 348, 350, 351, 857, 862, 868, 2938

ASEAN 173, 174, 175, 209, 2864

Asep Kuswadi 2668, 3107, 3109, 3111, 3131, 3132, 3133, 3346

Asia Foundation 67

Asia Students Association 799

Asia Watch 793, 1137, 1138, 1141, 1272, 2024, 2060, 2064, 2066, 2067, 2068, 2069, 2071, 2074, 2080, 2404

ASIAT 214

Asmah Achmad 2003

ASIET 800, 809

Asosiasi Mantan Tahanan Politik. *Lihat* Assepol

Asosiasi Perpustakaan dan Informasi Timor-Leste. *Lihat* ABITL

Assepol 18, 23, 27, 54, 2709

Assistencia 892, 893, 894, 896, 902, 906, 910

Assistente Comissáriado 456

assistente zona 464

Associação de Amizade Portugal-Timor-Leste 778

Associação Popular Democrática Timorense. *Lihat* Apodeti

Associação Social Democrata Timorense. *Lihat* ASDT

assuliar. Lihat *auxiliar*

Asvi Warman Adam 44, 158, 229, 342, 352, 353

Ataúro, Pulau 10, 30, 32, 163, 200, 206, 208, 209, 216, 217, 223, 225, 252, 257 - 261, 265, 275, 281, 359, 2324, 2345, 2346, 2419, 2545, 2561, 2562, 2571, 2893, 2903, 2938

Atelulo, Francisco (alias) 3313

Atino Brewok 1112

Atolan, Agustinho 3352

Atusuri, Guilherme 3319

audiensi amnesti 94

audiensi korban 28, 36,41,42, 71

audiensi publik CAVR 31, 34, 37, 41, 53, 84, 89, 94, 170, 201, 203, 205, 235, 342 – 370, 2747, 2793, 2795, 2796, 2797, 2802, 2804, 2806, 2807, 2808, 2818, 2830

tingkat nasional 40 - 45, 54, 60, 63, 158, 185 - 186, 225, 236, 256, 342, 2551, 2556, 2596, 2597, 2655, 2694, 2796, 2800, 2801, 2804, 2808, 2898, 2900, 2910

tentang Konflik Politik Internal 857, 881, 887, 919, 922, 1014

tentang Pembantaian 850, 1001, 1110, 1270

tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional 697, 774

tentang Perempuan dan Konflik 2126

Audiensi Rekonsiliasi Komunitas 1931, 1932

audiensi tertutup 84

Auni, Firminio 3354

AusAID 3012

Australia 9, 10, 44, 159, 164, 172, 175, 177, 179, 187, 193, 196 - 201, 206,

209 - 214, 219, 222 - 224, 228, 229, 232, 239, 244, 255, 256, 265, 279, 280, 284, 291, 295, 300, 311, 312, 314, 319, 321, 323, 331, 336, 338, 339, 341, 342, 344, 346, 347, 352, 356, 361, 366, 367, 368, 398, 424, 444, 446, 2442, 2457, 2458, 2462, 2463, 2464, 2477, 2503, 2505, 2506, 2507, 2509, 2527, 2578, 2580, 2596, 2623, 2627, 2628, 2650, 2655, 2694, 2864, 2865, 2905, 2943, 2946, 2954, 2956, 2991, 3012, 3018, 3020, 3023, 3039, 3057, 3060, 3063, 3084, 3095, 3096, 3103, 3162, 3130, 3132, 3145, 3146, 3213, 3186, 3209, 3210, 3211, 3212

Parlemen 45

Australian Broadcasting Commission 795

Australian Catholic Relief 780

Australian Council for Overseas Aid. *Lihat* ACFOA

Avebury, Lord 762, 782, 792

Ave Maria, Gereja. *Lihat* Suai, Gereja

auxiliar 469

AWD 783, 784

Azis Hasyam 429

B

Babinsa 260, 270, 359, 361, 381, 391, 405, 409, 443, 971, 1041, 1085, 1096, 1102, 1163, 1184, 1187, 1217, 1228, 2151, 2161, 2193, 2194, 2217, 2220, 2294, 2298, 2299, 2307, 2346, 2375, 2376, 2380, 2746

Babo, Adão Salsinha 3320

Badan Intelijen ABRI. *Lihat* BIA

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. *Lihat* BKKBN

BAIS 1113, 2064, 2067, 2070, 2074, 2080, 2964, 2965, 3058, 3060, 3061, 3064, 3067, 3194, 3197

Bakin 172, 178, 179, 192, 207, 221, 376, 673, 2017, 2021, 2032, 2064, 2454

Bakorstanas 1991

Bakti Timur Karya 2459

Balibó 214, 2865, 2939, 3081, 3187

Balibó, Deklarasi 11, 216, 221, 229, 239, 426, 2031, 2077, 2531, 2532, 2599, 2620, 2622, 3140

Balide 22, 51, 71

Ball, Desmond 885

Balsemão, Pinto 668, 761

Bamadhaj, Kamal bin Ahmed 796, 1110,1112, 1118, 1126, 1133, 1138 - 1140

Bambang Gandhi Baroto 2664

Bambang G. Supriyanto 3322

Bambang Hermanu 2678

Bambang Indra 3148, 3317

Bambang R. Gunadi 2666

Bambang Sukresno 2672

Bambang Sungesti 1167, 3123

Bambang Wiriadi 2669

Bambang Wisnumurty 2662, 3024, 3031, 3037, 3091, 3116, 3124

Bangladesh 256

Bank Dunia 326, 337, 341, 2474, 2479, 2480, 2484, 2647, 2822, 2945, 3056, 3067, 3209, 3214

Bank Pembangunan Daerah. *Lihat* Bappeda

Banpur 388

Banteng Raiders 2307

BAP. *Lihat* Berita Acara Pemeriksaan

Bappeda 432, 2460

Baptista, Joao de Jesus 55

Baptista, João 3313, 3323

Baptista, Orlando 3313

Barbosa, Carlos Alberto 499

Barbosa, Geraldo 870

Bariak, Saran 3355

Barisan Rakyat Timor Timur 2640, 2647. *Lihat juga* BRTT

Barito Pacific 2404

barlaque 465, 469

Barreto, Abe 497

Barreto, Domingos 2043, 2044, 2047

Barreto, Filomeno 3115

Barreto, Financio 1107

Barreto, Jorge 1107, 1139

Barreto, Marcelino 864

Barreto, Maria 23

Barreto, Lino 3333

Barreto, Pascoela 499

Barreto, Sabino 1996

Barreto, Venancio 1139

Barros, Bernardo 3313

Barros, Celestinho 3313

Barros, Manuel 3171, 3172, 3173

Barros, Xisto 3332

Barry, Robert L. 728

Barwick, Garfield 681, 682

base de apoio 452, 453, 461, 471, 472, 480, 485, 926,969, 970, 1008, 1038, 1906, 1915

basis-data pelanggaran hak asasi manusia 533, 538

basis data sensus batu nisan 533, 850, 851

Basofi, M 2673

Bassarewan, Hamis 917, 944, 945. *Lihat juga* Hata

Barreto, Eduardo de Deus 29

Barros, Manuel 1200, 1202

Batalion (*angka miring bercetak tebal mengacu pada kesatuan batalion*)

141 929

144 1103

202 932, 933, 934, 941,942, 943, 999

303 1107, 1108, 1109, 1121, 1127, 1129, 1130

312 940, 941

315 927, 953, 1077, 1088, 1104, 1105, 1156

321 1061, 1103 2542

328 1104, 1245, 1258, 2545

330 1007

401 929, 1030

403 884, 930, 937

405 932

406 1074

407 1104

412 1099, 1100

501 1090, 1922

502 942, 956

503 937

507 940

509 931

501 281

511 1073, 1104

512 930, 940, 971, 1095

516 1105

641 1079, 1080, 1082, 1087

700 990

713 1105

721 928, 942, 958, 1001, 1002

726 1103

744 401, 406, 931, 1035, 1040, 1055, 1057, 1102, 1107, 1108, 1130, 1148, 1149, 2952, 3008, 3040, 3120

745 339, 401, 929, 935, 953, 957, 959, 968, 970, 971, 972, 973, 974, 1067, 1104, 1169, 1183, 1203, 1204, 1218, 1225, 1226,

1249, 1251, 2952, 2974, 2975, 2982, 2989, 3016, 3078, 3096, 3103, 3104, 3106, 3119, 3176, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187

Lintas Udara *100* 991, 1066

Lintas Udara *745* 991

Marinir *503* 1074

Zipur *5* 1060

Batalion Partisan Dili 3008

Batara Indra Group 2459, 2461

Batugade, petisi 207

Baucau 29

BCIET 781

Bedjo Juwono 2668

Belanda 159, 160, 161, 162, 164, 178, 218, 299, 337, 353

Beldasi, José 3313

Belo, Abel da Costa 499

Belo, Joanico Césario 309, 1168, 2298, 2642, 2643, 2644, 2957, 3035, 3046, 3076, 3077, 3315

Belo, Paulo Assis 505, 510

Belo, Saturnino da Costa 2072, 2073

Belo, Uskup Carlos Felipe Ximenes (SDB) 22, 165, 273,278, 281, 282, 286, 287, 292, 294, 301, 302, 306, 307, 311, 322, 332, 333, 336, 341, 696,738, 744, 790, 801, 1135, 2488, 2637, 2644, 2693, 2941, 2944, 2974, 2977, 3162, 3164

Beno, Lino 3353

Beny Ludji 3335

Bere Dasi, Arlindo 3320

Bere Laka, José 3322

Bere Loco Meo. *Lihat* Jesus, João Baptista Soares de

Bere Loe, Rui 3321

Bere Malae Laka 485, 486, 487

Bere, Manuel G.L. 3316

Bere, Maternus 3327

Bere Tali, Rue 3322

Berek, Joaquim 3327

Bere Masak, Francisco 3323

Beremali, Marcelino 3314

Beremau, Domingos 3338

Beretus, Antoni 1139

Berita Acara Pemeriksaan 1982, 1990, 1991, 1994, 2018, 2049, 2050, 2059, 2090, 2091, 2103

Berkala Timor-Leste. Lihat *Higashi Chimoru Tsuchin*

Bescau, António 3335

Besi Merah Putih (BMP) 320, 322, 419, 1149, 1168, 1174, 1175, 1176, 1184, 1211, 1224, 1248, 1929, 1930, 2167, 2168, 2225, 2311 - 2316, 2354, 2547, 2636, 2640, 2641, 2645, 2646, 2725, 2956, 2981, 2996, 3003, 3028, 3037, 3107, 3132, 3133, 3152, 2996, 3335, 3345, 3346, 3347

Bete Aloi. *Lihat* Mali, Domingos

Bife, José. *Lihat* Reis, Jose Manuel dos

Bili Ato, Francisco V 3320

Bili Tael, Agustinho 3321

Bi Lear 944

BIA 417, 420

Binanggal Frits 2664

Binpolda 382, 406, 1072, 1163, 2183, 2195

Bintara Polisi Daerah. *Lihat* Binpolda

Biro Pembebasan Republik Timor 177

Biro Pusat Statistik 258, 273, 361, 535, 645

BKKBN 2483, 2484, 2485

BKR 378

Blair, Dennis 3213

Blasius Manek 3355

BMP. *Lihat* Besi Merah Putih

BNU 208, 213, 217

Boaventura, Dom 9, 163, 2453

Boavida, Agostino Freitas. *Lihat* Sera Malik

Bobo, Bonafacio 3351, 3352

Bobonaro 10, 29

Bolang, Cheri 1138, 2661

Bolshevik, Revolusi 706

Bonaparte, Mariano 1997, 1998

Bonaparte, Rosa Muki 229

Bondia, Domingos 3336

Bonifacio, Mário 1013, 1018

Borges, Julio 3331

Borges, Justinho 3320

Borges, Alfredo Ferreira 756

BPI 384

Branco, Francisco Miranda 23, 509, 1120, 2011, 2014 - 2018, 2020 -

2023, 2029 - 2035, 2037, 2068, 2079

Branco, João 402

Brasil 164, 186, 213, 218, 319

Brereton, Laurie 689

Breok, Alfredo 3334

Brichoq 461

Briere, Elaine 792, 831

Brigada Dinamisadora 463, 464

Brigade Infanteri ke-18 236

Brigade Mobil. *Lihat* Brimob

Brigade Penyelamat Integrasi Timor Timur 3008

Brimob 297, 313, 320, 326, 382, 385, 394, 2547, 2636, 2652, 2959, 2974, 2980, 2981, 2982, 2993, 3038, 3068, 3078, 3089, 3094, 3099, 3101, 3102, 3111, 3116, 3131, 3132, 3133, 3150, 3151, 3154, 3163, 3170, 3172, 3186, 3198

British Aerospace 715

Brito, Filomeno 3348

Bronco OV-10 240, 247, 249

BRTT 325, 417, 420, 421, 2951, 2962, 2963, 2977, 3022, 3053, 3063, 3073, 3074, 3080, 3099, 3100, 3103, 3105, 3121, 3333, 3344.

Brzezinski, Zbigniew 243, 355

Bubun, Tomas 3351

Budi Atmono 2665

Budi Susilo 1199, 2678, 3079, 3171, 3173, 3322

Budiardjo, Carmel 782, 787, 792, 806

Bulog 257, 382, 3061

bunuh diri ideologis 473

Burgess, Patrick 23, 3180

Bush, George 728

C

CAAT 792

Caeiro, Olandina. *Lihat* Alves, Maria Olandina Isabel Caeiro

Caetano, Marcello 9, 80, 167, 168

Callaghan, James 711

Calohan. *Lihat* Antobio Lobato

Camara, João Freitas da 2043, 2044, 2046, 2047, 2049 - 2057

camarada 465

Camp David 720

Campinos, Jorgé 194

Canalini, Monsignor 745

Canossian 2809, 2812, 2818, 2824

Canossiana, Susteran 2974

Cansil, Manuel 3324

Caldas, Afonso 3314

Câmara Eclesiástica 3095

Cardoso, Agapito 2043, 2044, 2047, 2056, 2057

Cardoso, José 2165

Cardoso, Leoneto 3331

Cardoso, Luis 497, 3323

Cardoso, Reinaldo 787, 790

Cardoso, Teresinha Maria 29

Cardoso, Tomas 3315

Carlos, Adelino de Palma 169

Carlos, Domingos A 3312

Carlos, Francisco 756

Carlos Soares 3312, 3341

Carmelita, Susteran 2405

Carmo, Albino do 215, 240, 351, 355

Carmo, Fernando do 226

Carmona, Carlos Soares 3341

Carrascalão, João 171, 186, 187, 201, 202, 343, 344, 345, 347, 348, 351, 400, 442, 497, 499, 751, 753, 763, 764, 765, 857, 882, 2596, 2726

Carrascalão, Manuel Viegas 171, 231, 313, 320, 345, 419, 499, 1119, 1149, 1174, 1179, 1180, 1248, 2086, 2636, 2646, 2649, 2694, 2972, 2977, 3027, 3040, 3092, 3107, 3111, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3164

Carrascalão, Mario Viegas 171, 182, 187, 190, 199, 203, 207, 234, 238, 239, 274, 276 - 279, 285, 294, 344 - 351, 355, 358, 392, 424, 425, 427, 437, 441, 442, 444 - 446, 498, 752, 763, 766, 858, 859,1135, 2008, 2162, 2211, 2213, 2377, 2387, 2391, 2399,2400, 2409, 2454, 2459, 2488, 2506, 2559, 3140

Carrion, Armindo 3336

Carter Center 319, 3012, 3060, 3092, 3093

Carter, Jimmy 45, 725, 728, 2629

Carvalho, Aleixo de 3115, 3348

Carvalho, Cancio 3024, 3042, 3043, 3072, 3073, 3077

Carvalho, Cancio Lopes de 312, 2152, 2298, 2644, 2957, 3024, 3072, 3165, 3313, 3333

Carvalho, Dinis. *Lihat* Nelo Kadomi Timor

Carvalho, Domingos dos Santos de 3322

Carvalho, Francisco 2956, 3043

Carvalho, Francisco Lopes 499

Carvalho, Lino de 3318

Carvalho, Mateus de 3090, 3336, 3337

Carvalho, Nemesio Lopes de 3072, 3074, 3313

Carvarinho, Maria do Ceu. *Lihat* Bi Lear

CAS. *Lihat* Comissão de Apoio e Solidaridade

Casa de Timor 753

Casaroli, Kardinal Agostino 741,743, 745

Cascol 1009, 1021

Case, Clifford 725

Castro 163

Catholic Relief Services 44, 67, 242, 252, 256, 358, 360, 2564, 2565, 2566

Catry, Jean Pierre 792

Cav, Domingos 3354

Cavadini, Fabio 793

CAVR 6, 8, 21, 27, 28, 29, 36, 37, 44, 45, 52, 53, 55, 57, 64,79, 2128, 2168, 2245, 2271, 2277, 2707, 2711, 2714, 2716, 2717, 2718, 2719, 2722, 2723, 2725, 2733, 2734, 2736, 2742, 2744, 2751, 2753, 2756, 2759, 2761, 2762, 2763

CCF 864, 945, 946, 950

CDPM 778, 789

CDR 504

CDT 189, 198

CEDAW 2877

Ceforpol 463, 471

Celah Timor 291, 300, 665, 685, 689, 2442, 2503, 2578, 2595, 2623, 2628

Celcom 511

CEL/FA 510

CEL/FC 510, 511

Center for Internally Displaced Persons Service. *Lihat* CIS

Center for Strategic and International Studies. *Lihat* CSIS

Centro Feto Enclave Oecusse 2824

Cepeda, Antonio 917, 975, 990

Cerita dari Garis Belakang 44

Cernac 486

César Mau Laka 915, 917, 944, 1014

Cezo 511

Ch'en His-lien 701

Ch'iao Kuan-hua 702

Chan, Kenneth 691

Chandraça 1065, 1074,1096

chefe de suco 2453

Chico Zumalai. *Lihat* Atelulo, Francisco

Chomsky, Noam 787

Christie, Kenneth 733

Christopher, Robin 716

Chirac, Jacques 706

Cidadaun 66

CIDAC 778

CIET 780, 781, 782, 786

Cile 319

CIPM 864

Cina 166, 174, 175, 179, 187, 192, 196, 213, 218, 222, 3042, 3211

Cinta Damai, Yayasan 2406

CISET 792

Civpol 329, 2947, 2948, 2991, 3005, 3078, 3114, 3119, 3134

clandestina 453, 454, 490

Clark, Roger 788

Clinton, Bill 299, 729, 2629

Cloe, Agustinho 3352

Clubo Municipal 2146, 2149

CNRM 14, 26, 282, 283, 292, 299, 300, 303, 310, 360, 361, 453, 496 - 503, 506 - 511, 765, 766, 767, 768, 769, 771, 2012, 2069, 2320, 2599, 2942

CNRT 8, 14, 17, 18, 21, 22, 68, 73, 303, 306, 307, 310 - 312, 314, 319, 321, 323, 324, 326, 331, 332, 334, 335, 340, 341, 367, 368, 454, 498, 499, 511, 765, 769, 770, 774, 809, 1168, 1170, 1175, 1181, 1182, 1184, 1186, 1188 - 1194, 1200, 1205, 1208, 1209, 1214, 1216, 1217, 1224 - 1229, 1249, 1251,1928, 1930, 2172, 2173, 2178, 2315, 2316, 2354, 2367, 2384, 2599, 2637, 2701, 2709, 2861, 2863, 2867, 2937, 2942, 2945, 2963, 2975, 2976, 2977, 2983, 3005, 3007, 3009, 3009, 3012, 3013, 3020, 3069, 3070, 3074, 3079, 3082, 3083, 3085, 3088, 3092, 3093, 3094, 3099, 3100, 3105, 3110, 3112, 3124, 3113, 3115,

3117, 3118, 3124, 3126, 3128, 3129, 3130, 3137, 3142, 3147, 3161, 3164, 3166, 3172, 3178, 3179, 3181, 3182, 3189

Cobra, Aleixo 2327

Cocoleu, Alex 3070, 3071

Coelho, Avelino 507

Coelho, Ermelita. *Lihat* Siri Lou

colaborador do estado maior 460

Coli, João 3321, 3323

Colo, Gabriel 3124, 3176, 3177, 3351

Comando da Luta Boru-Quere 1009

Comarca 51 - 55, 63, 71, 864, 900, 910, 922, 946, 947, 1042, 1043, 1044 – 1055, 2345, 2347, 2349, 2350, 2364

Comarca Balide 2897, 2920

Comissão de Apoio e Solidaridade 985

Comissão Política Nacional. *Lihat* CPN. *Lihat juga* Comissário Política

Comissário Política 453, 455, 460, 461, 486, 489

Commission for Truth and Friendship. *Lihat* CTF

Comité Democrático Revolucionária. *Lihat* CDR

Comité Executivo 505, 506, 507, 508, 509, 510

Community Aid Abroad 780, 794, 796, 2464

Communidade dos Paises de Lingua Portuguesa. *Lihat* CPLP

Companhia de Instrução 864

Comoro 228, 334

Conboy, Ken 885, 1034, 1925, 1948

Conceição, Domingos da 1107, 2617

Conceição, Jose da 276, 486, 492, 499

Conselho Nacional de Resistência Maubere. *Lihat* CNRM

Conselho Nacional de Resistência Timorense. *Lihat* CNRT

Conselho Revolucionário de Resistência Nacional. *Lihat* CRRN

Conselho Superior da Luta 460

conscientização 470

Convergência Nacionalista. Lihat Konvergensi Nasionalis

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. *Lihat* CEDAW

Convention on the Rights of the Child. *Lihat* CRC

Cook, Robin 716

Cornelio Gama. *Lihat* Leki Nahak Foho Rai Boot

Correia, Abilio Mendes 3345

Correia, Agustinho Alves 3346

Correia, Anacoreto 765

Correia, Brigida 23

Correia, Rudolfo Alves 3339

Correia, Reinaldo. *Lihat* Kilik Wae Gae

Correia, Thomas 2085, 2088, 2089, 2091, 2093

Correia Lebre, César. *Lihat* Mau Laka, Cesar

Corte Real, Duarte Gaspar 1096, 1266, 1269

Cortereal, Adriano 917

Cortereal, Martinho 976, 990

Cortereal, Mateus 976, 990

Cortereal, Nazario 3120

Cortereal, Nazario V. dos S. 3349

Cortereal, Pedro 917, 976, 990

Cosgrove, Peter 331, 339

Costa, Agustinho da 3341

Costa, Amelio da 3343

Costa, Angelino da 3339

Costa, Andre da 2084, 2085

Costa, Antonio da 29

Costa, Antonio Manuel Gomes da. *Lihat* Mauhunu

Costa, António Tomás Amaral da. *Lihat* Aitahan Matak

Costa, Bernardino da. *Lihat* Guterres, Bernardino Agusto da Costa

Costa, Cecilia da 1023

Costa, Celina Pires da 2085, 2086, 2087, 2089, 2090, 2098

Costa, Cristiano da 1995, 2005

Costa, Cipriano da 3342

Costa, Clementino da 3323

Costa, Domingos da 2013, 2089, 2093, 2099

Costa, Egas da 456, 460, 466, 471, 472, 473

Costa, Filomeno Mesquita da 1167

Costa, Filomeno Misquito da 3123

Costa, Francisco Borja da 181

Costa, Herminio da Silva da 890, 901, 913, 921, 922, 1255, 2962

Costa, Jaime da 29, 3121

Costa, Jaimito Candido da 61

Costa, Januario da 3353, 3354

Costa, João da 2355, 2404, 3341, 3343

Costa, José da 1068, 1102, 1214, 1261, 1267, 3344 *Lihat juga* Mau Hudu Ran Kadalak

Costa, Julio da 3351

Costa, Ligia da 61

Costa, Lucas da 455, 458, 462, 474, 475, 477, 478, 479, 499, 876, 920, 921, 1014 *Lihat juga* Rama Metan

Costa, Luis da 252, 1009, 1032, 1261

Costa, Manuel Carceres da 236, 238, 246, 354, 355, 356, 357, 360

Costa, Manuel da 3342

Costa, Maria José da 247, 356, 357

Costa, Martinho da 3344

Costa Nunes, Baltazar da 3327

Costa, Orlando da 1147

Costa, Paulo da 3343

Costa, Quiteria da 23

Costa, Thomas da 3344

Costa, Tito da. *Lihat* Lere Anan Timor

Costa, Willem T da 2661, 3015

Costa, Zacarias da 499

Costa Lopes, Dom Martinho da. Lihat Lopes, Dom Martinho da Costa

Covalima 29

Cox, Steve 796

CPCC 324, 368

CPLP 2864, 2866

CPN 8

CRC 2878, 2879

crèche 462, 465

Criado 2084, 2086, 2088, 2090, 2091, 2092, 2093, 2098, 2099

Cribb, Robert 534

critíca-auto critíca. *Lihat* kritik-otokritik

Crosland, Anthony 714

CRC 2441, 2442, 2499, 2595

CRRN 14, 269, 272, 277, 283,453, 486, 487, 488, 489, 492, 494, 495, 496, 503, 505, 763, 766, 952, 954, 968, 1004, 1051, 1053, 1055, 1061, 1259, 1260, 1274

CRS 252, 256, 257, 261, 262, 357, 358, 788

Cruz, Filomena Lopes da 1929, 2643, 2981, 3115, 3117

Cruz , Francisco Xavier Lopes da 45, 171, 187, 207, 234, 239, 325, 421, 424, 426, 427, 701, 753, 764, 2647, 2963, 3072, 3115, 3162

Cruz, Humberto Martins da 911, 912, 913, 914, 921, 1957

Cruz, P, Elizario da 3035

Cruz, Vasco da 3332

Cruz, Victor da 3346

CSIS 45, 177, 178, 224, 225, 344, 352, 376, 384, 673, 817

CSRNET 506

CTF 2895

Cuellar, Javier Perez de 287, 288, 694, 744, 761, 762, 2941

Cunningham, Gary 885

Curlog 1926

D

Dadurus Merah Putih (DMP) 322,1149, 1166, 1168, 1172, 1173, 1179, 1185, 1188, 1191, 1200, 1202, 1211, 1212, 1219, 1249, 2166, 2182, 2247, 2312, 2367, 2547, 2637, 2642, 2757, 2834, 2835, 2956, 2981, 2997, 3028, 3039, 3079, 3080, 3081, 3149, 3316, 3318, 3322, 3151, 3323, 3324

Dahlan Effendi 2660

Dalan ba Dame 65, 66

Dalton, Richard 668, 693

Damianus Soetarto 944, 2662

Damião, Domingos 935

Damiri, Adam Rachmat 309, 333, 416, 417, 444,1248, 2639, 2640, 2652, 2654, 2660, 2949, 2952, 2953, 2974, 2999, 3004, 3008, 3010, 3013, 3020, 3021, 3022, 3031, 3036, 3038, 3042, 3049, 3058, 3061, 3062, 3192, 3026, 3062, 3087, 3143, 3162, 3218, 3194, 3195, 3196, 3200, 3202, 3208, 3217, 3218, 3219, 3357

Dana Amanah untuk Timor-Leste 2822

Dana Moneter Internasional. *Lihat* IMF

Dana perwalian 2905, 2917

Danrem 321, 367

Danton Intel 2238

Darah Integrasi 2981, 2997, 3028, 3097, 3098, 3099, 3100, 3179

Darah Merah 1149, 1181, 1189, 1193, 1215, 1225, 3002, 3003, 3097, 3181, 3003, 3097, 3342

Darah Merah Integrasi 2165, 2173, 2174, 2227

Darah Merah Putih 1186, 2165

Dare, Pertemuan14, 49

Darmawi Chaidir 2661

Darsono 2667

Darurat Militer 2950, 2953, 2954, 2965, 3058, 3194, 3199, 3200, 2952, 3010, 3162, 3199

Daud Napis 2661, 2664

Dauth, John 690

Davidson, Afonso 3324

DDII 2401, 2402

d'Estaing, Giscard 704, 705

Deakin, Hilton 746, 800

Deas, Ansori 2664

Dede Angga Heryanto 2673

DEF 497

Defence Signals Directorate. *Lihat* DSD

Defert, Gabriel 793

Deklarasi Bangkok 732

deklarasi kemerdekaan 216, 218, 219, 221, 222, 223, 754

Deklarasi Kemerdekaan bagi Negara dan Bangsa Kolonial 173, 660, 662, 672,717

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 83, 96, 99, 112, 2441, 2442, 2446, 2571

dekolonisasi 158, 160, 165, 167 - 169, 172, 179, 180, 189, 192, 194, 198, 201, 202, 208, 214, 216, 217, 219, 287, 346, 375, 376, 399

Dekrit No.19/1976 424

Dekrit Presiden No.53 1133

Delegasi Eksternal Fretilin 742, 760, 765

Depnaker 2404, 2405

deponen 33, 37, 47, 70

Demokrasi Terpimpin 379, 380

Dengarlah Suara Kami. *Lihat* Rona Ami nia Lian

Denok Hernandes Internasional Indonesia, PT 429, 437, 2455, 2457, 2458, 2459

Departemen Luar Negeri 2943, 2987, 3015, 3058, 3059, 3063, 3067, 3219, 2943, 3210

Departemen Orientasi Politik dan Ideologi. *Lihat* DOPI

Departemento da Orientação Política e Ideológica. *Lihat* DOPI

Departemen Pekerjaan Umum dan Transmigrasi 3054

Departemen Penerangan 3058, 3067

Departemen Transmigrasi 3058, 3067

Dephankam 384

desa binaan 258, 2481

desa janda 2218

desa pemukiman 12

despartidarização 454

Detaq, Paul St. L. 2664

Deus, Domingos de 3341

Deus, Mercurious José de 3326

Deus, Simplicio Celestino de 294, 364

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. *Lihat* DDII

Dewan Gereja Dunia 265, 784

Dewan Keamanan 7, 11, 81, 86, 91, 95, 98, 137, 173, 222, 224, 226, 231, 232, 234, 323, 328, 331, 337, 338, 341, 353, 354, 653 - 655, 661, 662, 664, 667, 674, 676, 691 - 694, 697 - 704, 706, 709, 710, 713, 716, 720, 729 - 731, 740, 752, 756, 759, 762, 779, 815, 816, 2523, 2580, 2626, 2630, 2631, 2655, 2864, 2865, 2876, 2895, 2916, 2942, 2947, 2988, 3041, 3207, 3211, 3212, 3214, 3215, 3216, 3217, 3220, 3221, 3211, 3212

Dewan Kehormatan Militer 393, 2011

Dewan Legislatif 167

Dewan Nasional Resistansi Rakyat Timor. *Lihat* CNRT

Dewan Penasihat CAVR 22

Dewan Perwakilan Rakyat. *Lihat* DPR RI

Dewan Rakyat 424

Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur 1182, 1189, 1215

DFSE 496, 497

Dharma Silen 2661

Dharmais, Yayasan 2399

dialog tripartit 292, 302

Dias, João Antonio 1111, 1112

Dias, José Amorim 497, 768

Didit Satrio 2663, 2670

Diet Members Forum on East Timor.

Lihat Forum Anggota Diet tentang Timor-Leste

Dili 29

Dioses Dili 181, 282, 1054, 1194, 2566

direcção 458

Direktorat Sinyal Pertahanan. *Lihat* DSD

Divisi Dukungan Korban 55

Divisi Pencarian Kebenaran 55

Djoko Pramono 2660

Djoko Soeharsoyo 3355

Djoko Sukarsono 3125

DMP. *Lihat* Dadurus Merah Putih

Doherty, Edward 787

Doko, Merry S. 2002, 2005

Dolok Seribu, Solapidin 3070

Domi Yos Atok 2029

Domm, Robert 290, 795, 809

DOPI 464, 472, 486

Downer, Alexander 311, 336, 367, 689, 804, 2628

Dowson, Hugh 45, 659

DPR RI 11, 177, 225, 239, 242, 305, 424, 425, 428, 429, 430, 2397, 2950

DPRD 2140, 2151

DRSE 496, 497, 509

DSD 3023, 3024, 3025, 3060

DSMPTT 2978, 3012, 3013, 3074, 3126, 3128, 3129, 3145

Duarte, Dom 163

Dumas, Roland 705

Dunidja 2661

Dunn, Geoffrey C. 659

Dunn, James 177, 179, 209, 342, 343, 344, 349, 353, 356, 662, 701, 752, 758, 780, 783, 792, 2802

Dupe ,Gustaf 805

Dwyer, Kieran 2811

E

Eanes, António Ramalho 664, 668, 728

East, Roger 223, 224, 228, 230, 780

East Timor Action Network. *Lihat* ETAN

East Timor International Support Centre. *Lihat* ETISC

East Timorese Regional Council 314

East Timorese Relief Association 2479

Eda, Satsuki 791

Edi Sudradjat 2688

EFTA 168

El Niño 2463

El Tari 201, 207

Eldon, Stewart 716

Elsam 44, 810

Emmanuel Messu 2664

Ena, Carlos 3352

Ena, Umbertus 3352

Encarnacão, Lucio 763

Endang Nirwan 2666

Endar Priyanto 2646, 2663, 2669, 2960, 3040, 3060, 3090, 3091, 3141, 2961, 2986, 3019, 3060, 3219

Endriartono Sutarto 2688, 2953, 3010, 3197, 3023

equipa 462

Ermera 29

Eropa, Parlemen 668, 764, 769, 787

esclarecemento 464

Escuteiros. Lihat Pandu Katolik

Espirito Santo, Agustinho 1014

Estado Maior das Falintil 459

estafeta 2221, 2232, 2301, 2319, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2353, 2364, 2416

ETADEP 24

ETSSC 307, 324, 326

ET-Wave 25, 59, 2824, 2825

ETAN 792, 796, 800, 804, 3003, 3219

Etchegaray, Roger 745

ETISC 668, 768, 797, 2240

Evans, Gareth 45, 291, 688, 2943, 2944

Externato de São José 2320, 2323, 2328

F

Fahik, Antonio Alves 29

Falintil 11, 18, 19, 39, 66, 82, 106, 116, 122, 142, 158, 214, 215, 218, 219, 227, 228, 230, 237, 240, 241, 243, 244, 246, 250 - 254, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 274 - 283, 308, 314, 316, 320, 321, 327, 333, 339, 340, 351, 355, 357, 360, 361, 362, 367, 390, 392, 398, 402, 403, 405, 408, 410, 423, 451 - 455, 458 - 462, 464, 466, 473, 475, 476, 477, 478, 480, 482 - 511, 516, 517, 765, 766, 770, 852, 853, 854, 862, 871 - 873, 875 - 880, 884, 885, 887, 889, 892, 898, 911, 913, 914, 918, 922, 926, 927, 928, 930, 931, 933 - 946, 953 - 958, 960, 968, 970, 972 - 975, 978, 981 - 983, 985, 987, 989, 990 - 992, 994 -1012, 1014, 1016, 1018, 1019, 1022, 1023, 1024, 1025, 1028 - 1041, 1047, 1048, 1051, 1054, 1056 - 1063, 1066, 1073 - 1077, 1080, 1082, 1085, 1089, 1090, 1092, 1093, 1097, 1099, 1101 - 1105, 1122, 1145, 1148, 1149, 1151 - 1165, 1168, 1177, 1183 - 1186, 1191, 1193, 1205, 1211, 1213, 1215, 1219, 1220, 1224, 1229, 1236 - 1240, 1242 - 1246, 1248, 1993, 1997, 1999, 2059, 2064, 2069, 2075, 2094, 2121 - 2123, 2132, 2133, 2135, 2137, 2138, 2140 - 2145, 2148, 2152, 2155, 2157, 2158, 2160, 2161, 2165, 2167, 2188, 2191, 2192, 2198 - 2203, 2210, 2212, 2213, 2221, 2228, 2231 - 2233, 2235, 2239, 2241, 2246, 2250, 2263, 2266, 2270, 2286, 2291 - 2292, 2295, 2298- 2303, 2307,

2308, 2311, 2315, 2318 - 2325, 2329 - 2339, 2343 - 2350, 2353, 2356 - 2363, 2365, 2368, 2370 - 2376, 2380 - 2382, 2415, 2416, 2419, 2421, 2466, 2467, 2470, 2521, 2528, 2529, 2538, 2539, 2542 - 2549, 2552, 2555, 2561, 2562, 2572, 2573, 2575, 2576, 2587, 2593, 2599, 2605 - 2609, 2610, 2613, 2636, 2647, 2709, 2745, 2746, 2747, 2757, 2937, 2940, 2941, 2942, 2945, 2949, 2963, 2976, 2979, 2981, 2983, 2984, 3001, 3042, 3044, 3069, 3070, 3076, 3078, 3082, 3083, 3097, 3100, 3101, 3110, 3113, 3115, 3117, 3082, 3208, 3340, 3341, 3118 - 3120, 3123, 3126, 3128, 3129, 3136, 3137, 3147, 3148, 3179, 3184, 3205

Lihat juga Fretilin, Fretilin/Falintil

Falo Chai 264, 276

Falur. *Lihat* Domingos Raul

Falur Rate Laek 2325

Family Health International 2488

Far Eastern Economic Review 2004, 2005

Farano, Vincenzo 740

Faria, Aviano Antonio 1111

Fatima Cunha, Ana de 29

Fátima, Nossa Senhora de 2323

FDTL 2329, 2331, 2337, 2338

Federer, Ceu Lopes 258, 358

Federer, Juan 768, 800

Feith, Herb 44

Felectil 294, 506

Fereira, Paulus 3149

Fereira, José Cardoso 3317. *Lihat juga* Mouzinho

Fernandes, Alarico 186, 191, 219, 231, 243, 245, 248, 250, 473, 483, 913, 917, 920, 944, 1018, 3343

Fernandes, Cisto. *Lihat* Helio Espirito Santo

Fernandes, Filomeno Pedro Cabral 2368

Fernandes, Francisco 790, 1031, 1035, 3322

Fernandes, Gilberto 3343, 3344

Fernandes, Hugo Maria 61

Fernandes, João 3316

Fernandes, Jacob Martins dos Reis 23

Fernandes, John 2484, 2485, 2486, 2487, 2508

Fernandes, Julio 3339, 3340

Fernandes, Martinho 3125, 3126, 3355

Fernandes, Vitalis 3318

Ferrão, Francisco Capella 3120, 3349

Ferreira, Alfredo Borges 499

feto nona 2127, 2187

Fiar Metin Merah Putih. *Lihat* Firmi Merah Putih

Filipe, Domingos 3315

Filippo, Monsignor Ettore de 741

Financial Times 3186, 3210

Finngeir Hiorth 792

finta 163

Firmi Merah Putih 1166, 2248, 3079

Fitun 1007, 1015, 1108, 1188

Fitzgerald, Stephen 701

FKP 3075, 3076, 3077

Flamboyan, Hotel 954, 958, 2127, 2146, 2148, 2150, 2231, 2232, 2267

Fokupers 44, 59, 64, 2254, 2258, 2276, 2809, 2813, 2824, 2825, 2967, 2968, 2979, 3203, 3257, 3261, 3262, 3264

Fontes, Asiz 3085, 3318, 3319

Forças Popular 2983

Força Auto Defesa 459, 461

Ford, Gerald 2943

Forum Komunikasi Partisan. *Lihat* FKP

Forum Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan. *Lihat* FPDK

Ford, Gerald R. 199, 222, 225, 659, 718 – 723, 727, 2629

Ford, Sir John Archibald 175, 702, 708, 710, 711, 712, 713, 714, 716

Forum Anggota Diet tentang Timor-Leste 791

Forum Estudante 796

Forsarepetil 307

Forsolidareste 298

Fortilos 298, 350, 369, 809, 832

FPDK 25, 325, 368, 421, 2647, 2745, 2951, 2962, 2963, 2981, 3019, 3053, 3059, 3063, 3064, 3067, 3073, 3074, 3080, 3087, 3099, 3100, 3121, 3136, 3137.

Lihat Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan

Força Auto-Defesa 2333

Força Defesa de Timor-Leste. *Lihat* FDTL

Forças de Sector 2333

Freitas, Adelino 3315

Freitas, Mário 2400

Frente Armada. *Lihat* Front Bersenjata

Frente Clandestina. *Lihat* Front Klandestin

Frente Diplomática. *Lihat* Front Diplomatik

Fretilin 2292, 2293, 2295, 2298, 2300, 2301, 2306, 2308, 2319, 2324, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2336, 2337, 2339, 2340, 2344, 2345, 2346, 2349, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2361, 2368, 2369, 2370, 2371, 2375, 2377, 2379, 2400, 2401, 2404, 2416, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2470, 2476, 2503, 2886, 2893, 2901, 2937, 2938, 2939, 2940, 2942, 3001, 3015, 3032, 3121, 3016

Fretilin/Falintil 2359, 2361, 2370, 2374

Fraga, Adolfo 1092, 1102

Fraga, Julião 403

Franca, Jhoni 2165

Fransiskan 160

Francisco Ruas Hornay 2606

Fransiscus Xavierus 2672

Fraser, Malcolm 672, 686, 687, 702, 755

Free East Timor Coalition. *Lihat* Koalisi Timor-Leste Merdeka

Freeport McMoran 383

Freire, Paulo 213

Freitas, Adelino 23

Freitas, Aquiles 458, 475, 476, 2606

Freitas, Cecilio Caminha 23

Freney, Denis 761, 780, 781, 793

Freitas, Aquiles 1959

Freitas, Inocêncio da Costa Maria 1111, 1112

Frente Armada 501, 502, 510, 511

Frente Clandestina 506, 510, 511

Frente Diplomática 510

Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente. *Lihat* Fretilin

Fretilin 10 - 15, 19, 23, 25, 39, 82, 89, 106, 115, 116, 158, 160, 170, 180 - 187, 190 - 194, 198, 200 - 238, 240 - 252, 254, 260 - 263, 265 - 269, 271, 272, 275 - 277, 280, 282 - 284, 306, 342 - 345, 347 - 356, 358, 360 -362, 390, 392, 399, 402, 417, 426, 427, 438, 451 - 458, 460 - 499, 502, 503, 506, 507, 511, 657, 664, 667, 673, 676, 680, 681, 685, 687, 692, 693, 700 - 702, 708, 712, 721, 722, 730, 736, 737, 739, 740 - 743, 751 - 759, 761 - 768, 770 - 771, 774 - 775, 777 - 786, 789 - 791, 799, 808, 815, 818, 852 - 881, 884, 887, 889, 891, 892, 896, 898, 899 - 901, 910 - 916, 918- 922, 926, 928 - 930, 933, 935, 936 - 946, 953, 954, 956, 960, 966, 968, 972, 974, 988 - 1002, 1005 - 1011, 1014, 1015, 1018, 1019 - 1034, 1037, 1039, 1042, 1051, 1056, 1066, 1075, 1076, 1092, 1101 - 1103, 1122, 1123,

1135, 1151, 1152, 1153, 1156, 1159, 1161, 1171, 1180, 1217, 1218, 1232 - 1238, 1240, 1242, 1243, 1274, 1981, 1986, 1997 - 2000, 2006, 2069, 2075, 2085, 2092, 2094, 2121 - 2123, 2131, 2132, 2138, 2142, 2148, 2152, 2187 - 2189, 2192, 2217, 2230, 2231, 2263, 2270, 2521, 2522, 2525, 2528, 2529, 2530, 2531, 2537- 2539, 2542, 2543, 2549, 2554, 2555, 2560, 2561, 2566, 2573, 2575, 2576, 2597 - 2621, 2626, 2628, 2636, 2639

Fretilin/Falintil 531, 853, 873, 876, 879, 880, 889, 892, 915, 917, 925, 926, 929, 939, 940, 953,974, 1005, 1006, 1011, 1029, 1032, 1051, 1056, 1058, 1065, 1099, 1104, 1151 - 1158, 1161, 1236, 1238, 1239, 1242, 1246, 1904 -1907, 1910 - 1916, 1923 - 1927, 1934 - 1938, 1944 -1963, 1966, 1967, 2533, 2534, 2536, 2542, 2543, 2546, 2599, 2600, 2607, 2610, 2611, 2612, 2633

Front Bersenjata 2318

Front Diplomatik 2318

Front Klandestin 2318, 2326, 2328

Fry, Ken 779

Fukusawa, Kiyoko 791

Funu Sei Nafatin 270

G

Gadapaksi 309, 411, 415, 417, 2350, 2638, 2640, 2957, 2960, 2961, 3018, 3019, 3069, 3091, 3108, 3120, 3121

Galuh Wandita. *Lihat* Soedjatmoko, Galuh Wandita

GAM 3025

Gama, Agusto 505

Gama, Carlito 3320

Gama, Jaime 669,696

Gama, Manuel 1164,1177, 1178, 2353, 2981, 3082, 3136, 3137, 3138, 3142

Gama, Paulino. *Lihat* Mauk Moruk

Gama, Vasco da 488, 504, 505, 507

Gamukai. *Lihat* Eduardo Ximenes

Gardapaksi. *Lihat* Gadapaksi

Garnadi, H.R. 2964, 3002, 3006, 3006, 3023

Gatot Purwanto 1137

Gatot Rudianto, Paulus 2661, 2666, 3071, 3073

Gatot Subyaktoro 1195, 2678, 3086, 3087, 3166, 3167, 3330

GCD 533, 538, 539, 541, 544, 545, 547

Gemi Nastiti 809

gencatan senjata 1040, 1061, 1065, 1075, 1076, 1077, 1092, 1093, 1245

Geni *Lihat* Gemi Nastiti

genosida 83, 86, 94, 100, 128, 136, 2522

Gerakan Rekonsiliasi dan Persatuan Rakyat Timor Timur. *Lihat* GRPRTT

Gerakan 11 Agustus 858, 862, 866, 871

Gerakan Angkatan Bersenjata. *Lihat* MFA

Gerakan Anti-Komunis 186

Gerakan Bersenjata 11 Agustus 200, 400, 451, 455, 458, 1904, 2528, 2530, 2598, 2600, 2601, 2613, 2614, 2615, 2617, 2618, 2619

Gerakan Non-Blok 173, 174

Gerakan Pengacau Keamanan. *Lihat* GPK

Gereja 2863, 2864, 2865, 2866, 2870, 2874, 2877, 2878, 2880, 2885, 2886, 2905.

Lihat juga Katolik, Gereja dan Protestan, Gereja

Gerhan Lentara, Andi 395, 1107, 1112, 1116,1118, 1119, 1126,1140, 2013, 2669

Gerombolan Pengacau Keamanan. *Lihat* GPK

Goa 161, 163, 168

Godinho, Joaquim 3338

Goei Hok Gie 806

Goenawan Mohamad 811

Golkar 273, 274, 304, 705

Gomes, Adelino 667, 779

Gomes, António 3335

Gomes, Costa 194

Gomes, Orlando 3101, 3157, 3158

Gomes, Donaciano 507

Gomes, Emiliano Joaquim 3356

Gomes, Francisco da Costa 189

Gomes, Geraldo 29

Gomes, Helena H X 29

Gomes, João 3355

Gomes, Julião 3034, 3151

Gomes, Manuel 3313

Gomes, Marcelo 3314

Gomes , Maria de Fatima 22

Gomes, Sebastião 293, 2327

Goncalves, Domingos 3345, 3346

Gonçalves, Guilherme Maria 172, 182, 183, 238, 239399, 424, 425, 426, 428,

Goncalves, Jacinto 3346

Gonçalves, José 212, 217

Gonçalves, Mário 3147

Gonçalves, Natalino Monteiro 1199, 1200, 3080, 3171, 3323

Gonçalves, Paul 1149

Goncalves, Paulo 3319, 3320

Goncalves, Ruben Monteiro 3318, 3323, 3325

Gonçalves, Tomas 183, 188, 193, 309, 354, 399, 400, 401, 402, 408, 416, 441, 442, 3000, 3020, 3033, 3058, 3098

Gonçalves, Vasco 169, 194

Goodman, Amy 796, 1130

Gorbachev, Mikhail 709

Goronwy-Roberts, Lord 712

Gouveia, Rui Magiolo 202, 203, 211, 664, 874, 912

GPK 1073, 1101, 1122, 1123, 1178, 2199, 2217, 2218, 2299, 2321

Grasiano, Felipe 3346

Graveyard Census Database 3257, 3269

Gray, Gary 718, 829

Greenstock, Jeremy 716

GRPRTT 3141

Guicciardi, Vittorio Winspeare 232, 663, 674, 693, 702, 731,759

Guinea Bissau 168

Gultom, Ery TB 2678, 3097, 3099

Gultom, Hulman 2678, 3090, 3091, 3143, 3340

Gunawan 2669

Guntur 3320, 3321

Guntur Merah Putih 3079, 3081

Gunung Kijang, PT 2459

Gusmão, Albino 918, 949

Gusmão, Gregorio Sebastião 1186

Gusmão, Illidio 3327

Gusmão, Joanico 3327

Gusmão, José Alexandre. *Lihat* Gusmao, Xanana

Gusmão, Kirsty Sword 798, 831

Gusmão, Xanana 1, 24, 27, 54, 55, 63, 159, 166, 188, 204, 242, 248, 250, 261, 265, 267 - 271, 274 - 276, 278, 282, 283, 290 - 294, 296, 297, 299, 300 - 303, 306, 310, 312, 313, 320, 322, 324, 327, 331, 333, 336, 337, 340 - 344, 346, 348, 350, 353, 355,

356, 357, 359 - 361, 363 - 367, 393, 442, 454, 455, 461, 471, 475, 477, 478, 482 - 499, 507 - 510, 689, 690, 694, 716, 729, 742, 747, 763, 766, 767, 769, 770, 773, 774, 775, 790, 791, 795, 797, 798, 801, 809, 813, 856, 918, 922, 930, 953, 970, 1013, 1021, 1022, 1024, 1025, 1041, 1058, 1089, 1161, 1262, 1951, 1960, 1961, 1983, 1986, 1998, 2050, 2052, 2053, 2059 - 2085, 2092, 2094, 2095, 2109 - 2111, 2318, 2325, 2327, 2328, 2338, 2537, 2599, 2801, 2807, 2813, 2941, 2944, 2945, 2949, 3211, 3221

Gustaf Hero 2999, 3125, 3126, 3129, 3126, 3355

Guterres, Mateus 3339

Guterres, Abel 497, 755, 771 – 774

Guterres, Aparicio 3324, 3325

Guterres, Apolinario 790

Guterres, Antonio Amado de Jesus Ramos 1014, 1019, 1025

Guterres, Aquelino Fraga 1993, 1995

Guterres, Bernardino Agusto 320, 326, 2993, 3094

Guterres, Caetano 1992, 1998, 2000, 2002, 2005, 2006, 2106

Guterres, Eurico 309, 313, 321, 417, 419, 1929, 2165, 2292, 2298, 2301, 2320, 2350, 2639 - 2642, 2646, 2649, 2693, 2956, 2957, 2962, 2976, 3017, 3018, 3019, 3021, 3023 - 3026, 3030, 3031, 3034, 3035, 3039, 3054, 3061, 3064 - 3066, 3077, 3090, 3091, 3121, 3122, 3123, 3139, 3144, 3161, 3162, 3164, 3196, 3218, 3335, 3336

Guterres, Francisco 268, 360, 361,1957. *Lihat juga* Lu Olo

Guterres, Francisco da Conceição 2309, 2430

Guterres, Isabel Amaral 23, 24, 26, 2813

Gutteres, Januario 1139

Guterres, José Caetano 61

Guterres, Jose Luis 754,762

Guterres, Dr. José 2488

Guterres, Olandino 886, 887, 1097, 1099, 1269

Guterres, Vicente 499, 752

Guterres, Virgilio da Silva 463, 2043, 2047, 2055, 2056, 2057, 2109, 2333

Guterres Lopes, Aniceto 23, 24, 65, 2045, 2089, 2090, 2094, 2095, 2096, 2097, 2800

H

Habibie, BJ 45, 303, 304, 305, 306, 311, 312, 331, 336, 386, 395, 396, 415, 511, 678, 680, 689, 690, 696, 698, 699, 706, 734, 751, 801, 802,803, 812, 817, 1929, 1932, 2945, 2946, 2950, 2954, 2956, 2974, 3003, 3023, 3082, 3196, 3199, 3205, 3210, 3213, 2947, 3023, 3196, 3203

hadeer ai-riin 2734

Hadi Santoso 903, 904

Hadisiswoyo, Subagyo 2954, 3010, 3013, 3042, 3061, 3197, 3010

Haing Tjipto Sularsono 2662

HAK, Yayasan 24, 44, 64, 2089, 2095, 2158, 2159, 2312, 2473, 2507, 2632, 2641, 2824, 2825, 2941, 2952, 2953, 2955, 2958, 2960, 2961, 2962, 2964, 2965, 2985, 2986, 2987, 3002, 3006, 3009, 3010, 3012, 3017, 3019, 3023, 3026, 3029, 3146, 3203, 3027, 3029, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3040, 3041, 3046, 3047, 3048, 3051, 3056, 3060, 3062, 3063, 3095, 3108, 3115, 3116, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3157, 3161, 3165, 3199, 3203

Hak

- atas air 83, 101
- atas ganti rugi 102
- atas hidup 100, 101, 110, 111, 113
- atas proses peradilan yang layak 107
- ekonomi, sosial, dan budaya 112

Hak Asasi Manusia, Pengadilan 3165, 3192, 3217, 3218

Haksolok 270

Halek, Raul 3331

Halilintar 400, 415, 1149, 1166, 1171,1172, 1173, 1177, 1179, 1188, 1191, 1199, 1215,1219, 1220, 1248, 2311, 2353, 2547, 2636, 2641, 2956, 2981, 2997, 3016, 3028, 3053, 3062, 3072, 3079, 3080, 3081, 3082, 3131, 3136, 3317, 3319, 3320, 3138

Hamengkubuwono IX, Sultan 2399

Hametin Merah Putih 1166, 1172, 1173, 1220, 2174, 3030, 3079, 3081

Handrianus Eddy Sunaryo 1107,1139

Handy Geniadi 3019

Hansip

Hankamrata 409, 2361

Hanoin Lorosae II 315, 332, 2958, 3002, 3009, 3012

Hansip 240, 253, 254, 260, 262, 274, 276, 280, 281, 309, 362, 396, 401, 404 – 407, 409, 415, 443, 851, 932, 934, 935, 937, 938, 939, 941, 942, 945, 950, 951, 954, 955, 957, 958, 959, 963, 964, 969, 970, 972 - 974, 976, 985, 989, 990, 991, 992, 1000, 1001, 1003, 1004, 1030, 1041 - 1044, 1047 - 1049, 1054 - 1057, 1059 - 1062, 1065, 1067, 1069, 1072, 1074 - 1080, 1082, 1083, 1085, 1086, 1089, 1090, 1093, 1096, 1097, 1099, 1103, 1105, 1107, 1151, 1154 - 1159, 1162, 1229, 1230, 1238 - 1245, 1259, 1274, 1912, 1918, 1919, 1921, 1922, 1924 - 1926, 1944, 1945, 1946, 1951, 1954, 1955, 2132, 2136, 2138 - 2142, 2144, 2145, 2148, 2150 - 2152, 2156, 2160, 2163, 2190, 2193, 2194,

2199, 2201, 2204, 2206, 2207, 2217, 2218, 2233, 2234, 2245, 2250, 2266, 2267, 2295, 2298, 2300, 2309, 2310, 2311, 2333, 2343, 2344, 2346, 2361 - 2363, 2376, 2378 - 2380, 2421, 2423, 2467, 2484, 2486, 2533, 2536, 2537, 2538, 2542, 2545, 2558, 2559, 2572, 2573, 2607 - 2609, 2621, 2622, 2624, 2638, 2641, 3016 - 3018, 3027, 3028, 3073

Hardiono Saroso 2662, 2665

Hardoputranto SJ 805

Hari Antikorupsi Internasional 2885

Hari Mulyono 2661

Hari Nere 485

Hari Saryono 2665

Hariwibowo, J. 427, 428

Harkito 2666

Harimau Merah Putih 3079, 3081

Harmoko 304

Harriman 682

Hart, Gary 725

Hartono 2663

Haryadi Sutanto 2670

Harun Tateny 3330

Hashimoto, Ryutaro 734

Hata 456

Hati, Yayasan 2406, 2407

Hawke, Bob 688, 780

Heiho 377

Helio Espírito Santo 2337

Hendropriyono, A.M. 402, 2654, 2675, 2688, 2954, 3025, 3058, 3194, 3198, 3195

Henricus Harjatmo 2664

Henriques, Jerónimo 499

Henrique, José 976, 990

Hercules 2399, 2400

Heri Subagio 2669

Herman Sedyono 1167, 1196, 1282, 3040, 3086, 3087, 3088, 3166, 3167, 3086, 3087, 3088, 3089, 3165, 3166, 3167, 3330

Hermanu (Letnan Kolonel Pol.) 3068

Hery Mutholib 2667

Heu, Antonio 1013, 1019

Hornay, Francisco Ruas 244, 476, 1011, 1012, 1237

Hibberd, Rob 793

Hidayatullah 2402

Hidup Baru 808

Higashi Chimoru Tsuchin 787

Hill, Helen 782

Hires, Chip 3184

Hobart East Timor Committee 793

Holbrooke, Richard 726

Howard, John 311, 337, 678, 690, 812, 2946, 3210, 3213

HPPMAI 505

HRDAG 3255, 3267, 3274

HRVD 533, 538, 539, 540, 541, 544, 550. *Lihat juga* Basis-data pelanggaran hak asasi manusia

Huang Hua 701, 758

hukum hak asasi manusia internasional 2519, 2543, 2610, 2619, 2624

hukum humaniter 2519, 2523, 2543, 2560, 2570, 2583, 2585, 2587, 2592, 2594, 2610, 2611, 2619, 2620, 2624

hukum kebiasaan 91, 95, 97, 99, 102, 104, 106, 117, 118, 121, 122, 127, 130, 131, 142

hukum kebiasaan internasional 82, 83, 84, 92, 97, 100, 102, 109, 110, 114, 116, 117, 119, 120, 128, 2519, 2520, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2593, 2611, 2624

hukum kebiasaan perang 83, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 127, 128, 130, 131

Humphrey, Hubert 725

Hull, Geoffrey 800

Hull, Terence 535, 645

Human Rights Advocates 794

Human Rights Data Analysis Group. Lihat HRDAG

Hutajulu, Hisar Richard 3076, 3075, 3077, 3315

HRDAG 42, 43, 67

HRVD 37

Hyland, Tom 797

I

IAPC 810

ICCPR 1984, 1985, 2025

ICESCR 2595, 2692. *Lihat juga* Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

ICIET 415

ICRC 2561, 2564, 2565, 2598, 2637, 3162

ICJ 2023, 2037, 2038, 2060, 2066, 2069, 2074, 2076

ICRC 26, 204, 211, 212, 213, 214, 223, 231, 252, 256, 257, 258, 261, 262, 272, 281, 308, 332, 349, 350, 788, 855, 922, 1092, 1194, 1248, 1993, 2061, 2067, 2447, 2463, 2505

ICTJ 21, 67, 69

ICTY 3191, 3193

IDP. *Lihat* pengungsi dalam negeri

IFET 319, 793, 800, 804

Igerja Protestante Timor-Leste. *Lihat* IPTL

IGGI 714, 732

IKADIN 2020, 2021, 2022, 2055

IMF 304, 337, 341, 2945, 3209

Imparsial 22

Impettu 285, 297, 299, 307, 411, 506

impunitas 375 – 377, 404, 2528, 2538, 2540, 2546, 2552, 2555, 2559, 2573, 2583, 2584, 2705, 2862, 2881, 2887, 2891, 2892, 2894

Imaculada, Aquilina 2321, 2324, 2326

Immaculata Mardani 805

imunitas 93

Inacio, Juvenal 219. *Lihat juga* Sera Key

India 168, 239, 256

Indocina 172, 175

Indocement 2404

Indonesia 158 - 160, 162, 166, 168, 170, 172 - 180, 183 - 187, 189 - 201, 205 - 209, 211, 212, 214 - 219, 221 - 235, 237 - 248, 250, 251, 253 - 263, 265 - 268, 270 - 278, 280 - 308, 310 - 327, 329 - 334, 336 - 344, 346, 350, 352 - 359, 361 - 369

INFID 810, 811

Infien, Luis 3354, 3355

Infight 806, 808

Inggris 162, 164, 175, 195, 214, 244, 336, 337, 351, 398, 2864, 2865, 2916

International Court Tribunal for Yugoslavia. *Lihat* ICTY

Initiatives for International Dialogue 798

Inside Indonesia 810, 832

Institute for the Healing of Memory 2814

integrasi 171, 172, 177, 178, 180, 183, 190, 192, 194, 195, 196, 198, 205, 207, 216, 221, 222, 229, 233, 234, 238, 239, 289, 291, 307, 312, 313, 314

Interfet 159, 331, 335, 338, 339, 340, 386, 396, 691, 703, 706, 709, 716, 729, 735, 1167, 1169, 1204, 1205,

1213, 1229, 2703, 2866, 2950, 3089, 3114, 3123, 3125, 3176, 3178, 3186, 3174, 3186, 3187, 3204

International Bar Association and the Law Council of Australia 797

International Center for Transitional Justice. *Lihat* ICTJ

International Covenant on Civil and Political Rights. *Lihat* ICCPR

International Organization for Migration. *Lihat* IOM

International Refugee Council. *Lihat* IRC

intervensi militer penuh 376. *Lihat juga* Invasi dan Seroja, Operasi.

invasi 14, 80, 81, 87, 92, 99, 115, 116, 123, 126, 132, 158, 160, 178, 193, 206, 211, 215, 216, 218, 222, 224, 226, 227, 229 - 234, 236, 237, 271, 272, 277, 282 -285, 289, 291, 293, 299

IOM 67, 341, 2809

IPJET 796

IPTL 26

Irak 239, 256

IRC 2388, 2406

Irian Barat 176, 671, 673, 681, 693, 708, 718

Irlandia 313, 318, 319

Irsan Wijaya 2678, 3102

Irwan (LNU) 3315

Irwan Kusnadi 395, 2675, 2955

Isaac, Leandro 499, 2963, 3142, 3164

Ishak Kodijat 1117

Istiyono 2667

Iswanto 2661

IWGIA 786

J

Jacob Djoko Saroso 2670, 3316, 3340, 3343

Jajak Pendapat 13 - 15, 19, 27, 80, 81, 92, 159, 165, 168, 302, 304, 314, 316 - 324, 328, 330 - 333, 336 - 341, 386, 395 – 396, 415 – 418, 421 – 423, 678, 696, 698, 709, 734, 747, 775, 1164, 1165, 1167, 1169, 1170, 1186, 1187, 1189, 1190, 1192, 1195, 1201, 1203, 1205, 1210 - 1212, 1217, 1228, 1240, 1241, 1247, 1249, 1251, 1903, 1907, 1920, 1928, 1930, 1956, 1965, 2132, 2165, 2167, 2168, 2170, 2172, 2174, 2188, 2222, 2225, 2227, 2229, 2247, 2311 - 2316, 2328, 2329, 2335, 2365 - 2367, 2382, 2386, 2405, 2406, 2419, 2471, 2474, 2482, 2486, 2527, 2547, 2572, 2577, 2582, 2596, 2609, 2610, 2624, 2628, 2632, 2635, 2638, 2640, 2643, 2645, 2648, 2650, 2651, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2703, 2709, 2757, 2777, 2778, 2798, 2799, 2833, 2834

Jakarta 2 1062, 1063, 1245

Jakarta Jakarta 2067

Jaksa Agung 2011, 2158, 2223, 2704, 2722

Jaksa Agung Timor-Leste untuk Kejahatan Berat, Wakil 3043, 3105, 3135, 3192, 3193, 3195

Januario, Joaquim 3344

Jaringan Pengamanan Sosial 326

Jepang 160, 164, 175, 239, 256, 257, 284, 377, 378, 398, 3014, 3211

Jesuit Refugee Services (JRS) 26, 2406

Jesus, Afonso de 1110, 1139

Jesus, António de 3323

Jesus, Filomeno Paixão de 458, 459, 460, 467, 479

Jesus, João Baptista Soares de 947, 1014

Jesus, Paulino de 3318

João, Adriano 1914, 1941

Joko Himpuno 971

Joko Irianto 2678, 3107, 3109, 3193

Jolliffe, Jill 780, 788, 885, 1106

JRS. *Lihat* Jesuit Refugee Services

JSMP 64

JSN 168, 170

jumlah kematian 530

Jusfiq Hadjar 806

justiça popular 2604, 2605. *Lihat juga* Pengadilan Rakyat

Justice System Monitoring Program. *Lihat* JSMP

justo correctivo 465, 2604

Juventude 23

K

Kablaki, Gunung 390, 402

Kaer Metin Merah Putih 1179, 1220, 2165, 3079, 3081, 3083, 3147, 3317

Kairupan, Glenny 2964, 2965, 3025, 3030

Kakuk. *Lihat* dos Anjos, Eduardo

Kalangi, A.P. 426, 428, 429, 431, 2661

Kalbuadi, Dading 193, 226, 230, 231, 277, 390, 401, 673, 902, 1981, 2455, 2660, 2662, 2688

Kaledonia Baru 690

Kalohan 918, 1039

Kamar Dagang 2885

Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia. *Lihat* OHCHR

Kamiso Miran 1167, 3123, 3123

Kampanye Dialog Timor 299

kamp pemukiman kembali 253, 853, 926, 971, 1082

kamp penampungan 254

Kamra 3016, 3017, 3098, 3150, 3154

Kanada 256, 319

kanonikalisasi 3273, 3275

Kanazawa 730, 731

Kanindotex 2404

kantonisasi 2949, 3044, 3179

Kantor Interim 22

Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB. *Lihat* OHCHR

Kanusa Bino 917

Karmel, Biara 27

Kasa, Leonardos 3356

Kase, Jeremias 1147

Kasenda, R. 230, 902

Kasospol 383

kasu sala 2911

Katjasungkana, Nugroho 298, 364, 365, 806, 808, 812, 2802

Katolik, Gereja 8, 14, 17, 18, 20, 22, 63, 64, 159, 161, 255, 266, 271, 272, 273, 274, 278, 281, 306, 313, 332, 341, 492, 2158, 2260, 2271, 2564, 2598, 2709, 2717, 2940, 2941, 3011, 3013, 3117, 3118

KB. *Lihat* Keluarga Berencana

keadaan darurat 2955, 2974, 2989, 2990, 3041, 3091, 3095, 3196, 3197, 3199, 3200, 3205, 3206

keadilan koreksi. *Lihat justo correctivo*

Kesejahteraan Islam Nasrullah, Yayasan. *Lihat* Yakin

Keating, Paul 689

Kehakiman, Departemen 2008

Kejahatan Berat, Panel Khusus 3188

Kejahatan Berat, Unit Penyidikan 86, 87, 400, 415, 416, 2015, 2704, 2713, 2715, 2727, 2739, 2750, 2753, 2759, 2760, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 3311, 3312

kejahatan perang 129

Kejahatan terhadap kemanusiaan 89, 128

Kejaksaan Agung 31, 36, 46, 47, 52, 65, 80, 85, 89, 90, 93, 94, 885, 2702, 2705, 2711, 2713, 2714, 2715, 2716, 2718, 2726, 2727, 2730, 2731, 2734, 2736, 2739, 2749, 2750, 2759, 2760, 2762, 2882, 2894

kekerasan pengganti 2130, 2148, 2165, 2172, 2264

Kekerasan seksual 109

kelaparan 12

kelompok fungsional 379

Keluarga Berencana 286, 2483, 2484, 2488, 2504

Keppres No. 107/1999 395

kerja paksa 160, 163, 166, 209, 213

kesalahan identifikasi 90

Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas (KRK) 2716 - 2718, 2724, 2736, 2741, 2751

Kesterven, James 793

Keuskupan Dili 3090, 3095, 3161, 3162

Ketut Suarna, I 2667

Ketut Wardhana 2661

Keri Laran Sabalae 510

KIHESB 2441, 2442, 2443, 2445, 2463, 2475, 2476, 2501, 2507, 2508, 2509

KIHSP. *Lihat* ICCPR

Kilik Wae Gae 270, 272, 475, 485, 486, 487, 488, 492, 493, 494, 1010, 1159

KIN 384

Kinderdorf 2405, 2409

King, Mandy 793

Kiper 812

Kirbiantoro 887

Kissinger, Henry 222, 225, 352, 718, 720, 721, 722, 723, 725, 727,736, 2943

Kitab Undang-Undang Acara Pidana. *Lihat* KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lihat* KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer 135

Klandestin, Front 2937, 2941, 3099, 3102

Klibur Oan Timor Aswain. *Lihat* KOTA

KNIL 377

Koalisi LSM 2786, 2788, 2791

Koalisi Timor-Leste Merdeka 791

Kohen, Arnold 694, 727, 737, 787, 788, 790

Kodahankam 236, 388, 389, 390, 410, 431, 440, 441, 445

Kodam 276, 277, 309, 315, 346, 354, 381, 390, 391, 416, 417, 441, 442, 444, 2949, 2951, 2952, 2954, 2955, 2957, 2961, 2999, 3004, 3010, 3011, 3013, 3024, 3042, 3062, 3196, 3197, 2961, 3010, 3062, 3087, 3132

Kodam VIII Brawijaya 2390

Kodim 381, 389, 401, 403, 406, 407, 410, 419, 441, 1630 1070, 2137, 2139, 2141, 2142, 2144, 2145, 2146, 2149, 2152, 2154, 2160, 2162, 2173, 2176, 2177, 2178, 2179, 2181, 2189, 2190, 2192, 2193, 2199, 2200, 2204,

2210, 2212, 2227, 2234, 2235, 2537, 2545, 2547, 2636, 2640, 2641, 2642, 2645, 2646, 2648, 2693, 2891, 2902, 2942, 2946, 2947, 2951, 2952, 2957, 2958, 2959, 2961, 2964, 2965, 2969, 2976, 2986, 2991, 2993, 3002, 3005, 3006, 3011, 3060, 3061, 3062, 3076, 3081, 3083, 3084, 3151, 3182, 3198, 3209, 2951, 2952, 2955, 2985, 3000, 3016, 3026, 3029, 3030, 3031, 3034, 3037, 3046, 3048, 3060, 3062, 3065, 3067, 3068, 3070, 3073, 3075, 3076, 3077, 3080, 3082, 3085, 3087, 3090, 3097, 3100, 3102, 3104, 3111, 3114, 3116, 3119, 3037, 3046, 3081, 3095, 3108, 3109, 3115, 3116, 3119, 3120, 3125, 3127, 3131, 3132, 3133, 3134, 3136, 3137, 3142, 3151, 3152, 3166, 3168, 3173, 3174, 3181, 3182, 3184, 3197, 3205, 3208

Kodim 1633 2982, 3071

Kodim 1635 2982, 3086

Kodim 1636 2982, 3079, 3170

Kodim 1638 2982, 3035, 3037, 3107, 3108, 3109

Kodim 1639 2982, 3123

Kogasgab Seroja 207, 388, 389, 390, 410, 2455

Kohen, Arnold 2802

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia 2315

Kolakops 391, 393, 394, 410, 441, 444, 1107, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125, 1131, 1137,1138, 1145, 1989, 1990, 2013, 2060

Komandan Peleton Intelijen. *Lihat* Danton Intel

Komando Pasukan Sandhi Yudha. *Lihat* Kopassandha

Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. *Lihat* Kopkamtib

Komando Strategi dan Cadangan Angkatan Darat. *Lihat* Kostrad

Komando Taktis. *Lihat* Kotis

komando tempur 380, 385, 391

komando teritorial 380, 385, 389, 394, 406, 428

Kometa, João 3324

Komnas HAM 2963, 3134

Komisaris Nasional 22, 23, 36, 41

Komisaris Regional 28, 29, 33, 36, 47, 56, 57, 58, 59, 61, 69, 70, 93, 2702, 2712, 2715, 2722, 2725, 2726, 2736, 2754, 2755, 2757, 2763

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia 851

Komisi Ahli Hukum Internasional. *Lihat* ICJ

Komisi HAM PBB 1111, 1115

Komisi Ekonomi Eropa 668

Komisi Gabungan Pembela Timor-Leste 298

Komisi Hak Asasi Manusia 100, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 136, 138, 139, 140, 141, 282, 288, 295, 321, 669, 703, 728, 762, 793, 798, 1145, 1247, 2089, 2157, 2641, 2648,

Komisi Katolik untuk Keadilan dan Perdamaian 740, 744, 780

Komisi Kebenaran dan Persahabatan 24, 25, 27, 2896. *Lihat juga* CTF

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan 82, 94, 136

Komisi Nasional Perempuan 44

Komisi Nasional Perlindungan Anak 2407

Komisi Pemilihan 317, 318, 329, 330, 368, 369, 2993, 3094, 3208

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi. *Lihat* CAVR

Komisi Penyelidik Internasional 2969, 2971, 3057, 3129, 3142, 3201, 3215, 3221

Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Tim-Tim. *Lihat* KPP-HAM

Komisi Penyelidikan 8, 210, 366, 2011, 2035

Komisi Penyidikan 86

Komisi Perdamaian dan Stabilitas. *Lihat* KPS

Komisi Rekonsiliasi 8

Komisi Timor untuk Penentuan Nasib Sendiri 170

Komite Bersama untuk Timor-Leste 2055

Komite Dekolonisasi 2864, 2942

Komite Demokratis Revolusioner. *Lihat* CDR

Komite Eksekutif 212, 284

Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 112

Komite Independen Pemantau Suara. *Lihat* Kiper

Komite Investigasi 920, 921

Komite Keuskupan Amerika Serikat 273

Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi 165, 173, 177, 239, 256, 282, 288, 661, 666, 668, 672, 676, 717733, 761, 762, 793, 815

Komite Khusus untuk Pendampingan Situasi di Timor-Leste 668

Komite Palang Merah Internasional. *Lihat* ICRC

Komite Pengarah 18, 20, 22, 46

Komite Regional 212

Komite Reparasi Korban 2824

Komite Sentral 184, 191, 203, 208, 211, 212, 218, 219, 220, 223, 235, 244, 245, 248, 250, 265, 267, 269, 270, 271, 349, 857, 858, 859, 864, 873, 882, 913, 914, 917, 918, 919, 922, 924, 953, 969, 990, 1010, 1011, 1013, 1014, 1015, 1018, 1020, 1021, 1022, 1024, 1033, 1037, 1039, 1042, 1051, 1233, 1237, 1238, 1907, 1957, 1960, 2528, 2604, 2606, 2612, 2613, 2617, 2618, 2619

Komite Solidaritas dan Bantuan. *Lihat* Comissão de Apoio e Solidaridade

Komnas HAM. *Lihat* Komisi Hak Asasi Manusia

Komnas Perempuan 2802

Kompi Gabungan 1107, 1121, 1123, 1125, 1126, 1128, 1129, 1131, 1132, 1139, 1142

komunisme 172, 174, 175, 179, 186, 187, 188, 657, 722, 739, 748, 795

Konferensi Reorganisasi Nasional 265, 269, 485, 486, 487, 488

Konferensi Waligereja Indonesia 281, 289, 805, 810

konflik bersenjata 83, 92, 95, 97, 100, 109, 114, 115, 116, 117, 120, 124, 127, 128, 129, 130, 131

konflik internal 27, 39, 42, 64, 158, 160, 165, 170,185, 187, 201,204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 225, 235, 271, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 360,361, 362, 856, 2862, 2878, 2910 *Lihat juga* perang saudara

Kongres Amerika Serikat 45, 243

Kongres Nasional Afrika 497

Kongres Nasional Perempuan 64

Konis Santana 486, 487, 510, 511, 1161

Konkordat 1940 739

Konsili Vatikan II 657, 738, 739, 748

Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste 22, 220

Kontak Damai 490, 491

Kontras 22

Konvensi Jenewa 2521, 2522, 2526, 2528, 2530, 2570, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2592, 2593, 2594, 2610, 2611, 2612, 2614, 2619, 2624, 2692

Konvensi Den Haag untuk Perlindungan Warisan Budaya dalam Situasi Konflik Bersenjata 118, 1983, 2444, 2445, 2501, 2594

Konvensi Hak Anak 2286, 2289, 2291, 2329, 2339, 2373, 2387, 2413, 2417, 2418, 2420, 2424, 2427, 2571, 2591

Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak 83, 96. *Lihat juga* CRC

Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial 97

Konvensi Jenewa 83, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 127, 129, 130, 132, 135, 141, 142, 143, 144, 1909, 1919, 1933, 1934, 1966, 1967, 1983, 1984, 1991, 2125, 2184, 2229

Konvensi Jenewa IV 2288, 2291, 2386, 2413, 2415, 2418, 2420, 2422, 2424, 2426, 2427, 2428, 2441, 2444, 2445

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia 83, 96, 97, 105, 106

Konvensi Nasional Bangsa Timor 498

Konvensi tentang Hak Anak 96, 97, 110, 111

Konvensi tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Persenjataan Konvensional Tertentu yang Dianggap Dapat Merusak secara Luas 117, 118, 119

Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Beracun, dan tentang Pemusnahan Senjata Tersebut 118, 119

Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan Senjata Kimia, dan tentang Pemusnahannya 119

Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan, Penyimpanan, Produksi, dan Pengiriman Ranjau Anti-Personil, dan Pemusnahannya 119

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 83, 96

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 83, 96, 97, 110

Konvergensi Nasionalis 495

Kooijmans, Pieter 293, 1106, 1121, 2327

Koopskam 391, 392, 944, 1101

Ko-ops Nusra 2974, 2949, 3199, 3200

Kopasgat 388

Kopassandha 193, 215, 226, 228, 231, 279, 281, 387, 388, 392, 399, 400, 402, 889, 899, 903, 933, 937, 938, 947, 954, 963, 964, 968, 969, 970, 976, 990, 1033, 1041, 1042, 1051, 1052, 1062, 1070, 1083, 1085, 1095, 1100, 1245, 2137, 2148, 2149, 2232, 2298, 2347, 2541 *Lihat juga* Kopassus, ABRI

Kopassus 250, 280, 295, 308, 309, 328, 340, 346, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 359, 361, 362, 393, 394, 395, 398, 403, 410, 411, 416, 418, 420, 421, 422, 427, 440, 442, 444, 885, 1034, 1065, 1073, 1074, 1077, 1079, 1082, 1083, 1088, 1103, 1104, 1112, 1113, 1147, 1163, 1168, 1174, 1185, 1186, 1187, 1226, 1227, 1228, 1246, 1992, 1993, 2014, 2017, 2044, 2061, 2064, 2070, 2080, 2086, 2093, 2134, 2157, 2167, 2232, 2245, 2349, 2350, 2351, 2380, 2381, 2392, 2400, 2544, 2545, 2583, 2639, 2641, 2642,

2643, 2645, 2646, 2647, 2652, 2654, 2939, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2964, 2977, 2982, 2983, 2985, 2989, 2992, 2999, 3014, 3016, 3018, 3019, 3022, 3024, 3025, 3027, 3033, 3035, 3038, 3040, 3046, 3047, 3048, 3049, 3052, 3062, 3063, 3070, 3072, 3073, 3076, 3078, 3080, 3087, 3091, 3103, 3104, 3103, 3109, 3127, 3132, 3195, 3315, 3342, 3343, 3344, 3349, 3355, 3356, 3105, 3106, 3108, 3109, 3111, 3115, 3116, 3117, 3118, 3120, 3121, 3124, 3126, 3127, 3131, 3132, 3164, 3187, 3193, 3194, 3195, 3197

kopi 9, 2459

Kopkamtib 384, 1991

Kopur 388

Koramil 381, 389, 401, 403, 406, 410, 1992, 1993, 2086, 2139, 2140, 2141, 2142, 2144, 2145, 2146, 2149, 2151, 2154, 2156, 2157, 2162, 2165, 2172, 2175, 2189, 2190, 2192, 2193, 2198, 2202, 2203, 2204, 2205, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2217, 2224, 2228, 2233, 2234, 2240, 2243, 2257, 2259, 2266, 2267, 2537, 2544, 2545, 2572, 2636, 2645, 2646, 2951, 2952, 2955, 2973, 3037, 3040, 3070, 3081, 3095, 3108, 3110, 3111, 3117, 3120, 3128, 3131, 3134, 3135, 3136, 3138, 3143, 3147, 3148, 3149, 3166, 3171, 3173, 3197

Korea Selatan 239, 256, 318

Korem 381, 389, 391, 392, 393, 394, 401, 404, 409, 410, 416, 417, 418, 419, 420, 441, 442, 2543, 2581, 2636, 2639, 2640, 2645, 2652, 2654, 2656, 2693, 2950, 2951, 2952, 2954, 2955, 2964, 2965, 2996, 3002, 3008, 3009, 3010, 3012, 3013, 3015, 3016,

3024, 3028, 3029, 3030, 3033, 3035, 3037, 3162, 3037, 3039, 3069, 3108, 3115, 3116, 3203, 3041, 3045, 3065, 3091, 3116, 3117, 3124, 3185, 3186, 3197, 3205

KORPRI 2960

Kostrad 226, 228, 231, 235, 236, 247, 249, 333, 338, 354, 357, 386, 388, 391, 392, 394, 395, 412, 424, 441, 898, 899, 1101, 1159, 1223, 2086, 2134, 2157, 2160, 2221, 2261, 2583, 2644, 2953, 2954, 2982, 2990, 3041, 3163, 3164, 3197, 2953, 2955, 3170

Kuntara 2675

KOTA 10, 23, 172, 182, 205, 206, 207, 221, 222, 351, 353, 751, 759, 1904, 2031, 2532, 2599, 2600, 2621, 2622, 2901

Kotis 943, 946, 947, 948, 999, 1001, 1043, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1057, 1058, 2151

Kouwenberg, Saskia 796

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. *Lihat* ICCPR

Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 83, 96, 97, 112, 113, 2441, 2577, 2595, 2866, 2867, 2873, 2874

Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik 83, 96, 97, 99, 100, 101, 2442, 2446, 2867, 2868

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 101, 102, 103, 106, 107, 113

KPN 295, 1113, 1117, 1119, 1129, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1143

KPP-HAM 2876

KPS 314, 315, 320, 321, 340, 2963

Kranek 510, 511

Kraras, Insiden 848

Krieger, Heiki 45, 659

kritik-otokritik 465, 2604

Kronlid, Lotta 799

Kruger, Sam 780

KUD 437

KUHAP 1983, 1984, 1990, 2000, 2007, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2033, 2036, 2046, 2049, 2050, 2051, 2053, 2054, 2056, 2058, 2059, 2062, 2064, 2065, 2067, 2071, 2073, 2075, 2076, 2079, 2080, 2086, 2090, 2091, 2093, 2096, 2098, 2882

KUHP 134, 135, 144, 145, 1125, 1139, 1140, 1981, 1983, 1996, 2000, 2004, 2023, 2051, 2056, 2068, 2092, 2093, 2125, 2289, 2377, 2423, 2567, 2882

KUHPM 1126, 1138, 1139

Kusumaatmaja, Mochtar 45, 256

Kusni Sulang 806

KWI. *Lihat* Konferensi Waligereja Indonesia

L

Laksaur 2956, 2981, 2997, 2998, 3028, 3040, 3063, 3071, 3086, 3087, 3088, 3089, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3026, 3063, 3064, 3087, 3326, 3327, 3328, 3332

Lalu Manus 3355

Lao, Mateus 3353

La'o Hamutuk 64

Lafaek, Fera 474, 488

Laksaur 1149, 1167, 1168, 1172, 1173, 1180, 1181, 1183, 1190, 1195, 1197, 1198, 1210, 1215, 1223, 1248, 1249, 2167, 2168, 2176, 2178, 2179, 2180, 2181, 2183, 2222, 2261, 2314, 2354, 2383, 2384, 2547, 2548, 2636, 2637, 2641, 2646, 2732

Laline, Konferensi 460, 471, 472, 486, 492, 1015, 1021

Lane, Max 800, 806

Lapsley, Pastor Michael 2813

Lay Kuon Nhen 755

Lasut, Yopie 805, 808

Lau, Anito 3331

Le Compt, M. 703

Leão, Adolfo Viera 3336

Lebre, Pedro Correia 29

Leite, Sabino 2165

Leite, Sabino Goveia 3317

Leki, Gaspar 3312

Leki Nahak Foho Rai Boot 493

Lembaga Advokasi anti-Kekerasan terhadap Masyarakat Sipil. *Lihat* Lakmas

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Lihat* LIPI

Lembaga Perempuan Oecussi. *Lihat* Centro Feto Enclave Oecusse

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. *Lihat* Elsam

Lemos, Ana Xavier da Conceição 2978, 2979, 3102, 3157, 3179, 3180, 3181

lisan 2776

Lemorai, Yayasan 2402, 2408

Lemos, Adriano Soares 479

Lemos, Carlos 2020, 2036, 2037

Lemos, Pedro 879, 1012, 1042, 1044, 1049, 1051

Lentara, Gerhan. *Lihat* Gerhan Lentara, Andi

Leo Sukata, Uskup Agung 1054

Lere Anan Timor 458, 471, 476, 485, 486, 487, 496

Leto, Flaviano Dasi 3320

Leto, Marcelino 3319

levantamento 257, 261, 275, 280, 1951, 2188, 2345, 2348, 2381, 2562

levée en masse 1933

lia nain 2706, 2707, 2717, 2730, 2731, 2733, 2734, 2735

Liceu Dr. Francisco Machado 167

Liem Bian Kie 673

Liem Soei Liong 383, 782, 792, 806, 807

Liga Bangsa-Bangsa 716

Liliek Koeshadianto 395, 1167, 2999, 3086, 3087, 3166, 3167, 3330

Lima, Lopes da 161

Linmas 406

Linud 700 1927

LIPI 44

Liquiçá 27, 29, 33, 67, 70

Liquiçá, Gereja 419, 421,2547, 2636, 2640, 2645, 2965, 2966, 2972, 3037, 3038, 3042, 3109, 3111, 3130, 3134, 3135, 3140, 3144, 3187

lisan 2702, 2705, 2706, 2707, 2708, 2710, 2712, 2717, 2718, 2722, 2723, 2724, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2736, 2741, 2747, 2750, 2756, 2757, 2758, 2761

LSM 2555, 2598, 2632, 2648, 2653

Lumintang, Johny 2661, 2688

liurai 161, 162, 163, 166, 172, 182, 244, 309, 312, 464, 469, 475, 476

Lisabon 9, 11

Lisboa, Antonio 976, 990

LKMD 437, 1096

Lobato, Antobio 1034

Lobato, Domingos 2369

Lobato, Isabel 229, 900, 901, 902, 904

Lobato, Nicolau 171, 181, 186, 218, 220, 242, 245, 248, 250, 390, 461, 469, 473, 483, 484, 485, 753, 760, 785, 900, 914, 917, 918, 919, 920, 922, 940, 1034, 1242, 1958

Lobato, Rogério 184, 203, 204, 211, 220, 223, 270, 345, 346, 348, 350, 459, 486, 860, 864, 922, 925

Lobo, Pieter 1128

Locatelli, Pater Eligio 944, 1009, 2298, 2321

lokakarya partisipatoris 94

Lokakarya Pemulihan 34, 60, 2748, 2772, 2793, 2808, 2809, 2810, 2811, 2819, 2820, 2825, 2826

Lopes, Agustinho 3320

Lopes, Alvaro 3101, 3157, 3158

Lopes, Dom Martinho da Costa 165, 181, 252, 263, 265, 266, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278282, 286, 342, 361, 407, 491, 492, 687, 738, 740, 741, 742, 743, 744, 747, 751, 752, 785, 790, 791,1054, 1998, 2465

Lopes, Elvis 3351

Lopes, Felismino 3313

Lopes, Fernando 3313

Lopes, Filomeno 403

Lopes, Gilverto 3314

Lopes, Humberto 3318

Lopes, João 2992, 3101, 3157, 3158, 3159

Lopes, Manuel 3320, 3322

Lopes, Martinho 3313

Lopes, Martinho da Costa 2941

Lopes, Dom Martinho da Costa 2865

Lopes, Rui 3089

Lopes, Simão 1167, 1228, 1284, 3124, 3175, 3176, 3350

Lopes, Victor 3347

Lorico 403

Loromunu 3079, 3081

Loto Runggum, Agustinus 2098

Lourdes, Albino 1998, 2002

LPHAM 808

Lu Olo 498, 499, 502, 1957, 2319, 2325

Lubis, Todung Mulya 807

Ludwig, Klemens 786

Luis Metan. *Lihat* Oliveira, Luis da Costa

Lumintang, Johny 315

Lusitania Expresso 796, 806

Lutan, Ahwil 2065

M

M. Yusuf 248, 276, 742

Mabes Polri 2061, 2065

Madeira, Martinho 1103

Madeira, Pastor Hilario 3167, 3168

MacDougall, John 800

Macey, Dave 781

Madeira, Hilario 1195, 1203

Madeira, Jimmy 2816

Magalhães, António Barbedo de 792, 799, 806

Magalhães, Manuel 1200

Maggiolo, Rui Gouveia 2603

Magna Carta 2861, 2863, 2867

Magno, Bonafacio 2011, 2015, 2020, 2034, 2036

Magno, Francisco dos Reis 29

Mahadomi 419, 2641, 2981, 3028, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118

Mahasiswa Muslim Asal Timor Timur. *Lihat* Mamtim

Mahidi 312, 332, 415, 1167, 1168, 1172, 1180, 1182, 1183, 1185, 1187, 1195, 1197, 1198, 1205, 1206, 1217, 1218, 2152, 2176, 2181, 2183, 2227, 2248, 2298, 2314, 2315, 2354, 2383, 2385, 2641, 2644, 2956, 2957, 2981, 2997, 2998, 3003, 3024, 3028, 3042, 3048, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3086, 3088, 3089, 3100, 3131, 3165, 3167, 3008, 3026, 3072, 3093, 3313, 3314, 3332, 3333, 3334

Mahkamah Agung 2008, 2022, 2036, 2042, 2057, 2158

Mahkamah Internasional 8, 97, 99, 120, 160, 162, 300, 653,665, 691, 759

Mahkota, Hotel 1983, 1986, 2085, 2086, 2087, 2091, 2092, 2094, 2096

Maia, Carlos 1193, 1200

Maia, Domingos de Deus 2394, 2396

Maia, Egidio 29

Maia, Manuel 3321

Maia, Mateus 1110, 1126,1138, 1140, 3091

Maia, Monis da 210, 349, 350, 354, 876, 915, 916

Maia, Prudencio 985, 992

Majelis Rakyat Timor-Timur 11, 233, 238, 239, 674, 675, 676, 688, 697, 713,731, 817, 2622, 2939

Manaf, Guruh R 2673

Majelis Umum PBB 11, 98, 143, 165, 170, 178, 224, 225, 232, 233, 234, 239, 256, 279, 287, 288, 342, 348, 364

makar 1981, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2010, 2011, 2023, 2031, 2034, 2043, 2068, 2072, 2085, 2092, 2098, 2102

Makarim, Zacky Anwar 318, 328, 416 – 418, 420, 444, 2640, 2642, 2646, 2655, 2691, 2965, 2988, 3003, 3011, 3020, 3022, 3024, 3030, 3031, 3034, 3043, , 3061, 3064, 3088, 3192, 3194, 3195, 3197, 3198, 3010, 3026, 3030, 3143, 3162, 3195, 3202, 3208, 3356, 3200, 3202, 3208, 3218

Makikit 415, 2981, 3016, 3034, 3046, 3076, 3125, 3126, 3128, 3034, 3046

Malaka 160

Malari 384

Malaysia 174, 175, 239, 337, 355

Mali, Alvaro 3322

Mali, Americo 3328

Mali Dao, Luis 3324

Mali, Domingos 3327

Mali, Hendrikus 3327

Malik, Adam 176, 222, 399, 672, 719, 720, 722, 725

Malimeta, Florindo 3338

Malimeta, Mateus 3338

Maman Hermawan 1107

Maman Rahman 2665, 2999, 3068, 3069

Mamtim 2402

Manafe, Salmun 3031, 3037

Manatuto 29

Mandala, kampanye militer 673

Mandati. *Lihat* Ximenes, David Dias

Mandela, Nelson 301, 306

Manek, Egidio 3327

Mangunwijaya, Yusuf Bilyarto 811

Mantiri 392, 2660, 2662, 2689

Mansyur, M 2665

Manu, Liberatus 3353

Manuel Bere Lete 3320

Manual e Programa Politicos da Fretilin 185, 464, 468, 469

Manufahi 9, 29

Manulin, Paulo 921

Marcal, Guilhermino 3350

Marçal, Luis 976, 990

Marçal, Virgílio 3075, 3076, 3077

Marcos Tato Mali 3323

Maria Immaculada 1053

Mariano, Armindo Soares 428, 434, 445, 446, 2960

Marinir 193, 226, 227, 231, 247, 249, 251, 262, 351, 353, 355, 356, 357, 359, 1056

Marker, Jamsheed 303, 310, 314, 333,669, 689, 696, 706, 716, 734, 769, 770, 775, 2084, 2085, 2948, 3210, 3210

Marmer, PT 2459

Marpaung, Sodak C. 2678, 3075

Marpaung, Wilmar 1167, 2678, 3123

Martadinata, KRI 720, 724

Martin, Ian 22, 287, 315, 316, 317, 321, 322, 330, 335, 338, 339, 364, 367, 368, 369, 422, 444,698, 2647, 2655, 2693, 2694, 2802

Martin Alau 1126,1139

Martins, Dom Manuel da Silva 745

Martins, Francisco 29, 2173

Martins, Hermenegildo 172

Martins, João 867, 975, 1008

Martins, José 172, 351

Marques, Joni 309, 370, 3188

Martin, Ian 2948, 2963, 3084, 3205, 2950, 2962, 2963, 2964, 2972, 2998, 3011, 3026, 3027, 3034, 3144, 3200, 3202, 3205

Martins, Almeida 3312

Martins, Anastasio 3345

Martins, Juvencio 509

Martins, Leoneto 1174, 1176, 1278, 3107, 3108, 3109, 3111, 3131, 3132, 3133, 3107, 3110, 3112, 3113, 3130, 3132, 3134, 3324, 3345

Martins, Lukas 3342

Marxisme 471, 486, 492,1008

Mary McKillop Institute of East Timorese Studies 800

Masbuku (Letnan) 3024

Mashuri 222

masyarakat internasional 2862, 2864, 2878, 2883, 2891, 2892, 2896, 2903, 2904, 2916

masyarakat sipil 2863, 2864, 2866, 2869, 2870, 2871, 2876, 2877, 2879, 2880, 2884, 2885, 2888, 2889, 2913, 2917, 2918

Matebian, Gunung 390, 925, 933, 934, 938, 941, 942, 956, 958, 969, 970, 974, 1009, 1022, 1029, 1034, 1037, 1152

Matebian Lian 324

Matos, Francisco 3336, 3339

Matignon, Kesepakatan 311

Matsuno, Akihisa [Aki] 791

Mau Bere, Manuel 3319

Mau Bere, Feliciano 3320

Mau Hodo 340 *Lihat juga* da Costa, Jose

Mau Hudu Ran Kadalak 485, 486, 487, 491, 496, 506, 507. Mau Laka, César 456, 475

Mau Kruma. *Lihat* Pina, Helio

Mau Laka, César 218

Mau Lear 251, 473, 483, 484, 944, 945

Maubere, Rusdin 1147

Mau Muti 3322

Mau, Miguel 3327

Maubere, Rusdin 3347

Maubuti, Domingos 3334

Mau Seran. *Lihat* da Silva, Venâncio Gomes

Maubrani 1010

Mauhu 410, 412

Mauhunu 876

Maubere, Radio 243, 356

Mauhunu 267, 270, 393, 484, 485, 486, 487

Mauk Moruk 270, 272, 485, 486, 487, 492, 493, 494, 918, 1159, 2322

Maukruma 456, 459, 474, 479, 484

Mausiri, Julião 23

Mautersa. *Lihat* Mau Xesta, Antonio Pinto

McCarthy, John 689

McDonald, Hamish 885

McIntosh, Gordon 779

McKinnon, Don 737

McMahon, William 682

Meda, Petrus Saul 1126, 1138

Médecins Sans Frontières. *Lihat* MSF

Medeiros, Uskup 161

Megawati Sukarnoputri 45, 305, 337

Melky (Sersan Satu) 3102, 3179, 3180, 3181, 3341

Mello, Sérgio Vieira de 18, 22, 23, 28, 331, 341, 699, 885, 2709

Mendes, Domingos 3346

Mendes, Maria Fernanda 29

Mendez, Francisco 3313

Mendonça, Adão 913, 1042, 1051, 1052

Mendonca, Cesar 3332

Mendonca, Domingos 3349

Mendonca, Meta 29

Mendonça, Tobias 1013, 1018

Mendonça, Tomás 3069, 3070

Meneses, João 951, 1010, 1021

Menwa 411

Menzies, RG 681

Mesir 256

Mesquita, Alarico 3339

Metan, Domingos 3115, 3353

Metan, Mateus 3335

Metello, Arnão 170, 189

Metinaro 32

Metro Jaya, Polda 2043, 2044, 2047, 2048, 2049

Meyner, Helen 724

MFA 167, 168, 169, 170, 187, 189, 203, 399, 667, 778

Michael Suwito 1138

Miclat, Gus 798

Miguel, Aparicio 3320

milisi 159, 162, 218, 237, 262, 303, 304, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 338, 339, 340, 351, 370

militer Indonesia 158, 207, 211, 214, 215,222, 226, 229, 232, 233, 236, 242, 246, 249, 251, 252, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 266, 270, 274, 276, 281, 293, 295, 297, 303, 316, 319, 531 *Lihat juga* operasi militer

Miller, John 796

Milsas 401, 406, 407, 1107, 1113, 1126, 1127, 1163, 1187, 1211, 3006

Miplin 504

Missao Paz por Timor 796

Mitterand, Francois 705

MNF 3212, 3213

Mohammad Ma'ruf 2660, 2661, 2689

Mohamad Noer Muiz 3357

Moerdani, Benny 179, 193, 228, 230, 231, 274, 277, 278, 281, 349, 385, 387, 402, 411, 427, 431, 664, 673, 686, 724, 726, 727, 736, 743, 784, 888, 890, 902, 1040, 1245, 2388, 2454, 2580

Moertopo (Jenderal) 385

Moko, Laurentino 3047, 3124

Moko. Lihat Soares, Laurentino

Mondale, Walter 726

Monis, António 3076

Monis, Diogo 1013, 1018, 1021

Monis, Leoneto 3324

Monis, Mateus 3324

Monis, Mauterca 3343

Monjo, John 290, 2042

Monteiro, Longuinhos 65

Montes, Atzis. *Lihat* Fontes, Assis

Morok 2981, 3037, 3114, 3115, 3116, 3117, 3026, 3115

Morreira, Celestino 3315

Morreira, Cosme 3315

Morreira, Florindo 3339

Morreira, Henrique 3346

Morreira, Marito L. 3318, 3324

Morris, Cliff 794

Moruk 3076, 3087, 3117, 3165

Moruk, Olivio Mendonça 1167, 1168, 3087

Mota, Francisco 184, 195

Mota, Justino 171, 181

Mota, Marito 1108

Motael, Gereja 293, 903, 1106, 1246

Moucho, Harold 754, 755

Moustan 2667

Mouzinho 3147, 3148

Mouzinho, César Augusto da Costa 171, 187, 211

Movimento das Forcas Amadas. *Lihat* MFA

Mozambik 163, 168, 169, 181, 198, 218, 222, 754

MPR 225, 277, 304, 311, 314, 322, 341

Ketetapan 1978 699

MSE. *Lihat* multiple systems estimation

MSF 26

Mubyarto (Profesor) 437

Muchdi Purwo Pranyoto 2689

Mudjiono (Kolonel) 2662, 2986, 3042, 3132, 3197

Mufad Santoso 2661

Muhamad Kadir 2664

Muhamad Nur 1184, 2667, 3097, 3099, 3157, 3161, 3341

MUITD 202

Muladi 3011

Muldoon, Robert 720

multiple systems estimation 530, 539, 540

Multi-National Force. *Lihat* MNF

Multiple Systems Estimation 3266, 3296

Mulyadi (Jenderal) 393, 2662

Munir 22

Murdani, Benny. *Lihat* Moerdani, Benny

Mursanib, Soegiman 1107, 1108, 1121, 1123, 1126, 1131, 1139, 1140

Mursiono 2665

Muspida 325, 381, 428, 433, 3030

Mustafa 2667

Mustari 1994

N

Nababan, Asmara 805

Naga Merah 1189, 1192, 1224, 1225, 1229, 3026, 3028, 3097, 3181

Nahak, Gabriel 3328

Nahak, Simão 3331

Nahdlatul Ulama 811

nahe biti boot 2706, 2735

Naipospos, Bonar Tigor (Coki) 809

Nairn, Alan 796,1130

Nakamura, Monica 733, 745, 790, 2802

Nakroma 270

Nanang Priadi 2662

Nanggala 1077, 1085, 1090, 1096, 1102, 1104, 2537, 2955, 3016, 3017

napalm 1905, 1939, 1941, 1964

Naro, John 177

Nascimento, Adriano 3334

Nascimento, António 763

Nascimento, Uskup Basilio do 22, 55, 311, 322, 1147, 2365, 2803, 3000, 3076, 3164

Nasution, Abdul Haris 379, 380

Nasution, Adnan Buyung 807

National Aboriginal and Islander Legal Service 794

National Security Archive 45

Natxa, Holy 485

Naubasa, Herman 3354

Ndiaye, Bacre Waky 809, 1114, 1115, 1118, 1119, 1121, 1123, 1134, 1136, 1137, 1140, 1144, 1141, 1271, 1272

Needham, Andrea 799

Nelo Kadomi Timor 485, 488

Neves, José António 810

Newsom, David 720, 721, 722

New York Times 3212, 3218, 3219

Ngadiman Sumarto Putro 2666

Nicodemus Y.Y 3127, 3128

Nicolau, Julio 918

Ninja 297, 411, 3017, 3018, 3082, 3085, 3172

Nobel, Anugerah 2944

Nobel Perdamaian 159, 292, 301, 302, 306, 366, 669, 696, 734, 745, 761, 769, 792, 795, 801, 813

Noer Muis 328, 2952, 2954, 2990, 3011, 3162, 3163, 3186, 3194, 3195, 3197, 3200, 3202, 3205, 3217, 3008, 3010, 3157, 3161, 3162, 3195, 3208

normalisasi 1981

Non-Blok 657

Nono Musihono 2673

Noor Muis, Mohammad 2649, 2652, 2662

Norman, Marciano 2665

Noronha, Francisco 3317

Nunes, Damião da Costa 3326

Nunes, Jaime da Costa 1190

Nunes, João dos 3324

Nunes, Maria 29

Nur Ismanto 2020, 2029

Nunes, Pedro. *Lihat* Keri Laran Sabalae

Nurep 487, 511

Nurtias, Wilson B. 298

Nyus Rahasia 2955, 3116, 3038, 3072

O

Obe, Domingos 3350

OCR 505

ODIR 510

Oecussi 26, 29, 30

Ogaden, Perang 706

OHCHR 43, 2632, 2692, 2693

OJECTIL 285, 326, 506, 507, 2069, 2326

Ojetil 2941, 3012

OKI 174

Oliveria, Anigio de 3313

Oliveira, Domingos de 170,171, 181, 191,201, 221, 343, 344, 345,346, 347, 348, 351, 361, 499, 763, 857, 858, 881

Oliveira, Luis da Costa 3337

Ologari Assuwain 487, 493, 494, 918

ombudsman 2884, 2885, 2887

OMT 2941, 3102, 3179

OPJT 238

OPMT 238,458, 463, 464, 465, 483, 864, 937, 944, 947, 990, 994, 996, 1000, 1003,1007, 1012, 1019, 1055, 1153, 1193,1999, 2131, 2231, 2377

operasi militer

- Bedah Marinir 77, 246
- Cabut 2952, 3009, 3010, 3011
- Cahaya 241, 248, 250, 252
- Flamboyan 193, 207, 224, 387, 400, 686

Gempur 407

Keamanan 262, 273, 274, 2294, 2297, 2308, 2309, 2340, 2491

Kikis 259, 261, 262, 263, 265, 359, 407, 854, 1056, 1057, 1152, 1153, 1239, 1244, 1906, 1917, 1925, 1936, 1938, 1942, 1945, 1948, 1949, 1952, 1955, 2297, 2308, 2310, 2363, 2415, 2542, 2574, 2607

Komodo 191, 192, 387, 673, 680

Opsus 179, 207, 344, 384, 387, 673

Pamungkas 1921

Pembersihan 251, 3002, 3003, 3004, 3005, 3097

Persatuan 934, 1040, 1245, 2544

Senyum 392

Seroja 226, 246, 251, 256, 260, 264, 388, 390, 391, 936, 1243, 1914, 1917, 1935, 1938, 1942, 1944, 1946, 1947, 1950, 1961

Sisir 246

Skylight 1935

Tatoli 2952

Watumisa 1101

Wira Dharma 2952, 3002, 3009, 3010, 3012

OPS 2310, 2330

Orde Baru 174, 175, 179, 285, 298, 304, 305, 375, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 397, 425, 429, 430, 439, 2443, 2460, 2498, 2938, 2939, 2951. *Lihat juga* Indonesia

Organisasi Migrasi Internasional. *Lihat* IOM

Organisasi Rakyat untuk Keamanan. *Lihat* OPS

Organisasi Siswa Intra Sekolah. *Lihat* OSIS

Organização Popular de Segurança. *Lihat* OPS

OSIS 2320

Osorio, Abilio 2062

Ote, José Antonio 29

otonomi khusus 159, 304, 305, 306, 310, 311, 312, 314, 317, 318, 325, 330, 2947, 2956, 2964, 2965, 3004, 3006, 3007, 3012, 3051, 3052, 3053, 3057. *Lihat juga* otonomi luas

otonomi luas 415, 2937, 2945, 3003

OSIS 505

Oxfam 788, 796, 2464, 2505, 2509

OV-10 Bronco 1939, 1941, 2940

P

P3TT, Satgas 318, 2963, 2964

P4. *Lihat* Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Pablo Puente, Monsignor 278

Padre Jovito. *Lihat* de Araújo, (Padre) Jovito do Rêgo

Pagar Betis 257, 259, 261, 286, 2834, 2835

Pakpahan, Mochtar 811

Palácio das Cinzas 2874

Palang Merah 732, 760, 855, 878, 1110, 1111

Paulino Gama. *Lihat* Mauk Moruk

Palang Merah, Komite Internasional 536, 628, 2142, 2239, 2337, 2348, 2447, 2974. *Lihat juga* ICRC

Palang Merah Indonesia 2564

Partisan 2531, 2532, 2541, 2599, 2620, 2621

Pam Swakarsa 321, 326, 419, 2641, 2987, 3028, 3051, 3053, 3060, 3091, 3099

Pana 3107, 3107

Pancasila 258, 380, 398, 429, 438

Pancasila, Tim 3028, 3097

Pandjaitan, Luhut 2675

Panjaitan, Sintong 2954

Pandu Katolik 2320, 2664

Panel Khusus 2704, 2713, 2752

Panel Seleksi 23

Pangaribuan, Luhut 294, 365, 2020, 2021, 2029, 2056, 2108, 2802

Panggabean, Maraden 183, 388, 2580

Panjaitan, Luhut 403

Panjaitan, Sintong 1137, 2660, 2675

Parada, Antonio Freitas 428

Parlemen Nasional 79, 2880, 2881, 2884, 2886, 2887, 2888, 2889, 2897, 2900, 2919, 2920

Partai Buruh 658, 683, 688, 689, 755

Partai Komunis Indonesia 700, 749, 805, 806

Partai Rakyat Demokratik. *Lihat* PRD

Partai Sosialis 168, 169, 287

Partidjo 2667

Partisan 193, 215, 227, 229, 354, 397, 399, 400, 401, 402, 408, 415, 416, 426, 433, 442, 883, 884, 927, 930, 1056, 1186, 1235, 2330, 3008, 3015, 3075, 3076, 3077, 3086, 3098, 3008

Pasmar 3 953

Pasmar 9 938

Pastor Domingos. *Lihat* Soares, Domingos (Maubere)

Pasukan Multi-Nasional. *Lihat* MNF

Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) 1166, 1179, 2165, 2350, 2956, 2957, 3000, 3004, 3005, 3029, 3066. *Lihat* PPI

Pasukan Tombak 1033, 1942, 1952, 1953, 1961

Perlawanan Rakyat. *Lihat* Wanra

Paus Paulus VI 740

Paus Yohanes Paulus II 282, 288, 289, 669, 738, 743, 744, 746, 747, 750, 790, 795, 8162042

Pax Christi International 794

Pax Romana 794

PBB 7, 8, 9, 11, 14, 18, 19, 22, 24, 30, 31, 34, 45, 67, 162, 165, 167, 173, 174, 175, 177, 178, 206, 222, 224, 226, 231, 232, 233, 234, 239, 248, 255, 256, 275, 276, 279, 282, 287, 288, 290, 292, 293, 294, 295, 297, 299, 300, 302, 303, 304, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 329, 330, 331, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 352, 353, 354, 367, 396, 400, 415, 422, 424, 427, 1928, 1929, 1930, 1966, 1995, 1997, 1998, 2002, 2005, 2024, 2031, 2032, 2035, 2037, 2043, 2044, 2053, 2057, 2061, 2063, 2070, 2075, 2077, 2084, 2085, 2092, 2095, 2097, 2184, 2245, 2446, 2461, 2473, 2499, 2505, 2523, 2531, 2537, 2547, 2584, 2622, 2624, 2625, 2626, 2628, 2630, 2631, 2632, 2635, 2639, 2642, 2643, 2647, 2648, 2650, 2652, 2654, 2657, 2693, 2704, 2750, 2762, 2864, 2865, 2866, 2867, 2871, 2877, 2878, 2880, 2883, 2888, 2889, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2902, 2907, 2909, 2916, 2917, 2937, 2941, 2942, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2956, 2961, 2964, 2972, 2973, 2974, 2979, 2980, 2985, 2986, 2987, 2988, 2991, 2993, 3005, 3013, 3034, 3041, 3047, 3048, 3050, 3073, 3084, 3095, 3106, 3111, 3114, 3128, 3139, 3143, 3149, 3150, 3151, 3152, 3154, 3155, 3158, 3159, 3169, 3180, 2947, 2971, 2996, 3047, 3165, 3201, 3208, 3210, 3212, 3213,

3214, 3215, 3216, 3219, 3185, 3201, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3219, 3220, 3221

Piagam 91, 136, 137, 165, 173, 655, 660, 662, 663, 671, 692, 701, 710, 717

Sekretaris Jenderal 655, 697, 734, 744, 747, 759, 762, 763, 769, 777, 795, 813, 814, 826, 2942, 2946, 3207, 3209, 3211, 2944, 3208

Sidang Umum 654, 655, 661, 662, 663, 669, 670, 671, 674, 677, 681, 687, 688, 691, 692, 701, 703, 704, 705, 706, 710, 713, 714, 724, 728, 731, 759, 760, 761, 762, 777, 793, 814, 815, 816, 818, 819

Utusan Khusus Sekretaris Jenderal 2948, 3208

PDB 2443, 2449, 2450, 2451, 2452, 2464, 2474

Pearl Harbor 164

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 2498

Pedro Geger, Francisco 3317

Pekerjaan Umum 3054, 3055, 3067

pelanggaran nonfatal 529, 531, 532, 571, 572, 574, 575, 578, 579, 581, 582, 583, 586, 587, 592, 594, 596, 597, 598, 599, 602, 603, 612, 614, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 629, 632

pola temporal 531

pelanggaran pidana berat 93, 94

Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan 2327

Pelapor Khusus 2944, 2967, 3034, 3216, 3217, 3221, 3216

Peliung, Syahrial B. P. 2666, 2669, 2675

pelucutan senjata 423

pemalsuan identitas 121, 128

Pemberian Kemerdekaan bagi Negara dan Bangsa Kolonial 671, 679, 703,706, 729

Pemerintah Indonesia 162, 224, 255, 282, 314, 329, 353

Pemerintah Sementara Timor-Timur 233,234, 671, 674, 731

pemerkosaan 109

pemilihan umum 198, 220, 238, 242, 273, 274, 384, 429

pemindahan 531, 537

penahanan preventif 103

penahanan sewenang-wenang 102, 110, 111, 124

penanaman paksa 163

Pencarian Kebenaran 32, 37

dan Rekonsiliasi Komunitas 80

Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen 3054, 3055, 3065, 3067

penentuan nasib sendiri 11, 165, 169, 170, 171, 176, 194, 196, 197, 198, 199, 201, 218, 221, 224, 232, 233, 239, 255, 282, 287, 288, 292, 293, 294, 296, 298, 300, 303, 304, 306, 310, 311, 314, 653, 654, 655, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 668, 669, 670, 671, 672, 674, 675,

676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 684, 688, 689, 690, 691, 692, 695, 699, 701, 703, 704, 705, 706, 708, 709, 712, 713, 714, 716, 717, 721, 723, 728, 729, 731, 733, 735, 738, 739, 741, 743, 744, 745, 746, 748, 750, 751, 752, 754, 756, 757, 759, 761, 764, 766, 770, 772, 774, 776, 778, 779, 782, 784, 786, 787, 788, 790, 791, 793, 795, 796, 800, 801, 803, 804, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 814, 815, 816, 817, 818, 831

Penentuan Pendapat Rakyat. 384, 673, 685, 697,

Penfui 1092

Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia 2753

Pengadilan Hukum Maubere. *Lihat* Komite Keadilan

Pengadilan Kejahatan Berat 8, 85, 2753

Pengadilan Permanen Rakyat 757, 789, 806

Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia. *Lihat* ICTY

pengadilan rakyat 466, 467, 881, 917, 1025

pengadilan transisi 17

pengepungan dan pemusnahan 452, 480, 481

penghilangan orang 100, 101

pengungsi dalam negeri 2948, 2969, 2974, 3100, 3110, 3111, 3112, 3126, 3131, 3152, 3153, 3166

Penjara Cipinang 285, 292, 296

Penpada, Alex 1127

Penyantunan Anak Taruna Negara, Panti. *Lihat* PPATN

penyerangan seksual 109

Penyesuaian Kembali Struktur Resistansi 283, 495

Pepera. *Lihat* Penentuan Pendapat Rakyat

perang adil 92

perang *cyber* 801

Perang Dingin 10, 13,172, 173, 175, 188, 192, 283, 291, 376, 379, 656, 657, 699, 706, 715, 718, 728, 759, 766, 783, 790, 795

Perang Dunia Kedua 160, 162, 164, 165, 180, 257, 378, 398, 656, 660, 680, 691, 692, 706, 712, 716, 732, 733, 779, 794

Perang Rakyat Jangka Panjang 451, 471, 472, 477, 478, 480, 484, 490

perang saudara 10, 14, 91, 92, 116, 133, 160, 173, 184, 190, 324, 326, 333, 338, 400 *Lihat juga* Konflik Bersenjata Internal

perbudakan seksual 110, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2127, 2129, 2138, 2176, 2177, 2178, 2181, 2182, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2198, 2199, 2200, 2201, 2204, 2208, 2210, 2216, 2217, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2227, 2228, 2229, 2230, 2236, 2240, 2252, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2263, 2266, 2268, 2269, 2270, 2271

perdagangan perempuan 110

Peregrina. *Lihat* Imaculada, Aquilina

Pereira, Amaro 2087, 2089, 2099

Pereira, Antonio 1148, 3121.

Pereira, Agio 499, 502, 510, 756, 769, 770

Pereira, Arcanzo 3320

Pereira, Augusto 2060

Pereira, Belchior Francisco Bento Alves 2302, 2326, 2327, 2350, 2365

Pereira, Daniel 3072, 3074

Pereira, Domingos 3085, 3157, 3172

Pereira, Elias 3324

Pereira, Filomena Barros 29

Pereira, Francisco 3332

Pereira, Ildefonso 29

Pereira, Luisa Teotonio 772, 776, 778, 786, 2802

Pereira, Maria José Franco 54

Pereira, Vicente Rodrigues. *Lihat* Vicente, José

Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 653

Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik 653

Permesta 379

Persit 2485

pertahanan keamanan rakyat semesta 3014, 3015

Pertamina 383

Pessoa Pinto, Ana 22, 54, 64, 499, 754, 760

PET 792

PETA 378

Peters, Brian 711, 885, 886, 888

PGI 810

PIDE 166, 181, 399

Pijar 809

Pilger, John 798

Pina, Hélio 914, 1012. *Lihat juga* Maukruma

Piton 12 1073

Pinto, Antonio. 3337. *Lihat* Kalohan

Pinto, Constancio 289, 364, 497, 505, 507, 509, 723, 768, 2052, 2053, 2069, 2327, 2332

Pinto, Francisco 1073

Pinto, Matias Amari 1008

Pinto, Paula 50

Pinto, Tomas 476

Pinto Leite, Pedro 796

Pires, Emilia 499

Pires, Frederico M 3322

Pires, Lemos 864,

Pires, Mário Lemos 11, 169, 183, 189, 190, 191, 194, 198, 202, 206, 343, 344, 346, 347, 348, 664 – 667, 670, 793, 1904, 2625

Pires, Paulo 752

Pires, Rosalino 3319

PKI 174, 175, 379, 384

Ploughshares for Peace 799

PMI 256, 257

PMLF 486, 489, 491, 492

Pokastim 808

pola mortalitas keseluruhan 534

pola mortalitas teragregasi 534

politik memerintah senjata 474

Polisi Militer 2143, 2148, 2149, 2150, 2158, 2159

Polisi Militer, Laporan I 1107, 1125, 1126, 1132

Polisi Militer, Laporan II 1107, 1126, 1128

Polisi Militer, Laporan III 1107, 1108, 1126, 1139, 1140, 1271

Politik Persatuan Nasional 492, 494, 495, 496

Polisi Republik Indonesia (Polri) 382, 2757, 2758

Polres 2146, 2158

Polri 2947, 2948, 2949, 2951, 2958, 2959, 2963, 2966, 2970, 2971, 2973, 2974, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2996, 2998, 3001, 3002, 3004, 3005, 3009, 3011, 3012, 3026, 3029, 3038, 3039, 3041, 3044, 3045, 3049, 3068, 3070, 3071, 3073, 3074, 3079, 3081, 3083, 3084, 3085, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3099, 3101, 3105, 3035, 3041, 3044, 3142, 3198, 3199, 3109, 3111, 3112, 3113, 3114, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3128, 3130, 3131, 3133, 3134, 3135, 3142, 3143, 3144, 3150, 3151, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3169, 3170, 3171, 3173, 3174, 3175, 3177, 3179, 3180, 3190, 3192, 3195,

3198, 3199, 3200, 3202, 3203, 3204, 3206, 3207, 3208, 3217

Ponco Atmono 2020, 2021, 2036

Ponto, Gerson 2664, 3114, 3116, 3116, 3193

Portugal 44, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 190, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 202, 206, 208, 209, 210, 214, 216, 217, 218, 221, 222, 225, 237, 239, 284, 286, 287, 288, 292, 295, 299, 300, 303, 304, 306, 310, 311, 314, 318, 319, 331, 336, 341, 358, 375, 376, 398, 399, 422, 2442, 2444, 2453, 2461, 2463, 2466, 2477, 2521, 2597, 2624, 2625, 2626, 2627, 2631, 2635, 2692, 2861, 2863, 2864, 2866, 2873, 2880, 2897, 2905, 2937, 2938, 2939, 2942, 2945, 2946, 2947, 3214, 3217

Portugal, Misi Parlemen 288

Portuguese Hackers against Indonesia 801

post-traumatic stress disorder 2490

Poto, Felipe 3354

POW 1932

Pãtria! Pãtria! 219

PPATN 2409, 2410

PPI 2957, 2962, 3000, 3004, 3008, 3019, 3024, 3029, 3031, 3035, 3076, 3090 *Lihat* Pasukan Pejuang Integrasi

PPKI 378

Prabowo Subianto 279, 393, 411, 427, 2689, 2675, 2957, 3016, 3017, 3076, 3097, 3126

Pramuka 408, 411

Prancis 2864, 2865, 2916

Pranoto Koesoemo, Ign. 2660

PRD 809

PRK 46, 47, 59, 64, 66, 2701, 2702, 2703, 2705, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2722, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2705, 2795

Presidium Juventude Loriku Ass'wain Timor Lorosa'e 324

Princen, HJC 798, 808

prinsip pembedaan 120

Prinsip-prinsip Penuntun PBB tentang Pengungsian Internal 2868

Prisoners of War. *Lihat* POW

Priyo Patmonoyogo 2677

Produk Domestik Bruto. *Lihat* PDB

Profil Komunitas 33,1903, 1920, 1931, 1932, 1937, 1946, 1948, 1949, 1951, 1954, 1955, 1968, 1969, 2772, 2794, 2830, 2831, 2832, 2833, 2835, 2836, 2837, 2847

lokakarya 60, 2290, 2293, 2296, 2298, 2300, 2309, 2312, 2333, 2433

program akar-rumput 94

Proklamasi Integrasi 221, 222

Proklamasi Kemerdekaan November 459, 491

Promosi Kesetaraan, Kantor 2878

propriedade estatal 462

Prosedur Rekonsiliasi Komunitas 80, 93, 94

Proses Rekonsiliasi Komunitas 2899, 2900. *Lihat* PRK

Protestan, Gereja 64

Protokol I CCW tentang Fragmen yang tidak dapat dideteksi 119

Protokol II CCW tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Ranjau, Perangkap, dan Alat-alat lainnya 119

Protokol III CCW tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Pembakar 119

Protokol Jenewa untuk Pelarangan Penggunaan Gas Pencekik, Beracun, atau yang Lainnya, dan Peperangan 118, 119

provinsi seberang lautan 165

proxy violence. Lihat kekerasan pengganti

Proyek Pembangunan Regional dan Daerah 3055, 3056

PRRI 379

PSTT 234, 239, 314, 424, 426, 676

Puente, Monsignor Pablo 741

Punef, Mateus 3353, 3354

Purwadirdja, Adang Ruchiatna 2660, 2687

Purwanto 2661, 2668,

Purwanto 274, 275, 276, 279, 281

Q

Quartel Geral 203, 864, 910, 920, 1009, 2613

Quina, Moises 918

Quintas, Verissimo Dias 2976, 3105

R

Rachlan Nashidik 809

Radio Australia 1998

Radio Maubere 858, 1018

Radio Timor-Leste 65, 66, 2768

Radjagukguk, Adolf Sahala 275, 409, 944, 1052, 1243, 2543, 2660, 2661, 2687

Radjakarina Brahmana 428

Rakambia, Radio 66

Rahardi Ramelan 3061

Rahardjo 2661

Rahman Zulkarnaen 2643, 2675, 3105, 3344

Railakan 403, 1127

Rais, Amien. *Lihat* Amien Rais

Rajawali 394

Rakambia, Radio 2798

Rakyat Terlatih. *Lihat* Ratih

Rama Metan 474, 477, 499

Ramahana. *Lihat* Alves, Leonardo

Ramos-Horta, José 22, 64, 171, 176, 181, 185, 186, 188, 191, 219, 223, 232, 233, 256, 270, 273, 284, 287, 292, 293, 295, 300, 301, 306, 310, 315, 322, 336, 341, 343, 344, 345, 350, 351, 353, 364, 367, 399, 441, 473, 486, 496 - 499, 510, 663, 667 - 687, 693, 696, 697, 701, 704, 708, 709, 712, 725, 727, 730, 734, 743, 745, 753 - 765, 767 - 770, 773, 775, 783, 785, 787, 791 - 794, 798, 801, 809, 813, 2052, 2628, 2801

Rangel, Sebastião Gomes 1106, 1121, 1246

Raper, Mark (SJ) 779, 805

Rate Laek, Falur 63, 511

Ratih 262, 265, 281, 309, 381, 396, 404, 405, 409, 1065, 1066, 1072, 1076, 1082, 1083, 1085, 1088, 1230, 1245, 1918, 1925, 1948, 1951, 2160, 2199, 2295, 2298, 2307, 2311, 2538, 2545, 2624, 2641, 2645, 2648, 2985, 3016, 3017, 3018, 3027, 3028, 3036, 3037, 3047, 3048

Raul, Domingos. *Lihat* Rate Laek, Falur

Reajustamento Estrutural da Resistência. *Lihat* Penyesuaian Struktural Resistansi

Reajustamento Estrutural da Resistência e Proposta da Paz. *Lihat* RER

Reagan, Ronald 794

record linkage 3255, 3275, 3278, 3281, 3283, 3286

Rede 23

Rede Feto Timor-Leste 25

Reformasi 303, 305, 309

Rêgo, Alexandrino do 896, 902, 903, 904

Regu, Anton 3344

Regulasi UNTAET 1/1999 96

Regulasi No. 10/2001 22, 23, 31, 38, 49, 73, 79, 90, 136, 137, 141, 2692, 2702, 2711, 2712, 2730, 2754, 2760, 2771, 2774, 2861, 2896, 2907, 2914

Rehabilitação Nacional. *Lihat* Renal

Reis, Alarico da Costa 29

Reis, Marito 511, 1995, 1998, 2002, 2003, 2006, 2008, 2009, 2105

Reis, Thomas dos 3348

Reis, Vicente dos 219,1009, 1010. *Lihat juga* Sa'he

rekonsiliasi komunitas

audiensi 28, 33, 60

Kesepakatan 93

pertemuan 34, 56

prosedur 31, 33, 46, 48, 52, 2312

Relatórios da Descolonização de Timor 45, 659

Remembering History in East Timor 1141, 1272

Renal 238, 466, 467, 1008, 1011, 1015, 1018, 1020, 1021, 1024 - 1028, 1037, 1237, 2188, 2356, 2357, 2370, 2529, 2604, 2606

Rencana Damai 292, 299

Rencana Kontinjensi 2952, 3007, 3010, 3011

Rencana Pembangunan Lima Tahun 2448, 2455, 2500

Renetil 24, 25, 285, 294, 297, 298, 299, 307, 326, 506, 809,2045, 2050, 2052, 2053, 2054, 2069, 2500, 2941

Rennie, Malcolm 711, 885

Renouf, Alan 683, 684, 700

Renwick, Colin 801

reparasi 93, 94, 2865, 2866, 2896, 2905, 2907 - 2913, 2915 - 2919

reparasi mendesak 2772, 2794, 2809, 2810, 2811, 2816, 2821, 2822, 2824, 2825, 2827 - 2830, 2849

reparasi perang 165

Reparasi Darurat, Komisi 49

Repelita. *Lihat* Rencana Pembangunan Lima Tahun

repovoamento 2454

RER 497, 499, 509

Resimen Tempur 247

Resistansi 8, 12 - 15, 92, 158, 161, 163, 237, 243, 245, 248, 251, 252, 257, 259 - 261, 265, 266, 268 - 272, 274, 275, 277, 281 - 285, 292, 296, 303, 306, 393, 397, 399, 409 - 411, 451, 452, 705, 709, 715, 741, 744, 745, 747, 751, 753, 757, 759, 769, 770, 774, 775, 778, 789, 790, 798, 799, 851 - 854, 918, 925, 932, 935 - 937, 941, 943, 944, 948, 954, 970, 973, 989, 1000, 1001, 1005 - 1008, 1010, 1012 - 1015, 1030, 1031, 1033, 1035, 1036, 1040, 1042, 1056, 1060, 1062, 1065, 1073, 1075, 1082, 1085, 1097, 1122, 1124, 1156, 1157, 1158, 1161, 1193, 1230, 1236, 1237, 1238, 1239, 1243, 1244, 1245, 1906, 1907, 1911, 1923 - 1928, 1935, 1948, 1952, 1961, 1963, 2135, 2153, 2162, 2199, 2211, 2231, 2287, 2291, 2292, 2298, 2302, 2315, 2318, 2319, 2320, 2321, 2323, 2325, 2327, 2330, 2335, 2336, 2337, 2345, 2361, 2363, 2364, 2416, 2421, 2422, 2499, 2524, 2526, 2529, 2540, 2543, 2544, 2548, 2550, 2553, 2560 - 2563, 2565, 2572, 2579, 2582, 2583, 2592, 2599, 2604 - 2610, 2629 - 2631, 2861, 2862, 2870, 2872, 2876, 2886, 2916, 2940, 2941, 2944, 2977, 3001, 3018, 3211

perjuangan diplomasi 453

Resistencia Nacional dos Estudantes de Timor-Leste. *Lihat* Renetil

Resolusi 31/53 233, 239

Resolusi ***1264*** 338, 396

Resolusi ***1272*** 81, 341

Resolusi ***3485*** 232, 234

Resolusi ***384*** 713, 723, 730

Resolusi ***389*** 693, 713, 724, 815

Resolusi ***1541*** 661, 679

Resolusi ***1542*** 729

Resolusi Dewan Keamanan 384, 389, 729, 730

Resolusi Sidang Umum 675

Retboll, Torben 786, 792

Retrospective Mortality Survey 3265

Revolusi 375, 376, 378, 382

Revolusi Anyelir 160, 167, 168, 170, 173, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 192, 287, 375, 376, 396, 683, 739, 751, 778

Reza Muharram 806

Riak Leman 511

Ribeiro, Domingos 459, 460

Ribeiro, Jaime 2330, 2331

Ribeiro, Marina 754, 760

Ribeiro, Ricardo da Costa 505, 2320, 2321

Ribeiro, Teofilo da S. 3335

Ribeiro, Thomás Antonio 1019

Ribeiro, Uskup José Joaquim 738,739, 740, 752

Richardson, Michael 780

Ripomo 2667

Rizali SH 2678

Rizali (Mayor Pol.) 3071

RMS 533, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547

Robert, Michel 786

Robinson, Geoffrey 43, 2582, 2632

Robinson, Mary 34, 67, 337

Robinson Report 2632

Rochadi 2665

Rodrigues, Roque 486, 497, 499, 753, 754, 755, 762, 763

Roesmanhadi 3198

Rohiat Wiseso 1990

Roja, Rudolf A. 1107

Rona Ami Nia Lian 42, 2177, 2798

Rondonuwu, Dolgi 1138

Roosevelt, Franklin Delano 716

Rosario, Carolina M E do 29

Roulston, Jim 780

Roy, Denny 733

Rudini 2689

Rudito 281

Rudjito 2661

Rusia 3211

RTP 388, 389, 938, 949, 950, 952, 954, 957, 2146, 2149, 2193

Ryamizard Ryacudu 2690

S

Sabalae 511

Sabika Bessi Kulit 511, 2325

Sabraca, António 3351

Saburai, Lafaek 3002, 3003, 3097

Sade, Domianus Y. 3346

Sagrada Familia 505, 2320, 2324, 2326

Sagran, Salim 2402

Sa'he 456, 484 *Lihat juga* Reis, Vicente

Saito, Shizuo 730

Saka 2981, 3000, 3017, 3027, 3035, 3046, 3048, 3062, 3063, 3075, 3076, 3077, 3079, 3081, 3017, 3026

Saka Loromonu 1166, 1200, 1201

Sakin Nere Ulas Timor Lemo Rai 485

Sakunar 1149, 1167, 1168, 1187, 1188, 1191, 1207 - 1210, 1216, 1228, 1229, 1249, 1930, 1931, 2167, 2182, 2313, 2315, 2366, 2548, 2637, 2638, 2645, 2734, 2981, 3028, 3047, 3108, 3123 - 3125, 3176, 3350, 3351, 3178, 3352 - 3355

salah-identifikasi 88

Salazar, PT 2458, 2459

Salazar, Antonio de Oliveira 9, 160, 164, 167, 168, 177, 399, 662, 681, 717, 2625

Saldanha, Gregorio da Cunha 290, 364, 365, 508, 509, 1109, 1112,1142, 2011, 2013, 2014, 2016 - 2019, 2023 - 2029, 2031, 2034 - 2037, 2068, 2079, 2100, 2323, 2326

Salim A. Salim 758

Salim, Mahalan Agus 3319

Salova, Adios 3107, 3109, 3111, 3132, 3133, 3198, 3346

Salsinha, Antonio 1184, 2618

Samba Sembilan. *Lihat* Ribeiro, Jaime

Samuel, Tamrat 302, 303, 694, 695, 2070

Sang Tai Hoo 894, 946, 947, 948, 1092

Sani, Anwar 178, 672, 674, 759

Santa Cruz 292 - 296, 298, 310, 365, 393, 427, 541, 668, 669, 677, 694, 714, 728, 734, 745, 769, 795, 796, 799, 808, 810, 1983, 1986, 1992, 2011 - 2014, 2016, 2018 - 2020, 2024, 2026, 2028, 2029, 2034, 2035, 2037 - 2045, 2053, 2059, 2066, 2068, 2069, 2072, 2073, 2079, 2093, 2100, 2106, 2328, 2335, 2351, 2357, 2365, 2404, 2546, 2584, 2629, 2871, 2893, 2903

Demonstrasi 26

Pembantaian 13, 42, 159, 292, 300, 509, 848, 854, 1106, 1110, 1114, 1247, 1907, 2328, 2335, 2351, 2364, 2457, 2944, 3072

Santana, Konis 2325

Santo, José Espirito 2617

Santo Thomas, Panti Asuhan 2399

Santos, Afonso dos 865, 872, 1226

Santos, Agusto dos 3312

Santos, Almeida 195, 206

Santos, Ana Maria J. dos 29, 33

Santos, Antonio de Almeida 170, 189, 194, 195, 198, 206, 673

Santos, António dos 3098, 3099

Santos, Armando dos 3345

Santos, Camilo dos 3106, 3182, 3185, 3316, 3340, 3343

Santos, Constantino dos 952, 955

Santos, Domingas dos 29, 2642, 3034, 3080, 3151, 3322

Santos, Faustino dos 3315

Santos, Gilman dos 242, 253, 255, 256, 257, 355, 357, 358

Santos, Gonsalo dos 3343

Santos, Guilherme dos 1199, 3079, 3080, 3084, 3086, 3135, 3137, 3323

Santos, Joanico dos 29

Santos, José Sales dos 407, 443, 1959

Santos Laku, Francisco dos 3317

Santos, Lamberto do 3344

Santos, Lucio dos 55, 61

Santos, Napoleão dos 3333

Santos, Pastor Rafael dos 1174, 3130, 3132, 3133

Santos, Rui Pereira dos 2158, 2273

Saparinah Sadli 22

SAPT 164, 212, 2453, 2454, 2459

SARET 314, 315, 318

Saridjo, A.B. 427, 428, 2013

Sardono, Kardinal Angelo 747

Sarmento, Antonio Doutel 403, 3348

Sarmento, Benjamin 3348

Sarmento, Evaristo Doutel 3071, 3074

Sarmento, Jaime 976, 990

Sarmento, Raimundo 2365, 2433

Sarmento, Vidal Doutel 3114, 3115, 3118, 3347

Sasaran Pembangunan Millenium PBB 2875

Satgas Intel 389, 393, 394, 410

Satilos 2824

Satuan Gabungan Intelijen. *Lihat* SGI

Savio, Afonso 1959

Scent Indonesia, PT 2459, 2461

Scott, Catherine 792

Scott, David 232, 342, 352, 353, 354, 667, 758, 780, 785, 2802

Scowcroft, Brent 721, 725

Scheiner, Charles 796

Scheffers, Victor 791

Scrine, Gil 793, 799

SCU. *Lihat* Kejahatan Berat, Unit

Seara 181

Seda, Frans 45

Segurança 2983

Seixas, Domingos 1991, 1996, 1998, 2002, 2004

Sejarah Timor-Leste dalam Indonesia Baru 44

Sekretaris Jenderal PBB 44, 159, 170, 232, 234, 282, 292, 303, 317, 322, 328, 330, 338, 367, 2864, 2892 *Lihat juga* PBB

Sekutu 160, 164

sel gelap 2540, 2551, 2571

Selandia Baru 209, 239, 256, 319, 331, 336, 2865, 2943, 3211

Sellout of East Timor, *The* 792

Semarang, Keuskupan 2407

Sembiring Meliala, Raja Kami 2689

Sensus Kuburan 43, 538

Sensus penduduk 535

Sentenca Arbitral 160,162

Sepang 2661

Sera 415, 2955, 2981, 3000, 3027, 3063, 3075, 3076, 3077, 3079, 3017

Sera Key 219, 252, 269, 456, 476, 947, 1000, 1011

Sera Malik 403, 918, 1262, 3077

Sera, Tim 2956, 3016, 3076, 3077

Seran, Americo 3331

Serious Crime Unit. *Lihat* Kejahatan Berat, Unit

Seroja, Asrama 3008, 3009

Seroja, Operasi 2293, 2294

Seroja, Panti Asuhan 2390, 2397, 2398, 2405, 2410, 2425, 2574

Seubelan, Saartje 2002

SGI 393, 394, 410, 416, 1930, 2154, 2161, 2165, 2176, 2243, 2247, 2955, 2956, 2982, 3016, 3017, 3019, 3072, 3073, 3080, 3082, 3091, 3098, 3110, 3136, 3138, 2955, 3016, 3072, 3080, 3082, 3098, 3109, 3117, 3127, 3160, 3164, 3160, 3170, 3171

Shackleton, Greg 885

Shackleton, Shirley 780

Sherman, Tom 885, 888

Siagian (Letnan Kolonel) 2999, 3084, 3138, 3151, 3170, 3173, 3174

Siagian, Burhanuddin 1167, 1177, 1199, 2998, 3079, 3080, 3082, 3086, 3135, 3137, 3138, 3151, 3152, 3170, 3171, 3079, 3319, 3322

Siauw Tiong Djin 806

Sibarani, Hotman 2668

Sibarani, Jongko 2666

Sidabutar, Salamat 2661

Sidang Umum PBB 2537, 2630, 2864, 2942. *Lihat juga* Majelis Umum PBB

Siga Mau, Silvano 3320

Sigar, Simon G 2661, 2670

Silaen, Timbul 2649, 2652, 2654, 2958, 3013, 3162, 3198, 3208, 3217, 3133, 3162, 3196, 3198, 3199, 3336

Silalahi, Harry Tjan. *Lihat* Tjan Silalahi, Harry

Silalahi, Sahala 396

Siliman 409

Siloko Nailoko 1040

Silva, Albino da 29

Silva, Ananias da 1013, 1018, 1019

Silva, Caitano da 3337

Silva, Celestino da 163, 876

Silva, Domingos da 403

Silva, Edmundo da Conceição 402, 3102, 3103, 3103, 3105, 3344

Silva, Estanislau da 499, 756

Silva, Filomeno da 509

Silva, Floriano da 3335, 3346

Silva, Gaspar da 3338

Silva, João da 2327

Silva, José Celestino da 2453

Silva, José da 459, 474, 511, 2606

Silva, Manuel da 3338

Silva, Mattius da 3121

Silva, Morais da 664

Silva, Paulo Freitas da 499

Silva, Romeo da 3322

Silva, Tomas Soares da 249, 357, 361

Silva, Venâncio Gomes da 1051

Silva, Zito da 3328

Silveira, Luis 1085

Simanjuntak, Halasan 2672

Simão, António L. 3353

Simbolon, Mahidin 2660, 2661, 2954, 2957, 2961, 3024, 3042, 3194, 3197, 2961, 2965, 3024, 3132, 3195

Simith, Virgilio 334, 369. *Lihat juga* Kranek

Sinaga 403, 428

Sinaga, H.M. 3119

Singapura 174, 175, 361, 367

Siqueira, José 873, 2617

Sirait, MK 2663, 2669

Siregar, LP 2007

Siri Lou 977, 990

Sishankamrata 380, 404

Siskamling 382, 2212

Sistem Keamanan Lingkungan. *Lihat* Siskamling

Sisters of St Joseph 800

Siswowiharjo, Tri Agus Susanto 809

Siti Hardiyanti Rukmana 2404

Sitompul, Ade Rostina 285, 294, 365, 805, 810, 2802

Sitorus, J.D. 396

Sjafrie Syamsudin 2675

Sjamsuddin, Sjafrie 2954, 3030, 3194, 3197, 3030, 3164, 3195

Sjamsul Rizal 2665

Sjarifuddin Zein 2663, 2666

Skadam 402

Skubiszewksi (Hakim) 300

Sky Hawk A-4 249, 1939, 1941

Skylight 483, 944

Slamet Kirbiantoro 2689

Smythe, Patrick 737, 749

Soares, José Fernando Osório 2603

Soares, Abilio 1179, 2640, 2646

Soares, Abilio José Osorio 307, 326, 418 – 420, 425,427, 2073, 2960, 3028, 3091, 3123, 3192, 3198, 3208, 3218, 3357

Soares, Agustinho 3315

Soares, António Pinto 3119

Soares, Armindo 3323

Soares, Arnold 3320

Soares, Aquiles Freitas 1005, 1007, 1009, 1010, 1011

Soares, Aquilis 244

Soares, Carlos 1070, 1139

Soares, Carlos Maria 228, 353

Soares, Constantino 3097, 3099

Soares, Daniel Sarmento 29

Soares, Domingos (Maubere) 55

Soares, Domingos 325, 419, 421, 893, 895, 1045, 1055, 1179, 3090, 3091, 3123

Soares, Domingos (Koli) Maria das Dores 2647

Soares, Fausto 763

Soares, Francisco 995, 1007, 1045, 1046, 1195, 1203, 3080, 3168, 3334

Soares, Guido 459, 460, 461, 922

Soares, Gustavão 3320

Soares, João Bosco 456

Soares , José Estevão 22, 23, 24, 25

Soares, José Fernando Osorio 172, 915, 916, 918

Soares, José Osorio 181

Soares, Laurentino 3124, 3154, 3177, 3178, 3351, 3352, 3354

Soares, Marcelino 3336

Soares, Marculino 3335, 3336

Soares, Mario 169, 170, 194, 287, 664, 668

Soares, Martinho 1014

Soares, Matias 3338

Soares, Miguel 3322

Soares, Natercia 2407

Soares, Ruben B. 3085

Soares, Salvador 3318, 3319

Soares, Virgilio 3315

Soares, (Madre) Zulmira Osorio 22

Sociedade Agrícola Pátria e Trabalho. *Lihat* SAPT

Soebandrio 176, 177, 342

Soedjarwo (Letnan Kolonel) 2953, 3090, 3091, 3010, 3041

Soedjatmoko, Galuh Wandita 23, 61

Soegijopranoto, Yayasan Sosial 2407

Soegito 2675, 2690

Soeharto 10, 13, 45, 159, 174 - 177, 179, 193 - 196, 199 - 201, 207, 222, 224, 225, 233, 234, 237 - 239, 252, 273, 274, 277, 286, 290, 298, 301, 303 - 305, 344, 347, 375, 379 – 384, 392, 411, 415, 424, 425, 427, 429, 658, 671 - 673, 675, 677 - 689, 691, 696, 700, 703, 705 - 712, 718, 720 - 722, 726, 732, 734, 736, 748, 749, 755, 768, 776, 782, 786, 790, 794, 795, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 810, 812, 816, 817, 818 , 943, 1113, 1133, 1137, 1149, 1928, 1935, 1991, 2011, 2036, 2081, 2091, 2311, 2397, 2398, 2399, 2400, 2426, 2542, 2575, 2576, 2580, 2627, 2629, 2937, 2938, 2942, 2943, 2944, 2945, 2950, 2951, 3001, 3018, 3047, 3076, 3203

Soekotjo Hadi 2661, 2663

Soemaryono (Brigadir Jenderal) 3061

Soenardjadi 1990

Soetarto, R. P. Damianus 2660

Soewardi 2660

Soeweno (Jenderal) 388, 2660, 2662, 2690

Soibada, Konferensi 1015

Sofian Effendi 2675, 2690

Solan 269

Solidamor 298, 351, 798, 806, 809

Soma, Uskup Aloisius 790

Sosialisasi, Satuan Tugas 3052

Sousa, Baptista de 3324

Sousa, Domingos F.J. 499

Sousa, Fernando da 1010, 1022, 3336

Sousa, Manuel 3335, 3346

Sousa, Pedro 3338

Spanyol 218, 319

Spínola 167, 168, 169, 193, 194

SPRIM 298, 806, 809

Sri Bintang Pamungkas 811

Sritex 2404

Stahl, Max 293, 364, 365, 796, 797

standar hak asasi manusia 82, 83, 96, 97, 102, 109, 134

Statuta Roma 2984, 3191, 3195

Stewart, Paul 780

Stokes, Alison 675

Suai, Gereja 312, 848, 2176, 2177, 2179, 2181, 2182, 2222, 2227, 2366, 2547, 2636, 2637, 2904, 2966, 2967, 2974, 2979, 2998, 2999, 3040, 3088, 3089, 3130, 3135, 3165

Suara Timor Timur 313, 1929, 2962, 3140

Suardana, Gede 2665

Subagyo Hadisiswoyo 2644

Subandi 2664

Subandrio 671

Subianto 2672, 2675

Subianto, Prabowo. *Lihat* Prabowo Subianto

subversi 1981, 1983, 1986, 1988, 2010, 2022, 2023, 2034, 2035, 2043, 2050, 2051, 2056, 2068, 2069, 2102

Sudharmono 722

Sudirman 378

Sudjono 2066, 2067, 2073, 2074, 2075, 2076, 2080, 2081, 2082

Sudrajat A. S 309, 420, 2664, 3021, 3022, 3043, 3044, 3102

Sufa, Anton Lelan 3352

Sufa, Augustinho 3178

Sugianto (Kolonel) 191

Sugianto, Aloysius 178, 344

Sugiono (Letnan Jenderal) 2953, 3197, 2964, 2965

Sugiarto 2670

Sugito 2662

Sulastiyo 2664

Sugito (Jenderal) 392

Suharto. *Lihat* Soeharto

Suhartono (Tono) Suratman 309, 313, 321, 326, 328, 367, 369, 417 - 420, 423, 444, 1148, 1179, 1248, 2636, 2639, 2640, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2652, 2654, 2656, 2662, 2952, 2954, 2985, 3013, 3020, 3023, 3026 - 3028, 3030, 3031, 3035 - 3038, 3040, 3043, 3048, 3049, 3039, 3044, 3058, 3091, 3108, 3115, 3143, 3144, 3192, 3194, 3195, 3197, 3202, 3205, 3206, 3357

suicido ideológico 475. *Lihat* juga bunuh diri ideologis

Sujarwo 2663

Sukarelawan 2152, 2160

sukarelawan, organisasi 3072

Sukarno 174, 177, 178, 378, 379, 380, 670, 671, 681, 682, 683, 712

Sukiman Kadir 2661

Sulastiyo 3114, 3115, 3116, 3115, 3116

Sumampow, J A 2678

Sumampouw, Robby 2454, 2456, 2461

Sumartono 2668

Sunarko 2675

Sunarko (Kolonel) 2955, 3038, 3116

Sunny, Arnold 29

Suntoro 2661

Supadi 2662, 2667

Supadi (Letnan Kolonel) 418, 420 3033, 3035, 3041, 3197

Supersemar, Yayasan 2398

Suprapto Tarman 2666, 3068, 3069, 3069

Suratman, Tono Suriah 239, 256

Survei Tingkat Kematian Retrospektif 43, 533, 538, 539, 851

Suryo Prabowo 396

Susenas 2480, 2509

Sutarto 390, 392

Sutrisno (Letnan) 1167, 1177, 1178, 1199

Stahl, Max 1110, 1113, 1114, 1119

Stewart, Tony 885

Suradal Muhajir 2668

Suriadiredja, Kahpi 2688

Suroto 2663

Survei Kematian Retrospektif 3261

Suryadi 2666

Suryo Prabowo 2662

Surwan 2955, 3017, 3027, 3047

Sutrisno 2998, 3079, 3080, 3082, 3085, 3086, 3135, 3137, 3138, 3151, 3152, 3170, 3173, 3174, 3318, 3319, 3322

Suwarno 2661

Suwondo 2666

Syafei, Theo. *Lihat* Theo Syafei

Syaful Anwar 2643, 2675, 3103, 3104, 3105, 3106, 3187, 3343, 3344

Syahnakri, Kiki 333, 395, 418, 419, 444, 1179, 1248, 2636, 2641, 2651, 2656, 2661, 2689, 3022, 3043

Syahrir M S 2660

Syarid A. R 2667

T

Tahu, Gabriel 3127

Takaqui, Florencio 3350, 3351

Talan, Eddie 3354

Talitakum 66

Tallo, Frans 3326

Tambunan, H 2661

Tamlicha Ali 2690

Tampubolon, Sakan 2667

Tanjung, Asril H. 1130

Tanjung, Feisal 416, 2650, 2654, 2688, 2954, 2964, 3006, 3008, 3013, 3025, 3031, 3194, 3198, 3006, 3023, 3162, 3195, 3198

Taolin, Luis 192

Tapol 781, 788, 806, 828

Taquai. *Lihat* Takaqui, Florencio

Tarsisius Dewanto, Pastor 1195, 1203

Tarub 2675, 2690

Tarsisius Dewanto, Pastor 3168

Tasion, Simao 3333

Tatang Zaenuddin 2955, 3124

Tato Mali, Marcos 1199

Tatoo Bau, Olivio 3327

Taur Matan Ruak 267, 333, 355, 357, 361, 362, 455, 473, 483, 486, 488, 490, 493, 494, 499, 502, 504, 510, 1000, 1958, 2319

Tavares, Agusto A 3317

Tavares, João da Silva 207, 325, 400, 1166, 1177, 1188, 1199, 1929, 2165, 2223

Tavares, Jorgé 1177,1199

Tavares, Lorenco 3339

Tavares, Ruben Pereira 3318, 3323, 3325

Tawanan Perang 122, 123

Taylor, John 781, 788, 790, 792

TBO 262 - 265, 309, 407, 408, 930, 942, 955, 972, 974, 990, 1003, 1051, 1052, 1056, 1074, 1080, 1151 - 1153, 1239, 1942 - 1949, 1954, 2139, 2145 - 2147, 2154, 2191, 2206, 2218, 2251, 2252, 2286 - 2288, 2291 - 2308, 2310, 2337, 2362, 2375, 2387, 2391, 2394, 2411, 2414, 2415, 2425, 2442, 2476, 2491, 2492, 2573, 2574, 2590, 2595, 2607

Teebuti, Domingos 3338

Teki. *Lihat* Lemos, Pedro

Teles, Pedro 3327

Televisi Timor-Leste. *Lihat* TVTL

Tenaga Bantuan Operasi 262, 309 *Lihat juga* TBO

Tetum 742, 746, 794, 800

Theo Syafei 401, 2013, 2060, 2660, 2662, 2670, 2690

Thoenes, Sander Robert 1204, 2975, 2982, 3096, 3104, 3119, 3183, 3186

Tiara, Yayasan 2404

Tilman, Abilio 1992, 2002, 2004

Tilman, Adolfo 1127

Tilman, Cesario 1168, 3314

Tilman, Fernando 1112

Tilman, Filomeno 3121

Tilman, Georgina 2367, 2979, 3102

Tilman, Mateus 3348

Tilman, Romerio 3349

Tilman, Saturnino 29

Tim Distrik 56, 58, 59, 61, 70

Tim Kemanusian Timor Barat 44, 2228

Tim Koordinasi Pusat Pendidikan dan Kebudayaan 431

Tim Pembina Desa 260

Timor Aid 800

Timor Barat 10, 18, 20, 26, 30, 34, 35, 37, 40, 44, 65, 66, 67, 69, 71, 2771, 2772, 2776, 2777, 2778, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2792, 2802, 2833, 2834, 2847, 2848

Timor Information Service 782, 784

Timor Kmanek, Radio 66

TimorNet 801

Tindakan Integrasi 233

tindakan rekonsiliasi 93, 2712, 2716, 2717, 2718, 2724, 2725, 2728, 2730, 2731, 2735, 2741, 2749, 2750, 2752, 2795

Tingangin, Hendrik 2669

Tionghoa 164

Titimau, Adriano Lopes 3313

Tito Leto Bere 3319

Tjan Silalahi, Harry 177, 178, 224, 664, 672, 673, 680, 681, 749

TKR 378

TKTB. *Lihat* Tim Kemanusiaan Timor Barat

TNI 375, 377, 378, 379, 380, 382, 383, 398, 401, 406, 415 - 424, 440, 441, 443, 2527, 2540, 2547, 2558, 2572, 2577, 2586, 2587, 2595, 2596, 2599, 2621 - 2624, 2632, 2635 - 2657, 2693, 2703, 2758, 2945, 2947 - 2954, 2956, 2958, 2959, 2961 - 2963, 2965, 2966, 2967, 2968, 2970 - 2977, 2980 - 2996, 2998, 3002 - 3006, 3008 - 3014, 3016, 3018, 3020 - 3024, 3026 - 3049, 3052, 3058 - 3080, 3082 - 3085, 3089 - 3093, 3095 - 3098, 3100 - 3103, 2964, 2965, 2968, 2986, 2991, 2994, 2995, 2999, 3010, 3023, 3026, 3035, 3037, 3039, 3041, 3044, 3046, 3072, 3080, 3082, 3087, 3093, 3119, 3132, 3134, 3136, 3139 - 3143, 3157, 3160, 3162, 3164, 3167, 3171, 3173, 3183, 3184, 3185, 3198, 3199, 3202 - 3204, 3208, 3218, 3105 - 3140, 3143 - 3148, 3151, 3152, 3156 - 3177, 3179 - 3182, 3184, 3186, 3187, 3189, 3190, 3192, 3194 , 3209, 3211 - 3213, 3217, 3218, 3220

Todd, Helen 1110, 1111

Tomé Diogo 3109, 3110, 3112, 3133, 3134, 3335, 3346

Tono Suratman. *Lihat* Suhartono Suratman

Tonsus 2538

Tony Suhartono 2666

Trabalhista 2532, 2599, 2600, 2621, 2622, 2901

Tribuana, Satgas 2954, 2955, 2985, 3024, 3033, 3037, 3046, 3052, 3109, 3111, 3116, 3131, 3132, 3194, 2954

Tribuana VIII, Satgas 2954, 2955, 3024, 3132, 2954

Tropical, Hotel 3023

Trust Fund for East Timor. *Lihat* Dana Amanah untuk Timor-Leste

Try Sutrisno 2660, 2691

Tyasno Sudarto 2691

Todung Mulya Lubis. *Lihat* Lubis, Todung Mulya

Toisutta, George 2661

Tomodok, Elias 172

Tommy Soeharto 2473

Tono Suratman. *Lihat* Suratman, Tono

Tonsus 402, 851, 933, 945, 950, 951, 953, 967, 974, 1033, 1230, 1243, 1257

Topasses 160, 161

Tossy Santoso 806

Tornquist, Ollie 788

TPPP 431

Trabalhista 10, 23, 82, 172, 205, 206, 207, 221, 222, 229, 751, 1904

Traube, Elizabeth 793

Travert, M. 704TRI 378

Tri Agus Susanto Siswowiharjo. *Lihat* Siswowiharjo, Tri Agus Susanto

tripartit, pembicaraan 288, 300

Tripika 381

Trisula , LBH 20022089

Trumpington of Sandwich, Baroness 714,715,799

Try Sutrisno 295, 2065

Tubir Loke Dalan. *Lihat* Alves, Paulo

Tuli, Lazarus 3353

Tunas Kalimantan, Yayasan 2408

Turismo, Hotel 228, 290

Turner, Michele 809

TVTL 66

Txay 267, 269, 484,1011

Tyasno Sudarto 2953, 3061, 3197

U

Udayana, Kodam IX 333

Udin Syukur 1107, 1126, 1138

UDT 10, 14, 19, 23, 82, 89, 115, 116, 170 - 172, 180 - 187, 190, 191, 192, 196, 198, 200, 201 -, 211, 213, 215, 221 - 224, 229, 231, 233 - 235, 266, 271, 274, 275, 325, 343, 346, 348, 350, 353, 354, 362, 397, 399, 400, 403, 421, 424, 426, 427, 433, 438, 451, 458, 470, 492, 494, 495, 497, 498, 507, 664, 666, 667, 673, 674, 685, 736, 739, 751 - 753, 755 - 757, 759, 763 - 771, 774, 775, 778, 783, 784, 830, 855 - 858, 860 - 884, 886, 892, 912, 914, 915, 918, 920, 922, 934, 989, 1005 - 1009, 1015, 1232 - 1237, 1904, 1920, 1923, 1941, 1957, 1966, 2031, 2069, 2121 - 2123, 2131, 2132, 2187, 2223, 2230, 2263, 2295, 2330, 2331, 2339, 2340, 2354, 2355, 2356, 2359, 2368, 2369, 2374, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2470, 2476, 2503, 2522, 2528, 2530, 2531, 2533, 2534, 2536, 2538, 2539, 2541, 2549, 2555, 2596, 2598, 2600, 2601, 2602, 2603, 2605, 2610, 2612 - 2621, 2626, 2636, 2647, 2893, 2901, 2938

Ular Rheik 2325, 2334, 2348. *Lihat juga* Anjos, Virgilio dos

Ulan, Andre 3124, 3177, 3351

Uma Lima 2146, 2232

Uma Merah 954

Uma Metan 2467, 2469

UNAMET 159, 316 - 332, 335 - 340, 416, 421, 422, 424, 697, 729, 775, 812, 1164, 1165, 1168, 1169 - 1171, 1187, 1188, 1189, 1191 - 1194, 1198, 1201, 1209, 1225, 1249, 1928, 1930, 2173, 2642, 2646 - , 2647, 2648, 2649, 2652, 2654, 2655, 2693, 2694, 2798, 2802, 2812, 2813, 2937, 2947 - 2950, 2953, 2964, 2969, 2971 - 2976, 2978, 2980, 2983, 2984, 2986 - 2989, 2991 – 2995, 2997, 2998, 3001, 3005, 3006, 3009, 3011, 3012, 3028, 3029, 3034, 3038 - 3041, 3044, 3049, 3070, 3073, 3074, 3076 - 3081, 3083 - 3085, 3087, 3088, 3091, 3092, 3093, 3095, 3097, 3099 - 3118, 3124, 2963, 2987, 2991 - 2993, 2995, 2996, 3004, 3005, 3009, 3026, 3028, 3208, 3046, 3080, 3084, 3086, 3087, 3092 - 3094, 3097, 3114, 3118, 3126, 3127, 3128, 3149, 3152, 3157, 3158, 3159, 3160, 3171, 3172, 3174, 3179, 3200, 3202, 3203, 3205, 3208, 3209, 3125, 3126, 3127, 3128, 3149 - 3180, 3202, 3208, 3211, 3213

UNCAC 2885

UN Convention against Corruption. Lihat UNCAC

Undang-Undang 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan-kegiatan Subversif 134

Undang-undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak 2373

Undang-Undang No. 7/75 183,198

Undang-Undang No. 7/76 133, 314, 424, 2407, 2940

Undang-undang Anti-Subversi 1984, 2023, 2034, 2051, 2057

Undang-Undang Dasar 2028, 2034, 2040, 2056

Undang-Undang Dasar 1945 97, 670, 672

Undang-Undang Dasar 1950 378

Undang-Undang Integrasi 238

Undang-Undang Kolonial 164, 662

Undang-Undang Pertahanan 1982 380

UNDHR 2595

UNEP 2875

Unetim 871, 875, 896, 900, 948, 2369

UNHCR 18, 22, 30, 48, 67, 341, 2386, 2388, 2405, 2406, 2408, 2409, 2709, 2762, 2778, 2853, 2906

UNICEF 2311, 2312, 2313, 2314, 2316, 2317, 2318, 2325, 2329, 2332, 2334, 2335, 2336, 2338, 2431, 2478, 2482

Uni Eropa 287, 299, 319, 337, 854, 1147, 2365

Uni Soviet 179, 196, 218

União Democrática Timorense. *Lihat* UDT

Unidade Nacional. *Lihat* Politik Persatuan Nasional

UNIF 319, 325, 2962, 2963

Unit Kejahatan Berat. *Lihat* Kejahatan Berat, Unit

United Front for East Timor Autonomy. *Lihat* UNIF

United Nations Mission of Support in East Timor. *Lihat* UNMISET

Universitas Timor-Timur 285, 297, 505

UNMISET 34, 43, 67, 415, 2632, 3311

UNTAET 7, 8, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 43, 51, 57, 59, 67, 68, 73, 79, 81, 83, 86, 115, 131, 331, 334, 341, 370, 415, 669, 699, 745, 765, 885, 1142, 1203, 1278, 1280, 2523, 2524, 2632, 2703, 2704, 2709, 2762, 2996, 3006, 3029, 3039, 3041, 3046, 3068, 3071, 3072, 3072, 2967, 2987, 2991, 2992, 2995, 3108, 3112, 3119, 3132, 3147, 3191, 3195, 3201, 3204, 3220, 3075, 3079, 3082, 3084, 3086, 3090, 3093, 3094, 3097, 3103, 3107, 3109, 3110, 3112, 3113, 3114, 3119, 3120, 3123, 3126, 3130, 3132, 3134, 3135, 3139, 3142, 3147, 3149, 3152, 3158, 3159, 3172, 3173, 3175, 3176, 3179, 3183, 3184, 3185, 3195, 3201, 3220, 3311

Untung Setiawan 2669

Uppsala, Universitas 8

Uren, Tom 779

USAID 3012

Uskup Belo. *Lihat* Belo, Uskup Carlos Felipe Ximenes

V

Valentim, Justino 29

Vasco de Gama. *Lihat* Criado

Vasconselos, Agustinho de 23, 24, 26, 64

Vasconcelos, José Maria de. *Lihat* Taur Matan Ruak

Vatikan 272, 273, 278, 281, 286, 287, 2864, 2865

Vaz, Samuel 3355

Vendrell, Francesc 287, 288, 293, 300, 302, 303, 337, 343, 354, 364, 366, 367, 677, 694, 695, 696, 760, 787, 793, 2802

Vicente, José 1013, 1019, 1085

Vieira, Claudio 433, 445

Villot, Jean-Marie Cardinal 740

Viqueque 29

pemberontakan 162, 180, 182

Vox Populi 324

W

Waddingham, John 534, 645, 659, 784

Wahid, Abdurrahman 680, 699, 807, 811, 812

Wahyu Hidayat 1137

Waldheim, Kurt 693, 759, 762

Walsh, Pat 22, 250, 255, 256, 257, 357, 358, 741, 784, 805, 811, 2802

Wanandi, Jusuf 45, 178, 179, 224, 225, 343, 344, 352, 376, 440, 736, 749

Wankai, Nyongky 3354

Wanra 262, 265, 281, 309, 381, 396, 404, 405, 407, 409, 415, 443, 1948, 2160, 2235, 2245, 2538, 2638, 2641, 2644, 2648

Wanra 2298, 2307, 2308, 2985, 3016, 3018, 3027, 3028, 3042, 3048, 3098

Warrouw, Laporan I 1107, 1121, 1122, 1131, 1143

Warrouw, Laporan II 1107, 1118, 1131

Warrouw, Rudolf Samuel 392, 393, 1121, 1135,1137, 2661, 2662

Warsito (Jenderal) 392, 2662

Watu Besi Raya, PT 2459

Weeramantry (Hakim) 300

Wensley, Penny 689

Wehale 162

Whitlam, Gough 176, 179, 195, 196, 197, 224, 265, 363,658, 667, 681, 683, 685, 686, 687700, 707, 743, 761, 2627

Wiranto 2635, 2641, 2647, 2649, 2652, 2654, 2655, 2691, 2726

Wismoyo 2660, 2675

WHO 2480, 2488

wilayah bebas. *Lihat* zona libertadas

wilayah tanpa pemerintahan sendiri 11, 95, 98, 165, 2942

Willessee, Don 197, 684

Wilson, Joanna 799

Wilson, Woodrow 716

Wira Dharma 1991

Wira Husada, Rumah Sakit 294, 1111, 1112, 1113

Wiranto 304, 305, 309, 312, 314, 315, 316, 320, 322, 327, 333, 337, 395, 416, 420, 441, 444, 2952, 2953, 2959, 2961, 2963, 2964, 2965, 2988, 2990, 3004, 3008, 3010, 3021, 3023, 3024, 3025, 3027, 3028, 3031, 3041, 3043, 3047, 3061, 3162, 3195, 3196, 3197, 3199, 3050, 3061, 3132, 3162, 3193, 3198, 3200, 3199, 3202, 3203, 3204, 3208, 3220, 3356, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3208, 3213, 3218, 3220

Wolfensohn, James 337

Woolcott, Richard 45, 197, 199, 201, 347, 672, 685 – 687, 708

World Vision 26, 788

X

Xavier, Vicente 1148

Ximenes, Abel José 2086, 2089

Ximenes, Aleixo 29

Ximenes, Américo. *Lihat* Sabica Besi Kulit

Ximenes, António 3337

Ximenes, Caetano 1996

Ximenes, Cristiano 3315

Ximenes, David Dias 499, 510, 511, 1041, 1052, 1987, 1989, 1991, 1997, 1998, 2003, 2006, 2084

Ximenes, Eduardo 956

Ximenes, Laurinda Guterres Barreto 900, 901

Ximenes, Mario da Costa 1035

Y

Yacob Dasto 2691

Yakin 2401, 2402

Yakraman Yagus 2669

Yayat Sudrajat 416, 417, 418, 420, 444, 2639, 2652, 2675, 2954, 2955, 3020, 3038, 3043, 3049, 3109, 3111, 3132, 3192, 3194, 3195, 3197, 3202, 2954, 3195, 3357

Yeni Rosa Damayanti 802, 806, 807, 808, 812, 2802

Yesuit 166

YLBHI 2020, 2021, 2022, 2044, 2046, 2055, 2065, 2066, 2081, 2112

Yoga Sugama 673, 721, 2580

Yohanes Alexander Penpada 1139

Yohanes Leodesi 3319

Yonif (*nomor berhuruf miring dan bercetak tebal mengacu kepada kesatuan Yonif*)

- ***131*** 1084
- ***303*** 1124, 1126, 1127, 1128, 1129, 1138, 1139, 1140
- ***321*** 1056
- ***328*** 1070
- ***501*** 1070
- ***511*** 1074
- ***641*** 2145, 2242
- ***726*** 2139, 2160
- ***732*** 2138
- ***742*** 1074
- ***744*** 1056, 1065, 1121, 1127, 1128, 1129

745 1056, 1059, 1066, 1070, 1082

Linud 2138, 2191

Yoseph Leki 3326

Yoss Wibisono 806

Yudhoyono, Susilo Bambang 2669, 2953

Yudomo Sastrosuhardjo 2660

Yunus Yosfiah 193, 207, 401, 416, 678, 2660, 2661, 2669, 2675, 2691, 2945, 2954, 3025, 3058, 3194, 3198, 3195

Yusup 2665

Yusuf Tandi 3127, 3355

Yustin Dino 1107, 1109, 1140

Z

Zacharias Alves 3110, 3112, 3346

Zegwaard, Gerry 805

Zelter, Angie 799

Zipur 2545, 2572

Zito Saek. *Lihat* Zito da Silva

zonas libertadas 237, 242, 266, 452, 453, 455, 458, 459, 461, 473, 475, 479, 482, 484, 485, 487, 488, 489, 490, 491, 499, 504, 506, 1914, 1937, 1960, 2319, 2471, 2604